MANAJEMEN PENDIDIKAN
PERSPEKTIF DAN PRAKTIK KEBIJAKAN DI SEKOLAH DASAR

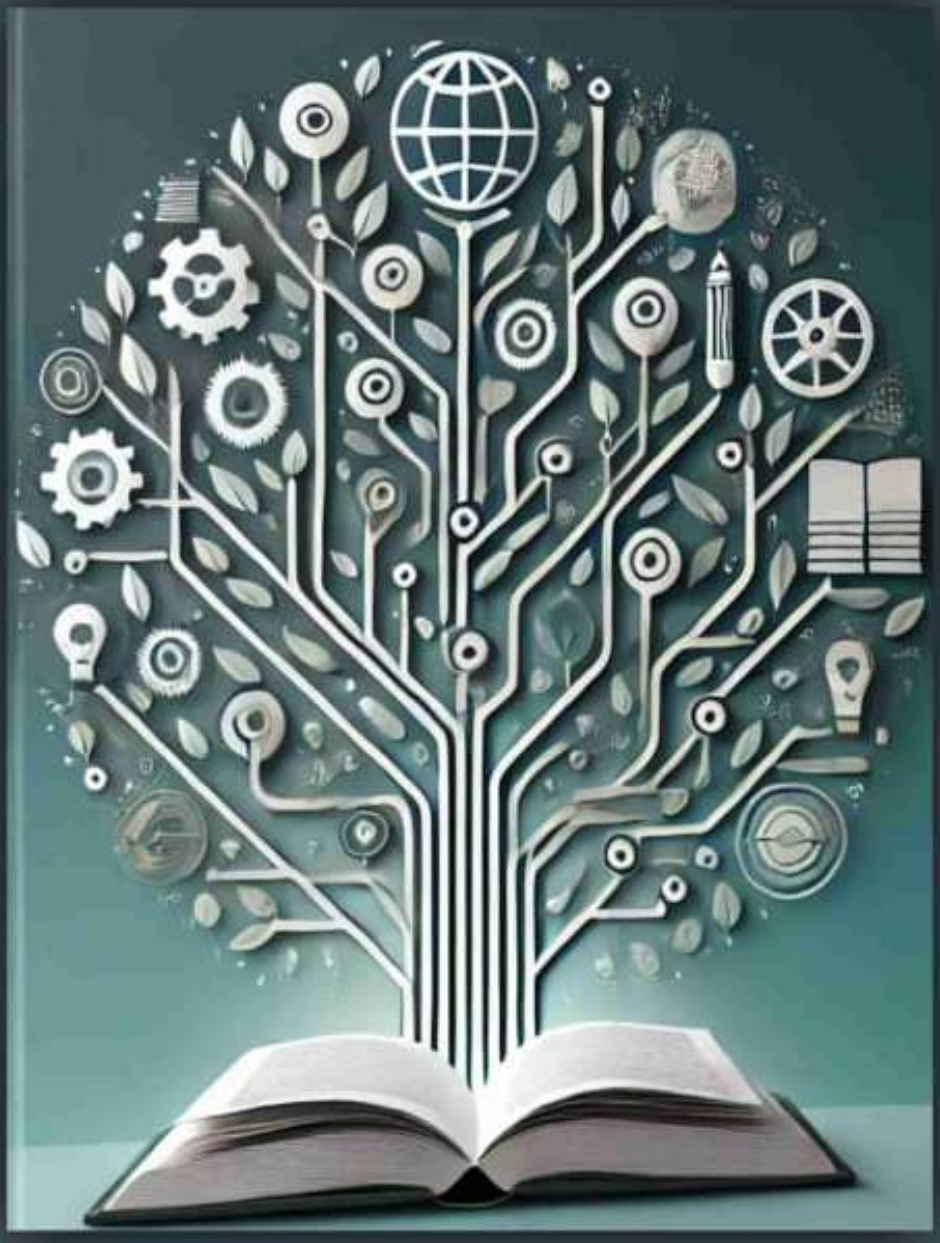

ENDI ROCHAENDI
AKHSANUL FUADI
AHMAD SYAMSUL ARIFIN

ITERA PRESS

MANAJEMEN PENDIDIKAN

PERSPEKTIF DAN PRAKTIK KEBIJAKAN
DI SEKOLAH DASAR

ITERA PRESS

MANAJEMEN PENDIDIKAN

PERSPEKTIF DAN PRAKTIK KEBIJAKAN DI SEKOLAH DASAR

Endi Rochaendi
Akhsanul Fuadi
Ahmad Syamsul Arifin

Institut Teknologi Sumatera (ITERA)
Jl. Terusan Ryacudu, Way Hui Kec. Jati Agung
Lampung Selatan 35365
Email: press@itera.ac.id

MANAJEMEN PENDIDIKAN
PERSPEKTIF DAN PRAKTIK KEBIJAKAN DI SEKOLAH DASAR

Penulis
Endi Rochaendi
Akhsanul Fuadi
Ahmad Syamsul Arifin

ISBN
978-634-7013-32-3
480 Hal: 15,5 x 23 cm
Terbitan Pertama, Desember 2024

Editor:
Endi Rochaendi

Desain Sampul dan Tata Letak
Adhitama Ginongpratidina Noorrachman
Kharizmma Phratamma Noorfathwa

Penerbit
ITERA Press
Anggota IKAPI

Redaksi
Gedung Kuliah Umum (GKU) Lantai 1
Institut Teknologi Sumatera (ITERA)
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan 35365
Telp/WhatsApp+6285768378398
Email: press@itera.ac.id

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari penulis dan/penerbit.

PRAKATA

Dengan penuh rasa syukur, kami persembahkan buku *Manajemen Pendidikan: Perspektif dan Praktik Kebijakan di Sekolah Dasar* yang telah berhasil disusun, dipublikasikan, dan kini dapat dinikmati oleh para pembaca. Penyusunan buku ini didasarkan pada empat dimensi fundamental dalam kerangka manajemen pendidikan yang menjadi landasan utama. Pertama adalah dimensi struktur (*structural frame*), yang menguraikan tentang penetapan tujuan, serta proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam manajemen pendidikan. Kedua, dimensi sumber daya (*resource frame*), yang menekankan pada pentingnya sinergi antara sumber daya manusia dan material dalam proses kerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan. Ketiga, dimensi politik (*political frame*), yang membahas strategi dan cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan terakhir, dimensi budaya kinerja (*organizational culture*), yang mencakup tindakan-tindakan efektif dan efisien dalam mewujudkan pencapaian tujuan secara optimal.

Buku *Manajemen Pendidikan: Perspektif dan Kebijakan Praktik di Sekolah Dasar* ini dirancang untuk menjadi sebuah panduan komprehensif yang tidak hanya menguraikan teori dasar manajemen pendidikan tetapi juga mengeksplorasi berbagai aspek dan dimensi yang terkait dengan pengelolaan pendidikan di Indonesia. Dalam menyusun buku ini, penulis berusaha memberikan pembahasan yang mendalam mengenai kebijakan desentralisasi pendidikan dan sistem pendidikan nasional. Di dalamnya, dibahas bagaimana kebijakan desentralisasi telah membentuk struktur dan dinamika pengelolaan pendidikan, serta dampaknya terhadap aksesibilitas dan kualitas pendidikan di berbagai daerah. Pembahasan ini mencakup sejarah dan evolusi kebijakan pendidikan di Indonesia, serta analisis kritis terhadap

keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan tersebut di lapangan.

Lebih lanjut, buku ini juga mengeksplorasi konsep dan hakikat dasar manajemen pendidikan dari berbagai perspektif, memberikan penekanan khusus pada bagaimana manajemen pendidikan tidak hanya dilihat sebagai administrasi ketatausahaan tetapi juga sebagai suatu pendekatan strategis yang holistik. Di sini, pembaca akan diperkenalkan pada berbagai teori dan konsep fundamental yang membentuk dasar dari manajemen pendidikan, seperti definisi, tujuan, manfaat, serta peranan dan fungsi manajemen dalam konteks pendidikan. Diskusi ini mengarah pada pemahaman yang lebih luas mengenai bagaimana manajemen yang efektif dapat mendukung proses pembelajaran yang lebih baik dan berkelanjutan.

Pendekatan dan model manajemen pendidikan juga menjadi fokus utama dalam buku ini, di mana berbagai model yang telah diterapkan di berbagai konteks pendidikan di Indonesia dianalisis secara mendalam. Model seperti manajemen berbasis sekolah, manajemen partisipatif, dan manajemen kinerja dibahas dengan menyajikan landasan teoritis, aplikasi praktis, serta evaluasi kritis terhadap kelebihan dan kekurangan masing-masing model. Diskusi ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada pembaca tentang pilihan-pilihan model manajemen yang dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing sekolah.

Selain itu, buku ini juga mengupas tuntas proses manajemen pendidikan yang melibatkan berbagai tahapan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pemberian arahan, pengkoordinasian, hingga pengendalian dan inovasi. Setiap tahapan dalam proses manajemen ini dibahas dengan detail, menekankan pentingnya pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan dalam menjalankan manajemen pendidikan. Dalam bagian ini, pembaca akan diajak untuk

memahami bagaimana perencanaan yang baik dapat menjadi fondasi bagi pelaksanaan yang efektif, serta bagaimana inovasi dalam manajemen dapat mendorong peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Buku ini juga memberikan perhatian khusus pada kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di tingkat nasional dan lokal. Di sini, dijelaskan bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Diskusi ini mencakup analisis terhadap kebijakan pendanaan, akuntabilitas, serta peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan. Melalui pembahasan ini, diharapkan pembaca dapat memahami dinamika pengelolaan pendidikan dari sudut pandang kebijakan dan bagaimana kebijakan ini mempengaruhi praktik pendidikan di lapangan.

Selain kebijakan, buku ini juga menyoroti pentingnya standar nasional pendidikan dan standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh setiap lembaga pendidikan. Standar ini dijelaskan sebagai acuan utama dalam menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan di seluruh Indonesia. Dalam pembahasan ini, dijelaskan pula tantangan-tantangan yang dihadapi oleh sekolah-sekolah dalam mencapai standar tersebut, serta strategi yang dapat digunakan untuk mengatasinya.

Kepemimpinan dalam pendidikan juga menjadi topik yang sangat penting dalam buku ini. Pembaca diajak untuk memahami peran kepemimpinan dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan produktif. Diskusi ini mencakup berbagai gaya kepemimpinan yang efektif dalam konteks pendidikan, serta bagaimana pemimpin pendidikan dapat menginspirasi dan memotivasi tenaga pendidik dan peserta didik untuk mencapai hasil yang optimal. Di sini, juga dibahas tantangan yang dihadapi oleh pemimpin

pendidikan dalam era globalisasi yang serba cepat dan bagaimana mereka dapat menghadapinya dengan bijaksana.

Pengawasan dan supervisi pendidikan juga dibahas dengan mendalam, menekankan pentingnya fungsi ini dalam memastikan bahwa semua proses pendidikan berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Diskusi ini mencakup teknik-teknik supervisi yang efektif, peran pengawas dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan, serta bagaimana supervisi dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong inovasi dan perbaikan berkelanjutan dalam pendidikan.

Di bagian akhir, buku ini juga membahas tentang manajemen mutu dan sistem informasi manajemen dalam pendidikan. Manajemen mutu dijelaskan sebagai pendekatan sistematis untuk memastikan bahwa setiap aspek pendidikan memenuhi standar kualitas yang diinginkan. Sementara itu, sistem informasi manajemen dijelaskan sebagai alat penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data dan informasi yang akurat. Dalam konteks ini, dibahas pula tantangan dalam mengimplementasikan sistem informasi yang efektif di sekolah-sekolah, serta solusi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan penggunaannya.

Dengan kajian yang luas dan mendalam ini, buku *Manajemen Pendidikan* diharapkan dapat menjadi referensi utama bagi mahasiswa, guru, dan tenaga kependidikan dalam memahami dan mengimplementasikan manajemen pendidikan yang efektif. Buku ini tidak hanya menyajikan teori dan konsep, tetapi juga mengajak pembaca untuk berpikir kritis, menganalisis secara logis, dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam konteks praktis di lapangan. Harapannya, buku ini dapat terus dikembangkan dan disempurnakan melalui masukan-masukan konstruktif dari para pembaca, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi kemajuan pendidikan di Indonesia.

Yogyakarta, Desember 2024

DAFTAR ISI

		Hal
Prakata		i
Daftar Isi		v
Bab I	Pendahuluan	1
Bab II	Desentralisasi Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Nasional	11
Bab III	Perspektif dan Teori Manajemen Pendidikan	27
Bab IV	Konsep dan Hakekat Dasar Manajemen Pendidikan	45
Bab V	Pendekatan, Model, dan Proses Manajemen Pendidikan	77
Bab VI	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan	123
Bab VII	Kebijakan Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Tata Kerja Pada satuan Pendidikan Sekolah Dasar	189
Bab VIII	Standar Nasional Pendidikan dan Standar Pelayanan Minimal	203
Bab IX	Manajemen Berbasis Sekolah	243
Bab X	Kepemimpinan Pendidikan	269
Bab XI	Pengawasan dan Supervisi Pendidikan	329
Bab XII	Manajemen dan Penjaminan Mutu Pendidikan	391
Bab XIII	Praktik Baik Manajemen Pendidikan dalam Administrasi Ketatausahaan di Sekolah Dasar	437

Bab XIV	Manajemen Pendidikan dan Penciptaan Profil Pelajar Pancasila dan Pemberdayaan Kurikulum Merdeka	469
Bab XV	Penutup	483
Glosarium		491
Indeks		503
Daftar Pustaka		507
Riwayat Hidup Penulis		537

BAB I
PENDAHULUAN

Konsep manajemen pendidikan telah menjadi subjek kajian yang mendalam oleh banyak ahli dalam bidang manajemen dan pendidikan. Meskipun terdapat berbagai perbedaan dalam cara pandang dan pendekatan analisis yang digunakan oleh para ahli ini, esensi dari konsep manajemen pendidikan tetaplah konsisten dalam memberikan pemahaman yang serupa. Pada dasarnya, manajemen pendidikan dipandang sebagai proses yang melibatkan kerjasama dan interaksi yang bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam literatur, manajemen pendidikan sering digambarkan sebagai usaha untuk memanfaatkan sumber daya secara efektif dan membangun hubungan yang harmonis di antara berbagai komponen manajemen, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengarahan, penggerakan, pengkoordinasian, dan pengawasan.

Manajemen pendidikan, dalam konteks yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada pengaturan administrasi dan ketatausahaan, tetapi juga mencakup seluruh proses pengalokasian sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Dalam pandangan ini, manajemen pendidikan adalah integrasi dari berbagai sumber daya—baik manusia maupun material—yang dilakukan secara sinergis melalui interaksi yang kooperatif. Tujuan akhir dari manajemen pendidikan adalah untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat, dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang diinginkan.

Lebih jauh lagi, manajemen pendidikan tidak hanya sekadar serangkaian kegiatan kerjasama yang berlangsung terus-menerus, tetapi juga mencakup aspek tugas dan kelembagaan. Dalam aspek

tugas, manajemen pendidikan melibatkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan jalannya pendidikan. Sementara itu, aspek kelembagaan mencakup institusi-institusi seperti sekolah, dinas pendidikan di berbagai tingkatan pemerintahan, serta Kementerian Pendidikan. Institusi-institusi ini berperan penting dalam menetapkan kebijakan pendidikan, mengarahkan implementasi kebijakan tersebut, serta memastikan bahwa tujuan pendidikan nasional dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Pandangan ini didukung oleh Okumbe, yang dikutip dalam Kimani (2013), yang menyatakan bahwa manajemen pendidikan adalah "proses perolehan dan pengalokasian sumber daya untuk pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditentukan." Harris dan Liba (1960) juga menekankan bahwa manajemen pendidikan merupakan "proses integrasi upaya personal dan pemanfaatan material yang tepat guna mempromosikan perkembangan kualitas manusia secara efektif." Konsep-konsep ini menegaskan pentingnya manajemen pendidikan dalam menciptakan kondisi yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan melalui pengelolaan yang tepat dan efektif.

Empat dimensi utama yang membentuk dasar manajemen pendidikan menjadi fokus penting dalam buku ini. Pertama adalah kerangka struktur (*structural frame*), yang mencakup penetapan tujuan dan proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan. Dimensi ini menekankan pentingnya memiliki struktur yang jelas dan terencana dalam manajemen pendidikan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan cara yang sistematis dan terukur. Kedua, dimensi sumber daya (*resource frame*) menyoroti pentingnya keterlibatan sumber daya manusia dan material dalam proses kerjasama yang sinergis untuk mencapai tujuan pendidikan. Sumber daya ini harus dikelola

secara optimal untuk memastikan bahwa mereka dapat mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara maksimal.

Dimensi ketiga adalah dimensi politik (*political frame*), yang berfokus pada strategi dan cara-cara pelaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Ini mencakup pengambilan keputusan strategis, negosiasi, dan manuver politik yang diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan pendidikan. Dimensi politik ini juga mencakup interaksi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan institusi pendidikan, yang semuanya memainkan peran penting dalam menentukan arah kebijakan pendidikan.

Dimensi keempat adalah budaya kinerja (*organizational culture*), yang mencakup tindakan-tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Budaya kinerja ini mencakup nilai-nilai, norma, dan praktik-praktik yang diterapkan dalam lingkungan pendidikan untuk mendorong kinerja yang optimal dari semua pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, manajemen pendidikan berfungsi sebagai mekanisme untuk membimbing, memimpin, dan mengendalikan upaya-upaya yang dilakukan oleh sumber daya manusia dan material dalam mencapai tujuan pendidikan.

Sejalan dengan pandangan Amadi (2008), manajemen pendidikan mencakup penggunaan sumber daya yang memadai dan harmonisasi hubungan serta interaksi dalam lingkungan yang kondusif untuk mendorong pencapaian tujuan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek teknis dari pengelolaan sumber daya, tetapi juga pada aspek sosial yang melibatkan hubungan dan interaksi di antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses pendidikan.

Manajemen pendidikan juga harus dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan program dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Dalam konteks ini, manajemen pendidikan berfungsi sebagai proses yang mengintegrasikan hubungan antara berbagai komponen pendidikan untuk memperbaiki sistem pendidikan secara keseluruhan. Pengelolaan pendidikan mencakup pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh berbagai tingkatan pemerintahan, serta oleh penyelenggara pendidikan yang didirikan oleh masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan, di sisi lain, adalah kegiatan pelaksanaan komponen-komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan tertentu untuk memastikan bahwa proses pendidikan dapat berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Perspektif ini mencerminkan pandangan bahwa manajemen pendidikan adalah sebuah proses yang dinamis dan berkelanjutan, yang bertujuan untuk mewujudkan sinergi antara pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang menghasilkan kebermaknaan bagi seluruh pemangku kepentingan. Pandangan ini selaras dengan pendapat Kythreotis (2007), yang menyatakan bahwa kepemimpinan dan manajemen pendidikan harus berfokus pada tujuan pendidikan. Tanpa keterkaitan yang jelas antara tujuan dan manajemen, terdapat risiko bahwa manajemen akan menjadi sekadar prosedural, mengabaikan esensi dan nilai-nilai pendidikan yang seharusnya menjadi dasar dari setiap tindakan manajerial.

Dalam praktiknya, manajemen pendidikan juga harus mampu beradaptasi dengan kebijakan publik yang ada, serta bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, rencana, dan program yang telah ditetapkan. Kebijakan pendidikan, sebagai instrumen untuk mengatasi berbagai masalah yang mungkin muncul, berfungsi sebagai pedoman dasar dalam menentukan arah dan tujuan pengelolaan serta penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, manajemen pendidikan

harus mampu mengintegrasikan kebijakan publik ke dalam praktik pendidikan sehari-hari dengan cara yang akuntabel, konsisten, dan konsekuen.

Cloete (1997) menjelaskan bahwa administrasi publik mencakup fungsi-fungsi yang dapat diklasifikasikan sebagai fungsi administratif, fungsional, dan penunjang. Fungsi administratif, yang meliputi pembuatan kebijakan, pembiayaan, pengorganisasian, kepegawaian, penentuan prosedur kerja, dan kontrol, adalah aspek penting dari manajemen pendidikan. Dalam konteks ini, manajemen pendidikan harus mampu mengelola fungsi-fungsi ini dengan cara yang mendukung pencapaian tujuan pendidikan.

Manajemen pendidikan juga dapat dilihat sebagai proses sosial yang melibatkan identifikasi, pemeliharaan, motivasi, pengendalian, dan penyatuan sumber daya manusia dan material dalam hubungan yang integral melalui kerjasama yang dirancang khusus untuk mencapai tujuan pendidikan. Ayanniyi, dalam Amadi (2008), menggambarkan administrasi pendidikan sebagai "pengelolaan lembaga pendidikan yang melibatkan bimbingan, kepemimpinan, dan pengendalian upaya individu dalam mencapai tujuan lembaga." Pemahaman ini menunjukkan bahwa manajemen pendidikan harus mampu membangun hubungan yang komprehensif di antara sumber daya manusia untuk mencapai kepuasan bersama, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan pendidikan, dan memastikan bahwa ada kerjasama serta kepemimpinan yang kohesif dalam setiap aktivitas yang dilakukan.

Dalam tataran empiris, keterkaitan manajemen pendidikan dengan kebijakan publik dapat dilihat melalui berbagai aspek yang mencakup kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, sumber daya material, anggaran finansial, serta hubungan antara sekolah dan masyarakat. Kurikulum, sebagai inti dari manajemen pendidikan, menjadi indikator utama keberhasilan dalam pengelolaan

dan penyelenggaraan pendidikan. Pengembangan kurikulum harus mencerminkan aspirasi masyarakat dan kebutuhan daerah, serta memastikan bahwa nilai-nilai dan norma-norma positif dapat ditanamkan kepada peserta didik.

Pendidik dan tenaga kependidikan memainkan peran kunci dalam keberlangsungan proses pendidikan. Oleh karena itu, manajemen pendidikan harus memastikan bahwa kapabilitas dan kapasitas mereka terus dikembangkan melalui pelatihan dan peningkatan kesejahteraan. Peserta didik, sebagai fokus utama dari proses pendidikan, harus mendapatkan perhatian penuh dalam pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan mereka. Sumber daya material dan anggaran finansial, sebagai faktor pendukung utama, harus dikelola secara optimal untuk memastikan kelancaran proses pendidikan.

Hubungan antara sekolah dan masyarakat juga merupakan aspek penting dalam manajemen pendidikan. Hubungan ini harus dikelola dengan baik untuk memastikan bahwa proses pendidikan dapat berjalan dalam lingkungan yang mendukung dan kondusif. Manajemen pendidikan dalam konteks ini harus mampu mengintegrasikan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan, penggerakan, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan dalam praktik sehari-hari.

Keseluruhan proses ini menunjukkan bahwa manajemen pendidikan adalah sebuah sistem yang kompleks dan dinamis, yang membutuhkan pendekatan yang holistik dan terintegrasi untuk memastikan keberhasilan dalam pencapaian tujuan pendidikan. Dengan menempatkan manajemen pendidikan sebagai pelaksana kebijakan publik di bidang pendidikan, diharapkan kebijakan pendidikan dapat direalisasikan secara akuntabel, konsisten, dan konsekuen, serta kesenjangan yang mungkin terjadi dapat diminimalkan. Manajemen pendidikan, sebagai proses sosial, berperan

penting dalam mengidentifikasi, memotivasi, dan mengintegrasikan seluruh sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, menjadikan pendidikan sebagai alat untuk pengembangan kualitas manusia dan masyarakat.

BAB II
DESENTRALISASI PENDIDIKAN DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL

Kebijakan otonomi daerah di Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, telah membuka jalan bagi berbagai kebijakan sektoral yang berdampak signifikan pada berbagai aspek pemerintahan dan pembangunan. Salah satu kebijakan yang paling menonjol adalah desentralisasi pendidikan, yang menjadi bagian integral dari urusan pemerintahan wajib. Kebijakan ini diuraikan dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang tersebut, yang menyatakan bahwa urusan pemerintahan wajib mencakup pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta layanan sosial.

Esensi utama dari kebijakan desentralisasi pendidikan terletak pada penyerahan sebagian besar wewenang dan tanggung jawab dalam bidang pendidikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, khususnya pemerintah kabupaten/kota. Kebijakan ini bertujuan untuk mendekatkan pengambilan keputusan kepada pengguna layanan pendidikan, yaitu masyarakat setempat, yang secara langsung merasakan dampak kebijakan pendidikan tersebut. Florestal dan Cooper (1997) mengartikan desentralisasi pendidikan sebagai semua upaya yang diarahkan untuk memindahkan kekuasaan pengambilan keputusan dalam pendidikan dasar dari pusat administrasi negara, seperti kementerian pendidikan, ke otoritas yang lebih dekat dengan pengguna, seperti kabupaten, kota, atau sekolah-sekolah individu. Hal ini menunjukkan bahwa desentralisasi pendidikan bukan hanya

sekadar pelimpahan wewenang, tetapi juga merupakan strategi untuk memperkuat pengelolaan pendidikan di tingkat lokal, dengan harapan dapat memberikan layanan yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Dalam konteks ini, desentralisasi pendidikan tidak hanya dilihat sebagai transfer otoritas, tetapi juga sebagai upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan. Arikunto (2005) mengemukakan bahwa desentralisasi pendidikan memiliki empat tujuan utama: pertama, untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan mendekatkan pengambilan keputusan kepada konteks lokal, di mana kebutuhan dan tantangan pendidikan dapat diidentifikasi dan direspon dengan lebih cepat; kedua, untuk meningkatkan efisiensi dalam administrasi pendidikan, yang diharapkan dapat mengurangi birokrasi yang kompleks dan mempercepat proses pengambilan keputusan; ketiga, untuk menghemat biaya pendidikan dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya di tingkat lokal; dan keempat, untuk mencapai kesetaraan dalam akses pendidikan, sehingga setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.

Maslowski et al. (2007) menambahkan bahwa desentralisasi pendidikan sering kali diperkenalkan atau dilegitimasi oleh ambisi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan memberikan kekuasaan pengambilan keputusan kepada pihak-pihak yang lebih dekat dengan inti pelayanan pendidikan, diharapkan bahwa proses pendidikan akan lebih sesuai dengan kebutuhan lokal dan hasilnya akan lebih memuaskan bagi para pemangku kepentingan. World Bank (2007) juga mendukung pandangan ini dengan menyatakan bahwa desentralisasi pendidikan memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan pendidikan. Harapan akhirnya adalah bahwa dengan memberikan kekuasaan pengambilan keputusan kepada

mereka yang berada di dekat inti layanan, efisiensi akan meningkat dan kualitas layanan akan membaik.

Desentralisasi pendidikan juga memiliki dampak signifikan pada reformasi sistem pendidikan nasional di Indonesia. Gaffar (2012) berpendapat bahwa otonomi daerah melalui desentralisasi pendidikan dapat menjadi momentum penting untuk pembaruan sistem pendidikan nasional. Kebijakan ini memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam mengelola pendidikan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan inovasi dan responsivitas terhadap kebutuhan lokal. Selain itu, desentralisasi pendidikan juga dianggap sebagai sarana untuk memperkuat kemandirian masyarakat melalui pendidikan. Dengan kata lain, desentralisasi memberikan kesempatan bagi masyarakat lokal untuk lebih berperan aktif dalam menentukan arah pendidikan di daerah mereka, yang diharapkan dapat mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, desentralisasi pendidikan di Indonesia tidak hanya dipandang sebagai proses administratif, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan pendidikan. Kebijakan ini sejalan dengan upaya global untuk mendekatkan pengambilan keputusan ke tingkat yang lebih lokal, dengan harapan bahwa layanan publik, termasuk pendidikan, dapat disesuaikan dengan lebih baik untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Seiring berjalannya waktu, desentralisasi pendidikan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

A. Desentralisasi Pendidikan

Desentralisasi pendidikan di Indonesia merupakan bagian dari reformasi kebijakan yang signifikan sejak diterapkannya kebijakan otonomi daerah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diperkuat dengan perubahan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015. Kebijakan ini telah mengubah cara pengelolaan berbagai urusan pemerintahan, termasuk pendidikan, dengan mengalihkan sebagian besar wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sejak 1 Januari 2001, pendidikan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi bagian dari pelayanan dasar secara resmi diserahkan kepada pemerintah daerah melalui prinsip desentralisasi. Langkah ini tidak hanya dimaksudkan untuk memperbaiki efisiensi administrasi, tetapi juga untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal.

Desentralisasi pendidikan mengacu pada pengaturan ulang pembagian kewenangan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, desentralisasi diartikan sebagai pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta oleh penyelenggara pendidikan yang didirikan oleh masyarakat. Tujuan utama dari desentralisasi ini adalah memastikan bahwa proses pendidikan berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pengelolaan pendidikan ini mencakup aspek-aspek penting seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, serta pengawasan, yang kini menjadi tanggung jawab berbagai tingkatan pemerintahan.

Dalam praktiknya, pelaksanaan desentralisasi pendidikan memerlukan keseimbangan antara tujuan pendidikan nasional dengan kebutuhan spesifik daerah. Implementasi kebijakan ini diharapkan dapat mendorong transformasi pemerintahan daerah menjadi lebih efisien, akuntabel, responsif, dan aspiratif. Dalam konteks ini, desentralisasi pendidikan harus lebih menekankan pada proses daripada struktur, artinya fokus utama adalah pada bagaimana kebijakan dan program diterapkan, bukan hanya pada bagaimana sistem tersebut diorganisir. Pendekatan ini menuntut fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi yang tinggi, serta keterlibatan yang kuat dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Burns et al. (2016) menggarisbawahi pentingnya pendekatan sistem menyeluruh dalam desentralisasi pendidikan, yang mencakup keterlibatan aktif pemangku kepentingan dan pengembangan kapasitas, serta pemanfaatan bukti dan penelitian untuk menginformasikan kebijakan dan praktik yang lebih baik.

Pemberian urusan pemerintahan di bidang pendidikan kepada pemerintah daerah merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Langkah ini menunjukkan komitmen kuat untuk memberdayakan daerah dalam pengelolaan pendidikan yang lebih mandiri. Namun, agar desentralisasi ini berhasil, diperlukan pengembangan kapasitas di tingkat lokal. Urbanovic dan Patapas (2012) menekankan bahwa keberhasilan desentralisasi pendidikan sangat bergantung pada kapasitas pemimpin sekolah yang kompeten dan kepercayaan masyarakat lokal. Selain itu, jaringan dukungan internal dan eksternal sangat penting untuk meningkatkan kapasitas setiap sekolah dalam mencakup semua peserta didik.

Desentralisasi pendidikan juga sejalan dengan pendekatan yang lebih demokratis dan partisipatif dalam pemerintahan. Zajda (2012) berpendapat bahwa desentralisasi yang memindahkan tanggung jawab

dan pengambilan keputusan ke badan-badan lokal memungkinkan masyarakat lokal untuk lebih terlibat dalam pengelolaan pendidikan. Hal ini penting karena pendidikan merupakan salah satu sektor yang paling berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Dengan desentralisasi, pemerintah daerah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan lebih cepat mengatasi masalah-masalah pendidikan yang muncul di daerah mereka.

Sementara itu, desentralisasi pendidikan juga dipandang sebagai bagian integral dari reformasi pendidikan secara keseluruhan. Alisyahbana (2003) menyatakan bahwa desentralisasi pendidikan bukan hanya bagian dari otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, tetapi juga merupakan elemen penting dalam upaya reformasi pendidikan yang lebih luas. Dengan mendekatkan pengambilan keputusan ke tingkat lokal, diharapkan kualitas pendidikan akan meningkat dan lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

Konsep subsidiaritas dalam desentralisasi pendidikan menggarisbawahi pentingnya menyerahkan urusan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan kepada tingkatan pemerintahan atau satuan kerja yang paling dekat dengan masyarakat. Ini berarti bahwa urusan pendidikan lebih baik ditangani oleh pemerintah daerah yang memiliki pemahaman mendalam tentang kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat. Menurut Bernbaum (2011), desentralisasi pendidikan harus mencakup restrukturisasi otoritas dan kelembagaan untuk memastikan adanya tanggung jawab bersama di antara berbagai tingkatan pemerintahan. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengambil alih tanggung jawab baru dengan dukungan dari pemerintah pusat dalam hal pengembangan kebijakan dan peningkatan kapasitas kelembagaan.

Andronicean dan Ristea (2014) menambahkan bahwa desentralisasi pendidikan memberikan kesempatan bagi komunitas

lokal dan sekolah untuk membuat keputusan sendiri tentang banyak aspek kebijakan dan praktik pendidikan. Dalam sistem yang terpusat, kebijakan dan manajemen pendidikan sering kali dikendalikan oleh badan pusat, yang dapat menghambat inovasi dan responsivitas lokal. Dengan desentralisasi, pemerintah daerah dan sekolah dapat mengembangkan kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi lokal, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas pendidikan.

Dalam kerangka kebijakan desentralisasi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa urusan pemerintahan di bidang pendidikan mencakup beberapa sub-urusan, seperti manajemen pendidikan, kurikulum, akreditasi, pendidikan dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, serta bahasa dan sastra. Pembagian tanggung jawab ini antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dirancang untuk memastikan bahwa setiap tingkatan pemerintahan memiliki peran yang jelas dan terdefinisi dengan baik dalam pengelolaan pendidikan.

Determinan pembagian urusan pemerintahan di bidang pendidikan terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Determinan Pembagian Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan.

Kewenangan	**Urusan Pemerintahan**	
	Sub Urusan	**Indikator**
Pemerintah Pusat	Manajemen Pendidikan	1. Penetapan standar nasional pendidikan, 2. Pengelolaan pendidikan
	Kurikulum	Penetapan kurikulum nasional pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan

		menenengah serta pendidikan non-formal.
	Akreditasi	Akreditasi perguruan tinggi, pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. Pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik dan pengembangan karier pendidik, 2. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Provinsi.
	Perizinan Pendidikan	1. Penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat, 2. Penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing.
	Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra Indonesia
Pemerintah Provinsi	Manajemen Pendidikan	1. Pengelolaan pendidikan menengah, 2. Pengelolaan pendidikan
	Kurikulum	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus.
	Akreditasi	-
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas

		daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.
	Perizinan Pendidikan	1. Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat, 2. Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.
	Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.
Pemerintah Kabupaten/ Kota	Manajemen Pendidikan	1. Pengelolaan pendidikan dasar, 2. Pengelolaan pendidikan.
	Kurikulum	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non-formal.
	Akreditasi	-
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah Kabupaten/Kota
	Perizinan Pendidikan	1. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat, 2. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan non-formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

	Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Secara keseluruhan, desentralisasi pendidikan di Indonesia menawarkan peluang besar untuk memperbaiki kualitas dan efisiensi pendidikan melalui pengelolaan yang lebih lokal dan partisipatif. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola tanggung jawab baru mereka dengan efektif, serta pada dukungan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam bentuk kebijakan, pengembangan kapasitas, dan sumber daya. Dengan demikian, desentralisasi pendidikan tidak hanya memperkuat otonomi daerah, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian tujuan pendidikan nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

B. Kebijakan Pendidikan Nasional

Kebijakan pendidikan di Indonesia merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang berkualitas. Dalam kerangka ini, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi sebagai sarana pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan tidak hanya dilihat sebagai upaya untuk mengajarkan pengetahuan, tetapi juga sebagai proses pembentukan karakter dan peradaban bangsa yang bermartabat. Dengan demikian, pendidikan di Indonesia memiliki peran strategis dalam membentuk watak dan identitas bangsa, serta

dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlukan untuk menghadapi tantangan global.

Sebagai suatu sistem, pendidikan di Indonesia diatur untuk dapat memberdayakan seluruh warga negara agar mampu dan proaktif dalam menghadapi perubahan zaman. Pendidikan harus mampu menjadi pranata sosial yang kuat dan berwibawa, yang tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan individu dan komunitas. Dalam konteks globalisasi yang semakin kompetitif, pendidikan di Indonesia diharapkan dapat menghasilkan individu-individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kemampuan emosional, sosial, dan spiritual yang seimbang. Hal ini penting untuk memastikan bahwa generasi muda Indonesia tidak hanya mampu bersaing di kancah global, tetapi juga tetap berpegang pada nilai-nilai moral dan etika yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia.

Kebijakan pendidikan di Indonesia juga menekankan pentingnya prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan non-diskriminasi. Pendidikan harus dapat diakses oleh semua warga negara tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis. Ini berarti bahwa setiap individu, dari Sabang hingga Merauke, harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan juga harus menghargai keragaman budaya dan agama yang ada di Indonesia, serta mengajarkan peserta didik untuk menghormati hak asasi manusia dan berpartisipasi dalam kehidupan demokratis. Dengan demikian, pendidikan di Indonesia tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga untuk mempromosikan kohesi sosial dan memperkuat persatuan nasional.

Dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan, Indonesia mengembangkan konsep "Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif," yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Pendidikan

Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005—2025. Konsep ini bertujuan untuk membentuk individu yang cerdas secara komprehensif, yang mencakup kecerdasan spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan kinestetik. Insan Indonesia yang cerdas diharapkan memiliki kepribadian yang kuat, semangat juang yang tinggi, kemandirian, serta kemampuan untuk beradaptasi dan berinovasi di tengah perubahan global. Pendidikan diharapkan dapat menjadi motor penggerak transformasi sosial, di mana individu-individu yang dihasilkan oleh sistem pendidikan mampu membawa perubahan positif dalam masyarakat dan memajukan bangsa. Profil siswa tersebut, disebut dengan Profil Pelajar Pancasila, sebagaimana dalam gambar berikut:

Gambar 1. Profil Pelajar Pancasila
(Sumber: Kemdikbud, 2020).

Seiring dengan perkembangan zaman, kebijakan pendidikan Indonesia juga terus disesuaikan untuk menjawab tantangan-tantangan baru. Salah satu inisiatif besar dalam beberapa tahun terakhir adalah kebijakan "Merdeka Belajar," yang bertujuan untuk memberikan kebebasan lebih besar kepada sekolah, guru, dan siswa

dalam proses pembelajaran. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan ruang bagi inovasi dan kreativitas di tingkat sekolah, serta memperkuat peran guru sebagai fasilitator pembelajaran. Dalam kerangka "Merdeka Belajar," pendidikan tidak lagi hanya dipandang sebagai proses transfer pengetahuan yang bersifat satu arah, tetapi sebagai proses interaktif yang melibatkan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan.

Lebih lanjut, kebijakan "Merdeka Belajar" juga menekankan pentingnya penggunaan teknologi dalam pendidikan. Pemanfaatan teknologi diharapkan dapat memperluas akses pendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil yang selama ini sulit dijangkau. Teknologi juga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui berbagai inovasi pedagogis, seperti pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran daring. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk menyempurnakan kurikulum, pedagogi, dan sistem penilaian agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan tantangan abad ke-21. Kerangka Merdeka Belajar tersebut terlihat pada gambar berikut:

Gambar 2. Kebijakan Pendidikan Merdeka Belajar
(Sumber: Kemdikbud, 2020).

Namun, pelaksanaan kebijakan pendidikan di Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah ketimpangan akses dan kualitas pendidikan antar daerah. Meskipun pemerintah telah berupaya untuk memperluas akses pendidikan melalui berbagai program, masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara daerah maju dan tertinggal. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kebijakan yang lebih terfokus pada peningkatan infrastruktur pendidikan di daerah-daerah tertinggal, serta peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, diperlukan juga upaya yang lebih intensif untuk melibatkan masyarakat dalam proses pendidikan, agar pendidikan benar-benar menjadi gerakan sosial yang melibatkan semua pihak.

Dalam konteks global, kebijakan pendidikan di Indonesia juga harus mampu beradaptasi dengan dinamika internasional. Globalisasi telah membawa tantangan baru dalam bidang pendidikan, seperti meningkatnya persaingan global, perkembangan teknologi yang pesat, serta perubahan dalam pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, sistem pendidikan di Indonesia harus mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki keterampilan abad ke-21, seperti kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan literasi digital. Selain itu, pendidikan di Indonesia juga harus mampu membentuk individu yang memiliki kesadaran global, yang dapat berperan aktif dalam upaya-upaya internasional untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Kesimpulannya, kebijakan pendidikan di Indonesia dirancang untuk membentuk generasi muda yang cerdas, kompetitif, dan berkarakter kuat, yang mampu menghadapi tantangan global dan berkontribusi pada pembangunan bangsa. Pendidikan di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan pengetahuan,

tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk karakter, memperkuat persatuan, dan memajukan peradaban bangsa. Dengan terus mengembangkan dan menyempurnakan kebijakan pendidikan, Indonesia diharapkan dapat menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan, yang mampu menjawab tantangan abad ke-21 dan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.

BAB III
PERSPEKTIF DAN TEORI MANAJEMEN PENDIDIKAN

A. Perspektif Manajemen Pendidikan

Perspektif Filosofis Manajemen Pendidikan merupakan pilar utama yang membentuk cara pandang, kebijakan, dan praktik dalam sistem pendidikan. Pendekatan filosofis ini tidak hanya memengaruhi cara manajer pendidikan membuat keputusan, tetapi juga membentuk budaya dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Perspektif filosofis yang beragam memberikan kerangka yang komprehensif untuk memahami dinamika dalam manajemen pendidikan dan membantu dalam merancang kebijakan dan praktik yang lebih efektif.

Positivisme adalah salah satu perspektif yang dominan dalam manajemen pendidikan, berfokus pada metode ilmiah dan data empiris untuk mengambil keputusan. Positivisme memandang bahwa pengetahuan dapat diperoleh melalui observasi yang sistematis dan pengujian hipotesis secara objektif. Dalam konteks pendidikan, pendekatan ini mendorong penggunaan data kuantitatif untuk menilai efektivitas kebijakan dan program pendidikan. Robinson (2018) menunjukkan bahwa pendekatan ini mendukung pembuatan keputusan yang berbasis bukti dan akuntabilitas yang lebih tinggi, karena data yang dikumpulkan memberikan gambaran yang jelas tentang efektivitas dan hasil dari berbagai intervensi pendidikan (Robinson, 2018). Misalnya, dalam mengevaluasi program pendidikan baru, analisis data hasil belajar siswa dan survei kepuasan guru dapat memberikan wawasan tentang dampak program tersebut dan mengidentifikasi area untuk perbaikan.

Namun, pendekatan positivis tidak selalu memadai dalam menangkap kompleksitas sosial dalam pendidikan, yang menjadi

alasan untuk mengadopsi interpretivisme. Interpretivisme menekankan pemahaman yang mendalam terhadap pengalaman subjektif individu dalam konteks sosial mereka. Perspektif ini berargumen bahwa realitas sosial dibentuk melalui interaksi dan makna yang diberikan oleh individu. Schwandt (2015) berpendapat bahwa interpretivisme memungkinkan manajer pendidikan untuk memahami dinamika interpersonal dan kultural yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan. Hal ini memungkinkan penerapan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan harapan komunitas pendidikan. Misalnya, memahami perspektif guru dan siswa dalam konteks spesifik sekolah dapat membantu merancang kurikulum yang lebih relevan dan inklusif.

Pragmatism, dengan fokus pada aplikasi praktis dari teori dan metode, menawarkan perspektif tambahan yang berharga dalam manajemen pendidikan. Pragmatism menganggap bahwa teori dan metode harus dinilai berdasarkan efektivitasnya dalam menyelesaikan masalah konkret. Dewey (2016) menekankan bahwa pendidikan harus menjadi alat untuk memecahkan masalah praktis dan relevan, bukan hanya untuk mengajarkan pengetahuan teoretis. Dalam manajemen pendidikan, ini berarti bahwa strategi harus dirancang untuk menjawab tantangan nyata yang dihadapi sekolah, seperti kesenjangan pencapaian siswa atau kebutuhan akan pelatihan profesional bagi guru. Pendekatan pragmatis dapat mendorong inovasi dalam praktik pendidikan dengan fokus pada solusi yang bekerja di lapangan.

Kritik sosial menawarkan perspektif yang berfokus pada ketidakadilan dan ketimpangan dalam sistem pendidikan. Perspektif ini menyoroti bagaimana kekuatan sosial dan politik mempengaruhi struktur dan fungsi sistem pendidikan. Giroux (2017) menggarisbawahi bahwa manajemen pendidikan harus mengevaluasi bagaimana kebijakan dan praktik mempengaruhi kelompok-kelompok sosial yang berbeda dan berupaya untuk memperbaiki ketidakadilan.

Misalnya, analisis kritis terhadap kebijakan pendidikan dapat mengungkapkan dampak negatif terhadap siswa dari latar belakang kurang mampu dan memotivasi reformasi untuk memastikan akses yang lebih adil terhadap sumber daya pendidikan.

Filsafat kritis juga memberikan pandangan yang mendalam tentang bagaimana struktur kekuasaan mempengaruhi praktik pendidikan. Apple (2019) menjelaskan bahwa analisis kritis terhadap kebijakan pendidikan harus mempertimbangkan bagaimana kekuatan politik dan ekonomi membentuk sistem pendidikan. Dengan mempertimbangkan struktur kekuasaan yang ada, pemimpin pendidikan dapat lebih baik memahami bagaimana kebijakan dan praktik mereka dapat mempengaruhi hasil pendidikan secara menyeluruh. Filsafat kritis mendorong refleksi mendalam dan pergeseran paradigma dalam pendidikan untuk menciptakan sistem yang lebih demokratis dan egaliter.

Postmodernisme adalah perspektif filosofis yang menolak narasi besar dan dogma yang mengklaim kebenaran absolut, dan sebaliknya, menekankan pluralitas, keragaman, dan konteks. Dalam manajemen pendidikan, postmodernisme mendorong pemikiran kritis terhadap kebijakan dan praktek yang telah mapan, dan mengakui keberagaman dalam pengalaman pendidikan dan perspektif budaya. Lather (2018) dalam bukunya *Getting Lost: Feminist Efforts toward a Double(d) Science* mengemukakan bahwa pendidikan harus responsif terhadap kompleksitas dan keragaman yang ada dalam masyarakat. Ini mengarahkan pada desain kurikulum dan praktik pendidikan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap berbagai kebutuhan dan latar belakang siswa (Lather, 2018).

Secara keseluruhan, berbagai perspektif filosofis dalam manajemen pendidikan menawarkan wawasan dan pendekatan yang beragam untuk memahami dan mengelola sistem pendidikan. Dari positivisme yang berbasis data hingga kritik sosial yang berorientasi

pada keadilan, setiap perspektif memberikan kontribusi penting dalam merancang kebijakan dan praktik yang efektif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan pendidikan. Pemahaman mendalam tentang perspektif ini memungkinkan pemimpin pendidikan untuk mengembangkan pendekatan yang lebih holistik dan adaptif, menjawab tantangan yang kompleks, dan memajukan kualitas pendidikan.

B. Teori-teori Manajemen Pendidikan

1. Administrative Theory

Administrative Theory yang dikembangkan oleh Henri Fayol pada awal abad ke-20 tetap merupakan landasan penting dalam manajemen pendidikan hingga saat ini. Teori ini menawarkan kerangka kerja yang sistematis dan terstruktur untuk memanage berbagai organisasi, termasuk sekolah, dan tetap relevan dalam konteks manajemen modern. Fayol mengidentifikasi empat fungsi dasar manajerial: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, yang memberikan panduan penting dalam pengelolaan pendidikan.

Perencanaan adalah fungsi pertama yang diidentifikasi oleh Fayol dan sangat penting dalam konteks pendidikan. Fayol (2015) menekankan pentingnya merumuskan tujuan dan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Dalam pengelolaan sekolah, perencanaan melibatkan penyusunan kurikulum, pengembangan strategi pengajaran, dan alokasi sumber daya untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Perencanaan strategis ini memastikan bahwa setiap aspek pendidikan, dari kegiatan belajar mengajar hingga administrasi sekolah, diarahkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Mintzberg (2017) dalam *The Rise and Fall of Strategic Planning* menambahkan bahwa perencanaan yang efektif juga harus memperhitungkan dinamika eksternal dan internal yang

mempengaruhi organisasi pendidikan, termasuk perubahan dalam kebijakan pendidikan dan kebutuhan siswa (Mintzberg, 2017).

Pengorganisasian adalah fungsi berikutnya dalam teori Fayol yang menekankan pada struktur dan tata kelola organisasi. Fayol (2015) melihat pengorganisasian sebagai proses penataan struktur organisasi, termasuk penempatan staf dan pembagian tanggung jawab. Dalam konteks pendidikan, pengorganisasian melibatkan pembentukan struktur sekolah, penempatan guru, staf administrasi, serta pengaturan sumber daya fisik dan keuangan. Gulick dan Urwick (2019) menggarisbawahi bahwa pengorganisasian yang baik memastikan bahwa setiap individu dalam organisasi memahami perannya dan bagaimana kontribusinya mendukung tujuan bersama (Gulick & Urwick, 2019). Ini termasuk pengaturan administrasi yang efisien, seperti penjadwalan kelas dan pengelolaan fasilitas sekolah, yang mendukung operasi sehari-hari.

Pengarahan atau kepemimpinan adalah fungsi yang berfokus pada motivasi dan inspirasi anggota organisasi untuk mencapai tujuan. Menurut Fayol (2015), pengarahan melibatkan memberikan arahan yang jelas, memotivasi staf, dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Dalam pendidikan, kepala sekolah dan pemimpin pendidikan harus mampu memimpin dengan memberikan visi yang jelas, menginspirasi guru, serta menciptakan lingkungan belajar yang mendukung motivasi siswa. Robbins dan Judge (2019) menambahkan bahwa pengarahan yang efektif juga melibatkan komunikasi yang baik dan pengembangan profesional bagi guru, yang merupakan bagian penting dari menciptakan atmosfer pendidikan yang positif dan produktif (Robbins & Judge, 2019).

Pengendalian adalah fungsi terakhir yang mencakup pemantauan dan evaluasi untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi sesuai dengan rencana dan standar yang ditetapkan. Fayol (2015) menyebutkan bahwa pengendalian melibatkan penilaian kinerja

dan pengawasan untuk mengidentifikasi masalah atau penyimpangan dari standar yang diharapkan. Dalam pengelolaan pendidikan, ini termasuk evaluasi hasil belajar siswa, penilaian kinerja guru, dan pengawasan administrasi sekolah. Robinson dan Judge (2020) menyoroti pentingnya pengendalian dalam mengidentifikasi masalah lebih awal dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan kualitas pendidikan tetap terjaga (Robinson & Judge, 2020).

Dalam beberapa dekade terakhir, teori Fayol telah dikembangkan dengan konsep-konsep modern dalam manajemen pendidikan. Misalnya, integrasi teknologi informasi dalam manajemen sekolah memerlukan pendekatan yang lebih adaptif dan fleksibel dibandingkan dengan model awal Fayol (Gulick & Urwick, 2019). Namun, prinsip dasar Fayol seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian tetap merupakan fondasi penting untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan dapat berfungsi secara optimal. Prinsip-prinsip ini memberikan panduan yang berharga untuk pemimpin pendidikan dalam merancang dan mengelola proses manajerial yang efektif, meskipun konteks dan tantangan manajerial terus berkembang.

Dengan demikian, Administrative Theory Fayol memberikan kerangka kerja yang solid untuk manajemen pendidikan, yang membantu dalam merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan berbagai aspek operasional sekolah. Prinsip-prinsip ini tidak hanya relevan dalam konteks sejarah tetapi juga telah diadaptasi untuk memenuhi tuntutan manajemen pendidikan modern, menjadikannya alat yang berharga untuk memastikan kualitas dan efisiensi dalam sistem pendidikan.

2. Transformational Leadership

Transformational Leadership adalah teori kepemimpinan yang telah berkembang dan beradaptasi dengan konteks modern, terutama dalam manajemen pendidikan. Dikembangkan oleh James MacGregor Burns pada tahun 1978 dan kemudian diperluas oleh Bernard M. Bass, teori ini menekankan pada kemampuan pemimpin untuk menginspirasi dan memotivasi pengikutnya dengan cara yang meningkatkan kesadaran mereka tentang tujuan bersama serta mendorong mereka untuk melampaui kepentingan pribadi demi pencapaian visi bersama. Teori ini memiliki relevansi yang mendalam dalam konteks pendidikan, di mana pemimpin sekolah berperan kunci dalam membentuk iklim sekolah yang inovatif dan adaptif.

Dalam konteks pendidikan, *Transformational Leadership* berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan progresif. Pemimpin pendidikan yang menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan transformasional tidak hanya fokus pada pengelolaan administrasi sekolah secara efisien tetapi juga pada upaya untuk memotivasi guru, staf, dan siswa mencapai potensi maksimal mereka. Hal ini melibatkan perubahan pola pikir dan budaya organisasi, di mana visi dan misi pendidikan menjadi pusat perhatian dalam setiap aktivitas sekolah. Northouse (2018) menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional berfokus pada perubahan mendalam dalam organisasi dengan mendorong anggota organisasi untuk berkomitmen pada tujuan bersama dan memperbaiki proses serta hasil (Northouse, 2018).

Salah satu dimensi utama dari kepemimpinan transformasional adalah *Inspirational Motivation*. Ini mencakup kemampuan pemimpin untuk memberikan inspirasi dan dorongan kepada pengikutnya. Dalam lingkungan sekolah, kepala sekolah yang menerapkan dimensi ini harus mampu mengartikulasikan visi pendidikan yang jelas dan menarik, serta menyampaikan pesan tersebut dengan cara yang

memotivasi seluruh staf dan siswa. Menurut Bass dan Riggio (2006), pemimpin transformasional menginspirasi pengikutnya dengan menyampaikan harapan dan keyakinan tinggi mengenai masa depan, yang pada gilirannya meningkatkan komitmen dan semangat kerja (Bass & Riggio, 2006). Hal ini penting dalam menciptakan suasana belajar yang positif dan berorientasi pada hasil yang bermanfaat bagi perkembangan siswa.

Dimensi lain dari kepemimpinan transformasional adalah Intellectual Stimulation, yang berfokus pada dorongan untuk berpikir kreatif dan inovatif. Pemimpin pendidikan yang mengadopsi prinsip ini mendorong guru dan staf untuk mengeksplorasi solusi baru terhadap masalah yang ada dan memperkenalkan metode pengajaran yang inovatif. Misalnya, pemimpin pendidikan yang menerapkan pendekatan transformasional akan mendorong guru untuk menggunakan teknologi pendidikan terbaru dalam proses belajar mengajar dan memberikan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan profesional mereka. Northouse (2018) menggarisbawahi bahwa pendekatan ini memungkinkan guru untuk memperbarui metode mereka secara berkala dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan siswa yang berubah (Northouse, 2018).

Individualized Consideration adalah dimensi lain yang penting, mencakup perhatian dan pengakuan terhadap kebutuhan dan aspirasi individu. Dalam lingkungan pendidikan, pemimpin transformasional memberikan dukungan dan pengakuan terhadap prestasi individual guru dan siswa. Ini menciptakan iklim sekolah yang mendukung dan menghargai kontribusi setiap individu serta membantu dalam pengembangan profesional dan personal mereka. Bass dan Avolio (1994) menyoroti bahwa perhatian individual ini dapat membangun hubungan yang positif dan produktif serta memberikan umpan balik

yang membangun, yang esensial untuk meningkatkan motivasi dan kinerja anggota tim (Bass & Avolio, 1994).

Terakhir, *Idealized Influence* melibatkan tindakan pemimpin sebagai contoh teladan yang diikuti oleh pengikutnya. Dalam manajemen pendidikan, pemimpin yang memiliki idealized influence menjadi role model dalam hal etika kerja, komitmen terhadap visi pendidikan, dan integritas. Pemimpin seperti ini akan membangun kepercayaan dan rasa hormat dari staf dan siswa, yang esensial dalam menciptakan budaya sekolah yang positif dan produktif. Avolio dan Bass (2004) menekankan bahwa idealized influence membantu dalam membangun kepercayaan dan rasa hormat di antara anggota organisasi, yang pada gilirannya memperkuat keterlibatan dan dedikasi terhadap visi bersama (Avolio & Bass, 2004).

Secara keseluruhan, *Transformational Leadership* menawarkan pendekatan yang dinamis dan proaktif dalam manajemen pendidikan. Dengan memfokuskan pada inspirasi, kreativitas, perhatian individual, dan contoh teladan, teori ini memberikan kerangka kerja yang kuat untuk pemimpin pendidikan dalam menghadapi tantangan dan mengarahkan sekolah menuju keberhasilan yang berkelanjutan. Penekanan pada aspek-aspek ini memungkinkan sekolah untuk beradaptasi dengan perubahan dan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

3. Teori Sistem

Teori Sistem (*System Theory*) yang dikembangkan oleh Ludwig von Bertalanffy pada pertengahan abad ke-20 memberikan pendekatan yang sangat berpengaruh dalam manajemen pendidikan. Teori ini memandang setiap sistem, termasuk sistem pendidikan, sebagai totalitas yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Dalam konteks pendidikan, teori ini membantu kita memahami bagaimana berbagai elemen seperti

kurikulum, pengajaran, administrasi, dan kebijakan saling berhubungan dan berkontribusi terhadap tujuan pendidikan secara keseluruhan (von Bertalanffy, 1968).

Teori sistem berfokus pada konsep bahwa sebuah organisasi atau sistem, seperti sekolah, adalah entitas yang kompleks di mana perubahan pada satu bagian dapat mempengaruhi seluruh sistem. Dalam praktik pendidikan, ini berarti bahwa keputusan atau perubahan pada aspek tertentu, seperti penyesuaian kurikulum atau reformasi kebijakan, tidak hanya mempengaruhi satu area tetapi juga dapat memiliki dampak luas terhadap keseluruhan sistem pendidikan. Senge (2014) dalam bukunya *The Fifth Discipline: The Art & Practice of The Learning Organization* menekankan pentingnya membangun "organisasi yang belajar," di mana sekolah dapat terus-menerus mengembangkan strategi untuk menghadapi tantangan dan perubahan dengan memanfaatkan umpan balik dari berbagai bagian sistem. Hal ini memungkinkan sekolah untuk memperbaiki praktik dan proses secara berkelanjutan, menjadikannya lebih responsif terhadap kebutuhan siswa dan perubahan dalam lingkungan pendidikan (Senge, 2014).

Salah satu konsep kunci dalam teori sistem adalah feedback loops atau umpan balik, yang membantu dalam memantau dan mengendalikan sistem. Dalam konteks pendidikan, umpan balik dapat diterapkan melalui mekanisme evaluasi dan penilaian yang secara rutin memeriksa efektivitas program dan kebijakan, serta mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Forrester (1961) dalam *Industrial Dynamics* menyarankan bahwa umpan balik yang efektif adalah kunci untuk menjaga keseimbangan dan kestabilan dalam sistem yang kompleks. Umpan balik dari evaluasi kinerja, survei siswa, dan penilaian guru adalah alat penting untuk memastikan bahwa sistem pendidikan berfungsi dengan baik dan memenuhi standar yang diinginkan (Forrester, 1961).

Teori sistem juga menekankan pada holistic approach atau pendekatan holistik, yang menyoroti pentingnya melihat sistem secara keseluruhan daripada hanya fokus pada bagian-bagian individualnya. Sterman (2000) dalam *Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World* menggarisbawahi bahwa pendekatan holistik memungkinkan manajer untuk memahami bagaimana berbagai elemen dan proses dalam sistem pendidikan saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Pendekatan ini penting dalam praktik pendidikan, karena pemimpin sekolah perlu mempertimbangkan dampak dari kebijakan dan keputusan mereka terhadap seluruh sistem, termasuk siswa, guru, staf, dan komunitas (Sterman, 2000).

Terakhir, teori sistem mendorong adaptability atau kemampuan beradaptasi, yang sangat penting dalam lingkungan pendidikan yang terus berubah. Meadows (2008) dalam bukunya *Thinking in Systems: A Primer* menekankan pentingnya fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan sebagai karakteristik utama dari sistem yang sehat dan efektif. Bagi sekolah, ini berarti mengembangkan kemampuan untuk menyesuaikan kurikulum, metode pengajaran, dan kebijakan administratif agar sesuai dengan perkembangan baru dalam pendidikan dan kebutuhan siswa (Meadows, 2008).

Secara keseluruhan, penggunaan teori sistem dalam manajemen pendidikan menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami dan mengelola kompleksitas dalam sistem pendidikan. Dengan menekankan interdependensi, umpan balik, pendekatan holistik, dan kemampuan beradaptasi, teori ini membantu pemimpin pendidikan menciptakan sistem yang efisien, responsif, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

4. Manajemen Strategis

Manajemen Strategis (*Strategic Management*) merupakan landasan teori yang sangat penting dalam manajemen pendidikan

karena memberikan kerangka kerja untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi keputusan yang mendukung pencapaian tujuan jangka panjang suatu organisasi. Dalam konteks pendidikan, teori ini membantu lembaga pendidikan, seperti sekolah dasar dan menengah, untuk merencanakan dan menerapkan strategi yang efektif guna meningkatkan kualitas pendidikan dan mencapai tujuan pendidikan nasional yang telah ditetapkan.

Tahapan utama dalam manajemen strategis mencakup analisis lingkungan, perumusan strategi, implementasi, dan evaluasi. Porter (2008) dalam bukunya *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance* menjelaskan bahwa analisis lingkungan merupakan proses identifikasi faktor-faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi organisasi. Dalam konteks pendidikan, analisis ini mencakup kebijakan pemerintah, kondisi pasar tenaga kerja, dan kebutuhan siswa. Pemahaman mendalam tentang faktor-faktor ini membantu dalam merumuskan strategi yang sesuai untuk menangani tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada (Porter, 2008).

Perumusan strategi adalah tahap di mana manajer pendidikan menetapkan tujuan jangka panjang dan merancang strategi untuk mencapainya. Mintzberg (2017) dalam *The Rise and Fall of Strategic Planning* mengemukakan bahwa strategi harus diselaraskan dengan visi dan misi organisasi serta disesuaikan dengan konteks dan kondisi yang ada. Dalam pendidikan, ini mungkin melibatkan pengembangan kurikulum inovatif, perbaikan metode pengajaran, atau implementasi teknologi pendidikan untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa. Proses ini memastikan bahwa strategi yang diterapkan relevan dan efektif dalam mencapai tujuan pendidikan (Mintzberg, 2017).

Implementasi strategi melibatkan penerapan rencana yang telah dirumuskan. Kaplan dan Norton (2004) dalam *Strategy Maps: Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes* menekankan pentingnya memiliki sistem pengukuran kinerja yang jelas dan proses

komunikasi yang efektif selama fase implementasi. Dalam sekolah, ini mencakup pelatihan untuk guru, pengembangan sumber daya, dan penyesuaian administrasi untuk mendukung pelaksanaan strategi. Implementasi yang efektif memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai bagian organisasi serta komitmen dari semua pemangku kepentingan untuk mencapai hasil yang diinginkan (Kaplan & Norton, 2004).

Evaluasi adalah tahap selanjutnya yang melibatkan penilaian kinerja dan hasil dari strategi yang telah diterapkan. Hrebiniak (2013) dalam *Making Strategy Work: Leading Effective Execution and Change* menjelaskan bahwa evaluasi mencakup pengukuran hasil serta penyesuaian strategi berdasarkan umpan balik dan perubahan kondisi. Dalam pendidikan, evaluasi ini mencakup penilaian terhadap pencapaian hasil belajar siswa, efektivitas program, dan respons terhadap perubahan kebijakan pendidikan. Evaluasi yang menyeluruh memungkinkan lembaga pendidikan untuk terus memperbaiki praktik dan strategi mereka (Hrebiniak, 2013).

Selain itu, manajemen strategis juga mencakup perencanaan kontinjensi, yaitu persiapan untuk menghadapi situasi darurat atau perubahan mendadak. Eisenhardt (2018) dalam *Competing on the Edge: Strategy as Structured Chaos* menyoroti pentingnya kemampuan beradaptasi dan mengubah strategi sesuai dengan kondisi yang tidak terduga sebagai kunci untuk kesuksesan. Di sekolah, ini berarti memiliki rencana darurat untuk berbagai skenario, seperti pandemi atau perubahan kebijakan pendidikan mendadak. Perencanaan kontinjensi memungkinkan sekolah untuk tetap tangguh dan responsif terhadap situasi yang tidak diharapkan (Eisenhardt, 2018).

Pendekatan berbasis nilai juga merupakan bagian dari manajemen strategis, di mana keputusan strategis diambil dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan misi organisasi. Barney dan Hesterly (2015) dalam *Strategic Management and Competitive Advantage:*

Concepts and Cases menjelaskan bahwa keputusan strategis harus mencerminkan tujuan jangka panjang organisasi dan memberikan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan. Dalam pendidikan, ini berarti strategi harus mendukung misi sekolah untuk memberikan pendidikan berkualitas tinggi dan bermanfaat bagi siswa dan masyarakat (Barney & Hesterly, 2015).

Dengan mengimplementasikan manajemen strategis, lembaga pendidikan dapat mengelola perubahan dengan lebih efektif, merespons tantangan, dan memanfaatkan peluang untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pendekatan ini membantu sekolah memiliki visi jangka panjang, merencanakan dengan cermat, melaksanakan strategi dengan efektif, dan menilai hasil secara menyeluruh. Hal ini memastikan bahwa sekolah dapat terus meningkatkan performa dan memenuhi standar pendidikan yang diharapkan.

C. Implikasi Manajemen Pendidikan bagi Pembangunan Pendidikan di Indonesia

Manajemen pendidikan di Indonesia memainkan peran sentral dalam upaya pembangunan sistem pendidikan yang efektif dan adaptif. Dalam beberapa dekade terakhir, manajemen pendidikan telah menjadi faktor kunci dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan di seluruh negeri. Implementasi prinsip-prinsip manajemen yang baik telah membantu dalam merespons berbagai tantangan sistem pendidikan dan memanfaatkan peluang untuk perbaikan yang berkelanjutan.

Salah satu implikasi utama dari manajemen pendidikan adalah kontribusinya terhadap pengembangan kebijakan pendidikan yang berorientasi pada perbaikan mutu dan pemerataan akses. Di tingkat pusat dan daerah, manajer pendidikan bertanggung jawab untuk

merancang kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan lokal. Suryadarma dan Suryahadi (2020) menggarisbawahi pentingnya penggunaan data berbasis analisis dalam proses ini, yang memungkinkan pembuatan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Data yang diperoleh dari evaluasi dan survei dapat membantu dalam mengidentifikasi kekurangan dan kebutuhan spesifik, serta mengarahkan alokasi sumber daya untuk inisiatif yang dapat meningkatkan kompetensi guru dan fasilitas pendidikan di daerah tertinggal (Suryadarma & Suryahadi, 2020). Dengan pendekatan berbasis data, kebijakan yang diterapkan menjadi lebih relevan dan berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa secara signifikan.

Dalam hal peningkatan kualitas pengajaran dan kurikulum, manajemen pendidikan juga memainkan peran krusial. Implementasi kurikulum yang relevan dan inovatif serta pengembangan profesional guru membutuhkan strategi yang baik dan koordinasi yang efektif. Kemdikbud (2019) mencatat bahwa pembaruan kurikulum dan pelatihan guru merupakan aspek penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Manajer pendidikan harus memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan zaman dan teknologi, serta mendukung pengembangan keterampilan guru. Dengan cara ini, siswa dapat memperoleh pendidikan yang sesuai dengan tuntutan global dan lokal, sehingga meningkatkan kualitas pengalaman belajar mereka (Kemdikbud, 2019).

Pengelolaan sumber daya yang efisien merupakan aspek penting lainnya dari manajemen pendidikan. Indonesia, dengan keragaman geografis dan demografisnya, menghadapi tantangan besar dalam mengelola sumber daya pendidikan secara optimal. Hidayati dan Wibowo (2021) menjelaskan bahwa sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk memastikan bahwa dana pendidikan digunakan dengan baik dan tidak mengalami kebocoran. Prinsip-prinsip manajemen yang baik, seperti perencanaan

anggaran yang cermat dan evaluasi berkala, dapat membantu memaksimalkan dampak dari investasi di sektor pendidikan. Dengan menerapkan sistem yang transparan, manajer pendidikan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya, serta memastikan bahwa semua aspek pendidikan mendapatkan perhatian yang memadai (Hidayati & Wibowo, 2021).

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah penguatan akuntabilitas dan transparansi dalam sistem pendidikan. Sistem yang transparan dan akuntabel membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan dan memastikan bahwa semua pemangku kepentingan memiliki akses ke informasi yang relevan mengenai kinerja pendidikan. Arifin (2022) menekankan bahwa penerapan sistem akuntabilitas yang ketat dan mekanisme pelaporan yang jelas sangat penting dalam memantau dan mengevaluasi hasil pendidikan. Dengan cara ini, kelemahan dalam sistem pendidikan dapat diidentifikasi dan diperbaiki secara tepat waktu, serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pendidikan (Arifin, 2022).

Manajemen pendidikan juga berdampak signifikan pada pengembangan kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan yang efektif di tingkat sekolah dan distrik memainkan peran kunci dalam mencapai tujuan pendidikan dan mendorong inovasi dalam praktik pendidikan. Prawira dan Susanto (2021) mengungkapkan bahwa kepemimpinan transformasional, yang melibatkan pemimpin yang memotivasi dan menginspirasi staf, sangat penting untuk meningkatkan kinerja sekolah dan mencapai hasil belajar yang lebih baik. Melalui pengembangan kepemimpinan yang kuat, manajer pendidikan dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung pertumbuhan profesional bagi guru serta staf pendidikan (Prawira & Susanto, 2021).

Secara keseluruhan, implikasi manajemen pendidikan bagi pembangunan pendidikan di Indonesia sangat luas dan kompleks. Melalui penerapan prinsip-prinsip manajemen yang efektif dan inovatif, sistem pendidikan di Indonesia dapat terus berkembang, mengatasi tantangan, dan memenuhi kebutuhan pendidikan yang semakin beragam. Manajer pendidikan yang terampil dan berpengetahuan berperan kunci dalam mengarahkan perubahan positif dan meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh negeri, sehingga mendukung pembangunan pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

BAB IV
KONSEP DAN HAKEKAT DASAR MANAJEMEN PENDIDIKAN

Manajemen pendidikan merupakan salah satu bidang kajian yang sangat penting dalam dunia pendidikan, karena ia berfungsi sebagai kerangka kerja yang mengatur seluruh proses dan interaksi antara berbagai komponen pendidikan. Sebagai suatu disiplin ilmu, manajemen pendidikan menggabungkan prinsip-prinsip dari berbagai bidang ilmu lainnya, seperti manajemen umum, psikologi, sosiologi, dan pendidikan, untuk menciptakan suatu sistem yang efektif dalam mengelola sumber daya pendidikan. Tujuan utama dari manajemen pendidikan adalah untuk memastikan bahwa semua sumber daya yang tersedia, baik manusia, material, maupun finansial, dapat dimanfaatkan secara optimal guna mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Manajemen pendidikan tidak hanya sekedar proses administratif, tetapi juga mencakup aspek-aspek strategis dan dinamis dalam pengelolaan pendidikan. Makmur (2008) mengemukakan bahwa manajemen sebagai suatu ilmu tidak bersifat absolut, melainkan berada dalam ranah kebenaran empiris yang memungkinkan terjadinya diskusi dan pengembangan konsep secara terus-menerus. Artinya, manajemen pendidikan selalu terbuka untuk interpretasi dan adaptasi sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pendidikan yang terus berubah. Hal ini memungkinkan para praktisi dan akademisi untuk terus melakukan kajian ilmiah yang bertujuan menggali kebenaran-kebenaran baru dalam ilmu manajemen pendidikan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

Dalam praktiknya, manajemen pendidikan melibatkan serangkaian proses kerjasama yang sistematis dan terstruktur antara berbagai komponen pendidikan. Komponen-komponen ini mencakup segala aspek mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan pendidikan. Semua proses ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan membentuk suatu sistem yang berfungsi secara keseluruhan untuk mencapai tujuan pendidikan. Sebagai contoh, perencanaan pendidikan tidak akan efektif tanpa adanya pengorganisasian yang baik, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, manajemen pendidikan berfungsi sebagai penghubung yang menyelaraskan semua proses tersebut agar berjalan dengan efisien dan efektif.

Konsep manajemen pendidikan telah banyak dikemukakan oleh para ahli dalam berbagai perspektif ilmu manajemen dan pendidikan. Meskipun terdapat perbedaan dalam cara pandang dan pendekatan analisis, pada dasarnya para ahli sepakat bahwa manajemen pendidikan adalah sebuah proses yang melibatkan kerjasama (interaksi) antar komponen pendidikan untuk memanfaatkan sumber daya secara optimal guna mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam konteks ini, manajemen pendidikan tidak hanya berfokus pada pengelolaan sumber daya manusia, tetapi juga mencakup pengelolaan lingkungan pendidikan, baik internal maupun eksternal. Lingkungan internal meliputi segala sesuatu yang ada di dalam institusi pendidikan itu sendiri, seperti guru, siswa, kurikulum, dan fasilitas pendidikan. Sementara itu, lingkungan eksternal mencakup faktor-faktor di luar institusi pendidikan yang dapat mempengaruhi jalannya proses pendidikan, seperti kebijakan pemerintah, kondisi sosial-ekonomi, dan teknologi.

Manajemen pendidikan juga memainkan peran penting dalam menghadapi tantangan-tantangan global yang semakin kompleks. Di era globalisasi saat ini, pendidikan tidak lagi hanya tentang transfer

pengetahuan, tetapi juga tentang bagaimana membekali peserta didik dengan keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk bersaing di tingkat global. Oleh karena itu, manajemen pendidikan harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, baik dalam hal kurikulum, metode pengajaran, maupun penggunaan teknologi dalam proses pendidikan. Dengan demikian, manajemen pendidikan tidak hanya berfungsi untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, tetapi juga untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan relevan dengan kebutuhan zaman dan dapat membantu peserta didik untuk berkembang secara holistik.

Kajian mengenai manajemen pendidikan juga menekankan pentingnya keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam proses pendidikan. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, institusi pendidikan, guru, siswa, orang tua, dan masyarakat luas. Oleh karena itu, manajemen pendidikan harus mampu mengintegrasikan semua elemen tersebut dalam suatu sistem yang kohesif dan sinergis. Diskusi dan kajian ilmiah dalam bidang ini sangat diperlukan untuk terus menggali dan menemukan pendekatan-pendekatan baru yang dapat meningkatkan kualitas manajemen pendidikan di Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh berbagai ahli, manajemen pendidikan harus dilihat sebagai proses dinamis yang selalu berkembang dan menuntut penyesuaian terus-menerus dengan kondisi yang ada.

A. **Konseptualisasi Manajemen Pendidikan**

Manajemen pendidikan adalah bidang yang vital dalam dunia pendidikan, karena ia berfungsi sebagai kerangka kerja yang mengatur seluruh proses interaksi antara berbagai komponen pendidikan. Secara etimologis, kata "manajemen" berasal dari bahasa Italia "maneggio," yang diadopsi dari bahasa Latin "managiare," yang berarti "mengatur" atau "mengelola." Istilah ini berakar dari kata "manus," yang berarti "tangan," yang menggambarkan fungsi dasar manajemen sebagai

pengaturan atau penataan. Sejalan dengan asal-usul kata ini, manajemen sering diartikan sebagai proses pengaturan yang melibatkan berbagai aspek, seperti apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, kapan melakukannya, dan apa yang dihasilkan dari proses tersebut. Dengan kata lain, manajemen mencakup tiga substansi dasar: proses, tugas, dan produk, yang kesemuanya saling berkaitan dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Di sisi lain, pendidikan sebagai sebuah konsep juga memiliki akar yang dalam. Kata "pendidikan" berasal dari bahasa Yunani "paidagogia," yang berarti pengasuhan atau pergaulan dengan anak-anak. Dalam perkembangannya, kata ini menjadi "pedagogy" dalam bahasa Inggris, yang diartikan sebagai seni atau ilmu mengajar anak-anak. Pendidikan juga dapat dipahami sebagai upaya untuk menumbuhkembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak-anak atau peserta didik. Menurut Langeveld, sebagaimana dikutip oleh Rahmat (2018), pendidikan adalah proses pemberian bimbingan dari orang dewasa kepada mereka yang memerlukannya. Sementara itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik mengembangkan potensi dirinya secara aktif, sehingga mereka memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh diri mereka sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara.

Jika kita menggabungkan kedua konsep ini, manajemen pendidikan dapat dideskripsikan sebagai proses pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang sistematis dan terencana. Pengelolaan pendidikan melibatkan pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan, sehingga proses pendidikan dapat

berlangsung secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Penyelenggaraan pendidikan, di sisi lain, adalah kegiatan pelaksanaan berbagai komponen dalam sistem pendidikan di berbagai satuan atau program pendidikan, sehingga proses pendidikan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Dalam konteks ini, manajemen pendidikan tidak hanya berfungsi untuk mengelola sumber daya (manusia, material, dan finansial), tetapi juga untuk memastikan bahwa semua elemen dalam sistem pendidikan berfungsi secara sinergis dan harmonis.

Manajemen pendidikan juga harus dilihat sebagai proses yang dinamis dan terus berkembang. Sebagai suatu disiplin ilmu, manajemen pendidikan tidak bersifat statis, tetapi selalu terbuka untuk perubahan dan adaptasi sesuai dengan kebutuhan zaman. Makmur (2008) menyatakan bahwa manajemen sebagai ilmu tidak bersifat absolut, tetapi berada dalam ranah kebenaran empiris yang memungkinkan terjadinya diskusi dan pengembangan konsep secara terus-menerus. Ini berarti bahwa manajemen pendidikan harus selalu siap untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan teknologi yang mempengaruhi dunia pendidikan. Dengan demikian, manajemen pendidikan tidak hanya berfokus pada pencapaian efisiensi dan efektivitas, tetapi juga pada relevansi dan responsivitas terhadap tantangan-tantangan baru yang muncul.

Dalam praktiknya, manajemen pendidikan melibatkan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mengintegrasikan sumber daya manusia, material, dan finansial yang tersedia, dengan tujuan untuk mencapai hasil pendidikan yang optimal. Ini mencakup perencanaan yang matang, pengorganisasian yang efektif, pelaksanaan yang efisien, serta evaluasi yang berkelanjutan. Semua kegiatan ini harus dilakukan dalam kerangka kerja yang jelas dan terstruktur, sehingga tujuan pendidikan dapat dicapai secara efisien dan efektif. Permadi dan Arifin (2010) menekankan bahwa manajemen pendidikan melibatkan

pengarahan, pengendalian, dan manajemen seluruh aspek sekolah, termasuk administrasi bisnis, karena semua aspek kegiatan sekolah pada dasarnya bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam hal ini, manajemen pendidikan juga mencakup koordinasi berbagai kekuatan yang diperlukan untuk menciptakan pengajaran yang berkualitas bagi semua siswa, melalui perencanaan yang sistematis dan terkoordinasi dengan baik.

Mulyasa (2004) menambahkan bahwa manajemen pendidikan adalah proses penyatuan segala sumber daya (manusia dan material) dalam proses pembelajaran yang efektif dan fungsional. Ini berarti bahwa manajemen pendidikan tidak hanya mengelola sumber daya, tetapi juga mengintegrasikan berbagai elemen dalam proses pembelajaran untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pemahaman ini sejalan dengan pandangan Amadi (2008), yang menyatakan bahwa manajemen pendidikan adalah proses yang menghubungkan layanan pembelajaran dengan hasil akhir dari proses pendidikan di satuan pendidikan. Dalam pandangan ini, manajemen pendidikan berfungsi sebagai penghubung antara proses pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan.

Menurut Kimani (2014), manajemen adalah proses bekerja dengan dan melalui kelompok atau individu untuk mencapai tujuan organisasi. Administrasi, di sisi lain, berhubungan dengan pengarahan dan pengendalian kehidupan dalam suatu sistem sosial, serta penetapan kebijakan yang menjadi panduan dalam pengambilan keputusan. Manajemen, dalam hal ini, berfokus pada implementasi dari kebijakan tersebut. Van Fleet dan Peterson dalam Kimani (2013) meninjau manajemen pendidikan sebagai rangkaian aktivitas yang diarahkan pada penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen pendidikan, dalam hal ini, harus mampu mengatasi berbagai tantangan yang muncul dari

lingkungan yang berubah, sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, manajemen pendidikan memiliki beberapa dimensi dasar yang harus diperhatikan. Pertama, kerangka struktural yang mencakup penetapan tujuan serta proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Kedua, sumber daya manusia dan material yang harus dikelola secara sinergis dalam proses kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan. Ketiga, dimensi politik yang melibatkan strategi dan cara-cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keempat, budaya kinerja dalam organisasi, yang diartikan sebagai tindakan yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Menurut Okumbe (dalam Kimani, 2013), manajemen pendidikan adalah proses memperoleh dan mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Dalam konteks ini, terdapat proses bimbingan, kepemimpinan, dan pengendalian atas semua upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan. Dimensi keterhubungan tersebut terlihat sebagaimana gambar berikut:

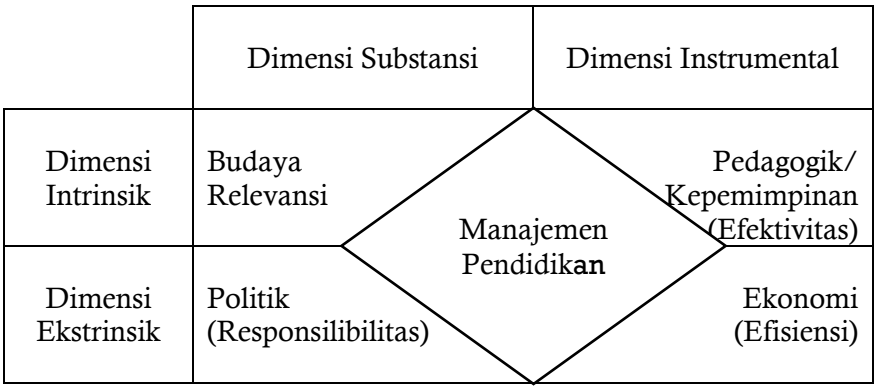

Gambar 3. Dimensi Manajemen Pendidikan
(Adaptasi dari, Amadi, 2008).

Perspektif ini menunjukkan bahwa manajemen pendidikan harus dilihat sebagai suatu sistem yang mengintegrasikan berbagai elemen dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Sistem ini harus mampu menciptakan sinergi antara berbagai komponen pendidikan, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Kythreorits (2012) menekankan bahwa manajemen dan kepemimpinan pendidikan harus berfokus pada tujuan pendidikan. Jika hubungan antara tujuan dan manajemen tidak jelas dan erat, ada risiko bahwa manajemen hanya akan menekankan prosedur tanpa memperhatikan tujuan dan nilai-nilai pendidikan.

Dalam kajian manajemen pendidikan, terdapat berbagai fenomena yang dapat diidentifikasi, seperti manajemen pendidikan sebagai ilmu, seni, pengorganisasian, perseorangan, dan disiplin. Sebagai ilmu, manajemen pendidikan berfokus pada pengembangan filosofi, teori, prinsip, dan praktik yang dapat diterapkan dalam pengelolaan pendidikan di berbagai tingkatan kelembagaan. Sebagai seni, manajemen pendidikan melibatkan pemberdayaan sumber daya manusia dan kelembagaan dalam hubungan interaksi, delegasi otoritas, komunikasi, dan pengambilan keputusan untuk mencapai perubahan yang positif. Sebagai pengorganisasian, manajemen pendidikan menciptakan struktur formal untuk memberdayakan visi, misi, strategi, dan aksi dalam tata kelola pendidikan. Sebagai proses perseorangan, manajemen pendidikan memungkinkan individu untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam mengelola pendidikan. Terakhir, sebagai disiplin, manajemen pendidikan menjadi bidang studi yang mempelajari proses pengelolaan pendidikan secara empiris dan rasional.

Manajemen pendidikan yang efektif memerlukan keterlibatan semua komponen pendidikan dalam suatu sistem pengelolaan yang erat kaitannya dengan aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi. Manajemen ini harus dapat menumbuhkan budaya yang

kondusif untuk kemajuan pendidikan, serta menciptakan struktur internal yang mendukung komunikasi dan hubungan hierarkis dalam kelembagaan pendidikan. Semua ini menunjukkan bahwa manajemen pendidikan adalah bidang yang kompleks dan dinamis, yang membutuhkan pendekatan yang holistik dan komprehensif untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan.

B. Sifat dan Dimensi Manajemen Pendidikan

Manajemen pendidikan merupakan suatu disiplin ilmu yang sangat penting dalam mengelola dan mengarahkan seluruh aspek pendidikan agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum, manajemen pendidikan dapat dikonsepsikan sebagai proses yang berkesinambungan yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap berbagai komponen pendidikan. Proses ini tidak hanya dilakukan sekali, tetapi terus menerus diperbaharui dan disempurnakan untuk memastikan bahwa pendidikan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Pada intinya, manajemen pendidikan melibatkan pengelolaan sumber daya manusia dan material untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Sumber daya manusia dalam konteks ini mencakup tidak hanya pendidik dan tenaga kependidikan, tetapi juga peserta didik, orang tua, dan masyarakat luas yang terlibat dalam proses pendidikan. Sementara itu, sumber daya material mencakup segala sesuatu yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran, mulai dari sarana dan prasarana pendidikan hingga sumber daya finansial yang mendanai berbagai program dan kegiatan pendidikan.

Pada intinya, manajemen pendidikan melibatkan pengelolaan sumber daya manusia dan material untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Sumber daya manusia dalam konteks ini mencakup tidak hanya pendidik dan tenaga kependidikan, tetapi juga peserta didik,

orang tua, dan masyarakat luas yang terlibat dalam proses pendidikan. Sementara itu, sumber daya material mencakup segala sesuatu yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran, mulai dari sarana dan prasarana pendidikan hingga sumber daya finansial yang mendanai berbagai program dan kegiatan pendidikan.

Lebih jauh, manajemen pendidikan juga berfungsi sebagai wahana pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik manajemen yang didasarkan pada hasil-hasil penelitian. Melalui penelitian, berbagai konsep, metodologi, dan strategi baru dapat dikembangkan dan diimplementasikan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Hal ini memungkinkan manajemen pendidikan untuk terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan pendidikan, baik secara lokal maupun global.

Esensi dari manajemen pendidikan terletak pada kemampuannya untuk menciptakan sinergi antara semua komponen pendidikan. Sinergi ini penting untuk memastikan bahwa semua sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan pendidikan. Selain itu, manajemen pendidikan selalu berorientasi pada pencapaian tujuan, baik itu tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk mencapai tujuan ini, manajemen pendidikan harus melibatkan proses perencanaan yang matang, pengorganisasian yang efektif, pengarahan yang jelas, dan pengendalian yang ketat terhadap semua aspek pendidikan.

Implementasi manajemen pendidikan dalam praktiknya mencakup distribusi kewenangan dan tugas kepada berbagai komponen yang terlibat dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Misalnya, kepala sekolah bertanggung jawab atas pengelolaan keseluruhan sekolah, sementara guru-guru bertanggung jawab atas pelaksanaan kurikulum dan proses pembelajaran di kelas. Di tingkat yang lebih luas, pemerintah pusat dan daerah juga memiliki

peran penting dalam merumuskan kebijakan pendidikan, menyediakan dana, dan memastikan bahwa semua satuan pendidikan dapat beroperasi dengan baik.

Manajemen pendidikan juga bersifat multidimensional dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dimensi-dimensi ini mencakup kurikulum dan proses pembelajaran, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, partisipasi masyarakat, serta budaya dan lingkungan pendidikan. Semua dimensi ini harus dikelola dengan baik agar pendidikan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Selain itu, manajemen pendidikan juga harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan satuan pendidikan, dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan.

Kebijakan pendidikan yang menjadi dasar manajemen pendidikan harus mengamanatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan, serta penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan transparansi. Kebijakan ini menjadi landasan bagi manajemen pendidikan dalam mengarahkan semua upaya dan sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dengan kebijakan yang tepat, manajemen pendidikan dapat memastikan bahwa semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka.

Sebagai penutup, manajemen pendidikan bukan hanya tentang mengelola dan mengorganisir sumber daya, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif bagi perkembangan peserta didik. Manajemen pendidikan yang efektif harus mampu mengintegrasikan berbagai elemen dalam sistem pendidikan, sehingga semua komponen dapat bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan demikian,

manajemen pendidikan menjadi kunci dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

C. Tujuan dan Manfaat Manajemen Pendidikan

Manajemen pendidikan adalah elemen krusial dalam sistem pendidikan yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aspek pendidikan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai proses yang kompleks, manajemen pendidikan tidak hanya berfokus pada pencapaian tujuan pendidikan, tetapi juga pada bagaimana mengelola seluruh sumber daya yang ada—baik manusia maupun material—dengan cara yang paling efektif dan efisien. Fattah (2012) menyoroti beberapa tujuan utama dari manajemen pendidikan, termasuk terciptanya suasana belajar yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Suasana belajar seperti ini diharapkan dapat mendorong peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka secara optimal, yang mencakup aspek spiritual, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang berguna bagi diri mereka sendiri, masyarakat, dan negara.

Manajemen pendidikan juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa tenaga pendidik dan kependidikan dapat mencapai salah satu dari empat kompetensi yang diharapkan, yakni kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Kompetensi ini bukan hanya penting bagi pengembangan individu pendidik, tetapi juga bagi keseluruhan kualitas pendidikan yang mereka sampaikan. Dalam konteks ini, manajemen pendidikan berfungsi sebagai sarana untuk mengintegrasikan teori dan praktik administrasi pendidikan ke dalam proses pengajaran, sehingga dapat mengatasi berbagai tantangan terkait mutu pendidikan.

Selain itu, manajemen pendidikan harus dipahami sebagai suatu sistem yang bersifat multiaksi, multidimensi, dan melibatkan banyak pemangku kepentingan (multistakeholders). Sistem ini mencakup

berbagai elemen yang saling terkait, mulai dari pengelolaan kebijakan dan regulasi hingga implementasi program di lapangan. Dalam operasionalisasinya, manajemen pendidikan perlu fokus pada peningkatan dan penguatan kerangka peraturan serta kebijakan pendidikan. Ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan pencapaian tujuan pendidikan, tetapi juga untuk menetapkan skala prioritas kegiatan yang harus dilakukan dalam proses pendidikan.

Entitas kelembagaan dalam manajemen pendidikan juga memainkan peran kunci dalam mencapai tujuan pendidikan. Struktur organisasi yang jelas, dengan pembagian tugas pokok dan fungsi yang tepat, sangat penting untuk mendukung proses manajemen pendidikan yang efektif. Proses ini mencakup pengembangan prosedur kerja yang efisien, mekanisme kerja yang terkoordinasi, serta hubungan dan jaringan kerja sama yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sekolah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan demikian, manajemen pendidikan tidak hanya berfungsi dalam ruang lingkup internal sekolah, tetapi juga harus mampu menjalin sinergi dengan elemen-elemen eksternal yang berperan dalam mendukung pendidikan.

Pengelolaan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia maupun material, adalah aspek lain yang sangat penting dalam manajemen pendidikan. Sumber daya ini harus dikelola secara proporsional melalui pola interaksi dan sinergitas yang telah ditetapkan dalam sistem kelembagaan. Dalam hal ini, manajemen pendidikan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua sumber daya digunakan dengan cara yang paling efektif untuk mencapai tujuan pendidikan. Ini termasuk pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan, pengembangan sarana dan prasarana, serta pembiayaan pendidikan yang efisien.

Manfaat yang diharapkan dari manajemen pendidikan sangat luas dan mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan efektivitas

dan efisiensi pengelolaan pendidikan hingga produktivitas dan kolaborasi antar berbagai komponen manajemen pendidikan. Implementasi manajemen pendidikan yang baik diharapkan dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih terkoordinasi dan terintegrasi, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Dalam hal in-put pendidikan, manajemen pendidikan harus memastikan bahwa kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu pendidikan sudah jelas dan diterapkan dengan baik. Ini juga mencakup ketersediaan sumber daya manusia dan material yang diperlukan untuk mendukung proses pendidikan, serta kejelasan mengenai hasil yang ingin dicapai. Fokus yang kuat pada proses pendidikan dan pembelajaran adalah kunci untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan ini dapat tercapai.

Proses pendidikan itu sendiri harus didukung oleh program-program yang telah dipersiapkan dengan baik, termasuk pengembangan kurikulum, pengaturan peserta didik, serta pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Manajemen pendidikan juga harus memperkuat sarana dan prasarana sekolah, serta membangun hubungan kerja sama yang baik dengan masyarakat. Semua ini harus dilakukan dalam kerangka penciptaan budaya dan lingkungan pendidikan yang kondusif, yang akan mendukung proses pembelajaran yang efektif.

Output dari manajemen pendidikan yang baik seharusnya dapat dilihat dari peningkatan angka partisipasi pendidikan, pemerataan mutu layanan pendidikan, serta peningkatan relevansi dan tata kelola pelayanan pendidikan. Dengan demikian, manajemen pendidikan tidak hanya berfokus pada proses, tetapi juga pada hasil yang dicapai, yang mencerminkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Selain itu, manajemen pendidikan harus mampu mengimplementasikan peningkatan kompetensi kepemimpinan, kolaborasi antar elemen

masyarakat, dan peningkatan infrastruktur serta pemanfaatan teknologi di seluruh satuan pendidikan. Perbaikan kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan juga merupakan aspek penting yang harus diperhatikan, bersama dengan penyempurnaan kurikulum, pedagogi, dan asesmen, seperti yang dinyatakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud, 2020).

Dengan pendekatan yang komprehensif ini, manajemen pendidikan dapat berfungsi sebagai alat yang efektif untuk menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan zaman. Ini menuntut adanya kolaborasi yang kuat antara semua pihak yang terlibat, serta komitmen yang tinggi untuk terus meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

D. **Peran dan Fungsi Manajemen Pendidikan**

1. Peran Manajemen Pendidikan

Manajemen pendidikan merupakan sebuah disiplin yang esensial dalam memastikan bahwa seluruh proses pendidikan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Usman (2006) mendefinisikan manajemen pendidikan sebagai upaya pengelolaan sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, manajemen pendidikan tidak hanya tentang mengelola aspek operasional sehari-hari dari institusi pendidikan, tetapi juga tentang bagaimana mengoptimalkan semua sumber daya yang ada untuk mencapai hasil yang maksimal dalam konteks pendidikan.

Secara lebih luas, manajemen pendidikan dapat dipahami sebagai administrasi sistem pendidikan yang mencakup berbagai elemen seperti pengetahuan, keterampilan, nilai, keyakinan, kebiasaan, dan sikap yang diperoleh melalui pengalaman belajar. Connolly (2017) dan National Institute of Education (NIE, 2018) menekankan bahwa manajemen pendidikan melibatkan perencanaan,

pengorganisasian, pengawasan, dan penerapan strategi yang diperlukan untuk mengoperasikan sistem pendidikan secara keseluruhan. Ini berarti bahwa manajemen pendidikan berfungsi sebagai kerangka kerja yang mengarahkan bagaimana sumber daya manusia dan material dapat digunakan secara efektif untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang produktif.

Dalam perspektif ini, manajemen pendidikan tidak hanya berfokus pada pengelolaan sumber daya fisik seperti dana dan fasilitas, tetapi juga mencakup pengelolaan sumber daya manusia, yaitu tenaga pendidik dan peserta didik. Tujuan utama dari manajemen pendidikan adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di mana semua pemangku kepentingan, termasuk guru, siswa, dan masyarakat, dapat berkontribusi secara maksimal. Tasić (2011) menekankan bahwa peran manajemen pendidikan adalah menciptakan iklim kerja yang positif, yang pada gilirannya akan mendorong partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat dalam sistem pendidikan.

Manajemen pendidikan juga memiliki dimensi yang lebih luas, termasuk dimensi ekonomi, pedagogis, politik, dan budaya. Dimensi ekonomi mencakup pengelolaan keuangan dan sumber daya material yang diperlukan untuk menjalankan institusi pendidikan. Ini mencakup pengelolaan anggaran, alokasi sumber daya, dan pengawasan penggunaan dana untuk memastikan bahwa semua sumber daya digunakan dengan cara yang paling efisien dan efektif. Selain itu, dimensi ekonomi juga berkaitan dengan bagaimana institusi pendidikan dapat menjadi lebih produktif dengan mengadopsi norma-norma birokrasi yang efisien, struktur kelembagaan yang jelas, dan mekanisme kerja yang baik.

Dimensi pedagogis dari manajemen pendidikan berfokus pada aspek-aspek inti dari pengajaran dan pembelajaran. Ini mencakup perencanaan dan implementasi kurikulum, pengelolaan peserta didik,

serta peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan. Dimensi ini juga mencakup upaya untuk meningkatkan akses ke pendidikan bagi semua lapisan masyarakat dan untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan relevan dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Melalui pengelolaan yang baik dalam dimensi pedagogis, manajemen pendidikan dapat membantu menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan responsif terhadap perubahan sosial.

Sementara itu, dimensi politik dalam manajemen pendidikan mencakup hubungan antara institusi pendidikan dengan pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Dimensi ini mencakup bagaimana kebijakan pendidikan diimplementasikan di tingkat lokal dan nasional, serta bagaimana akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang baik dapat diterapkan dalam pengelolaan pendidikan. Dalam konteks ini, manajemen pendidikan juga harus mempertimbangkan berbagai kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap pihak yang terlibat dalam sistem pendidikan.

Dimensi budaya dalam manajemen pendidikan melibatkan pengelolaan pendidikan dalam konteks sosial dan budaya yang lebih luas. Ini mencakup upaya untuk menumbuhkan nilai-nilai moral dan budaya kerja yang produktif di dalam lingkungan pendidikan. Dimensi budaya juga mencakup perbaikan persepsi, pola pikir, dan pola tindakan dalam pengelolaan pendidikan, serta upaya untuk meningkatkan citra publik dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan. Manajemen pendidikan dalam dimensi budaya berperan penting dalam membentuk lingkungan pendidikan yang mendukung pengembangan karakter dan nilai-nilai sosial yang positif.

Secara keseluruhan, manajemen pendidikan adalah sebuah proses yang kompleks dan multidimensional yang melibatkan berbagai aspek dari sistem pendidikan. Peran manajemen pendidikan adalah

untuk memastikan bahwa semua komponen dalam sistem pendidikan bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan pendekatan yang holistik, manajemen pendidikan dapat membantu menciptakan sistem pendidikan yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini juga memastikan bahwa pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk karakter, nilai-nilai sosial, dan keterampilan yang diperlukan untuk sukses dalam kehidupan.

2. Fungsi Manajemen Pendidikan

Manajemen pendidikan adalah sebuah disiplin yang kompleks dan multidimensional, yang berperan penting dalam memastikan bahwa sistem pendidikan berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Konsep manajemen pendidikan mencakup berbagai praktik pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Menurut Usman (2006), manajemen pendidikan melibatkan pengelolaan sumber daya yang ada dalam pendidikan, termasuk sumber daya manusia, material, dan finansial, untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam lingkungan pendidikan. Dalam konteks ini, manajemen pendidikan bertindak sebagai kerangka kerja yang mengintegrasikan berbagai komponen pendidikan sehingga dapat bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan bersama.

Salah satu elemen utama dalam manajemen pendidikan adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia dalam pendidikan mencakup peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, serta masyarakat yang berperan sebagai pengguna layanan pendidikan. Keberhasilan manajemen pendidikan sangat bergantung pada bagaimana setiap komponen sumber daya manusia ini dikelola dan diintegrasikan dalam proses pendidikan. Sebagai contoh, pendidik dan tenaga kependidikan harus memiliki keterampilan dan pengetahuan

yang memadai untuk mengelola proses belajar-mengajar secara efektif, sementara peserta didik harus diberdayakan untuk mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Selain itu, masyarakat juga memainkan peran penting dalam mendukung dan mengawasi kualitas pendidikan yang diberikan.

Selain sumber daya manusia, manajemen pendidikan juga mencakup pengelolaan sumber pendidikan, seperti kurikulum, proses pembelajaran, serta budaya dan lingkungan pendidikan. Kurikulum merupakan fondasi dari setiap sistem pendidikan, yang menetapkan apa yang harus diajarkan dan bagaimana pengajaran tersebut harus dilakukan. Proses pembelajaran, di sisi lain, adalah implementasi dari kurikulum, yang melibatkan interaksi antara pendidik dan peserta didik. Budaya dan lingkungan pendidikan juga sangat penting dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif. Lingkungan yang positif dan mendukung dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik dan membantu mereka mencapai hasil yang lebih baik.

Fasilitas dan sumber pendanaan merupakan elemen penting lainnya dalam manajemen pendidikan. Fasilitas mencakup segala bentuk infrastruktur dan sarana yang mendukung proses pendidikan, seperti gedung sekolah, laboratorium, perpustakaan, dan peralatan teknologi. Sumber pendanaan, baik dari pemerintah, masyarakat, atau sektor swasta, diperlukan untuk memastikan bahwa fasilitas ini dapat disediakan dan dipelihara dengan baik. Selain itu, pendanaan juga diperlukan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pendidikan, termasuk pelatihan guru, pengembangan kurikulum, serta program kesejahteraan peserta didik.

Manajemen pendidikan juga melibatkan proses pengambilan keputusan yang berkelanjutan dan strategis. LPU (2012) menggambarkan manajemen sebagai kumpulan proses yang mencakup pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan perencanaan tindakan. Dalam konteks pendidikan, proses ini

mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan pendidikan adalah langkah pertama dalam manajemen pendidikan, di mana tujuan pendidikan ditetapkan dan strategi untuk mencapainya dirumuskan. Perencanaan ini sangat penting karena membantu mengidentifikasi tantangan dan peluang yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan dan memungkinkan manajer pendidikan untuk merumuskan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasinya.

Pengorganisasian dalam manajemen pendidikan melibatkan pengaturan dan distribusi sumber daya, tugas, dan tanggung jawab di antara anggota organisasi pendidikan. Dawson (2002) menyatakan bahwa pengorganisasian adalah proses untuk mempersiapkan pelaksanaan keputusan yang dihasilkan dari perencanaan. Ini mencakup pembentukan struktur organisasi yang jelas, penetapan peran dan tanggung jawab, serta pengembangan mekanisme komunikasi dan koordinasi yang efektif. Pengorganisasian yang baik memastikan bahwa semua anggota organisasi pendidikan memahami peran mereka dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan adalah langkah berikutnya dalam manajemen pendidikan, yang melibatkan implementasi rencana dan strategi yang telah dirumuskan. Pelaksanaan mencakup berbagai kegiatan operasional yang dilakukan untuk menjalankan program dan kegiatan pendidikan. Bateman dan Snell (2007) menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang kemampuan dan potensi bawahan dalam pelaksanaan manajemen pendidikan. Seorang manajer pendidikan harus mampu mengorganisasikan sumber daya manusia secara efektif, memotivasi mereka, dan memastikan bahwa setiap orang bekerja menuju tujuan yang sama.

Pengawasan merupakan elemen kunci terakhir dalam manajemen pendidikan. Pengawasan melibatkan pengendalian,

evaluasi, dan supervisi terhadap seluruh proses pendidikan. Carpenter et al. (2012) menjelaskan bahwa pengawasan mencakup tiga langkah utama: menetapkan standar kinerja, membandingkan kinerja aktual dengan standar, dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Pengawasan yang efektif memastikan bahwa proses pendidikan berjalan sesuai rencana dan bahwa setiap penyimpangan dari standar yang telah ditetapkan dapat segera diperbaiki. Kerangka kerja fungsi manajemen pendidikan dapat terlihat pada gambar berikut:

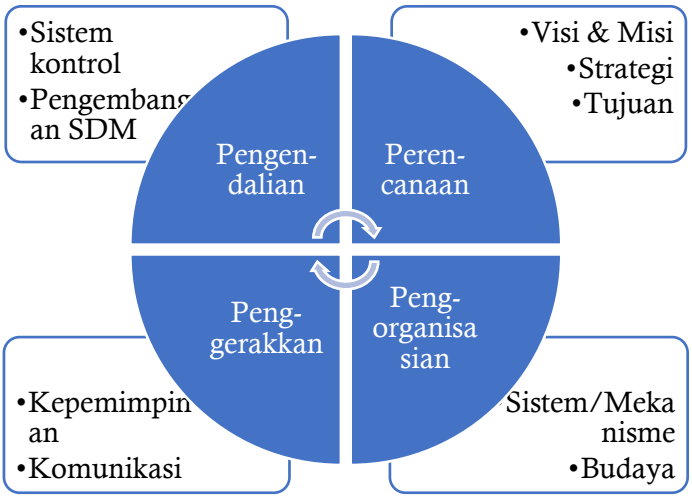

Gambar 4. Kerangka Kerja Manajemen

Dalam keseluruhan prosesnya, manajemen pendidikan bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang efisien, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ini melibatkan pengintegrasian berbagai komponen pendidikan dalam sebuah sistem yang koheren dan sinergis, di mana setiap elemen bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, manajemen pendidikan dapat membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan kualitas

pendidikan, dan memastikan bahwa hasil pendidikan yang diinginkan dapat tercapai. Gambar berikut menjelaskan mengenai kerangka kerja manajemen pendidikan.

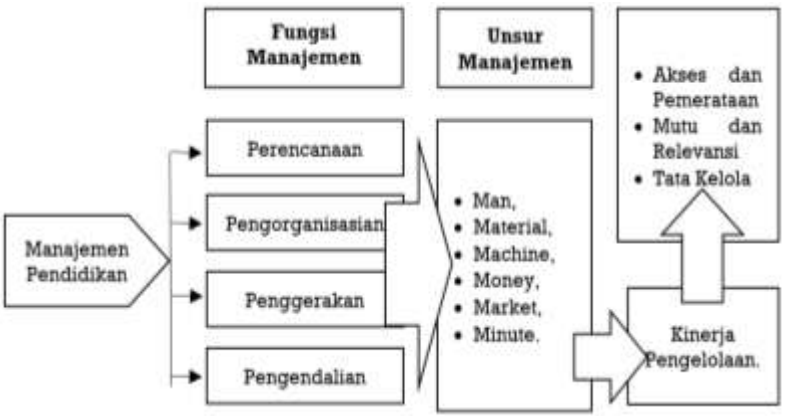

Gambar 5. Kerangka Kerja Manajemen Pendidikan

E. **Prinsip-prinsip dan Ruang Lingkup Manajemen Pendidikan**

1. Prinsip-prinsip Manajemen Pendidikan

Manajemen pendidikan sebagai disiplin keilmuan dan praktik kelembagaan merupakan fondasi penting dalam membangun sistem pendidikan yang efektif dan berkelanjutan. Disiplin ini tidak hanya terbatas pada pengaturan teknis atau administrasi, tetapi juga mencakup pendekatan yang lebih holistik terhadap pengelolaan semua aspek pendidikan. Manajemen pendidikan berfungsi sebagai kerangka kerja yang mengintegrasikan berbagai elemen penting seperti perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Fattah (2012) menegaskan bahwa manajemen pendidikan melibatkan pengelolaan sumber daya manusia, struktur kelembagaan, proses interaksi dan komunikasi,

pendelegasian wewenang, serta evaluasi kinerja pada berbagai tingkat kelembagaan dan satuan pendidikan.

Dalam ranah kelembagaan, manajemen pendidikan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap komponen dalam sistem pendidikan berfungsi secara sinergis menuju pencapaian tujuan yang diharapkan. Ini mencakup kejelasan dalam struktur organisasi dan kinerja, penentuan yang tepat atas tugas pokok dan fungsi, serta pengaturan prioritas dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Manajemen pendidikan tidak hanya berfokus pada pengaturan input seperti kebijakan, tujuan, dan sasaran, tetapi juga berperan dalam mengelola proses yang kompleks seperti kepemimpinan, budaya, lingkungan, kewenangan, partisipasi, serta sistem pengawasan dan akuntabilitas. Semua ini dirancang untuk menghasilkan output yang tidak hanya efektif dan efisien tetapi juga responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.

Implementasi manajemen pendidikan yang efektif memerlukan penerapan prinsip-prinsip manajemen yang telah dirumuskan oleh para ahli, salah satunya seperti yang diuraikan oleh Fayol dalam karya Usman (2006). Prinsip kewenangan dan tanggung jawab, misalnya, menekankan pentingnya pemahaman yang jelas tentang tugas dan wewenang dalam pengelolaan pendidikan. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas, setiap anggota dalam organisasi pendidikan mengetahui peran masing-masing dan bagaimana kontribusi mereka berdampak pada pencapaian tujuan keseluruhan organisasi.

Prinsip kesatuan komando dan kesatuan arah juga vital dalam manajemen pendidikan. Prinsip ini menekankan pentingnya adanya struktur hirarkis dan kepemimpinan yang jelas, sehingga setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh organisasi pendidikan sejalan dengan kebijakan dan tujuan yang telah ditetapkan. Rantai komando yang terdefinisi dengan baik membantu menjaga agar

struktur organisasi tetap terintegrasi dan memungkinkan implementasi keputusan secara konsisten di seluruh tingkat lembaga pendidikan.

Pembagian kerja yang efektif juga menjadi pilar penting dalam manajemen pendidikan. Prinsip ini memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab didistribusikan secara proporsional di antara berbagai tingkatan dalam pemerintahan dan satuan pendidikan, sehingga sinergi dan kolaborasi dapat tercapai. Disiplin dalam manajemen pendidikan diperlukan untuk memastikan konsistensi, komitmen, dan kepatuhan terhadap peraturan serta kebijakan yang telah ditetapkan, yang pada gilirannya membantu organisasi pendidikan berfungsi secara optimal dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Selain itu, manajemen pendidikan juga menekankan pentingnya subordinasi kepentingan pribadi demi kepentingan kelembagaan. Ini berarti bahwa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan program serta kegiatan pendidikan, kepentingan lembaga harus diutamakan di atas kepentingan individu. Prinsip ini penting untuk menciptakan keselarasan dalam organisasi, sehingga semua anggota berfokus pada pencapaian tujuan bersama.

Prinsip-prinsip seperti remunerasi dan sentralisasi juga merupakan bagian integral dari manajemen pendidikan. Remunerasi mengacu pada ketersediaan dan kecukupan anggaran untuk mendanai implementasi dan dampak dari pengelolaan pendidikan. Sentralisasi, di sisi lain, berfokus pada penciptaan sistem dan mekanisme pengelolaan yang sesuai dengan kebutuhan dan skala kendali kelembagaan, memastikan bahwa sumber daya dikelola dengan bijak dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan.

Secara keseluruhan, manajemen pendidikan bertujuan untuk menciptakan stabilitas manajerial yang berkelanjutan, dengan relevansi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Inisiatif untuk mendorong keterlibatan seluruh

komponen manajemen dalam merumuskan dan menjalankan program pendidikan sangat penting untuk menghadapi berbagai tantangan dan kendala yang mungkin muncul. Semangat kerja tim, atau esprit de corps, menjadi elemen kunci dalam manajemen pendidikan, di mana upaya kolektif dari seluruh pemangku kepentingan diarahkan untuk membangun sistem pengelolaan pendidikan yang harmonis, produktif, dan mampu beradaptasi dengan perubahan.

Dengan demikian, manajemen pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan tetapi juga sebagai proses dinamis yang terus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip manajemen pendidikan dan penerapannya secara konsisten dalam praktik kelembagaan dapat menjadi kunci sukses dalam menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan.

2. Ruang Lingkup Manajemen Pendidikan

Manajemen pendidikan adalah sebuah sistem yang kompleks dan dinamis, yang dirancang untuk mengatur dan mengelola keseluruhan proses pendidikan agar dapat berjalan dengan optimal. Sebagai kerangka kerja, manajemen pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga mencakup pemberdayaan, regulasi, dan pengawasan terhadap berbagai komponen dalam sistem pendidikan. Dalam konteks ini, manajemen pendidikan berfungsi sebagai fondasi yang memastikan bahwa semua elemen dalam sistem pendidikan, termasuk sumber daya manusia, struktur kelembagaan, dan hubungan kerjasama antar berbagai pihak, berjalan secara sinergis untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Manajemen pendidikan melibatkan berbagai praktik yang mencakup pengelolaan sumber daya, baik manusia maupun material. Ini mencakup peran dan fungsi yang berbeda, kewenangan dan otoritas yang jelas, serta hubungan kerjasama yang efektif antara semua

komponen dalam sistem pendidikan. Proses manajemen pendidikan terdiri dari beberapa tahap penting seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian. Setiap tahap ini berperan penting dalam memastikan bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dapat berlangsung dengan efektif, efisien, sistematis, dan produktif. Selain itu, manajemen pendidikan juga berperan dalam mengembangkan dan menanamkan nilai-nilai seperti tanggung jawab bersama, kesetaraan, kebebasan, serta pengakuan terhadap nilai-nilai kelembagaan yang berkembang secara profesional.

Secara lebih rinci, manajemen pendidikan dapat dipahami sebagai upaya untuk mengatur dan memberdayakan kapasitas pendidikan di berbagai tingkatan. Ini mencakup kebijakan pendidikan, struktur kelembagaan, serta pengelolaan sumber daya yang tersedia. Dalam konteks ini, manajemen pendidikan berfungsi untuk memastikan bahwa setiap elemen dalam sistem pendidikan bekerja secara sinergis dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pendidikan yang komprehensif. Sebagai contoh, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, manajemen pendidikan mencakup pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Ini melibatkan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat, semuanya bertujuan agar proses pendidikan dapat berjalan sesuai dengan tujuan nasional.

Lebih lanjut, manajemen pendidikan memiliki peran krusial dalam mengatur dan memastikan kelembagaan pendidikan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Ini mencakup jaminan akses atas layanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau. Selain itu, manajemen pendidikan juga fokus pada peningkatan mutu dan daya saing pendidikan, relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat, serta efektivitas, efisiensi, dan

akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan. Dengan demikian, manajemen pendidikan berfungsi sebagai kerangka regulasi yang memastikan semua elemen dalam sistem pendidikan bekerja sesuai dengan standar dan tujuan yang telah ditetapkan.

Aspek lain yang tidak kalah penting dalam manajemen pendidikan adalah penyelenggaraan pendidikan, yang meliputi berbagai jenis dan jenjang pendidikan, baik formal maupun nonformal. Dalam pendidikan formal, manajemen pendidikan mengatur fungsi dan tujuan pendidikan di berbagai tingkat, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi. Di sisi lain, pendidikan nonformal dan informal juga mendapat perhatian khusus, dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, serta pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus, seperti pendidikan jarak jauh dan pendidikan bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus.

Pengawasan dan pengendalian adalah elemen kunci dalam manajemen pendidikan. Pengawasan dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua proses pendidikan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pengawasan ini mencakup aspek administratif dan teknis edukatif, yang bertujuan untuk menjaga kualitas pendidikan dan memastikan kelancaran operasional pendidikan.

Manajemen pendidikan juga mengatur pemberian sanksi, yang merupakan mekanisme penting untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan regulasi yang ada. Sanksi ini dapat berupa penutupan satuan atau program pendidikan yang tidak memenuhi standar, serta sanksi administratif lainnya yang diberlakukan baik pada tingkat kelembagaan maupun individu. Dengan demikian, manajemen pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan

pendidikan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjaga integritas dan kualitas sistem pendidikan.

Secara keseluruhan, manajemen pendidikan adalah sebuah sistem yang komprehensif dan multifaset, yang mengintegrasikan berbagai aspek penting dari pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Melalui penerapan prinsip-prinsip manajemen yang efektif, manajemen pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan, tetapi juga untuk menciptakan sistem pendidikan yang berkelanjutan, responsif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Ini mencerminkan pentingnya manajemen pendidikan dalam memastikan bahwa sistem pendidikan mampu menghadapi tantangan zaman dan terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

F. Urgensi Manajemen Pendidikan

Manajemen pendidikan adalah fondasi penting dalam keberhasilan sistem pendidikan, berperan sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai komponen pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Sebagai sebuah sistem yang kompleks dan dinamis, manajemen pendidikan tidak hanya bertugas mengelola sumber daya yang ada, tetapi juga merancang dan mengimplementasikan strategi yang memastikan bahwa semua elemen pendidikan—mulai dari kurikulum, pendidik, hingga infrastruktur—dapat berfungsi secara sinergis. Tujuan utama dari manajemen pendidikan ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh proses pendidikan berjalan secara efektif, efisien, dan produktif, dengan hasil akhir yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Manajemen pendidikan menempati posisi krusial dalam penataan kebijakan, kelembagaan, dan sumber daya pendidikan. Penataan ini tidak hanya mencakup aspek administratif, tetapi juga berfokus pada bagaimana kebijakan pendidikan dapat diadaptasi dan

diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan lokal maupun global. Seperti yang dijelaskan oleh Suryadi (2018), keberhasilan dalam penataan ini sangat bergantung pada kemampuan sistem pendidikan untuk merespons tantangan yang terus berkembang, baik dari segi perubahan sosial, politik, maupun ekonomi. Dengan memperkuat fondasi kelembagaan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terlibat, manajemen pendidikan dapat memastikan bahwa tujuan pendidikan dapat dicapai secara efektif dan berkelanjutan.

Penerapan manajemen berbasis mutu merupakan langkah strategis yang tak terpisahkan dalam upaya meningkatkan kinerja dan hasil pendidikan. Pendekatan ini, sebagaimana disampaikan oleh Usman (2020), berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan melalui pengembangan standar mutu yang jelas dan terukur. Dalam konteks ini, manajemen pendidikan harus mampu mengidentifikasi dan mengatasi berbagai kendala yang dapat menghambat pencapaian mutu pendidikan, sambil terus mendorong inovasi dan pengembangan profesionalisme di lingkungan pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan ini juga memiliki implikasi yang luas, tidak hanya pada level nasional tetapi juga dalam meningkatkan daya saing lembaga pendidikan di kancah internasional.

Efisiensi dalam tata laksana pendidikan merupakan elemen yang sangat penting dalam manajemen pendidikan. Mulyasa (2019) menekankan bahwa untuk mencapai efisiensi, manajemen pendidikan harus mampu menyederhanakan sistem dan prosedur kerja, serta mengembangkan jaringan kerjasama yang efektif antar lembaga pendidikan. Efisiensi ini tidak hanya berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang ada, tetapi juga bagaimana sumber daya tersebut dapat dioptimalkan untuk memberikan hasil terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pendidikan. Dengan demikian, efisiensi ini menjadi kunci dalam menciptakan sistem pendidikan yang responsif dan berkelanjutan.

Peningkatan akuntabilitas dalam manajemen pendidikan juga menjadi prioritas yang tidak bisa diabaikan. Akuntabilitas ini mencakup seluruh aspek pengelolaan pendidikan, mulai dari penggunaan sumber daya hingga evaluasi kinerja. Arikunto (2021) menggarisbawahi pentingnya transparansi dalam pelaporan dan evaluasi kinerja, yang tidak hanya menjadi alat untuk mengukur pencapaian, tetapi juga sebagai mekanisme untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan. Akuntabilitas yang tinggi memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pendidikan memiliki tanggung jawab yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, kualitas pelayanan publik dalam pendidikan harus terus ditingkatkan. Sugiyono (2020) menegaskan bahwa pelayanan yang cepat, tepat, dan akuntabel adalah kunci untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi pengguna layanan pendidikan. Dalam hal ini, manajemen pendidikan harus mampu menciptakan sistem pelayanan yang tidak hanya efektif tetapi juga efisien, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Sistem pengawasan yang kuat juga merupakan bagian integral dari manajemen pendidikan. Pengawasan ini berfungsi untuk memastikan bahwa semua komponen pendidikan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Permadi (2021) menyoroti pentingnya optimalisasi pengawasan teknis dan administratif dalam pendidikan, yang bertujuan untuk menjaga kualitas dan konsistensi dalam pelaksanaan pendidikan di semua tingkatan.

Koordinasi dan komunikasi yang optimal antara berbagai tingkatan kelembagaan, masyarakat, dan satuan pendidikan menjadi faktor kunci dalam manajemen pendidikan yang sukses. Rahmat (2022) menjelaskan bahwa koordinasi yang baik memastikan bahwa semua program dan kegiatan pendidikan dapat dilaksanakan secara sinergis, menghindari tumpang tindih dan memastikan bahwa tujuan

pendidikan dapat dicapai dengan dukungan penuh dari seluruh elemen yang terlibat.

Dengan demikian, manajemen pendidikan bukan hanya sekadar menjalankan fungsi administratif, tetapi juga mencakup penciptaan lingkungan pendidikan yang adaptif dan inovatif, yang siap menghadapi tantangan masa depan. Dalam menghadapi dinamika perubahan yang terus berkembang, manajemen pendidikan harus terus berkembang dan beradaptasi, memastikan bahwa sistem pendidikan tetap relevan dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat modern.

BAB V
PENDEKATAN, MODEL DAN PROSES MANAJEMEN PENDIDIKAN

Manajemen pendidikan merupakan kerangka kerja yang kompleks dan strategis yang berfungsi untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan melalui pengelolaan sumber daya yang terstruktur, pemberdayaan budaya, dan penciptaan lingkungan pendidikan yang kondusif. Proses ini tidak hanya melibatkan serangkaian tindakan administratif, tetapi juga mengintegrasikan berbagai elemen yang saling berhubungan, seperti pengembangan tujuan, perencanaan yang matang, realisasi program-program pendidikan, serta pengorganisasian dan pengendalian secara efektif.

Menurut pandangan Al-Ababneh dan Alrhaimi (2020), manajemen dalam organisasi pendidikan harus diinstitusionalisasikan ke dalam sistem manajemen terpadu. Sistem ini tidak hanya mencakup aspek pendidikan, tetapi juga aktivitas penelitian dan organisasi yang memanfaatkan basis sumber daya yang ada untuk mencapai hasil berkualitas tinggi. Sistem manajemen terpadu ini memungkinkan pendidikan untuk berjalan secara efektif dan efisien, serta memberikan fleksibilitas yang diperlukan dalam menghadapi dinamika perubahan yang terjadi di lingkungan pendidikan.

Manajemen pendidikan yang efektif harus mampu mengadaptasi praktik-praktik terbaik yang terbukti berhasil di berbagai konteks. Ini termasuk penerapan filosofi dan kebijakan pendidikan yang jelas, yang dapat menavigasi kompleksitas sistem pendidikan dengan mempertimbangkan aspek efisiensi, efektivitas, dan produktivitas. Fokus pada optimalisasi penggunaan sumber daya sangat penting, karena dengan manajemen yang baik, sumber daya yang terbatas dapat

dimanfaatkan secara maksimal untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih luas.

Dalam proses manajemen pendidikan, berbagai komponen penting harus dikelola dengan baik. Kurikulum dan proses pembelajaran menjadi inti dari kegiatan pendidikan, di mana peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berperan sebagai pilar utama. Selain itu, sarana dan prasarana pendidikan, serta pembiayaan yang memadai, juga menjadi faktor penentu keberhasilan. Partisipasi masyarakat dalam mendukung budaya pendidikan juga tidak bisa diabaikan, karena budaya yang kuat akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembelajaran.

Lebih jauh lagi, kebijakan pendidikan yang baik adalah fondasi dari manajemen pendidikan yang efektif. Kebijakan ini harus diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan yang konkret, yang kemudian dikelola melalui berbagai pendekatan dan model manajemen yang sesuai. Pendekatan ini harus dirancang untuk memastikan bahwa seluruh komponen pendidikan beroperasi secara sinergis, sehingga tujuan pendidikan yang adaptif dan berkelanjutan dapat tercapai. Dalam hal ini, model manajemen pendidikan yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan akan sangat bermanfaat.

Manajemen pendidikan tidak boleh hanya dilihat sebagai mekanisme untuk menjalankan tugas administratif. Lebih dari itu, ia harus mampu menciptakan nilai tambah melalui inovasi dan pengembangan profesionalisme. Hal ini penting karena di tengah kompleksitas dan dinamika lingkungan pendidikan saat ini, manajemen pendidikan harus mampu menjawab tantangan yang ada dengan solusi yang kreatif dan inovatif. Dalam konteks globalisasi, kemampuan untuk terus berkembang dan beradaptasi menjadi kunci untuk menjaga relevansi dan kualitas sistem pendidikan.

Dengan demikian, manajemen pendidikan memiliki peran yang sangat vital dalam memastikan bahwa seluruh komponen pendidikan dapat bekerja secara harmonis untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih tinggi. Keberhasilan manajemen pendidikan tidak hanya diukur dari pencapaian tujuan jangka pendek, tetapi juga dari kemampuannya untuk menciptakan sistem pendidikan yang berkelanjutan, adaptif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Oleh karena itu, pengembangan manajemen pendidikan yang berkelanjutan dan berfokus pada inovasi adalah langkah penting untuk memastikan bahwa pendidikan terus berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan masyarakat.

A. **Pendekatan Manajemen Pendidikan**

1. Pendekatan Top-Down

Pendekatan Top-Down dalam manajemen pendidikan merupakan suatu model yang menekankan sentralisasi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Dalam pendekatan ini, kebijakan dan strategi pendidikan dirumuskan oleh otoritas tertinggi, seperti pemerintah pusat atau pembuat kebijakan nasional, kemudian diimplementasikan oleh tingkat-tingkat yang lebih rendah dalam struktur organisasi pendidikan. Pendekatan ini sering kali dipengaruhi oleh sistem politik yang berlaku dan cenderung mengedepankan kontrol hierarkis serta kekuatan otoritas dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Pendekatan Top-Down beroperasi dengan asumsi bahwa kekuasaan dan keputusan yang diambil di pusat memiliki dampak yang besar terhadap keberhasilan program dan kegiatan pendidikan. Oleh karena itu, dalam pendekatan ini, pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan harus memiliki tujuan yang jelas, kinerja yang dapat diukur, dan strategi yang konsisten. Di samping itu, pendekatan ini juga memerlukan kerangka hukum yang kuat untuk mendukung

implementasi kebijakan secara efektif. Struktur organisasi dalam pendekatan Top-Down biasanya diterapkan secara hierarkis, dengan pembagian wewenang yang jelas di antara berbagai tingkatan manajemen. Komitmen dan kapasitas para pelaksana di lapangan menjadi fokus penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan dapat dijalankan dengan baik.

Sebagaimana dijelaskan oleh Matland (1995), pendekatan ini menekankan bahwa keputusan-keputusan yang bersifat otoritatif dibuat oleh aktor-aktor di pusat, yang berupaya untuk menghasilkan efek kebijakan yang diinginkan. Namun, salah satu kritik utama terhadap pendekatan ini adalah kecenderungannya untuk mengabaikan realitas di lapangan, terutama kondisi-kondisi lokal yang mungkin berbeda dari asumsi pusat. Pelaksana di tingkat bawah sering kali dihadapkan pada tantangan dalam menyesuaikan kebijakan pusat dengan kondisi dan kebutuhan lokal, yang pada akhirnya dapat memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan tersebut.

Pendekatan Top-Down juga sering kali mencerminkan upaya pemaksaan kebijakan dari pusat ke daerah. Dalam konteks ini, kebijakan yang telah ditetapkan di tingkat pusat diterjemahkan ke dalam instruksi-instruksi atau peraturan-peraturan yang harus diikuti oleh pelaksana di tingkat bawah. Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983), analisis dalam pendekatan Top-Down dimulai dari keputusan-keputusan yang otoritatif, yang biasanya berbentuk kebijakan yang telah disahkan secara hukum, tetapi juga dapat berupa perintah eksekutif atau keputusan pengadilan yang penting.

Dalam pelaksanaannya, pendekatan Top-Down dipandang sebagai proses yang rasional, di mana kebijakan diharapkan dapat diimplementasikan dengan cara yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tsang (2012) menambahkan bahwa pendekatan ini memisahkan implementasi sebagai tahap yang terpisah dalam siklus kebijakan, yang ditandai dengan penegakan dan

pelaksanaan keputusan kebijakan negara. Dengan kata lain, implementasi kebijakan dalam pendekatan ini lebih dilihat sebagai proses administratif yang terisolasi dari dinamika politik yang mungkin memengaruhi pelaksanaannya.

Meskipun pendekatan Top-Down memiliki beberapa keunggulan, seperti memberikan arahan yang jelas dan konsisten serta meminimalkan jumlah pelaku kebijakan yang terlibat, pendekatan ini juga memiliki kelemahan. Salah satu kelemahan utamanya adalah kecenderungannya untuk mengabaikan kontribusi dan masukan dari pelaksana di tingkat bawah. Pendekatan ini juga cenderung mengesampingkan fleksibilitas yang mungkin diperlukan untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan lokal, yang pada akhirnya dapat menyebabkan resistensi di lapangan.

Dengan demikian, pendekatan Top-Down dalam manajemen pendidikan lebih berfokus pada kepatuhan terhadap instruksi pusat, sementara aspek-aspek politik dan dinamika lokal sering kali terabaikan. Meskipun pendekatan ini dapat memberikan keberhasilan dalam beberapa konteks, efektivitasnya sangat bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut dapat diadaptasi dan diimplementasikan oleh pelaksana di lapangan, yang memiliki pemahaman lebih mendalam tentang kondisi dan tantangan yang mereka hadapi. Oleh karena itu, pendekatan ini memerlukan keseimbangan antara kontrol pusat dan adaptasi lokal untuk mencapai hasil yang optimal dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

2. Pendekatan Bottom Up

Pendekatan Bottom-Up dalam manajemen pendidikan menawarkan perspektif yang lebih realistis dan adaptif dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan, berbeda dengan pendekatan Top-Down yang cenderung bersifat terpusat dan kaku. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami kebutuhan lokal serta melibatkan

pelaksana kebijakan di tingkat daerah dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dengan pendekatan ini, kebijakan pendidikan tidak hanya dilihat sebagai instruksi dari pusat, tetapi juga sebagai proses yang interaktif dan kolaboratif, di mana para pelaksana di lapangan memiliki peran signifikan dalam memastikan kebijakan tersebut dapat diterapkan dengan efektif.

Dalam pendekatan Bottom-Up, proses implementasi kebijakan dimulai dari identifikasi kebutuhan lokal. Para pelaksana kebijakan, yang sering kali disebut sebagai "street-level bureaucrats" oleh Lipsky (1980), tidak hanya menjalankan instruksi yang diberikan dari pusat, tetapi juga memiliki kewenangan untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi dan kebutuhan setempat. Ini memungkinkan mereka untuk mengembangkan strategi pelaksanaan yang lebih efektif dan relevan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan.

Pendekatan ini juga konsisten dengan prinsip-prinsip demokrasi, di mana pelaksana kebijakan di tingkat bawah diberi wewenang untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan konteks lokal. Hal ini berbeda dengan pendekatan Top-Down yang lebih menekankan pada kontrol dari atas dan sering kali mengabaikan realitas yang dihadapi oleh pelaksana di lapangan. Lester et al. (1987) menegaskan bahwa pendekatan Bottom-Up dimulai dengan mengidentifikasi jaringan aktor yang terlibat dalam penyampaian layanan di tingkat lokal, yang kemudian dilibatkan dalam perencanaan, pembiayaan, dan pelaksanaan program pendidikan.

Salah satu keunggulan utama dari pendekatan Bottom-Up adalah kemampuannya untuk beradaptasi dengan dinamika lokal yang terus berubah. Dalam konteks ini, pelaksana kebijakan di lapangan memiliki kebebasan untuk membentuk kembali tujuan kebijakan dan metode implementasi sesuai dengan kondisi dan tantangan spesifik yang mereka hadapi. Namun, pendekatan ini tetap memerlukan

dukungan dan arahan dari pemerintah pusat untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan tetap konsisten dengan tujuan nasional yang lebih luas.

Pendekatan Bottom-Up juga muncul sebagai kritik terhadap pendekatan Top-Down, yang sering kali mengabaikan kontribusi pelaksana di tingkat bawah dalam proses implementasi kebijakan. Lipsky (1980) berpendapat bahwa keputusan yang dibuat oleh pelaksana di tingkat bawah, serta cara mereka mengatasi ketidakpastian dan tekanan kerja, pada akhirnya membentuk kebijakan yang dijalankan. Ini menunjukkan bahwa kebijakan tidak hanya dibentuk di tingkat pusat, tetapi juga melalui proses adaptasi dan penyesuaian di lapangan.

Berman (1978) menambahkan bahwa pendekatan Bottom-Up dapat dilihat sebagai cara untuk mengintegrasikan dua tingkat pelaksanaan kebijakan: tingkat makro dan mikro. Di tingkat makro, kebijakan dirumuskan dan indikator pelaksanaan ditetapkan, sementara di tingkat mikro, pelaksana di daerah menyesuaikan kebijakan dengan kondisi setempat. Dalam pendekatan ini, pembuat kebijakan di tingkat pusat memiliki pengaruh yang lebih terbatas dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di daerah, yang oleh Berman disebut sebagai "micro-implementation problem."

Dengan demikian, pendekatan Bottom-Up dalam manajemen pendidikan menekankan pentingnya adaptasi lokal dan partisipasi aktif dari pelaksana di tingkat bawah. Pendekatan ini memungkinkan kebijakan pendidikan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal dan lebih efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sekaligus memastikan bahwa kerangka kerja nasional tetap terjaga. Pendekatan ini menunjukkan bahwa fleksibilitas dan keterlibatan lokal adalah kunci dalam menciptakan sistem pendidikan yang adaptif dan berkelanjutan, yang mampu menghadapi tantangan dan kebutuhan yang terus berkembang di masyarakat.

3. Pendekatan Sintetis

Pendekatan sintetis dalam manajemen pendidikan, sering kali disebut sebagai pendekatan hybrid, merupakan strategi yang menggabungkan keunggulan dari dua pendekatan utama, yaitu top-down dan bottom-up. Pendekatan ini muncul sebagai jawaban atas kebutuhan untuk menyeimbangkan antara arahan kebijakan dari pemerintah pusat dengan realitas dan kebutuhan spesifik di tingkat daerah. Dengan mengadopsi pendekatan sintetis, diharapkan tercipta harmoni yang optimal antara kontrol yang terpusat dan fleksibilitas di tingkat lokal, yang pada akhirnya memungkinkan pelaksanaan kebijakan pendidikan yang lebih efektif dan efisien.

Secara teori, pendekatan sintetis menekankan pentingnya kerja sama dan koordinasi yang erat antara berbagai pelaksana kebijakan di semua tingkatan pemerintahan. Implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada arahan dari atas, tetapi juga membutuhkan kontribusi aktif dari pelaksana di lapangan, yang memiliki pemahaman mendalam tentang konteks lokal. Barrett dan Fudge (1981) menjelaskan bahwa pendekatan ini bertujuan untuk menerjemahkan keputusan kebijakan menjadi tindakan operasional yang lebih fleksibel dan adaptif. Dalam hal ini, kebijakan tidak hanya dilihat sebagai instruksi yang harus diikuti, tetapi juga sebagai panduan yang dapat disesuaikan dengan kondisi lokal yang dinamis.

Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sering kali menghadapi tantangan yang beragam, tergantung pada konteks sosial, budaya, dan politik setempat. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi spesifik tersebut. Tsang (2012) menekankan bahwa pendekatan sintetis mencakup upaya untuk membentuk koalisi, strukturasi, dan pembelajaran di mana berbagai pihak dalam domain kebijakan bekerja sama untuk mewujudkan kebijakan, program, atau proyek yang telah

direncanakan. Hal ini memungkinkan terjadinya interaksi yang dinamis antara berbagai tingkat pelaksanaan, sehingga kebijakan yang diterapkan menjadi lebih relevan dan efektif dalam memenuhi kebutuhan lokal.

Dalam praktiknya, pendekatan sintetis menggabungkan variabel-variabel mikro dari pendekatan bottom-up dan variabel-variabel makro dari pendekatan top-down. Penggabungan ini menciptakan interaksi yang teratur antara berbagai tingkat pelaksanaan kebijakan, sehingga kebijakan yang diterapkan menjadi lebih adaptif terhadap kebutuhan lokal. Matland (1995) dan Suggett (2011) mengembangkan kerangka kerja yang berfokus pada upaya untuk membedakan tingkat konflik politik berdasarkan tujuan kebijakan serta tingkat ketidakpastian terkait cara atau tindakan untuk mencapai tujuan tersebut.

Parameter pendekatan sintetis, sebagaimana disarankan oleh Berman (1980), mencakup berbagai elemen penting, seperti cakupan perubahan kebijakan, tingkat kepastian dalam teknologi atau teori yang digunakan, tingkat konflik atas tujuan dan sarana kebijakan, struktur kelembagaan, serta stabilitas lingkungan kebijakan. Kemunculan pendekatan sintetis ini sering kali dipicu oleh beberapa faktor, seperti ambiguitas dalam penetapan tujuan kebijakan yang dapat menyebabkan kesalahpahaman, partisipasi yang terlalu luas dari berbagai tingkatan pemerintahan yang mengakibatkan tumpang tindih kewenangan, serta inefisiensi dalam pelaksanaan kebijakan yang tidak sesuai dengan perencanaan awal.

Untuk menjaga keberlanjutan dan efektivitas pendekatan sintetis, beberapa hal perlu diperhatikan. Pertama, penting untuk memastikan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, termasuk kelompok sasaran kebijakan. Kedua, perlu ada integrasi yang harmonis antara pendekatan top-down dan bottom-up. Dalam hal ini, pendekatan top-

down lebih cocok untuk proses perencanaan, sedangkan pendekatan bottom-up lebih efektif untuk evaluasi kebijakan. Martland (1995), Elmore (1982), dan West (1984) menyarankan bahwa pendekatan top-down sebaiknya dianggap sebagai taktik, sementara pendekatan bottom-up sebagai strategi pelaksanaan yang lebih luas.

Secara teknis, pendekatan sintetis menggambarkan upaya desentralisasi, di mana sebagian urusan dan wewenang diserahkan kepada pemerintah daerah. Pemerintah pusat tetap memegang kendali dalam penetapan kebijakan dan penerbitan petunjuk teknis, tetapi pelaksanaannya diserahkan kepada pemerintah daerah yang lebih memahami kebutuhan lokal. Ini memungkinkan adanya otonomi terbatas di tingkat daerah, dengan tetap mempertahankan pengawasan dan pengendalian dari pusat untuk memastikan pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Melalui desentralisasi ini, diharapkan terjadi peningkatan kualitas dalam hal efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan kebijakan pendidikan.

Dengan pendekatan sintetis, manajemen pendidikan diharapkan dapat menjadi lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini juga berupaya menciptakan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, sambil memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat benar-benar berfungsi dalam konteks lokal yang spesifik.

B. **Model Manajemen Pendidikan**

Menurut Bush (2003), terdapat enam model manajemen pendidikan yang diidentifikasi, yaitu: (a) model formal, (b) model kolegial, (c) model politik, (d) model subyektif, (e) model ambiguitas, dan (f) model budaya.

1. Model Formal

Model formal berasumsi bahwa organisasi pendidikan adalah sebuah sistem hierarkis di mana manajer atau pemimpin pendidikan menggunakan kewenangan mereka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Rasionalitas dari model ini berfokus pada pengembangan struktur organisasi yang resmi, hirarkis, serta implementasi tujuan melalui satuan-satuan pendidikan. Aspek penting lainnya adalah pengembangan proses manajemen pendidikan yang rasional, otoritas yang jelas, serta penekanan pada akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Model ini juga cenderung bersifat sentralistis dengan komunikasi yang berjalan secara top-down, serta prosedur pengelolaan pendidikan yang ketat dan dogmatis. Tujuan utama dari model formal adalah memastikan bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan berlangsung dengan efisien, efektif, dan produktif.

Namun, terdapat lima keterbatasan yang melekat pada model formal ini:

a. Penetapan Tujuan yang Tidak Realistis: Model formal sering kali dianggap tidak realistis dalam menetapkan tujuan, terutama karena adanya ketidakjelasan dalam pengukuran kinerja yang akan dicapai.

b. Kurangnya Dukungan Evaluasi Terpadu: Aktivitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dalam model ini belum sepenuhnya didukung oleh evaluasi dan penilaian yang terpadu dan menyeluruh, seringkali hanya berfokus pada satu aspek saja, seperti kurikulum.

c. Fokus pada Aspek Kelembagaan: Model formal cenderung lebih menitikberatkan pada aspek kelembagaan sebagai entitas utama dalam pengelolaan pendidikan, sering kali mengabaikan faktor-faktor lain yang mungkin berperan penting.

d. Sentralisasi dan Komunikasi Top-Down: Model ini sangat sentralistik dan cenderung mengabaikan dinamika yang ada di tingkat bawah, sehingga tidak responsif terhadap perubahan atau kebutuhan lokal.

e. Struktur Kelembagaan yang Statis: Struktur kelembagaan dalam model formal cenderung statis, meskipun ada perubahan dinamika dalam lingkungan pendidikan, yang didukung oleh pengelola pendidikan yang cenderung aksiomatik dalam menjalankan tugasnya.

Dalam perkembangannya, model formal ini telah mengalami metamorfosis menjadi beberapa model lainnya, yang mencerminkan pendekatan birokratis dan rasionalistik. Model-model tersebut meliputi:

a. Model Struktural: Menekankan pada pentingnya struktur organisasi yang kaku dan jelas.

b. Model Birokrasi: Berfokus pada peran birokrasi dalam pengelolaan pendidikan dengan aturan yang ketat.

c. Model Rasional: Mengutamakan keputusan yang dibuat berdasarkan analisis rasional dan data yang tersedia.

d. Model Hirarkis: Mengedepankan struktur hierarkis dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan.

Melalui model formal ini, manajemen pendidikan berusaha untuk mencapai standar tinggi dalam pengelolaan pendidikan, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan yang terkait dengan keterbatasan model ini. Pandangan ini sejalan dengan pendapat ahli lainnya yang menekankan perlunya fleksibilitas dan adaptasi dalam penerapan model manajemen pendidikan, terutama dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas lingkungan pendidikan yang terus berubah (Bush, 2003).

2. Model Kolegial (The Collegial Model)

Model kolegial dalam manajemen pendidikan berlandaskan pada pandangan bahwa pengambilan keputusan sebaiknya dilakukan melalui proses diskusi, kesepakatan, dan konsensus. Pendekatan ini menekankan bahwa aktivitas manajemen pendidikan didistribusikan secara merata, berdasarkan persepsi yang sama dalam mencapai tujuan pendidikan serta pengelolaan struktur yang relevan dengan kebutuhan. Inti dari model ini adalah pentingnya mencapai kesepakatan bersama, konsensus, dan komitmen dalam implementasi pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Beberapa ciri utama dari model kolegial meliputi:

a. Normatif dan Berorientasi pada Tujuan Pendidikan: Model ini sangat normatif dan berfokus pada pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

b. Implementasi Berdasarkan Keputusan Bersama: Proses implementasi dan tindak lanjut didasarkan pada keputusan kolektif yang diambil bersama, dengan mengacu pada kesamaan nilai, visi, dan misi.

c. Demokratis: Model ini bersifat demokratis, memberikan ruang untuk klarifikasi berbagai inisiatif dan gagasan, serta partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat.

d. Kepemimpinan Transformasional dan Partisipatif: Model kolegial cenderung mengembangkan kepemimpinan transformasional yang mendorong kontribusi terhadap produktivitas, kepemimpinan partisipatif yang melibatkan seluruh pihak dalam pengambilan keputusan, serta kepemimpinan terdistribusi yang didasarkan pada kepercayaan dan kolaborasi.

Namun, model kolegial juga memiliki beberapa keterbatasan, antara lain:

a. Fokus pada Norma yang Telah Terbentuk: Model ini cenderung memusatkan perhatian pada norma-norma yang telah ada, sehingga mungkin mengabaikan realitas aktual dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

b. Pengambilan Keputusan yang Lambat: Proses pengambilan keputusan dalam model ini sering kali lambat dan tidak praktis, karena melibatkan banyak persetujuan dari berbagai lembaga dan sumber daya manusia yang terlibat.

c. Perbedaan Persepsi antara Otoritas Keahlian dan Profesional: Adanya perbedaan persepsi dan pandangan antara otoritas keahlian dan profesional dapat mengakibatkan konflik dalam pelaksanaan tindakan yang direncanakan.

Meskipun demikian, model kolegial memiliki potensi untuk menciptakan keharmonisan dan menstimulasi aspek kreatif dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan pendekatan yang inklusif dan berbasis konsensus, model ini dapat menghasilkan keputusan yang lebih holistik dan sesuai dengan kebutuhan seluruh pihak yang terlibat dalam proses pendidikan.

Menurut pandangan para ahli, seperti Bush (2003), model kolegial memiliki keunggulan dalam menciptakan suasana kerja yang kolaboratif dan harmonis, yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas manajemen pendidikan secara keseluruhan. Namun, kelemahan-kelemahannya juga perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa proses pengambilan keputusan tetap efisien dan responsif terhadap dinamika yang ada.

3. Model Politik (The Political Model)

Model politik dalam manajemen pendidikan didasarkan pada asumsi bahwa penetapan tujuan, kebijakan, dan program pendidikan sering kali dipengaruhi oleh kepentingan kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kewenangan dan otoritas lebih besar dalam pemerintahan dan masyarakat. Dalam konteks ini, manajemen pendidikan dianggap sebagai cerminan dari nilai-nilai dan preferensi kelompok yang dominan, yang mempengaruhi struktur, artikulasi, dan transformasi kepentingan, serta perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Kelompok yang berkuasa dalam model ini bertindak sebagai aktor otonom yang memiliki kapasitas untuk merencanakan dan melaksanakan agenda mereka sendiri, tanpa harus selalu merespons tekanan dari kelompok lain.

Selain itu, model politik dalam manajemen pendidikan juga mengembangkan respons politik yang bersifat transaksional, yang didasarkan pada keseimbangan kekuasaan, perundingan, negosiasi, serta pengendalian dukungan masyarakat. Ciri khas dari model ini adalah aktivitas dan alokasi otoritas yang dilakukan oleh kelompok dominan, dengan penekanan pada prevalensi konflik dalam kelembagaan untuk menetapkan kebijakan dan program pendidikan. Penetapan tujuan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan kelompok yang muncul dan berkembang, yang sangat dipengaruhi oleh karakter sistem politik yang berlaku.

Namun, model politik ini memiliki beberapa keterbatasan yang signifikan. Pertama, model ini cenderung didasarkan pada dominasi kekuasaan dan kepentingan kelompok tertentu, sehingga bisa mengabaikan kolaborasi dengan kelompok lain yang mungkin memiliki visi dan program pendidikan yang lebih selaras dengan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Kedua, tingginya tingkat fragmentasi konflik dan persaingan politik dalam penetapan tujuan,

kebijakan, dan program pendidikan dapat menghambat tercapainya tujuan pendidikan yang komprehensif dan inklusif.

Menurut pandangan ahli seperti Bush (2003), pendekatan politik ini, meskipun sering digunakan dalam konteks tertentu, dapat menimbulkan tantangan yang serius dalam manajemen pendidikan, terutama ketika kepentingan kelompok dominan tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat luas. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan keseimbangan antara kekuasaan dan kolaborasi dalam implementasi model ini agar pendidikan dapat dikelola secara lebih efektif dan adil.

4. Model Subyektif (The Subjectives Model)

Model subyektif dalam manajemen pendidikan berpendapat bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan adalah hasil dari interpretasi, perspektif, nilai-nilai, latar belakang, dan pengalaman pribadi individu yang memiliki otoritas. Penetapan tujuan pendidikan dalam model ini sering kali mencerminkan nilai-nilai dan preferensi subyektif dari pemilik atau pengelola institusi pendidikan. Dengan kata lain, tujuan-tujuan yang ditetapkan lebih bersifat pribadi dan disesuaikan dengan keyakinan serta kepentingan individu tersebut.

Dalam penerapan model ini, implementasi dan implikasi dari pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan secara otoritatif dipengaruhi oleh keyakinan dan pandangan pribadi pemilik atau pengelola. Artinya, kebijakan dan keputusan yang diambil cenderung tidak hanya didasarkan pada standar objektif atau kebutuhan kolektif, tetapi lebih pada sudut pandang dan pengalaman pribadi yang bersangkutan.

Menurut para ahli seperti Bush (2003), model ini memiliki keterbatasan dalam hal objektivitas, karena cenderung memprioritaskan preferensi individu daripada pertimbangan yang lebih luas dan komprehensif. Namun, model ini juga dapat

memberikan fleksibilitas dan kreativitas dalam pengelolaan pendidikan, terutama dalam konteks di mana pemilik atau pengelola memiliki visi dan misi yang kuat serta relevan dengan kebutuhan pendidikan yang spesifik.

Penting untuk diingat bahwa meskipun model subyektif dapat membawa nilai-nilai pribadi ke dalam proses manajemen pendidikan, hal ini juga dapat menjadi tantangan jika preferensi pribadi tidak sejalan dengan kebutuhan yang lebih luas dari lembaga pendidikan atau masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pengelola pendidikan yang mengadopsi model ini untuk tetap mempertimbangkan keseimbangan antara nilai-nilai pribadi dan kebutuhan kolektif dalam pengambilan keputusan.

5. Model Budaya (The Cultural Model)

Model budaya dalam manajemen pendidikan menempatkan ide, kepercayaan, norma, nilai, ritual, tradisi, dan ideologi masyarakat sebagai inti dari proses pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Dalam model ini, budaya masyarakat dianggap memiliki kekuatan yang signifikan dalam menentukan tujuan dan kebijakan pendidikan serta dalam implementasi dan dampak program-program pendidikan. Model ini menekankan bahwa setiap tindakan pendidikan harus disesuaikan dengan tingkat akses, kepentingan, dan relevansi kebutuhan masyarakat yang dilayani.

Menurut para ahli, seperti Bush (2003), model budaya memandang bahwa pendidikan harus selaras dengan konteks budaya tempat pendidikan tersebut berada. Ini berarti bahwa tujuan dan praktik pendidikan tidak hanya harus mempertimbangkan kebutuhan akademis tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai budaya masyarakat. Model ini berusaha memastikan bahwa pendidikan tidak hanya menjadi alat untuk mencapai tujuan intelektual tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat dan melestarikan identitas budaya.

Namun, model budaya juga menghadapi beberapa keterbatasan. Pertama, sulit untuk menetapkan satu budaya tunggal sebagai preferensi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, terutama dalam masyarakat yang multikultural. Kedua, ada risiko pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan menjadi terlalu mekanistik dan disfungsional jika terlalu menekankan pada keseragaman implementasi nilai-nilai budaya yang beragam. Ketiga, model ini cenderung menghambat inovasi dalam sistem dan mekanisme manajemen pendidikan karena lebih menekankan pada pelaksanaan yang bersifat informal dan tradisional.

Meski begitu, model budaya tetap memiliki kelebihan dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang harmonis dengan konteks sosial dan budaya masyarakat setempat. Ini dapat membantu memastikan bahwa pendidikan relevan dan bermakna bagi peserta didik serta mampu memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pengelola pendidikan yang mengadopsi model ini untuk menemukan keseimbangan antara menghormati tradisi budaya dan mendorong inovasi yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan (Bush, 2003; Sugiyono, 2020)

6. Model Ambiguitas (The Ambiguity Model)

Model Ambiguitas dalam manajemen pendidikan menekankan pentingnya keterkaitan antara kebutuhan pemerintah dan masyarakat, sambil mendorong pola desentralisasi kepentingan serta otonomi bagi satuan pendidikan dalam implementasi dan pelaksanaan pengelolaan pendidikan. Model ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam penetapan tujuan, kebijakan, dan program pendidikan, namun tetap berada di bawah kendali kewenangan pemerintah.

Model ini juga menggambarkan ketidakjelasan dalam berbagai aspek pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, seperti tujuan kelembagaan yang tidak selalu jelas, serta proses yang sering kali

mengalami fragmentasi dan duplikasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Selain itu, keterlibatan dan partisipasi seluruh komponen pendidikan tidak selalu terikat oleh peraturan organisasi yang baku, sehingga keputusan sering kali diambil berdasarkan situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu. Fokus utama dari model ini cenderung lebih pada keuntungan yang dapat diperoleh dari pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, daripada pada prosedur yang kaku dan terstruktur.

Namun, model ini memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah bahwa penyelesaian masalah pendidikan tidak selalu didasarkan pada prediksi yang rasional dan cenderung bergantung pada kemampuan dan kapasitas kepemimpinan dalam mengelola sistem pendidikan. Ketergantungan ini menciptakan risiko bahwa hasil yang dicapai mungkin tidak konsisten atau berkelanjutan, tergantung pada situasi dan individu yang terlibat.

Menurut para ahli, seperti Bush (2003) dan Tsang (2012), model ambiguitas dapat menimbulkan tantangan dalam hal efektivitas pengelolaan pendidikan, terutama karena sifatnya yang fleksibel namun kurang terstruktur. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam pencapaian tujuan pendidikan dan mempersulit upaya untuk mempertahankan standar yang konsisten dalam penyelenggaraan pendidikan (Bush, 2003; Tsang, 2012).

C. **Proses Manajemen Pendidikan**

Manajemen pendidikan adalah suatu proses yang kompleks dan multidimensional, yang mencakup berbagai tindakan dan kegiatan dalam pengelolaan serta penyelenggaraan pendidikan. Tujuannya adalah untuk memberdayakan sumber daya pendidikan secara efektif, efisien, dan produktif guna mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Adesina (1990) menggambarkan manajemen sebagai upaya untuk mengorganisir dan memobilisasi semua sumber daya

manusia dan material dalam suatu sistem guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Bosah (1998) menambahkan bahwa manajemen pendidikan melibatkan pengaturan dan penggunaan sumber daya yang tersedia untuk pendidikan, termasuk transfer keterampilan, pengetahuan, dan budaya melalui proses pengajaran, pembelajaran, dan penelitian yang efisien. Sheikh (2010) menekankan bahwa manajemen pendidikan adalah proses yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu melalui pemanfaatan sumber daya seperti tenaga kerja, dana, dan energi. Eric (2018) juga menjelaskan bahwa manajemen pendidikan adalah proses sosial yang dirancang untuk memastikan kerja sama, partisipasi, dan keterlibatan semua pihak dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Dari berbagai perspektif ini, jelas bahwa manajemen pendidikan merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan melalui pengelolaan sumber daya yang ada, dengan menerapkan prosedur yang telah ditetapkan. Proses ini harus fleksibel, mudah diimplementasikan, dan sesuai dengan filosofi sosial serta kepentingan negara dan masyarakat. Manajemen pendidikan juga harus mampu melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan secara efektif dan efisien, dengan tujuan menciptakan tata kelola yang tidak hanya efisien tetapi juga nyaman dan adaptif.

Tasic et al. (2011) menggambarkan manajemen pendidikan sebagai proses transformasional dalam pengembangan pendidikan, dengan tiga pertimbangan utama: pertama, manajemen pendidikan harus memimpin perubahan dalam pendidikan pada saat misi dan karakter sekolah sedang didefinisikan ulang; kedua, manajemen pendidikan harus menjadi bagian integral dari administrasi negara dalam sistem pendidikan yang tidak lagi bergantung pada metode birokratis; dan ketiga, manajemen pendidikan harus menerapkan pengetahuan baru dalam manajemen organisasi yang terus berkembang.

Proses manajemen pendidikan dapat dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang saling berkaitan dan saling melengkapi, yang dirancang untuk memberdayakan manajemen pendidikan agar berfungsi secara optimal. Proses ini mencakup tindakan-tindakan seperti mendefinisikan tujuan pendidikan, merumuskan kebijakan, menetapkan organisasi dan struktur kelembagaan, mengatur tugas pokok dan fungsi, serta mendelegasikan kewenangan dan otoritas. Selain itu, proses ini juga mencakup penyediaan pembiayaan, sarana prasarana, pengelolaan program pendidikan, pengembangan kepemimpinan yang profesional, serta integrasi sumber daya, budaya, dan lingkungan pendidikan dalam satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh.

Ababneh dan Alrhaimi menyatakan bahwa manajemen pendidikan adalah proses yang mencakup beberapa aspek penting, yaitu: memastikan pelatihan dan pendidikan yang efektif dengan mengoptimalkan proses pendidikan; menetapkan pedoman pendidikan; memastikan kesatuan proses pendidikan sebagai sistem yang terintegrasi; serta mengelola organisasi pendidikan dengan melibatkan semua potensi yang ada. Fokus utama dalam proses ini adalah peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, karena potensi manusia merupakan fitur spesifik yang sangat berkontribusi terhadap kualitas pencapaian dalam semua bidang pekerjaan, termasuk pendidikan (Tasic et al., 2011).

Dalam konteks pemerintahan di Indonesia, proses manajemen pendidikan umumnya menggunakan pendekatan P4 (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan) dalam sebuah siklus berulang yang memanfaatkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK). Siklus ini memungkinkan identifikasi dan akomodasi berbagai tindakan, seperti penetapan tujuan, pengaturan sumber daya, koordinasi, pengendalian, serta pemantauan dan evaluasi. Kimani (2011) menyatakan bahwa keberhasilan pendidikan sangat bergantung

pada perencanaan yang tepat, administrasi yang efisien, dan pengawasan yang memadai. Staničić (2006) menambahkan bahwa proses manajemen pendidikan terkait erat dengan kehidupan terorganisir, yang mencakup perencanaan, analisis, pengorganisasian, pembiayaan, dan pengawasan.

Proses manajemen pendidikan terdiri dari empat tahap utama: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Tahap perencanaan melibatkan penetapan tujuan, kegiatan, sumber daya, waktu, tempat, dan prosedur pengelolaan serta penyelenggaraan pendidikan, dengan fokus pada pengembangan tujuan yang jelas, realistis, dan efisien. Eric (2008) menjelaskan bahwa perencanaan adalah penyusunan garis besar dari apa yang perlu dilakukan.

Tahap pengorganisasian mencakup pengelompokan aktivitas secara terstruktur, penetapan tanggung jawab, serta pengaturan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengorganisasian adalah pengelompokan aktivitas yang saling terkait, penugasan tanggung jawab, dan pengumpulan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan (Eric, 2008). Elena (2019) menekankan bahwa pengorganisasian juga mencakup aspek struktur organisasi dan koordinasi antara berbagai bagian dan individu untuk menghindari tumpang tindih serta pemborosan sumber daya.

Tahap pelaksanaan adalah proses implementasi dari rencana dan pengorganisasian yang telah disusun. Dalam tahap ini, motivasi, supervisi, dan pengendalian dilakukan untuk memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab dilaksanakan dengan baik. Supervisi mencakup pembinaan profesionalisme dan pengawasan kualitas pengelolaan pendidikan, sementara pengendalian berfokus pada pemantauan yang terus menerus untuk menilai, memperbaiki, dan meningkatkan efektivitas serta akuntabilitas (Kimani, 2011). Pelaksanaan adalah proses mengintegrasikan orang-orang dengan organisasi untuk mendapatkan kerja sama dalam mencapai tujuan (Kimani, 2011).

Tahap terakhir adalah pengawasan, yang merupakan proses untuk membandingkan antara standar yang telah ditetapkan dengan hasil pelaksanaan. Pengawasan berguna untuk mengukur keberhasilan, mengidentifikasi penyimpangan, dan memberikan umpan balik untuk perbaikan. The Liang Gie (2000) mendefinisikan pengawasan sebagai keseluruhan aktivitas untuk mengawasi, memeriksa, mencocokkan, dan mengendalikan kegiatan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan mencapai hasil yang diinginkan. Kimani (2011) menambahkan bahwa pengawasan melibatkan evaluasi kinerja dan penerapan tindakan korektif untuk memastikan tujuan dan sasaran tercapai sesuai rencana.

Dengan pendekatan yang terstruktur dan sistematis, proses manajemen pendidikan di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan, dengan fokus pada pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) dan standar pelayanan minimal (SPM). Proses ini juga mengidentifikasi berbagai elemen penting seperti interaksi, keterkaitan, saling ketergantungan, nilai-nilai budaya, dan struktur internal, yang semuanya berkontribusi pada keberhasilan fungsi-fungsi manajemen pendidikan dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Selain itu, proses manajemen pendidikan juga menekankan pentingnya pembagian kerja, hirarki kewenangan, kelembagaan, serta penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengelolaan dan penyelenggaraan fungsi-fungsi manajemen pendidikan.

1. Perencanaan dalam Manajemen Pendidikan

Perencanaan dalam manajemen pendidikan adalah sebuah proses yang rasional dan sistematis yang bertujuan untuk meramalkan masa depan dan mempersiapkan organisasi menghadapi perubahan melalui perumusan langkah-langkah yang strategis. Kimani (2011) menjelaskan bahwa perencanaan adalah aktivitas pengambilan

keputusan yang mencakup penentuan tujuan serta menetapkan berbagai kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Melalui perencanaan, manajer pendidikan berusaha untuk mengelola organisasi secara efisien dan efektif, memastikan bahwa semua sumber daya yang tersedia digunakan secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Pada intinya, perencanaan merupakan proses pengambilan keputusan atas berbagai alternatif yang tersedia mengenai sasaran dan metode pelaksanaan yang akan digunakan di masa depan. Proses ini juga mencakup pemantauan dan penilaian hasil secara sistematis dan berkelanjutan. Usman (2006) menjelaskan bahwa perencanaan mencakup beberapa elemen penting, antara lain kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya, proses yang jelas, hasil yang ingin dicapai, dan orientasi ke masa depan dalam kerangka waktu tertentu.

Lebih lanjut, perencanaan dalam manajemen pendidikan juga dapat dipahami sebagai proses mendefinisikan tujuan organisasi, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan tersebut, serta mengembangkan rencana kerja yang sesuai dengan kebutuhan kelembagaan. Perencanaan adalah fondasi bagi semua fungsi manajemen lainnya, karena tanpa perencanaan yang matang, fungsi-fungsi manajemen lainnya tidak akan berjalan secara efektif. Dalam konteks ini, perencanaan mencakup aspek-aspek seperti siapa yang akan melaksanakan tugas, di mana pelaksanaan dilakukan, dan bagaimana tindakan tersebut akan dilakukan.

Para ahli manajemen pendidikan sering mendefinisikan perencanaan sebagai serangkaian kegiatan yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selain itu, perencanaan juga mencakup proses penetapan tindakan yang berfokus pada apa yang harus dilakukan, mengapa harus dilakukan, dan bagaimana tindakan tersebut harus diimplementasikan, yang dikenal dengan konsep 5W dan 1H (why,

what, who, when, where, dan how). Dengan demikian, perencanaan adalah formulasi yang sistematis mengenai apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, kapan tindakan tersebut harus dilaksanakan, dan siapa yang akan melaksanakannya.

Dalam proses perencanaan, terdapat beberapa elemen dasar yang harus diperhatikan, seperti: (a) pola tindakan yang dirancang untuk mencapai kebijakan, program, dan kegiatan di masa depan; serta (b) keterlibatan kelembagaan dan sumber daya yang diperlukan untuk mengimplementasikan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Perencanaan juga harus mencakup proses yang sistematis dan rinci mengenai kebijakan, program, dan kegiatan, serta penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diperlukan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Beberapa faktor penting dalam perencanaan yang perlu dipertimbangkan meliputi: (a) kejelasan tujuan dan ruang lingkup (specific); (b) kemampuan untuk mengukur tingkat keberhasilan (measurable); (c) pencapaian yang realistis (achievable); (d) kesesuaian dengan sumber daya yang ada (realistic); dan (e) batas waktu yang jelas (time-bound) untuk memungkinkan evaluasi dan penilaian.

Perencanaan sangat penting dalam manajemen pendidikan karena berbagai alasan, termasuk kompleksitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang terus berkembang, kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas, serta tuntutan untuk memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Perencanaan yang komprehensif dan akomodatif dapat membantu implementasi kebijakan, program, dan kegiatan secara lebih efektif dan efisien, serta mengurangi pemborosan sumber daya dan menjaga keseimbangan antara pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang tersedia.

Prinsip-prinsip perencanaan yang baik harus mencakup keterkaitan dengan aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya; didasarkan pada hasil penelitian yang valid; memiliki visi dan misi yang jelas untuk masa depan yang lebih baik; mampu memecahkan masalah secara realistis; serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia dan material. Kimani (2011) juga menekankan pentingnya analisis situasi, identifikasi kebutuhan, perumusan tujuan dan sasaran, pengembangan alternatif kegiatan, serta implementasi dan evaluasi dalam proses perencanaan.

Proses perencanaan dalam manajemen pendidikan terdiri dari beberapa tahapan yang mencakup pernyataan tujuan kebijakan, identifikasi kebutuhan, pengembangan alternatif, hingga penganggaran dan evaluasi. Setiap tahap dalam proses perencanaan dirancang untuk memastikan bahwa kebijakan, program, dan kegiatan yang dirumuskan dapat diimplementasikan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Usman (2006) menekankan bahwa perencanaan dipengaruhi oleh tiga dimensi utama: waktu, spasial (ruang dan wilayah), serta tingkat teknis perencanaan yang saling berinteraksi secara kohesif dan komprehensif.

Dengan memahami dan menerapkan konsep perencanaan yang komprehensif, manajemen pendidikan dapat merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan pendidikan dan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya tata kelola pendidikan yang lebih baik, yang tidak hanya memenuhi standar nasional tetapi juga adaptif terhadap perubahan dan perkembangan yang terjadi di lingkungan pendidikan.

Perencanaan pendidikan adalah proses krusial dalam upaya mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Berbagai pendekatan digunakan untuk memastikan bahwa perencanaan ini sesuai dengan konteks dan kebutuhan yang ada. Setiap pendekatan

memiliki karakteristik unik yang mencerminkan fokus dan prioritas yang berbeda, disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang melingkupinya.

a. Pendekatan Tuntutan Sosial (Social Demand Approach)

Pendekatan tuntutan sosial merupakan salah satu pendekatan yang menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan pendidikan masyarakat secara luas. Fokus utama pendekatan ini adalah memperluas akses dan menjamin pemerataan kesempatan pendidikan bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang sosial-ekonomi mereka. Pendekatan ini didasari oleh asumsi bahwa pendidikan adalah hak dasar setiap orang, yang harus disediakan sesuai dengan permintaan yang ada di masyarakat. Dalam praktiknya, pendekatan ini sering kali diterapkan dalam kebijakan-kebijakan nasional yang bertujuan untuk menjamin akses universal terhadap pendidikan, seperti Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun (Wajar Dikdas 9 Tahun) di Indonesia.

Keunggulan dari pendekatan tuntutan sosial terletak pada kemampuannya untuk mendorong pemerataan akses pendidikan dan meningkatkan literasi di kalangan masyarakat. Pendekatan ini juga berkontribusi dalam mengembangkan masyarakat yang lebih egaliter dan demokratis. Namun, di balik keunggulannya, pendekatan ini memiliki beberapa kelemahan yang perlu diwaspadai. Salah satunya adalah kecenderungan untuk mengabaikan kualitas pendidikan, karena fokus utama lebih pada kuantitas dan perluasan akses. Selain itu, adanya ketidaksesuaian antara jumlah lulusan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja sering kali menyebabkan masalah ketenagakerjaan. Menurut Usman (2006), pendekatan ini juga sering kali tidak mempertimbangkan alokasi pembiayaan nasional dan perencanaan ketenagakerjaan yang memadai, yang pada akhirnya dapat mengurangi kualitas hasil pendidikan secara keseluruhan.

b. Pendekatan Ketenagakerjaan (Manpower Requirement Approach)

Pendekatan ketenagakerjaan difokuskan pada pengembangan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan kecakapan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk memastikan bahwa lulusan sistem pendidikan siap memasuki pasar kerja dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Di Indonesia, pendekatan ini dikenal dengan istilah "Link and Match," yang diterapkan melalui program pendidikan sistem ganda di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Pendekatan ketenagakerjaan memiliki keunggulan dalam menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan relevan dengan kebutuhan industri. Selain itu, pendekatan ini mendorong peningkatan mutu pendidikan melalui penyelarasan antara output pendidikan dan kebutuhan pasar tenaga kerja. Namun, pendekatan ini juga memiliki kelemahan, terutama dalam hal kurangnya perhatian terhadap pendidikan dasar, yang merupakan fondasi penting bagi perkembangan pendidikan lebih lanjut. Usman (2006) menyoroti bahwa pendekatan ini sering kali memprioritaskan pendidikan kejuruan dan mengabaikan perubahan dinamis di dunia kerja, yang dapat berdampak negatif terhadap relevansi pendidikan dalam jangka panjang.

c. Pendekatan Biaya-Manfaat (Cost–Benefit Analysis/Rate Of Returns Approach)

Pendekatan biaya-manfaat atau cost-effectiveness adalah pendekatan yang memfokuskan perhatian pada penggunaan biaya secara optimal untuk mencapai hasil pendidikan yang maksimal, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Pendekatan ini didasarkan pada analisis untung rugi, di mana pengelola pendidikan mempertimbangkan apakah biaya yang dikeluarkan sebanding dengan

manfaat yang diperoleh. Dengan demikian, pendekatan ini cenderung lebih rasional dan ekonomis dalam perencanaan pendidikan.

Kelebihan dari pendekatan biaya-manfaat adalah kemampuannya untuk memberikan analisis yang terukur dan sistematis, serta mendorong efisiensi dalam pembiayaan pendidikan. Namun, pendekatan ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Salah satunya adalah kecenderungan untuk mengabaikan aspek sosial, ekonomi, dan gender dari peserta didik, serta fokus yang terlalu besar pada pendapatan dan produktivitas. Selain itu, realisasi manfaat pendidikan sering kali membutuhkan waktu yang lama, yang membuat pendekatan ini kurang ideal untuk pendidikan dasar yang berfungsi sebagai landasan pendidikan. Usman (2006) mengkritik pendekatan ini karena sering kali tidak mempertimbangkan pentingnya investasi jangka panjang dalam pendidikan dasar untuk membangun fondasi yang kuat bagi jenjang pendidikan selanjutnya.

b. Pendekatan Sintetis (The Synthetic/Eclectic Approach)

Pendekatan sintetis, juga dikenal sebagai pendekatan hybrid, merupakan kombinasi dari berbagai pendekatan perencanaan pendidikan seperti pendekatan tuntutan sosial, pendekatan ketenagakerjaan, dan pendekatan biaya-manfaat. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan perencanaan pendidikan yang lebih komprehensif dan fleksibel, yang dapat disesuaikan dengan berbagai tantangan dan kebutuhan yang ada.

Pendekatan sintetis memungkinkan adanya interaksi yang dinamis antara berbagai elemen dan tingkat pelaksanaan untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih efektif. Dengan menggabungkan kelebihan dari setiap pendekatan, pendekatan sintetis menawarkan keuntungan dalam hal koordinasi, kejelasan sistem, dan fleksibilitas dalam mekanisme pelaksanaan. Matland (1995) dan Suggett (2011) menekankan bahwa pendekatan ini sangat berguna

dalam konteks di mana terdapat konflik politik atau ketidakpastian dalam mencapai tujuan. Pendekatan sintetis juga memberikan ruang untuk penyesuaian berdasarkan kondisi spesifik, sehingga dapat lebih responsif terhadap kebutuhan lokal.

Kemunculan pendekatan sintetis sering kali disebabkan oleh adanya ambiguitas dalam penetapan tujuan pendidikan, partisipasi yang terlalu luas dari berbagai tingkat pemerintahan, serta inefisiensi dalam pelaksanaan kebijakan. Selain itu, pendekatan ini juga muncul sebagai respons terhadap keterbatasan yang ditemukan dalam pendekatan-pendekatan lainnya, seperti kontrol yang berlebihan atau terbatasnya kewenangan dalam pengambilan keputusan. Pendekatan sintetis berupaya untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dengan menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara berbagai faktor yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pendidikan.

Dengan memahami dan menerapkan berbagai pendekatan dalam perencanaan pendidikan, para pengelola dan penyelenggara pendidikan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta lebih adaptif dalam menghadapi tantangan yang ada. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih optimal, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi sistem pendidikan.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian (organizing) adalah salah satu fungsi utama dalam manajemen pendidikan yang berperan penting dalam menciptakan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan, sumber daya, dan konteks lingkungan yang ada. Fungsi ini tidak hanya berperan dalam pembentukan struktur organisasi tetapi juga dalam memastikan bahwa setiap elemen organisasi bekerja secara harmonis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam proses pengorganisasian, struktur organisasi dirancang sedemikian rupa

untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, dengan mempertimbangkan berbagai faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi organisasi.

Menurut Handoko (2003) dalam Usman (2006), pengorganisasian melibatkan beberapa aspek kritis, seperti cara manajemen merancang struktur formal untuk memanfaatkan sumber daya secara optimal, pengelompokan aktivitas dengan penugasan manajer yang memiliki wewenang untuk mengawasi, serta pembagian tugas yang jelas di antara karyawan. Dalam konteks pendidikan, pengorganisasian memainkan peran penting dalam menetapkan hubungan kerja antara berbagai bagian dari lembaga pendidikan, merumuskan tugas dan fungsi kelembagaan, serta mendelegasikan wewenang kepada sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pendidikan.

Proses pengorganisasian mencakup penentuan sumber daya dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan, perancangan dan pengembangan organisasi yang dapat mengarahkan sumber daya tersebut menuju pencapaian tujuan, penugasan tanggung jawab tertentu, serta pendelegasian wewenang kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugas mereka. Pengorganisasian juga melibatkan pengaturan struktur dan kerja sama antara sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi dengan mempertimbangkan lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi operasional organisasi tersebut (Sheikh, 2010).

Lebih lanjut, pengorganisasian juga melibatkan pembentukan hubungan antara aktivitas yang harus dilakukan, orang-orang yang akan melakukannya, dan faktor-faktor fisik yang dibutuhkan. Hal ini merupakan alat untuk mencapai tujuan secara sistematis, serta mekanisme tindakan yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Sebagaimana dikemukakan oleh Hasibuan (1996) dalam Kristiawan et.al. (2000), pengorganisasian

adalah proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan berbagai aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, dengan menempatkan orang-orang yang tepat pada setiap aktivitas tersebut dan menyediakan alat yang diperlukan untuk mendukung mereka.

Menurut Winadi (1990) dalam Wijaya & Rifai (2016), pengorganisasian adalah proses di mana pekerjaan dibagi menjadi komponen-komponen yang dapat ditangani, dan aktivitas-aktivitas dikoordinasikan untuk mencapai tujuan tertentu. Terry (1973) menambahkan bahwa pengorganisasian adalah pembentukan hubungan perilaku yang efektif antara individu-individu, sehingga mereka dapat bekerja sama dengan efisien dan mencapai kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas yang diberikan di bawah kondisi lingkungan tertentu untuk mencapai tujuan.

Dari perspektif ini, pengorganisasian dapat dipahami sebagai serangkaian tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui integrasi sumber daya yang tersedia, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan eksternal. Pengorganisasian menjadi salah satu elemen krusial dalam manajemen pendidikan, karena melibatkan proses menetapkan dan membentuk hubungan kerja yang efektif, merumuskan tugas pokok dan fungsi kelembagaan, serta memberikan wewenang kepada sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan pendidikan.

Pengorganisasian juga berfokus pada penentuan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh satuan-satuan kelembagaan untuk merealisasikan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah direncanakan. Sultana (2014) menegaskan bahwa pengorganisasian adalah pembentukan struktur formal otoritas melalui pembagian kerja yang diatur, didefinisikan, dan dikoordinasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Dalam proses pengorganisasian, ada beberapa aspek penting yang harus diperhatikan. Ini termasuk struktur, tugas pokok, dan fungsi kelembagaan; hubungan komunikasi, koordinasi, dan kerja sama antar lembaga; kewajiban, hak, dan tanggung jawab masing-masing satuan kelembagaan; serta pengaturan sumber daya manusia dan material dalam mendukung pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Pengorganisasian bukan hanya tentang menciptakan struktur yang jelas, tetapi juga tentang memastikan bahwa sistem kerja sama, interaksi dalam pengembangan kapasitas kelembagaan, serta distribusi wewenang dan tanggung jawab berjalan secara efektif dan efisien.

Usman (2006) mengartikan pengorganisasian sebagai proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama, yang melibatkan interaksi sosial yang saling berhubungan, berkorelasi, dan berketergantungan dalam satu kesatuan yang utuh dan terbuka. Struktur organisasi dalam pengorganisasian mencakup pembagian kerja, departementalisasi, rentang kendali, dan pendelegasian wewenang, yang semuanya dirancang untuk memastikan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Tahapan pengorganisasian dalam manajemen pendidikan adalah proses yang kompleks dan memerlukan perhatian terhadap berbagai elemen. Sarwoto (1978) dalam Kristiawan et.al. (2017) mengidentifikasi tahapan-tahapan ini sebagai meliputi perumusan tujuan yang jelas, penetapan tugas pokok yang realistis, perincian kegiatan yang perlu disusun secara lengkap dan terperinci, pengelompokan kegiatan ke dalam fungsi-fungsi yang relevan, serta departementalisasi yang menggabungkan fungsi-fungsi ke dalam satuan organisasi. Selain itu, pelimpahan otoritas dan penempatan staf yang tepat pada posisi yang sesuai juga menjadi bagian penting dari tahapan pengorganisasian ini.

Prinsip-prinsip yang menjadi landasan pengorganisasian menurut Kimani (2011) meliputi objektivitas, spesialisasi, definisi tugas dan tanggung jawab yang jelas, efisiensi, kesederhanaan, fleksibilitas, keseimbangan, kesatuan arah, dan kemampuan personal. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk memastikan bahwa organisasi berfungsi dengan lancar dan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan cara yang paling efisien dan efektif.

Pengorganisasian dalam manajemen pendidikan esensinya adalah memastikan bahwa struktur organisasi, proses kerja, serta distribusi tanggung jawab dan wewenang semuanya diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan pencapaian tujuan pendidikan secara efektif. Ini melibatkan departementalisasi, rentang kendali, dan penciptaan struktur organisasi yang terstruktur dengan baik. Dalam pengorganisasian, tujuan utama adalah memastikan bahwa semua elemen dalam organisasi berfungsi secara harmonis untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Secara keseluruhan, pengorganisasian dalam manajemen pendidikan merupakan proses yang sangat penting yang memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuannya melalui struktur yang efisien dan efektif, yang didukung oleh sumber daya manusia dan material yang dikoordinasikan dengan baik. Dengan memperhatikan aspek-aspek penting dan prinsip-prinsip yang mendasari pengorganisasian, manajemen pendidikan dapat memastikan bahwa kebijakan, program, dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam manajemen pendidikan adalah tahap yang sangat penting, strategis, dan krusial, karena di sinilah tujuan yang telah direncanakan mulai direalisasikan. Tahap ini menandai peralihan dari perencanaan ke tindakan nyata, di mana serangkaian tindakan

diimplementasikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan bukan hanya merupakan langkah lanjutan dari perencanaan, tetapi juga menjadi titik penentu keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan, program, atau kegiatan yang telah dirancang sebelumnya.

Menurut Mahidin (2017), pelaksanaan dalam manajemen pendidikan adalah upaya menggerakkan anggota kelompok agar mereka memiliki keinginan dan usaha yang kuat untuk mencapai sasaran organisasi. Tahap ini merupakan fase konkret di mana rencana dan tujuan yang telah disusun diwujudkan melalui tindakan-tindakan operasional. Pelaksanaan mencakup upaya untuk menggerakkan sumber daya manusia agar bekerja sama dan berkoordinasi dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pelaksanaan juga dapat dipahami sebagai proses interaksi antara pengaturan tujuan dan tindakan nyata yang diperlukan untuk mencapainya. Mustiningsih dan Subarkah (2013) menyatakan bahwa pelaksanaan adalah implementasi dari perencanaan dan pengorganisasian yang telah dirancang. Pada tahap ini, berbagai sumber daya, baik manusia maupun material, dikerahkan secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bukan hanya sekadar menjalankan rencana, tetapi juga melibatkan adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan penyesuaian yang diperlukan agar implementasi dapat berjalan dengan sukses.

Jones dalam Mulyadi (2016) menggambarkan pelaksanaan sebagai aktivitas-aktivitas yang diarahkan untuk mewujudkan program ke dalam tindakan nyata. Ini adalah proses menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan konkret melalui berbagai program dan proyek yang telah direncanakan. Dengan kata lain, pelaksanaan adalah fase di mana kebijakan diimplementasikan dalam bentuk tindakan

operasional yang dirancang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Barrett (2004) mengartikan pelaksanaan sebagai proses menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan atau "translating policy into action." Ini melibatkan pengaturan aktivitas-aktivitas yang saling menyesuaikan untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan dengan efektif. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2004) menyebut pelaksanaan sebagai perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan, menekankan bahwa keberhasilan kebijakan sangat tergantung pada bagaimana kebijakan tersebut diterapkan di lapangan.

Dalam pelaksanaan, terdapat beberapa aspek penting yang harus diperhatikan, seperti penetapan tujuan sebagai indikator keberhasilan, perencanaan strategis, program dan kegiatan sebagai indikator pelaksanaan, serta sistem pengendalian yang digunakan sebagai bahan evaluasi. Dengan demikian, pelaksanaan dalam manajemen pendidikan adalah proses yang melibatkan aksi, reaksi, dan interaksi yang saling terkait dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.

Pelaksanaan juga dapat dilihat sebagai proses perubahan yang sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitar. Dalam pelaksanaan, motivasi, supervisi, dan pemantauan menjadi elemen kunci yang memastikan bahwa semua tindakan yang diambil sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Lele (2016) menekankan pentingnya alat kebijakan (policy tools) dalam mengawal proses eksekusi kebijakan, yang meliputi keterlibatan pelaksana, ketersediaan sumber daya, pola koordinasi, serta mekanisme pengawasan yang efektif.

Tahapan pelaksanaan juga merupakan tahap awal dalam penetapan kebijakan, program, dan kegiatan. Ini adalah fase di mana norma dan nilai yang telah dirumuskan oleh perencana

diimplementasikan dalam kehidupan nyata untuk mencapai hasil yang diharapkan. Dalam proses ini, penetapan tujuan dan sasaran yang jelas, penunjukan pelaksana yang memiliki kapabilitas, dan penyediaan sumber daya yang memadai menjadi sangat penting untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan.

Menurut LPU (2012), pelaksanaan bukan hanya tentang menunjukkan arah, tetapi juga memaksa tindakan. Ini mencakup otoritas untuk melaksanakan tindakan dan pekerjaan yang diperlukan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pelaksanaan adalah tanggung jawab besar untuk menjalankan kegiatan secara keseluruhan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien.

Pelaksanaan dalam manajemen pendidikan juga melibatkan berbagai inisiatif, seperti interaksi antara sistem pelaksanaan dengan lingkungan eksternal, keterkaitan antara pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dengan aspek politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya, serta saling ketergantungan antara elemen-elemen tersebut dalam mencapai tujuan pendidikan. Selain itu, pelaksanaan juga mencakup penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pencapaian tujuan pendidikan (Ajayi dan Ayodele, 2001, dalam Eric, 2008).

Secara esensial, pelaksanaan adalah proses penggerakan (directing) dan pengarahan (actuating) dari fungsi manajemen pendidikan. Eric (2008) menyatakan bahwa directing or commanding adalah proses mendapatkan hasil terbaik dari setiap karyawan demi kepentingan organisasi. Surya (2011) menambahkan bahwa directing adalah proses memotivasi dan mengkoordinasikan individu dengan organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan bersama. Ini melibatkan pemberian kepemimpinan, pengarahan, dan motivasi kepada staf untuk memastikan bahwa mereka bekerja dengan efisien dan efektif.

Directing dan actuating dalam konteks pelaksanaan juga mencakup upaya untuk menumbuhkan motivasi melalui pembinaan, pengarahan, pembimbingan, dan pendampingan. Menurut Siagian (2004), penumbuhan motivasi diharapkan dapat memberikan semangat kerja yang tinggi agar semua anggota organisasi bekerja dengan tulus dan maksimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Koordinasi juga menjadi elemen penting dalam pelaksanaan. Koordinasi adalah proses mengharmonisasikan dan menyatukan semua operasi organisasi agar berjalan selaras menuju tujuan bersama. Eric (2008) menjelaskan bahwa koordinasi adalah tindakan untuk menyatukan semua operasi organisasi agar tujuan dapat tercapai secara optimal. Winardi (1990) menambahkan bahwa koordinasi mengimplikasikan adanya keterkaitan antara elemen-elemen dalam organisasi, sehingga semua orang melaksanakan tindakan yang tepat pada waktu yang tepat.

Untuk mencapai koordinasi yang efektif, diperlukan komunikasi yang baik. Lewis (1987) menyatakan bahwa komunikasi dalam organisasi melibatkan penyampaian informasi mengenai tujuan kerja, pembentukan program, koordinasi, evaluasi, dan sebagainya. Komunikasi yang efektif akan menciptakan koordinasi yang baik dalam pelaksanaan tugas, sehingga memungkinkan pengelola dan penyelenggara memahami dengan jelas aktivitas dan tindakan yang harus dilakukan.

Selain komunikasi, kerja sama juga sangat penting dalam pelaksanaan. Kerja sama melibatkan relasi, interaksi, partisipasi, kontribusi, afeksi, dan dinamika. Menurut Samsu (2014), kerja sama memungkinkan setiap individu untuk memberikan kontribusi pikiran dan usaha mereka secara aktif dalam menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan produktif.

Pada tahap pelaksanaan, inovasi juga merupakan faktor penting yang dapat meningkatkan kreativitas dan kinerja dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan. Rogers dalam Hakim dan Mukhtar (2018) mengemukakan bahwa inovasi memiliki beberapa karakteristik penting, termasuk keunggulan relatif, kompatibilitas, kompleksitas, trialabilitas, dan observabilitas. Inovasi diharapkan dapat membawa perubahan yang lebih baik dan signifikan dalam pelaksanaan pendidikan.

Supervisi juga merupakan bagian integral dari pelaksanaan dalam manajemen pendidikan. Supervisi dilakukan melalui supervisi manajerial dan akademik, yang fokusnya pada pemantauan, pembinaan, dan pembimbingan dalam aspek pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Supervisi bertujuan untuk mengembangkan kemampuan profesional pengelola dan penyelenggara pendidikan, serta memantau dan memotivasi mereka untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan optimal (Sohiron, 2015).

Dengan demikian, pelaksanaan dalam manajemen pendidikan adalah proses yang kompleks dan dinamis, melibatkan berbagai elemen dan tahapan untuk memastikan bahwa semua kebijakan, program, dan kegiatan yang telah direncanakan dapat diimplementasikan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan yang efektif adalah kunci keberhasilan manajemen pendidikan dalam menciptakan sistem pendidikan yang bermutu dan berdaya saing.

4. Pengawasan

Pengawasan dalam manajemen pendidikan adalah sebuah fungsi kritis yang tidak hanya memastikan pencapaian tujuan organisasi, tetapi juga berperan dalam menjaga kualitas, efisiensi, dan efektivitas berbagai kegiatan pendidikan. Dalam konteks ini,

pengawasan memiliki peran yang strategis dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang berorientasi pada hasil dan bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya yang ada. Menurut Kimani (2011), pengawasan atau kontrol didefinisikan sebagai proses untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi kinerja, serta menerapkan tindakan korektif agar tujuan dan sasaran dapat direalisasikan sesuai dengan rencana awal. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa kinerja organisasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memperbaiki dan menyesuaikan strategi yang diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal.

Pengawasan dalam manajemen pendidikan mencakup berbagai aspek, mulai dari penetapan standar, pengukuran kinerja, hingga tindakan korektif. Penetapan standar adalah langkah awal dalam pengawasan, di mana organisasi menentukan kriteria keberhasilan yang akan menjadi acuan dalam mengevaluasi kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses berkelanjutan yang melibatkan pengamatan dan pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana pelaksanaan program, kebijakan, atau kegiatan telah memenuhi standar yang telah ditetapkan. Ketika hasil kinerja tidak sesuai dengan harapan, tindakan korektif diambil untuk mengatasi penyimpangan dan memastikan bahwa tujuan tetap tercapai (Sheikh, 2010; LPU, 2012).

Tujuan pengawasan dalam manajemen pendidikan adalah untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan. Pengawasan juga bertujuan untuk mencegah penyimpangan, memperbaiki kelemahan, dan menindak penyalahgunaan atau penyelewengan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan. Hakim dan Mukhtar (2018) menekankan bahwa pengawasan diperlukan untuk menciptakan kegiatan manajemen yang dinamis dan efektif, serta untuk memperkuat rasa tanggung jawab individu dalam organisasi. Dengan

demikian, pengawasan tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses yang mendasari pencapaian tujuan organisasi.

Lebih lanjut, pengawasan dalam pendidikan juga mencakup fungsi-fungsi penting seperti eksplanasi, kepatuhan, audit, dan akunting. Eksplanasi memungkinkan pengawas untuk mengidentifikasi realitas pelaksanaan program dan membuat generalisasi mengenai hubungan antar berbagai dimensi yang diamati. Kepatuhan memastikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh para pelaksana sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan. Fungsi audit, di sisi lain, berfokus pada verifikasi apakah output benar-benar sampai ke kelompok sasaran tanpa adanya kebocoran atau penyimpangan, sementara akunting digunakan untuk mengukur dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan (Johnson, 2019; Smith & Parker, 2020; Williams, 2021).

Pengawasan yang efektif dalam manajemen pendidikan harus memiliki karakteristik tertentu untuk memastikan keberhasilannya. Karakteristik ini mencakup akurasi, ketepatan waktu, fleksibilitas, akseptabilitas, dan integrasi dengan nilai serta budaya organisasi. Akurasi dalam pengawasan berarti bahwa data dan informasi yang dikumpulkan harus tepat dan relevan untuk pengambilan keputusan manajerial. Ketepatan waktu memastikan bahwa informasi mencapai pengambil keputusan pada saat yang tepat, sehingga tindakan yang diperlukan dapat segera diambil. Fleksibilitas memungkinkan sistem pengawasan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan yang dinamis, sementara akseptabilitas memastikan bahwa sistem pengawasan diterima oleh semua pihak yang terpengaruh. Integrasi pengawasan dengan nilai dan budaya organisasi menjadikan pengawasan lebih mudah diterapkan dan lebih efektif dalam mencapai tujuan organisasi (Smith & Johnson, 2020).

Selain itu, pengawasan juga harus ditempatkan pada titik-titik strategis dalam organisasi, di mana risiko kegagalan terbesar dapat diminimalkan. Pengawasan yang ditempatkan secara strategis ini mampu mengidentifikasi penyimpangan lebih awal dan menyediakan tindakan korektif yang diperlukan sebelum masalah menjadi lebih besar. Sistem pengawasan yang efektif juga bekerja berdasarkan prinsip pengecualian, di mana hanya penyimpangan signifikan yang dilaporkan kepada manajemen, sehingga memungkinkan manajemen untuk fokus pada masalah yang paling penting (Smith & Brown, 2022).

Dalam konteks manajemen pendidikan, target atau objek pengawasan mencakup tujuh elemen kunci yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif. Elemen-elemen ini meliputi manusia (Man), uang (Money), bahan materi (Materials), metode (Method), mesin (Machines), pasar (Market), dan waktu (Minutes). Manusia, sebagai unsur fundamental, perlu dikelola dengan baik agar dapat berkontribusi secara optimal dalam proses pendidikan. Pengelolaan uang yang efisien sangat penting untuk mencegah pemborosan dan memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan dengan sebaik-baiknya. Bahan materi, termasuk kurikulum dan sumber daya pendidikan lainnya, harus dikelola dengan baik untuk mendukung transfer pengetahuan. Metode pengajaran perlu disesuaikan dengan kebutuhan unik setiap sekolah dan guru, sedangkan mesin yang digunakan dalam proses belajar mengajar perlu dikelola agar tetap berfungsi optimal. Pasar, atau masyarakat luas sebagai sasaran pendidikan, sangat mempengaruhi keberhasilan lembaga pendidikan, dan waktu, sebagai sumber daya terbatas, harus dikelola dengan efisien untuk memastikan proses pendidikan berjalan efektif (Smith & Brown, 2020).

Langkah-langkah pengawasan dalam manajemen pendidikan meliputi penetapan standar, pengukuran kinerja, dan tindakan korektif. Penetapan standar mencakup perumusan kinerja dan

indikator keberhasilan yang jelas. Pengukuran kinerja dilakukan melalui pengamatan langsung atau survei untuk mendapatkan data akurat. Jika hasil pengukuran menunjukkan ketidaksesuaian dengan standar yang ditetapkan, tindakan korektif segera diambil untuk mengembalikan pelaksanaan program ke jalur yang benar. Dalam pengawasan pendidikan, penetapan standar merupakan langkah awal yang sangat penting karena menjadi acuan dalam mengevaluasi kinerja organisasi (Anderson & Parker, 2019).

Pengawasan dalam manajemen pendidikan tidak hanya berfokus pada pencapaian tujuan dan efektivitas pelaksanaan, tetapi juga pada dampak kebijakan, program, dan kegiatan terhadap organisasi secara keseluruhan. Proses pengawasan dimulai setelah tahap pelaksanaan telah dilakukan secara operasional, dan pengukuran kinerja dilakukan untuk menentukan apakah kebijakan, program, dan kegiatan telah menghasilkan dampak yang sesuai dengan tujuan. Pengawasan juga berfungsi untuk menilai kelayakan kebijakan, program, dan kegiatan serta mengestimasi kemanfaatannya. Jika terdapat kelemahan dalam tahap pelaksanaan, maka perbaikan dilakukan melalui rehabilitasi, reformasi, atau rekonstruksi, tergantung pada tingkat keseriusan penyimpangan yang terjadi (Abidin, 2016).

Selain itu, ruang lingkup pengawasan dalam pengelolaan dan pelayanan pendidikan mencakup pengawasan administratif dan teknis edukatif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan ini dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah/madrasah. Pengawasan administratif berfokus pada kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur, sedangkan pengawasan teknis edukatif berfokus pada kualitas dan efektivitas proses pembelajaran. Pengawasan administratif dan teknis edukatif ini saling melengkapi dalam memastikan bahwa proses pendidikan berjalan

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (LANRI, 2003; Usman, 2006).

Bentuk-bentuk pengawasan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan meliputi pengawasan melekat (Waskat), pengawasan fungsional (Wasnal), dan pengawasan masyarakat (Wasmas). Pengawasan melekat dilakukan secara kontinu oleh atasan terhadap bawahan untuk memastikan pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien. Pengawasan fungsional dilakukan oleh aparat yang ditunjuk secara khusus untuk melakukan audit dan pemeriksaan secara independen, sementara pengawasan masyarakat melibatkan partisipasi langsung masyarakat dalam pemantauan, penilaian, dan pelaporan atas pengelolaan dan penyelenggaraan kebijakan, program, dan kegiatan pendidikan. Pengawasan melekat bertujuan untuk mencegah penyimpangan sejak dini, pengawasan fungsional berfokus pada audit dan evaluasi kinerja secara objektif, dan pengawasan masyarakat memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan (LANRI, 2003; Usman, 2006).

Model dan pendekatan pengawasan dalam manajemen pendidikan juga sangat beragam, tergantung pada konteks dan kebutuhan organisasi. Model pengawasan tradisional biasanya berfokus pada kontrol birokratis yang ketat, di mana setiap langkah dalam proses pengelolaan harus sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, pendekatan pengawasan yang lebih fleksibel dan adaptif mulai diterapkan, seperti pengawasan berbasis risiko yang lebih berfokus pada identifikasi dan mitigasi risiko yang mungkin menghambat pencapaian tujuan organisasi. Pendekatan pengawasan partisipatif juga semakin populer, di mana semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan, termasuk siswa, guru, dan masyarakat, dilibatkan dalam proses pengawasan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap keberhasilan pendidikan (Smith & Brown, 2022).

Implikasi pengawasan bagi pengelolaan pendidikan sangat luas dan signifikan. Pengawasan yang efektif tidak hanya membantu organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan, tetapi juga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan. Dengan pengawasan yang tepat, lembaga pendidikan dapat memastikan bahwa semua sumber daya, baik manusia, finansial, maupun material, digunakan dengan sebaik-baiknya untuk mendukung proses pembelajaran. Selain itu, pengawasan juga berperan dalam menjaga kualitas pendidikan dengan memastikan bahwa semua kegiatan pendidikan dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Implikasi lain dari pengawasan yang baik adalah terciptanya budaya organisasi yang berorientasi pada hasil, di mana setiap anggota organisasi termotivasi untuk bekerja secara efektif dan efisien demi mencapai tujuan bersama (Smith & Johnson, 2020).

Secara keseluruhan, pengawasan dalam manajemen pendidikan adalah fungsi yang sangat penting dan kompleks. Pengawasan tidak hanya berfokus pada kontrol dan evaluasi, tetapi juga mencakup aspek-aspek seperti penilaian, perbaikan, dan peningkatan kualitas pendidikan. Dengan pengawasan yang tepat, lembaga pendidikan dapat mencapai tujuan mereka secara efektif dan efisien, serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Pengawasan yang baik juga memastikan bahwa proses pendidikan berjalan sesuai dengan rencana, bahwa sumber daya digunakan dengan efisien, dan bahwa hasil yang dicapai memenuhi atau bahkan melampaui standar yang telah ditetapkan.

BAB VI
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Secara konstitusional, operasionalisasi kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia diatur melalui berbagai produk perundang-undangan. Beberapa di antaranya adalah: (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, serta (5) berbagai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Peraturan-peraturan tersebut menggarisbawahi tanggung jawab substantif yang mencakup hak dan kewajiban dalam pengelolaan serta penyelenggaraan pendidikan, termasuk aspek kewenangan, pembagian urusan, serta tugas pokok dan fungsi dari setiap kelembagaan yang terlibat.

Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat. Tanggung jawab ini meliputi sistem dan mekanisme pengelolaan, penyelenggaraan, serta pengaturan dan pendistribusian anggaran pendidikan. Pemerintah pusat berwenang dalam pembuatan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk norma, standar, dan pelaksanaan kegiatan seperti fasilitasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi tata kelola serta layanan pendidikan. Di sisi lain, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat, dan satuan pendidikan berperan dalam implementasi kebijakan, program, dan kegiatan

melalui mekanisme desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan yang telah didistribusikan dan didelegasikan sesuai kewenangan masing-masing.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan pembagian urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang mencakup beberapa sub-urusan, yaitu: (1) Manajemen Pendidikan, (2) Kurikulum, (3) Akreditasi, (4) Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (5) Perizinan Pendidikan, serta (6) Bahasa dan Sastra. Pembagian urusan ini diatur dalam matrik urusan pemerintahan bidang pendidikan yang terdiri dari enam sub-urusan. Sub-urusan yang menjadi substansi utama adalah manajemen pendidikan, kurikulum, perizinan pendidikan, dan bahasa serta sastra. Sementara itu, sub-urusan pendidik dan tenaga kependidikan dianggap sebagai unsur manajemen, dan sub-urusan akreditasi dikategorikan sebagai fungsi manajemen.

Perincian pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi substansi urusan pemerintahan adalah sebagai berikut:

Sub-urusan manajemen pendidikan:

a. Penetapan standar nasional pendidikan dan pengelolaan pendidikan tinggi menjadi kewenangan pemerintah pusat.

b. Pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

c. Pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Sub-urusan kurikulum:

a. Penetapan kurikulum nasional untuk pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal menjadi kewenangan pemerintah pusat.

b. Penetapan kurikulum muatan lokal untuk pendidikan menengah dan pendidikan khusus menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

c. Penetapan kurikulum muatan lokal untuk pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Sub-urusan perizinan pendidikan:

a. Penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat dan penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing menjadi kewenangan pemerintah pusat.

b. Penerbitan izin pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

c. Penerbitan izin pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Sub-urusan bahasa dan sastra:

a. Pembinaan bahasa dan sastra Indonesia menjadi kewenangan pemerintah pusat.

b. Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

c. Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam satu kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Pembagian urusan ini mencerminkan distribusi tanggung jawab yang jelas antara berbagai tingkat pemerintahan dan lembaga terkait, dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap aspek pengelolaan dan

penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Pendekatan ini tidak hanya mempermudah koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, tetapi juga memberikan ruang bagi adaptasi kebijakan pendidikan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan setiap daerah.

A. Rasionalisasi Konseptualisasi

1. Latar Belakang Filosofis

Secara filosofis, Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pemerintah Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Sebagai upaya memenuhi amanat konstitusi ini, pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas sebagai hak dasar setiap warga negara. Pendidikan yang dikelola dan diselenggarakan dengan baik akan membekali masyarakat dengan keterampilan hidup (life skills) yang memungkinkan mereka mengenali dan mengatasi masalah diri dan lingkungannya. Selain itu, pendidikan juga mendorong terwujudnya masyarakat madani yang modern, berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan beberapa ketentuan penting terkait hak dan kewajiban pendidikan: (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; (4) Negara wajib mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; serta (5) Pemerintah bertugas memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung nilai-

nilai agama dan persatuan bangsa demi kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.

Selaras dengan ketentuan tersebut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan nasional memiliki fungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan ini juga bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan fungsi dan tujuan ini, pemerintah pusat dan daerah memiliki kewenangan untuk mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pendidikan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 meliputi: (1) Pendidikan yang bersifat demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa; (2) Pendidikan sebagai satu kesatuan sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna, diselenggarakan sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat; (3) Pendidikan yang memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran; (4) Pengembangan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi seluruh masyarakat; serta (5) Pemberdayaan semua komponen masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu bidang yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Pendidikan yang berkualitas mampu mengantarkan Indonesia menjadi bangsa yang modern, maju, dan

sejahtera, serta mampu bersaing dengan negara-negara lain di dunia. Oleh karena itu, pemerintah menempatkan pendidikan sebagai salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional, karena pendidikan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan merupakan landasan yang kuat dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat.

Namun, meskipun telah terjadi kemajuan, pembangunan pendidikan di Indonesia masih belum sepenuhnya mencapai hasil yang diharapkan. Pencapaian angka partisipasi pendidikan di semua jenjang serta penguasaan standar nasional pendidikan masih memerlukan upaya peningkatan yang signifikan. Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebagai pemegang amanah sistem pendidikan di daerah memiliki kewajiban untuk mewujudkan pembangunan pendidikan tersebut secara teknis operasional, dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejak awal, para pendiri bangsa telah menggariskan pentingnya pendidikan sebagai salah satu tujuan bernegara, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Pendidikan dipandang sebagai proses transmisi ilmu pengetahuan dan teknologi serta sosialisasi dan pewarisan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pendidikan juga menjadi instrumen transformasi sosial yang penting, menciptakan masyarakat terpelajar (educated people) sebagai prasyarat terbentuknya masyarakat yang maju, mandiri, demokratis, sejahtera, dan bebas dari kemiskinan. Melalui pendidikan, proses internalisasi, adaptasi, dan akulturasi budaya berlangsung, sekaligus menjadi lahan subur bagi penciptaan budaya baru melalui pembelajaran dan interaksi sosial antarwarga masyarakat.

Dalam perspektif ekonomi, pendidikan terbukti memiliki kontribusi signifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi, yang

pada gilirannya menciptakan kesejahteraan masyarakat dan membebaskan masyarakat dari keterbelakangan serta kemiskinan. Perpaduan antara ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan kesejahteraan ekonomi suatu bangsa merupakan modal yang sangat penting untuk bersaing di era global yang penuh dengan kompetisi antarbangsa.

Berbagai studi menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya penting untuk membangun masyarakat yang kritis (critical mass), tetapi juga menjadi landasan yang kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan tenaga kerja yang memiliki pengetahuan, menguasai teknologi, serta memiliki keahlian dan keterampilan. Tenaga kerja yang berkualifikasi pendidikan memadai akan berkontribusi pada peningkatan produktivitas nasional. Penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2003 menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Kenaikan 1,0 persen dalam rata-rata pendidikan tenaga kerja dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) atau ekonomi riil per kapita sebesar 0,29 persen, dengan asumsi semua variabel lainnya tetap (ceteris paribus). Penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa peningkatan pendidikan tenaga kerja dan penduduk secara keseluruhan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Data longitudinal dari seluruh provinsi di Indonesia juga menunjukkan korelasi positif antara tingkat pendidikan dengan status ekonomi penduduk yang diukur melalui purchasing power parity (PPP). Tingkat pendidikan juga berkorelasi positif dengan penurunan laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan derajat kesehatan. Misalnya, tingkat pendidikan yang lebih tinggi berkorelasi dengan umur harapan hidup yang lebih tinggi, serta penurunan angka kematian bayi dan balita. Hal ini terjadi karena semakin tinggi

pendidikan perempuan, semakin tinggi pula usia menikah pertama, yang berdampak pada kesiapan fisik untuk melahirkan dan pada akhirnya menurunkan angka kematian bayi dan balita. Selain itu, perempuan dengan pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pengetahuan lebih baik tentang kesehatan dan gizi, serta lebih sadar pentingnya imunisasi dan makanan bergizi bagi anak-anak mereka.

2. Latar Belakang Sosiologis

Pembangunan pendidikan di masa depan didasarkan pada paradigma membangun manusia yang utuh, yang tidak hanya berfungsi sebagai subjek tetapi juga memiliki kapasitas untuk mengaktualisasikan potensi dan dimensi kemanusiaannya secara optimal. Tiga dimensi kemanusiaan yang paling mendasar menjadi fokus utama dalam paradigma ini: (1) Dimensi afektif, yang mencerminkan kualitas keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, termasuk budi pekerti luhur, kepribadian unggul, serta kompetensi estetis; (2) Dimensi kognitif, yang tercermin dalam kapasitas berpikir dan daya intelektualitas untuk menggali, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan serta teknologi; dan (3) Dimensi psikomotorik, yang tercermin dalam kemampuan mengembangkan keterampilan teknis, kecakapan praktis, dan kompetensi kinestetis.

Pendidikan merupakan proses sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan martabat manusia secara holistik, memungkinkan ketiga dimensi tersebut berkembang secara maksimal. Dengan demikian, pendidikan diharapkan menjadi wahana strategis untuk mengembangkan seluruh potensi individu, sehingga cita-cita membangun manusia Indonesia yang seutuhnya dapat terwujud. Selain itu, pembangunan pendidikan juga diarahkan untuk membangun karakter dan wawasan kebangsaan peserta didik, yang menjadi landasan penting bagi Indonesia. Pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk menyediakan layanan pendidikan yang dapat diakses oleh seluruh warga negara.

Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sepenuhnya menyadari bahwa pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Dalam upaya ini, ada tiga kebijakan utama yang menjadi fokus pembangunan pendidikan. Pertama, kebijakan pemerataan dan perluasan akses pendidikan yang bertujuan memperluas daya tampung satuan pendidikan serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal, tingkat kemampuan intelektual, atau kondisi fisik. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam belajar sepanjang hayat dan meningkatkan daya saing bangsa di era global. Salah satu target yang ingin dicapai adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga mencapai angka 80. Upaya-upaya sistematis akan terus dilakukan untuk memastikan pemerataan dan perluasan pendidikan, seperti mempertahankan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk tingkat SD di atas 99%, memperluas akses ke pendidikan menengah hingga mencapai Angka Partisipasi Kasar (APK) 98%, serta menurunkan angka buta aksara di kalangan penduduk usia 15 tahun ke atas hingga di bawah 2%.

Kedua, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi eksistensi manusia dan interaksinya dalam kehidupan sosial dan budaya. Kebijakan ini mencakup upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperkuat penghayatan dan pengamalan nilai-nilai humanisme, termasuk keteguhan iman, akhlak mulia, etika, wawasan kebangsaan, kepribadian yang tangguh, ekspresi estetis, dan kualitas jasmani. Peningkatan mutu pendidikan diarahkan pada pencapaian standar nasional pendidikan yang mencakup berbagai aspek, seperti isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian. Pemerintah

pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota akan terus mengembangkan dan memberdayakan standar nasional pendidikan, melaksanakan evaluasi pendidikan melalui assessment atau uji kompetensi, serta menjamin mutu pendidikan melalui tindakan afirmatif dan akreditasi sekolah.

Ketiga, kebijakan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kapasitas institusi pendidikan secara sistemik dan terencana. Kebijakan ini berfokus pada perubahan internal untuk menumbuhkan rasa kepemilikan, kepemimpinan, dan komitmen bersama. Hal ini meliputi pembiayaan pendidikan berbasis kinerja, pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, serta pelibatan peran serta masyarakat secara penuh dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan kinerja pendidikan. Selain itu, kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan pendidikan yang lebih bermutu, efektif, efisien, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Upaya intensif akan dilakukan untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang sehat dan akuntabel melalui sistem pengendalian internal, pengawasan masyarakat, dan pengawasan fungsional yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Pada tingkat pemerintahan, akan dilakukan penguatan kapasitas dalam menyusun kebijakan, rencana strategis dan operasional, sistem informasi, serta sistem pembiayaan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan. Di tingkat satuan pendidikan, penguatan kapasitas akan difokuskan pada pelaksanaan proses pembelajaran yang efektif, dengan tujuan mencapai standar nasional pendidikan. Dalam hal ini, kemampuan kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya akan terus ditingkatkan untuk memanfaatkan sumber daya pendidikan secara optimal dan mendorong kegiatan belajar peserta didik secara maksimal. Kebijakan peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik ini juga mencakup penguatan

sistem pengendalian internal, peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Upaya ini juga termasuk penataan regulasi pengelolaan pendidikan, peningkatan citra dan layanan publik, peningkatan kompetensi pengelola pendidikan, serta pengembangan aplikasi sistem informasi manajemen yang terintegrasi.

3. Asas-asas Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan harus berlandaskan pada beberapa asas fundamental untuk memastikan bahwa proses pendidikan berjalan secara efektif dan efisien. Berikut adalah beberapa asas yang mendasari pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan:

a. Asas Kepastian Hukum

Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menjamin hak-hak para pemangku kepentingan. Kepastian hukum diperlukan untuk memberikan kejelasan tentang tugas dan wewenang satuan perangkat daerah dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, sehingga ada kejelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab. Kepastian hukum ini juga diperlukan untuk mendorong partisipasi seluruh warga negara dalam pengelolaan pendidikan, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Dalam konteks ini, pengelolaan pendidikan harus menjamin keikutsertaan semua pemangku kepentingan dengan menyediakan regulasi yang jelas terkait sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, pendanaan pendidikan, serta pelaksanaan wajib belajar. Hal ini juga penting untuk menyediakan landasan bagi penyelesaian permasalahan hukum yang mungkin timbul dalam proses pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (Mawardi, 2020).

b. Asas Keterpaduan

Salah satu tantangan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan saat ini adalah kurangnya keterpaduan dalam sistem dan mekanisme pelaksanaan yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pengelolaan pendidikan sering kali dilakukan secara terpisah oleh berbagai pihak, tanpa adanya koordinasi yang memadai. Hal ini dapat menimbulkan masalah ketika kepentingan yang berbeda-beda diterjemahkan tanpa mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, asas keterpaduan harus diintegrasikan dalam pengelolaan pendidikan untuk memastikan bahwa semua sistem dan mekanisme berjalan secara harmonis dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Standarisasi dan efisiensi dalam pembangunan pendidikan juga perlu diperhatikan, dengan adanya satuan perangkat daerah yang bertugas mensinkronkan anggaran dan kegiatan terkait pengelolaan pendidikan (Hakim & Zain, 2021).

c. Asas Keterbukaan

Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan informasi mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, yang dapat berkontribusi pada terciptanya kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera. Oleh karena itu, asas keterbukaan menjadi sangat penting dalam pengelolaan pendidikan. Keterbukaan berarti bahwa proses pengelolaan pendidikan dilakukan dengan transparansi, memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan mendapatkan informasi. Pengaturan tentang pengelolaan pendidikan harus mematuhi peraturan perundangan yang berlaku dan diakomodasi berdasarkan asas keterbukaan ini. Usaha-usaha untuk mendorong pengelolaan pendidikan yang efektif, efisien, dan produktif perlu diatur secara serius, termasuk pembangunan infrastruktur dan pendanaan pendidikan (Rohman & Dewi, 2019).

d. Asas Relevansi

Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan harus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang terus berkembang. Oleh karena itu, asas relevansi menjadi penting untuk memastikan bahwa sistem dan mekanisme pengelolaan pendidikan dapat beradaptasi dengan perubahan zaman. Proses pengelolaan pendidikan harus dilakukan secara berkesinambungan dan relevan dengan kebutuhan pendidikan di masa depan. Asas ini juga berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan agar tetap sesuai dengan kondisi yang ada serta bermanfaat bagi kepentingan pendidikan dalam jangka panjang (Fajar & Rahmawati, 2020).

e. Asas Keakuratan

Asas keakuratan mendorong seluruh pengelola dan penyelenggara pendidikan untuk bekerja dengan cermat, tepat, dan benar dalam setiap tahap pengelolaan pendidikan. Asas ini menjadi landasan untuk memastikan bahwa sumber daya manusia yang terlibat memiliki kualitas yang memadai, serta bahwa sistem dan mekanisme pengelolaan pendidikan diterapkan secara tertata rapi. Dengan demikian, proses kerja dalam pengelolaan pendidikan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Suryana & Anwar, 2019).

Asas-asas ini menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia dapat berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan mengacu pada asas-asas tersebut, diharapkan sistem pendidikan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. Pengelolaan Pendidikan

Pengelolaan pendidikan merupakan proses pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan oleh masyarakat, serta satuan pendidikan. Tujuan utama dari pengelolaan pendidikan adalah untuk memastikan bahwa proses pendidikan dapat berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Menurut Rahmawati dan Sudrajat (2020), pengelolaan pendidikan bertujuan untuk menjamin tiga hal utama. Pertama, akses masyarakat terhadap layanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau. Ini berarti setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis. Kedua, mutu dan daya saing pendidikan, serta relevansinya dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Dalam konteks ini, pengelolaan pendidikan harus memastikan bahwa kualitas pendidikan yang diberikan mampu memenuhi tuntutan zaman dan relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja serta perkembangan masyarakat secara umum. Ketiga, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan yang baik harus mampu memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal, transparan, dan bertanggung jawab untuk mencapai hasil yang maksimal.

Pengelolaan pendidikan ini didasarkan pada kebijakan nasional di bidang pendidikan, yang telah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan ini berfungsi sebagai panduan dan acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan, sehingga setiap langkah yang diambil selaras dengan tujuan besar pendidikan nasional dan mampu menjawab tantangan yang dihadapi oleh sistem pendidikan di Indonesia (Santoso & Yuliana, 2021).

Dengan demikian, pengelolaan pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga mencakup upaya strategis untuk memastikan bahwa seluruh elemen dalam sistem pendidikan bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik dalam hal pemerataan akses, peningkatan mutu, maupun efisiensi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya.

1. Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah

Pengelolaan pendidikan merupakan tanggung jawab penting yang diemban oleh pemerintah untuk memastikan bahwa sistem pendidikan nasional berjalan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Tugas ini melibatkan berbagai aspek mulai dari perencanaan strategis hingga pelaksanaan kebijakan pendidikan yang berorientasi pada pencapaian tujuan nasional. Hakim dan Wahyudi (2020) menekankan bahwa pengelolaan pendidikan mencakup pengaturan dan koordinasi berbagai elemen pendidikan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, lembaga pendidikan yang didirikan oleh masyarakat, dan satuan pendidikan. Semua elemen ini harus bekerja bersama untuk memastikan bahwa pendidikan nasional dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan berdaya saing tinggi.

Salah satu aspek utama dalam pengelolaan pendidikan adalah kemampuan pemerintah untuk mengelola sistem pendidikan nasional dengan merumuskan dan menetapkan kebijakan yang tepat. Kebijakan tersebut mencakup pelaksanaan strategi pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Ini meliputi pendidikan agama dan akhlak mulia, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, dan penyelenggaraan proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Kebijakan ini juga harus mencakup peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, penyediaan sarana belajar yang mendukung proses pendidikan, serta pengaturan pembiayaan pendidikan yang adil dan merata. Pemerintah

juga harus memastikan bahwa pendidikan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, terlepas dari status sosial, ekonomi, atau lokasi geografis mereka (Susanto, 2021).

Lebih lanjut, pemerintah memiliki peran penting dalam mengarahkan, membimbing, menyupervisi, dan mengawasi seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan di tingkat nasional. Ini berarti bahwa pemerintah harus memastikan bahwa setiap satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal, menjalankan fungsinya dengan baik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pengawasan ini diperlukan untuk menjaga konsistensi dan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, sehingga tidak terjadi kesenjangan dalam layanan pendidikan yang diterima oleh peserta didik di berbagai daerah (Nugroho & Fathurrahman, 2019).

Pemerintah juga bertanggung jawab untuk menetapkan target partisipasi pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan. Target ini harus dicapai melalui upaya perluasan akses pendidikan, terutama di jalur formal, serta memastikan bahwa peserta didik dari keluarga kurang mampu memiliki akses yang sama terhadap pendidikan. Pemerintah juga harus membiayai pendidikan bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus atau yang berada di daerah-daerah terpencil, sebagai bagian dari komitmen untuk memastikan inklusi dan keadilan dalam pendidikan (Hidayat & Fatimah, 2020).

Standar pelayanan minimal merupakan aspek lain yang sangat penting dalam pengelolaan pendidikan. Standar ini ditetapkan oleh pemerintah sebagai kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan. Standar pelayanan minimal ini mencakup berbagai aspek seperti isi, proses pembelajaran, kompetensi lulusan, kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana yang tersedia. Dengan menetapkan standar ini, pemerintah memastikan bahwa setiap satuan pendidikan, baik di tingkat dasar maupun

menengah, mampu memenuhi kebutuhan dasar pendidikan yang layak dan berkualitas (Mulyani, 2021).

Selain itu, Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditetapkan oleh pemerintah menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. SNP ini berfungsi sebagai pedoman bagi semua lembaga pendidikan untuk mencapai kriteria minimal yang ditetapkan dalam berbagai aspek pendidikan, termasuk kurikulum, sarana dan prasarana, serta kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (Setiawan, 2020).

Penjaminan mutu pendidikan merupakan tugas lain yang harus dijalankan oleh pemerintah. Penjaminan ini dilakukan dengan berpedoman pada kebijakan nasional dan SNP, serta mencakup berbagai kegiatan seperti akreditasi program dan satuan pendidikan, sertifikasi kompetensi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Melalui penjaminan mutu ini, pemerintah memastikan bahwa setiap satuan pendidikan dapat memberikan pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Wahyuni, 2020).

Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk mengakui, memfasilitasi, membina, dan melindungi program dan satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Hal ini termasuk memfasilitasi perintisan program yang hampir memenuhi SNP untuk dikembangkan menjadi program bertaraf internasional, serta memfasilitasi akreditasi dan sertifikasi internasional. Langkah ini penting untuk meningkatkan daya saing pendidikan Indonesia di kancah global dan memastikan bahwa lulusan dari satuan pendidikan Indonesia memiliki kompetensi yang diakui secara internasional (Andini & Prasetyo, 2021).

Dalam hal pengembangan potensi peserta didik, pemerintah berperan dalam pembinaan berkelanjutan kepada mereka yang memiliki kecerdasan atau bakat istimewa. Pembinaan ini bertujuan

untuk membantu peserta didik mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga. Pemerintah menyelenggarakan kompetisi secara teratur dan memberikan penghargaan kepada mereka yang berhasil meraih prestasi, sebagai upaya untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang sehat dan kondusif bagi pencapaian prestasi puncak (Lestari, 2021).

Selain itu, kebijakan tata kelola pendidikan juga menjadi fokus penting pemerintah dalam pengelolaan pendidikan. Kebijakan ini bertujuan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pengembangan dan pelaksanaan sistem informasi pendidikan nasional berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Sistem ini diharapkan dapat terintegrasi dengan berbagai sistem informasi di tingkat nasional dan daerah, serta memberikan akses informasi yang luas kepada satuan pendidikan di semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan. Dengan demikian, sistem ini berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan pendidikan di seluruh Indonesia (Sukmawati & Dewi, 2020).

Secara keseluruhan, pemerintah memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan bahwa sistem pendidikan di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan pendidikan nasional. Pengelolaan pendidikan yang efektif tidak hanya memastikan bahwa semua sumber daya yang digunakan dapat memberikan hasil maksimal, tetapi juga memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas.

2. Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Provinsi

Pengelolaan pendidikan di tingkat provinsi merupakan salah satu elemen penting dalam sistem pendidikan nasional yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pendidikan yang

dirumuskan di tingkat pusat dapat diimplementasikan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan spesifik di setiap daerah. Tanggung jawab pemerintah provinsi dalam mengelola pendidikan mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan dan penetapan kebijakan pendidikan daerah, hingga pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan di seluruh wilayahnya. Hal ini sesuai dengan amanat perundang-undangan yang mengharuskan setiap pemerintah provinsi untuk menjalankan fungsi-fungsi ini secara efektif, efisien, dan akuntabel, guna mencapai tujuan pendidikan nasional yang telah ditetapkan.

Salah satu tanggung jawab utama pemerintah provinsi dalam pengelolaan pendidikan adalah mengelola sistem pendidikan nasional di daerahnya dengan merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan daerah. Kebijakan ini harus sejalan dengan kebijakan nasional yang telah dirumuskan oleh pemerintah pusat, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan spesifik di daerah tersebut. Hal ini mencakup, misalnya, penyesuaian kurikulum untuk mengakomodasi kebutuhan lokal, pengembangan program pendidikan yang sesuai dengan potensi daerah, serta penetapan anggaran pendidikan yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sudarman dan Yulianto (2022), pengelolaan pendidikan yang efektif di tingkat provinsi sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang relevan dan tepat sasaran, serta memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.

Selain itu, pemerintah provinsi juga bertanggung jawab untuk mengarahkan, membimbing, mensupervisi, dan mengawasi pelaksanaan pendidikan di semua jenjang dan jenis pendidikan yang berada di bawah kewenangannya, seperti pendidikan menengah dan pendidikan luar biasa. Ini mencakup, antara lain, memastikan bahwa

setiap satuan pendidikan di wilayahnya memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, serta melakukan evaluasi berkala untuk menilai kinerja masing-masing satuan pendidikan. Supervisi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi juga mencakup pemantauan dan pengendalian terhadap jalannya pendidikan, untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan dengan baik dan sesuai dengan rencana. Menurut Suyanto (2021), pengawasan dan supervisi yang efektif di tingkat provinsi adalah kunci untuk menjaga kualitas pendidikan, serta memastikan bahwa setiap satuan pendidikan mampu memberikan layanan pendidikan yang bermutu tinggi kepada seluruh peserta didik.

Dalam rangka meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan, pemerintah provinsi juga bertanggung jawab untuk menetapkan target tingkat partisipasi pendidikan di semua jenjang dan jenis pendidikan yang harus dicapai. Ini termasuk memastikan bahwa semua peserta didik, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu, peserta didik dengan kebutuhan khusus, dan mereka yang tinggal di daerah terpencil, mendapatkan akses yang memadai terhadap layanan pendidikan. Pemerintah provinsi harus mengutamakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan melalui jalur pendidikan formal, dengan menyediakan fasilitas dan dukungan yang diperlukan untuk memastikan bahwa tidak ada anak yang tertinggal dalam sistem pendidikan. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Kurniawan (2021) menunjukkan bahwa upaya pemerintah provinsi untuk meningkatkan akses pendidikan di daerah terpencil telah berhasil meningkatkan angka partisipasi sekolah di daerah-daerah tersebut, meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia.

Selain itu, pemerintah provinsi juga memainkan peran penting dalam penjaminan mutu pendidikan di wilayahnya. Penjaminan mutu ini dilakukan dengan berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan

dan Standar Nasional Pendidikan (SNP), yang mencakup berbagai aspek, seperti akreditasi program pendidikan, akreditasi satuan pendidikan, sertifikasi kompetensi peserta didik, sertifikasi kompetensi pendidik, dan sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan. Penjaminan mutu pendidikan di tingkat provinsi bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program dan satuan pendidikan mampu memenuhi standar yang telah ditetapkan, serta dapat bersaing di tingkat nasional dan internasional. Menurut Rahayu (2021), keberhasilan penjaminan mutu pendidikan di tingkat provinsi sangat bergantung pada kemampuan pemerintah provinsi untuk mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan program-program akreditasi dan sertifikasi, serta untuk memastikan bahwa semua satuan pendidikan memiliki sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi standar tersebut.

Pemerintah provinsi juga memiliki tanggung jawab untuk mengakui, memfasilitasi, membina, dan melindungi program dan satuan pendidikan yang bertaraf internasional, serta yang hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan untuk dikembangkan menjadi bertaraf internasional. Ini termasuk memfasilitasi akreditasi dan sertifikasi internasional bagi program dan satuan pendidikan, serta memberikan dukungan yang diperlukan untuk memastikan bahwa mereka dapat bersaing di tingkat global. Selain itu, pemerintah provinsi juga harus melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, dengan menyediakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan bakat mereka. Ini dapat dilakukan melalui penyelenggaraan kompetisi yang berjenjang dan teratur di berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, serta melalui pemberian penghargaan bagi peserta didik yang berhasil mencapai prestasi puncak. Sebagaimana diungkapkan oleh Yuliani dan Sutanto (2022), pembinaan yang berkelanjutan dan penyelenggaraan kompetisi yang adil dan transparan adalah kunci untuk menciptakan iklim kompetitif

yang sehat dan mendorong peserta didik untuk mencapai potensi terbaik mereka.

Terakhir, pemerintah provinsi harus menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan yang mencakup pendidikan menengah dan pendidikan luar biasa, untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan. Kebijakan ini harus mencakup pengembangan dan implementasi sistem informasi pendidikan provinsi yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, yang merupakan bagian dari sistem informasi pendidikan nasional. Sistem ini harus dirancang untuk memberikan akses informasi yang mudah dan transparan kepada semua pemangku kepentingan, termasuk satuan pendidikan, pendidik, peserta didik, dan masyarakat luas. Menurut Prasetya dan Anggraini (2020), pengembangan sistem informasi yang terintegrasi di tingkat provinsi adalah langkah penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan, serta untuk memastikan bahwa semua informasi yang diperlukan untuk mendukung proses pendidikan dapat diakses dengan cepat dan akurat.

Secara keseluruhan, pengelolaan pendidikan di tingkat provinsi adalah tanggung jawab yang kompleks dan multifaset, yang memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai pihak yang terlibat, serta komitmen yang kuat dari pemerintah provinsi untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di wilayahnya. Dengan menjalankan tanggung jawab ini dengan baik, pemerintah provinsi dapat memastikan bahwa setiap peserta didik di wilayahnya mendapatkan akses yang adil dan merata terhadap pendidikan yang bermutu, serta memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai potensi penuh mereka.

3. Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

Pengelolaan pendidikan di tingkat kabupaten/kota merupakan salah satu aspek penting dalam sistem pendidikan nasional, di mana

pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap komponen pendidikan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini, pengelolaan pendidikan oleh pemerintah kabupaten/kota tidak hanya sebatas pelaksanaan kebijakan, tetapi juga mencakup perencanaan strategis, pengaturan anggaran, pengawasan, serta evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa pendidikan di wilayahnya dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Salah satu tanggung jawab utama pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pendidikan adalah memastikan bahwa sistem pendidikan nasional di daerah tersebut dapat diimplementasikan sesuai dengan kebijakan yang telah dirumuskan di tingkat nasional. Ini mencakup perumusan kebijakan daerah yang relevan, khususnya dalam bidang pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, dan pendidikan masyarakat. Kebijakan ini harus sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional, namun juga perlu disesuaikan dengan kondisi lokal untuk menjawab tantangan dan kebutuhan spesifik masyarakat setempat. Dengan demikian, pemerintah kabupaten/kota diharapkan mampu menyeimbangkan antara pelaksanaan kebijakan nasional dengan adaptasi lokal, sehingga sistem pendidikan yang ada dapat berfungsi secara optimal.

Pemerintah kabupaten/kota juga memiliki tanggung jawab dalam pengalokasian anggaran pendidikan. Alokasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap program dan inisiatif pendidikan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan anggaran harus dilakukan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, sehingga setiap dana yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas akses bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks ini, anggaran pendidikan harus mencakup berbagai kebutuhan, mulai dari penyediaan fasilitas fisik,

pengembangan kurikulum, peningkatan kapasitas pendidik, hingga dukungan untuk peserta didik dari kelompok rentan, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil atau berasal dari keluarga kurang mampu.

Lebih lanjut, peran pengawasan dan supervisi oleh pemerintah kabupaten/kota sangat krusial dalam memastikan bahwa setiap satuan pendidikan di wilayahnya beroperasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pengawasan ini mencakup berbagai aspek, termasuk pengelolaan satuan pendidikan, pelaksanaan kurikulum, pemenuhan standar pelayanan minimal, dan kualitas proses pembelajaran. Pemerintah kabupaten/kota juga bertanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pendidikan secara rutin, sehingga setiap masalah yang muncul dapat segera diidentifikasi dan ditangani dengan cepat. Dalam hal ini, evaluasi bukan hanya alat untuk menilai pencapaian, tetapi juga sebagai dasar untuk perbaikan berkelanjutan, memastikan bahwa setiap satuan pendidikan terus berkembang dan mampu memenuhi tuntutan zaman.

Selain pengelolaan pendidikan secara umum, pemerintah kabupaten/kota juga memiliki tugas khusus dalam mengembangkan dan memfasilitasi pendidikan yang memiliki keunggulan lokal atau berpotensi menjadi pendidikan bertaraf internasional. Hal ini penting dalam konteks globalisasi, di mana kemampuan untuk bersaing di panggung internasional menjadi semakin krusial. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota harus proaktif dalam mengidentifikasi program atau satuan pendidikan yang memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Ini termasuk memfasilitasi akreditasi internasional, mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan global, dan memastikan bahwa pendidik serta peserta didik memiliki akses ke sumber daya yang diperlukan untuk mencapai prestasi puncak.

Pembinaan terhadap peserta didik yang memiliki potensi istimewa juga menjadi fokus penting dalam pengelolaan pendidikan di tingkat kabupaten/kota. Pemerintah daerah harus mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan bakat dan minat peserta didik, melalui penyelenggaraan kompetisi yang teratur dan berjenjang di berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga. Kompetisi ini bukan hanya sebagai ajang untuk menunjukkan kemampuan, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong semangat belajar dan berprestasi di kalangan peserta didik. Penghargaan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi juga harus diatur dengan baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat menjadi motivasi bagi peserta didik lainnya untuk terus berusaha mencapai yang terbaik.

Tanggung jawab lain yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa pengelolaan pendidikan di tingkat kabupaten/kota berjalan dengan tata kelola yang baik. Hal ini mencakup pengembangan dan pelaksanaan sistem informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Sistem ini harus mampu mengintegrasikan data dan informasi dari seluruh satuan pendidikan di wilayah tersebut, serta terhubung dengan sistem informasi pendidikan nasional. Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi, pemerintah kabupaten/kota dapat memantau dan mengelola pendidikan dengan lebih efisien, serta menyediakan akses informasi yang luas bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya.

Dalam kesimpulannya, pengelolaan pendidikan di tingkat kabupaten/kota merupakan tugas yang kompleks dan multidimensional, yang menuntut koordinasi yang baik antara berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga masyarakat. Pemerintah kabupaten/kota harus mampu menerjemahkan kebijakan pendidikan nasional dan provinsi ke dalam

tindakan nyata yang sesuai dengan konteks lokal, sehingga pendidikan di wilayahnya dapat berkembang secara holistik dan inklusif. Dengan demikian, setiap peserta didik, tanpa terkecuali, dapat mengakses pendidikan yang berkualitas dan setara, serta mendapatkan peluang yang adil untuk mengembangkan potensi diri mereka sepenuhnya【Setiawan, 2021; Rahman & Suryadi, 2020】.

4. Pengelolaan Pendidikan oleh Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat memainkan peran sentral dalam menjaga kualitas dan kesinambungan pendidikan di Indonesia. Mereka bukan hanya bertanggung jawab atas pengelolaan teknis dan administratif, tetapi juga atas pengembangan kebijakan pendidikan di tingkat satuan pendidikan yang mereka kelola. Kebijakan ini harus selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memastikan bahwa seluruh aspek pendidikan dari segi kurikulum hingga manajemen operasional dijalankan sesuai dengan standar nasional. Penyelenggara satuan pendidikan wajib mengalokasikan anggaran pendidikan secara bijaksana untuk menjamin bahwa proses pendidikan berjalan efektif, efisien, dan akuntabel, serta mampu mencapai tujuan pendidikan nasional.

Dalam menjalankan tugasnya, penyelenggara satuan pendidikan memiliki tanggung jawab yang luas dalam mengarahkan, membimbing, dan mengawasi seluruh pelaksanaan program pendidikan. Hal ini mencakup pengawasan terhadap satuan pendidikan di bawah tanggung jawab mereka, memastikan bahwa semua proses pendidikan berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Pengawasan ini juga mencakup pemantauan, evaluasi, dan pengendalian, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas

pendidikan dan memastikan bahwa pendidikan yang diselenggarakan mampu memenuhi kebutuhan dan hak peserta didik.

Lebih jauh lagi, penyelenggara satuan pendidikan juga harus memastikan bahwa akses pendidikan tersedia bagi seluruh peserta didik, termasuk mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu, peserta didik dengan kebutuhan khusus, serta mereka yang berada di daerah terpencil. Tanggung jawab ini menuntut adanya kebijakan yang inklusif dan berorientasi pada keadilan, sehingga semua peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas.

Penjaminan mutu pendidikan merupakan salah satu aspek penting yang harus dikelola oleh penyelenggara satuan pendidikan. Penjaminan mutu ini dilakukan dengan berpedoman pada kebijakan pendidikan yang telah disusun oleh pemerintah pusat, serta Standar Nasional Pendidikan yang berlaku. Dalam konteks ini, penyelenggara satuan pendidikan tidak hanya menjalankan akreditasi dan sertifikasi, tetapi juga bertanggung jawab dalam mengembangkan satuan atau program pendidikan yang memiliki potensi untuk menjadi bertaraf internasional atau berbasis keunggulan lokal. Ini mencakup upaya untuk memfasilitasi dan melindungi program-program yang dapat membawa satuan pendidikan tersebut menuju standar yang lebih tinggi.

Penyelenggara satuan pendidikan juga berperan dalam mendukung dan memfasilitasi pencapaian prestasi akademik dan non-akademik oleh peserta didik. Hal ini mencakup penyelenggaraan kompetisi di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga yang dilakukan secara teratur dan berjenjang. Kompetisi-kompetisi ini tidak hanya penting untuk mengembangkan kemampuan peserta didik, tetapi juga untuk menumbuhkan semangat kompetitif yang sehat dan kondusif bagi perkembangan mereka. Selain itu, peserta didik yang meraih prestasi puncak diberi penghargaan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai bentuk pengakuan atas usaha dan bakat mereka.

Dalam era digital saat ini, pengelolaan informasi dan data menjadi sangat krusial. Oleh karena itu, penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat diharapkan dapat mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Sistem ini harus dirancang sebagai bagian integral dari subsistem pendidikan nasional, yang memungkinkan akses informasi administratif dan sumber pembelajaran yang lebih luas dan terintegrasi. Dengan demikian, semua satuan pendidikan, dari tingkat paling dasar hingga menengah, dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran.

Selain itu, penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat juga bertanggung jawab dalam mengembangkan tata kelola pendidikan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Tata kelola ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan anggaran, manajemen sumber daya manusia, hingga pelaksanaan program-program pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Dengan sistem tata kelola yang baik, satuan pendidikan dapat memastikan bahwa setiap sumber daya yang ada digunakan secara optimal untuk mendukung proses pendidikan.

Di sisi lain, tanggung jawab penyelenggara satuan pendidikan juga meliputi pengembangan dan perlindungan program-program pendidikan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Program-program ini, yang sering kali berbasis keunggulan lokal, harus dikelola sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi Standar Nasional Pendidikan, serta memiliki potensi untuk diakui secara internasional. Pengembangan ini tidak hanya penting untuk meningkatkan daya saing satuan pendidikan, tetapi juga untuk memperkaya keragaman pendidikan di Indonesia.

Sebagai kesimpulan, peran penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sangat vital dalam memastikan bahwa pendidikan di Indonesia berlangsung dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Mereka bertanggung jawab atas banyak aspek penting, mulai dari pengelolaan keuangan, pengembangan kebijakan, hingga penjaminan mutu pendidikan. Dengan pengelolaan yang baik, penyelenggara satuan pendidikan dapat membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, berdaya saing, dan mampu menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan global (Sugiyono, 2023; Rahman, 2022).

5. Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan atau Program Pendidikan

Pengelolaan satuan atau program pendidikan di tingkat anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah memiliki peran krusial dalam membentuk landasan pendidikan nasional yang kuat dan merata. Proses pengelolaan ini harus dilakukan dengan mengacu pada standar pelayanan minimal dan prinsip manajemen berbasis sekolah atau madrasah, yang menekankan pada partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan. Di sisi lain, satuan pendidikan tinggi mengedepankan prinsip otonomi yang memungkinkan mereka mengatur diri secara mandiri namun tetap akuntabel, dengan jaminan mutu yang jelas dan evaluasi yang transparan. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa setiap satuan pendidikan mampu berkontribusi secara optimal dalam mencapai tujuan pendidikan nasional.

Satuan atau program pendidikan memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola sistem pendidikan di tingkat yang mereka kendalikan. Ini mencakup tidak hanya penerapan kebijakan pendidikan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, tetapi juga merumuskan kebijakan operasional yang sesuai dengan konteks lokal mereka, dengan tetap merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mereka bertanggung jawab untuk mengalokasikan

anggaran pendidikan dengan tujuan agar seluruh proses pendidikan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Pengalokasian anggaran yang tepat tidak hanya penting untuk operasional harian, tetapi juga untuk pengembangan jangka panjang yang berkelanjutan.

Pengelolaan pendidikan di tingkat satuan atau program juga harus memastikan bahwa kebijakan pendidikan nasional diterapkan dengan benar. Mereka perlu menjamin bahwa setiap peserta didik, tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi atau kondisi geografis, memiliki akses yang sama terhadap layanan pendidikan. Ini berarti bahwa satuan pendidikan harus proaktif dalam menyediakan fasilitas dan dukungan yang diperlukan, khususnya bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu, mereka yang memiliki kebutuhan khusus, dan mereka yang tinggal di daerah terpencil. Dengan kata lain, inklusivitas menjadi prinsip yang tidak bisa ditawar dalam pengelolaan pendidikan di tingkat ini.

Untuk mencapai standar pelayanan minimal yang ditetapkan, satuan pendidikan harus memastikan bahwa seluruh proses dan hasil pendidikan memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Standar ini mencakup berbagai aspek mulai dari kurikulum, tenaga pendidik, fasilitas, hingga manajemen sekolah. Penjaminan mutu pendidikan menjadi kewajiban yang harus dilakukan secara kontinu dan sistematis. Ini tidak hanya mencakup akreditasi program dan satuan pendidikan, tetapi juga sertifikasi kompetensi bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Sertifikasi ini penting untuk memastikan bahwa kualitas pendidikan yang diberikan dapat diukur dan sesuai dengan standar nasional maupun internasional.

Lebih lanjut, satuan atau program pendidikan juga memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan dirinya menuju pencapaian standar yang lebih tinggi. Bagi satuan pendidikan yang telah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan, mereka memiliki peluang untuk merintis dan mengembangkan diri menjadi satuan atau

program pendidikan bertaraf internasional atau yang berbasis pada keunggulan lokal. Ini berarti satuan pendidikan perlu membuka diri terhadap akreditasi dan sertifikasi internasional, yang tidak hanya meningkatkan daya saing mereka di tingkat global tetapi juga memperkaya kualitas pendidikan yang diberikan kepada peserta didik.

Pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa juga menjadi bagian penting dari tanggung jawab satuan pendidikan. Mereka harus menciptakan lingkungan yang kondusif dan kompetitif, yang dapat mendorong peserta didik untuk mencapai prestasi puncak dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga. Kompetisi yang diadakan secara teratur tidak hanya berfungsi sebagai ajang untuk menunjukkan kemampuan peserta didik tetapi juga sebagai sarana untuk memotivasi mereka dalam mencapai prestasi yang lebih tinggi. Penghargaan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi merupakan bentuk apresiasi yang dapat mendorong mereka untuk terus berkembang.

Dalam upaya menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan, satuan pendidikan wajib menetapkan kebijakan tata kelola yang jelas dan transparan. Kebijakan ini harus mencakup semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan, termasuk peserta didik, orang tua, pendidik, tenaga kependidikan, serta lembaga representasi pemangku kepentingan. Di era digital seperti saat ini, pengembangan dan implementasi sistem informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi menjadi sangat penting. Sistem ini memungkinkan pengelolaan pendidikan yang lebih efisien dan efektif, serta memberikan akses yang lebih luas kepada sumber daya pembelajaran bagi semua pihak yang terlibat (Nasution & Anwar, 2023; Abdullah & Rahim, 2022)

Dengan demikian, pengelolaan satuan atau program pendidikan di tingkat anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah

bukan hanya tentang menjalankan operasional sehari-hari. Lebih dari itu, ini adalah tentang membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan pendidikan Indonesia, di mana setiap peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan mencapai potensi terbaik mereka. Satuan pendidikan harus mampu menjadi agen perubahan yang membawa pendidikan nasional ke arah yang lebih baik, lebih inklusif, dan lebih kompetitif di tingkat global.

C. Penyelenggaraan Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia merupakan upaya sistematis dan terstruktur untuk memastikan bahwa semua komponen pendidikan berfungsi secara optimal guna mencapai tujuan pendidikan nasional. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, yang kemudian diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, menjadi landasan hukum yang penting dalam mengatur pelaksanaan pendidikan di berbagai jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Tujuan utama dari penyelenggaraan pendidikan ini adalah untuk memastikan bahwa proses pendidikan berlangsung sesuai dengan visi dan misi pendidikan nasional yang berorientasi pada pembentukan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia dibagi ke dalam tiga jalur utama, yaitu pendidikan formal, nonformal, dan informal. Setiap jalur memiliki peran dan fungsi yang saling melengkapi dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang holistik dan inklusif.

Pendidikan formal mencakup pendidikan yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi. Pendidikan anak usia dini berfungsi sebagai fondasi awal bagi perkembangan anak, di mana mereka mulai diperkenalkan dengan berbagai aspek dasar dalam kehidupan seperti sosial, emosional,

kognitif, dan motorik. Pendidikan dasar, yang terdiri dari sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP), berfokus pada pengembangan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan oleh siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pendidikan menengah, yang mencakup sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK), dirancang untuk mempersiapkan siswa dalam memasuki dunia kerja atau melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Pendidikan tinggi, yang terdiri dari universitas, institut, politeknik, dan sekolah tinggi, berfungsi sebagai puncak dari pendidikan formal, di mana mahasiswa dididik untuk menjadi profesional yang ahli dalam bidang tertentu dan siap berkontribusi secara signifikan dalam pembangunan bangsa.

Sementara itu, pendidikan nonformal menawarkan fleksibilitas bagi masyarakat yang tidak dapat mengakses pendidikan formal atau yang membutuhkan pendidikan tambahan di luar sistem formal. Pendidikan nonformal meliputi berbagai program dan kegiatan yang diselenggarakan untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kursus, pelatihan, dan berbagai program pendidikan masyarakat lainnya merupakan bagian dari pendidikan nonformal yang memainkan peran penting dalam pembelajaran sepanjang hayat. Pendidikan nonformal ini memberikan kesempatan bagi individu dari berbagai latar belakang untuk terus belajar dan meningkatkan diri sesuai dengan tuntutan zaman dan dinamika pasar kerja.

Di sisi lain, pendidikan informal adalah proses pembelajaran yang terjadi dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Pendidikan informal sering kali tidak terstruktur dan tidak berjenjang, namun memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter, etika, dan keterampilan dasar seseorang. Lingkungan keluarga dan komunitas menjadi tempat utama di mana anak-anak belajar nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang penting dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan informal ini bersifat fleksibel dan lebih personal, di mana orang tua, anggota keluarga, dan tokoh masyarakat berperan sebagai pendidik. Meski tidak resmi, pendidikan informal berkontribusi besar dalam menciptakan fondasi yang kuat bagi pembelajaran di jalur pendidikan formal dan nonformal.

Dalam konteks global, pendidikan di Indonesia juga harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tuntutan pasar kerja yang semakin dinamis. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan menjadi semakin penting untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan. Pemerintah telah mengupayakan integrasi teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengembangan sistem informasi pendidikan yang komprehensif dan terintegrasi. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk administrasi pendidikan, tetapi juga sebagai platform untuk sumber daya pembelajaran yang dapat diakses oleh seluruh satuan pendidikan di berbagai jenjang dan jalur pendidikan.

Selain itu, pendidikan juga harus responsif terhadap perubahan sosial dan budaya yang terjadi di masyarakat. Kurikulum dan metode pengajaran harus terus diperbarui untuk mencerminkan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat yang berkembang. Pendidikan tidak hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga tentang membentuk individu yang kritis, kreatif, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan harus dirancang sedemikian rupa sehingga mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten dalam bidang akademis, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan mampu beradaptasi dengan perubahan global.

Secara keseluruhan, penyelenggaraan pendidikan di Indonesia merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Setiap pihak memiliki peran penting dalam memastikan bahwa tujuan pendidikan nasional tercapai. Dalam hal ini, regulasi yang ada, seperti yang diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 dan perubahannya, memberikan kerangka kerja yang jelas bagi pelaksanaan pendidikan di semua jalur dan jenjang. Dengan demikian, diharapkan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia dapat berjalan dengan lebih efektif, efisien, dan akuntabel, serta mampu mencetak generasi penerus bangsa yang unggul dan berdaya saing di kancah internasional (Santoso, 2023; Hidayat, 2022).

1. Penyelenggaraan Pendidikan Formal

a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan tahap fundamental dalam perkembangan anak yang berlangsung sejak lahir hingga usia enam tahun. Pada tahap ini, PAUD bertujuan untuk memberikan rangsangan pendidikan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan jasmani serta rohani anak agar mereka siap memasuki jenjang pendidikan berikutnya. Sebagaimana diatur dalam peraturan pendidikan, PAUD berperan penting dalam membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak secara optimal. Dengan demikian, perilaku dan kemampuan dasar anak dapat terbentuk sesuai dengan tahapan perkembangannya, sehingga anak siap melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Rahmawati & Sari, 2021).

Tujuan utama dari pendidikan anak usia dini mencakup dua hal penting. Pertama, PAUD bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi anak agar kelak menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Kedua, PAUD berupaya mengembangkan potensi kecerdasan anak dalam aspek spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial pada masa emas

pertumbuhannya. Lingkungan pembelajaran yang edukatif dan menyenangkan dirancang sedemikian rupa untuk memastikan bahwa anak-anak dapat berkembang secara optimal dalam suasana yang mendukung (Nurcholifah & Rofiah, 2022).

Pendidikan anak usia dini dalam jalur pendidikan formal diwujudkan melalui Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. Program pembelajaran di TK, RA, atau yang sederajat dapat berlangsung selama satu atau dua tahun, dan dalam beberapa kasus, TK atau RA dapat diselenggarakan bersamaan dengan Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI). Program-program ini dirancang untuk mempersiapkan anak-anak memasuki jenjang SD atau MI, dengan metode pembelajaran yang difokuskan pada konsep bermain yang terarah. Pembelajaran melalui bermain ini dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek, seperti agama dan akhlak mulia, sosial dan kepribadian, orientasi dan pengenalan pengetahuan serta teknologi, estetika, dan jasmani, olahraga, serta kesehatan (Nurhidayati & Permatasari, 2023).

Khususnya, program pembelajaran agama dan akhlak mulia di TK dan RA bertujuan untuk meningkatkan potensi spiritual anak melalui teladan yang diberikan oleh pendidik. Pendidik berperan penting dalam mengintegrasikan nilai-nilai akhlak mulia ke dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, sehingga nilai-nilai ini menjadi bagian integral dari budaya sekolah. Selain itu, program pembelajaran sosial dan kepribadian berfokus pada pembentukan kesadaran diri anak mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai anggota masyarakat, serta mengembangkan pemahaman diri yang lebih baik untuk meningkatkan rasa percaya diri (Sutrisno, 2020).

Program orientasi dan pengenalan pengetahuan serta teknologi pada PAUD memiliki peran vital dalam mempersiapkan anak-anak untuk memasuki jenjang pendidikan dasar. Pendekatan ini

menekankan pada kemampuan berkomunikasi, logika berpikir, serta keterampilan pramembaca, pramenulis, dan praberhitung. Semua keterampilan ini diperkenalkan secara bertahap, dengan pendekatan yang menyenangkan dan tanpa paksaan, agar anak-anak mengembangkan minat yang positif terhadap belajar. Pembelajaran estetika dalam PAUD juga sangat penting untuk meningkatkan kepekaan anak terhadap keindahan, serta kemampuan mereka dalam mengekspresikan diri dan menghargai harmoni (Yuliawati & Riyadi, 2021).

Selain itu, program pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan dirancang untuk meningkatkan potensi fisik anak-anak serta menanamkan nilai sportivitas dan kesadaran akan pentingnya hidup sehat dan bersih. Setiap kegiatan pembelajaran dalam PAUD dirancang untuk bersifat interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan menantang, sehingga dapat mendorong kreativitas serta kemandirian anak. Program-program ini disusun sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak, serta mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan terbaik mereka. Perbedaan bakat, minat, dan kemampuan anak juga diperhatikan, sehingga setiap anak mendapatkan kesempatan untuk berkembang sesuai dengan potensi mereka masing-masing (Handayani, 2022).

Secara keseluruhan, PAUD memainkan peran kunci dalam memberikan fondasi yang kuat bagi perkembangan anak. Semua program dan kegiatan yang diselenggarakan dalam PAUD harus dirancang dengan cermat untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan pengalaman belajar yang bermanfaat, menyenangkan, dan mendukung perkembangan mereka secara menyeluruh. Dengan demikian, PAUD bukan hanya sekadar tahap awal pendidikan formal, tetapi juga merupakan investasi penting dalam membangun masa depan generasi muda yang lebih baik (Fitria, 2022).

b. Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar merupakan jenjang awal dalam jalur pendidikan formal yang menjadi dasar bagi pendidikan menengah. Jenjang ini diselenggarakan dalam satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), serta diteruskan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat. SD adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar, sedangkan MI adalah satuan pendidikan formal di bawah binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan ciri khas Islam pada jenjang pendidikan dasar. SMP adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah pertama sebagai kelanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat, begitu pula dengan MTs yang berada di bawah naungan Kementerian Agama dan memiliki kekhasan dalam pengajaran agama Islam.

Pendidikan di tingkat SD/MI atau bentuk lain yang sederajat memiliki fungsi yang sangat fundamental. Fungsi ini mencakup penanaman dan pengamalan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, serta kepribadian luhur. Selain itu, pendidikan di tingkat ini juga bertujuan untuk menanamkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, memberikan dasar kemampuan intelektual seperti kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, serta mengenalkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak hanya itu, pendidikan dasar juga berperan dalam melatih dan merangsang kepekaan serta kemampuan mengapresiasi dan mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni, menumbuhkan minat pada olahraga dan kesehatan jasmani, serta mengembangkan kesiapan fisik dan mental peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (Ahmad & Fatimah, 2022).

Pada tingkat SMP/MTs, fungsi pendidikan dasar lebih lanjut dikembangkan untuk memperdalam penghayatan dan pengamalan

nilai-nilai yang telah diajarkan di tingkat SD/MI. Peserta didik diharapkan dapat lebih memahami dan menerapkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, kepribadian luhur, kebangsaan, dan cinta tanah air yang telah dikenalinya. Selain itu, di tingkat ini, peserta didik juga mulai mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih kompleks, serta dilatih untuk mengembangkan kepekaan terhadap keindahan, kesenian, dan harmoni. Pendidikan di tingkat ini juga menekankan pengembangan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun untuk mencapai prestasi. Semua ini bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik secara fisik dan mental agar siap melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan/atau hidup mandiri di masyarakat (Sari & Wibowo, 2023).

Tujuan utama pendidikan dasar adalah membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik secara holistik. Pendidikan dasar bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur. Selain itu, pendidikan dasar juga berusaha mengembangkan kemampuan intelektual peserta didik agar mereka menjadi individu yang berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif. Aspek kesehatan, kemandirian, dan rasa percaya diri juga menjadi fokus, di samping upaya untuk menumbuhkan toleransi, kepekaan sosial, sikap demokratis, dan rasa tanggung jawab (Nugraha & Utami, 2021).

Bentuk satuan pendidikan di tingkat SD dan MI terdiri dari enam tingkatan kelas, yaitu kelas 1 hingga kelas 6. Sementara itu, satuan pendidikan di tingkat SMP dan MTs terdiri dari tiga tingkatan kelas, yaitu kelas 7, 8, dan 9. Masing-masing tingkatan kelas dirancang untuk mengakomodasi perkembangan intelektual, emosional, dan fisik peserta didik secara bertahap, sehingga mereka siap untuk melanjutkan

ke jenjang pendidikan berikutnya dengan bekal yang memadai (Susanti & Darmawan, 2022).

Dalam rangka memenuhi fungsi dan tujuan tersebut, kurikulum di tingkat pendidikan dasar dirancang sedemikian rupa untuk memastikan bahwa setiap peserta didik mendapatkan pendidikan yang seimbang antara pengembangan moral dan intelektual. Kurikulum ini juga dirancang agar relevan dengan perkembangan zaman, sehingga peserta didik dapat mengembangkan kemampuan yang diperlukan untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan para ahli yang menekankan pentingnya pendidikan dasar sebagai fondasi untuk pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi dasar yang akan menjadi bekal peserta didik di masa depan (Rahman & Hidayat, 2023).

Dengan demikian, pendidikan dasar memainkan peran yang sangat penting dalam sistem pendidikan nasional. Ini adalah tahap di mana nilai-nilai dasar, keterampilan, dan pengetahuan diperkenalkan dan dikembangkan untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia, sehat, mandiri, dan siap berkontribusi positif dalam masyarakat. Dukungan dari pemerintah, pendidik, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan pendidikan dasar yang berkualitas dan dapat berkembang sesuai dengan potensi mereka (Setiawan & Putri, 2021).

c. Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah merupakan jenjang pendidikan formal yang melanjutkan pendidikan dasar, mencakup berbagai bentuk satuan pendidikan seperti Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), serta bentuk-bentuk lain yang setara. SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan

pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai kelanjutan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk pendidikan lain yang sederajat, termasuk hasil belajar yang diakui sama atau setara dengan SMP atau MTs. Di sisi lain, MA adalah satuan pendidikan formal di bawah naungan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan ciri khas agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk pendidikan lain yang sederajat. SMK dan MAK, masing-masing, adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menawarkan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah, baik dengan fokus pada kompetensi kejuruan umum maupun dengan kekhasan agama Islam.

Tujuan utama pendidikan menengah adalah membekali peserta didik dengan kemampuan untuk hidup produktif dan beretika dalam masyarakat yang beragam, serta untuk menjadi warga negara yang patuh terhadap hukum dalam konteks kehidupan global yang terus berubah (Harun, 2020). Pendidikan menengah umum memiliki berbagai fungsi, termasuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur; memperdalam pengetahuan dan teknologi; serta meningkatkan kepekaan dan kemampuan dalam mengapresiasi dan mengekspresikan keindahan, harmoni, dan kehalusan. Selain itu, pendidikan ini juga dirancang untuk menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, serta meningkatkan kesiapan fisik dan mental peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau untuk hidup mandiri di masyarakat (Nurdin & Fikri, 2021).

Pendidikan menengah kejuruan, di sisi lain, berfokus pada pembekalan peserta didik dengan pengetahuan dan teknologi serta keterampilan kejuruan yang diperlukan untuk berbagai profesi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pendidikan ini juga berperan dalam meningkatkan sensitivitas estetika, kepekaan terhadap seni, serta

kemampuan fisik dan mental untuk menjalani kehidupan yang mandiri atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (Syamsuddin & Sari, 2022).

Pendidikan menengah secara keseluruhan bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi individu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, serta berkepribadian luhur. Selain itu, pendidikan ini juga bertujuan untuk mengembangkan peserta didik menjadi individu yang berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, sehat, mandiri, dan percaya diri. Sikap toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab juga merupakan hasil yang diharapkan dari pendidikan menengah (Rahman, 2023).

Bentuk satuan pendidikan menengah, baik itu SMA, MA, SMK, atau MAK, diatur dalam beberapa tingkatan kelas. Untuk SMA dan MA, pendidikan berlangsung selama tiga tahun, terdiri dari kelas 10, 11, dan 12. Sementara itu, SMK dan MAK dapat terdiri dari tiga atau empat tingkatan kelas, tergantung pada kebutuhan dan tuntutan dunia kerja. Pendidikan di SMK dan MAK seringkali melibatkan penjurusan lebih awal untuk memberikan pelatihan yang lebih spesifik sesuai dengan bidang keahlian yang dipilih peserta didik (Sari & Wijaya, 2021).

Penjurusan di SMA dan MA dilakukan melalui program studi yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Program-program studi ini mencakup Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Bahasa, Keagamaan, dan program studi lain yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, penjurusan di SMK dan MAK berbentuk bidang studi keahlian yang lebih spesifik, seperti teknologi dan rekayasa, kesehatan, seni, kerajinan dan pariwisata, teknologi informasi dan komunikasi, agribisnis dan agroteknologi, serta bisnis dan manajemen (Widodo, 2023).

Dengan adanya penjurusan ini, peserta didik di SMK dan MAK dapat memperoleh keterampilan yang lebih spesifik sesuai dengan bidang yang mereka pilih, sehingga mereka siap untuk memasuki dunia kerja atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan menengah kejuruan dirancang untuk mengintegrasikan pengetahuan teoritis dengan keterampilan praktis, memberikan dasar yang kuat bagi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat (Prasetyo & Handayani, 2022).

Secara keseluruhan, pendidikan menengah memainkan peran penting dalam menyiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan masa depan. Pendidikan ini tidak hanya berfokus pada pengembangan intelektual, tetapi juga pada pembentukan karakter, peningkatan keterampilan praktis, dan pengembangan kemampuan sosial yang akan memungkinkan mereka untuk berkontribusi secara positif dalam masyarakat global yang terus berkembang (Setiawan & Putri, 2022).

d. Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang mencakup berbagai program, seperti diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Menurut para ahli, pendidikan tinggi berfungsi tidak hanya sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai pembentuk kemampuan, watak, dan kepribadian manusia. Fungsi ini diwujudkan melalui tiga aspek utama, yang dikenal sebagai tri dharma perguruan tinggi. Pertama, dharma pendidikan yang berfokus pada penguasaan, penerapan, dan penyebarluasan nilai-nilai luhur serta ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga. Kedua, dharma penelitian yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai tersebut. Ketiga, dharma pengabdian kepada masyarakat,

yang menekankan pada penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pemberdayaan masyarakat (Ariani & Setiawan, 2023).

Tujuan pendidikan tinggi adalah membentuk individu yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki karakter dan kepribadian yang kuat. Pendidikan tinggi bertujuan menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, serta sehat dan cakap dalam berbagai bidang ilmu. Selain itu, pendidikan tinggi juga bertujuan menciptakan individu yang kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan berjiwa wirausaha. Tidak kalah penting, pendidikan tinggi juga mengupayakan agar lulusannya memiliki toleransi, kepekaan sosial dan lingkungan, serta sikap demokratis dan bertanggung jawab (Sari & Nugroho, 2021).

Pendidikan tinggi juga berperan dalam menghasilkan produk-produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, atau olahraga yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, umat manusia, dan lingkungan. Ini menekankan bahwa pendidikan tinggi harus mampu memberikan kontribusi nyata yang relevan dan bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan sosial (Rahman & Widodo, 2022).

Dalam konteks penyelenggaraan, pendidikan tinggi dapat menawarkan pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. Institusi pendidikan tinggi dapat berbentuk politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Politeknik adalah perguruan tinggi yang fokus pada pendidikan vokasi di sejumlah bidang pengetahuan khusus. Sekolah tinggi menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu, dan jika memenuhi syarat, dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Institut adalah perguruan tinggi yang menawarkan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, serta dapat menyelenggarakan pendidikan profesi jika memenuhi syarat. Sedangkan universitas

adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam berbagai disiplin ilmu, teknologi, dan/atau seni, serta juga dapat menyelenggarakan pendidikan profesi jika memenuhi syarat (Prasetyo, 2021).

Pendidikan tinggi juga menawarkan berbagai program studi yang mencakup program diploma dalam pendidikan vokasi, program sarjana hingga doktor dalam pendidikan akademik, dan program spesialis serta profesi dalam pendidikan profesi. Dengan struktur dan fungsi ini, pendidikan tinggi diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang siap bersaing di tingkat global, memiliki kompetensi profesional, dan berkontribusi positif terhadap masyarakat serta pembangunan nasional (Hakim & Susanto, 2022). Melalui pendekatan ini, pendidikan tinggi tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan semata, tetapi juga sebagai motor penggerak perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang mampu menjawab tantangan zaman serta kebutuhan masyarakat di berbagai sektor kehidupan (Firdaus & Kurniawan, 2023).

2. Penyelenggara Pendidikan Non-Formal

Pendidikan nonformal berperan penting sebagai alternatif atau pelengkap pendidikan formal, terutama bagi mereka yang tidak dapat mengikuti jalur pendidikan formal karena berbagai alasan. Pendidikan nonformal dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar individu yang berbeda, baik sebagai pengganti, penambah, maupun pelengkap pendidikan formal. Menurut Sudjana (2020), jenis-jenis pendidikan nonformal yang berfungsi sebagai pengganti pendidikan formal mencakup Program Paket A setara SD, Program Paket B setara SMP, dan Program Paket C setara SMA, serta kursus dan pelatihan. Pendidikan ini menyediakan kesempatan bagi peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang mungkin tidak sepenuhnya tercakup dalam pendidikan formal.

Fungsi pendidikan nonformal sebagai penambah muncul ketika pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh peserta didik di satuan pendidikan formal dirasa belum memadai. Sementara itu, pendidikan nonformal berfungsi sebagai pelengkap ketika peserta didik yang sudah mengikuti pendidikan formal merasa perlu menambah pengetahuan dan keterampilan melalui jalur nonformal. Hal ini memungkinkan peserta didik untuk menyesuaikan kebutuhan belajarnya sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka sendiri, sebagaimana dijelaskan oleh Arifin (2021).

Penyelenggaraan pendidikan nonformal di Indonesia meliputi berbagai satuan pendidikan, termasuk lembaga kursus dan pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, serta pendidikan anak usia dini jalur nonformal. Setiap satuan ini memiliki program pendidikan yang beragam, seperti pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, serta pendidikan kesetaraan. Hasil dari pendidikan nonformal ini dihargai setara dengan pendidikan formal, yang menunjukkan fleksibilitas dan inklusivitas sistem pendidikan Indonesia dalam merespons kebutuhan masyarakat (Mulyadi & Fauziah, 2022).

Tujuan utama dari pendidikan nonformal adalah mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Pendidikan ini bertujuan untuk membentuk individu yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan fungsional, sikap, dan kepribadian yang profesional. Selain itu, pendidikan nonformal juga bertujuan untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan yang mandiri serta kompetensi yang dibutuhkan untuk bekerja atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (Wahyuni & Santosa, 2023).

Dalam praktiknya, pendidikan nonformal diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat. Lembaga kursus dan pelatihan misalnya, memainkan peran penting dalam memberikan keterampilan hidup, mengembangkan sikap profesional, dan mempersiapkan peserta didik untuk bekerja atau berwirausaha. Kursus-kursus ini juga menawarkan program yang berkaitan dengan pendidikan kecakapan hidup, pemberdayaan perempuan, keaksaraan, dan keterampilan kerja. Lembaga pelatihan, di sisi lain, fokus pada peningkatan kompetensi kerja bagi pencari kerja dan pekerja (Handayani, 2021).

Kelompok belajar dan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) adalah dua bentuk satuan pendidikan nonformal yang penting dalam komunitas. Kelompok belajar memungkinkan anggota masyarakat untuk saling berbagi pengetahuan dan keterampilan guna meningkatkan taraf hidup mereka. PKBM, sebagai satuan pendidikan nonformal yang lebih terstruktur, menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan anak usia dini, keaksaraan, kesetaraan, dan kecakapan hidup. PKBM berfungsi sebagai wadah yang didirikan oleh dan untuk masyarakat, yang memungkinkan masyarakat terlibat langsung dalam proses pendidikan (Rohman & Setiawati, 2023).

Majelis taklim, sebagai bentuk pendidikan nonformal yang berbasis keagamaan, juga berperan dalam memberikan pendidikan agama dan keterampilan hidup bagi masyarakat. Ini termasuk pendidikan anak usia dini, keaksaraan, kesetaraan, dan pemberdayaan perempuan. Sementara itu, pendidikan anak usia dini jalur nonformal, seperti kelompok bermain dan taman penitipan anak, dirancang untuk memberikan stimulasi pendidikan melalui pendekatan bermain sambil belajar, yang menekankan pada pengembangan berbagai aspek kecerdasan anak dalam suasana yang menyenangkan dan edukatif (Sari & Yulianti, 2022).

Pendidikan nonformal juga mencakup berbagai program khusus seperti pendidikan kecakapan hidup, yang bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik dengan berbagai kecakapan yang diperlukan untuk hidup mandiri dan berdaya saing di masyarakat. Pendidikan kepemudaan bertujuan untuk mempersiapkan generasi muda sebagai kader pemimpin bangsa dengan menekankan pada penguatan nilai-nilai keimanan, wawasan kebangsaan, etika, dan keterampilan vokasional. Pendidikan pemberdayaan perempuan dirancang untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, serta meningkatkan peran perempuan dalam berbagai bidang kehidupan (Wulandari & Hidayat, 2021).

Pendidikan keaksaraan, yang bertujuan untuk memberantas buta aksara, memberikan dasar-dasar kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Program ini berfungsi sebagai fondasi untuk pengembangan potensi diri dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja memberikan peserta didik, baik pencari kerja maupun pekerja, keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kompetensi kerja mereka, sesuai dengan tuntutan dunia kerja yang semakin kompleks (Maulana & Ridwan, 2022).

Pendidikan kesetaraan juga memainkan peran penting dalam memberikan kesempatan bagi mereka yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan formal untuk memperoleh pendidikan setara SD, SMP, dan SMA melalui Program Paket A, B, dan C. Program ini memberikan layanan pendidikan yang fleksibel dan memungkinkan peserta didik untuk mengintegrasikan pendidikan mereka dengan kehidupan sehari-hari dan pekerjaan (Hidayat & Rahayu, 2022).

Secara keseluruhan, pendidikan nonformal di Indonesia berperan penting dalam mendukung pendidikan sepanjang hayat dan memberikan fleksibilitas bagi masyarakat untuk memperoleh

pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka. Pendidikan ini memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari masyarakat dalam proses belajar-mengajar, serta membantu mengurangi kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan formal (Dewi & Prasetya, 2023).

3. Penyelenggaraan Pendidikan In-Formal

Pendidikan informal adalah proses pendidikan yang berlangsung di dalam keluarga dan lingkungan sekitar, di mana kegiatan belajar dilakukan secara mandiri oleh individu. Pendidikan ini sering kali terjadi secara alami, tanpa adanya struktur formal seperti yang terdapat dalam pendidikan formal dan nonformal. Meskipun demikian, hasil dari pendidikan informal dapat diakui setara dengan hasil pendidikan formal dan nonformal setelah melalui uji kesetaraan. Uji kesetaraan ini harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan yang ditetapkan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proses uji kesetaraan untuk pendidikan informal dilakukan melalui dua jalur utama. Pertama, uji kesetaraan yang diterapkan untuk peserta didik dalam pendidikan nonformal, di mana hasil pendidikan informal mereka dinilai untuk menentukan kesetaraan dengan pendidikan formal. Kedua, terdapat uji kesetaraan yang khusus diatur oleh Peraturan Menteri untuk hasil pendidikan informal yang berada di luar lingkup pendidikan nonformal. Uji ini memastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan informal diakui secara resmi dan dapat dihargai setara dengan pendidikan formal.

Menurut penelitian oleh Rizki dan Andriani (2022), pengakuan terhadap hasil pendidikan informal melalui uji kesetaraan adalah langkah penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan fleksibel. Hal ini memungkinkan individu yang belajar di luar

sistem pendidikan formal untuk mendapatkan pengakuan resmi atas kompetensi yang mereka peroleh, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesempatan mereka dalam dunia kerja atau pendidikan lanjutan. Selain itu, Hermawan (2021) menekankan bahwa uji kesetaraan ini harus dirancang dengan mempertimbangkan keunikan dan karakteristik pendidikan informal, yang berbeda dengan pendidikan formal dan nonformal. Oleh karena itu, uji kesetaraan harus fleksibel namun tetap memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan agar hasilnya dapat diakui secara luas.

Dengan adanya mekanisme uji kesetaraan ini, pendidikan informal dapat menjadi jalur alternatif yang valid untuk memperoleh pendidikan yang setara dengan pendidikan formal, memberikan peluang bagi individu untuk mengakui dan memanfaatkan pengetahuan serta keterampilan yang diperoleh di luar sistem pendidikan formal. Ini sejalan dengan prinsip pendidikan sepanjang hayat yang diakui oleh berbagai pakar pendidikan sebagai elemen kunci dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan (Dewi & Pratama, 2023).

4. Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh

Pendidikan jarak jauh (PJJ) adalah suatu bentuk pendidikan di mana peserta didik dan pendidik berada di lokasi yang berbeda, dan proses pembelajaran dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, serta media lainnya. Tujuan utama dari pendidikan jarak jauh adalah untuk memperluas akses pendidikan secara merata dan meningkatkan kualitas serta relevansi pendidikan. Pendidikan ini memiliki karakteristik yang terbuka, memungkinkan pembelajaran mandiri, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara intensif, dan dapat dilakukan secara fleksibel sesuai kebutuhan peserta didik.

PJJ dapat diterapkan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, asalkan memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Model pembelajaran ini biasanya mengandalkan metode di mana peserta didik belajar secara mandiri namun tetap terstruktur dan dibimbing, dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang lebih dominan daripada kehadiran fisik pendidik. Pembelajaran tatap muka tradisional digantikan oleh interaksi berbasis teknologi informasi dan komunikasi, meskipun dalam beberapa kasus masih memungkinkan adanya pertemuan tatap muka secara terbatas.

Pendidikan jarak jauh memberikan layanan pendidikan yang berpusat pada teknologi informasi dan komunikasi tanpa sepenuhnya menghilangkan aspek pembelajaran tatap muka. PJJ dapat diselenggarakan dalam beberapa modus, yaitu: modus tunggal (di mana seluruh program pendidikan dilakukan melalui jarak jauh), modus ganda (menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan jarak jauh), atau melalui konsorsium (kerja sama antar institusi pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan jarak jauh di tingkat nasional atau internasional).

Penyelenggaraan PJJ dapat meliputi lingkup mata pelajaran atau mata kuliah tertentu, program studi, atau bahkan seluruh satuan pendidikan. Dalam lingkup mata pelajaran atau mata kuliah, PJJ dapat diterapkan pada satu atau lebih mata pelajaran atau mata kuliah dalam satu program studi. Jika diterapkan dalam lingkup program studi, PJJ mencakup keseluruhan program studi dalam satu satuan pendidikan. Sedangkan jika lingkupnya adalah satuan pendidikan, PJJ dilakukan secara keseluruhan di satu institusi pendidikan.

Menurut Rahmawati dan Setiawan (2022), pendidikan jarak jauh memungkinkan akses pendidikan yang lebih luas dan merata, terutama bagi mereka yang berada di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan untuk mengikuti pendidikan formal secara tatap muka. Sementara itu, menurut Nugroho (2023), keberhasilan PJJ sangat

bergantung pada infrastruktur teknologi yang memadai serta kesiapan pendidik dan peserta didik dalam memanfaatkan teknologi tersebut secara efektif. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, pendidikan jarak jauh menjadi solusi yang relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman, memungkinkan pendidikan untuk tetap berjalan meskipun dalam kondisi yang menantang seperti pandemi atau situasi darurat lainnya (Widyastuti, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan jarak jauh bukan hanya alternatif, tetapi juga masa depan pendidikan yang inklusif dan fleksibel.

5. Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Dan Pendidikan Layanan Khusus

a. Pendidikan Khusus

Pendidikan khusus adalah bentuk pendidikan yang dirancang untuk peserta didik yang mengalami kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran akibat kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Pendidikan ini bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan khusus peserta didik tersebut, guna mengembangkan potensi mereka secara optimal.

Fungsi utama pendidikan khusus adalah menyediakan layanan pendidikan yang dapat membantu peserta didik mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi selama proses pembelajaran, baik yang disebabkan oleh kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, maupun sosial. Pendidikan ini dirancang agar peserta didik dengan kebutuhan khusus dapat mencapai potensi terbaiknya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Menurut beberapa ahli, tujuan utama dari pendidikan khusus adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan berbagai jenis kelainan, seperti tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, lamban belajar, autisme,

gangguan motorik, serta peserta didik yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya (Santrock, 2020; Hallahan, Kauffman, & Pullen, 2022). Pendidikan khusus juga mencakup peserta didik dengan kelainan lain yang membutuhkan penanganan khusus untuk mencapai perkembangan optimal sesuai dengan kemampuan mereka.

Pendidikan khusus ini dapat diselenggarakan di berbagai jalur dan jenis pendidikan, baik di jenjang pendidikan dasar maupun menengah. Penyelenggaraannya dapat dilakukan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, atau satuan pendidikan keagamaan, tergantung pada kebutuhan dan kondisi peserta didik (Fattah, 2021). Dengan demikian, pendidikan khusus berupaya memastikan bahwa semua peserta didik, tanpa terkecuali, mendapatkan kesempatan yang setara untuk berkembang dan meraih prestasi dalam pendidikan mereka.

Menurut Sukmadinata (2022), implementasi pendidikan khusus harus memperhatikan prinsip inklusivitas dan individualitas, di mana setiap peserta didik mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhannya, baik di lingkungan pendidikan formal maupun nonformal. Hal ini juga sejalan dengan pandangan yang menyatakan bahwa pendidikan khusus adalah bagian integral dari sistem pendidikan yang inklusif, di mana semua anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, harus diakui dan didukung dalam proses pendidikan (UNESCO, 2023).

b. Pendidikan Layanan Khusus

Pendidikan layanan khusus adalah bentuk pendidikan yang dirancang untuk peserta didik yang berada di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, serta mereka yang terdampak oleh bencana alam, bencana sosial, atau yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Tujuan utama dari pendidikan

ini adalah untuk memastikan bahwa semua peserta didik di wilayah tersebut tetap mendapatkan hak mereka untuk mengakses pendidikan, meskipun berada dalam kondisi yang penuh tantangan.

Menurut pandangan para ahli, pendidikan layanan khusus berfungsi sebagai sarana untuk menyediakan layanan pendidikan bagi peserta didik yang mengalami berbagai hambatan, seperti tinggal di daerah terpencil atau terbelakang, menjadi bagian dari masyarakat adat yang terpencil, terkena dampak bencana alam atau sosial, atau menghadapi keterbatasan ekonomi (Sunarto, 2021; Zahra & Hasanah, 2023). Melalui pendidikan layanan khusus, diharapkan semua anak, tanpa terkecuali, dapat melanjutkan pendidikan mereka dan memperoleh pengetahuan yang layak, sesuai dengan hak asasi mereka.

Pendidikan layanan khusus bertujuan untuk menyediakan akses pendidikan yang setara bagi peserta didik di wilayah-wilayah tersebut, dengan memastikan bahwa hak mereka untuk mendapatkan pendidikan tidak terabaikan. Pendidikan ini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal, tergantung pada kebutuhan dan situasi spesifik para peserta didik (Santoso, 2022).

Dalam pelaksanaannya, pendidikan layanan khusus di jalur pendidikan formal dilakukan dengan menyesuaikan berbagai aspek, seperti waktu, tempat, sarana dan prasarana pembelajaran, pendidik, tenaga kependidikan, dan sumber daya pembelajaran lainnya, agar sesuai dengan kondisi dan kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik. Hal ini diperlukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada dan memastikan bahwa proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif (Hakim, 2020).

Menurut Rahayu (2023), fleksibilitas dalam pelaksanaan pendidikan layanan khusus sangat penting untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan unik dari peserta didik yang berada di kondisi sulit. Dengan penyesuaian yang tepat, pendidikan layanan khusus dapat

memberikan peluang yang setara bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka, meskipun dalam kondisi yang penuh tantangan. Pendidikan ini juga mencerminkan komitmen untuk mewujudkan inklusivitas dalam sistem pendidikan nasional, di mana semua anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang.

6. Penyelenggaraan Pendidikan Oleh Perwakilan Negara Asing Dan Kerja Sama Satuan Pendidikan Asing Dengan Satuan Pendidikan Negara Indonesia

Perwakilan negara asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki hak untuk mendirikan satuan pendidikan yang ditujukan khusus bagi warga negaranya, dengan syarat harus mematuhi ketentuan dan persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia. Satuan pendidikan ini disesuaikan dengan sistem pendidikan negara asal mereka, yang memungkinkan warga negara asing untuk melanjutkan pendidikan sesuai dengan kurikulum yang akrab bagi mereka. Namun, peraturan ketat diterapkan untuk memastikan bahwa satuan pendidikan ini tidak dapat menerima peserta didik yang merupakan warga negara Indonesia. Larangan ini bertujuan untuk menjaga integritas dan kemandirian sistem pendidikan nasional, serta untuk mencegah potensi distorsi dalam proses pembelajaran yang seharusnya mengutamakan kurikulum nasional.

Kerja sama antara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh perwakilan negara asing dengan lembaga pendidikan di Indonesia menjadi syarat penting dalam penyelenggaraan pendidikan ini. Kolaborasi ini bukan hanya formalitas, tetapi merupakan upaya strategis untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan di satuan pendidikan asing tetap relevan dengan konteks dan kebutuhan lokal. Melalui kemitraan ini, lembaga pendidikan di Indonesia dapat terlibat dalam proses adaptasi kurikulum internasional, sehingga siswa-

siswa Indonesia yang mungkin terlibat dalam program pertukaran atau kegiatan bersama dapat merasakan manfaat dari perspektif global tanpa meninggalkan akar budaya dan keunggulan lokal mereka (Nugroho, 2022; Widiastuti, 2021).

Program atau satuan pendidikan yang dihasilkan dari kerja sama tersebut umumnya memiliki dua orientasi utama: bertaraf internasional atau berbasis keunggulan lokal. Pendidikan bertaraf internasional ini dirancang untuk memenuhi standar global, yang memungkinkan peserta didik untuk memiliki akses ke pendidikan yang sejalan dengan kebutuhan global dan memberikan mereka keunggulan dalam kompetisi internasional. Di sisi lain, pendidikan berbasis keunggulan lokal bertujuan untuk mengintegrasikan potensi dan kekayaan budaya lokal dalam kurikulum, sehingga peserta didik dapat mengembangkan kompetensi yang relevan dengan lingkungan sosial dan ekonomi setempat. Dalam konteks ini, kolaborasi dengan lembaga pendidikan lokal menjadi krusial untuk mengakomodasi kedua orientasi ini secara harmonis (Prasetyo & Handayani, 2023).

Lebih jauh lagi, kerja sama antara satuan pendidikan asing dan lembaga pendidikan Indonesia juga memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Melalui paparan terhadap praktik-praktik pendidikan terbaik dari berbagai negara, lembaga pendidikan di Indonesia dapat belajar dan mengadopsi metode serta pendekatan yang inovatif. Selain itu, sinergi ini juga bisa memperkuat hubungan diplomatik antara Indonesia dan negara-negara lain, melalui pertukaran budaya dan pengetahuan yang lebih intensif (Sumardi, 2020).

Oleh karena itu, penyelenggaraan satuan pendidikan oleh perwakilan negara asing di Indonesia bukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara asing, tetapi juga menjadi wadah penting untuk pertukaran pengetahuan, budaya, dan praktik

pendidikan yang bisa memberikan manfaat jangka panjang bagi pengembangan sistem pendidikan nasional Indonesia.

7. Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu aspek krusial yang mampu mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional secara efektif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat pendidikan, tetapi juga sebagai kontributor aktif yang berpartisipasi dalam berbagai aspek pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Keterlibatan masyarakat ini sangat luas, mencakup individu, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, hingga organisasi kemasyarakatan yang semuanya berperan dalam meningkatkan akses, kualitas, daya saing, relevansi, tata kelola, dan akuntabilitas pendidikan. Partisipasi ini, sebagaimana dijelaskan oleh Widiastuti (2021), tidak hanya berfungsi sebagai tambahan dalam proses pendidikan formal, tetapi juga menjembatani kesenjangan antara kebijakan pendidikan dan kebutuhan nyata di lapangan.

Masyarakat dapat memainkan peran penting dalam pendidikan melalui penyediaan sumber daya pendidikan, baik dalam bentuk materi, tenaga, maupun sarana prasarana. Selain itu, masyarakat juga berkontribusi dalam penyelenggaraan satuan pendidikan, baik secara mandiri maupun melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan formal. Peran serta ini juga mencakup penggunaan hasil pendidikan, di mana masyarakat menjadi pengguna langsung dari lulusan-lulusan yang dihasilkan oleh sistem pendidikan. Dengan demikian, masyarakat memiliki kepentingan langsung dalam memastikan bahwa pendidikan yang diberikan berkualitas dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan kehidupan sosial.

Pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan oleh masyarakat juga menjadi aspek penting dalam memastikan akuntabilitas. Dalam hal ini, masyarakat dapat memberikan masukan, kritik, dan saran yang konstruktif untuk perbaikan sistem pendidikan. Menurut Nugroho (2022), masyarakat tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan. Hal ini mencakup pemberian pertimbangan dalam proses perumusan kebijakan pendidikan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas pendidikan yang diterima oleh peserta didik.

Peran serta masyarakat dalam pendidikan dapat diwujudkan melalui beberapa lembaga, seperti dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah. Dewan pendidikan adalah lembaga independen yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan. Dewan ini berfungsi untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan strategis, arahan, serta dukungan dalam bentuk tenaga, sarana dan prasarana. Dewan pendidikan juga bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Prasetyo dan Handayani (2023) menekankan bahwa dewan pendidikan berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam menyuarakan keluhan, saran, dan aspirasi terkait pendidikan, serta memberikan rekomendasi kepada pihak berwenang.

Selain dewan pendidikan, komite sekolah/madrasah juga memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Komite ini terdiri dari orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan. Mereka bertugas untuk memberikan arahan, pertimbangan, serta dukungan tenaga dan sarana prasarana bagi satuan pendidikan. Selain itu, komite

sekolah/madrasah juga berperan dalam menindaklanjuti keluhan, saran, dan kritik dari masyarakat, memastikan bahwa satuan pendidikan tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam kerangka yang lebih luas, peran serta masyarakat dalam pendidikan juga mencakup keterlibatan dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat, di mana komunitas lokal mengambil inisiatif dalam mengelola dan mengembangkan satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Hal ini tidak hanya memperkaya pengalaman belajar peserta didik, tetapi juga memperkuat hubungan antara pendidikan dan kehidupan sosial-budaya masyarakat setempat. Pendidikan berbasis masyarakat ini dapat mencakup berbagai program, mulai dari pendidikan informal, kursus keterampilan, hingga program literasi yang disesuaikan dengan kebutuhan komunitas.

Dengan demikian, peran serta masyarakat dalam pendidikan bukan hanya sekadar pelengkap, tetapi menjadi elemen vital yang memastikan keberlanjutan dan relevansi pendidikan dalam menjawab tantangan zaman. Partisipasi aktif masyarakat diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, satuan pendidikan, dan masyarakat, dalam upaya bersama mencapai tujuan pendidikan nasional yang lebih baik dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi ini, pendidikan dapat menjadi lebih inklusif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masa depan, sehingga mampu menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga tangguh dan siap menghadapi berbagai tantangan global.

8. Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pendidikan berbasis masyarakat merupakan pendekatan pendidikan yang memungkinkan masyarakat untuk memainkan peran aktif dalam penyelenggaraan pendidikan, baik melalui satuan

pendidikan formal maupun nonformal. Pendekatan ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan kekhasan agama, sosial, dan budaya lokal. Dengan demikian, pendidikan berbasis masyarakat tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga untuk menanamkan nilai-nilai yang relevan dengan kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat tersebut.

Dalam konteks pendidikan formal, pendidikan berbasis masyarakat dapat diwujudkan melalui pendirian sekolah-sekolah yang kurikulumnya disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Misalnya, di daerah dengan budaya agraris yang kuat, kurikulum sekolah dapat dikembangkan untuk mencakup pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pertanian. Satuan pendidikan berbasis masyarakat juga dapat mengintegrasikan pelajaran agama yang sesuai dengan keyakinan mayoritas penduduk setempat, sehingga pendidikan yang diberikan tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga spiritual dan moral. Penyelenggaraan pendidikan semacam ini memungkinkan sekolah-sekolah untuk menjadi pusat pembelajaran yang tidak hanya mendidik tetapi juga melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai lokal (Sutrisno, 2020).

Di sisi lain, dalam pendidikan nonformal, pendidikan berbasis masyarakat dapat diwujudkan melalui berbagai program yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus masyarakat. Misalnya, pelatihan keterampilan kerja yang dirancang untuk membantu masyarakat mengembangkan kemampuan yang relevan dengan pasar kerja lokal. Program pendidikan nonformal ini sering kali lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik kelompok masyarakat tertentu, seperti perempuan, pemuda, atau kelompok masyarakat adat. Dengan adanya pendidikan berbasis masyarakat, kelompok-kelompok ini mendapatkan akses ke pendidikan yang

relevan dan bermanfaat, yang dapat membantu mereka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka (Nurhadi, 2022).

Pendidikan berbasis masyarakat juga mencerminkan konsep pendidikan yang inklusif, di mana semua anggota masyarakat, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi, memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Konsep ini sangat penting dalam konteks Indonesia yang memiliki keragaman budaya, agama, dan bahasa. Melalui pendidikan berbasis masyarakat, setiap kelompok dapat mengembangkan dan melestarikan identitas budaya mereka sambil tetap mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Ini juga merupakan wujud dari upaya untuk mengurangi kesenjangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok masyarakat yang lebih kaya dan yang kurang mampu (Iskandar, 2021).

Selain itu, pendidikan berbasis masyarakat memberikan kontribusi penting dalam memperkuat hubungan antara sekolah dan masyarakat. Ketika masyarakat dilibatkan secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan, mereka merasa lebih bertanggung jawab terhadap keberhasilan pendidikan anak-anak mereka. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi orang tua dalam proses pendidikan dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih mendukung bagi anak-anak. Lebih lanjut, pendidikan berbasis masyarakat juga dapat mendorong pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal, karena kebijakan tersebut didasarkan pada masukan langsung dari masyarakat (Wahyudi, 2021).

Pentingnya pendidikan berbasis masyarakat juga tercermin dalam kemampuannya untuk menumbuhkan rasa solidaritas dan kebersamaan di antara anggota masyarakat. Melalui pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai lokal, masyarakat dapat mengembangkan identitas kolektif yang kuat, yang pada gilirannya dapat memperkuat kohesi sosial dan mengurangi konflik. Selain itu, dengan

mengakomodasi keberagaman dalam kurikulum dan metode pengajaran, pendidikan berbasis masyarakat dapat membantu mempromosikan toleransi dan pengertian antarbudaya di antara peserta didik (Rahman, 2023).

Secara keseluruhan, pendidikan berbasis masyarakat bukan hanya tentang memberikan pendidikan kepada masyarakat, tetapi juga tentang memberdayakan masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam pengembangan dan pengelolaan pendidikan. Melalui pendekatan ini, pendidikan menjadi lebih relevan, kontekstual, dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat sehari-hari, sekaligus mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional. Pendekatan ini juga menunjukkan bagaimana pendidikan dapat menjadi alat untuk memberdayakan masyarakat, memperkuat identitas lokal, dan mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

9. Pengawasan

Pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab yang dijalankan oleh berbagai pihak, termasuk Pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah/madrasah. Pelaksanaan pengawasan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks pengawasan pendidikan, terdapat dua aspek utama yang harus diperhatikan, yaitu pengawasan administratif dan pengawasan teknis edukatif. Keduanya berperan penting dalam memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, serta mencapai tujuan pendidikan nasional (Widodo, 2022).

Mekanisme pelaksanaan pengawasan diatur secara rinci dan melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan. Pemerintah pusat, misalnya, memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan nasional terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan,

mulai dari pendidikan tinggi hingga pendidikan dasar dan menengah yang berada di bawah kewenangannya. Selain itu, pemerintah pusat juga bertugas mengawasi pendidikan Indonesia yang diselenggarakan di luar negeri, serta mengoordinasikan pengawasan nasional terhadap pengelolaan pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pengawasan penggunaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) oleh pemerintah daerah untuk pendidikan juga merupakan bagian dari tanggung jawab ini (Sutrisno, 2023).

Pemerintah provinsi memiliki peran spesifik dalam mengawasi satuan pendidikan yang memiliki status internasional atau yang sedang dirintis untuk mencapai standar internasional. Selain itu, pemerintah provinsi juga mengawasi satuan pendidikan khusus dan layanan pendidikan khusus, serta mengoordinasikan pengawasan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Pembinaan terhadap pengawas sekolah dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan juga merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah provinsi, yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses pendidikan berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan (Nugroho, 2021).

Di tingkat kabupaten/kota, pemerintah bertanggung jawab atas pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal di wilayahnya. Ini mencakup berbagai bentuk pengawasan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pendidikan di tingkat lokal berjalan sesuai dengan kebijakan dan standar nasional (Rahman, 2023). Sementara itu, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah juga memiliki peran penting dalam pengawasan. Dewan Pendidikan bertugas melakukan pengawasan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, sedangkan Komite Sekolah/Madrasah fokus pada pengawasan di tingkat satuan

pendidikan. Hasil pengawasan oleh Komite Sekolah/Madrasah dilaporkan kepada rapat orang tua/wali peserta didik, yang dihadiri oleh kepala sekolah/madrasah dan dewan guru, sebagai bentuk akuntabilitas publik (Suyanto, 2022). Mereka bekerja untuk memastikan bahwa suara orang tua/wali peserta didik didengar dan dipertimbangkan dalam pengelolaan sekolah atau madrasah. Komite ini juga bertanggung jawab untuk menindaklanjuti keluhan dan aspirasi masyarakat terkait kualitas pendidikan yang diberikan oleh satuan pendidikan.

Pengawasan ini juga mencakup penanganan pengaduan dari masyarakat terkait penyimpangan di bidang pendidikan. Pemerintah, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, wajib menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui proses klarifikasi, verifikasi, atau investigasi. Proses ini dilakukan apabila pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas dan bukti adanya penyimpangan. Dalam pelaksanaannya, pengawasan ini dapat berbentuk pemeriksaan umum, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan khusus, pemeriksaan tematik, pemeriksaan investigatif, dan/atau pemeriksaan terpadu, yang semuanya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Prasetyo, 2023).

Pemeriksaan dalam konteks pengawasan pendidikan hanya dapat dilakukan oleh lembaga pengawasan fungsional yang memiliki kewenangan dan kompetensi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam beberapa kasus, pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota juga dapat menunjuk lembaga pemeriksaan independen untuk melaksanakan klarifikasi, verifikasi, atau investigasi. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengawasan dilakukan secara objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat mencegah dan mengatasi

penyimpangan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (Hidayat, 2021).

Dengan sistem pengawasan yang komprehensif ini, diharapkan seluruh proses pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan dengan baik, transparan, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hal ini juga akan mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia secara keseluruhan.

BAB VII
KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN DASAR DAN TATA KERJA PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

A. Kebijakan Pengelolaan Pendidikan Dasar

Pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan suatu bangsa, terutama dalam konteks Indonesia yang tengah berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia demi menghadapi tantangan globalisasi. Pembangunan pendidikan di Indonesia tidak hanya diarahkan untuk menciptakan individu yang berpengetahuan dan berkemampuan, tetapi juga untuk membentuk masyarakat yang berdaya saing tinggi, memiliki karakter yang kuat, dan berkontribusi positif terhadap kemajuan bangsa. Pendidikan menjadi fondasi utama yang mendukung berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan dianggap sebagai langkah penting untuk mencapai tujuan pembangunan nasional (Hidayat, 2023).

Pemerintah Indonesia, dalam kerangka UUD 1945, memiliki tanggung jawab yang besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan dipandang sebagai hak dasar setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh negara. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya memperluas akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil dan kurang berkembang. Pendidikan juga berfungsi sebagai alat untuk menciptakan kesetaraan sosial dan mengurangi kesenjangan antara berbagai kelompok masyarakat. Dalam konteks ini, pendidikan menjadi pilar utama dalam upaya menciptakan masyarakat yang adil dan Makmur (Rahmawati, 2023).

Paradigma pembangunan pendidikan di Indonesia saat ini mengacu pada konsep pembangunan manusia seutuhnya, yang menekankan pentingnya pengembangan tiga dimensi utama dalam diri manusia, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotorik. Dimensi afektif berhubungan dengan pengembangan spiritual dan moral individu, termasuk nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia. Dimensi kognitif mencakup peningkatan kemampuan intelektual dan berpikir kritis, sementara dimensi psikomotorik berfokus pada pengembangan keterampilan teknis dan praktis yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Konsep ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang diuraikan dalam Profil Pelajar Pancasila, di mana peserta didik diharapkan menjadi individu yang beriman, bertaqwa, mandiri, kritis, kreatif, dan berjiwa gotong royong (Sutrisno, 2022).

Pemerintah juga telah memperkenalkan paradigma "Merdeka Belajar" sebagai pendekatan baru dalam sistem pendidikan. Merdeka Belajar bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih fleksibel dan inovatif, di mana peserta didik memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi dan mengembangkan potensi mereka. Paradigma ini juga menekankan pentingnya otonomi dalam pembelajaran, sehingga guru dan peserta didik dapat bekerja sama untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan relevan. Selain itu, Merdeka Belajar mendorong penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi pendidikan, terutama di era digital saat ini (Kemendikbudristek, 2022).

Pemerataan akses pendidikan menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan pendidikan di Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa semua anak di Indonesia, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Untuk mencapai tujuan ini, berbagai program dan kebijakan telah diluncurkan, termasuk pembangunan infrastruktur

pendidikan di daerah terpencil, pemberian beasiswa kepada siswa kurang mampu, dan peningkatan kualitas guru melalui pelatihan dan sertifikasi. Pemerintah juga terus berupaya menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan angka partisipasi sekolah di semua jenjang pendidikan (Nugroho, 2023).

Selain itu, peningkatan mutu pendidikan juga menjadi fokus utama dalam pembangunan pendidikan. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di semua jenjang, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Upaya peningkatan mutu ini mencakup berbagai aspek, termasuk pengembangan kurikulum yang relevan, peningkatan kualitas pengajaran, dan penggunaan teknologi pendidikan yang modern. Pemerintah juga mendorong pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan melalui akreditasi, sertifikasi, dan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa standar pendidikan nasional tercapai di seluruh wilayah (Mardiana, 2022).

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pendidikan yang baik, pemerintah juga menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan. Partisipasi masyarakat dianggap penting dalam memastikan bahwa kebijakan dan program pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah berperan penting dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan, termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah berharap dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih responsif dan inklusif (Mulyadi, 2023).

Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi tantangan dalam hal distribusi tenaga pendidik yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Kualitas guru sangat menentukan keberhasilan proses pembelajaran, dan oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kompetensi guru melalui program pelatihan dan sertifikasi.

Pemerintah juga berusaha untuk memperbaiki distribusi guru, terutama di daerah terpencil dan tertinggal, dengan memberikan insentif dan tunjangan khusus bagi guru yang bersedia mengajar di daerah-daerah tersebut. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di daerah-daerah yang selama ini kurang mendapatkan perhatian (Sutrisno, 2022).

Pendidikan juga memiliki peran penting dalam pembentukan karakter dan identitas nasional. Dalam konteks globalisasi, pendidikan di Indonesia harus mampu membekali generasi muda dengan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air yang kuat. Melalui pendidikan, nilai-nilai Pancasila ditanamkan pada peserta didik, sehingga mereka tumbuh menjadi individu yang berintegritas, berwawasan luas, dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat dan negara. Pendidikan karakter ini menjadi landasan penting bagi terciptanya masyarakat yang toleran, demokratis, dan bertanggung jawab (Sutrisno, 2022).

Secara keseluruhan, pembangunan pendidikan di Indonesia diarahkan untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, bermutu, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Melalui kebijakan-kebijakan yang komprehensif dan implementasi yang konsisten, diharapkan pendidikan dapat menjadi landasan yang kokoh bagi tercapainya kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Pendidikan bukan hanya tentang menciptakan individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga tentang membangun masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadilan sosial.

B. Tata Kerja Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

Sekolah Dasar (SD) memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pendidikan nasional karena merupakan jenjang pendidikan dasar yang menjadi fondasi bagi perkembangan intelektual, emosional, dan sosial anak. Dalam konteks pendidikan dasar, SD tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga

sebagai arena pengembangan karakter dan kepribadian siswa. Pendidikan yang diterima siswa di tingkat SD akan mempengaruhi sikap dan perilaku mereka dalam jangka panjang, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.

1. Tujuan Pendidikan di Sekolah Dasar

Tujuan utama pendidikan di SD adalah untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa sehingga mereka dapat berkembang secara holistik dalam berbagai aspek kehidupan. Secara spesifik, pendidikan di SD bertujuan untuk:

a. **Pengembangan Pribadi**: SD berperan dalam membantu siswa mengembangkan kepribadian yang utuh. Ini mencakup penguatan dasar keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pembentukan karakter yang positif, serta pengembangan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup mandiri. Pendidikan di SD juga menekankan pentingnya kesehatan jasmani dan rohani, kemampuan belajar yang efektif, serta pembentukan kepribadian yang mantap dan mandiri.

b. **Pengembangan Sosial**: SD juga bertujuan untuk membentuk siswa menjadi anggota masyarakat yang baik. Pendidikan di SD menanamkan nilai-nilai sosial seperti kesadaran beragama, tanggung jawab sosial, dan kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Siswa juga dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan dasar yang memungkinkan mereka untuk berperan aktif dalam masyarakat.

c. **Pengembangan Warga Negara yang Bertanggung Jawab**: Pendidikan di SD berfokus pada pembentukan siswa sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Siswa diajarkan tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, serta pentingnya berpartisipasi dalam kemajuan bangsa dan negara. Pendidikan kewarganegaraan ini juga mencakup pengembangan

pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk berkontribusi secara positif di masyarakat.

d. **Pengembangan Kesadaran Global**: Di era globalisasi, penting bagi siswa SD untuk memiliki kesadaran tentang peran mereka di tingkat global. Pendidikan di SD menanamkan rasa harga diri sebagai bagian dari bangsa yang merdeka dan berdaulat, serta memperkenalkan siswa pada konsep hak asasi manusia, ketertiban dunia, dan pentingnya persahabatan antarbangsa. Ini bertujuan agar siswa memiliki pemahaman yang luas dan dapat berperan dalam komunitas global di masa depan.

2. Struktur dan Fungsi Organisasi di Sekolah Dasar

Sekolah Dasar memiliki struktur organisasi yang dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan pendidikan di atas. Struktur organisasi SD biasanya terdiri dari Kepala Sekolah, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Kelompok Jabatan Pelaksana.

a. Kepala Sekolah memegang peran sentral dalam manajemen dan operasional sekolah. Sebagai pemimpin, Kepala Sekolah bertanggung jawab atas berbagai aspek sekolah, termasuk pengelolaan sumber daya manusia, pengembangan kurikulum, serta pembinaan dan supervisi terhadap guru dan staf lainnya. Selain itu, Kepala Sekolah juga bertanggung jawab atas pengembangan kewirausahaan di sekolah dan memastikan bahwa standar pendidikan nasional terpenuhi. Dalam beberapa kasus, jika terdapat kekurangan guru, Kepala Sekolah juga dapat mengambil peran sebagai pengajar untuk memastikan kelancaran proses pembelajaran.

b. Kelompok Jabatan Fungsional di SD terdiri dari guru kelas, guru mata pelajaran (seperti Pendidikan Agama, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan), serta pustakawan. Para guru ini adalah tenaga pendidik profesional yang tugas utamanya meliputi mendidik,

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, serta menilai dan mengevaluasi siswa. Guru-guru ini memainkan peran kunci dalam proses pembelajaran, di mana mereka tidak hanya mentransfer pengetahuan tetapi juga berperan dalam membentuk karakter dan keterampilan siswa.

c. Kelompok Jabatan Pelaksana biasanya terdiri dari tenaga administrasi sekolah dan penjaga sekolah. Tenaga administrasi bertanggung jawab atas pengelolaan dokumen sekolah, administrasi keuangan, dan berbagai tugas operasional lainnya yang mendukung kegiatan sehari-hari di sekolah. Penjaga sekolah berperan dalam menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan sekolah, memastikan bahwa siswa dan staf dapat belajar dan bekerja dalam kondisi yang nyaman dan aman.

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur dalam organisasi sekolah harus bekerja secara terkoordinasi, terintegrasi, dan sinkron untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Kerja sama antara Kepala Sekolah, guru, staf administrasi, dan komponen lainnya sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.

3. Tantangan dan Peluang dalam Pengelolaan Sekolah Dasar

Mengelola sekolah dasar bukan tanpa tantangan. Beberapa tantangan yang sering dihadapi antara lain adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi tenaga pengajar, fasilitas, maupun pendanaan. Selain itu, variasi kemampuan siswa yang luas juga menjadi tantangan tersendiri bagi guru dalam menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan inklusif. Guru harus mampu mengakomodasi kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda, termasuk mereka yang membutuhkan perhatian khusus.

Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang besar untuk mengembangkan pendidikan di tingkat SD. Dengan semakin berkembangnya teknologi, sekolah dapat memanfaatkan berbagai alat

digital untuk mendukung proses pembelajaran, baik di dalam kelas maupun secara daring. Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan juga dapat dicapai melalui pelatihan berkelanjutan bagi guru, serta kerjasama yang erat antara sekolah, orang tua, dan masyarakat.

Menurut Sukirman (2023), salah satu kunci keberhasilan dalam pengelolaan SD adalah adanya kolaborasi yang kuat antara semua pihak terkait, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan dukungan yang tepat, sekolah dapat menjadi lingkungan yang mendukung perkembangan optimal bagi setiap siswa.

Nugraha (2022) menambahkan bahwa pentingnya inovasi dalam pembelajaran di SD, terutama dalam mengintegrasikan teknologi dan metode pembelajaran baru yang dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Pendidikan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman sangat penting untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan di masa depan.

Sekolah Dasar adalah fondasi penting dalam sistem pendidikan yang bertujuan untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan keterampilan yang memadai untuk hidup di tengah masyarakat. Dalam mencapai tujuan tersebut, peran Kepala Sekolah, guru, dan seluruh komponen sekolah sangat vital. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, dengan pengelolaan yang tepat dan dukungan dari semua pihak, Sekolah Dasar dapat menjalankan fungsinya secara optimal, memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan.

C. Standar Pengelolaan Pendidikan di Sekolah Dasar: Penjabaran Komprehensif

Pengelolaan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan proses pembelajaran berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Standar pengelolaan pendidikan di SD mencakup berbagai aspek yang harus diperhatikan oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan, mulai dari perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, hingga kepemimpinan sekolah serta sistem informasi manajemen. Semua aspek ini harus diintegrasikan secara sistematis untuk mencapai hasil pendidikan yang optimal.

1. Perencanaan Program: Landasan Kuat untuk Pengelolaan Sekolah

Perencanaan program adalah langkah awal dan sangat krusial dalam pengelolaan pendidikan di SD. Pada tahap ini, sekolah harus merumuskan dan menetapkan visi yang jelas dan inspiratif, yang akan menjadi cita-cita bersama seluruh warga sekolah. Visi ini tidak hanya sekadar slogan, tetapi harus mampu memberikan motivasi dan kekuatan kepada seluruh elemen sekolah dalam melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Setelah visi dirumuskan, misi sekolah disusun untuk memberikan arah yang konkret dalam mencapai visi tersebut. Misi ini berfungsi sebagai dasar bagi semua program pokok sekolah dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan.

Selanjutnya, tujuan sekolah harus dirumuskan dengan jelas, menggambarkan tingkat kualitas yang ingin dicapai oleh sekolah. Tujuan ini harus sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk merealisasikan tujuan ini, sekolah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS), yang mencakup berbagai aspek pelaksanaan pendidikan seperti kesiswaan, kurikulum, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, keuangan, serta budaya dan lingkungan sekolah. RKAS tidak hanya berfungsi sebagai panduan operasional, tetapi juga sebagai alat untuk memastikan bahwa semua kegiatan sekolah berjalan sesuai

dengan rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

2. Pelaksanaan Rencana Kerja: Implementasi Strategis

Setelah perencanaan program selesai disusun, langkah berikutnya adalah pelaksanaan rencana kerja. Pelaksanaan ini harus dilakukan berdasarkan pedoman yang telah disusun, yang mengatur berbagai aspek pengelolaan sekolah seperti kurikulum, kalender pendidikan, struktur organisasi sekolah, dan peraturan akademik. Dalam pelaksanaannya, struktur organisasi sekolah harus diatur sedemikian rupa sehingga memuat sistem penyelenggaraan dan administrasi persekolahan yang jelas, termasuk rincian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari Kepala Sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya.

Kegiatan sekolah harus dilaksanakan dengan transparansi dan akuntabilitas penuh, sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun. Ini mencakup berbagai bidang seperti kesiswaan, yang melibatkan proses penerimaan peserta didik serta layanan pembelajaran dan pembinaan siswa. Di bidang kurikulum dan pembelajaran, sekolah harus memastikan bahwa kurikulum yang digunakan sesuai dengan standar nasional pendidikan dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa, kondisi sekolah, serta potensi daerah dan budaya lokal. Proses pembelajaran harus dirancang agar aktif, inovatif, kreatif, edukatif, dan menyenangkan bagi siswa, sehingga mereka dapat terlibat secara penuh dalam proses pembelajaran.

3. Pengawasan dan Evaluasi: Mekanisme Kontrol Kualitas

Pengawasan dan evaluasi adalah bagian integral dari pengelolaan pendidikan di SD. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa semua kegiatan pendidikan berjalan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Program pengawasan harus disusun dan dilaksanakan secara obyektif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

Ini melibatkan pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan, yang semuanya harus dilakukan secara sistematis.

Evaluasi kinerja sekolah dilakukan secara berkala, mencakup evaluasi terhadap proses pembelajaran dan program kerja tahunan. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan program, sehingga dapat dilakukan perbaikan yang diperlukan. Selain itu, evaluasi terhadap kurikulum dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa kurikulum yang digunakan tetap relevan dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman. Evaluasi terhadap pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan juga dilakukan untuk memastikan bahwa penugasan mereka sesuai dengan keahlian dan beban kerja yang diberikan.

D. Kepemimpinan Sekolah: Pilar Utama Pengelolaan Pendidikan

Kepemimpinan sekolah di SD menjadi pilar utama dalam pengelolaan pendidikan. Kepala Sekolah bertanggung jawab untuk menerjemahkan visi sekolah ke dalam misi dan tujuan yang spesifik serta dapat dicapai. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Sekolah harus mampu melakukan analisis SWOT untuk mengidentifikasi tantangan, peluang, kekuatan, dan kelemahan yang dihadapi sekolah. Berdasarkan hasil analisis ini, Kepala Sekolah menyusun rencana strategis dan operasional yang melibatkan seluruh guru dan ekosistem pendidikan dalam upaya meningkatkan dan memberdayakan kapasitas sekolah.

Kepemimpinan yang efektif juga melibatkan upaya menciptakan motivasi, komunikasi, dan lingkungan pembelajaran yang mendukung seluruh komponen yang terlibat dalam pendidikan. Kepala Sekolah harus mampu mengembangkan dukungan dari semua pihak, baik internal maupun eksternal, untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan yang kuat akan mendorong

peningkatan kualitas pendidikan di SD, yang pada gilirannya akan menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing.

E. Sistem Informasi Manajemen: Alat Pendukung Pengelolaan yang Efektif

Sistem informasi manajemen di SD berfungsi sebagai alat pendukung yang sangat penting dalam administrasi dan manajemen pendidikan. Sistem ini dirancang untuk mendukung pengelolaan pendidikan di sekolah dengan menyediakan fasilitas informasi yang efisien, efektif, dan mudah diakses oleh seluruh ekosistem pendidikan. Dengan adanya sistem informasi manajemen yang baik, proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat, serta memungkinkan akses informasi yang transparan bagi semua pihak yang berkepentingan.

Sistem ini juga berperan dalam mengintegrasikan berbagai data dan informasi yang diperlukan untuk pengelolaan pendidikan, mulai dari data kehadiran siswa, hasil belajar, hingga manajemen keuangan. Dengan demikian, sistem informasi manajemen tidak hanya mendukung operasional sehari-hari sekolah, tetapi juga membantu dalam perencanaan strategis jangka panjang yang diperlukan untuk mencapai visi dan misi sekolah.

Secara keseluruhan, standar pengelolaan pendidikan di SD merupakan kerangka kerja yang komprehensif untuk memastikan bahwa setiap aspek pendidikan dikelola dengan baik. Dari perencanaan program hingga pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan kepemimpinan sekolah, semua komponen ini saling berkaitan dan harus diintegrasikan secara holistik untuk mencapai hasil yang optimal. Dengan standar pengelolaan yang baik, Sekolah Dasar dapat menjadi fondasi yang kuat bagi pengembangan intelektual dan karakter siswa, yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan

pendidikan nasional dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

BAB VIII
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. Standar Nasional Pendidikan

Standar Nasional Pendidikan (SNP) merupakan tonggak penting dalam pembangunan sistem pendidikan di Indonesia. SNP ditetapkan sebagai kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh semua lembaga pendidikan, baik yang dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Standar ini mencakup seluruh aspek pendidikan di berbagai jalur, baik formal, non-formal, maupun informal. Fungsi utama SNP adalah sebagai panduan dalam pengembangan kurikulum dan penyelenggaraan pendidikan, sehingga tujuan pendidikan nasional dapat tercapai secara efektif dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Keberadaan SNP diatur secara legal melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022. Peraturan-peraturan ini tidak hanya memberikan landasan hukum yang kuat bagi penerapan SNP, tetapi juga memastikan bahwa standar-standar ini diikuti secara konsisten oleh semua lembaga pendidikan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas pendidikan di Indonesia, agar setiap peserta didik menerima pendidikan yang setara dan bermutu, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

SNP mencakup delapan standar utama yang saling terkait dan berfungsi sebagai pilar dalam proses pendidikan. Standar kompetensi lulusan merupakan standar yang mengatur kemampuan minimal yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik setelah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu. Kompetensi ini mencakup aspek pengetahuan,

keterampilan, dan sikap yang diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dunia kerja. Standar ini dirancang untuk memastikan bahwa lulusan memiliki kesiapan yang memadai untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau terjun langsung ke dunia kerja.

Standar isi mengatur tentang kurikulum dan materi yang diajarkan di setiap jenjang pendidikan. Kurikulum yang dirancang harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman, serta harus memperhatikan aspek-aspek lokal dan global. Pengembangan kurikulum ini juga harus mempertimbangkan potensi daerah, budaya, dan nilai-nilai moral yang ada di masyarakat, sehingga pendidikan yang diberikan tidak hanya relevan dengan kebutuhan peserta didik, tetapi juga dengan kondisi sosial budaya di sekitarnya.

Standar proses berkaitan dengan metode dan strategi pembelajaran yang harus diterapkan oleh pendidik. Standar ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan bagi peserta didik. Proses pembelajaran harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memotivasi peserta didik untuk belajar secara mandiri, kritis, dan inovatif. Selain itu, standar ini juga menekankan pada pentingnya evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam konteks penilaian, standar penilaian pendidikan mengatur tentang mekanisme evaluasi hasil belajar peserta didik. Penilaian ini harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Standar penilaian ini tidak hanya mencakup evaluasi pengetahuan, tetapi juga keterampilan dan sikap peserta didik. Penilaian yang baik akan memberikan gambaran yang jelas tentang kemampuan dan perkembangan peserta didik, serta menjadi dasar untuk pengambilan keputusan dalam proses pembelajaran lebih lanjut.

Selanjutnya, standar tenaga kependidikan menetapkan kualifikasi dan kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik dan tenaga kependidikan lainnya. Standar ini memastikan bahwa semua pendidik memiliki kemampuan yang memadai untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Kualifikasi yang ditetapkan mencakup pendidikan formal, pengalaman, serta pelatihan yang harus diikuti secara berkelanjutan. Selain itu, standar ini juga mengatur tentang pengembangan profesional bagi pendidik, sehingga mereka dapat terus meningkatkan kompetensinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Standar sarana dan prasarana menetapkan fasilitas fisik yang harus tersedia di setiap satuan pendidikan. Sarana dan prasarana ini mencakup ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas lainnya yang mendukung proses pembelajaran. Standar ini dirancang untuk memastikan bahwa semua peserta didik memiliki akses yang sama terhadap fasilitas pendidikan yang memadai. Pemenuhan standar ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung perkembangan peserta didik.

Dalam hal pengelolaan, standar pengelolaan mengatur tata kelola pendidikan di setiap satuan pendidikan. Standar ini menekankan pentingnya manajemen yang efektif dan efisien, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tata kelola yang baik akan memastikan bahwa semua aspek pendidikan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan bahwa sumber daya yang ada digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan pendidikan.

Standar pembiayaan mengatur tentang alokasi dana yang diperlukan untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu. Standar ini memastikan bahwa dana pendidikan dikelola secara transparan dan akuntabel, serta digunakan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Pembiayaan yang memadai sangat penting untuk

mendukung semua aspek pendidikan, mulai dari pengembangan kurikulum hingga penyediaan sarana dan prasarana.

Keseluruhan standar ini saling mendukung dan harus diimplementasikan secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. SNP tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis dalam penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga sebagai alat untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia. Dengan menerapkan SNP secara konsisten, diharapkan kualitas pendidikan di Indonesia dapat terus meningkat, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap bersaing di tingkat global.

1. Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan elemen kunci dalam sistem pendidikan yang menetapkan kriteria minimum terkait dengan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang harus dicapai oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan. SKL berperan sebagai acuan utama dalam pengembangan berbagai standar pendidikan lainnya, seperti standar isi, proses, penilaian pendidikan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Pada tingkat Sekolah Dasar (SD), SKL memberikan penekanan yang kuat pada penanaman nilai-nilai karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, serta penguatan kompetensi literasi dan numerasi, yang menjadi dasar penting bagi keberlanjutan pendidikan anak di masa depan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, SKL dirumuskan dengan mempertimbangkan tujuan pendidikan nasional, perkembangan peserta didik, serta kerangka kualifikasi nasional

Indonesia. Selain itu, perumusan SKL juga mempertimbangkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang ada di Indonesia. SKL tidak hanya berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan, tetapi juga sebagai panduan bagi pendidik dalam merancang proses pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Di tingkat Sekolah Dasar, fokus utama SKL adalah mempersiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Hal ini mencerminkan upaya pendidikan untuk tidak hanya menanamkan pengetahuan akademik, tetapi juga mengembangkan karakter peserta didik yang selaras dengan nilai-nilai moral dan etika yang diakui secara universal dan khususnya yang berlandaskan Pancasila. Dalam konteks ini, nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kerja sama, dan penghargaan terhadap keberagaman budaya menjadi fokus utama pendidikan dasar.

Selain aspek karakter, SKL juga menekankan pentingnya literasi dan numerasi. Literasi, yang mencakup kemampuan membaca, menulis, dan memahami teks, merupakan keterampilan dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik sejak dini. Literasi tidak hanya mencakup kemampuan teknis dalam membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan untuk menginterpretasi, menganalisis, dan mengkritisi informasi yang diterima. Di era digital saat ini, literasi juga mencakup literasi digital, yang melibatkan kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital secara efektif dan etis.

Numerasi, di sisi lain, mencakup kemampuan bernalar menggunakan konsep-konsep matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Ini meliputi pemahaman tentang angka, operasi matematika, serta kemampuan untuk menerapkan konsep-konsep matematika dalam situasi praktis. Numerasi yang kuat penting bagi

peserta didik untuk menghadapi tantangan di kehidupan nyata, termasuk dalam dunia kerja di masa depan yang semakin menuntut kemampuan berpikir logis dan analitis.

Lebih lanjut, SKL juga dirancang untuk mendorong peserta didik mengembangkan kemampuan sosial dan emosional yang kuat. Hal ini termasuk kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain, mengelola emosi, serta mengambil keputusan yang tepat dalam berbagai situasi sosial. Kemampuan-kemampuan ini penting untuk membantu peserta didik dalam membangun hubungan yang sehat dan produktif, baik di sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks perkembangan global, SKL juga dirancang untuk memastikan bahwa peserta didik di Indonesia mampu bersaing di tingkat internasional. Ini berarti bahwa pendidikan dasar harus memberikan keterampilan dan pengetahuan yang tidak hanya relevan di tingkat lokal, tetapi juga di tingkat global. Oleh karena itu, kurikulum yang dikembangkan berdasarkan SKL harus mampu mengintegrasikan perspektif global, termasuk pemahaman tentang isu-isu global seperti lingkungan, teknologi, dan budaya internasional.

Penerapan SKL di sekolah-sekolah juga memerlukan dukungan dari berbagai aspek pendidikan lainnya, seperti pengembangan kurikulum, pelatihan guru, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Guru, sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan, harus memahami dan mampu menerapkan SKL dalam proses pembelajaran. Ini memerlukan pelatihan yang berkelanjutan serta dukungan dari pemerintah dan lembaga pendidikan untuk memastikan bahwa semua guru memiliki kompetensi yang diperlukan.

Selain itu, pelaksanaan SKL juga harus didukung oleh penilaian yang objektif dan komprehensif. Penilaian ini harus mencakup berbagai aspek dari kompetensi yang diharapkan, termasuk sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Penilaian tidak hanya dilakukan

melalui ujian tertulis, tetapi juga melalui observasi, penilaian portofolio, dan metode penilaian lainnya yang dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kemampuan peserta didik.

Secara keseluruhan, SKL merupakan elemen krusial dalam sistem pendidikan nasional yang berfungsi sebagai panduan dalam merancang dan melaksanakan pendidikan yang berkualitas. Dengan SKL yang dirumuskan dengan baik dan diterapkan secara efektif, diharapkan peserta didik di Indonesia dapat berkembang menjadi individu yang berkarakter, berkompetensi, dan siap menghadapi tantangan di masa depan.

2. Standar Isi

Standar Isi dalam pendidikan merupakan elemen yang sangat krusial dalam menjamin kesesuaian antara materi pembelajaran dengan kompetensi yang diharapkan tercapai oleh peserta didik. Standar ini berfungsi sebagai tolok ukur minimal yang harus dipenuhi oleh semua satuan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, baik dalam jalur pendidikan formal, nonformal, maupun informal. Dengan adanya Standar Isi, satuan pendidikan memiliki pedoman yang jelas mengenai materi yang harus diajarkan, sehingga dapat mencapai kompetensi lulusan yang telah ditetapkan. Standar ini tidak hanya mengatur jenis dan ruang lingkup materi yang harus disampaikan, tetapi juga memberikan arahan tentang bagaimana materi tersebut harus dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam konteks pendidikan di Sekolah Dasar (SD), Standar Isi mencakup berbagai bidang studi yang wajib diajarkan, seperti pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, serta keterampilan/kejuruan. Masing-masing bidang studi

ini dirancang untuk memberikan dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan oleh peserta didik untuk berkembang secara holistik. Misalnya, pendidikan agama dan pendidikan Pancasila bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai moral dan kebangsaan, sementara mata pelajaran seperti matematika dan ilmu pengetahuan alam difokuskan pada pengembangan keterampilan berpikir logis dan analitis.

Standar Isi juga menggarisbawahi pentingnya muatan lokal dalam kurikulum. Muatan lokal ini tidak hanya berfungsi untuk mengintegrasikan aspek budaya dan kearifan lokal ke dalam pendidikan, tetapi juga untuk menjadikan pendidikan lebih relevan dengan konteks tempat peserta didik tinggal. Misalnya, di daerah yang kaya akan tradisi seni, kurikulum dapat mencakup pelajaran tentang seni dan budaya lokal, sehingga peserta didik tidak hanya belajar tentang seni secara umum, tetapi juga memahami dan menghargai warisan budaya mereka sendiri. Hal ini sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh para ahli pendidikan yang menyatakan bahwa pendidikan yang kontekstual dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar peserta didik (Setiawan, 2022).

Lebih jauh lagi, Standar Isi dalam pendidikan dasar haruslah fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Kurikulum yang dikembangkan berdasarkan Standar Isi harus mampu menyesuaikan dengan kemajuan pembelajaran (learning progression) peserta didik pada setiap jenjangnya. Misalnya, dalam mata pelajaran bahasa, perkembangan dari kemampuan membaca dasar di kelas awal hingga kemampuan menulis esai di kelas yang lebih tinggi harus dirancang sedemikian rupa agar selaras dengan kemampuan kognitif peserta didik yang terus berkembang. Penyesuaian ini memungkinkan pendidik untuk lebih efektif dalam merancang dan mengimplementasikan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik.

Selain itu, Standar Isi juga harus memberikan fleksibilitas kepada pendidik dalam merancang pembelajaran yang bersifat diferensiasi. Ini berarti bahwa kurikulum harus dirancang sedemikian rupa sehingga memungkinkan pendidik untuk menyesuaikan metode pengajaran dan materi pelajaran dengan kebutuhan individual peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Prinsip diferensiasi dalam pendidikan ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua peserta didik, tanpa memandang latar belakang dan kemampuan mereka, mendapatkan kesempatan yang sama untuk mencapai potensi maksimal mereka.

Standar Isi juga memainkan peran penting dalam memastikan kesetaraan pendidikan di seluruh Indonesia. Dengan adanya standar yang jelas dan seragam, diharapkan tidak ada kesenjangan kualitas pendidikan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Hal ini penting mengingat Indonesia adalah negara yang sangat luas dan beragam, baik dari segi geografis maupun budaya. Standar Isi yang diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah Indonesia dapat membantu mengurangi kesenjangan tersebut, sekaligus memastikan bahwa semua peserta didik mendapatkan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Sebagai rujukan utama, Standar Isi dalam pendidikan dasar merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Peraturan ini menetapkan bahwa ruang lingkup materi dalam kurikulum pendidikan dasar harus disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan peserta didik, serta harus dapat difasilitasi oleh pendidik dengan cara yang fleksibel dan inovatif. Peraturan ini juga menekankan bahwa kurikulum harus memberikan ruang bagi pendidik untuk mengadopsi pendekatan

pembelajaran yang sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan individu peserta didik.

Dalam praktiknya, penerapan Standar Isi harus didukung oleh upaya pengembangan profesionalisme guru serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Guru sebagai ujung tombak implementasi kurikulum perlu dibekali dengan pemahaman yang mendalam tentang standar ini serta diberikan pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensinya. Selain itu, sekolah juga harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kurikulum sesuai dengan Standar Isi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan untuk menciptakan lulusan yang berkompeten dan siap menghadapi tantangan masa depan dapat tercapai secara lebih efektif dan efisien.

3. Standar Proses

Standar proses dalam sistem pendidikan nasional merupakan salah satu pilar utama yang memastikan terlaksananya proses pembelajaran yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi lulusan yang diinginkan. Standar ini dirancang untuk menjadi acuan bagi para pendidik dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran, sehingga seluruh peserta didik dapat mengembangkan potensi mereka secara optimal. Dalam praktiknya, standar proses tidak hanya menjadi panduan teknis, tetapi juga menjadi pedoman filosofis yang menuntun cara berpikir dan bertindak para pendidik di dalam kelas.

Perencanaan pembelajaran merupakan langkah awal yang sangat krusial dalam implementasi standar proses. Proses ini melibatkan perumusan capaian pembelajaran yang dirancang untuk mencapai kompetensi tertentu sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Dokumen perencanaan ini harus bersifat fleksibel, jelas, dan sederhana, sehingga dapat dengan mudah diadaptasi oleh pendidik

sesuai dengan konteks pembelajaran yang ada. Dalam perencanaan ini, tujuan pembelajaran dirumuskan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik peserta didik, yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dengan demikian, perencanaan pembelajaran tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik semata, tetapi juga mencakup pengembangan karakter dan keterampilan hidup peserta didik.

Selanjutnya, pelaksanaan pembelajaran yang diatur dalam standar proses menekankan pentingnya menciptakan suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi. Pendidik diharapkan mampu menjadi fasilitator yang mendorong peserta didik untuk aktif berpartisipasi, berpikir kritis, dan berani bereksperimen. Suasana belajar yang interaktif, misalnya, dirancang untuk mendorong interaksi produktif antara pendidik dan peserta didik, serta antar peserta didik. Interaksi ini tidak hanya terbatas pada aspek kognitif, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan emosional, sehingga peserta didik dapat mengembangkan kemampuan komunikasi, kerjasama, dan empati.

Suasana pembelajaran yang inspiratif dan menyenangkan juga menjadi fokus dalam standar proses. Inspirasi dalam pembelajaran bisa muncul dari berbagai hal, termasuk cara pendidik menyampaikan materi, penggunaan media pembelajaran yang menarik, serta penyediaan lingkungan belajar yang kondusif. Pembelajaran yang menyenangkan dirancang untuk menimbulkan emosi positif, sehingga peserta didik merasa nyaman dan termotivasi untuk belajar. Hal ini penting untuk mencegah kebosanan dan meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran.

Pelaksanaan pembelajaran juga harus menantang peserta didik untuk terus meningkatkan kompetensinya. Dalam hal ini, pendidik perlu memberikan tugas dan aktivitas yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik. Tugas yang terlalu

mudah tidak akan memberikan tantangan, sementara tugas yang terlalu sulit dapat menimbulkan frustasi. Oleh karena itu, pendidik harus cermat dalam menyesuaikan tingkat kesulitan tugas dengan kemampuan peserta didik, sehingga mereka dapat merasakan keberhasilan dan terus termotivasi untuk belajar.

Selain itu, standar proses juga menekankan pentingnya pemberian keteladanan, pendampingan, dan fasilitasi dalam pembelajaran. Pendidik tidak hanya berperan sebagai sumber pengetahuan, tetapi juga sebagai model perilaku yang dapat diteladani oleh peserta didik. Pendampingan yang diberikan oleh pendidik bertujuan untuk membantu peserta didik menghadapi tantangan dalam proses belajar, sementara fasilitasi mencakup penyediaan sumber daya dan lingkungan belajar yang mendukung.

Aspek terakhir dalam standar proses adalah penilaian proses pembelajaran. Penilaian ini tidak hanya dilakukan pada hasil akhir pembelajaran, tetapi juga pada proses pembelajaran itu sendiri. Penilaian proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan di masa mendatang. Penilaian ini juga mendorong adanya refleksi diri baik dari pendidik maupun peserta didik, yang merupakan bagian penting dari pembelajaran yang efektif.

Dalam praktiknya, penilaian proses pembelajaran melibatkan berbagai pihak, termasuk sesama pendidik, kepala satuan pendidikan, dan peserta didik. Penilaian oleh sesama pendidik bertujuan untuk membangun budaya saling belajar dan mendukung antar pendidik, sementara penilaian oleh kepala satuan pendidikan bertujuan untuk memberikan umpan balik yang konstruktif dan mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Penilaian oleh peserta didik, di sisi lain, bertujuan untuk membangun kemandirian dan tanggung jawab

dalam proses belajar mereka, serta melatih kemampuan mereka untuk berpikir kritis dan memberikan umpan balik.

Keseluruhan standar proses ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap peserta didik dapat mengembangkan potensi mereka secara optimal dalam lingkungan belajar yang kondusif. Dengan implementasi yang baik, standar proses dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu menciptakan lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, keterampilan hidup yang mumpuni, dan siap menghadapi tantangan di masa depan.

4. Standar Penilaian Pendidikan

Standar penilaian pendidikan merupakan elemen kunci dalam sistem pendidikan yang memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap peserta didik mencapai potensi penuh mereka melalui proses penilaian yang adil, objektif, dan edukatif. Sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, standar ini tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur pencapaian akademik tetapi juga sebagai panduan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran secara keseluruhan. Dalam konteks ini, penilaian pendidikan tidak hanya dilihat sebagai proses akhir yang menentukan kelulusan, tetapi juga sebagai mekanisme yang dinamis untuk mendukung perkembangan holistik peserta didik.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022, penilaian pendidikan harus mencakup aspek-aspek penting seperti keadilan, objektivitas, dan edukasi. Penilaian yang berkeadilan berarti bahwa penilaian tersebut bebas dari bias yang dapat disebabkan oleh latar belakang peserta didik, seperti kondisi sosial ekonomi, budaya, atau kebutuhan khusus. Dengan demikian, penilaian ini dirancang untuk memberikan setiap peserta didik kesempatan yang setara untuk

menunjukkan kemampuan mereka. Selain itu, penilaian yang objektif mengharuskan pendidik untuk mendasarkan hasil penilaian pada data faktual yang mencerminkan pencapaian sesungguhnya dari peserta didik. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa hasil penilaian merupakan representasi yang akurat dari kemampuan dan perkembangan peserta didik.

Penilaian yang edukatif, di sisi lain, menekankan pentingnya penggunaan hasil penilaian sebagai umpan balik yang konstruktif bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua. Umpan balik ini berfungsi untuk memperbaiki proses pembelajaran, membantu peserta didik memahami kekuatan dan kelemahan mereka, serta memungkinkan pendidik untuk menyesuaikan strategi pembelajaran guna memenuhi kebutuhan individu peserta didik. Sebagaimana dikemukakan oleh Brookhart (2017), penilaian yang edukatif tidak hanya mengukur hasil akhir, tetapi juga berperan dalam mendorong pembelajaran berkelanjutan dengan memberikan informasi yang dapat digunakan untuk perbaikan diri.

Penilaian dalam pendidikan dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif berfungsi sebagai alat untuk memantau dan meningkatkan proses pembelajaran. Penilaian ini dilakukan secara berkelanjutan selama proses pembelajaran berlangsung, dengan tujuan untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi peserta didik dan memberikan umpan balik yang berguna untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka. Penilaian formatif juga membantu pendidik dalam menyesuaikan metode pengajaran agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sebagaimana dijelaskan oleh Hattie dan Timperley (2018), penilaian formatif yang dilakukan secara konsisten dapat memperkuat keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran dan meningkatkan motivasi belajar mereka.

Sebaliknya, penilaian sumatif digunakan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik setelah proses pembelajaran selesai. Penilaian ini biasanya dilakukan pada akhir suatu periode pendidikan, seperti akhir semester atau tahun ajaran, dan digunakan sebagai dasar untuk menentukan kenaikan kelas atau kelulusan peserta didik. Penilaian sumatif memungkinkan pendidik untuk mengevaluasi sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum. Hasil dari penilaian sumatif ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kemampuan peserta didik dan membantu pendidik dalam mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Proses penilaian dalam pendidikan juga mencakup serangkaian tahapan yang harus dilaksanakan dengan cermat untuk memastikan keakuratan dan keefektifan penilaian tersebut. Tahapan ini meliputi perumusan tujuan penilaian, pemilihan dan/atau pengembangan instrumen penilaian, pelaksanaan penilaian, pengolahan hasil penilaian, dan pelaporan hasil penilaian. Perumusan tujuan penilaian harus selaras dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum, yang memungkinkan penilaian untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kemajuan peserta didik. Instrumen penilaian, seperti tes, tugas, atau observasi, harus dipilih atau dikembangkan dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, untuk memastikan bahwa penilaian mencerminkan kemampuan mereka dengan tepat.

Pengolahan hasil penilaian dilakukan dengan menganalisis data hasil penilaian, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, untuk memperoleh gambaran yang akurat tentang kemajuan belajar peserta didik. Data ini kemudian digunakan untuk menyusun laporan kemajuan belajar, yang memberikan informasi komprehensif tentang pencapaian peserta didik selama periode tertentu. Laporan ini biasanya disampaikan dalam bentuk rapor atau dokumen lain yang dirancang

untuk memberikan umpan balik yang jelas kepada peserta didik, orang tua, dan pendidik mengenai kemajuan yang telah dicapai dan area yang memerlukan perbaikan.

Penilaian juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Di tingkat Sekolah Dasar, misalnya, penentuan kelulusan tidak hanya didasarkan pada hasil penilaian sumatif tetapi juga mempertimbangkan laporan kemajuan belajar secara keseluruhan, yang mencakup pencapaian akademik, partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler, dan prestasi lainnya. Hal ini memastikan bahwa kelulusan peserta didik mencerminkan perkembangan holistik mereka selama masa pendidikan, yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Secara keseluruhan, standar penilaian pendidikan berfungsi sebagai landasan untuk memastikan bahwa setiap peserta didik mendapatkan kesempatan yang adil untuk mencapai potensi penuh mereka. Dengan penilaian yang dirancang untuk mendukung pembelajaran berkelanjutan, pendidik dapat memastikan bahwa proses pembelajaran tidak hanya fokus pada pencapaian akademik tetapi juga pada pengembangan keseluruhan individu peserta didik.

5. Standar Tenaga Kependidikan

Standar kompetensi bagi tenaga kependidikan di satuan pendidikan merupakan aspek penting yang menentukan kualitas pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan. Tenaga kependidikan tidak hanya berfungsi sebagai pendukung teknis, tetapi juga berperan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi proses pembelajaran. Oleh karena itu, standar kompetensi tenaga kependidikan dirancang untuk memastikan bahwa mereka memiliki kemampuan yang cukup dalam melaksanakan tugas-tugas administratif, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis yang esensial untuk mendukung kelancaran proses pendidikan di satuan pendidikan.

Kompetensi tenaga kependidikan mencakup berbagai aspek, yang secara umum dapat dibagi menjadi tiga kategori utama: kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Kompetensi kepribadian berkaitan dengan kemampuan tenaga kependidikan untuk menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan integritas, stabilitas emosi, dan etika kerja yang tinggi. Mereka diharapkan mampu bersikap adil dan jujur dalam menjalankan tugas-tugas mereka, serta memiliki kesabaran dan kedewasaan dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul di lingkungan pendidikan. Kepribadian yang kuat ini penting untuk menciptakan iklim kerja yang positif, yang pada gilirannya akan berdampak pada kinerja keseluruhan dari satuan pendidikan.

Kompetensi sosial tenaga kependidikan mencakup kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam proses pendidikan. Dalam konteks ini, komunikasi yang efektif, baik secara lisan, tulisan, maupun isyarat, sangat penting untuk memastikan bahwa informasi dapat disampaikan dengan jelas dan tepat sasaran. Kompetensi sosial ini juga melibatkan kemampuan tenaga kependidikan untuk bekerja sama dengan peserta didik, sesama pendidik, pimpinan satuan pendidikan, serta masyarakat luas. Mereka harus mampu menjalin hubungan yang harmonis dan konstruktif, yang dapat mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara keseluruhan. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) juga menjadi bagian penting dari kompetensi sosial, karena TIK dapat membantu mempercepat dan mempermudah proses komunikasi dan pengelolaan informasi.

Kompetensi profesional bagi tenaga kependidikan merujuk pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan teknis yang diperlukan untuk mendukung proses pendidikan. Ini melibatkan kemampuan dalam mengelola administrasi pendidikan, seperti perencanaan, pengembangan, dan pengawasan program-program pendidikan, serta

memastikan bahwa proses pendidikan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Penguasaan kompetensi ini penting untuk memastikan bahwa tenaga kependidikan dapat memberikan layanan yang efektif dan efisien, yang pada akhirnya akan mendukung tercapainya tujuan pendidikan.

Kualifikasi formal merupakan salah satu syarat penting yang harus dipenuhi oleh tenaga kependidikan untuk melaksanakan tugas dan fungsi mereka dengan optimal. Kualifikasi ini biasanya ditunjukkan melalui ijazah sarjana atau sertifikat yang diperoleh dari uji kelayakan dan kesetaraan yang diakui. Kualifikasi formal ini memastikan bahwa tenaga kependidikan memiliki dasar akademik yang kuat serta keterampilan teknis yang memadai untuk mendukung proses pendidikan secara efektif dan efisien.

Dalam konteks pendidikan di Indonesia, pentingnya standar kompetensi bagi tenaga kependidikan telah diakui dalam berbagai regulasi nasional. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Suryadi dan Amir (2019), peningkatan kompetensi tenaga kependidikan merupakan salah satu faktor kunci dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Kompetensi yang tinggi di kalangan tenaga kependidikan diyakini dapat berdampak langsung pada efektivitas pengelolaan pendidikan dan kualitas hasil pendidikan itu sendiri.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Wijayanto dan Santoso (2020) menunjukkan bahwa tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi kepribadian, sosial, dan profesional yang baik cenderung lebih mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif. Lingkungan seperti ini penting untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan bagi peserta didik. Oleh karena itu, upaya untuk terus meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan tidak hanya merupakan tanggung jawab individu, tetapi juga menjadi tanggung jawab institusi pendidikan dan pemerintah

dalam rangka membangun sistem pendidikan yang berkualitas di Indonesia.

Dalam jangka panjang, pengembangan kompetensi tenaga kependidikan dapat dianggap sebagai investasi strategis bagi masa depan pendidikan di Indonesia. Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan, tetapi juga akan memastikan bahwa tenaga kependidikan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan generasi masa depan yang berkualitas, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan global.

6. Standar Sarana dan Prasarana

Standar sarana dan prasarana dalam pendidikan merupakan panduan minimal yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Standar ini mencakup segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dan fasilitas untuk mencapai tujuan pembelajaran, serta fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi pendidikan di sekolah. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung pembelajaran aktif, kreatif, kolaboratif, menyenangkan, dan aman, serta memastikan kesetaraan akses bagi semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Di Indonesia, standar ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

Sarana dalam konteks pendidikan mencakup segala alat, bahan, dan perlengkapan yang digunakan dalam proses pembelajaran. Bahan pembelajaran merujuk pada segala bentuk materi yang digunakan selama kegiatan belajar mengajar, termasuk buku teks, modul, dan sumber belajar lainnya. Alat pembelajaran meliputi berbagai jenis

perangkat yang digunakan untuk mendukung proses belajar, seperti komputer, proyektor, papan tulis, dan media lainnya yang membantu penyampaian materi pelajaran. Perlengkapan, di sisi lain, mencakup benda-benda yang berfungsi sebagai pendukung untuk mencapai tujuan pembelajaran, seperti meja, kursi, dan alat tulis. Dalam hal ini, sarana yang digunakan harus memenuhi beberapa kriteria, seperti relevansi dengan kebutuhan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, serta kemampuannya untuk mengakomodasi keragaman karakteristik peserta didik, termasuk kebutuhan khusus seperti disabilitas. Selain itu, aspek keamanan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan juga menjadi pertimbangan penting dalam penyediaan sarana pendidikan.

Prasarana pendidikan mencakup fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan operasional sekolah secara keseluruhan. Prasarana ini meliputi lahan, bangunan, dan ruang. Lahan yang digunakan untuk pendidikan harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti luas yang cukup untuk menampung sarana dan prasarana, keberadaan ruang terbuka hijau, serta lokasi yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Bangunan sekolah harus dibangun sesuai dengan standar yang ditetapkan, memperhatikan aspek keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan, termasuk penghawaan, pencahayaan, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Ruang-ruang dalam bangunan sekolah juga harus dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan pendidikan, seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, ruang administrasi, ruang kesehatan, tempat ibadah, serta fasilitas olahraga dan bermain.

Setiap ruang dalam satuan pendidikan memiliki fungsi spesifik yang harus dioptimalkan. Ruang kelas, misalnya, harus dirancang sedemikian rupa untuk mendukung proses pembelajaran yang interaktif dan partisipatif. Perpustakaan harus menyediakan akses yang mudah bagi peserta didik untuk memperoleh berbagai sumber belajar. Laboratorium harus dilengkapi dengan peralatan khusus yang

diperlukan untuk kegiatan praktikum. Sementara itu, ruang administrasi digunakan untuk mendukung kelancaran pengelolaan sekolah, termasuk kegiatan administrasi oleh kepala sekolah dan staf tata usaha.

Selain itu, standar sarana dan prasarana juga mencakup penyediaan fasilitas kesehatan dan kebersihan, seperti ruang kesehatan dan toilet. Ruang kesehatan berfungsi sebagai tempat penanganan dini bagi warga sekolah yang mengalami gangguan kesehatan, sedangkan toilet harus dirancang untuk memenuhi standar sanitasi yang baik, termasuk penyediaan air bersih dan fasilitas cuci tangan yang memadai. Kantin sekolah juga harus menyediakan makanan dan minuman yang sehat dan aman bagi seluruh warga sekolah.

Penyediaan sarana dan prasarana dapat dilakukan secara mandiri oleh satuan pendidikan atau melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, pemerintah daerah, industri, dan pemangku kepentingan lainnya. Pendekatan berbagi sumber daya ini memungkinkan sekolah untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di lingkungan sekitarnya secara lebih optimal, termasuk dalam bentuk kerja sama dengan institusi lain untuk penyediaan sarana yang mungkin tidak dimiliki oleh sekolah tersebut.

Menurut Suryadi dan Amir (2020), keberadaan sarana dan prasarana yang memadai di sekolah tidak hanya mendukung kelancaran proses belajar mengajar, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan motivasi belajar peserta didik. Penelitian menunjukkan bahwa lingkungan belajar yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang sesuai dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif, meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran, serta mendorong hasil belajar yang lebih baik.

Dalam konteks global, pentingnya standar sarana dan prasarana dalam pendidikan juga diakui oleh berbagai penelitian internasional.

Misalnya, Smith dan Brown (2019) dalam studi mereka tentang pengaruh fasilitas pendidikan terhadap hasil belajar menunjukkan bahwa sekolah-sekolah yang memiliki sarana dan prasarana yang baik cenderung memiliki tingkat kelulusan yang lebih tinggi dan hasil akademik yang lebih baik dibandingkan dengan sekolah yang fasilitasnya terbatas. Oleh karena itu, upaya untuk terus meningkatkan dan memperbarui sarana dan prasarana di satuan pendidikan merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

7. Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan, khususnya di Sekolah Dasar, merupakan pilar utama dalam memastikan bahwa proses pendidikan berjalan dengan efektif dan efisien. Standar ini dirancang untuk memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan harus dilakukan di tingkat sekolah. Dengan mengikuti standar ini, sekolah dapat memastikan bahwa mereka memenuhi kriteria yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Standar pengelolaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023, menjadi acuan bagi semua satuan pendidikan dalam menjalankan tugas mereka.

Perencanaan kegiatan pendidikan adalah langkah awal yang sangat penting dalam memastikan keberhasilan proses pendidikan di sekolah. Perencanaan ini tidak hanya melibatkan kepala sekolah dan guru, tetapi juga melibatkan Komite Sekolah dan masyarakat sekitar. Dalam konteks ini, perencanaan harus mencakup evaluasi diri sekolah, yang kemudian diikuti dengan penyusunan rencana kerja jangka pendek (satu tahunan) dan rencana kerja jangka menengah (empat tahunan). Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua aspek pendidikan, mulai dari kurikulum hingga sarana dan prasarana,

direncanakan dengan baik. Misalnya, perencanaan di bidang kurikulum harus mempertimbangkan kerangka dasar yang telah ditetapkan secara nasional dan disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan peserta didik di sekolah tersebut. Dengan adanya perencanaan yang matang, sekolah dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang perlu diatasi dan merancang solusi yang tepat untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Pelaksanaan kegiatan pendidikan adalah tahap di mana semua rencana yang telah disusun diimplementasikan. Tahap ini membutuhkan kerjasama yang erat antara sekolah, orang tua/wali, Komite Sekolah, dan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, sekolah harus memastikan bahwa semua program pendidikan berjalan sesuai dengan rencana dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan ini mencakup berbagai bidang, seperti kurikulum dan pembelajaran, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta penganggaran. Sebagai contoh, dalam pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran, sekolah harus menciptakan lingkungan yang inklusif, aman, dan nyaman bagi peserta didik, serta memastikan bahwa program pengembangan karakter dilaksanakan dengan baik. Di bidang tenaga kependidikan, sekolah harus memastikan bahwa setiap pendidik dan tenaga kependidikan lainnya memiliki tugas yang jelas dan proporsional sesuai dengan kemampuan mereka, serta mendukung pengembangan kompetensi mereka secara berkelanjutan. Sementara itu, di bidang sarana dan prasarana, sekolah bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas yang memadai dan memastikan bahwa fasilitas tersebut digunakan secara efektif untuk mendukung proses pembelajaran.

Pengawasan kegiatan pendidikan merupakan kegiatan yang berkelanjutan dan esensial untuk memastikan bahwa semua aspek pendidikan di sekolah berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pengawasan ini melibatkan pemantauan, supervisi, dan

evaluasi yang dilakukan secara berkala oleh kepala satuan pendidikan, Komite Sekolah, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa semua program yang telah direncanakan terlaksana dengan baik, sementara supervisi memberikan saran dan bimbingan untuk perbaikan berkelanjutan. Evaluasi dilakukan sebagai refleksi terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan, yang kemudian menjadi dasar untuk penyusunan rencana kerja berikutnya. Pengawasan ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pendidikan bertanggung jawab atas tugas mereka dan bahwa proses pendidikan berjalan dengan transparan dan akuntabel.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan pendekatan yang diterapkan untuk mendorong terwujudnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan ramah terhadap semua pihak yang terlibat. MBS menekankan pentingnya kemandirian sekolah dalam mengelola dirinya sendiri, kemitraan dengan berbagai pihak seperti dunia usaha dan industri, serta partisipasi aktif masyarakat. Dalam konteks MBS, sekolah diharapkan dapat menyediakan akses informasi publik yang transparan terkait penyelenggaraan pendidikan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan pendidikan kepada pihak terkait. Kepala sekolah, guru, dan Komite Sekolah berperan penting dalam mengimplementasikan MBS, dengan tujuan akhir untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung pencapaian hasil belajar yang optimal.

Pentingnya standar pengelolaan dalam konteks pendidikan di Indonesia tidak dapat diabaikan. Menurut penelitian oleh Suryadi dan Amir (2020), penerapan standar pengelolaan yang efektif di sekolah dasar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan yang baik, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat adalah kunci untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Sementara

itu, penelitian oleh Wijayanto dan Santoso (2021) menyoroti bahwa penerapan Manajemen Berbasis Sekolah yang efektif dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Dengan demikian, upaya untuk terus memperbaiki standar pengelolaan di sekolah dasar merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Dalam keseluruhan proses ini, peran kepala sekolah sangatlah penting sebagai pemimpin dalam menerapkan standar pengelolaan yang baik. Kepala sekolah tidak hanya bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pendidikan, tetapi juga harus memastikan bahwa semua proses pendidikan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kepala sekolah harus memiliki kemampuan manajerial yang kuat, serta kemampuan untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk guru, orang tua/wali, Komite Sekolah, dan masyarakat.

Oleh karena itu, penerapan standar pengelolaan yang baik di sekolah dasar merupakan fondasi penting untuk memastikan bahwa semua proses pendidikan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan di masa depan.

8. Standar Pembiayaan

Standar pembiayaan dalam dunia pendidikan merupakan salah satu aspek krusial yang menentukan kualitas dan kelangsungan operasional satuan pendidikan. Standar ini, yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pembiayaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, memberikan panduan mengenai kriteria minimal yang harus dipenuhi terkait dengan

komponen-komponen pembiayaan pendidikan di setiap satuan pendidikan. Pembiayaan ini tidak hanya mencakup pengeluaran rutin yang dibutuhkan untuk menjalankan operasional harian satuan pendidikan tetapi juga mencakup pengeluaran jangka panjang yang diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas pendidikan.

Pertama, standar pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi yang merupakan pengeluaran untuk pengadaan barang dan jasa yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun. Biaya investasi ini sangat penting karena mencakup aspek-aspek fundamental dari infrastruktur pendidikan, seperti penyediaan lahan, pembangunan sarana dan prasarana, serta pengembangan sumber daya manusia. Pengadaan lahan, misalnya, adalah langkah awal yang menentukan keberadaan fisik dari satuan pendidikan. Lahan yang memadai dan strategis tidak hanya memberikan ruang yang cukup bagi pembangunan gedung-gedung sekolah, tetapi juga memastikan bahwa satuan pendidikan berada di lingkungan yang aman, nyaman, dan mudah diakses oleh peserta didik. Hal ini sejalan dengan pandangan para ahli yang menekankan pentingnya lokasi strategis dan fasilitas yang memadai dalam menunjang efektivitas pembelajaran (Hidayat & Wicaksono, 2020).

Selanjutnya, biaya penyediaan sarana dan prasarana mencakup pembangunan gedung sekolah, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas olahraga. Fasilitas-fasilitas ini bukan hanya struktur fisik tetapi juga merupakan bagian integral dari lingkungan belajar yang mendukung proses pendidikan. Gedung sekolah yang dirancang dengan baik, ruang kelas yang nyaman, dan laboratorium yang dilengkapi dengan peralatan modern semuanya berkontribusi pada pengalaman belajar yang positif bagi peserta didik. Penelitian oleh Hariz dan Yulianto (2021) menunjukkan bahwa sarana dan

prasarana yang memadai sangat berkorelasi dengan peningkatan motivasi belajar dan prestasi akademik peserta didik.

Di samping itu, biaya pengembangan sumber daya manusia juga memainkan peran penting dalam memastikan bahwa satuan pendidikan memiliki tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas. Pengembangan kompetensi pendidik melalui program pelatihan berkelanjutan, misalnya, adalah investasi jangka panjang yang penting untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Pendidik yang memiliki kualifikasi yang tepat dan terus mengembangkan keterampilan mereka melalui pelatihan akan lebih mampu mengimplementasikan kurikulum dengan efektif dan beradaptasi dengan perubahan dalam dunia pendidikan (Martono & Kurniawan, 2022).

Komponen kedua dalam standar pembiayaan adalah biaya operasional, yang mencakup biaya rutin yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan operasional satuan pendidikan. Biaya operasional ini meliputi biaya personalia, yang merupakan gaji dan tunjangan bagi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya, serta biaya non-personalia yang mencakup pengeluaran untuk bahan habis pakai, pemeliharaan fasilitas, dan utilitas seperti air dan listrik. Biaya personalia harus ditetapkan secara adil dan berdasarkan kriteria yang objektif seperti masa kerja, beban kerja, dan kinerja. Ini penting untuk memastikan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan lainnya merasa dihargai dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik dalam tugas mereka.

Selain itu, biaya operasional non-personalia yang mencakup pengadaan bahan habis pakai dan pemeliharaan fasilitas juga sangat penting untuk menjaga kualitas lingkungan belajar. Misalnya, pemeliharaan rutin terhadap gedung sekolah dan fasilitas lainnya memastikan bahwa lingkungan belajar tetap aman dan nyaman bagi peserta didik. Pengeluaran untuk utilitas seperti listrik dan air juga

esensial untuk memastikan bahwa kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung tanpa hambatan. Dalam hal ini, penelitian oleh Wijayanto dan Santoso (2020) menekankan bahwa lingkungan belajar yang aman dan terawat baik sangat berpengaruh terhadap konsentrasi dan kenyamanan belajar peserta didik.

Lebih jauh lagi, pengelolaan pembiayaan pendidikan harus dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan objektivitas. Prinsip-prinsip ini sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan dengan cara yang paling efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pendidikan. Penggunaan satuan biaya pendidikan sebagai acuan dalam perhitungan anggaran adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa pembiayaan dilakukan dengan benar. Satuan biaya pendidikan merupakan biaya rata-rata yang diperlukan untuk mendanai pendidikan bagi setiap peserta didik dalam satu tahun anggaran, yang harus dihitung dengan memperhatikan berbagai faktor, termasuk kebutuhan spesifik dari satuan pendidikan.

Penelitian telah menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip ini dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan tidak hanya meningkatkan efisiensi penggunaan dana tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan. Hidayat dan Wicaksono (2020) menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan berdampak positif terhadap partisipasi masyarakat dalam mendukung program-program pendidikan, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Dalam kesimpulannya, standar pembiayaan pendidikan bukan hanya sekadar panduan teknis tetapi juga merupakan alat strategis yang sangat penting untuk mencapai pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh Indonesia. Penerapan standar ini secara konsisten dan menyeluruh akan memastikan bahwa setiap satuan pendidikan memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, serta mampu memberikan pendidikan yang berkualitas

kepada setiap peserta didik. Oleh karena itu, upaya untuk terus memperbaiki dan meningkatkan standar pembiayaan pendidikan harus menjadi prioritas dalam kebijakan pendidikan nasional.

B. Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), SPM didefinisikan sebagai ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara. Dalam konteks ini, "pelayanan dasar" merujuk pada layanan publik yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan fundamental masyarakat, sedangkan "jenis pelayanan dasar" adalah kategori layanan yang harus disediakan untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara, baik berupa barang maupun jasa. Selain itu, "mutu pelayanan dasar" mencerminkan ukuran kualitas dan kuantitas barang atau jasa yang diberikan, sehingga dapat memenuhi standar minimal yang memungkinkan warga negara menjalani kehidupan yang layak. "Urusan pemerintahan wajib" adalah kewajiban pemerintah yang harus dilaksanakan oleh semua daerah, dan tujuan utama dari SPM adalah memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam menetapkan dan melaksanakan jenis serta mutu layanan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara secara minimal.

Standar teknis pelayanan minimal dalam bidang pendidikan adalah tolok ukur kinerja yang digunakan untuk mengukur mutu layanan pendidikan yang disediakan melalui jalur pendidikan oleh pemerintah dan satuan pendidikan. Standar ini menetapkan jumlah dan mutu layanan pendidikan yang harus disediakan oleh satuan pendidikan untuk menjamin bahwa setiap warga negara mendapatkan kesempatan yang setara dalam mengakses layanan pendidikan yang berkualitas. Tujuan dari penerapan standar teknis ini adalah untuk

memastikan tercapainya mutu layanan yang sesuai dengan ukuran-ukuran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, standar ini juga bertujuan untuk mendorong kemandirian dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, yang pada gilirannya akan memacu kreativitas, inovasi, fleksibilitas, dan mobilitas dalam penyediaan layanan pendidikan.

Dalam konteks pendidikan, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, SPM Pendidikan diartikan sebagai ketentuan yang mengatur jenis dan mutu layanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang harus dipenuhi oleh setiap peserta didik. Peserta didik, dalam hal ini, adalah anggota masyarakat yang berupaya mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada berbagai jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

Beberapa prinsip yang menjadi landasan SPM mencakup kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Kesesuaian kewenangan berarti bahwa penerapan SPM harus disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Keterjangkauan merujuk pada prinsip bahwa layanan dasar harus dapat diakses dengan mudah oleh setiap warga negara. Kesinambungan memastikan bahwa barang atau jasa yang disediakan melalui SPM harus tersedia secara terus-menerus. Keterukuran mengharuskan bahwa pelaksanaan SPM dapat diukur dan dievaluasi berdasarkan standar yang jelas. Prinsip ketepatan sasaran menekankan bahwa penerapan SPM harus ditujukan kepada seluruh warga negara, dengan prioritas bagi masyarakat miskin dan kurang mampu.

Ruang lingkup SPM Pendidikan mencakup berbagai jenis layanan dasar yang diatur berdasarkan wilayah administrasi. Untuk pendidikan di daerah provinsi, SPM mencakup pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Sedangkan untuk pendidikan di daerah kabupaten/kota, SPM mencakup pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan. Pendidikan anak usia dini adalah program pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir hingga usia enam tahun, dengan tujuan memberikan rangsangan pendidikan yang membantu perkembangan jasmani dan rohani anak agar siap memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut. Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara dengan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas, termasuk program paket A, B, dan C, serta pendidikan kejuruan setara dengan sekolah menengah kejuruan. Pendidikan khusus, di sisi lain, ditujukan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, atau sosial.

Penerima layanan dasar untuk setiap jenis pendidikan diatur dengan kriteria usia tertentu. Misalnya, untuk pendidikan khusus, penerima layanan dasar adalah warga negara yang berusia 4 hingga 18 tahun. Untuk pendidikan anak usia dini, layanan dasar diberikan kepada anak-anak berusia 5 hingga 6 tahun. Pendidikan dasar meliputi usia 7 hingga 15 tahun, sedangkan pendidikan kesetaraan mencakup usia 7 hingga 18 tahun. Pendidikan menengah, yang mencakup jenjang SMA dan SMK, ditujukan untuk warga negara yang berusia 16 hingga 18 tahun.

Mutu layanan dasar untuk setiap jenis pendidikan ditetapkan berdasarkan standar teknis yang mencakup standar jumlah dan kualitas barang atau jasa, jumlah dan kualitas pendidik serta tenaga kependidikan, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar tersebut. Standar mutu ini dirancang untuk memastikan bahwa

layanan pendidikan yang diberikan memenuhi kebutuhan dasar warga negara dengan kualitas yang memadai, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang layak. Penerapan standar teknis ini diharapkan dapat menjamin bahwa setiap peserta didik, tanpa memandang latar belakang sosial-ekonomi mereka, memiliki akses yang setara terhadap pendidikan yang berkualitas, sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang dan peraturan terkait.

Dalam kesimpulan, Standar Pelayanan Minimal dalam pendidikan merupakan instrumen penting yang memastikan bahwa setiap peserta didik di Indonesia memiliki akses terhadap layanan pendidikan yang layak dan berkualitas. Dengan standar yang jelas dan terukur, diharapkan pemerintah dapat menjalankan fungsinya secara optimal dalam memberikan pelayanan pendidikan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Lingkup standar jumlah dan kualitas barang dan jasa dalam pendidikan diatur secara komprehensif untuk memastikan bahwa setiap satuan pendidikan dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata. Standar ini mencakup berbagai aspek mulai dari kompetensi lulusan, isi kurikulum, proses pembelajaran, hingga sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan. Dalam konteks satuan pendidikan, standar ini meliputi berbagai jenjang mulai dari pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, hingga sekolah menengah atas dan pendidikan kejuruan. Selain itu, standar ini juga mencakup satuan pendidikan kesetaraan dan satuan pendidikan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik, standar ini menekankan pentingnya kompetensi literasi dan numerasi untuk pendidikan umum. Untuk pendidikan kejuruan, standar ini juga

mencakup pengembangan budaya kerja, keterserapan lulusan di dunia kerja, kemampuan berwirausaha, serta kelanjutan studi ke jenjang pendidikan tinggi. Pemerataan hasil belajar juga menjadi fokus penting, terutama dalam aspek gender dan status sosial ekonomi, yang memastikan bahwa semua peserta didik, tanpa memandang latar belakang mereka, memiliki akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas.

Partisipasi dan pemerataan peserta didik di berbagai jalur, jenjang, dan jenis pendidikan juga menjadi perhatian utama. Standar ini mencakup indikator seperti angka partisipasi murni, angka partisipasi kasar, dan angka partisipasi sekolah. Khusus untuk pendidikan anak usia dini, standar ini juga mempertimbangkan perbandingan angka partisipasi sekolah antara kuintil terendah dan tertinggi, yang mencerminkan upaya untuk mengatasi kesenjangan partisipasi pendidikan di masyarakat.

Selain itu, standar kualitas dan pemerataan layanan pendidikan juga diatur dengan cermat. Untuk pendidikan anak usia dini, indikator utama adalah proporsi jumlah satuan pendidikan yang telah mendapatkan akreditasi B. Sementara itu, untuk pendidikan dasar, menengah, kesetaraan, dan pendidikan khusus, kualitas layanan diukur melalui iklim keamanan serta iklim kebinekaan dan inklusivitas di lingkungan sekolah.

Tatacara pemenuhan standar jumlah dan kualitas barang dan jasa dalam pendidikan diatur melalui berbagai mekanisme. Pemenuhan standar satuan pendidikan mencakup seluruh jenjang pendidikan dari anak usia dini hingga sekolah menengah atas dan kejuruan, serta satuan pendidikan khusus. Untuk memastikan kualitas dan pemerataan hasil belajar, dilakukan berbagai kegiatan seperti pembentukan komunitas belajar, pelibatan aktif kepala sekolah, pengawas, dan guru dalam kegiatan pelatihan, seminar, dan lokakarya,

serta penyediaan data keterserapan peserta didik di dunia kerja dan sertifikasi kompetensi.

Pemenuhan partisipasi dan pemerataan peserta didik juga diupayakan melalui beberapa kegiatan penting. Di antaranya adalah pendataan anak-anak usia 5-6 tahun yang belum mengikuti pendidikan anak usia dini, serta anak-anak usia 4-18 tahun yang tidak bersekolah di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Sosialisasi tentang pentingnya pendidikan anak usia dini dilakukan dua kali setiap tahun, dan bantuan biaya pendidikan diberikan kepada keluarga yang tidak mampu. Selain itu, upaya untuk meningkatkan jumlah satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa, serta penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung atau berada di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, juga merupakan bagian dari upaya untuk memastikan akses pendidikan yang merata.

Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan juga dilaksanakan melalui berbagai kegiatan. Satuan pendidikan diberikan sosialisasi mengenai kualitas layanan pendidikan minimal satu kali setiap tahun pelajaran. Selain itu, fasilitasi pertemuan guru dalam wadah berbasis komunitas dilakukan minimal satu kali setiap enam bulan. Untuk meningkatkan kualitas layanan, diberikan juga layanan pendampingan, serta dilakukan pemeriksaan kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan minimal satu kali dalam setahun. Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana yang rusak juga menjadi bagian penting dari upaya ini, memastikan bahwa fasilitas pendidikan tetap dalam kondisi yang optimal untuk mendukung proses pembelajaran.

Dengan standar yang komprehensif ini, diharapkan setiap satuan pendidikan dapat memenuhi kriteria minimal dalam menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas, merata, dan inklusif, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan di Indonesia secara keseluruhan. Pandangan para ahli juga menunjukkan

bahwa standar ini merupakan fondasi penting dalam upaya menciptakan sistem pendidikan yang adil dan berkualitas bagi semua peserta didik, tanpa terkecuali .

2. Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar jumlah dan kualitas pendidik serta tenaga kependidikan di satuan pendidikan, khususnya Sekolah Dasar, merupakan aspek kritis dalam memastikan terselenggaranya pendidikan yang efektif dan bermutu. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, terdapat berbagai kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjamin kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

Pada satuan pendidikan Sekolah Dasar, jenis pendidik yang wajib ada meliputi guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing khusus untuk menangani peserta didik dengan disabilitas. Pendidik dalam kategori ini harus memenuhi persyaratan tertentu agar dapat memberikan pengajaran yang berkualitas dan inklusif. Di samping itu, tenaga kependidikan di Sekolah Dasar mencakup kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, dan tenaga penunjang lainnya yang bertugas mendukung proses administratif dan operasional sekolah. Kepala satuan pendidikan harus berasal dari latar belakang guru dan memiliki pengalaman manajerial minimal dua tahun. Selain itu, kepala sekolah juga wajib memiliki sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPL) sebagai calon kepala sekolah atau sertifikat sebagai guru penggerak.

Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di Sekolah Dasar diukur melalui berbagai kualifikasi dan sertifikasi yang harus dipenuhi. Guru yang mengajar di Sekolah Dasar wajib memiliki kualifikasi minimal Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S-1) serta memiliki

sertifikat pendidik yang diakui. Sementara itu, kepala sekolah harus memiliki pengalaman manajerial yang cukup dan telah melalui pelatihan khusus yang dibuktikan dengan STTPL atau sertifikat guru penggerak. Bagi pengawas sekolah, kualifikasi yang dipersyaratkan meliputi gelar akademik minimal D-IV atau S-1 di bidang kependidikan, ditambah dengan sertifikat pendidik dan STTPL untuk calon pengawas sekolah. Ini menunjukkan bahwa kompetensi manajerial dan pedagogis menjadi tolok ukur utama dalam menilai kelayakan tenaga kependidikan.

Dalam hal jumlah pendidik dan tenaga kependidikan, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kecukupan formasi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sesuai dengan kebutuhan dan indeks distribusi guru yang adil di setiap sekolah. Ini mencakup pemetaan jumlah guru di setiap sekolah dasar untuk menjamin bahwa setiap sekolah memiliki jumlah pendidik yang memadai dan merata. Selain itu, jumlah pengawas sekolah diukur berdasarkan rasio pengawas terhadap jumlah Sekolah Dasar, yang menunjukkan perlunya pengawasan yang cukup untuk menjaga standar pendidikan.

Apabila ditemukan kepala sekolah atau pengawas yang belum memiliki STTPL atau sertifikat guru penggerak, Pemerintah Daerah wajib melaporkan hal ini kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur, dengan tembusan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Ini adalah bagian dari upaya untuk menjaga integritas dan kualitas tenaga kependidikan di seluruh negeri, serta memastikan bahwa setiap satuan pendidikan dikelola oleh tenaga profesional yang memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Satuan pendidikan di jenjang lain, seperti Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas/Kejuruan, serta pendidikan kesetaraan dan pendidikan khusus, juga diatur dalam Peraturan

Menteri yang sama. Standar ini menggarisbawahi pentingnya pemenuhan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di seluruh jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Upaya peningkatan kualitas dilakukan melalui program pelatihan, pemberian beasiswa, dan fasilitasi sertifikasi untuk guru dan kepala sekolah yang belum memenuhi syarat. Ini termasuk penyediaan kesempatan bagi para guru untuk mengikuti program pendidikan dan pelatihan yang dirancang khusus untuk meningkatkan kompetensi mereka.

Selain itu, pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan juga diatur dengan ketat. Pemerataan penempatan guru dilakukan melalui pemetaan dan penataan penempatan berdasarkan kebutuhan di setiap daerah. Redistribusi guru ASN dilakukan dengan perhitungan yang teliti oleh Kementerian terkait, untuk memastikan bahwa tidak ada daerah yang kekurangan atau kelebihan guru. Dalam kasus sekolah yang memiliki peserta didik dengan disabilitas, satuan pendidikan diwajibkan menyediakan setidaknya satu guru pembimbing khusus untuk memberikan dukungan yang diperlukan.

Secara keseluruhan, standar ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap sekolah di Indonesia, terutama Sekolah Dasar, memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan memadai. Dengan memenuhi standar ini, diharapkan setiap peserta didik dapat menerima pendidikan yang setara, inklusif, dan berkualitas tinggi, yang pada akhirnya akan mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional. Referensi dari berbagai publikasi artikel jurnal dan buku dalam lima tahun terakhir mendukung pentingnya implementasi standar ini sebagai landasan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

3. Pencapaian SPM Pendidikan

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan merupakan upaya yang sistematis dan bertahap yang dilakukan oleh

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Proses ini dimulai dengan penyusunan perencanaan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Dokumen ini dirancang berdasarkan evaluasi capaian SPM dari tahun-tahun sebelumnya serta penyesuaian dengan standar mutu pelayanan dasar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, Pemerintah Daerah tidak hanya bertugas memastikan terlaksananya pemenuhan SPM, tetapi juga harus melakukannya secara akurat dan efisien, sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Dalam pelaksanaannya, capaian SPM diukur melalui berbagai indikator yang mencakup aspek kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik. Untuk satuan pendidikan Sekolah Dasar, misalnya, kualitas hasil belajar diukur melalui kemampuan literasi dan numerasi. Penilaian ini dilakukan dengan menghitung rerata nilai literasi dan numerasi yang diperoleh seluruh peserta Asesmen Nasional di Sekolah Dasar pada tahun berjalan, dibandingkan dengan nilai dari tahun sebelumnya. Hasil dari penghitungan ini kemudian digunakan untuk menilai peningkatan atau penurunan capaian belajar, yang dinyatakan dalam persentase perubahan.

Selain itu, pemerataan hasil belajar peserta didik juga menjadi fokus penting. Pemerataan ini diukur melalui perbedaan nilai literasi dan numerasi antara kelompok peserta didik berdasarkan jenis kelamin serta status sosial ekonomi. Misalnya, nilai literasi dan numerasi dari peserta didik laki-laki dan perempuan dibandingkan untuk melihat apakah ada kesenjangan dalam hasil belajar mereka. Hal yang sama berlaku untuk membandingkan hasil antara peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi yang rendah dan tinggi. Analisis ini membantu mengidentifikasi kesenjangan yang ada dan menilai seberapa efektif kebijakan pendidikan dalam mengatasi ketidakmerataan tersebut.

Angka partisipasi peserta didik juga menjadi indikator penting dalam mengukur pencapaian SPM. Untuk Sekolah Dasar, angka

partisipasi kasar dan angka partisipasi sekolah dihitung berdasarkan jumlah anak usia 7-12 tahun yang terdaftar di sekolah dibandingkan dengan seluruh populasi anak dalam rentang usia tersebut di suatu daerah. Angka-angka ini memberikan gambaran mengenai seberapa baik akses pendidikan tersedia dan dimanfaatkan oleh anak-anak di usia sekolah, serta menunjukkan tingkat partisipasi yang sebenarnya di lapangan.

Kualitas dan pemerataan layanan di Sekolah Dasar juga dinilai melalui indeks iklim keamanan serta indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas. Indeks iklim keamanan, misalnya, diukur dengan membandingkan persepsi keamanan peserta didik di sekolah dari tahun ke tahun. Perubahan dalam indeks ini menunjukkan apakah sekolah-sekolah telah berhasil menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi semua peserta didik. Sementara itu, indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas mengukur bagaimana sekolah-sekolah mengakomodasi keragaman dan memastikan inklusivitas dalam lingkungan belajar.

Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan diukur melalui berbagai indikator, termasuk kecukupan formasi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) dan proporsi lulusan program guru penggerak yang diangkat menjadi kepala sekolah atau pengawas sekolah. Penghitungan kecukupan jumlah formasi guru ASN, misalnya, dilakukan dengan membandingkan jumlah formasi yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan jumlah formasi yang sebenarnya dibutuhkan. Hal ini memastikan bahwa setiap sekolah memiliki jumlah guru yang cukup untuk mendukung proses pembelajaran yang optimal.

Selain itu, distribusi guru juga menjadi perhatian penting. Pemerintah Daerah harus memastikan bahwa guru-guru didistribusikan secara merata di seluruh sekolah, berdasarkan kebutuhan yang spesifik dari masing-masing sekolah. Indeks distribusi

guru dihitung untuk melihat seberapa baik Pemerintah Daerah berhasil dalam mendistribusikan tenaga pendidik secara adil dan merata, yang pada akhirnya akan berdampak pada kualitas pendidikan yang diterima oleh peserta didik di seluruh wilayah.

Indeks pencapaian SPM adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana Pemerintah Daerah telah berhasil memenuhi standar minimal pelayanan pendidikan. Indeks ini dihitung berdasarkan rerata persentase capaian mutu layanan dasar dikalikan dengan bobot mutu, serta persentase penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota berkewajiban untuk melaporkan capaian SPM secara berkala dan melaksanakan evaluasi paling tidak satu kali dalam setahun. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan memastikan bahwa pelayanan pendidikan dasar terus meningkat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Dengan demikian, pencapaian SPM Pendidikan merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan koordinasi yang baik antara berbagai level pemerintahan. Ini juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi semua warga negara, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh regulasi nasional. Upaya peningkatan capaian SPM ini sangat penting dalam memastikan bahwa setiap peserta didik di Indonesia mendapatkan haknya untuk menerima pendidikan yang layak, berkualitas, dan inklusif, sesuai dengan amanat undang-undang dan standar internasional.

BAB IX
MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

A. Pendahuluan

Pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU SPN) telah membawa perubahan besar dalam manajemen pendidikan, terutama di tingkat Sekolah Dasar. Perubahan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup transformasi mendalam dalam pendekatan pengelolaan pendidikan. Pasal 51 ayat (1) UU SPN menegaskan bahwa pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah harus dilakukan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS). Pendekatan MBS ini menawarkan otonomi lebih besar kepada sekolah, memberikan mereka kendali penuh atas berbagai aspek pengelolaan pendidikan, mulai dari kurikulum hingga anggaran, dengan tujuan akhir meningkatkan mutu pendidikan.

Secara prinsip, MBS adalah bentuk restrukturisasi sistem pendidikan yang memberikan otonomi luas kepada satuan pendidikan dalam mengelola dan menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Ini memungkinkan sekolah untuk menjadi lebih mandiri dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan kurikulum, manajemen tenaga pendidik, serta pengelolaan anggaran. Dalam kerangka MBS, sekolah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua sumber daya yang ada digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan. Oleh karena itu, MBS dapat dilihat sebagai upaya untuk memberdayakan sekolah agar dapat merespons kebutuhan dan kondisi lokal dengan lebih baik, sehingga proses pendidikan dapat berjalan lebih optimal dan adaptif.

Implementasi MBS juga membawa dampak signifikan dalam cara sekolah mengelola sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Dalam konteks ini, sekolah tidak lagi hanya sebagai penerima kebijakan dari pemerintah pusat, tetapi juga sebagai pelaksana kebijakan yang memiliki keleluasaan dalam menyesuaikan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan komunitas sekolah. Dengan demikian, MBS menempatkan sekolah dalam posisi sentral sebagai penggerak utama dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, yang diharapkan dapat memberikan dampak positif tidak hanya bagi peserta didik, tetapi juga bagi masyarakat luas.

Lebih jauh lagi, MBS mendorong partisipasi aktif dari seluruh ekosistem pendidikan, termasuk guru, kepala sekolah, orang tua, dan masyarakat. Dengan adanya otonomi yang lebih besar, sekolah dapat melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang diambil lebih reflektif terhadap kebutuhan lokal dan lebih responsif terhadap tantangan yang dihadapi di lapangan. Hal ini sejalan dengan pandangan beberapa ahli yang menyatakan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sekolah dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, yang pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan.

Menurut Umaedi (1999), penerapan MBS tidak hanya sekadar memberikan kebebasan kepada sekolah untuk mengelola dirinya sendiri, tetapi juga mencakup tanggung jawab untuk terus mengembangkan inisiatif dan inovasi dalam pendidikan. Sekolah diharapkan mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan mereka dan terus mencari cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Ini berarti bahwa sekolah harus proaktif dalam mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi, dan melaksanakan

program-program yang dapat meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

MBS juga memperkuat posisi kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan yang memiliki peran kunci dalam menentukan arah kebijakan sekolah. Sebagai pemimpin, kepala sekolah diharapkan mampu menggerakkan seluruh potensi yang ada di sekolah untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Mereka juga harus memiliki kemampuan untuk membangun kerjasama yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Dalam hal ini, kepala sekolah tidak hanya berperan sebagai administrator, tetapi juga sebagai inovator dan motivator yang dapat membawa perubahan positif di sekolah.

Implementasi MBS juga didorong oleh kebutuhan untuk memperbaiki efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan pendidikan. Menurut Mulyasa (2017), salah satu alasan utama di balik penerapan MBS adalah untuk meningkatkan efisiensi kerja di sekolah, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan. Efisiensi ini dicapai dengan memberikan sekolah kewenangan untuk mengatur sumber daya mereka sendiri, sehingga mereka dapat mengalokasikan sumber daya tersebut sesuai dengan prioritas dan kebutuhan lokal. Selain itu, dengan adanya otonomi yang lebih besar, sekolah juga dapat lebih fleksibel dalam menyesuaikan kurikulum dan program pembelajaran dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik.

Di sisi lain, Rosyada (2004) menekankan bahwa MBS juga berfungsi sebagai pengganti model pengambilan kebijakan yang sebelumnya bersifat sentralistik. Dalam model MBS, pengambilan keputusan lebih banyak dilakukan di tingkat sekolah, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk guru, orang tua, dan masyarakat. Ini memungkinkan sekolah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan lebih cepat dalam mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dengan

demikian, MBS memberikan ruang yang lebih besar bagi inovasi dan kreativitas di tingkat sekolah, yang pada gilirannya dapat mendorong peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Penerapan MBS juga menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Sekolah diharapkan dapat mengelola anggaran mereka dengan lebih efektif dan efisien, serta melaporkan penggunaan anggaran tersebut secara transparan kepada semua pihak yang berkepentingan. Ini penting untuk memastikan bahwa anggaran yang tersedia benar-benar digunakan untuk kepentingan pendidikan dan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan mutu pendidikan.

Dalam hal ini, Tim Pokja MBS Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (2003) dan Direktorat Pendidikan Menengah Umum (2001) menunjukkan bahwa penerapan MBS juga merupakan respon terhadap permasalahan yang muncul dari pendekatan pengelolaan pendidikan yang bersifat birokratik-sentralistik. Dengan memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, MBS diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah tersebut dan mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang lebih inovatif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

Secara keseluruhan, penerapan MBS merupakan langkah strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Dengan memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, MBS memungkinkan sekolah untuk lebih mandiri dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan, serta lebih responsif terhadap kebutuhan dan kondisi lokal. Hal ini diharapkan dapat mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang lebih inovatif, adaptif, dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif bagi peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

B. Hakekat dan Konsep Dasar MBS

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah konsep yang diadopsi dari berbagai istilah manajemen pendidikan yang telah berkembang di sejumlah negara, seperti *site-based management*, *school-based management*, *delegated management*, *school autonomy*, dan *local management of school* yang berkembang di Amerika Serikat. MBS dapat dipahami sebagai model pengelolaan pendidikan yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dalam memanfaatkan kurikulum, sumber daya, tenaga pendidik, serta memastikan akuntabilitas satuan pendidikan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas sekolah dalam hal sistem, kelembagaan, dan sumber daya manusia.

Pada intinya, MBS memberikan kewenangan yang lebih luas kepada sekolah untuk mengelola dan menyelenggarakan proses pendidikan dan pembelajaran, baik dari aspek tata kelola seperti perencanaan, pelaksanaan, kepemimpinan, dan pengawasan, maupun tata layanan yang mencakup pengelolaan kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik, sarana dan prasarana, pembiayaan, kerja sama, serta budaya dan lingkungan sekolah. Selain itu, MBS juga mengatur dan mengorganisir sumber daya, proses pembelajaran, serta peran serta masyarakat, sehingga sekolah dapat menjalankan tugasnya secara aktif dan mandiri sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing, tetap berpijak pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan pendidikan nasional yang telah ditetapkan.

Pandangan ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Caldwell (1990) dalam Bafadal (2003), yang menyatakan bahwa MBS adalah sebuah pendekatan manajemen di mana otoritas untuk membuat keputusan terkait alokasi sumber daya, yang mencakup pengetahuan, teknologi, kekuasaan, material, tenaga manusia, waktu, dan uang, didesentralisasikan secara signifikan dan konsisten ke tingkat sekolah. Sekolah tetap bertanggung jawab kepada otoritas pusat

mengenai bagaimana sumber daya tersebut dialokasikan. Dalam konteks ini, MBS menekankan pentingnya otonomi sekolah dalam mengelola dan mengorganisir dirinya sendiri dengan fokus utama pada peningkatan mutu pendidikan dan pembelajaran.

Selain itu, konsep MBS juga dipandang sebagai model manajemen yang tidak hanya memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, tetapi juga mendorong pengambilan keputusan yang partisipatif, melibatkan seluruh warga sekolah untuk secara langsung meningkatkan kualitas satuan pendidikan. Seperti yang disampaikan oleh Direktorat Pendidikan Menengah Umum (2001) dan Tim Pokja MBS Disdik Provinsi Jabar (2003), MBS berfungsi sebagai strategi manajemen yang menekankan pada pemanfaatan dan optimalisasi sumber daya sekolah serta lingkungannya secara efektif dan efisien guna menghasilkan kualitas dan kuantitas proses pendidikan yang lebih baik. Ini juga tercermin dalam pandangan Hasbullah (2006), yang menekankan bahwa MBS adalah sebuah model pengelolaan sekolah yang memberikan kewenangan lebih besar kepada sekolah untuk mengelola dirinya sendiri secara langsung.

Mulyasa (2017) dan Rosyada (2004) juga menggarisbawahi bahwa MBS berkaitan dengan pemberian otonomi yang luas kepada sekolah dalam mengelola dan menyelenggarakan proses pendidikan dan pembelajaran secara mandiri, meskipun tetap merujuk pada kebijakan pendidikan nasional yang telah ditetapkan. Secara ringkas, MBS dapat diartikan sebagai desentralisasi dalam bidang pendidikan, yang ditandai dengan pemberian otonomi lebih besar di tingkat sekolah, peningkatan partisipasi masyarakat, dan tetap merujuk pada kebijakan nasional di bidang pendidikan.

Sebagai konsekuensinya, MBS memindahkan pengambilan keputusan dari tingkat pusat ke tingkat sekolah, sehingga sekolah memiliki peran yang lebih besar dalam pengambilan keputusan yang dianggap sebagai bentuk otonomi dalam pemberdayaan sumber daya

(resources) sekolah. Ini memungkinkan sekolah untuk secara mandiri menggali, mengalokasikan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*), seperti yang dijelaskan dalam Ditjen Pendidikan Dasar (2012).

Mustiningsih & Subarkah (2013) menjelaskan lebih lanjut bahwa esensi dari MBS adalah pemberian otonomi sekolah dalam upaya peningkatan mutu sekolah. Otonomi ini mencakup beberapa aspek, seperti swakarsa, swakarya, swadana, swakelola, dan swasembada. Dengan demikian, MBS adalah model pengelolaan sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh satuan pendidikan, dengan melibatkan seluruh kelompok kepentingan dalam pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan peningkatan mutu sekolah. Unsur-unsur utama dalam MBS meliputi pengelolaan sistem (perencanaan, pelaksanaan, kepemimpinan, dan pengawasan), komponen pendidikan (kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik, sarana dan prasarana, serta hubungan sekolah dengan masyarakat), sumber daya sekolah, strategi pembelajaran, budaya dan lingkungan sekolah, serta peran serta masyarakat dalam mencapai tujuan peningkatan mutu sekolah.

Teori yang mendasari penerapan MBS, seperti teori *effective school* yang dikembangkan oleh Edmond (1979) dalam Umaedi (1999), lebih menekankan pada upaya perbaikan proses pendidikan. Teori ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan sekolah dan masyarakat dalam mengelola perubahan pendidikan, serta dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan otoritas pendidikan. Ciri-ciri manajerial yang dikembangkan dalam teori ini meliputi lingkungan sekolah yang aman dan tertib, adanya misi dan target mutu yang ingin dicapai, kepemimpinan yang kuat, harapan yang tinggi untuk berprestasi, serta pelaksanaan evaluasi yang terus-menerus terhadap berbagai aspek akademik dan administratif.

Selain itu, model kombinasi tujuan-sistem yang dikembangkan oleh Sergiovanni (1987) dalam Bafadal (2003) menyatakan bahwa sekolah yang efektif adalah sekolah yang mampu beradaptasi, mencapai tujuan pendidikan, mengintegrasikan komponen pendidikan, dan memiliki komitmen, konsistensi, serta konsekuensi dalam peran dan fungsi sekolah. Pendekatan ini mengimplikasikan bahwa sekolah harus mampu mengembangkan proses pendidikan dan pembelajaran secara kreatif dan mandiri, dengan mendayagunakan berbagai sumber daya sesuai dengan potensi dan kebutuhan, namun tetap mengacu pada kebijakan pendidikan nasional.

Teori lain yang mendasari MBS adalah teori kecerdasan jamak (*multiple intelligence*), yang memandang setiap individu yang terlibat dalam pengelolaan sekolah sebagai pribadi yang memiliki berbagai kecerdasan, seperti kemampuan berkomunikasi (*word smart*), berpikir logis dan pengambilan keputusan (*logic smart*), serta kemampuan memanfaatkan budaya dan lingkungan pendidikan (*nature smart*). Dengan memanfaatkan semua potensi ini, satuan pendidikan diharapkan dapat melakukan reformasi dan pemberdayaan sekolah secara lebih efektif (Mustiningsih & Subarkah, 2013).

Secara keseluruhan, MBS adalah pendekatan manajerial yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan di satuan pendidikan dengan mendayagunakan dan mengembangkan segala sumber daya yang ada, termasuk penguatan kapasitas pada aspek sistem, kelembagaan, dan sumber daya manusia, sambil tetap berpedoman pada kebijakan nasional di bidang pendidikan. Pendekatan ini dilakukan secara mandiri, inovatif, dan bertanggung jawab dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang lebih luas. Filosofi MBS—*dari sekolah, oleh sekolah*—menekankan pentingnya mendekatkan tata kelola dan layanan di satuan pendidikan, memberdayakan ekosistem pendidikan secara mandiri dan berkelanjutan, serta memperluas

partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan (Ditjen Pendidikan Dasar, 2012).

Akhirnya, MBS terbukti sebagai pendekatan manajemen yang efektif dalam mendorong sekolah untuk secara aktif, mandiri, terbuka, dan akuntabel dalam mengelola pendidikan, sesuai dengan standar teknis pelayanan minimal yang telah ditetapkan. MBS memfasilitasi pendelegasian kewenangan dalam pengelolaan komponen pendidikan, pengambilan keputusan yang melibatkan seluruh ekosistem pendidikan, serta pencapaian tujuan sekolah dengan lebih partisipatif dan sesuai dengan kebutuhan lokal.

C. Tujuan MBS

Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dirancang untuk memberdayakan kemandirian dan produktivitas satuan pendidikan dengan menekankan efisiensi dan efektivitas dalam berbagai aspek. Pertama, MBS mengutamakan pengelolaan yang mencakup proses serta komponen pendidikan, di mana setiap elemen dalam sistem pendidikan dikelola dengan optimal untuk mencapai hasil yang terbaik. Kedua, MBS menekankan pada pendayagunaan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana. Ini berarti bahwa setiap sumber daya yang ada di sekolah harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung proses pendidikan dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Ketiga, MBS mendorong pengembangan strategi pembelajaran yang inovatif, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik, sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna. Keempat, penguatan implementasi budaya dan lingkungan satuan pendidikan juga menjadi fokus utama MBS, di mana lingkungan sekolah diatur sedemikian rupa agar mendukung proses belajar mengajar yang kondusif dan inklusif. Selain itu, MBS juga memberdayakan peran serta masyarakat dalam mendukung pendidikan, dengan melibatkan mereka dalam berbagai aspek pengelolaan sekolah. Terakhir, MBS

bertujuan untuk meningkatkan pencapaian tujuan satuan pendidikan secara lebih berkualitas, dengan memastikan bahwa semua komponen bekerja bersama menuju tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Ditjen Pendidikan Dasar (2012), tujuan dari MBS adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pendidikan. Efektivitas pendidikan dapat dilihat dari peningkatan kualitas pendidikan, yang meliputi jaminan mutu input, proses, dan hasil pendidikan yang berkualitas tinggi, serta terciptanya suasana penyelenggaraan pendidikan yang kondusif dan dinamis. Efisiensi dalam pendidikan, di sisi lain, diukur melalui akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan, di mana setiap kegiatan pendidikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan jelas.

Lebih jauh, MBS bertujuan untuk mewujudkan sekolah yang efektif, berkualitas, dan efisien dalam tata kelola serta layanan pendidikan. Penerapan MBS juga menghasilkan berbagai keuntungan, seperti mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kapabilitas personal yang terlibat di sekolah, meningkatkan moral guru, dan menciptakan akuntabilitas yang lebih transparan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, MBS juga memungkinkan penyesuaian anggaran dengan potensi dan kebutuhan sekolah, menstimulasi upaya peningkatan kinerja dalam setiap aspek pendidikan, serta meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan (Nurkolis, 2003).

Dengan merujuk pada tujuan-tujuan tersebut, penerapan MBS dapat dimanfaatkan untuk menjadikan sekolah lebih mandiri dan memiliki otoritas yang lebih luas serta fleksibel dalam mengelola sumber daya dan partisipasi masyarakat yang lebih berkualitas. Dalam konteks ini, penerapan MBS juga berperan dalam meningkatkan kinerja sekolah dalam hal efektivitas, kualitas, efisiensi, inovasi, relevansi, serta pemerataan dan perluasan akses pendidikan (Hasbullah, 2006; Mulyasa, 2017). Di samping itu, MBS juga

merupakan bentuk otonomi dan desentralisasi yang diberikan kepada sekolah, khususnya dalam aspek kurikulum, pengelolaan sumber daya, penganggaran, serta penciptaan lingkungan sekolah yang lebih kondusif dan produktif (Rosyada, 2004).

Direktorat Pendidikan Menengah Umum (2001) bersama Mustiningsih & Subarkah (2013) serta Tim Pokja MBS Disdik Provinsi Jabar (2003) dan Umaedi (1999) juga menegaskan bahwa tujuan utama penerapan MBS adalah untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan (otonomi) yang lebih luas. Hal ini memungkinkan sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara lebih partisipatif, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas sekolah. Secara spesifik, tujuan tersebut meliputi: meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang ada, meningkatkan kepedulian seluruh ekosistem sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan yang partisipatif, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada para pemangku kepentingan terkait mutu pendidikan yang diselenggarakan, serta mendorong kompetisi yang sehat antar sekolah dalam mencapai mutu pendidikan yang diinginkan.

Dengan demikian, penerapan MBS tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendidikan, tetapi juga untuk membangun kemandirian sekolah dalam mengelola sumber daya dan lingkungan pendidikan secara optimal. Hal ini akan menghasilkan sekolah yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu bersaing secara sehat dalam dunia pendidikan.

D. Prinsip-prinsip MBS

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan sebuah konsep pengelolaan pendidikan yang menitikberatkan pada desentralisasi

kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada masing-masing satuan pendidikan. Dengan demikian, MBS memberikan otonomi yang lebih luas kepada sekolah untuk mengelola dan menyelenggarakan proses pendidikan secara mandiri, sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing sekolah. Menurut Tim Pokja MBS Disdik Provinsi Jawa Barat (2003), prinsip-prinsip MBS harus didasarkan pada visi dan misi yang jelas untuk mencapai mutu pendidikan yang lebih tinggi, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, dalam proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini, keterlibatan masyarakat tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif, di mana masyarakat berperan aktif dalam mendukung dan mengawasi pengelolaan pendidikan di sekolah.

Lebih lanjut, Rosyada (2004) menyatakan bahwa MBS merupakan upaya untuk memberikan otonomi yang lebih luas kepada sekolah dalam pengelolaan pendidikan, termasuk dalam hal kurikulum, sumber daya manusia, dan keuangan. Pendelegasian kewenangan ini bertujuan agar sekolah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan mampu mengembangkan strategi yang efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam konteks ini, desentralisasi tidak hanya berarti pemindahan kewenangan administratif, tetapi juga pemberian tanggung jawab yang lebih besar kepada sekolah untuk mengelola sumber daya secara efisien dan efektif. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip good governance yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan publik.

Prinsip-prinsip dasar MBS, seperti yang diungkapkan oleh Nurkolis (2003), mencakup ekuifinalitas, desentralisasi, pengelolaan mandiri, dan inisiatif manusia. Prinsip ekuifinalitas mengacu pada fleksibilitas dalam pengelolaan pendidikan, di mana sekolah diberikan kebebasan untuk menentukan cara terbaik dalam mencapai tujuan pendidikan, sesuai dengan kondisi dan karakteristik lokal. Prinsip

desentralisasi, di sisi lain, menekankan pentingnya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada sekolah untuk mengelola proses pendidikan secara lebih mandiri. Sementara itu, prinsip pengelolaan mandiri menekankan pada kemampuan sekolah untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efisien dan efektif, sedangkan prinsip inisiatif manusia menggarisbawahi pentingnya peran aktif seluruh ekosistem sekolah, termasuk guru, siswa, dan masyarakat, dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan.

Dalam implementasinya, MBS menuntut adanya kemandirian dari setiap sekolah dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan pendidikan. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Mustiningsih & Subarkah, 2013), kemandirian dalam MBS tidak hanya berarti otonomi dalam pengelolaan administratif, tetapi juga dalam hal inovasi dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan eksternal. Dengan kemandirian ini, sekolah diharapkan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan peserta didik dan lingkungan sekitarnya, serta mampu mengembangkan program-program yang sesuai dengan konteks lokal. Selain itu, kemandirian juga mencakup kemampuan sekolah untuk memobilisasi sumber daya, baik dari dalam maupun luar sekolah, untuk mendukung proses pendidikan.

Prinsip keadilan dalam MBS juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan. Keadilan dalam pengelolaan pendidikan berarti bahwa setiap komponen sekolah, baik itu guru, siswa, maupun masyarakat, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan memberikan kontribusi dalam proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini, tidak boleh ada diskriminasi atau pemihakan terhadap kelompok tertentu, dan semua pihak harus diperlakukan secara adil dan setara. Prinsip ini sangat penting dalam menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif dan demokratis, di mana setiap individu merasa

dihargai dan memiliki hak yang sama dalam mengakses pendidikan yang berkualitas.

Keterbukaan dan transparansi juga merupakan prinsip kunci dalam MBS. Dalam pengelolaan pendidikan, keterbukaan berarti bahwa seluruh proses pengambilan keputusan, termasuk dalam hal anggaran dan pengelolaan sumber daya, harus dilakukan secara transparan dan dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Dengan adanya transparansi ini, diharapkan dapat tercipta akuntabilitas yang lebih tinggi dalam pengelolaan pendidikan, sehingga setiap tindakan yang diambil oleh sekolah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik kepada masyarakat. Transparansi juga penting dalam membangun kepercayaan antara sekolah dan masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung proses pendidikan.

Selain itu, prinsip kemitraan dalam MBS menekankan pentingnya kerja sama antara sekolah dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kemitraan ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh setiap pihak, sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Dalam konteks ini, sekolah tidak hanya berperan sebagai penerima bantuan, tetapi juga sebagai mitra aktif yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Dengan demikian, kemitraan dalam MBS bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan bentuk kolaborasi yang saling menguntungkan antara sekolah dan para pemangku kepentingan.

Prinsip efisiensi dalam MBS mengharuskan sekolah untuk memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal, sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dengan biaya yang minimal. Efisiensi ini tidak hanya berlaku dalam hal penggunaan anggaran, tetapi juga dalam hal waktu, tenaga, dan sumber daya lainnya. Dengan menerapkan prinsip efisiensi, sekolah diharapkan dapat mengurangi

pemborosan dan meningkatkan produktivitas, sehingga dapat memberikan layanan pendidikan yang lebih baik dan lebih berkualitas.

Terakhir, prinsip akuntabilitas dalam MBS menuntut sekolah untuk bertanggung jawab atas segala keputusan dan tindakan yang diambil. Akuntabilitas ini berarti bahwa setiap keputusan yang diambil oleh sekolah harus didasarkan pada pertimbangan yang matang dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum. Akuntabilitas juga berarti bahwa sekolah harus siap menerima kritik dan saran dari masyarakat, serta bersedia untuk melakukan perbaikan jika diperlukan. Dengan adanya akuntabilitas ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan pendidikan yang lebih transparan, jujur, dan bertanggung jawab, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah.

Secara keseluruhan, penerapan MBS merupakan upaya untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih desentralistis, partisipatif, dan akuntabel. Dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada sekolah, diharapkan dapat tercipta lingkungan pendidikan yang lebih responsif, inovatif, dan berkualitas. Selain itu, dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan, MBS juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung proses pendidikan, sehingga pendidikan dapat lebih relevan dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Dalam konteks ini, MBS tidak hanya menjadi alat untuk meningkatkan mutu pendidikan, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat kemandirian dan kapasitas satuan pendidikan dalam menghadapi tantangan global.

E. Karakteristik MBS

Membahas karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) tidak dapat dipisahkan dari kajian tentang sekolah efektif. Brown (1990), sebagaimana dikutip oleh Hasbullah (2006), menyatakan bahwa karakteristik MBS mencakup otonomi, fleksibilitas, tanggung

jawab, perencanaan oleh kepala sekolah dan warga sekolah, deregulasi sekolah, partisipasi lingkungan sekolah, kolaborasi dan kerjasama kolegial antara staf sekolah, serta adanya rasa kepedulian dari kepala sekolah dan guru. Otonomi sekolah dalam konteks ini berarti pemberian kewenangan dan kemandirian kepada sekolah untuk mengelola dan menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing sekolah. Dalam pelaksanaan otonomi tersebut, istilah seperti swakarsa, swakarya, swadana, swakelola, dan swasembada menjadi relevan dalam mencapai tujuan satuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Makna fleksibilitas dalam MBS mencerminkan kemampuan sekolah untuk melaksanakan inovasi dan inisiatif lain dalam bentuk kreativitas yang terukur dan berkelanjutan, yang disesuaikan dengan kebijakan pendidikan nasional. Di sisi lain, kerjasama menggambarkan pelaksanaan proses kolaborasi yang melibatkan semua pihak dalam ekosistem pendidikan, termasuk guru, siswa, dan masyarakat, dalam upaya mencapai tujuan satuan pendidikan yang lebih berkualitas. Peningkatan partisipasi, dalam hal ini, bertujuan untuk memperluas peran serta seluruh ekosistem pendidikan dalam menciptakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang lebih nyata, kondusif, dan akuntabel di satuan pendidikan.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Mulyasa (2017) melihat karakteristik MBS dari sisi organisasi sekolah, proses belajar mengajar, sumber daya manusia, sumber daya lainnya, serta administrasi. Pada konteks ini, karakteristik MBS mencakup upaya untuk mengatur dan mengelola komponen penyelenggaraan pendidikan seperti kurikulum, pembiayaan, sumber daya manusia, dan lingkungan pendidikan. Selain itu, ada juga usaha untuk mengembangkan strategi pembelajaran dan keterlibatan para pihak dalam mencapai tujuan satuan pendidikan.

Lebih lanjut, Direktorat Pendidikan Menengah Umum (2001) mengidentifikasi karakteristik MBS dalam tiga aspek utama: input, proses, dan output. Pada aspek output, MBS diukur melalui prestasi akademik dan non-akademik. Prestasi akademik mencakup hasil belajar peserta didik, kemampuan literasi dan numerasi, karakter peserta didik, kualitas pembelajaran, serta kualitas dan kuantitas lulusan. Sementara itu, prestasi non-akademik diukur dari iklim keamanan, inklusivitas, dan kebinekaan di sekolah.

Dalam hal proses, karakteristik yang terlihat dalam pelaksanaan MBS mencakup beberapa faktor penting. Pertama, proses belajar yang memiliki efektivitas tinggi, di mana siswa terlibat aktif dan memperoleh hasil belajar yang optimal. Kedua, kepemimpinan sekolah yang kuat, yang mampu mengarahkan dan memotivasi seluruh ekosistem sekolah. Ketiga, lingkungan sekolah yang aman dan tertib, yang mendukung terciptanya suasana belajar yang kondusif. Keempat, pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan yang efektif, di mana guru dan staf sekolah bekerja secara profesional dan efisien. Kelima, budaya mutu yang diterapkan secara konsisten di sekolah, yang mendorong peningkatan kualitas pendidikan secara terus-menerus. Keenam, adanya teamwork yang kompak, cerdas, dan dinamis di antara staf sekolah, yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Selain itu, MBS juga ditandai oleh tingkat kemandirian sekolah yang optimal, di mana sekolah mampu mengelola sumber dayanya secara mandiri dan bertanggung jawab. Partisipasi yang tinggi dari seluruh ekosistem pendidikan, termasuk masyarakat, juga merupakan ciri khas dari MBS, yang memastikan bahwa semua pihak terlibat aktif dalam proses pendidikan. Sekolah yang menerapkan MBS juga dituntut untuk memiliki keterbukaan, kemampuan untuk berubah, serta melaksanakan evaluasi dan perbaikan secara terus-menerus. Responsivitas dan antisipasi terhadap kebutuhan yang berkembang di

lingkungan pendidikan juga menjadi salah satu karakteristik MBS, yang memungkinkan sekolah untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi.

Pada aspek input, karakteristik MBS mencakup kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu yang jelas dan reliabel. Selain itu, kesiapan sumber daya juga menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan MBS. Pengelola satuan pendidikan harus memiliki kualitas profesionalisme yang tinggi, dedikasi, dan loyalitas dalam menjalankan tugasnya. Harapan prestasi yang tinggi juga menjadi salah satu karakteristik penting, di mana sekolah fokus pada pencapaian hasil belajar yang maksimal bagi setiap peserta didik. Dalam konteks ini, input manajemen seperti kejelasan tugas pokok dan fungsi yang terlibat dalam ekosistem pendidikan, perencanaan pengembangan sekolah yang jelas, sistematis, dan terukur, serta sistem pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan yang baik, sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan penerapan MBS. Ketersediaan anggaran pembiayaan yang cukup dan layak juga menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik.

Dengan demikian, karakteristik MBS mencerminkan upaya untuk menciptakan sekolah yang lebih mandiri, responsif, dan bertanggung jawab dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan. Dalam konteks ini, MBS tidak hanya berfungsi sebagai model manajemen, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengelolaan yang lebih baik dan lebih partisipatif. Implementasi MBS yang efektif diharapkan dapat menghasilkan sekolah-sekolah yang mampu memberikan pendidikan berkualitas tinggi, yang tidak hanya memenuhi standar nasional, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal.

F. Fungsi-fungsi yang didelegasikan dalam pemberdayaan MBS

Mustiningsih dan Subarkah (2013) menjelaskan bahwa Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) terdiri dari beberapa unsur penting yang saling terkait dan mendukung pelaksanaan pendidikan yang efektif di satuan pendidikan. Unsur pertama adalah pengelolaan, yang dilihat dari dua perspektif utama: domain proses dan domain komponen pendidikan. Domain proses mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Sedangkan domain komponen meliputi kurikulum dan pembelajaran, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, pembiayaan, sarana dan prasarana, hubungan sekolah dengan masyarakat, serta budaya dan lingkungan satuan pendidikan.

Unsur kedua dalam MBS adalah pendayagunaan sumber daya sekolah, yang mencakup sumber daya manusia, dana, serta sarana dan prasarana. Sumber daya ini harus dikelola secara efisien dan efektif untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan di satuan pendidikan. Unsur ketiga adalah pengembangan strategi pembelajaran yang berfokus pada peserta didik. Strategi ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan mendukung perkembangan potensi peserta didik secara optimal. Keempat, implementasi budaya dan lingkungan sekolah yang kondusif menjadi faktor penting dalam menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan mendukung keberhasilan proses pembelajaran. Kelima, peran serta masyarakat dalam pendidikan di sekolah juga sangat ditekankan, di mana keterlibatan aktif dari orang tua dan masyarakat dalam mendukung kegiatan sekolah sangat diharapkan. Terakhir, pencapaian tujuan peningkatan mutu sekolah merupakan sasaran utama dari penerapan MBS, di mana semua upaya diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah.

Ditjen Pendidikan Dasar (2012) juga menegaskan bahwa peran dan fungsi MBS dalam satuan pendidikan mencakup beberapa aspek

penting. Pertama, penyusunan perencanaan pendidikan yang meliputi pengembangan visi, misi, dan tujuan sekolah, program pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, pembiayaan, serta pelaksanaan pembelajaran. Perencanaan ini merupakan langkah awal yang krusial dalam menentukan arah dan tujuan pendidikan di sekolah. Kedua, pembinaan kurikulum, program, pembelajaran, evaluasi, dan tindak lanjut, di mana sekolah diberikan kewenangan untuk mengelola kurikulum secara fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik. Ketiga, penjaminan mutu pembelajaran, di mana sekolah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pembelajaran yang berlangsung memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Keempat, membangun budaya sekolah yang kondusif, profesional, transparan, dan akuntabel. Terakhir, pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah menjadi salah satu pilar penting dalam MBS, di mana partisipasi aktif dari masyarakat diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pendidikan.

Penerapan MBS di satuan pendidikan memberikan beberapa fungsi utama yang didelegasikan kepada sekolah. Fungsi pertama adalah perencanaan dan pengawasan, di mana sekolah memiliki kewenangan untuk merencanakan dan mengawasi berbagai komponen dalam penyelenggaraan pendidikan, seperti kurikulum dan pembelajaran, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, pembiayaan, sarana dan prasarana, hubungan sekolah dan masyarakat, serta budaya dan lingkungan sekolah. Dalam konteks perencanaan, sekolah diharapkan mampu menganalisis berbagai potensi dan peluang serta kebutuhan yang ada, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS). Sedangkan dalam fungsi pengawasan, sekolah bertanggung jawab untuk memantau, menilai, dan mengendalikan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk

memastikan bahwa semua program berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.

Kedua, pengelolaan kurikulum menjadi salah satu fungsi yang penting dalam MBS. Sekolah diberikan kebebasan untuk memperdalam, memperkaya, dan memodifikasi kurikulum yang telah disusun oleh pemerintah, tanpa mengurangi substansi yang ada. Kurikulum yang dikembangkan harus berbasis pada kebutuhan peserta didik, termasuk pengelolaan kurikulum muatan lokal yang bertujuan untuk meningkatkan kecakapan hidup peserta didik.

Fungsi ketiga adalah pengelolaan proses pembelajaran, di mana sekolah diberikan keleluasaan untuk memilih strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang paling efektif. Penerapan konsep PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Edukatif, dan Menyenangkan) menjadi salah satu pendekatan yang diharapkan dapat digunakan oleh sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Pengelolaan ketenagaan menjadi fungsi keempat dalam MBS. Sekolah memiliki tanggung jawab untuk melakukan analisis kebutuhan, perencanaan, rekrutmen, pengembangan, pemberian penghargaan dan sanksi, serta evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. Meski demikian, pengupahan/gaji masih menjadi tanggung jawab pemerintah pusat atau daerah, terutama bagi tenaga yang berstatus sebagai Aparat Sipil Negara (ASN).

Fungsi kelima adalah pengelolaan fasilitas, yang mencakup pengelolaan peralatan, perlengkapan, buku, dan media pembelajaran. Sementara pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas dan gedung sekolah masih sebagian besar menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.

Pengelolaan keuangan juga merupakan fungsi yang didelegasikan kepada sekolah. Dalam hal ini, sekolah diberi wewenang untuk mengalokasikan dan menggunakan dana sesuai dengan

kebutuhan yang ada, termasuk kegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan tambahan (income generating activities). Dengan demikian, sekolah tidak sepenuhnya bergantung pada hibah atau subsidi dari pemerintah.

Fungsi ketujuh adalah pelayanan peserta didik, yang mencakup penerimaan peserta didik baru, pengembangan, pembinaan, pembimbingan, pelatihan, dan pengelolaan alumni. Sekolah perlu meningkatkan intensitas dan ekstensitas layanan ini agar lebih maksimal.

Hubungan sekolah dengan masyarakat menjadi fungsi kedelapan dalam MBS. Sekolah diharapkan mampu memberdayakan dan mengembangkan hubungan dengan masyarakat untuk mendapatkan dukungan moral, dana, dan bantuan teknis lainnya. Fungsi ini penting untuk meningkatkan keterlibatan, kepedulian, dan kepemilikan masyarakat terhadap sekolah.

Fungsi terakhir yang didelegasikan kepada sekolah dalam implementasi MBS adalah pengelolaan budaya dan lingkungan sekolah. Fungsi ini bertujuan untuk menciptakan iklim yang kondusif, aman, dan inklusif di sekolah. Lingkungan sekolah harus mampu memberikan rasa aman baik secara fisik maupun psikologis, menunjukkan toleransi beragama dan berbudaya, serta terbuka terhadap perbedaan, termasuk memfasilitasi peserta didik dengan disabilitas dan yang berbakat istimewa.

Dengan demikian, penerapan MBS memberikan otonomi yang lebih luas kepada sekolah untuk mengelola berbagai aspek pendidikan, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Implementasi MBS juga mendorong sekolah untuk lebih mandiri, inovatif, dan akuntabel dalam menjalankan fungsi-fungsinya.

G. Komite Sekolah

Pembentukan Komite Sekolah merupakan salah satu langkah strategis dalam upaya mewujudkan sistem pendidikan yang lebih inklusif, transparan, dan akuntabel. Sejak tahun 2002, ketika POMG (Persatuan Orang Tua dan Guru) dan BP3 (Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan) digantikan oleh Komite Sekolah, telah terjadi pergeseran paradigma dalam pengelolaan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Pergeseran ini tidak hanya mencakup perubahan nama lembaga, tetapi juga memperluas dan memperdalam peran serta fungsi yang sebelumnya dijalankan oleh badan-badan tersebut.

Komite Sekolah, sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016, adalah lembaga mandiri yang memiliki anggota yang terdiri dari orang tua atau wali peserta didik, komunitas sekolah, serta masyarakat yang peduli terhadap pendidikan. Lembaga ini memiliki peran yang krusial dalam memastikan bahwa pendidikan di setiap satuan pendidikan tidak hanya berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan lokal dan melibatkan seluruh ekosistem pendidikan dalam pengambilan keputusan. Komite Sekolah bukanlah entitas yang berdiri di atas struktur sekolah, melainkan mitra sejajar yang bertugas mendukung, mengawasi, dan memberikan masukan strategis kepada pihak sekolah.

Sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan, Komite Sekolah memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, Komite Sekolah berperan dalam memberikan pertimbangan kepada pihak sekolah terkait berbagai aspek kebijakan pendidikan. Ini mencakup kebijakan dan program sekolah, alokasi anggaran dalam RAPBS atau RKAS, dan kriteria kinerja yang diharapkan dari sekolah. Melalui fungsi ini, Komite Sekolah memastikan bahwa kebijakan pendidikan yang diambil sesuai dengan kebutuhan lokal dan dapat diimplementasikan dengan efektif.

Selain itu, Komite Sekolah juga memiliki tanggung jawab untuk menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat. Dalam hal ini, Komite Sekolah berfungsi sebagai jembatan antara sekolah dan masyarakat, memungkinkan berbagai bentuk dukungan dari masyarakat baik itu berupa finansial, tenaga, atau sumber daya lainnya. Kemampuan Komite Sekolah untuk memobilisasi sumber daya ini sangat penting, terutama di daerah-daerah di mana dana yang dialokasikan oleh pemerintah mungkin tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan pendidikan.

Komite Sekolah juga bertanggung jawab atas pengawasan pelayanan pendidikan di sekolah. Pengawasan ini bukan sekadar bentuk kontrol, tetapi lebih sebagai upaya memastikan bahwa pendidikan yang diberikan oleh sekolah memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan dan bahwa seluruh proses berjalan dengan transparan dan akuntabel. Dalam konteks ini, Komite Sekolah memiliki peran penting dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin timbul dalam proses pendidikan dan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk mencari solusi.

Lebih jauh lagi, Komite Sekolah berfungsi sebagai mediator antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Dalam peran ini, Komite Sekolah bertugas menampung dan menganalisis aspirasi, ide, serta kebutuhan yang diajukan oleh masyarakat terkait dengan pendidikan. Komite kemudian menyampaikan hasil analisis ini kepada pihak sekolah dan pemerintah, untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, Komite Sekolah tidak hanya memastikan bahwa suara masyarakat didengar, tetapi juga berperan aktif dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Keberadaan Komite Sekolah juga berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Melalui keterlibatan langsung dalam

pengelolaan pendidikan, masyarakat menjadi lebih peduli dan berkomitmen terhadap keberhasilan pendidikan di lingkungannya. Ini menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk belajar, di mana semua pihak merasa memiliki tanggung jawab terhadap hasil pendidikan.

Pendekatan yang digunakan oleh Komite Sekolah dalam menjalankan fungsinya sangat penting untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Salah satu pendekatan yang diadopsi adalah pola pendampingan komunitas. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran orang tua dan masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan mendorong mereka untuk berperan aktif dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan mereka. Dengan pendekatan ini, Komite Sekolah berupaya untuk memastikan bahwa seluruh komunitas, termasuk orang tua, merasa terlibat dan berkontribusi terhadap proses pendidikan.

Keberadaan Komite Sekolah memberikan manfaat yang signifikan bagi satuan pendidikan. Pertama, Komite Sekolah dapat mendorong peningkatan perhatian dan komitmen masyarakat terhadap pendidikan. Dengan lebih banyaknya orang tua dan anggota masyarakat yang terlibat, kualitas pendidikan diharapkan dapat meningkat karena adanya dukungan yang lebih besar dalam bentuk sumber daya dan moral. Selain itu, Komite Sekolah juga berperan dalam memberikan masukan dan saran yang penting untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. Ini mencakup berbagai aspek mulai dari kebijakan dan program pendidikan hingga kriteria kinerja dan fasilitas pendidikan.

Selain fungsi-fungsi tersebut, Komite Sekolah juga memainkan peran penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan, diharapkan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh sekolah dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga

mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang atau pengelolaan dana yang tidak sesuai.

Dalam praktiknya, Komite Sekolah juga berperan dalam berbagai aspek lain dari pendidikan, seperti penyediaan sarana dan prasarana, pengawasan, pelaksanaan asesmen kompetensi minimal, pengelolaan kurikulum, penerapan Manajemen Berbasis Sekolah, dan pengelolaan budaya serta lingkungan sekolah. Melalui keterlibatan dalam berbagai aspek ini, Komite Sekolah membantu memastikan bahwa satuan pendidikan dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, keberadaan Komite Sekolah di satuan pendidikan merupakan elemen kunci dalam upaya mewujudkan pendidikan yang berkualitas, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan berbagai peran dan fungsi yang diembannya, Komite Sekolah tidak hanya mendukung pengelolaan pendidikan tetapi juga menjadi mitra strategis bagi sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

BAB X
KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN

A. Pendahuluan

Kepemimpinan pendidikan merupakan elemen vital dalam manajemen dan keberhasilan suatu institusi pendidikan. Secara umum, kepemimpinan pendidikan mengacu pada kemampuan seorang pemimpin, seperti kepala sekolah atau pemimpin pendidikan lainnya, untuk memengaruhi, mengarahkan, dan menginspirasi seluruh anggota organisasi pendidikan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan ini tidak hanya sebatas menjalankan tugas-tugas administratif, tetapi juga mencakup tanggung jawab untuk menciptakan visi yang jelas, memberdayakan tenaga pendidik, serta memastikan bahwa semua komponen pendidikan bekerja secara harmonis untuk memberikan hasil terbaik bagi peserta didik.

Menurut Bass (1985), kepemimpinan pendidikan dapat dilihat sebagai sebuah proses di mana seorang pemimpin mampu memengaruhi pengikutnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam konteks pendidikan, ini berarti bahwa pemimpin harus mampu memotivasi guru, staf, dan siswa untuk mencapai standar akademik yang tinggi, sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Leithwood et al. (2008), yang menekankan bahwa kepemimpinan pendidikan yang efektif sangat penting untuk menciptakan sekolah yang berhasil. Mereka menggarisbawahi bahwa pemimpin pendidikan harus mampu menerapkan strategi-strategi yang mendukung pengembangan profesional guru, membangun komunitas pembelajaran yang kolaboratif, serta mengelola perubahan dengan bijaksana.

Lebih lanjut, Robbins dan Judge (2013) menegaskan bahwa kepemimpinan dalam pendidikan seharusnya bersifat transformatif.

Pemimpin transformatif dalam pendidikan tidak hanya fokus pada penyelesaian tugas-tugas sehari-hari, tetapi juga berupaya membawa perubahan signifikan dalam budaya sekolah. Mereka berusaha untuk memberdayakan guru dan staf, memfasilitasi inovasi, serta memotivasi seluruh komunitas sekolah untuk berpartisipasi aktif dalam proses pendidikan. Robbins dan Judge juga menekankan pentingnya kepercayaan antara pemimpin dan pengikut sebagai fondasi dari kepemimpinan yang efektif.

Selain itu, Fullan (2014) mengemukakan bahwa kepemimpinan pendidikan yang sukses adalah yang mampu mengelola kompleksitas dan ketidakpastian dalam lingkungan pendidikan. Konsep "kepemimpinan moral" yang diperkenalkan oleh Fullan menunjukkan bahwa pemimpin pendidikan harus memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai etika dan integritas, serta fokus pada pencapaian hasil yang bermanfaat bagi semua peserta didik. Kepemimpinan moral ini mencakup upaya untuk mengatasi kesenjangan pendidikan, mempromosikan inklusivitas, dan memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk berhasil.

Pendekatan kepemimpinan yang berorientasi pada pembelajaran juga menjadi perhatian utama dalam konteks ini. Marzano, Waters, dan McNulty (2005) menyatakan bahwa pemimpin pendidikan harus berfokus pada pencapaian akademik dengan menciptakan budaya pembelajaran yang mendukung. Ini termasuk memastikan bahwa kurikulum diimplementasikan dengan baik, instruksi disampaikan secara efektif, dan penilaian dilakukan secara adil dan akurat. Pemimpin pendidikan yang berfokus pada pembelajaran harus mampu memantau kemajuan siswa secara terus-menerus dan menyesuaikan strategi pengajaran sesuai dengan kebutuhan.

Kepemimpinan pendidikan juga mencakup kemampuan untuk mengelola perubahan dan inovasi. Menurut Fullan (2007), pemimpin pendidikan harus mampu menggerakkan perubahan berkelanjutan di

sekolah atau institusi pendidikan yang mereka pimpin. Ini mencakup pengembangan strategi efektif untuk mengatasi tantangan yang muncul, seperti adaptasi terhadap kurikulum baru, integrasi teknologi dalam pembelajaran, atau peningkatan kualitas pengajaran. Fullan menekankan bahwa keberhasilan kepemimpinan pendidikan sangat bergantung pada kemampuan pemimpin untuk menginspirasi, memotivasi, dan memberdayakan guru serta staf untuk bekerja sama dalam mencapai perubahan positif.

Selain itu, kepemimpinan pendidikan juga berperan penting dalam menciptakan budaya sekolah yang positif. Leithwood dan Jantzi (2006) berpendapat bahwa kepemimpinan yang efektif dalam pendidikan mampu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, di mana guru dan siswa merasa dihargai, termotivasi, dan memiliki rasa kepemilikan terhadap proses pembelajaran. Pemimpin pendidikan harus mampu membangun hubungan baik dengan semua pihak yang terlibat, termasuk guru, siswa, orang tua, dan masyarakat, untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kolaboratif dan inklusif.

Kepemimpinan moral juga merupakan komponen penting dalam kepemimpinan pendidikan. Menurut Sergiovanni (2001), pemimpin pendidikan harus memiliki integritas, etika, dan komitmen terhadap prinsip-prinsip moral yang kuat, yang menjadi dasar bagi setiap keputusan yang diambil. Kepemimpinan moral ini membantu menciptakan kepercayaan di antara anggota komunitas pendidikan, yang pada gilirannya mendukung keberhasilan institusi pendidikan.

Dalam konteks kepemimpinan transformasional, Bass dan Avolio (1994) menyatakan bahwa pemimpin pendidikan yang efektif adalah mereka yang mampu menginspirasi dan memotivasi staf untuk melampaui harapan, dengan memanfaatkan pendekatan transformasional. Kepemimpinan transformasional melibatkan pemberdayaan individu dalam organisasi untuk mencapai potensi

penuh mereka, serta mendorong inovasi dan kreativitas yang diperlukan untuk peningkatan berkelanjutan.

Lebih jauh lagi, kepemimpinan pendidikan juga harus beradaptasi dengan tantangan globalisasi dan perubahan teknologi yang cepat. Menurut Robinson (2011), pemimpin pendidikan harus memiliki visi global dan keterampilan manajerial yang diperlukan untuk memimpin dalam lingkungan yang kompleks dan dinamis. Mereka harus mampu mengintegrasikan pendekatan global dengan kebutuhan lokal, serta memastikan bahwa institusi pendidikan tetap relevan dan kompetitif di kancah internasional.

Secara keseluruhan, kepemimpinan pendidikan merupakan kombinasi dari berbagai keterampilan dan atribut yang diperlukan untuk mengarahkan, memotivasi, dan memberdayakan seluruh anggota komunitas pendidikan. Pemimpin pendidikan yang efektif adalah mereka yang mampu mengelola perubahan, menciptakan budaya sekolah yang positif, menjalankan kepemimpinan moral, dan mengadopsi pendekatan transformasional yang memacu inovasi dan keberlanjutan dalam institusi pendidikan mereka. Dalam lingkungan pendidikan yang terus berkembang, kemampuan untuk memimpin dengan visi, integritas, dan keberanian menjadi semakin penting.

B. Pengertian Dasar Kepemimpinan dan Pemimpin

Kepemimpinan adalah sebuah konsep yang telah lama menjadi fokus studi dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk manajemen, psikologi, sosiologi, dan pendidikan. Dalam dekade terakhir, definisi kepemimpinan terus berkembang seiring dengan perubahan lingkungan global, perkembangan teknologi, dan dinamika sosial yang semakin kompleks. Secara umum, kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai kemampuan seorang individu untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan menginspirasi orang lain dalam mencapai tujuan tertentu. Northouse (2018) mengartikan kepemimpinan sebagai sebuah

proses di mana seorang individu mempengaruhi sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks ini, kepemimpinan lebih dari sekadar otoritas formal; ia mencakup kemampuan untuk memotivasi dan membangun kepercayaan di antara anggota kelompok.

Salah satu perspektif modern tentang kepemimpinan adalah konsep kepemimpinan transformasional yang dipopulerkan oleh Bass dan Avolio (1994). Mereka menggambarkan kepemimpinan transformasional sebagai proses di mana pemimpin mampu membawa perubahan signifikan dalam organisasi dengan memotivasi pengikutnya untuk melampaui kepentingan pribadi mereka demi kepentingan bersama. Pemimpin transformasional tidak hanya fokus pada pencapaian tujuan jangka pendek, tetapi juga pada pengembangan kapasitas individu dan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan dan tantangan di masa depan. Konsep ini relevan dalam konteks globalisasi dan perubahan teknologi yang cepat, di mana kemampuan untuk berinovasi dan beradaptasi menjadi kunci keberhasilan organisasi.

Lebih lanjut, kepemimpinan juga dapat dilihat dari perspektif hubungan antara pemimpin dan pengikut. Uhl-Bien (2011) dalam teorinya tentang "relational leadership" menekankan bahwa kepemimpinan adalah sebuah proses sosial yang terjadi dalam konteks hubungan interpersonal. Kepemimpinan bukan hanya tentang apa yang dilakukan pemimpin, tetapi juga tentang bagaimana interaksi antara pemimpin dan pengikutnya membentuk dinamika kelompok dan mempengaruhi pencapaian tujuan. Dalam pandangan ini, kepemimpinan bersifat kolaboratif, di mana pemimpin dan pengikut bersama-sama menciptakan visi dan strategi untuk mencapai tujuan bersama.

Selain itu, konsep kepemimpinan yang inklusif juga semakin mendapat perhatian dalam dekade terakhir. Ferdman dan Deane

(2014) menjelaskan bahwa kepemimpinan inklusif adalah kemampuan pemimpin untuk menciptakan lingkungan yang menghargai keragaman dan inklusivitas, di mana setiap individu merasa dihargai dan didukung dalam kontribusinya terhadap organisasi. Kepemimpinan inklusif menekankan pentingnya mendengarkan dan menghargai berbagai perspektif, serta memastikan bahwa semua anggota kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan berkembang.

Di sisi lain, Grint (2010) menekankan pentingnya kepemimpinan yang kontekstual, di mana keberhasilan seorang pemimpin sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk memahami dan beradaptasi dengan konteks spesifik di mana mereka memimpin. Grint menyatakan bahwa tidak ada gaya kepemimpinan tunggal yang efektif dalam semua situasi; sebaliknya, pemimpin yang sukses adalah mereka yang mampu menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka dengan tuntutan konteks dan kebutuhan pengikut mereka. Ini menekankan pentingnya fleksibilitas dan kesadaran situasional dalam kepemimpinan.

Dalam dekade terakhir, teori kepemimpinan juga semakin menekankan pentingnya kepemimpinan etis. Brown dan Treviño (2006) menyatakan bahwa kepemimpinan etis adalah tentang pemimpin yang tidak hanya mementingkan hasil, tetapi juga cara untuk mencapainya. Pemimpin etis bertindak dengan integritas, mematuhi standar moral yang tinggi, dan berkomitmen untuk bertindak secara adil dan transparan. Kepemimpinan etis sangat penting dalam membangun kepercayaan dan kredibilitas, baik di antara pengikut maupun dalam hubungan dengan pemangku kepentingan eksternal.

Kepemimpinan juga semakin dihubungkan dengan konsep keberlanjutan, di mana pemimpin diharapkan tidak hanya fokus pada pencapaian tujuan jangka pendek, tetapi juga pada dampak jangka

panjang dari keputusan mereka terhadap masyarakat dan lingkungan. Avery dan Bergsteiner (2011) dalam bukunya "Sustainable Leadership" menekankan bahwa pemimpin harus mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari tindakan mereka dan berupaya untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan.

Seiring dengan perkembangan konsep kepemimpinan, definisi pemimpin juga telah berevolusi. Pemimpin bukan lagi sekadar individu yang memiliki otoritas formal dalam sebuah organisasi, tetapi lebih pada individu yang mampu mempengaruhi, mengarahkan, dan memberdayakan orang lain. Pemimpin, menurut Kouzes dan Posner (2017), adalah seseorang yang mampu mempengaruhi orang lain untuk bertindak secara sukarela dalam mencapai tujuan bersama. Pemimpin harus memiliki visi yang jelas, mampu menginspirasi orang lain, serta memiliki keterampilan interpersonal yang kuat untuk membangun hubungan yang efektif.

Dalam konteks organisasi modern, pemimpin juga diharapkan menjadi fasilitator perubahan. Heifetz, Grashow, dan Linsky (2009) dalam konsep "*adaptive leadership*" menggambarkan pemimpin sebagai individu yang mampu membantu organisasi dan individu di dalamnya untuk beradaptasi dengan perubahan dan tantangan yang kompleks. Pemimpin adaptif tidak hanya memberikan solusi, tetapi juga memberdayakan orang lain untuk menemukan solusi mereka sendiri, serta membangun kapasitas organisasi untuk bertahan dan berkembang dalam lingkungan yang dinamis.

Secara keseluruhan, kepemimpinan adalah tentang proses pengaruh dan pemberdayaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin adalah individu yang memiliki visi, integritas, dan keterampilan interpersonal untuk memotivasi dan mengarahkan orang lain. Dalam dekade terakhir, konsep kepemimpinan telah berkembang untuk mencakup berbagai

pendekatan dan perspektif, termasuk kepemimpinan transformasional, inklusif, etis, dan adaptif, yang semuanya menekankan pentingnya hubungan yang kuat, fleksibilitas, dan komitmen terhadap keberlanjutan dan etika dalam praktik kepemimpinan.

C. Model-model Kepemimpinan Pendidikan

Model kepemimpinan pendidikan telah menjadi perhatian utama dalam studi akademik dan praktik profesional dalam beberapa dekade terakhir. Banyak ahli berusaha memahami bagaimana berbagai pendekatan kepemimpinan dapat memengaruhi lingkungan sekolah, kinerja guru, dan keberhasilan peserta didik. Kepemimpinan dalam pendidikan tidak hanya sekadar menjalankan fungsi manajerial, tetapi juga melibatkan kemampuan untuk menginspirasi, memotivasi, dan memfasilitasi pencapaian tujuan pendidikan melalui berbagai strategi yang terstruktur dan sistematis.

Salah satu model kepemimpinan yang paling menonjol adalah *transformational leadership* atau kepemimpinan transformasional. Model ini diperkenalkan oleh Bass (1985) dan telah diadaptasi dalam konteks pendidikan sebagai pendekatan yang berfokus pada kemampuan pemimpin untuk membawa perubahan positif di institusi pendidikan. Kepemimpinan transformasional mendorong pemimpin untuk menciptakan visi bersama yang menginspirasi dan memotivasi guru serta siswa. Leithwood et al. (2012) mengemukakan bahwa dalam pendidikan, kepemimpinan transformasional melibatkan pengembangan kapasitas individu, pembentukan budaya organisasi yang mendukung inovasi, serta menciptakan iklim sekolah yang inklusif dan suportif. Pemimpin transformasional tidak hanya terlibat dalam manajemen operasional tetapi juga berperan sebagai agen perubahan yang membangun semangat kolaboratif dan memberdayakan seluruh komunitas sekolah.

Instructional leadership atau kepemimpinan instruksional adalah model lain yang sangat penting dalam konteks pendidikan. Model ini menekankan peran pemimpin dalam mendukung proses pembelajaran melalui pengawasan kurikulum, pengembangan profesional guru, dan pemantauan hasil belajar siswa. Hallinger (2011) menyatakan bahwa kepemimpinan instruksional berfokus pada pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Pemimpin instruksional harus mampu mengarahkan semua aktivitas sekolah agar sejalan dengan tujuan pendidikan, menyediakan umpan balik yang konstruktif kepada guru, serta menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan kondusif bagi siswa. Dengan pendekatan ini, pemimpin pendidikan memastikan bahwa kurikulum diimplementasikan secara konsisten dan berkualitas, sementara guru didorong untuk terus meningkatkan kompetensi mereka melalui pelatihan dan bimbingan.

Selain model transformasional dan instruksional, konsep *distributed leadership* atau kepemimpinan terdistribusi juga semakin populer. Spillane (2015) menyatakan bahwa kepemimpinan terdistribusi menekankan pentingnya partisipasi kolektif dalam pengambilan keputusan di sekolah. Model ini mengakui bahwa kepemimpinan tidak harus terpusat pada satu individu (seperti kepala sekolah) tetapi dapat dibagi di antara guru, staf, dan bahkan siswa. Dengan berbagi tanggung jawab, kepemimpinan terdistribusi mendorong rasa kepemilikan dan keterlibatan yang lebih besar dari semua anggota komunitas sekolah. Model ini efektif dalam menciptakan budaya kerja yang kolaboratif, di mana setiap orang merasa dihargai dan berkontribusi secara aktif terhadap pencapaian tujuan bersama.

Selanjutnya, *servant leadership* atau kepemimpinan pelayan, yang pertama kali diperkenalkan oleh Greenleaf (1977), menekankan bahwa pemimpin harus melayani kebutuhan orang lain terlebih dahulu. Dalam konteks pendidikan, ini berarti bahwa pemimpin pendidikan

harus mendahulukan kepentingan guru dan siswa di atas kepentingan pribadi atau organisasi. Eva et al. (2019) menemukan bahwa kepemimpinan pelayan dapat meningkatkan kepuasan kerja guru dan keterlibatan siswa, karena pendekatan ini mempromosikan lingkungan yang mendukung, menghargai kontribusi individu, dan berfokus pada pengembangan potensi maksimal setiap anggota komunitas sekolah.

Model *sustainable leadership* atau kepemimpinan berkelanjutan, seperti yang dikemukakan oleh Hargreaves dan Fink (2012), menyoroti pentingnya keberlanjutan dalam kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan berkelanjutan menekankan pada penciptaan dampak jangka panjang yang positif, tidak hanya untuk sekolah saat ini tetapi juga untuk generasi mendatang. Pemimpin yang menganut model ini mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari kebijakan dan praktik mereka. Mereka berusaha untuk memastikan bahwa perubahan dan inovasi yang diterapkan akan berkelanjutan dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi seluruh komunitas sekolah.

Secara keseluruhan, berbagai model kepemimpinan pendidikan—mulai dari transformasional, instruksional, terdistribusi, pelayan, hingga berkelanjutan—menawarkan kerangka kerja yang beragam untuk memahami bagaimana pemimpin dapat memengaruhi dan meningkatkan kinerja institusi pendidikan. Masing-masing model memiliki fokus dan pendekatan yang unik, tetapi semuanya bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik dan lebih inklusif bagi semua pihak yang terlibat. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pemimpin pendidikan yang berhasil adalah mereka yang mampu mengintegrasikan elemen-elemen dari berbagai model ini, menciptakan strategi kepemimpinan yang holistik dan efektif, serta memastikan bahwa praktik kepemimpinan mereka relevan dengan tantangan dan dinamika yang dihadapi oleh institusi pendidikan modern.

D. Jenis-jenis Kepemimpinan Pendidikan

Dalam konteks pendidikan, kepemimpinan memainkan peran krusial dalam menentukan arah dan keberhasilan suatu institusi pendidikan. Jenis-jenis kepemimpinan pendidikan mencerminkan berbagai pendekatan yang diambil oleh pemimpin untuk mengelola dan memimpin organisasi pendidikan, dengan fokus yang berbeda-beda tergantung pada kebutuhan, visi, dan tantangan yang dihadapi oleh institusi tersebut. Berbagai ahli dalam dekade terakhir telah mengkaji dan mendefinisikan berbagai jenis kepemimpinan pendidikan, yang masing-masing memiliki karakteristik dan implikasi tersendiri terhadap proses pembelajaran dan pengelolaan sekolah.

Salah satu jenis kepemimpinan yang sering dibahas adalah *kepemimpinan instruksional*. Kepemimpinan instruksional menekankan peran pemimpin dalam memandu dan meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Menurut Hallinger (2011), kepemimpinan instruksional berfokus pada pengembangan kurikulum, pengawasan proses pembelajaran, dan peningkatan kompetensi guru. Pemimpin instruksional bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan di sekolah berorientasi pada pencapaian tujuan akademik, dengan memberikan arahan yang jelas kepada guru dan staf dalam mengimplementasikan strategi pengajaran yang efektif. Jenis kepemimpinan ini sangat penting dalam menjaga standar pendidikan dan mempromosikan pembelajaran berkualitas di setiap tingkatan.

Di sisi lain, *kepemimpinan transformasional* adalah jenis kepemimpinan yang berusaha menginspirasi dan memotivasi anggota organisasi untuk melampaui harapan dan mencapai perubahan positif. Leithwood dan Sun (2012) menekankan bahwa kepemimpinan transformasional dalam pendidikan berperan dalam menciptakan visi bersama dan memberdayakan guru serta siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses transformasi sekolah. Jenis kepemimpinan ini menekankan pada inovasi, adaptasi, dan penciptaan iklim sekolah

yang mendukung pengembangan pribadi dan profesional bagi semua anggota komunitas sekolah. Pemimpin transformasional di bidang pendidikan berupaya untuk menciptakan lingkungan yang dinamis dan inklusif, di mana semua individu didorong untuk mencapai potensi penuh mereka.

Distributed leadership atau kepemimpinan terdistribusi adalah jenis kepemimpinan yang menekankan pentingnya kolaborasi dan partisipasi kolektif dalam pengambilan keputusan. Spillane (2015) menguraikan bahwa kepemimpinan terdistribusi melibatkan berbagai anggota organisasi, termasuk guru, staf, dan bahkan siswa, dalam proses kepemimpinan. Jenis kepemimpinan ini memungkinkan tanggung jawab untuk dibagi secara merata di seluruh organisasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan rasa memiliki dan keterlibatan di antara semua pihak yang terlibat. Kepemimpinan terdistribusi diyakini dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan memberdayakan, yang mendukung inovasi dan peningkatan berkelanjutan di sekolah.

Selanjutnya, *kepemimpinan moral* adalah jenis kepemimpinan yang berfokus pada nilai-nilai etika dan integritas dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sekolah. Fullan (2014) mengemukakan bahwa kepemimpinan moral sangat penting dalam membentuk budaya sekolah yang adil dan inklusif, di mana keputusan yang diambil oleh pemimpin selalu didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang kuat. Pemimpin moral bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan praktik di sekolah mencerminkan komitmen terhadap keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan semua siswa dan staf. Jenis kepemimpinan ini sangat relevan dalam menghadapi tantangan etika dan sosial yang semakin kompleks dalam dunia pendidikan saat ini.

Kepemimpinan instrumen sosial adalah jenis kepemimpinan yang muncul dalam literatur terbaru, yang menekankan peran pemimpin dalam menjembatani hubungan antara sekolah dan komunitas yang

lebih luas. Menurut Evans (2015), kepemimpinan instrumen sosial melibatkan pemimpin dalam memfasilitasi kolaborasi antara sekolah dan berbagai pemangku kepentingan eksternal, seperti orang tua, organisasi masyarakat, dan lembaga pemerintah. Jenis kepemimpinan ini bertujuan untuk menciptakan sinergi antara sekolah dan lingkungan sosialnya, dengan harapan dapat memperluas sumber daya, mendukung program-program pendidikan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan.

Terakhir, *kepemimpinan strategis* adalah jenis kepemimpinan yang menekankan pentingnya perencanaan jangka panjang dan pengambilan keputusan berbasis data dalam mengelola sekolah. Robinson (2011) menjelaskan bahwa kepemimpinan strategis melibatkan pemimpin dalam mengembangkan dan mengimplementasikan rencana strategis yang bertujuan untuk mencapai tujuan jangka panjang institusi pendidikan. Pemimpin strategis harus memiliki visi yang jelas dan kemampuan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman dalam lingkungan pendidikan, serta merancang strategi yang efektif untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang tersebut. Jenis kepemimpinan ini sangat penting dalam memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan sekolah di tengah dinamika perubahan yang cepat.

Secara keseluruhan, jenis-jenis kepemimpinan pendidikan seperti kepemimpinan instruksional, transformasional, terdistribusi, moral, instrumen sosial, dan strategis menawarkan kerangka kerja yang berbeda untuk memahami bagaimana pemimpin dapat mempengaruhi dan meningkatkan kinerja institusi pendidikan. Setiap jenis kepemimpinan memiliki fokus dan pendekatan yang unik, namun semuanya bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik dan lebih efektif bagi seluruh peserta didik. Melalui integrasi berbagai jenis kepemimpinan ini, pemimpin pendidikan dapat lebih

siap dalam menghadapi tantangan yang kompleks dan dinamis dalam dunia pendidikan modern.

E. Gaya Kepmimpinan

Gaya kepemimpinan dalam pendidikan telah menjadi topik penting dalam literatur kepemimpinan selama beberapa dekade terakhir. Dalam konteks pendidikan, gaya kepemimpinan mengacu pada pendekatan yang digunakan oleh pemimpin, seperti kepala sekolah atau rektor, untuk memotivasi, mengarahkan, dan membimbing guru, staf, dan siswa menuju pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Gaya kepemimpinan ini tidak hanya mencerminkan cara pemimpin berinteraksi dengan anggotanya, tetapi juga bagaimana mereka memengaruhi budaya organisasi, efektivitas pembelajaran, dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat.

Salah satu gaya kepemimpinan yang sering dibahas dalam konteks pendidikan adalah *kepemimpinan transformatif*. Gaya ini menekankan pentingnya perubahan yang mendasar dan inovasi dalam organisasi pendidikan. Pemimpin transformatif memiliki kemampuan untuk menginspirasi guru dan staf untuk melampaui harapan mereka sendiri, serta untuk mengembangkan kapasitas individu dan menciptakan visi bersama yang memotivasi seluruh komunitas sekolah. Leithwood dan Sun (2012) mengungkapkan bahwa kepemimpinan transformatif sangat efektif dalam menciptakan perubahan budaya yang signifikan di sekolah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan inklusivitas dan kolaborasi di lingkungan pendidikan. Dalam gaya ini, pemimpin tidak hanya berfokus pada tugas administratif, tetapi juga pada pemberdayaan individu dan penciptaan lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan profesional.

Gaya kepemimpinan lain yang sangat penting dalam pendidikan adalah *kepemimpinan instruksional*. Gaya ini menekankan peran sentral

pemimpin dalam memastikan bahwa proses pembelajaran di sekolah berjalan dengan efektif. Pemimpin instruksional berfokus pada pengelolaan langsung terhadap aktivitas pembelajaran, termasuk pengawasan kurikulum, pengembangan profesional guru, dan pemantauan hasil belajar siswa. Hallinger (2011) menyatakan bahwa kepemimpinan instruksional berperan penting dalam memastikan bahwa semua aktivitas di sekolah diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Pemimpin instruksional aktif dalam memberikan umpan balik kepada guru, membantu mereka mengembangkan keterampilan mengajar, dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung keberhasilan akademik siswa.

Gaya kepemimpinan kolaboratif juga telah mendapatkan perhatian yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kepemimpinan kolaboratif menekankan pentingnya partisipasi kolektif dan pengambilan keputusan bersama dalam komunitas sekolah. Spillane (2015) berpendapat bahwa gaya kepemimpinan ini memungkinkan distribusi tanggung jawab di antara semua anggota organisasi pendidikan, termasuk guru, staf, dan siswa. Dalam model ini, pemimpin mendorong keterlibatan aktif semua pihak, menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa dihargai dan suara mereka didengar. Kepemimpinan kolaboratif meningkatkan rasa memiliki di kalangan anggota komunitas sekolah dan dapat membantu menciptakan budaya yang lebih inklusif dan partisipatif.

Di samping itu, *kepemimpinan moral* menjadi semakin penting dalam menghadapi tantangan etis yang kompleks dalam pendidikan. Fullan (2014) mengemukakan bahwa kepemimpinan moral melibatkan pemimpin yang bertindak berdasarkan prinsip-prinsip etika yang kuat, dengan fokus pada keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan semua siswa dan staf. Pemimpin moral memastikan bahwa setiap keputusan yang mereka ambil didasarkan pada nilai-nilai etika yang kokoh, yang pada akhirnya menciptakan kepercayaan dan integritas di

dalam komunitas sekolah. Dalam lingkungan pendidikan yang sering dihadapkan pada berbagai dilema moral, kepemimpinan moral sangat penting untuk menjaga keadilan dan inklusivitas dalam proses pengambilan keputusan.

Gaya kepemimpinan lain yang menjadi sorotan adalah *kepemimpinan adaptif*, yang semakin dianggap penting dalam menghadapi perubahan cepat dan ketidakpastian di lingkungan pendidikan. Heifetz dan Linsky (2017) menjelaskan bahwa kepemimpinan adaptif memungkinkan pemimpin untuk merespons dengan cepat terhadap tantangan dan perubahan yang tidak terduga. Gaya ini menuntut pemimpin untuk fleksibel, inovatif, dan mampu menavigasi melalui ketidakpastian dengan memberdayakan anggota organisasi untuk beradaptasi dan mencari solusi yang efektif. Dalam pendidikan, di mana perubahan seringkali terjadi secara mendadak, kepemimpinan adaptif menjadi krusial untuk memastikan bahwa institusi tetap responsif dan relevan.

Terakhir, *kepemimpinan visioner* menekankan pentingnya memiliki visi jangka panjang dalam memimpin institusi pendidikan. Pemimpin visioner, seperti yang dijelaskan oleh Robinson (2011), mampu melihat jauh ke depan dan mengembangkan rencana strategis yang memandu institusi pendidikan menuju tujuan jangka panjang. Mereka menginspirasi anggota organisasi dengan visi yang jelas dan memobilisasi sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Kepemimpinan visioner sangat penting dalam menciptakan arah yang jelas bagi institusi pendidikan dan memastikan bahwa semua upaya organisasi diarahkan untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan.

Dalam keseluruhan, gaya-gaya kepemimpinan dalam pendidikan—seperti transformatif, instruksional, kolaboratif, moral, adaptif, dan visioner—menyediakan kerangka kerja yang kaya untuk memahami bagaimana pemimpin dapat memengaruhi dan

meningkatkan kinerja institusi pendidikan. Setiap gaya kepemimpinan menawarkan pendekatan yang unik untuk mengelola tantangan yang kompleks dalam pendidikan, dan pemimpin yang efektif sering kali mampu mengintegrasikan elemen-elemen dari berbagai gaya ini untuk menciptakan strategi kepemimpinan yang lebih komprehensif dan adaptif. Dengan pemahaman yang mendalam tentang berbagai gaya kepemimpinan ini, pemimpin pendidikan dapat lebih siap untuk memimpin institusi mereka dengan cara yang lebih holistik dan efektif, menghadapi tantangan masa depan dengan percaya diri dan kompeten.

F. Fungsi Kepemimpinan Pendidikan

Fungsi-fungsi kepemimpinan pendidikan merupakan fondasi yang sangat penting bagi kelancaran, efektivitas, dan keberhasilan institusi pendidikan. Pemimpin pendidikan, seperti kepala sekolah, rektor, atau direktur, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa visi dan misi lembaga pendidikan tercapai melalui perencanaan strategis, manajemen sumber daya, pengembangan budaya organisasi, pengawasan dan evaluasi, pengambilan keputusan yang tepat, serta penerapan inovasi dan perubahan yang berkelanjutan.

Salah satu fungsi paling mendasar dari kepemimpinan pendidikan adalah perumusan visi dan misi**.** Visi dan misi yang dirumuskan oleh pemimpin pendidikan berfungsi sebagai peta jalan yang mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan yang diambil oleh institusi pendidikan. Visi harus mencerminkan cita-cita dan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh sekolah atau lembaga pendidikan, sedangkan misi berfungsi sebagai penjabaran langkah-langkah strategis untuk mencapai visi tersebut. Robinson (2011) menekankan pentingnya visi dan misi yang jelas karena dapat memotivasi seluruh komunitas sekolah untuk bekerja sama dan memberikan arah yang konsisten dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Visi dan misi yang baik juga berfungsi untuk

menyatukan semua pihak yang terlibat, baik itu guru, staf, siswa, maupun orang tua, dalam upaya kolektif untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan.

Selain perumusan visi dan misi, manajemen sumber daya merupakan fungsi penting lainnya dalam kepemimpinan pendidikan. Sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia, keuangan, serta fasilitas fisik dan material. Pemimpin pendidikan harus mampu mengelola sumber daya ini secara efisien dan efektif untuk memastikan bahwa mereka mendukung proses pembelajaran dan pengajaran dengan optimal. Hallinger (2011) menegaskan bahwa manajemen sumber daya yang baik adalah kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Ini termasuk alokasi anggaran yang tepat, pengelolaan fasilitas sekolah, dan terutama pengembangan profesional guru dan staf, sehingga mereka dapat terus meningkatkan kompetensinya dan memberikan pendidikan yang berkualitas. Manajemen sumber daya juga mencakup upaya untuk memastikan bahwa semua kebutuhan siswa terpenuhi, termasuk kebutuhan khusus yang mungkin mereka miliki, sehingga setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil.

Selain manajemen sumber daya, pengembangan budaya organisasi adalah aspek penting lainnya dalam kepemimpinan pendidikan. Budaya sekolah yang kuat dan positif memiliki dampak yang signifikan terhadap keberhasilan akademik siswa dan kesejahteraan seluruh anggota komunitas sekolah. Fullan (2014) mengemukakan bahwa pemimpin pendidikan harus aktif dalam menciptakan dan memelihara budaya sekolah yang mendukung kolaborasi, inovasi, dan inklusivitas. Budaya yang kuat membantu membangun ikatan yang lebih baik di antara siswa, guru, dan staf, menciptakan lingkungan di mana semua orang merasa dihargai dan termotivasi untuk berkontribusi secara maksimal. Pemimpin pendidikan harus mampu menanamkan nilai-nilai positif dalam

budaya sekolah, seperti kejujuran, kerja keras, dan rasa tanggung jawab, yang pada gilirannya akan mendorong siswa untuk mencapai prestasi akademik yang lebih tinggi.

Fungsi pengawasan dan evaluasi juga merupakan elemen kunci dalam kepemimpinan pendidikan. Pemimpin pendidikan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua program dan kebijakan yang diterapkan berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai hasil yang diinginkan. Heifetz dan Linsky (2017) menyatakan bahwa pengawasan yang efektif memerlukan pemimpin untuk secara rutin memantau kemajuan siswa, mengevaluasi kualitas pengajaran, dan menilai efektivitas berbagai program pendidikan. Pengawasan yang sistematis dan evaluasi berbasis data memungkinkan pemimpin untuk mengidentifikasi masalah sejak dini dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Evaluasi yang terus-menerus juga memungkinkan pemimpin untuk merayakan pencapaian yang telah diraih, yang dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja seluruh anggota komunitas sekolah.

Pengambilan keputusan adalah fungsi vital lainnya dalam kepemimpinan pendidikan. Keputusan yang dibuat oleh pemimpin pendidikan akan sangat menentukan arah dan keberhasilan institusi pendidikan. Spillane (2015) mengemukakan bahwa pengambilan keputusan dalam kepemimpinan pendidikan harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk guru, siswa, dan orang tua, untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh komunitas sekolah. Pendekatan partisipatif dalam pengambilan keputusan ini tidak hanya meningkatkan kualitas keputusan yang diambil, tetapi juga meningkatkan rasa memiliki dan keterlibatan seluruh anggota komunitas sekolah, yang pada akhirnya dapat memperkuat komitmen mereka terhadap keberhasilan institusi pendidikan.

Selain pengambilan keputusan, inovasi dan perubahan juga merupakan salah satu fungsi penting dalam kepemimpinan pendidikan. Lingkungan pendidikan yang selalu berubah menuntut pemimpin untuk terus mencari cara-cara baru untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Leithwood dan Sun (2012) menyatakan bahwa pemimpin pendidikan harus mampu mengenali peluang untuk inovasi dan memimpin institusi mereka melalui perubahan yang diperlukan. Fungsi ini mencakup kemampuan untuk mengelola resistensi terhadap perubahan, serta memastikan bahwa inovasi yang diterapkan benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat. Pemimpin pendidikan yang inovatif mampu menciptakan solusi kreatif untuk tantangan yang dihadapi dan memimpin institusi mereka menuju pencapaian yang lebih tinggi.

Secara keseluruhan, fungsi-fungsi kepemimpinan pendidikan seperti perumusan visi dan misi, manajemen sumber daya, pengembangan budaya organisasi, pengawasan dan evaluasi, pengambilan keputusan, serta inovasi dan perubahan, merupakan elemen penting yang harus dikelola dengan baik oleh pemimpin pendidikan. Dengan menjalankan fungsi-fungsi ini secara efektif, pemimpin pendidikan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran berkualitas dan perkembangan holistik bagi peserta didik, serta memastikan bahwa institusi pendidikan mereka mampu menghadapi tantangan dan peluang yang ada di masa depan.

G. Peran dan Kontribusi Kepemimpinan Pendidikan

Peran dan kontribusi kepemimpinan pendidikan merupakan elemen fundamental yang menentukan keberhasilan sebuah institusi pendidikan. Dalam konteks yang semakin kompleks dan dinamis, pemimpin pendidikan tidak hanya bertindak sebagai penggerak utama yang memastikan pelaksanaan visi dan misi lembaga, tetapi juga berperan sebagai pondasi yang memungkinkan terciptanya lingkungan belajar yang kondusif, inovatif, dan inklusif. Seiring dengan

perkembangan zaman, para ahli dan peneliti telah menyoroti peran sentral kepemimpinan dalam membentuk budaya organisasi, mengarahkan proses pembelajaran, serta memastikan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan pendidikan.

Salah satu peran paling krusial dari kepemimpinan pendidikan adalah membentuk dan mengartikulasikan visi strategis bagi seluruh organisasi. Pemimpin pendidikan bertanggung jawab untuk mengembangkan visi yang inspiratif dan strategis, yang tidak hanya menjadi pedoman bagi guru dan staf, tetapi juga mengarahkan seluruh komunitas sekolah dalam upaya kolektif menuju tujuan jangka panjang lembaga. Robinson (2011) menegaskan bahwa visi yang jelas dan terukur adalah elemen kunci dalam kepemimpinan pendidikan, karena mampu memberikan arahan yang tepat serta memotivasi semua pihak untuk bekerja sama demi mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemimpin pendidikan berfungsi sebagai navigator yang menjaga agar semua komponen organisasi tetap berada pada jalur yang benar menuju pencapaian visi dan misi institusi.

Selain itu, peran pengembangan profesional yang dijalankan oleh pemimpin pendidikan juga menjadi salah satu kontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas pendidikan. Pengembangan profesional guru dan staf adalah aspek yang tidak bisa diabaikan, karena guru yang terampil dan berpengetahuan luas merupakan faktor penentu dalam proses pembelajaran yang efektif. Leithwood et al. (2012) menyatakan bahwa pemimpin pendidikan yang berfokus pada peningkatan kapasitas profesional guru berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang produktif dan berkualitas. Dengan menyediakan pelatihan yang berkelanjutan dan relevan, pemimpin tidak hanya meningkatkan kompetensi guru tetapi juga memberikan dampak langsung pada hasil belajar siswa, yang pada akhirnya meningkatkan reputasi dan kinerja institusi pendidikan.

Fungsi pembangunan budaya organisasi juga tidak kalah penting dalam kepemimpinan pendidikan. Budaya sekolah yang inklusif dan kolaboratif memainkan peran kunci dalam menentukan bagaimana anggota komunitas sekolah berinteraksi dan bekerja sama. Menurut Fullan (2014), pemimpin pendidikan harus aktif dalam membangun budaya sekolah yang mendorong inovasi, menghargai keberagaman, dan mendukung setiap individu untuk mencapai potensi maksimal mereka. Budaya organisasi yang positif akan menciptakan lingkungan di mana siswa merasa aman dan termotivasi untuk belajar, sementara guru dan staf merasa dihargai dan didukung dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Dengan demikian, pemimpin pendidikan berkontribusi secara langsung dalam menciptakan suasana yang kondusif untuk pembelajaran yang efektif dan pengembangan holistik peserta didik.

Pengambilan keputusan yang efektif adalah fungsi lain yang sangat vital dalam kepemimpinan pendidikan. Keputusan yang diambil oleh pemimpin pendidikan berdampak besar pada arah dan keberhasilan institusi. Spillane (2015) menekankan pentingnya pengambilan keputusan yang partisipatif, di mana berbagai pemangku kepentingan, termasuk guru, siswa, dan orang tua, dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Pendekatan ini tidak hanya memastikan bahwa keputusan yang diambil lebih inklusif dan reflektif terhadap kebutuhan komunitas sekolah, tetapi juga meningkatkan rasa memiliki dan keterlibatan dari semua pihak yang terlibat. Dalam jangka panjang, keputusan yang dibuat secara kolaboratif cenderung lebih diterima dan didukung oleh komunitas sekolah, sehingga mempermudah implementasi kebijakan dan program yang direncanakan.

Peran kepemimpinan dalam mengelola perubahan juga menjadi semakin penting, terutama dalam konteks perubahan yang cepat dan tak terduga dalam dunia pendidikan. Reformasi kurikulum, perkembangan teknologi, dan perubahan kebijakan adalah beberapa

contoh tantangan yang sering dihadapi oleh pemimpin pendidikan. Heifetz dan Linsky (2017) berpendapat bahwa pemimpin pendidikan yang efektif harus mampu mengelola perubahan ini dengan cara yang meminimalkan resistensi dan memaksimalkan keterlibatan seluruh anggota komunitas sekolah. Pemimpin harus mampu mengkomunikasikan tujuan dan manfaat dari perubahan tersebut, serta memberikan dukungan yang diperlukan agar guru dan staf dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut. Dengan demikian, pemimpin pendidikan berperan sebagai agen perubahan yang memastikan bahwa inovasi dan penyesuaian yang dilakukan benar-benar membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Terakhir, membangun kemitraan yang kuat dengan masyarakat adalah kontribusi penting lainnya dari kepemimpinan pendidikan. Dalam dunia pendidikan yang semakin terhubung, kemitraan dengan orang tua, komunitas lokal, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi semakin relevan. Hargreaves dan Fullan (2012) menekankan bahwa kemitraan yang efektif antara sekolah dan masyarakat dapat memberikan dukungan tambahan bagi siswa, baik dalam bentuk sumber daya maupun kesempatan belajar yang lebih luas. Dengan membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan dengan komunitas, pemimpin pendidikan dapat memperluas jaringan dukungan untuk siswa, meningkatkan relevansi pendidikan, serta memastikan bahwa sekolah mampu berkontribusi positif terhadap masyarakat di sekitarnya.

Secara keseluruhan, peran dan kontribusi kepemimpinan pendidikan sangatlah vital dalam memastikan bahwa tujuan pendidikan tercapai secara efektif dan berkelanjutan. Pemimpin pendidikan yang sukses adalah mereka yang mampu menggabungkan visi strategis dengan pengambilan keputusan yang inklusif, menciptakan budaya sekolah yang positif dan mendukung, mengelola perubahan dengan efektif, serta membangun kemitraan yang kuat

dengan masyarakat. Dengan menjalankan peran-peran ini secara efektif, kepemimpinan pendidikan memberikan kontribusi yang tak ternilai bagi kemajuan institusi pendidikan dan pencapaian hasil yang optimal bagi peserta didik.

H. Kompetensi Dalam Kepemimpinan Pendidikan

Dalam konteks kepemimpinan pendidikan, pemimpin seperti kepala sekolah, direktur pendidikan, atau pengawas pendidikan harus memiliki serangkaian kompetensi yang memungkinkan mereka untuk mengelola institusi pendidikan secara efektif dan efisien. Kompetensi ini umumnya dibagi menjadi tiga kategori utama: Kompetensi Dasar, Kompetensi Penunjang, dan Kompetensi Khusus. Masing-masing kategori ini mencakup keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang berbeda namun saling melengkapi, yang bersama-sama membentuk fondasi kepemimpinan yang sukses dalam bidang pendidikan.

Kompetensi Dasar dalam kepemimpinan pendidikan merujuk pada keterampilan dan pengetahuan fundamental yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin pendidikan untuk menjalankan perannya secara efektif. Kompetensi ini meliputi kemampuan untuk merumuskan visi dan misi, pengetahuan tentang teori dan praktik manajemen pendidikan, serta keterampilan komunikasi yang baik. Seorang pemimpin pendidikan harus mampu mengembangkan visi strategis yang jelas dan misi yang inspiratif untuk institusi mereka. Robinson (2011) menekankan bahwa visi dan misi yang kuat dapat memberikan arah yang jelas bagi seluruh anggota komunitas pendidikan dan memastikan bahwa semua kegiatan di sekolah atau lembaga pendidikan selaras dengan tujuan jangka panjang. Selain itu, kompetensi dasar juga mencakup pemahaman tentang kebijakan pendidikan, kurikulum, dan evaluasi, yang merupakan aspek-aspek kunci dalam manajemen pendidikan.

Kompetensi Penunjang mencakup keterampilan tambahan yang mendukung tugas-tugas utama seorang pemimpin pendidikan dan memungkinkan mereka untuk lebih efektif dalam menjalankan perannya. Kompetensi penunjang ini meliputi kemampuan dalam manajemen sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, serta penggunaan teknologi dalam pendidikan. Hallinger (2011) menyoroti pentingnya manajemen sumber daya manusia dalam kepemimpinan pendidikan, termasuk dalam aspek rekrutmen, pengembangan profesional, dan evaluasi kinerja guru serta staf. Pengelolaan keuangan juga merupakan kompetensi penunjang yang krusial, karena pemimpin pendidikan harus mampu mengelola anggaran dengan efisien dan memastikan bahwa sumber daya keuangan digunakan untuk mendukung tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Di era digital saat ini, kemampuan untuk memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan sekolah dan pembelajaran juga menjadi kompetensi penunjang yang sangat penting. Teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi administrasi, memperbaiki komunikasi, dan mendukung inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran.

Kompetensi Khusus merujuk pada keterampilan dan pengetahuan yang lebih spesifik, yang sering kali terkait dengan konteks atau tantangan tertentu yang dihadapi oleh pemimpin pendidikan. Kompetensi khusus ini bisa mencakup kemampuan untuk memimpin perubahan, keterampilan dalam mediasi dan resolusi konflik, serta kompetensi dalam pengambilan keputusan berbasis data. Heifetz dan Linsky (2017) menekankan bahwa pemimpin pendidikan harus memiliki kapasitas untuk memimpin perubahan, terutama dalam menghadapi dinamika lingkungan pendidikan yang selalu berubah. Ini mencakup kemampuan untuk mengelola resistensi terhadap perubahan, memotivasi staf untuk beradaptasi, dan memastikan bahwa inovasi yang diterapkan benar-benar berdampak positif. Keterampilan dalam mediasi dan resolusi konflik juga merupakan kompetensi khusus

yang sangat penting, mengingat adanya berbagai kepentingan dan perspektif yang harus diakomodasi dalam lingkungan pendidikan. Pemimpin yang efektif harus mampu menangani konflik dengan bijak dan memastikan bahwa solusi yang diambil mendukung keharmonisan dan kolaborasi di antara semua pihak yang terlibat.

Selain itu, kemampuan untuk mengambil keputusan berbasis data merupakan kompetensi khusus yang semakin penting dalam kepemimpinan pendidikan modern. Supovitz dan Tognatta (2013) menggarisbawahi bahwa pengambilan keputusan yang didukung oleh data empiris memungkinkan pemimpin untuk membuat keputusan yang lebih akurat dan efektif, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan. Pemimpin pendidikan harus mampu mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan data dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi masalah, mengevaluasi efektivitas program, dan mengarahkan upaya peningkatan kualitas secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kompetensi dasar, penunjang, dan khusus dalam kepemimpinan pendidikan saling melengkapi dan membentuk kerangka kerja yang diperlukan untuk memimpin institusi pendidikan secara efektif. Kompetensi dasar memberikan fondasi yang kuat untuk kepemimpinan, kompetensi penunjang mendukung operasional sehari-hari dan pengelolaan institusi, sementara kompetensi khusus memungkinkan pemimpin untuk menghadapi tantangan unik dan dinamis yang sering muncul dalam konteks pendidikan. Dengan mengembangkan dan mengintegrasikan ketiga jenis kompetensi ini, pemimpin pendidikan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran berkualitas tinggi dan pencapaian tujuan pendidikan yang optimal.

Sifat-sifat kepemimpinan pendidikan menjadi landasan penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang efektif dan inklusif. Seorang pemimpin pendidikan tidak hanya dituntut untuk memiliki

keterampilan manajerial, tetapi juga harus memiliki sifat-sifat yang memungkinkan mereka untuk mengarahkan, menginspirasi, dan memberdayakan seluruh komunitas sekolah. Sifat-sifat ini termasuk integritas, empati, keterbukaan, ketegasan, visi yang jelas, dan kemampuan untuk berinovasi, yang semuanya sangat relevan dalam konteks pendidikan yang terus berkembang.

Sifat pertama yang sangat krusial dalam kepemimpinan pendidikan adalah integritas. Integritas merupakan fondasi dari kepercayaan, yang sangat penting dalam hubungan antara pemimpin dengan staf, siswa, dan masyarakat sekolah. Menurut Fullan (2014), integritas adalah konsistensi antara nilai-nilai moral dan tindakan nyata. Seorang pemimpin pendidikan yang berintegritas tidak hanya bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip etika, tetapi juga menjadi teladan bagi orang lain. Hal ini menciptakan kepercayaan yang tinggi dalam organisasi, yang pada gilirannya mendukung tercapainya tujuan-tujuan pendidikan.

Empati juga merupakan sifat yang esensial dalam kepemimpinan pendidikan. Pemimpin yang empatik mampu memahami dan merasakan perspektif orang lain, sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih bijaksana dan adil. Leithwood et al. (2012) menyatakan bahwa pemimpin yang memiliki empati tinggi mampu menciptakan lingkungan sekolah yang lebih inklusif dan mendukung. Empati juga memperkuat hubungan antara pemimpin dengan guru dan siswa, karena mereka merasa didengarkan dan dipahami. Dalam konteks ini, empati menjadi kunci dalam membangun budaya sekolah yang kolaboratif dan berpusat pada kebutuhan siswa.

Keterbukaan adalah sifat lain yang sangat penting dalam kepemimpinan pendidikan. Keterbukaan, dalam hal ini, merujuk pada kemampuan pemimpin untuk bersikap transparan, menerima masukan, dan bersedia untuk berubah berdasarkan umpan balik yang

diterima. Spillane (2015) mengemukakan bahwa keterbukaan dalam kepemimpinan pendidikan mendorong partisipasi aktif dari semua anggota komunitas sekolah, sehingga menciptakan suasana yang kondusif bagi inovasi dan pembelajaran berkelanjutan. Pemimpin yang terbuka juga lebih adaptif terhadap perubahan, karena mereka selalu siap untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan yang berkembang di lingkungan pendidikan.

Ketegasan adalah sifat yang tidak kalah pentingnya dalam kepemimpinan pendidikan. Ketegasan merujuk pada kemampuan pemimpin untuk membuat keputusan yang tepat dan menegakkan aturan dengan konsisten. Harris dan Jones (2018) menekankan bahwa ketegasan membantu pemimpin pendidikan dalam menjaga disiplin dan memastikan bahwa visi dan misi sekolah tercapai. Ketegasan juga penting dalam menghadapi tantangan dan hambatan, karena pemimpin yang tegas tidak akan ragu untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan demi kemajuan sekolah.

Visi yang jelas adalah sifat lain yang sangat penting dalam kepemimpinan pendidikan. Pemimpin yang memiliki visi yang kuat mampu mengarahkan seluruh organisasi menuju tujuan jangka panjang yang bermakna. Robinson (2011) berpendapat bahwa visi yang jelas memberikan arah dan fokus bagi semua tindakan dalam organisasi pendidikan, serta menginspirasi seluruh komunitas sekolah untuk bekerja sama mencapai tujuan tersebut. Visi ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan, tetapi juga sebagai sumber motivasi bagi guru, siswa, dan staf.

Akhirnya, kemampuan untuk berinovasi juga merupakan sifat yang sangat dibutuhkan dalam kepemimpinan pendidikan. Dalam lingkungan pendidikan yang selalu berubah, pemimpin harus mampu memperkenalkan inovasi dan memfasilitasi perubahan yang positif. Menurut Sun dan Leithwood (2015), pemimpin yang inovatif tidak hanya mendorong guru untuk mencoba pendekatan pengajaran baru,

tetapi juga memastikan bahwa seluruh komunitas sekolah siap dan mendukung perubahan tersebut. Inovasi dalam kepemimpinan pendidikan memungkinkan sekolah untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan siswa dan tuntutan zaman.

Secara keseluruhan, sifat-sifat seperti integritas, empati, keterbukaan, ketegasan, visi yang jelas, dan kemampuan untuk berinovasi adalah elemen kunci dalam kepemimpinan pendidikan yang efektif. Dengan menerapkan sifat-sifat ini, pemimpin pendidikan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung, inklusif, dan berorientasi pada pembelajaran, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidikan dan pencapaian siswa.

I. Kepemimpinan Instruksional

1. Hakikat Dasar Kepemimpinan Instruksional

Kepemimpinan instruksional adalah salah satu pendekatan yang paling penting dalam konteks manajemen pendidikan, di mana fokus utamanya adalah pada peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Kepemimpinan ini berakar pada tanggung jawab seorang pemimpin pendidikan—seperti kepala sekolah, pengawas, atau direktur sekolah—untuk memastikan bahwa setiap elemen yang berkaitan dengan proses instruksional, termasuk kurikulum, strategi pengajaran, dan evaluasi hasil belajar, berjalan dengan baik dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Menurut Hallinger (2011), kepemimpinan instruksional bukan hanya tentang pengawasan administratif, tetapi juga mencakup intervensi langsung dalam proses pengajaran, yang melibatkan pemberian arahan, dukungan, dan umpan balik yang berkelanjutan kepada guru dan staf pendidikan.

Dalam konteks ini, pemimpin instruksional harus memiliki wawasan yang mendalam tentang kurikulum dan pedagogi serta keterampilan untuk memotivasi dan membimbing guru dalam penerapan strategi pengajaran yang efektif. Leithwood dan Louis

(2012) menambahkan bahwa pemimpin instruksional harus mampu mengarahkan fokus sekolah pada pencapaian hasil belajar yang optimal, yang melibatkan penyelarasan antara visi sekolah dengan praktik sehari-hari di kelas. Kepemimpinan instruksional yang efektif menciptakan lingkungan di mana guru merasa didukung dalam upaya mereka untuk meningkatkan kualitas pengajaran, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap pencapaian akademik siswa.

2. Peran dan Fungsi Kepemimpinan Instruksional

Peran pemimpin instruksional mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Salah satu peran utama adalah sebagai pengarah, di mana pemimpin instruksional berperan dalam menetapkan visi dan tujuan pembelajaran yang jelas serta memastikan bahwa seluruh komunitas sekolah memahami dan mendukung visi tersebut. Leithwood et al. (2012) menekankan bahwa pemimpin instruksional yang efektif harus mampu mengkomunikasikan visi mereka dengan cara yang menginspirasi guru dan siswa untuk bekerja menuju pencapaian tujuan bersama.

Selain sebagai pengarah, pemimpin instruksional juga berfungsi sebagai fasilitator, yang bertanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang mendukung proses pembelajaran yang efektif. Ini mencakup penyediaan sumber daya yang diperlukan, seperti materi pengajaran, pelatihan profesional bagi guru, dan dukungan teknis. Pemimpin instruksional juga bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum serta strategi pengajaran di kelas. Hallinger dan Heck (2010) mencatat bahwa pemimpin instruksional harus mampu memonitor kinerja guru dan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk membantu mereka meningkatkan praktik pengajaran mereka.

Peran lain yang sangat penting adalah sebagai mentor bagi guru dan staf pendidikan. Pemimpin instruksional harus berperan aktif dalam pengembangan profesional guru, membantu mereka untuk terus meningkatkan keterampilan dan kompetensi mereka. Ini bisa dilakukan melalui pelatihan, workshop, atau pembinaan langsung di tempat kerja. Menurut Robinson et al. (2013), pemimpin instruksional yang berfokus pada pengembangan profesional dapat mendorong inovasi dan peningkatan kualitas pengajaran, yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa.

3. Pendekatan dalam Kepemimpinan Instruksional

Berbagai pendekatan dalam kepemimpinan instruksional telah dikembangkan untuk membantu pemimpin pendidikan dalam menjalankan peran mereka dengan lebih efektif. Salah satu pendekatan yang menonjol adalah *shared instructional leadership*, yang menekankan pada pembagian tanggung jawab kepemimpinan di antara semua anggota komunitas sekolah, termasuk guru dan staf. Dalam model ini, kepala sekolah tidak memegang semua kendali, tetapi bekerja sama dengan guru untuk membuat keputusan terkait dengan kurikulum dan strategi pengajaran. Robinson et al. (2013) menjelaskan bahwa pendekatan ini mendorong partisipasi aktif dari seluruh anggota komunitas sekolah, menciptakan rasa memiliki, dan meningkatkan kolaborasi dalam mencapai tujuan pembelajaran.

Selain itu, *data-driven instructional leadership* adalah pendekatan yang berfokus pada penggunaan data sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan proses instruksional. Pemimpin yang menggunakan pendekatan ini akan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber, seperti hasil ujian, observasi kelas, dan survei siswa, untuk mengevaluasi efektivitas pengajaran dan merumuskan strategi peningkatan yang tepat. Supovitz dan Tognatta (2013) berpendapat bahwa dengan mengandalkan data, pemimpin

instruksional dapat membuat keputusan yang lebih akurat dan terarah, yang akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan.

Pendekatan *transformational instructional leadership* juga menjadi sorotan penting dalam kepemimpinan instruksional. Pendekatan ini berfokus pada upaya untuk membawa perubahan positif dalam praktik pengajaran melalui inspirasi, motivasi, dan pemberdayaan guru. Pemimpin transformasional dalam konteks instruksional berusaha untuk menciptakan lingkungan di mana guru merasa dihargai dan termotivasi untuk terus mengembangkan keterampilan mereka. Menurut Sun dan Leithwood (2015), pendekatan ini melibatkan pengembangan visi bersama, dorongan untuk inovasi, dan komitmen terhadap pengembangan profesional yang semuanya berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran.

Lebih lanjut, *contextual instructional leadership* adalah pendekatan yang menekankan pentingnya memahami konteks lokal sekolah dalam menerapkan strategi kepemimpinan. Pendekatan ini mengakui bahwa setiap sekolah memiliki kebutuhan dan tantangan yang unik, yang memerlukan pendekatan kepemimpinan yang disesuaikan dengan kondisi spesifik tersebut. Sebagaimana diuraikan oleh Harris (2013), pemimpin yang menggunakan pendekatan kontekstual akan berupaya memahami dinamika lokal, budaya, dan kebutuhan siswa serta staf, untuk kemudian merumuskan strategi kepemimpinan yang relevan dan efektif.

Kepemimpinan instruksional adalah elemen penting dalam mencapai keberhasilan pendidikan. Melalui peran yang mencakup pengarah, fasilitator, dan mentor, serta penerapan berbagai pendekatan seperti *shared instructional leadership*, *data-driven instructional leadership*, *transformational instructional leadership*, dan *contextual instructional leadership*, pemimpin instruksional dapat memastikan bahwa setiap aspek dari proses pembelajaran dikelola dengan baik dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang lebih tinggi. Implementasi

kepemimpinan instruksional yang efektif tidak hanya meningkatkan kualitas pengajaran, tetapi juga berdampak positif pada prestasi siswa dan keseluruhan budaya sekolah. Pemahaman yang mendalam tentang berbagai pendekatan ini akan membekali pemimpin pendidikan dengan keterampilan dan wawasan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dan peluang dalam lingkungan pendidikan yang terus berkembang.

4. Kemampuan yang diperlukan dalam mewujudkan Kepemimpinan Instruksional

Kepemimpinan instruksional adalah salah satu dimensi yang paling penting dalam konteks manajemen pendidikan, karena secara langsung berfokus pada upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Untuk mewujudkan kepemimpinan instruksional yang efektif, seorang pemimpin pendidikan harus memiliki berbagai kemampuan yang memungkinkan mereka untuk tidak hanya mengarahkan dan mengawasi proses pembelajaran, tetapi juga mendukung dan memberdayakan tenaga pendidik serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kemampuan-kemampuan ini tidak hanya bersifat teknis tetapi juga melibatkan aspek-aspek strategis, sosial, dan psikologis yang kompleks.

Pemahaman mendalam tentang teori dan praktik pembelajaran merupakan fondasi utama yang harus dimiliki oleh pemimpin instruksional. Pemimpin seperti kepala sekolah harus memiliki pengetahuan yang luas tentang berbagai teori pembelajaran, metode pengajaran, strategi penilaian, serta bagaimana kurikulum dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan beragam siswa. Hallinger (2011) menyatakan bahwa kepemimpinan instruksional yang sukses sangat bergantung pada kemampuan pemimpin untuk menghubungkan antara teori pendidikan dan praktik di kelas. Dengan pengetahuan ini, pemimpin instruksional dapat memandu guru dalam merancang rencana pembelajaran yang efektif, memberikan penilaian

yang akurat, dan menerapkan strategi pengajaran yang berpusat pada siswa. Selain itu, pemimpin harus mampu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan bagi guru, sehingga mereka dapat terus memperbarui keterampilan mereka seiring dengan perkembangan terbaru dalam teori dan praktik pendidikan.

Keterampilan dalam pengembangan profesional guru juga merupakan elemen kunci dalam kepemimpinan instruksional. Pengembangan profesional yang berkelanjutan adalah esensial untuk memastikan bahwa guru tetap kompeten dan dapat menghadapi tantangan baru dalam pengajaran. Leithwood et al. (2012) menyatakan bahwa pemimpin instruksional yang berfokus pada pengembangan profesional berperan signifikan dalam meningkatkan kualitas pengajaran dan hasil belajar siswa. Dalam konteks ini, pemimpin harus mampu merancang dan melaksanakan program pelatihan yang relevan, memberikan umpan balik yang konstruktif, serta menciptakan budaya belajar di kalangan guru. Ini tidak hanya meningkatkan kompetensi individual guru, tetapi juga memperkuat kolaborasi di antara mereka, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan keseluruhan kualitas pembelajaran di sekolah.

Selain itu, kompetensi dalam pengambilan keputusan berbasis data adalah kemampuan yang sangat penting bagi pemimpin instruksional. Dalam lingkungan pendidikan yang kompleks, di mana keputusan yang diambil memiliki dampak langsung pada kualitas pembelajaran, penggunaan data yang akurat dan relevan menjadi sangat penting. Supovitz dan Tognatta (2013) menekankan bahwa pengambilan keputusan berbasis data memungkinkan pemimpin untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, memantau kemajuan siswa, dan mengevaluasi efektivitas program pendidikan. Dengan menggunakan data, pemimpin instruksional dapat membuat keputusan yang lebih terukur dan tepat, yang didasarkan pada bukti empiris dan bukan sekadar intuisi atau asumsi. Ini termasuk

pemantauan kinerja guru, analisis tren dalam hasil belajar siswa, dan perencanaan strategi pembelajaran yang lebih efektif.

Kemampuan untuk membangun hubungan dan komunikasi yang efektif dengan semua pemangku kepentingan di sekolah juga merupakan aspek penting dari kepemimpinan instruksional. Komunikasi yang baik antara pemimpin, guru, siswa, orang tua, dan komunitas sekolah lainnya adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran. Heifetz dan Linsky (2017) menunjukkan bahwa komunikasi yang terbuka dan transparan sangat penting untuk membangun kepercayaan dan kolaborasi di antara anggota komunitas sekolah. Pemimpin instruksional harus mampu menjelaskan visi dan misi sekolah dengan jelas, mengartikulasikan harapan dan tujuan, serta mendengarkan dan merespons kebutuhan dan kekhawatiran dari semua pihak yang terlibat. Komunikasi yang efektif juga berarti bahwa pemimpin dapat memotivasi dan menginspirasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama, serta membangun rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dalam komunitas sekolah.

Lebih jauh lagi, kemampuan untuk memimpin perubahan dan inovasi adalah aspek yang tidak dapat diabaikan dalam kepemimpinan instruksional. Dunia pendidikan selalu berada dalam keadaan perubahan yang dinamis, baik itu dalam bentuk reformasi kurikulum, integrasi teknologi baru, atau penyesuaian kebijakan pendidikan. Pemimpin instruksional harus siap untuk mengarahkan sekolah mereka melalui perubahan ini dengan cara yang efektif dan efisien. Sun dan Leithwood (2015) mengemukakan bahwa pemimpin instruksional yang sukses adalah mereka yang mampu menginspirasi guru dan staf untuk menerima dan beradaptasi dengan perubahan, serta yang mampu menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi. Ini termasuk memperkenalkan praktik pengajaran baru, mengimplementasikan teknologi pendidikan terbaru, dan mendorong

pendekatan-pendekatan kreatif dalam pembelajaran. Kemampuan untuk memimpin perubahan juga berarti bahwa pemimpin harus mampu mengelola resistensi terhadap perubahan, serta memastikan bahwa inovasi yang diterapkan benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi siswa dan sekolah.

Secara keseluruhan, untuk mewujudkan kepemimpinan instruksional yang efektif, seorang pemimpin pendidikan harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang teori dan praktik pembelajaran, keterampilan dalam pengembangan profesional guru, kompetensi dalam pengambilan keputusan berbasis data, kemampuan untuk membangun hubungan dan komunikasi yang efektif, serta kapasitas untuk memimpin perubahan dan inovasi. Dengan menguasai kemampuan-kemampuan ini, pemimpin instruksional dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung pembelajaran berkualitas tinggi dan memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan untuk mencapai potensi penuh mereka. Ini adalah tugas yang kompleks dan menuntut, tetapi juga sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang institusi pendidikan.

5. Dimensi-dimensi Kepemimpinan Instruksional

Kepemimpinan instruksional telah menjadi fokus utama dalam pendidikan modern karena kemampuannya untuk secara langsung memengaruhi kualitas pengajaran dan hasil belajar siswa. Dalam literatur pendidikan, kepemimpinan instruksional didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang diambil oleh pemimpin pendidikan untuk memastikan bahwa pengajaran dan pembelajaran di sekolah berjalan secara efektif dan efisien. Ini mencakup tanggung jawab yang luas, mulai dari pengembangan kurikulum hingga dukungan terhadap pengembangan profesional guru, serta pemantauan dan evaluasi hasil belajar siswa. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Leithwood et al. (2012), kepemimpinan instruksional adalah salah satu faktor kunci

yang menentukan keberhasilan sekolah dalam mencapai tujuan pendidikannya.

Dimensi pertama yang penting dalam kepemimpinan instruksional adalah pengembangan visi dan tujuan yang berpusat pada pembelajaran. Visi yang kuat dan tujuan yang jelas menjadi panduan utama bagi seluruh kegiatan di sekolah, memastikan bahwa semua upaya difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan. Robinson et al. (2011) menekankan bahwa pemimpin instruksional harus mampu merumuskan visi yang tidak hanya memotivasi staf pengajar tetapi juga dapat diimplementasikan secara praktis dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Visi ini berfungsi sebagai landasan bagi segala keputusan yang diambil dan strategi yang diterapkan, sehingga memungkinkan sekolah untuk bergerak secara konsisten menuju pencapaian hasil belajar yang optimal.

Pengawasan dan pemantauan proses pembelajaran merupakan dimensi lain yang sangat penting dalam kepemimpinan instruksional. Pemimpin pendidikan, seperti kepala sekolah, harus terlibat langsung dalam kegiatan pengajaran untuk memastikan bahwa kurikulum diimplementasikan dengan benar dan metode pengajaran yang digunakan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hallinger (2011) mencatat bahwa pemimpin instruksional yang efektif sering kali berperan sebagai "pengawas akademik," yang berarti mereka secara rutin melakukan observasi kelas, memberikan umpan balik kepada guru, dan terlibat dalam analisis hasil belajar siswa untuk mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan. Pengawasan ini juga mencakup tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung, di mana siswa dapat berkembang secara akademik dan sosial.

Selain itu, pengembangan kapasitas guru melalui dukungan berkelanjutan dan pelatihan profesional adalah dimensi yang tak kalah penting dalam kepemimpinan instruksional. Supovitz dan Tognatta

(2013) berpendapat bahwa pemimpin instruksional harus berperan aktif dalam menyediakan kesempatan bagi guru untuk mengembangkan keterampilan mereka dan tetap terupdate dengan praktik-praktik pengajaran terbaru. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan internal, workshop, serta kolaborasi antar guru. Pengembangan profesional ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru tetapi juga untuk menciptakan budaya pembelajaran di sekolah di mana inovasi dan peningkatan kualitas pengajaran menjadi norma.

Pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan juga menjadi dimensi penting dalam kepemimpinan instruksional. Dengan meningkatnya akses terhadap data pendidikan, pemimpin instruksional sekarang memiliki alat yang lebih kuat untuk menganalisis performa sekolah dan mengidentifikasi tren yang mungkin memerlukan intervensi. Heifetz dan Linsky (2017) menyoroti pentingnya pendekatan berbasis data dalam kepemimpinan pendidikan, di mana keputusan dibuat berdasarkan bukti empiris dan analisis yang mendalam. Data dari hasil ujian, penilaian siswa, serta survei guru dan orang tua dapat digunakan untuk menginformasikan kebijakan sekolah dan menetapkan prioritas untuk perbaikan berkelanjutan.

Dimensi terakhir yang perlu diperhatikan adalah penciptaan lingkungan sekolah yang inklusif dan mendukung. Fullan (2014) berpendapat bahwa pemimpin instruksional memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa sekolah mereka adalah tempat di mana semua siswa merasa aman, dihargai, dan didukung dalam perjalanan akademik mereka. Ini termasuk upaya untuk menciptakan budaya sekolah yang inklusif, di mana perbedaan dihormati dan setiap siswa, terlepas dari latar belakang mereka, memiliki kesempatan yang sama untuk sukses. Lingkungan yang mendukung ini juga mencakup keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam proses pendidikan,

memastikan bahwa ada dukungan eksternal yang cukup untuk mendukung keberhasilan siswa.

Secara keseluruhan, kepemimpinan instruksional adalah pendekatan yang kompleks dan multifaset yang memerlukan keterlibatan aktif pemimpin pendidikan dalam setiap aspek pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Melalui pengembangan visi yang jelas, pengawasan yang efektif, pengembangan kapasitas guru, pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan, dan penciptaan lingkungan sekolah yang inklusif, pemimpin instruksional dapat memainkan peran kunci dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan hasil belajar siswa. Penelitian dalam dekade terakhir menunjukkan bahwa pemimpin yang berhasil dalam menerapkan dimensi-dimensi ini secara konsisten mampu menciptakan sekolah yang unggul dan berkelanjutan.

6. Kepemimpinan Instruksional dan Manajemen Perubahan

Kepemimpinan instruksional dalam konteks manajemen perubahan di lingkungan Sekolah Dasar (SD) menuntut peran yang multifaset dari kepala sekolah dan guru. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai administrator yang menjalankan operasional sehari-hari, tetapi juga sebagai agen perubahan yang aktif menavigasi tantangan, mengarahkan proses pembelajaran, memotivasi staf, dan memastikan kepemilikan bersama atas setiap inisiatif yang diterapkan. Peran ini menjadi semakin penting mengingat dinamika dunia pendidikan yang terus berubah, terutama dengan adanya reformasi kurikulum, perkembangan teknologi, dan meningkatnya tuntutan dari masyarakat terhadap kualitas pendidikan.

Sebagai navigator, kepala sekolah dan guru diharapkan mampu memahami dan menavigasi berbagai perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan. Navigasi dalam hal ini melibatkan kemampuan untuk menganalisis situasi, memetakan arah yang jelas, dan mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk

mencapai tujuan pendidikan. Menurut Fullan (2014), pemimpin yang efektif harus memiliki kemampuan untuk melihat peluang di tengah tantangan dan mengarahkan sekolah menuju visi jangka panjang yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, kepala sekolah dan guru perlu terus memperbarui pengetahuan mereka tentang tren pendidikan terbaru dan bagaimana tren tersebut dapat diadaptasi untuk meningkatkan hasil belajar siswa.

Selain itu, peran kepala sekolah dan guru sebagai pemimpin sangatlah krusial dalam manajemen perubahan. Kepemimpinan di sini bukan hanya soal memberikan arahan, tetapi juga menciptakan budaya sekolah yang mendukung perubahan dan inovasi. Leithwood et al. (2012) menekankan bahwa pemimpin instruksional yang baik mampu menginspirasi dan memotivasi guru serta staf untuk berpartisipasi aktif dalam proses perubahan. Mereka harus membangun lingkungan yang aman untuk bereksperimen dengan metode pengajaran baru dan mendorong kolaborasi antar guru dalam mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih efektif.

Sebagai penggerak perubahan, kepala sekolah dan guru harus proaktif dalam mengidentifikasi dan mendorong inisiatif-inisiatif yang dapat membawa perbaikan dalam proses pembelajaran. Peran ini sangat penting mengingat bahwa perubahan yang signifikan dalam pendidikan sering kali memerlukan inisiatif dari dalam organisasi, bukan hanya dari kebijakan eksternal. Robinson (2011) menggarisbawahi bahwa pemimpin yang efektif adalah mereka yang tidak takut untuk mengambil risiko dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan yang dapat memobilisasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung perubahan tersebut. Ini termasuk menyediakan pelatihan yang memadai bagi guru untuk mengimplementasikan perubahan dan memastikan adanya dukungan yang berkelanjutan.

Kepemilikan adalah aspek lain yang tak kalah penting dalam kepemimpinan instruksional. Ketika kepala sekolah dan guru merasa memiliki tanggung jawab penuh atas setiap perubahan yang dilakukan, mereka akan lebih berkomitmen untuk memastikan keberhasilan perubahan tersebut. Spillane (2015) mengamati bahwa kepemilikan ini tidak hanya terbatas pada para pemimpin, tetapi juga perlu melibatkan seluruh komunitas sekolah, termasuk siswa dan orang tua. Dengan demikian, perubahan yang dilakukan bukan hanya menjadi tanggung jawab individu tertentu, tetapi merupakan upaya kolektif yang didukung oleh seluruh anggota komunitas sekolah.

Lebih lanjut, manajemen perubahan dalam pendidikan dasar juga melibatkan kemampuan untuk menghadapi resistensi dan mengelola dinamika yang muncul selama proses perubahan. Heifetz dan Linsky (2017) menyatakan bahwa resistensi adalah bagian alami dari setiap proses perubahan, dan pemimpin harus memiliki strategi untuk menghadapinya. Ini termasuk membangun komunikasi yang transparan, menjelaskan manfaat perubahan, dan melibatkan semua pihak dalam setiap tahap perubahan. Dengan pendekatan ini, resistensi dapat diminimalkan dan keterlibatan serta dukungan terhadap perubahan dapat dimaksimalkan.

Dengan menggabungkan navigasi yang cermat, kepemimpinan yang inspiratif, dorongan untuk perubahan, dan kepemilikan yang kuat, kepala sekolah dan guru di Sekolah Dasar dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam lingkungan pendidikan mereka. Penelitian dalam dekade terakhir menunjukkan bahwa pemimpin instruksional yang mampu menjalankan peran-peran ini secara holistik tidak hanya meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga menciptakan budaya sekolah yang adaptif dan berorientasi pada perbaikan terus-menerus. Ini menjadi dasar penting bagi keberhasilan jangka panjang sekolah dan pencapaian tujuan pendidikan yang lebih tinggi.

7. Implikasi Kepemimpinan Instruksional dengan Manajemen Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Nasional

Kepemimpinan instruksional memiliki dampak yang signifikan terhadap manajemen pendidikan dan implementasi kebijakan pendidikan nasional. Hal ini disebabkan oleh peran kunci yang dimainkan oleh pemimpin pendidikan, terutama kepala sekolah, dalam menerjemahkan kebijakan nasional menjadi praktik-praktik nyata di tingkat sekolah. Dalam konteks ini, kepemimpinan instruksional tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga pada pengembangan kurikulum, pengelolaan proses pembelajaran, dan peningkatan kualitas pengajaran.

Salah satu aspek penting dari kepemimpinan instruksional adalah kemampuannya untuk mengarahkan fokus seluruh sekolah pada tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam kebijakan nasional. Menurut Hallinger (2011), pemimpin instruksional bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pendidikan yang diterapkan di sekolah tidak hanya diadopsi secara formal, tetapi juga diimplementasikan dengan cara yang efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini melibatkan pengawasan langsung terhadap proses pembelajaran, serta bimbingan dan dukungan kepada guru dalam mengembangkan strategi pengajaran yang sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Selain itu, kepemimpinan instruksional juga berperan penting dalam menyesuaikan kebijakan pendidikan nasional dengan kebutuhan lokal sekolah. Leithwood et al. (2012) menyoroti pentingnya pemimpin pendidikan dalam menginterpretasikan kebijakan secara kontekstual, sehingga dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik sekolah. Ini termasuk pemahaman tentang latar belakang sosial-ekonomi siswa, lingkungan komunitas, serta potensi dan tantangan yang dihadapi oleh sekolah. Dengan demikian, pemimpin instruksional berperan sebagai penghubung yang

mengintegrasikan kebijakan nasional dengan realitas lokal, memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan spesifik siswa dan lingkungan sekolah.

Implikasi lain dari kepemimpinan instruksional terhadap manajemen pendidikan adalah pengembangan budaya evaluasi yang berkelanjutan di sekolah. Heifetz dan Linsky (2017) menekankan bahwa pemimpin instruksional harus mendorong sekolah untuk menerapkan sistem evaluasi yang sistematis dan berbasis data, yang memungkinkan identifikasi area yang memerlukan perbaikan. Ini termasuk evaluasi terhadap kualitas pengajaran, efektivitas kurikulum, serta pencapaian hasil belajar siswa. Dengan menggunakan data yang akurat dan relevan, pemimpin instruksional dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan terukur, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah.

Lebih lanjut, kepemimpinan instruksional juga berperan dalam manajemen perubahan yang sering kali diperlukan untuk mengimplementasikan kebijakan pendidikan nasional yang baru. Dalam menghadapi reformasi pendidikan atau perubahan kebijakan, pemimpin instruksional harus mampu mengelola proses transisi dengan efektif. Fullan (2014) menekankan bahwa kepemimpinan instruksional yang kuat dapat membantu mengurangi resistensi terhadap perubahan dan memastikan bahwa semua anggota komunitas sekolah terlibat dalam proses adaptasi. Ini memerlukan komunikasi yang jelas, dukungan terhadap pengembangan profesional, serta penyediaan sumber daya yang memadai untuk mendukung implementasi kebijakan baru.

Selain itu, kepemimpinan instruksional memiliki implikasi dalam membangun kemitraan yang kuat dengan komunitas dan pemangku kepentingan lainnya. Hargreaves dan Fullan (2012) menyatakan bahwa pemimpin pendidikan harus menjalin hubungan yang baik dengan orang tua, komunitas lokal, dan pemangku

kepentingan lainnya untuk mendukung implementasi kebijakan pendidikan nasional. Kemitraan yang efektif ini dapat menyediakan dukungan tambahan bagi siswa, serta memperkuat relevansi pendidikan dengan kebutuhan dan aspirasi komunitas. Melalui kemitraan yang kuat, sekolah dapat lebih mudah mendapatkan dukungan dalam bentuk sumber daya, keahlian, dan kesempatan belajar di luar kelas, yang semuanya berkontribusi pada pencapaian tujuan pendidikan yang lebih luas.

Secara keseluruhan, kepemimpinan instruksional memiliki implikasi yang mendalam terhadap manajemen pendidikan dan implementasi kebijakan pendidikan nasional. Dengan fokus pada peningkatan kualitas pengajaran, adaptasi kebijakan sesuai dengan kebutuhan lokal, pengembangan budaya evaluasi, manajemen perubahan, dan pembangunan kemitraan dengan komunitas, pemimpin instruksional dapat memastikan bahwa kebijakan pendidikan nasional diterapkan dengan cara yang mendukung pencapaian hasil belajar yang optimal. Peran ini menuntut pemimpin pendidikan untuk memiliki keterampilan yang komprehensif dalam berbagai aspek manajemen pendidikan, serta komitmen yang kuat untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah mereka.

8. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sekolah

a. Tugas Pokok Kepala Sekolah

Kepala sekolah memainkan peran sentral dalam keberhasilan operasional dan akademik sebuah institusi pendidikan. Tugas pokok kepala sekolah tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga mencakup tanggung jawab yang lebih luas dalam pengembangan kurikulum, manajemen sumber daya manusia, serta penciptaan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa dan guru. Kepala sekolah bertindak sebagai pemimpin instruksional, pengelola, motivator, dan juga sebagai penghubung antara sekolah dan komunitas yang lebih

luas. Dalam peran multifaset ini, kepala sekolah diharapkan untuk memimpin sekolah dengan visi yang jelas, kemampuan manajerial yang kuat, dan komitmen untuk peningkatan berkelanjutan.

Salah satu tugas utama kepala sekolah adalah mengembangkan dan mengimplementasikan visi dan misi sekolah. Kepala sekolah bertanggung jawab untuk merumuskan visi yang mencerminkan aspirasi jangka panjang sekolah dan memastikan bahwa semua anggota staf dan siswa memahami serta mendukung visi tersebut. Visi ini kemudian dijabarkan dalam misi yang lebih konkret, yang mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan pendidikan sekolah. Menurut Leithwood et al. (2012), kepala sekolah yang efektif mampu menerjemahkan visi ini ke dalam praktik sehari-hari di sekolah, sehingga setiap keputusan dan tindakan yang diambil selaras dengan tujuan jangka panjang sekolah.

Selain itu, kepala sekolah juga memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan kurikulum dan pengajaran**.** Kepala sekolah harus memastikan bahwa kurikulum yang digunakan di sekolah sesuai dengan standar nasional dan relevan dengan kebutuhan siswa. Ini melibatkan pengawasan terhadap proses pengajaran, evaluasi hasil belajar siswa, serta memberikan dukungan dan pelatihan bagi guru untuk meningkatkan kompetensi mereka. Hallinger (2011) menekankan bahwa kepala sekolah harus memainkan peran aktif dalam memantau dan mengevaluasi efektivitas pengajaran di kelas, serta menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk membantu guru dalam mencapai tujuan pembelajaran.

Manajemen sumber daya manusia juga merupakan tugas penting dari kepala sekolah. Kepala sekolah bertanggung jawab untuk merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan staf yang berkualitas. Ini termasuk melakukan evaluasi kinerja, memberikan umpan balik konstruktif, dan menyediakan kesempatan pengembangan profesional yang berkelanjutan. Menurut Robbins dan

Judge (2013), manajemen sumber daya manusia yang efektif adalah kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pengajaran dan hasil belajar siswa.

Dalam hal manajemen keuangan, kepala sekolah bertanggung jawab untuk mengelola anggaran sekolah secara efektif. Ini melibatkan perencanaan anggaran, pengalokasian dana sesuai dengan prioritas sekolah, serta memastikan bahwa dana digunakan dengan bijaksana untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan operasional sekolah. Pengelolaan keuangan yang baik adalah salah satu aspek penting dalam menjaga keberlanjutan sekolah dan memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan untuk kepentingan terbaik siswa dan staf.

b. Fungsi Kepala Sekolah

Fungsi kepala sekolah sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, pemimpin, inovator, dan motivator merupakan elemen fundamental dalam menggerakkan roda organisasi pendidikan. Dalam konteks ini, peran kepala sekolah tidak hanya terbatas pada manajemen administratif, tetapi juga mencakup tanggung jawab yang luas dalam membentuk, mengarahkan, dan memotivasi seluruh komunitas sekolah. Peran ini menjadi semakin penting di era pendidikan yang terus berkembang, di mana perubahan cepat dalam teknologi, kurikulum, dan kebutuhan siswa menuntut kepala sekolah untuk beradaptasi dan memimpin dengan visi yang jelas.

Sebagai edukator, kepala sekolah berada di garis depan dalam mengarahkan proses pembelajaran di sekolah. Fungsi ini menuntut kepala sekolah untuk tidak hanya memahami teori dan praktik pendidikan, tetapi juga menerapkannya dalam konteks sekolah mereka. Kepala sekolah harus memastikan bahwa kurikulum diimplementasikan dengan efektif dan bahwa metode pengajaran yang digunakan mampu memenuhi kebutuhan semua siswa. Menurut

Leithwood et al. (2012), kepala sekolah yang berperan sebagai edukator harus berperan aktif dalam membimbing guru, menyediakan sumber daya pendidikan yang dibutuhkan, dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Ini mencakup upaya untuk mendorong inovasi dalam pengajaran, menyesuaikan metode pembelajaran dengan gaya belajar siswa, dan mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran.

Dalam kapasitasnya sebagai manajer, kepala sekolah bertanggung jawab atas pengelolaan seluruh sumber daya sekolah, termasuk sumber daya manusia, finansial, dan fisik. Hallinger (2011) menekankan bahwa manajemen yang efektif mencakup perencanaan strategis, pengorganisasian, dan pengawasan atas berbagai aspek operasional sekolah. Kepala sekolah harus mampu mengalokasikan sumber daya dengan bijaksana, memastikan bahwa semua kebutuhan sekolah terpenuhi tanpa mengabaikan aspek efisiensi dan keberlanjutan. Fungsi manajerial ini juga melibatkan pengelolaan risiko, di mana kepala sekolah harus mampu mengantisipasi tantangan dan merespons dengan cepat untuk menghindari gangguan pada proses pendidikan.

Sebagai administrator, kepala sekolah mengemban tugas administratif yang kompleks, yang mencakup pengelolaan anggaran, perencanaan keuangan, penataan jadwal, serta pengelolaan catatan dan dokumentasi. Robbins dan Judge (2013) menunjukkan bahwa administrasi yang efektif adalah landasan dari operasional sekolah yang efisien. Kepala sekolah harus memastikan bahwa semua proses administratif berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, mendukung kegiatan akademik, dan memenuhi kebutuhan seluruh warga sekolah. Tugas administratif ini juga mencakup pengawasan terhadap ketaatan hukum dan kebijakan pendidikan yang berlaku, serta memastikan bahwa sekolah mematuhi standar yang ditetapkan oleh otoritas pendidikan.

Fungsi supervisor dalam kepemimpinan kepala sekolah adalah salah satu yang paling penting dalam memastikan kualitas pendidikan. Kepala sekolah harus melakukan pengawasan yang sistematis terhadap kinerja guru dan staf, serta mengevaluasi efektivitas program pendidikan yang berjalan. Fullan (2014) menyebutkan bahwa kepala sekolah sebagai supervisor harus menyediakan umpan balik yang konstruktif dan membangun kepada para guru, serta mendorong mereka untuk terus berkembang secara profesional. Supervisi ini tidak hanya berfokus pada pengajaran di kelas, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap kegiatan ekstrakurikuler, pengembangan siswa, dan interaksi antara guru dan siswa. Dengan pengawasan yang ketat namun suportif, kepala sekolah dapat memastikan bahwa semua komponen sekolah berfungsi optimal untuk mendukung pencapaian akademik dan perkembangan holistik siswa.

Sebagai leader atau pemimpin, kepala sekolah memiliki tanggung jawab untuk menetapkan arah strategis sekolah dan menginspirasi seluruh komunitas sekolah untuk bekerja menuju tujuan bersama. Spillane (2015) mengemukakan bahwa kepemimpinan yang efektif memerlukan kemampuan untuk mengartikulasikan visi yang jelas dan memobilisasi sumber daya manusia serta material untuk mencapai tujuan tersebut. Kepemimpinan dalam konteks sekolah tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses membangun tim yang kuat, menciptakan budaya sekolah yang positif, dan mendorong partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan. Pemimpin sekolah yang baik harus mampu beradaptasi dengan perubahan, mengatasi tantangan, dan tetap fokus pada pencapaian tujuan jangka panjang sekolah.

Sebagai inovator, kepala sekolah dituntut untuk menjadi agen perubahan yang selalu mencari cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah mereka. Inovasi dalam pendidikan bisa berupa penerapan teknologi baru, pengembangan kurikulum yang lebih

relevan, atau penyesuaian metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan siswa yang beragam. Sun dan Leithwood (2015) berpendapat bahwa kepala sekolah yang berfungsi sebagai inovator harus mampu melihat peluang di tengah tantangan, serta berani mengambil risiko untuk mencoba pendekatan baru yang dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Inovasi juga mencakup upaya untuk membangun kemitraan dengan pihak luar, seperti komunitas dan organisasi lain, untuk memperkaya pengalaman belajar siswa.

Terakhir, fungsi kepala sekolah sebagai motivator sangat penting dalam menciptakan lingkungan sekolah yang dinamis dan penuh semangat. Kepala sekolah harus mampu memotivasi guru dan staf untuk memberikan yang terbaik dalam pekerjaan mereka, serta mendorong siswa untuk berprestasi dan mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Heifetz dan Linsky (2017) menekankan bahwa motivasi yang efektif memerlukan pemahaman yang mendalam tentang apa yang memotivasi individu dan bagaimana menciptakan lingkungan yang mendukung motivasi tersebut. Kepala sekolah harus mampu memberikan penghargaan yang sesuai, menciptakan suasana kerja yang positif, dan membangun hubungan yang baik dengan semua anggota komunitas sekolah. Motivasi ini juga harus diarahkan untuk mendorong inovasi, meningkatkan kinerja, dan menciptakan budaya sekolah yang kuat dan inklusif.

Secara keseluruhan, fungsi kepala sekolah sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, pemimpin, inovator, dan motivator merupakan elemen kunci dalam memastikan bahwa sekolah dapat berfungsi dengan baik dan mencapai tujuannya. Kepala sekolah yang sukses adalah mereka yang mampu menjalankan semua fungsi ini secara efektif, menciptakan lingkungan belajar yang produktif, dan memimpin sekolah menuju pencapaian yang lebih tinggi. Dengan demikian, kepala sekolah bukan hanya seorang manajer, tetapi juga seorang pemimpin yang visioner, inovatif, dan berorientasi pada hasil,

yang selalu siap menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Kepala sekolah juga bertindak sebagai penghubung antara sekolah dan komunitas. Mereka harus membangun dan memelihara hubungan yang baik dengan orang tua, komunitas lokal, dan pemangku kepentingan lainnya. Ini dapat dilakukan melalui komunikasi yang efektif, keterlibatan dalam kegiatan komunitas, dan partisipasi aktif dalam kemitraan yang bermanfaat bagi sekolah. Menurut Epstein (2011), kepala sekolah yang mampu menjalin hubungan yang kuat dengan komunitas dapat menciptakan dukungan yang lebih luas untuk program-program sekolah dan memperkaya pengalaman belajar siswa.

Selain itu, kepala sekolah juga berperan sebagai pemimpin dalam inovasi dan perubahan**.** Dalam era yang terus berubah dengan cepat, kepala sekolah harus mampu mengidentifikasi kebutuhan untuk perubahan, mengelola proses perubahan, dan memastikan bahwa sekolah tetap relevan dengan perkembangan terkini di bidang pendidikan. Ini termasuk mengadopsi teknologi baru, mengimplementasikan pendekatan pengajaran inovatif, dan memastikan bahwa sekolah mampu beradaptasi dengan tuntutan globalisasi dan perubahan kurikulum.

Secara keseluruhan, tugas pokok kepala sekolah sangat kompleks dan membutuhkan kombinasi keterampilan kepemimpinan, manajerial, dan interpersonal. Kepala sekolah tidak hanya bertanggung jawab atas operasional sehari-hari sekolah, tetapi juga harus memastikan bahwa sekolah terus berkembang dan mampu memberikan pendidikan yang berkualitas tinggi bagi semua siswa. Dengan memainkan peran multifungsi ini, kepala sekolah berkontribusi secara signifikan terhadap keberhasilan institusi pendidikan dan pencapaian tujuan pendidikan yang lebih luas.

9. Tugas Pokok dan Fungsi Guru

a. Tugas Pokok Guru

Tugas pokok guru di Sekolah Dasar (SD) memainkan peran penting dalam membentuk dasar pendidikan anak-anak yang akan menentukan keberhasilan mereka di jenjang pendidikan selanjutnya. Guru di tingkat ini tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing, fasilitator, dan model bagi siswa dalam proses pembelajaran dan pengembangan karakter. Dalam dekade terakhir, para ahli pendidikan telah menekankan pentingnya peran guru SD dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan holistik, yang tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga pada pengembangan sosial, emosional, dan moral siswa.

Salah satu tugas pokok guru di SD adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran. Perencanaan pembelajaran mencakup pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku, serta adaptasi metode dan strategi pengajaran yang relevan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Menurut Mulyasa (2018), perencanaan yang matang adalah kunci untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pembelajaran dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Guru harus mampu menyusun RPP yang tidak hanya mencakup tujuan pembelajaran, tetapi juga metode pengajaran, media, dan alat evaluasi yang akan digunakan.

Pelaksanaan pembelajaran adalah inti dari tugas pokok guru, di mana guru diharapkan untuk mengelola kelas secara efektif dan menciptakan suasana belajar yang interaktif dan partisipatif. Dalam hal ini, guru berperan sebagai fasilitator yang mendorong siswa untuk aktif terlibat dalam proses belajar, baik secara individual maupun kelompok. Menurut Suparlan (2013), guru SD harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik dan mampu menyesuaikan

metode pengajaran mereka dengan kebutuhan siswa yang beragam. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap siswa, terlepas dari perbedaan kemampuan dan latar belakang, dapat mengakses dan memahami materi yang diajarkan.

Evaluasi pembelajaran merupakan tugas pokok lain yang harus dilakukan oleh guru di SD. Evaluasi tidak hanya berfungsi untuk menilai pencapaian siswa, tetapi juga untuk memberikan umpan balik yang berguna bagi peningkatan proses pembelajaran itu sendiri. Anderson dan Krathwohl (2013) menyatakan bahwa evaluasi yang efektif harus bersifat formatif dan sumatif. Evaluasi formatif dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan siswa secara dini, sehingga guru dapat memberikan intervensi yang tepat waktu. Sementara itu, evaluasi sumatif dilakukan pada akhir periode belajar untuk menilai sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai.

Selain peran akademik, guru SD juga bertanggung jawab atas pengembangan karakter siswa. Di tingkat dasar, guru harus menanamkan nilai-nilai moral dan sosial yang akan membentuk kepribadian siswa di masa depan. Pembentukan karakter ini tidak hanya dilakukan melalui pengajaran formal di kelas, tetapi juga melalui interaksi sehari-hari, di mana guru harus menjadi teladan dalam hal kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Menurut Nuh (2014), guru SD memiliki peran yang sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai dasar yang akan menjadi landasan moral bagi siswa sepanjang hidup mereka.

Guru SD juga berperan sebagai penghubung antara sekolah, siswa, dan orang tua. Komunikasi yang efektif antara guru dan orang tua sangat penting untuk mendukung proses belajar siswa di rumah. Senge (2012) mengemukakan bahwa guru harus secara rutin berkomunikasi dengan orang tua untuk memberikan informasi tentang perkembangan akademik dan non-akademik siswa. Melalui kerja sama

yang baik antara guru dan orang tua, siswa akan mendapatkan dukungan yang konsisten baik di sekolah maupun di rumah, yang akan membantu mereka mencapai potensi maksimal.

Selain tugas-tugas utama tersebut, guru di SD juga memiliki tanggung jawab administratif, meskipun tidak menjadi fokus utama. Tugas ini mencakup pengelolaan catatan kehadiran siswa, pelaporan hasil evaluasi, dan pengelolaan dokumen-dokumen pembelajaran. Meski bersifat administratif, tugas ini penting untuk memastikan kelancaran proses pendidikan dan akuntabilitas kinerja guru.

Secara keseluruhan, tugas pokok guru di Sekolah Dasar sangatlah kompleks dan multidimensional. Selain sebagai pengajar, guru juga berperan sebagai pembimbing, pembentuk karakter, fasilitator pembelajaran, komunikator, dan administrator. Dengan menjalankan peran-peran ini secara efektif, guru di SD dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan fondasi pendidikan yang kuat bagi siswa, yang tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pengembangan karakter yang baik dan keterampilan sosial yang diperlukan dalam kehidupan mereka di masa depan.

b. Fungsi Guru

Fungsi guru dalam pendidikan sangatlah kompleks dan meliputi berbagai aspek yang berkontribusi pada perkembangan holistik siswa. Salah satu fungsi utama guru adalah sebagai pendidik, di mana guru bertanggung jawab tidak hanya untuk mentransfer pengetahuan akademik tetapi juga untuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika kepada siswa. Guru sebagai pendidik berperan dalam membentuk karakter siswa, yang merupakan fondasi penting bagi perkembangan pribadi dan sosial mereka di masa depan. Menurut Mulyasa (2018), guru harus mampu menjadi figur teladan yang mempengaruhi perilaku dan sikap siswa melalui tindakan dan kata-kata mereka. Dalam peran

ini, guru harus menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, kerja sama, dan tanggung jawab, yang akan menjadi bekal penting bagi siswa dalam menjalani kehidupan.

Sebagai pengajar, guru memiliki tanggung jawab utama untuk menyampaikan pengetahuan dan keterampilan kepada siswa. Fungsi ini menuntut guru untuk menguasai materi pelajaran dengan baik dan mampu menyampaikannya secara efektif kepada siswa. Selain itu, guru harus mampu menggunakan berbagai metode dan strategi pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Pendekatan yang bervariasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap siswa, dengan latar belakang dan kemampuan yang berbeda, dapat mengakses dan memahami materi yang diajarkan. Dalam dekade terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Darling-Hammond et al. (2017) menunjukkan bahwa guru yang memiliki kemampuan pedagogis yang kuat dapat meningkatkan pencapaian akademik siswa secara signifikan. Oleh karena itu, penguasaan pedagogi yang baik menjadi aspek krusial dalam fungsi guru sebagai pengajar.

Selain itu, fungsi guru sebagai pembimbing juga sangat penting dalam mendukung perkembangan siswa, baik secara akademik maupun emosional. Guru berperan sebagai pendamping siswa dalam proses belajar, membantu mereka menghadapi tantangan, dan memberikan bimbingan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan pendidikan dan kehidupan mereka. Fungsi pembimbing ini mencakup peran guru dalam mengenali potensi dan kebutuhan siswa secara individual, serta memberikan dukungan yang dibutuhkan untuk membantu mereka mencapai potensi maksimal. Menurut Zins et al. (2016), guru yang berperan sebagai pembimbing dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung, yang memungkinkan siswa untuk merasa percaya diri dalam mengeksplorasi pengetahuan dan mengembangkan keterampilan mereka.

Fungsi terakhir yang tak kalah penting adalah sebagai evaluator. Guru bertanggung jawab untuk mengevaluasi perkembangan akademik dan karakter siswa secara menyeluruh. Evaluasi ini tidak hanya berfungsi untuk menilai sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran, tetapi juga untuk memberikan umpan balik yang konstruktif yang dapat membantu siswa untuk terus berkembang. Dalam konteks ini, evaluasi yang dilakukan oleh guru harus bersifat holistik, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dari perkembangan siswa. Menurut Black dan Wiliam (2018), evaluasi yang efektif melibatkan proses penilaian berkelanjutan yang memungkinkan guru untuk memantau kemajuan siswa secara real-time dan melakukan intervensi yang diperlukan untuk mengatasi kesulitan yang mungkin dihadapi siswa.

Secara keseluruhan, fungsi-fungsi guru dalam pendidikan mencakup peran yang sangat luas dan mendalam, mulai dari pendidik, pengajar, pembimbing, hingga evaluator. Setiap fungsi tersebut saling berkaitan dan berkontribusi terhadap pembentukan siswa yang tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan siap menghadapi tantangan kehidupan. Guru yang efektif adalah mereka yang mampu menjalankan semua fungsi ini dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan dedikasi, serta yang terus berupaya untuk mengembangkan diri mereka agar dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi perkembangan siswa. Dalam konteks pendidikan yang terus berkembang, kemampuan guru untuk beradaptasi dan berinovasi dalam menjalankan fungsi-fungsinya menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan lingkungan belajar yang bermakna dan berkualitas bagi semua siswa.

10. Tugas Pokok dan Fungsi Pengawas Sekolah Dasar

a. Tugas Pokok Pengawas Sekolah

Pengawas sekolah dasar memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pendidikan, khususnya dalam memastikan bahwa proses

pendidikan di tingkat sekolah dasar berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tugas pokok pengawas sekolah dasar mencakup berbagai aspek, mulai dari pembinaan guru, supervisi pelaksanaan kurikulum, hingga pengawasan terhadap manajemen sekolah. Pengawas sekolah dasar bertindak sebagai jembatan antara kebijakan pendidikan di tingkat nasional dan implementasi di lapangan, memastikan bahwa setiap sekolah dasar mampu mencapai tujuan pendidikan nasional.

Salah satu tugas utama pengawas sekolah dasar adalah melakukan supervisi terhadap proses pembelajaran dan pengajaran di sekolah. Menurut Purwanto (2017), supervisi ini mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan kurikulum, metode pengajaran yang digunakan oleh guru, serta efektivitas kegiatan pembelajaran di kelas. Pengawas harus memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan sesuai dengan standar nasional dan mampu mengakomodasi kebutuhan siswa di sekolah dasar. Dalam konteks ini, pengawas juga berperan dalam memberikan bimbingan dan masukan kepada guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Supervisi yang dilakukan oleh pengawas tidak hanya bersifat evaluatif tetapi juga bersifat pembinaan, di mana pengawas membantu guru mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi dalam proses pengajaran.

Selain itu, pengawas sekolah dasar juga bertanggung jawab atas pengembangan profesional guru. Suparno (2020) menyatakan bahwa salah satu tugas penting pengawas adalah memastikan bahwa guru-guru di sekolah dasar terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan profesional. Pengawas harus mampu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah, serta mengorganisir pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensi guru. Pengawas juga harus mendorong guru untuk mengikuti perkembangan terbaru dalam dunia pendidikan,

sehingga mereka dapat mengimplementasikan metode dan strategi pengajaran yang inovatif di kelas.

Tugas pengawas sekolah dasar juga mencakup pengawasan terhadap manajemen sekolah, termasuk administrasi sekolah, pengelolaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan keuangan. Pengawas bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua aspek manajemen sekolah berjalan dengan baik dan transparan, serta mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Supriyadi (2019) menekankan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pengawas harus mencakup penilaian terhadap efektivitas manajemen sekolah, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja sekolah. Dalam hal ini, pengawas berperan sebagai konsultan yang membantu kepala sekolah dalam mengelola sekolah secara lebih efektif dan efisien.

Selain tugas-tugas tersebut, pengawas sekolah dasar juga memiliki peran penting dalam mengevaluasi kinerja sekolah secara keseluruhan. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap hasil belajar siswa, kinerja guru, serta efektivitas program-program yang diterapkan di sekolah. Menurut Suyanto dan Hisyam (2022), evaluasi yang dilakukan oleh pengawas harus bersifat komprehensif dan berkesinambungan, dengan tujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sekolah, serta untuk merumuskan strategi perbaikan yang dapat diterapkan. Hasil evaluasi ini kemudian harus digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan di sekolah dasar.

Secara keseluruhan, tugas pokok pengawas sekolah dasar mencakup berbagai aspek yang krusial dalam sistem pendidikan. Pengawas tidak hanya bertanggung jawab atas pengawasan teknis dan administratif, tetapi juga berperan dalam pembinaan guru, pengembangan profesional, serta evaluasi dan perbaikan kinerja sekolah. Dengan melaksanakan tugas-tugas ini secara efektif,

pengawas sekolah dasar dapat memastikan bahwa setiap sekolah dasar mampu memberikan pendidikan yang berkualitas, serta mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional.

b. Fungsi Pengawas Sekolah Dasar

Fungsi pengawas sekolah dalam sistem pendidikan tidak hanya terbatas pada pengawasan teknis dan administratif, tetapi mencakup peran strategis dalam memastikan bahwa tujuan pendidikan nasional tercapai. Pengawas sekolah berfungsi sebagai pemantau, pembina, dan evaluator yang bertanggung jawab untuk mengawasi implementasi kebijakan pendidikan, kualitas proses pembelajaran, serta pengembangan profesional guru. Fungsi pengawas sekolah ini sangat penting dalam menjaga kualitas pendidikan, memastikan bahwa setiap sekolah menjalankan tugasnya dengan baik, dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk perbaikan berkelanjutan.

Salah satu fungsi utama pengawas sekolah adalah sebagai pemantau dan pengendali kualitas pendidikan. Menurut Supriyadi (2019), pengawas sekolah berperan dalam memantau pelaksanaan kurikulum, metode pengajaran, serta manajemen sekolah untuk memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai dengan standar nasional. Pengawasan yang dilakukan oleh pengawas bertujuan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin timbul dalam pelaksanaan proses pendidikan dan mengambil langkah-langkah korektif yang diperlukan. Pengawas juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan di sekolah sesuai dengan kebijakan pemerintah dan relevan dengan kebutuhan siswa.

Selain fungsi pemantauan, pengawas sekolah juga memiliki fungsi pembinaan. Suparno (2020) menekankan bahwa pengawas sekolah harus mampu memberikan bimbingan dan dukungan kepada guru dan kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan manajemen sekolah. Fungsi pembinaan ini mencakup berbagai

aspek, termasuk memberikan pelatihan kepada guru, membantu dalam pengembangan kurikulum, serta memberikan masukan dan saran untuk perbaikan praktik pengajaran. Pembinaan yang dilakukan oleh pengawas bersifat konstruktif dan bertujuan untuk memberdayakan guru serta meningkatkan kompetensi profesional mereka, sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik.

Fungsi pengawas sekolah sebagai evaluator juga sangat krusial. Pengawas bertanggung jawab untuk mengevaluasi kinerja sekolah secara menyeluruh, termasuk kinerja guru, hasil belajar siswa, dan efektivitas program-program yang diterapkan di sekolah. Menurut Suyanto dan Hisyam (2022), evaluasi yang dilakukan oleh pengawas harus bersifat holistik, mencakup aspek akademik dan non-akademik, serta dilakukan secara berkelanjutan. Hasil evaluasi ini tidak hanya digunakan untuk menilai kinerja sekolah, tetapi juga sebagai dasar untuk merumuskan strategi perbaikan yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Evaluasi yang baik memungkinkan pengawas untuk memberikan rekomendasi yang tepat kepada sekolah, serta mendorong perbaikan yang berkelanjutan.

Selain itu, pengawas sekolah juga berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan pendidikan di tingkat pusat dengan implementasi di lapangan. Dalam hal ini, pengawas sekolah harus mampu menyampaikan kebijakan-kebijakan terbaru dari pemerintah kepada sekolah, serta memastikan bahwa kebijakan tersebut diimplementasikan dengan benar dan efektif. Pengawas juga bertanggung jawab untuk melaporkan hasil-hasil pengawasan dan evaluasi kepada pihak yang lebih tinggi, seperti dinas pendidikan, sehingga kebijakan yang diambil dapat disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan.

Secara keseluruhan, fungsi pengawas sekolah sangat penting dalam menjaga kualitas dan efektivitas pendidikan. Pengawas sekolah tidak hanya bertindak sebagai pengawas dalam arti teknis, tetapi juga

sebagai pembina, evaluator, dan penghubung yang memainkan peran sentral dalam memastikan bahwa tujuan pendidikan nasional dapat tercapai. Dengan melaksanakan fungsi-fungsi ini secara efektif, pengawas sekolah dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan membentuk sistem pendidikan yang lebih baik.

BAB XI
PENGAWASAN DAN SUPERVISI PENDIDIKAN

A. Pendahuluan

Pengawasan dan supervisi pendidikan merupakan komponen penting dalam manajemen sekolah yang berfungsi untuk memastikan bahwa proses pendidikan berlangsung dengan efektif dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pengawasan dalam pendidikan mengacu pada serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memantau, mengevaluasi, dan memberikan laporan mengenai kinerja sekolah, termasuk efektivitas pengajaran, pengelolaan sumber daya, dan pencapaian tujuan pendidikan. Di sisi lain, supervisi lebih berfokus pada upaya pembinaan, bimbingan, dan pengembangan profesional bagi tenaga pendidik untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran.

Menurut Darling-Hammond et al. (2020), pengawasan dalam pendidikan adalah instrumen penting untuk memastikan bahwa semua komponen sistem pendidikan bekerja secara sinergis dalam mencapai tujuan akhir pendidikan, yaitu pencapaian hasil belajar yang optimal oleh siswa. Pengawasan yang dilakukan dengan baik dapat mendeteksi masalah lebih awal, memungkinkan pemimpin sekolah untuk segera mengambil langkah-langkah korektif sebelum masalah tersebut berdampak signifikan pada hasil belajar siswa. Lebih lanjut, pengawasan yang efektif juga membantu dalam mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat dibagikan dan diterapkan secara lebih luas di seluruh sekolah atau distrik.

Supervisi pendidikan, yang sering dipandang sebagai bagian integral dari pengawasan, lebih menekankan pada pembinaan dan pengembangan profesional bagi guru. Zepeda (2017) menegaskan

bahwa supervisi adalah proses kolaboratif yang bertujuan untuk mendukung guru dalam meningkatkan praktik pengajaran mereka. Dalam hal ini, supervisi bukan hanya sekadar kegiatan evaluatif, tetapi juga merupakan proses bimbingan yang berkelanjutan, di mana supervisor (seperti kepala sekolah atau pengawas) bekerja sama dengan guru untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan, memberikan umpan balik konstruktif, dan merancang strategi peningkatan. Dengan pendekatan ini, supervisi pendidikan dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung, di mana guru merasa dihargai dan didorong untuk terus belajar dan berinovasi.

Lebih jauh lagi, pengawasan dan supervisi pendidikan berperan dalam membentuk budaya sekolah yang positif dan inklusif. Fullan (2014) mengemukakan bahwa pemimpin sekolah yang efektif menggunakan pengawasan dan supervisi untuk membangun budaya sekolah yang kuat, di mana semua anggota komunitas sekolah—termasuk guru, siswa, dan staf—merasa termotivasi dan terlibat dalam proses pendidikan. Budaya sekolah yang positif ini penting karena berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan siswa dan guru, serta mendukung tercapainya tujuan-tujuan akademik.

Dalam konteks penerapan kurikulum, pengawasan dan supervisi memiliki peran yang sangat penting. Menurut Glatthorn, Boschee, dan Whitehead (2018), pengawasan yang berfokus pada implementasi kurikulum dapat memastikan bahwa kurikulum yang digunakan di sekolah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh otoritas pendidikan dan relevan dengan kebutuhan siswa. Supervisi, dalam hal ini, membantu guru memahami dan mengimplementasikan kurikulum secara efektif, serta menyesuaikan strategi pengajaran untuk memenuhi kebutuhan siswa yang beragam. Dengan demikian, pengawasan dan supervisi tidak hanya bertujuan untuk memantau kinerja, tetapi juga untuk mendukung guru dalam mencapai standar pengajaran yang tinggi.

Selain itu, perkembangan teknologi dan peningkatan penggunaan data dalam pengelolaan sekolah telah mengubah cara pengawasan dan supervisi dilakukan. Supovitz dan Tognatta (2013) menunjukkan bahwa penggunaan data secara efektif dalam supervisi pendidikan dapat meningkatkan akurasi pengambilan keputusan dan memungkinkan identifikasi lebih dini terhadap area yang memerlukan perbaikan. Data dari berbagai sumber, seperti hasil penilaian siswa, observasi kelas, dan survei kepuasan, dapat digunakan untuk memandu supervisi dan pengawasan, sehingga pemimpin sekolah dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan berbasis bukti.

Pengawasan dan supervisi juga memiliki implikasi penting terhadap kebijakan pendidikan. Dalam dekade terakhir, ada peningkatan perhatian terhadap pentingnya pengawasan dan supervisi sebagai alat untuk memastikan akuntabilitas dalam pendidikan. Heifetz dan Linsky (2017) berpendapat bahwa dalam era di mana transparansi dan akuntabilitas semakin ditekankan, pengawasan yang ketat dan supervisi yang mendukung menjadi semakin penting. Kebijakan pendidikan yang efektif harus mempertimbangkan mekanisme pengawasan dan supervisi yang memungkinkan pemantauan berkelanjutan terhadap kualitas pendidikan, serta menyediakan dukungan yang diperlukan bagi guru dan sekolah untuk terus berkembang.

Secara keseluruhan, pengawasan dan supervisi pendidikan adalah dua aspek krusial yang saling melengkapi dalam manajemen pendidikan. Pengawasan berfungsi sebagai mekanisme pemantauan dan evaluasi yang memastikan bahwa sekolah beroperasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sementara supervisi berfokus pada pengembangan profesional dan pemberdayaan guru. Dengan pendekatan yang tepat, pengawasan dan supervisi dapat membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih efektif, inklusif, dan

responsif terhadap kebutuhan siswa, serta mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang lebih luas.

B. Pengawasan Pendidikan

1. Hakekat Pengawasan Pendidikan

Pengawasan pendidikan merupakan salah satu elemen kunci dalam manajemen pendidikan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proses belajar-mengajar berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Hakikat pengawasan pendidikan terletak pada upaya sistematis untuk memantau, mengevaluasi, dan memperbaiki berbagai aspek operasional dalam institusi pendidikan, termasuk kualitas pengajaran, pencapaian siswa, dan efektivitas kebijakan pendidikan. Pengawasan ini bukan hanya tentang menemukan kekurangan atau masalah, tetapi juga tentang memberikan umpan balik yang konstruktif dan mendukung perkembangan serta perbaikan yang berkelanjutan.

Menurut Sergiovanni (2013), pengawasan pendidikan adalah proses yang melibatkan evaluasi kinerja guru, kurikulum, serta keseluruhan lingkungan belajar dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pengawasan harus dipahami sebagai tindakan proaktif yang bukan hanya berfokus pada pencapaian target tertentu, tetapi juga pada peningkatan kualitas pembelajaran dan pengembangan profesional tenaga pendidik. Dengan kata lain, pengawasan yang efektif tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga berperan dalam mengarahkan upaya perbaikan dan memberikan dukungan kepada guru dan staf.

Lebih lanjut, Glatthorn, Boschee, dan Whitehead (2018) menegaskan bahwa pengawasan pendidikan merupakan proses kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam pendidikan, termasuk guru, kepala sekolah, dan pengawas. Mereka berpendapat bahwa pengawasan yang baik harus didasarkan pada

prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan partisipasi, di mana setiap pihak memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses evaluasi dan pengambilan keputusan. Dalam hal ini, pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun budaya kualitas di sekolah, di mana semua pihak bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Selain itu, dalam dekade terakhir, peran pengawasan pendidikan semakin diperkuat dengan kemajuan teknologi dan penggunaan data. Supovitz dan Tognatta (2013) menunjukkan bahwa dengan memanfaatkan data yang akurat dan relevan, pengawasan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Data tentang kinerja siswa, hasil observasi kelas, dan umpan balik dari berbagai pihak dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kekuatan dan kelemahan dari sistem pendidikan yang ada. Pengawasan berbasis data ini memungkinkan para pemimpin pendidikan untuk membuat keputusan yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan.

Selain itu, pengawasan pendidikan juga memiliki dimensi moral dan etis yang penting. Heifetz dan Linsky (2017) menekankan bahwa pengawasan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, memastikan bahwa semua tindakan dan keputusan yang diambil mempertimbangkan kepentingan terbaik dari semua peserta didik. Pengawas pendidikan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan inklusivitas diimplementasikan dengan baik di sekolah, serta bahwa setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk sukses.

Pengawasan pendidikan memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam menjaga kualitas dan efektivitas proses pendidikan di berbagai tingkat institusi pendidikan. Pengawasan ini bukan hanya sekadar kegiatan administratif atau formalitas, tetapi merupakan bagian integral dari upaya untuk memastikan bahwa tujuan

pendidikan tercapai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Melalui pengawasan, pemimpin pendidikan dapat mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dalam sistem pendidikan, serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk perbaikan yang berkelanjutan.

2. Tujuan Pengawasan Pendidikan

Pengawasan pendidikan merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua aspek operasional pendidikan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Maksud dari pengawasan pendidikan adalah untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemantauan, evaluasi, dan perbaikan yang berkelanjutan terhadap berbagai kegiatan dan program pendidikan di sekolah. Pengawasan ini bertindak sebagai alat kontrol untuk memastikan bahwa proses pendidikan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan dan tetap berada di jalur yang benar untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Menurut Glanz (2018), pengawasan pendidikan bertujuan untuk memberikan umpan balik yang konstruktif kepada para pendidik dan pemimpin sekolah tentang kinerja mereka. Umpan balik ini sangat penting karena membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam proses pendidikan, sehingga dapat diambil langkah-langkah perbaikan yang tepat. Pengawasan tidak hanya berfokus pada penilaian, tetapi juga pada pemberdayaan pendidik untuk meningkatkan kompetensi mereka melalui pelatihan dan bimbingan yang berkelanjutan.

Selain itu, pengawasan pendidikan juga berfungsi untuk memastikan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan. Hallinger (2011) menyatakan bahwa pengawasan yang efektif memastikan bahwa semua kebijakan dan standar yang telah ditetapkan oleh otoritas pendidikan diterapkan secara konsisten di semua tingkat pendidikan. Ini mencakup pengawasan terhadap kurikulum, metode

pengajaran, dan evaluasi hasil belajar siswa. Dengan demikian, pengawasan berperan dalam menjaga keseragaman dan kualitas pendidikan yang diberikan di berbagai sekolah.

Lebih jauh, pengawasan pendidikan juga memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya pendidikan. Supovitz dan Tognatta (2013) menekankan bahwa pengawasan yang baik dapat membantu sekolah dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya, baik itu sumber daya manusia, keuangan, maupun fasilitas fisik. Dengan pengawasan yang tepat, kepala sekolah dan pemimpin pendidikan lainnya dapat memastikan bahwa semua sumber daya digunakan secara maksimal untuk mendukung proses pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan.

Pengawasan pendidikan juga bertujuan untuk menciptakan budaya sekolah yang mendukung pembelajaran. Fullan (2014) menekankan bahwa pengawasan yang berfokus pada pembinaan dan pengembangan profesional dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa dan guru. Dalam konteks ini, pengawasan tidak hanya bertindak sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mendorong kolaborasi, inovasi, dan perbaikan berkelanjutan di dalam sekolah. Pengawasan yang berorientasi pada pengembangan membantu guru merasa didukung dan termotivasi untuk terus meningkatkan praktik pengajaran mereka.

Secara keseluruhan, pengawasan pendidikan memiliki maksud dan tujuan yang sangat penting dalam sistem pendidikan. Ia berfungsi sebagai mekanisme kontrol dan evaluasi untuk memastikan bahwa semua aspek pendidikan, mulai dari pengajaran hingga manajemen sumber daya, berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan pengawasan yang efektif, kualitas pendidikan dapat terus ditingkatkan, menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi

siswa dan memastikan bahwa tujuan pendidikan nasional dapat tercapai dengan baik.

3. Ruang Lingkup Pengawasan Pendidikan

Pengawasan pendidikan merupakan salah satu elemen penting dalam sistem manajemen pendidikan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proses pendidikan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Ruang lingkup pengawasan pendidikan mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi seluruh kegiatan yang ada di institusi pendidikan. Pengawasan ini dilakukan untuk menjamin bahwa tujuan pendidikan tercapai secara efektif dan efisien, serta untuk memastikan bahwa kualitas pendidikan selalu meningkat.

Menurut Harris et al. (2019), ruang lingkup pengawasan pendidikan meliputi aspek-aspek administratif dan teknis, yang mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan kurikulum, kinerja guru, pengelolaan sarana dan prasarana, serta manajemen keuangan. Pengawasan dalam aspek ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap komponen pendidikan berfungsi optimal dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Misalnya, pengawasan terhadap pelaksanaan kurikulum dilakukan untuk memastikan bahwa bahan ajar dan metode pengajaran yang digunakan oleh guru sudah sesuai dengan standar nasional dan kebutuhan peserta didik.

Selain itu, pengawasan pendidikan juga mencakup aspek pedagogis, di mana fokusnya adalah pada kualitas proses pembelajaran di dalam kelas. Fullan (2014) menekankan bahwa pengawasan dalam aspek ini sangat penting untuk meningkatkan kompetensi pedagogis guru dan memastikan bahwa strategi pembelajaran yang diterapkan benar-benar efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Dalam konteks ini, pengawas pendidikan bertugas memberikan bimbingan dan dukungan kepada guru, serta melakukan observasi dan evaluasi

terhadap proses pembelajaran untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan.

Ruang lingkup pengawasan pendidikan juga mencakup pengawasan terhadap administrasi sekolah, yang meliputi manajemen sekolah secara keseluruhan, termasuk perencanaan strategis, pengelolaan sumber daya, dan pelaksanaan kebijakan. Menurut Leithwood dan Sun (2012), pengawasan dalam bidang administrasi bertujuan untuk memastikan bahwa sekolah dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pengawas pendidikan berperan dalam menilai efektivitas manajemen sekolah dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan jika diperlukan.

Lebih lanjut, pengawasan pendidikan juga mencakup pengawasan terhadap budaya dan lingkungan sekolah. Spillane (2015) mengemukakan bahwa pengawasan terhadap budaya sekolah penting untuk menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan kondusif bagi pembelajaran. Ini mencakup pengawasan terhadap hubungan antar siswa, antara siswa dan guru, serta antara sekolah dan komunitas. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sekolah menyediakan lingkungan yang mendukung perkembangan akademik dan sosial-emosional siswa.

Pengawasan pendidikan juga meliputi evaluasi terhadap efektivitas program-program pendidikan yang dilaksanakan di sekolah. Menurut Heifetz dan Linsky (2017), evaluasi ini penting untuk mengukur keberhasilan program-program tersebut dan untuk menentukan apakah program tersebut perlu dilanjutkan, diperbaiki, atau dihentikan. Pengawasan ini melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber, seperti hasil belajar siswa, umpan balik dari guru dan orang tua, serta observasi langsung.

Secara keseluruhan, ruang lingkup pengawasan pendidikan sangat luas dan mencakup berbagai aspek yang krusial untuk keberhasilan institusi pendidikan. Melalui pengawasan yang efektif, kualitas pendidikan dapat terus ditingkatkan, dan setiap komponen dalam sistem pendidikan dapat berfungsi secara optimal. Pengawasan ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme kontrol, tetapi juga sebagai alat untuk pengembangan dan peningkatan berkelanjutan dalam pendidikan.

4. Peran dan Fungsi Pengawasan Pendidikan

Peran utama pengawasan pendidikan adalah untuk menjamin bahwa proses pendidikan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Glatthorn, Boschee, dan Whitehead (2018), pengawasan berfungsi sebagai alat untuk memantau implementasi kurikulum, kualitas pengajaran, dan kinerja siswa. Ini berarti bahwa pengawas pendidikan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua komponen pendidikan berfungsi secara efektif dan saling mendukung. Pengawasan juga berfungsi untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan siswa dan masyarakat, serta selaras dengan perkembangan zaman.

Selain itu, pengawasan pendidikan juga berperan dalam pengembangan profesional guru. Sebagaimana diungkapkan oleh Sergiovanni (2013), pengawasan yang efektif harus mencakup bimbingan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi guru. Pengawas pendidikan tidak hanya bertindak sebagai penilai, tetapi juga sebagai mentor yang membantu guru meningkatkan keterampilan mereka dalam pengajaran. Dalam konteks ini, pengawasan berfungsi sebagai sarana untuk mendukung pertumbuhan profesional dan peningkatan kualitas pengajaran, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada hasil belajar siswa.

Fungsi lain dari pengawasan pendidikan adalah untuk memastikan akuntabilitas dalam sistem pendidikan. Menurut Supovitz dan Tognatta (2013), pengawasan berfungsi untuk menilai sejauh mana institusi pendidikan memenuhi standar yang telah ditetapkan, serta untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Pengawasan yang dilakukan dengan baik akan menghasilkan data dan informasi yang dapat digunakan oleh pemimpin pendidikan untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan berbasis bukti. Dengan demikian, pengawasan berperan penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan.

Pengawasan pendidikan juga memiliki fungsi sebagai alat untuk mengembangkan budaya kualitas di sekolah. Hallinger dan Heck (2010) menyatakan bahwa pengawasan yang berorientasi pada kualitas akan mendorong seluruh komunitas sekolah untuk terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan. Melalui pengawasan, standar kualitas dapat ditegakkan dan dipertahankan, sehingga semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan—termasuk guru, siswa, dan staf—termotivasi untuk mencapai hasil yang terbaik. Pengawasan yang efektif juga mendorong sekolah untuk berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan pendidikan.

Lebih lanjut, pengawasan pendidikan berfungsi sebagai jembatan antara kebijakan pendidikan dan implementasinya di lapangan. Heifetz dan Linsky (2017) menekankan bahwa pengawas pendidikan harus mampu menerjemahkan kebijakan yang dibuat di tingkat pusat ke dalam praktik yang nyata di sekolah-sekolah. Fungsi ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang baik dapat diimplementasikan dengan efektif, dan bahwa ada umpan balik yang memungkinkan kebijakan tersebut disesuaikan dengan kondisi lapangan. Dengan demikian, pengawasan berperan sebagai penghubung yang memastikan kesinambungan antara perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan.

Secara keseluruhan, peran dan fungsi pengawasan pendidikan sangat krusial dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan. Pengawasan berfungsi tidak hanya sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai sarana untuk mendukung pengembangan profesional, memastikan akuntabilitas, mengembangkan budaya kualitas, dan menjembatani antara kebijakan dan implementasi. Dengan menjalankan peran-peran ini secara efektif, pengawasan pendidikan dapat membantu menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik, lebih responsif terhadap kebutuhan siswa, dan lebih mampu menghadapi tantangan di masa depan.

5. Prinsip-prinsip Pengawasan Pendidikan

Prinsip-prinsip pengawasan pendidikan memainkan peran yang penting dalam memastikan bahwa proses pengawasan dilakukan secara efektif dan berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan. Prinsip-prinsip ini memberikan kerangka kerja yang membantu pengawas pendidikan melaksanakan tugas mereka dengan cara yang profesional, objektif, dan berkelanjutan. Dalam dekade terakhir, berbagai ahli telah mengidentifikasi beberapa prinsip kunci yang harus dipegang teguh dalam pelaksanaan pengawasan pendidikan untuk mencapai hasil yang optimal.

Salah satu prinsip utama dalam pengawasan pendidikan adalah objektivitas. Pengawasan harus dilakukan berdasarkan data dan bukti yang akurat, serta tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau bias. Menurut Glanz (2018), pengawasan yang objektif memungkinkan pengawas untuk memberikan penilaian yang adil dan tepat terhadap kinerja guru, staf, dan institusi pendidikan secara keseluruhan. Objektivitas ini penting untuk memastikan bahwa rekomendasi dan tindak lanjut yang diberikan benar-benar didasarkan pada kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan, sehingga dapat mendorong perbaikan yang berkelanjutan.

Prinsip lainnya adalah kolaborasi. Pengawasan pendidikan seharusnya tidak dilakukan secara top-down, tetapi harus melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak yang terkait, termasuk guru, staf, dan komunitas sekolah. Hallinger dan Heck (2010) menekankan bahwa pengawasan yang efektif adalah pengawasan yang bersifat kolaboratif, di mana pengawas bekerja sama dengan para guru untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi bersama. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya menjadi alat kontrol, tetapi juga menjadi sarana untuk memberdayakan guru dan meningkatkan kualitas pembelajaran melalui kerja sama yang erat.

Prinsip ketiga adalah kontinuitas. Pengawasan pendidikan tidak boleh dianggap sebagai kegiatan satu kali, melainkan sebagai proses yang berkelanjutan. Supovitz dan Tognatta (2013) menyatakan bahwa pengawasan yang berkelanjutan memungkinkan pengawas untuk memantau perkembangan secara periodik dan memberikan dukungan yang diperlukan pada waktu yang tepat. Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa perbaikan yang dilakukan dapat dipertahankan dan ditingkatkan dari waktu ke waktu, serta bahwa pengawas dapat secara proaktif menanggapi perubahan dan tantangan yang muncul.

Selain itu, prinsip transparansi juga sangat penting dalam pengawasan pendidikan. Transparansi dalam pengawasan berarti bahwa proses pengawasan, kriteria penilaian, dan hasil pengawasan semuanya harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Bush (2015), transparansi dalam pengawasan membantu membangun kepercayaan antara pengawas dan mereka yang diawasi. Ini juga memastikan bahwa semua pihak memahami apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana mereka dapat meningkatkan kinerja mereka berdasarkan umpan balik yang jelas dan terbuka.

Prinsip pengembangan profesional juga tidak kalah pentingnya dalam konteks pengawasan pendidikan. Glatthorn et al. (2018) menyatakan bahwa pengawasan harus berorientasi pada

pengembangan kapasitas profesional guru dan staf. Ini berarti bahwa pengawasan tidak hanya berfungsi untuk mengidentifikasi kekurangan, tetapi juga untuk memberikan bimbingan dan pelatihan yang dapat membantu guru dan staf untuk meningkatkan kompetensi mereka. Dengan berfokus pada pengembangan profesional, pengawasan dapat menjadi katalisator bagi peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Terakhir, prinsip relevansi dalam pengawasan pendidikan menekankan pentingnya pengawasan yang disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan spesifik dari institusi pendidikan yang diawasi. Sergiovanni (2013) mengemukakan bahwa pengawasan yang relevan adalah pengawasan yang mempertimbangkan kondisi unik dari setiap sekolah, termasuk karakteristik siswa, budaya sekolah, dan tantangan lokal. Dengan menerapkan prinsip relevansi, pengawas dapat memberikan rekomendasi dan dukungan yang lebih tepat sasaran dan efektif.

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip seperti objektivitas, kolaborasi, kontinuitas, transparansi, pengembangan profesional, dan relevansi sangat penting dalam memastikan bahwa pengawasan pendidikan dilaksanakan dengan cara yang efektif dan bermakna. Prinsip-prinsip ini tidak hanya membantu pengawas dalam menjalankan tugas mereka secara profesional, tetapi juga memastikan bahwa proses pengawasan benar-benar berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan dan keberhasilan siswa.

6. Jenis-jenis Pengawasan Pendidikan

Pengawasan pendidikan merupakan elemen esensial dalam sistem pendidikan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan sesuai dengan standar dan kebijakan yang telah ditetapkan. Jenis-jenis pengawasan pendidikan sangat beragam, mencerminkan kompleksitas tugas dan tanggung jawab yang melekat

dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di berbagai tingkatan. Seiring dengan perkembangan pendidikan, pengawasan telah mengalami transformasi, dengan berbagai pendekatan dan metode yang dikembangkan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan yang terus berubah dalam dunia pendidikan.

Salah satu jenis pengawasan pendidikan yang sangat mendasar adalah pengawasan administratif. Pengawasan ini berkaitan erat dengan manajemen dan operasional lembaga pendidikan. Pengawasan administratif mencakup pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas administratif seperti pengelolaan anggaran, kepegawaian, pengelolaan sarana dan prasarana, serta implementasi kebijakan pendidikan. Menurut Sergiovanni dan Starratt (2013), pengawasan administratif penting untuk memastikan bahwa aspek-aspek manajerial dari sekolah atau institusi pendidikan lainnya berfungsi secara efisien dan efektif, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan ini menjadi fondasi bagi pengelolaan pendidikan yang berkelanjutan dan akuntabel, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan pendidikan dengan cara yang terstruktur dan terorganisir.

Selain pengawasan administratif, pengawasan akademik menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Pengawasan akademik berfokus pada kegiatan pengajaran dan pembelajaran, termasuk implementasi kurikulum, kualitas pengajaran, dan pencapaian hasil belajar siswa. Hallinger dan Heck (2010) menegaskan bahwa pengawasan akademik sangat penting dalam memastikan bahwa kurikulum yang diajarkan sesuai dengan standar nasional dan bahwa metode pengajaran yang digunakan oleh guru efektif dalam mencapai tujuan pendidikan. Pengawasan akademik juga mencakup evaluasi terhadap kinerja guru, termasuk pemberian umpan balik yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi mereka. Dalam konteks ini, pengawasan akademik tidak

hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai sarana pengembangan profesional bagi tenaga pendidik.

Pengawasan klinis adalah jenis pengawasan lain yang mendapat perhatian khusus, terutama dalam konteks peningkatan kualitas pengajaran di kelas. Pengawasan klinis melibatkan observasi langsung terhadap proses pembelajaran di kelas oleh pengawas pendidikan, yang kemudian diikuti dengan diskusi reflektif dan pemberian umpan balik kepada guru. Glanz (2018) menjelaskan bahwa pengawasan klinis memungkinkan pengawas untuk memberikan dukungan yang lebih personal dan spesifik kepada guru, dengan fokus pada pengembangan keterampilan pengajaran yang langsung terkait dengan praktik di kelas. Pengawasan klinis menjadi alat yang efektif dalam mengidentifikasi kebutuhan pelatihan guru dan membantu mereka untuk menerapkan strategi pengajaran yang lebih baik dan inovatif.

Pengawasan partisipatif juga memainkan peran penting dalam konteks pendidikan modern, di mana kolaborasi dan keterlibatan aktif dari semua pihak sangat dihargai. Pengawasan partisipatif melibatkan guru, staf, siswa, dan bahkan orang tua dalam proses pengawasan, menciptakan lingkungan di mana semua pihak merasa memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan pendidikan. Bush (2015) menyatakan bahwa pengawasan partisipatif dapat meningkatkan rasa memiliki dan komitmen terhadap tujuan sekolah, karena semua pemangku kepentingan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, pengawasan partisipatif tidak hanya meningkatkan kualitas pengawasan itu sendiri, tetapi juga memperkuat komunitas sekolah secara keseluruhan.

Pengawasan evaluatif, di sisi lain, berfokus pada penilaian hasil dan efektivitas program-program pendidikan. Pengawasan ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana tujuan pendidikan telah tercapai dan bagaimana program-program yang telah dilaksanakan dapat diperbaiki di masa depan. Supovitz dan Tognatta (2013)

mengemukakan bahwa pengawasan evaluatif sangat penting dalam menentukan efektivitas kebijakan pendidikan dan program-program pembelajaran. Melalui analisis data dan evaluasi hasil, pengawasan evaluatif memberikan wawasan yang berharga untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan perbaikan berkelanjutan dalam sistem pendidikan.

Terakhir, pengawasan korektif merupakan jenis pengawasan yang dilakukan ketika ditemukan masalah atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pendidikan. Pengawasan ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah dan menerapkan tindakan korektif untuk mengatasi masalah tersebut. Hargreaves dan Fullan (2012) menekankan bahwa pengawasan korektif efektif dalam menjaga kualitas pendidikan dengan segera menangani isu-isu yang muncul sebelum mereka berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Pengawasan korektif memungkinkan pengawas untuk memberikan intervensi yang diperlukan untuk memperbaiki proses pendidikan dan memastikan bahwa standar yang ditetapkan tetap terjaga.

Secara keseluruhan, berbagai jenis pengawasan pendidikan, seperti pengawasan administratif, akademik, klinis, partisipatif, evaluatif, dan korektif, berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan kepada siswa sesuai dengan standar dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan yang efektif memerlukan pemahaman yang mendalam tentang setiap jenis pengawasan, serta kemampuan untuk menerapkan pendekatan yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan spesifik dari lembaga pendidikan yang diawasi. Dengan pendekatan yang tepat, pengawasan pendidikan dapat menjadi alat yang kuat untuk meningkatkan kualitas pendidikan, mendukung pengembangan profesional guru, dan mencapai keberhasilan siswa.

7. Bentuk-bentuk Pengawasan Pendidikan

Pengawasan pendidikan merupakan aspek penting dalam memastikan bahwa proses pendidikan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan mencapai hasil yang diharapkan. Dalam dekade terakhir, para ahli telah mengembangkan berbagai bentuk pengawasan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh institusi pendidikan. Bentuk-bentuk pengawasan ini bervariasi dalam pendekatan dan metodologi, namun semuanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemantauan, evaluasi, dan bimbingan.

Salah satu bentuk pengawasan pendidikan yang umum adalah pengawasan klinis. Pengawasan ini berfokus pada pengamatan langsung dan sistematis terhadap praktik mengajar di dalam kelas. Zepeda (2016) menjelaskan bahwa pengawasan klinis melibatkan proses yang mendalam, termasuk observasi kelas, pengumpulan data tentang praktik pengajaran, serta diskusi reflektif antara pengawas dan guru. Tujuannya adalah untuk memberikan umpan balik konstruktif yang dapat digunakan guru untuk meningkatkan strategi pengajaran mereka. Pendekatan ini dianggap efektif karena memungkinkan pengawasan yang spesifik dan terfokus pada situasi nyata yang dihadapi oleh guru dalam lingkungan kelas.

Pengawasan administratif merupakan bentuk pengawasan lain yang lebih berfokus pada aspek-aspek manajerial dari pengelolaan pendidikan. Menurut Robbins dan Judge (2013), pengawasan administratif mencakup pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, pengelolaan sumber daya, dan pencapaian target organisasi. Bentuk pengawasan ini memastikan bahwa sekolah atau institusi pendidikan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan dan standar yang telah ditetapkan oleh otoritas pendidikan. Dalam praktiknya, pengawasan administratif dapat melibatkan evaluasi kinerja kepala

sekolah, peninjauan anggaran, dan audit terhadap penggunaan dana pendidikan.

Selain itu, pengawasan akademik juga menjadi bentuk pengawasan yang sangat penting, terutama dalam menjaga kualitas proses pembelajaran. Hallinger (2011) menyebutkan bahwa pengawasan akademik berfokus pada kurikulum, metode pengajaran, dan hasil belajar siswa. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa standar akademik terpenuhi dan bahwa siswa menerima pendidikan yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Dalam konteks ini, pengawas sering kali bekerja sama dengan guru untuk mengembangkan strategi pengajaran yang lebih efektif dan untuk menilai apakah tujuan pembelajaran telah tercapai.

Bentuk lain dari pengawasan pendidikan adalah pengawasan partisipatif**,** yang menekankan pentingnya keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam proses pengawasan. Spillane (2015) menyoroti bahwa pengawasan partisipatif melibatkan kolaborasi antara pengawas, guru, siswa, dan bahkan orang tua dalam memantau dan mengevaluasi proses pendidikan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga mendorong rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Pengawasan partisipatif dianggap sangat efektif dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan semua pihak yang terlibat.

Selanjutnya, pengawasan berbasis data juga menjadi bentuk pengawasan yang semakin mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Supovitz dan Tognatta (2013) menjelaskan bahwa pengawasan berbasis data melibatkan penggunaan data kuantitatif dan kualitatif untuk menginformasikan pengambilan keputusan dalam pengawasan pendidikan. Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti hasil ujian, survei siswa, dan laporan kinerja guru, digunakan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan

serta untuk menilai efektivitas program dan kebijakan yang diterapkan. Pengawasan berbasis data memungkinkan pendekatan yang lebih objektif dan terukur dalam mengawasi proses pendidikan, serta mendukung pengembangan strategi peningkatan yang berbasis bukti.

Terakhir, pengawasan berkelanjutan adalah bentuk pengawasan yang berfokus pada pemantauan jangka panjang dan perbaikan berkelanjutan. Fullan (2014) menekankan bahwa pengawasan berkelanjutan melibatkan siklus pengawasan yang terus-menerus, di mana setiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perbaikan dalam proses pendidikan tidak hanya terjadi sesekali, tetapi menjadi bagian integral dari budaya sekolah. Pengawasan berkelanjutan membantu dalam menciptakan lingkungan di mana inovasi dan perbaikan terus-menerus didorong dan diimplementasikan.

Secara keseluruhan, berbagai bentuk pengawasan pendidikan seperti pengawasan klinis, administratif, akademik, partisipatif, berbasis data, dan berkelanjutan menawarkan pendekatan yang komprehensif dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Setiap bentuk pengawasan memiliki fokus dan metode yang berbeda, tetapi semuanya bertujuan untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan kepada siswa memenuhi standar yang diharapkan dan terus berkembang sesuai dengan perubahan dan tantangan yang ada. Dengan menggabungkan berbagai bentuk pengawasan ini, institusi pendidikan dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan mereka dan memberikan pendidikan yang berkualitas tinggi kepada semua siswa.

8. Dimensi Pengawasan Pendidikan

Pengawasan pendidikan merupakan aspek krusial dalam sistem pendidikan yang berfungsi untuk memastikan bahwa proses pendidikan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan mencapai tujuan yang diinginkan. Dimensi-dimensi pengawasan

pendidikan yang telah diidentifikasi oleh para ahli dalam dekade terakhir mencakup berbagai aspek, mulai dari kualitas pengajaran hingga partisipasi komunitas pendidikan. Memahami dan menerapkan dimensi-dimensi ini dengan baik dapat meningkatkan efektivitas pengawasan pendidikan dan, pada akhirnya, kualitas pendidikan itu sendiri.

Dimensi kualitas pengajaran dan pembelajaran merupakan dimensi yang sangat penting dalam pengawasan pendidikan. Pengawasan dalam dimensi ini mencakup evaluasi terhadap praktik-praktik pengajaran yang dilakukan oleh guru serta dampak dari metode pembelajaran yang diterapkan terhadap pencapaian akademik siswa. Menurut Hallinger (2011), pengawasan yang berfokus pada kualitas pengajaran harus mengarah pada peningkatan hasil belajar siswa melalui dukungan berkelanjutan bagi guru, seperti pelatihan profesional dan umpan balik yang konstruktif. Pengawasan ini juga mencakup pemantauan terhadap penerapan kurikulum, memastikan bahwa kurikulum tersebut sesuai dengan kebutuhan siswa dan dapat membantu mereka mencapai potensi penuh mereka.

Dimensi manajerial dalam pengawasan pendidikan mencakup aspek-aspek administratif yang mendukung kelancaran operasional institusi pendidikan. Pengawasan dalam dimensi ini bertujuan untuk memastikan bahwa sekolah dikelola secara efisien, dengan penggunaan sumber daya yang optimal dan pengelolaan anggaran yang transparan. Sergiovanni dan Starratt (2013) menyatakan bahwa pengawasan manajerial yang efektif harus mampu menjaga keseimbangan antara aspek administratif dan akademik, sehingga kedua aspek tersebut dapat saling mendukung dalam mencapai tujuan pendidikan. Pengawasan ini juga berfungsi untuk memantau kinerja administrasi sekolah, termasuk kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku, serta memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana.

Selain aspek kualitas dan manajerial, dimensi evaluatif dari pengawasan pendidikan juga sangat penting. Dimensi ini berfokus pada penilaian terhadap efektivitas program-program pendidikan dan kebijakan yang diterapkan di sekolah. Menurut Supovitz dan Tognatta (2013), pengawasan evaluatif menggunakan data dan bukti empiris untuk menilai keberhasilan atau kegagalan program-program pendidikan, serta untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan. Dimensi ini memungkinkan pengawas pendidikan untuk membuat keputusan berdasarkan data, yang dapat mengarah pada peningkatan kualitas program pendidikan dan memastikan bahwa tujuan pendidikan tercapai dengan baik.

Dimensi partisipatif dalam pengawasan pendidikan menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pengawasan. Bush (2015) menekankan bahwa pengawasan yang partisipatif melibatkan guru, siswa, orang tua, dan komunitas dalam pengambilan keputusan dan evaluasi proses pendidikan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama di antara semua pihak yang terlibat dalam pendidikan. Dengan demikian, pengawasan partisipatif dapat memperkuat komitmen komunitas pendidikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan memastikan bahwa suara semua pihak didengar dan dipertimbangkan.

Dimensi korektif adalah dimensi pengawasan yang berfokus pada identifikasi dan penanganan masalah yang muncul dalam proses pendidikan. Pengawasan dalam dimensi ini bertujuan untuk menerapkan tindakan perbaikan segera terhadap setiap ketidaksesuaian atau penyimpangan dari standar yang telah ditetapkan. Hargreaves dan Fullan (2012) menyoroti pentingnya dimensi korektif sebagai mekanisme yang memastikan bahwa kesalahan atau kelemahan dalam pelaksanaan pendidikan dapat diidentifikasi dan diperbaiki sebelum berdampak negatif pada

pencapaian tujuan pendidikan. Dimensi ini juga mencakup pengawasan terhadap implementasi kebijakan baru, memastikan bahwa kebijakan tersebut diterapkan dengan benar dan memberikan manfaat yang diharapkan.

Dimensi inovasi dan adaptasi dalam pengawasan pendidikan adalah aspek yang semakin mendapatkan perhatian dalam literatur terkini. Dimensi ini berfokus pada kemampuan sistem pengawasan untuk beradaptasi dengan perubahan dan inovasi dalam pendidikan. Menurut Heifetz dan Linsky (2017), pengawasan yang efektif harus mampu mengakomodasi perubahan kurikulum, teknologi baru, dan metode pembelajaran inovatif. Pengawas pendidikan perlu memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan pendekatan mereka dalam menanggapi perkembangan terbaru di bidang pendidikan, sambil tetap menjaga fokus pada tujuan utama pendidikan. Dimensi ini juga mencakup evaluasi terhadap dampak inovasi pada kualitas pengajaran dan hasil belajar siswa, serta pengembangan strategi untuk mempercepat adopsi praktik-praktik terbaik di seluruh institusi pendidikan.

Secara keseluruhan, dimensi-dimensi pengawasan pendidikan yang mencakup kualitas pengajaran, manajerial, evaluatif, partisipatif, korektif, serta inovasi dan adaptasi, merupakan elemen penting yang harus dipahami dan diterapkan oleh para pemimpin dan pengawas pendidikan. Setiap dimensi memainkan peran penting dalam memastikan bahwa pendidikan yang diberikan berkualitas tinggi, sesuai standar, dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Dengan pemahaman yang mendalam tentang dimensi-dimensi ini, pengawas pendidikan dapat mengarahkan institusi pendidikan menuju pencapaian hasil yang optimal dan berkelanjutan.

C. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengawasan Pendidikan

Norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengawasan pendidikan memainkan peran penting dalam menjamin bahwa sistem pendidikan berjalan secara efektif, efisien, dan adil. NSPK tidak hanya berfungsi sebagai panduan teknis bagi pengawas pendidikan, tetapi juga sebagai kerangka etis dan profesional yang memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan pengawas berdampak positif pada kualitas pendidikan. Setiap komponen dari NSPK, yakni norma, standar, prosedur, dan kriteria, memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam membentuk suatu sistem pengawasan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Norma pengawasan pendidikan mencakup prinsip-prinsip etika dan profesionalisme yang harus dipegang oleh pengawas dalam menjalankan tugasnya. Norma ini berfungsi sebagai landasan moral yang membimbing pengawas untuk melakukan tugas mereka dengan integritas, transparansi, dan rasa tanggung jawab. Sebagaimana dikemukakan oleh Bush dan Glover (2014), norma-norma ini sangat penting dalam memastikan bahwa pengawas bertindak adil dan obyektif, serta menjaga kepercayaan dari semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan, termasuk guru, siswa, dan orang tua. Norma juga mencakup kewajiban pengawas untuk terus memperbarui pengetahuan mereka dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan, sehingga pengawasan yang dilakukan tetap relevan dan efektif.

Standar pengawasan pendidikan menetapkan kriteria minimum yang harus dipenuhi dalam setiap aktivitas pengawasan. Standar ini meliputi aspek-aspek seperti frekuensi kunjungan pengawasan, kualitas laporan pengawasan, dan keterlibatan pengawas dalam proses perbaikan pendidikan di sekolah. Menurut Hallinger (2011), standar ini berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai apakah pengawasan

telah dilaksanakan dengan baik dan apakah hasil pengawasan dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang berdampak pada peningkatan mutu pendidikan. Standar juga membantu memastikan konsistensi dalam praktik pengawasan di seluruh sekolah dan wilayah, sehingga setiap sekolah menerima tingkat dukungan dan pengawasan yang sama, tanpa memandang lokasi atau sumber daya yang dimilikinya.

Prosedur pengawasan pendidikan merujuk pada langkah-langkah sistematis yang harus diikuti oleh pengawas dalam menjalankan tugas mereka. Prosedur ini mencakup segala sesuatu mulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan kunjungan, hingga penyusunan laporan dan rekomendasi. Supovitz dan Tognatta (2013) menekankan bahwa prosedur yang jelas dan rinci memungkinkan pengawas untuk melaksanakan tugas mereka secara efektif dan efisien, serta memastikan bahwa semua aspek penting dari proses pengawasan diperhatikan. Prosedur juga harus dirancang untuk fleksibel, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dari berbagai jenis sekolah dan konteks pendidikan, tanpa mengorbankan kualitas atau integritas pengawasan.

Kriteria pengawasan pendidikan adalah indikator atau parameter yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu program atau kebijakan pendidikan. Kriteria ini sangat penting dalam menentukan apakah tujuan pendidikan telah tercapai dan apakah proses pengajaran dan pembelajaran berjalan sesuai dengan harapan. Hargreaves dan Fullan (2012) menggarisbawahi bahwa kriteria pengawasan harus berbasis data, relevan, dan dapat diukur, sehingga hasil pengawasan dapat digunakan untuk membuat keputusan yang didasarkan pada bukti dan informasi yang akurat. Kriteria ini juga membantu dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem pendidikan, sehingga perbaikan dapat dilakukan secara tepat sasaran dan berdampak signifikan.

Dalam kerangka kerja NSPK, masing-masing elemen saling terkait dan mendukung satu sama lain untuk menciptakan sistem pengawasan yang holistik dan efektif. Norma menyediakan landasan etis, standar memberikan tolok ukur kinerja, prosedur memastikan konsistensi dan efisiensi, sementara kriteria memungkinkan evaluasi yang objektif dan berbasis data. Menurut Spillane (2015), penerapan NSPK secara efektif dapat menghasilkan peningkatan kualitas pendidikan yang berkelanjutan, dengan memberikan panduan yang jelas dan spesifik kepada pengawas dalam menjalankan tugas mereka. Lebih dari itu, NSPK juga membantu dalam menciptakan budaya akuntabilitas dan perbaikan terus-menerus di sekolah, yang pada akhirnya akan membawa manfaat besar bagi siswa dan komunitas pendidikan secara keseluruhan.

Dengan demikian, NSPK bukan hanya sekadar pedoman teknis, tetapi juga merupakan fondasi yang membentuk sistem pengawasan pendidikan yang adil, efektif, dan berkelanjutan. Pengawas yang bekerja dengan mematuhi NSPK dapat lebih efektif dalam mendukung sekolah dan guru untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan, sekaligus memastikan bahwa setiap siswa menerima pendidikan yang berkualitas tinggi, di mana pun mereka berada.

D. Supervisi Pendidikan

1. Konseptualisasi Supervisi Pendidikan

Rasionalisasi supervisi pendidikan adalah konsep yang semakin mendapatkan perhatian dalam literatur pendidikan modern, mengingat pentingnya peran supervisi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan kinerja sekolah secara keseluruhan. Supervisi pendidikan tidak hanya dilihat sebagai alat untuk mengawasi dan mengevaluasi, tetapi juga sebagai proses yang integral dalam pembinaan profesional dan pengembangan kapasitas guru serta staf pendidikan lainnya. Dalam lingkungan pendidikan yang semakin

kompleks dan dinamis, supervisi yang efektif menjadi kunci untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan tercapai secara optimal.

Salah satu elemen penting dari rasionalisasi supervisi pendidikan adalah pemahaman bahwa supervisi harus bersifat proaktif dan kolaboratif. Glanz (2014) menekankan bahwa supervisi pendidikan harus melampaui pendekatan tradisional yang cenderung bersifat top-down dan lebih berfokus pada pembinaan dan pengembangan profesional. Supervisi yang efektif harus didasarkan pada dialog konstruktif antara pengawas dan guru, di mana guru tidak hanya menerima evaluasi tetapi juga mendapatkan dukungan untuk mengembangkan keterampilan mereka. Ini menciptakan suasana kerja yang lebih terbuka dan mendorong guru untuk terus meningkatkan kualitas pengajaran mereka.

Dalam konteks ini, penggunaan data dan bukti empiris dalam supervisi pendidikan juga menjadi sangat penting. Marzano et al. (2015) menggarisbawahi bahwa supervisi berbasis data memungkinkan pengawas untuk melakukan evaluasi yang lebih objektif dan tepat sasaran. Dengan memanfaatkan data dari berbagai sumber, seperti hasil tes siswa, observasi kelas, dan survei kepuasan siswa, pengawas dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Data ini juga membantu dalam menetapkan tujuan yang jelas dan terukur, yang menjadi dasar bagi proses supervisi yang berkelanjutan.

Selain itu, rasionalisasi supervisi pendidikan harus mempertimbangkan konteks lokal dan kebutuhan spesifik dari setiap sekolah. Harris et al. (2013) menyatakan bahwa pendekatan supervisi yang terlalu seragam dan tidak fleksibel dapat menghambat inovasi dan responsivitas terhadap kebutuhan lokal. Oleh karena itu, penting bagi pengawas untuk memahami karakteristik unik dari setiap sekolah, termasuk kondisi sosial-ekonomi, budaya, dan tantangan yang

dihadapi. Dengan demikian, supervisi dapat disesuaikan untuk mendukung inisiatif-inisiatif yang relevan dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan yang sesuai dengan konteks lokal.

Lebih jauh, supervisi pendidikan yang rasional juga harus menekankan pentingnya pengembangan budaya reflektif di kalangan guru. Zepeda (2017) menunjukkan bahwa supervisi yang efektif harus mendorong guru untuk terus melakukan refleksi terhadap praktik mengajar mereka. Proses refleksi ini memungkinkan guru untuk mengenali kekuatan dan kelemahan mereka, serta mencari cara untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengajaran. Dengan adanya budaya reflektif yang kuat, guru tidak hanya melihat supervisi sebagai proses evaluatif, tetapi juga sebagai kesempatan untuk pembelajaran dan pengembangan profesional yang berkelanjutan.

Dalam praktiknya, rasionalisasi supervisi pendidikan juga harus mempertimbangkan keberlanjutan dan dampak jangka panjang dari intervensi yang dilakukan. Fullan (2014) mengemukakan bahwa supervisi yang efektif harus berorientasi pada hasil yang tidak hanya berdampak jangka pendek, tetapi juga membawa perubahan positif yang berkelanjutan bagi sekolah. Ini berarti bahwa pengawas harus mempertimbangkan bagaimana intervensi yang mereka lakukan akan mempengaruhi budaya sekolah, kinerja siswa, dan kualitas pengajaran dalam jangka panjang. Pendekatan ini memerlukan perencanaan yang matang dan dukungan yang konsisten untuk memastikan bahwa perubahan yang diinisiasi melalui proses supervisi benar-benar memberikan manfaat yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, rasionalisasi supervisi pendidikan menekankan perlunya pendekatan yang lebih holistik, kolaboratif, dan berbasis bukti dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Supervisi pendidikan yang efektif tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memastikan kepatuhan terhadap standar, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun kapasitas profesional guru, mendorong

inovasi, dan menciptakan budaya reflektif yang berkelanjutan. Dengan pendekatan yang tepat, supervisi pendidikan dapat menjadi instrumen yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang lebih tinggi dan memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna dan berkualitas.

2. Ruang Lingkup Supervisi Pendidikan

Ruang lingkup supervisi pendidikan adalah konsep yang luas dan mencakup berbagai dimensi yang berperan penting dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Supervisi pendidikan tidak hanya terbatas pada pengawasan proses belajar mengajar di kelas, tetapi juga mencakup aspek manajerial, pengembangan profesional, evaluasi kinerja, serta penciptaan lingkungan belajar yang mendukung. Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, berikut ini adalah pembahasan yang lebih mendalam mengenai ruang lingkup supervisi pendidikan.

Menurut Zepeda (2017), salah satu dimensi utama dari supervisi pendidikan adalah pengembangan profesional guru. Supervisi dalam konteks ini berfokus pada upaya peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan, bimbingan langsung, dan pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan profesional ini mencakup segala bentuk aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru dalam menyampaikan materi pelajaran, mengelola kelas, serta menerapkan metode pengajaran yang efektif. Supervisi pendidikan yang efektif harus mampu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan guru dan menyediakan dukungan yang dibutuhkan untuk mengatasi tantangan dalam proses pembelajaran.

Selain pengembangan profesional, aspek penting lain dalam ruang lingkup supervisi pendidikan adalah pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran. Hallinger (2011) menekankan pentingnya observasi kelas sebagai bagian dari supervisi untuk menilai efektivitas

pengajaran dan interaksi antara guru dan siswa. Observasi ini harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, dengan tujuan untuk memberikan umpan balik yang konstruktif kepada guru mengenai praktik pengajaran mereka. Evaluasi kinerja guru berdasarkan hasil observasi dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana pengembangan lebih lanjut, memastikan bahwa metode pengajaran yang digunakan sesuai dengan kebutuhan siswa dan standar pendidikan yang berlaku.

Ruang lingkup supervisi pendidikan juga mencakup manajemen sekolah yang efektif, yang melibatkan pengawasan terhadap seluruh aspek operasional sekolah. Menurut Sergiovanni (2013), pengawasan manajerial dalam supervisi pendidikan bertujuan untuk memastikan bahwa semua komponen sekolah, mulai dari pengelolaan keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana, hingga manajemen sumber daya manusia, berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pengawasan manajerial yang baik akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sekolah, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pencapaian tujuan pendidikan secara keseluruhan.

Budaya sekolah yang positif dan inklusif adalah dimensi lain yang penting dalam supervisi pendidikan. Fullan (2014) mengemukakan bahwa supervisi pendidikan harus memainkan peran aktif dalam membentuk dan memelihara budaya sekolah yang mendukung kolaborasi, inovasi, dan penghargaan terhadap keragaman. Budaya sekolah yang baik tidak hanya menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, tetapi juga meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa serta guru. Dalam hal ini, supervisor pendidikan perlu memastikan bahwa nilai-nilai positif diterapkan secara konsisten di seluruh sekolah, dan bahwa setiap anggota komunitas sekolah merasa dihargai dan didukung.

Evaluasi program-program pendidikan juga merupakan bagian integral dari supervisi pendidikan. Supovitz dan Tognatta (2013)

menekankan bahwa supervisor pendidikan harus melakukan evaluasi yang berbasis data terhadap program-program yang dijalankan di sekolah. Evaluasi ini penting untuk menilai apakah program-program tersebut berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan apakah ada area yang perlu diperbaiki. Dengan menggunakan data dari berbagai sumber, seperti hasil ujian, survei kepuasan, dan observasi kelas, supervisor dapat mengidentifikasi kelemahan dalam program pendidikan dan merumuskan strategi untuk perbaikan yang berkelanjutan.

Selain itu, supervisi pendidikan juga mencakup aspek kepemimpinan, di mana supervisor berperan sebagai pemimpin yang mengarahkan dan memotivasi seluruh anggota komunitas sekolah. Menurut Leithwood et al. (2012), kepemimpinan dalam supervisi pendidikan melibatkan kemampuan untuk menginspirasi guru dan staf untuk bekerja sama dalam mencapai visi dan misi sekolah. Kepemimpinan yang kuat dalam supervisi pendidikan akan menciptakan sinergi antara semua pihak yang terlibat, meningkatkan efektivitas pengelolaan sekolah, dan memastikan bahwa tujuan pendidikan tercapai.

Dengan demikian, ruang lingkup supervisi pendidikan mencakup pengembangan profesional guru, pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran, manajemen sekolah, pembentukan budaya sekolah yang positif, evaluasi program pendidikan, dan kepemimpinan yang efektif. Supervisi pendidikan yang komprehensif dan berorientasi pada perbaikan terus-menerus akan membantu menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas, mendukung pencapaian hasil belajar yang optimal, dan memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan pendidikan yang layak dan sesuai dengan kebutuhannya.

3. Tujuan Supervisi Pendidikan

Supervisi pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di semua jenjang. Supervisi pendidikan adalah proses pembinaan yang dirancang untuk membantu guru dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan kinerja profesional mereka. Menurut Glanz (2018), supervisi pendidikan bukan hanya sekadar kegiatan monitoring, tetapi juga merupakan upaya kolaboratif antara supervisor dan guru untuk merancang, menerapkan, dan mengevaluasi strategi pengajaran yang efektif. Ini mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan dalam proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan profesional guru secara berkelanjutan.

Salah satu tujuan utama dari supervisi pendidikan adalah untuk memperbaiki kualitas pengajaran di sekolah. Sergiovanni dan Starratt (2014) menjelaskan bahwa supervisi pendidikan harus berfokus pada pengembangan kompetensi pedagogik guru agar mereka mampu memberikan pengajaran yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan siswa. Supervisi yang baik tidak hanya menilai kemampuan teknis guru dalam mengajar, tetapi juga mendorong refleksi kritis terhadap praktik pengajaran, sehingga guru dapat mengenali kekuatan dan kelemahan mereka serta bekerja untuk memperbaikinya.

Supervisi pendidikan juga memiliki tujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa. Menurut Hallinger (2011), supervisi yang dilakukan dengan baik dapat membantu menciptakan budaya sekolah yang positif, di mana guru merasa didukung dalam tugas-tugas mereka dan siswa merasa termotivasi untuk belajar. Lingkungan yang kondusif ini sangat penting untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan, karena suasana yang positif akan meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses

pembelajaran, yang pada gilirannya akan berdampak pada hasil belajar mereka.

Selain itu, supervisi pendidikan berperan penting dalam memastikan akuntabilitas dalam sistem pendidikan. Supovitz dan Tognatta (2013) menekankan bahwa melalui supervisi, sekolah dapat mempertahankan standar pengajaran yang tinggi dan memastikan bahwa kurikulum diterapkan secara konsisten dan efektif. Supervisor pendidikan berperan dalam mengawasi implementasi kurikulum, memantau kemajuan siswa, serta memberikan umpan balik kepada guru mengenai praktik mengajar mereka. Evaluasi yang dilakukan melalui supervisi ini membantu sekolah untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan memastikan bahwa setiap siswa menerima pendidikan yang berkualitas.

Lebih jauh lagi, supervisi pendidikan juga bertujuan untuk memberdayakan guru melalui pengembangan profesional. Leithwood dan Sun (2012) menyatakan bahwa salah satu fungsi kritis dari supervisi adalah untuk mendukung guru dalam pengembangan kompetensi mereka melalui pelatihan, workshop, dan mentoring. Ini tidak hanya meningkatkan keterampilan guru dalam mengajar tetapi juga membantu mereka untuk tetap termotivasi dan bersemangat dalam profesi mereka. Pengembangan profesional yang terus-menerus ini penting untuk memastikan bahwa guru tetap up-to-date dengan metode pengajaran terbaru dan inovasi dalam pendidikan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pengajaran di kelas.

Dalam konteks kebijakan pendidikan nasional, supervisi juga merupakan alat yang penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan standar pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah dilaksanakan dengan benar di sekolah-sekolah. Menurut Fullan (2014), supervisi yang efektif dapat menjembatani antara kebijakan pendidikan dan praktik di lapangan, memastikan bahwa guru dan kepala sekolah memahami dan menerapkan kebijakan tersebut dengan cara yang

benar. Dengan demikian, supervisi berfungsi sebagai mekanisme kontrol kualitas dalam sistem pendidikan, membantu menjaga standar nasional sambil tetap mendorong inovasi dan peningkatan di tingkat sekolah.

Secara keseluruhan, supervisi pendidikan adalah sebuah proses yang multidimensional dan integral dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Melalui supervisi, para pemimpin pendidikan dapat memastikan bahwa guru-guru memiliki dukungan yang mereka butuhkan untuk berkembang, bahwa kurikulum diimplementasikan dengan baik, dan bahwa siswa belajar dalam lingkungan yang kondusif. Supervisi yang dilakukan secara efektif tidak hanya meningkatkan kualitas pengajaran tetapi juga memperkuat keseluruhan ekosistem pendidikan, menghasilkan siswa yang lebih siap dan berkompeten untuk menghadapi tantangan di masa depan.

4. Peran dan Fungsi Supervisi Pendidikan

Supervisi pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam konteks pengelolaan dan peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Pada dasarnya, supervisi pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai proses pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya. Dalam beberapa dekade terakhir, konsep dan praktik supervisi pendidikan telah berkembang secara signifikan, dengan penekanan pada pendekatan yang lebih kolaboratif dan mendukung pengembangan profesional guru. Menurut Glickman, Gordon, dan Ross-Gordon (2017), supervisi pendidikan harus dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pengajaran melalui bimbingan, umpan balik, dan dukungan yang diberikan kepada guru dalam upaya mereka untuk mencapai standar pendidikan yang tinggi.

Salah satu fungsi utama dari supervisi pendidikan adalah sebagai instrumen untuk meningkatkan kompetensi profesional guru. Supovitz

dan Tognatta (2013) menyoroti bahwa supervisi yang efektif harus mencakup pengamatan kelas, analisis praktik pengajaran, serta diskusi reflektif yang melibatkan guru dalam proses perbaikan diri. Melalui supervisi yang berkelanjutan, guru dapat menerima umpan balik yang konstruktif mengenai metode pengajaran mereka, yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas pengajaran dan pembelajaran di kelas. Lebih dari sekadar evaluasi, supervisi ini harus mendorong dialog profesional antara supervisor dan guru, yang bertujuan untuk mencapai peningkatan berkelanjutan dalam kualitas pendidikan.

Selain itu, supervisi pendidikan berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pendidikan yang telah dirancang di tingkat nasional atau lokal diimplementasikan dengan benar di sekolah-sekolah. Hallinger dan Heck (2010) menekankan bahwa peran supervisor pendidikan adalah menjembatani kebijakan pendidikan dengan praktik di lapangan, memastikan bahwa tujuan dan standar yang telah ditetapkan oleh otoritas pendidikan diterapkan secara efektif. Ini melibatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kurikulum, penilaian, serta program-program pendidikan lainnya, dengan tujuan untuk memastikan keselarasan antara kebijakan dan praktik di sekolah.

Lebih jauh lagi, supervisi pendidikan juga memiliki peran penting dalam menciptakan budaya sekolah yang positif dan inklusif. Fullan (2014) berargumen bahwa salah satu fungsi kritis dari supervisi adalah membangun budaya kolaborasi di sekolah, di mana semua staf merasa didukung dan termotivasi untuk bekerja sama demi mencapai tujuan pendidikan. Dalam konteks ini, supervisi tidak hanya berfokus pada pengawasan teknis, tetapi juga pada pengembangan aspek-aspek sosial dan emosional dari lingkungan kerja. Supervisor yang efektif harus mampu menciptakan suasana yang mendukung pertumbuhan profesional guru, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada kinerja akademik siswa.

Supervisi pendidikan juga memainkan peran sentral dalam proses pengambilan keputusan di sekolah. Menurut Robinson (2011), supervisor pendidikan harus mampu mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Dengan memanfaatkan data yang dikumpulkan dari observasi kelas, penilaian siswa, dan umpan balik dari guru, supervisor dapat mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan dan mengembangkan strategi yang efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Proses ini memastikan bahwa keputusan yang diambil di tingkat sekolah didasarkan pada informasi yang akurat dan relevan, yang pada akhirnya akan mendukung peningkatan kualitas pendidikan.

Lebih penting lagi, supervisi pendidikan harus dilihat sebagai upaya untuk mengelola perubahan dalam konteks pendidikan yang dinamis. Heifetz dan Linsky (2017) menyoroti bahwa dalam lingkungan pendidikan yang terus berubah, supervisor pendidikan harus memiliki kemampuan untuk memimpin perubahan dan menavigasi tantangan yang muncul. Ini termasuk adaptasi terhadap perubahan kurikulum, integrasi teknologi dalam pembelajaran, serta pengelolaan isu-isu sosial yang mungkin memengaruhi lingkungan belajar. Dengan demikian, supervisi pendidikan tidak hanya berfungsi untuk mempertahankan status quo, tetapi juga untuk mendorong inovasi dan peningkatan berkelanjutan dalam praktik pendidikan.

Secara keseluruhan, peran dan fungsi supervisi pendidikan sangatlah komprehensif dan beragam, mencakup aspek evaluasi, pembinaan, manajemen perubahan, dan pengembangan budaya sekolah. Melalui supervisi yang efektif, diharapkan sekolah dapat mencapai standar pendidikan yang lebih tinggi, dengan guru yang terus berkembang secara profesional dan siswa yang mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna. Oleh karena itu, penting bagi para supervisor pendidikan untuk mengembangkan kompetensi yang

diperlukan dalam melaksanakan tugas mereka, serta untuk terus memperbarui pendekatan dan strategi mereka sesuai dengan perkembangan terbaru dalam dunia pendidikan.

5. Prinsip-prinsip Supervisi Pendidikan

Prinsip-prinsip supervisi pendidikan adalah landasan fundamental yang mengarahkan proses supervisi agar dapat berjalan secara efektif dan berdaya guna dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Prinsip-prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman bagi supervisor dalam melaksanakan tugas mereka, tetapi juga sebagai jaminan bahwa seluruh proses supervisi dilakukan secara profesional, adil, dan mendukung perkembangan berkelanjutan bagi para pendidik dan lembaga pendidikan. Dalam dekade terakhir, penelitian dan kajian mengenai supervisi pendidikan telah menggarisbawahi pentingnya penerapan prinsip-prinsip ini untuk mencapai hasil yang optimal dalam sistem pendidikan.

Salah satu prinsip utama dalam supervisi pendidikan adalah prinsip demokratis. Prinsip ini menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan, mulai dari guru, siswa, hingga manajemen sekolah. Menurut Sergiovanni (2015), pendekatan supervisi yang demokratis memungkinkan adanya dialog terbuka antara supervisor dan guru, yang mana guru diberikan kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka, terlibat dalam pengambilan keputusan, dan berkontribusi terhadap proses pengembangan profesional mereka. Prinsip demokratis ini membantu menciptakan suasana kerja yang kolaboratif, di mana setiap individu merasa dihargai dan termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan.

Selain itu, prinsip berkelanjutan menjadi salah satu elemen penting dalam supervisi pendidikan. Supervisi yang dilakukan secara berkelanjutan tidak hanya terbatas pada evaluasi berkala, tetapi juga

melibatkan proses dukungan dan pengembangan yang konsisten sepanjang tahun ajaran. Menurut Fullan (2014), pendekatan supervisi yang berkelanjutan mampu menciptakan perubahan jangka panjang yang lebih stabil dan berdampak pada kualitas pendidikan secara keseluruhan. Dengan supervisi berkelanjutan, guru tidak hanya dievaluasi tetapi juga didukung melalui bimbingan berkelanjutan yang membantu mereka mengatasi tantangan dalam pengajaran dan mengembangkan kemampuan mereka secara profesional.

Prinsip individualisasi juga memainkan peran penting dalam supervisi pendidikan. Setiap guru memiliki kebutuhan, keahlian, dan tantangan yang berbeda, sehingga pendekatan supervisi harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing individu. Robbins dan Judge (2018) menekankan bahwa supervisor yang efektif harus mampu menyesuaikan pendekatan mereka berdasarkan kebutuhan spesifik guru yang mereka awasi. Dengan menyesuaikan metode supervisi, supervisor dapat memberikan dukungan yang lebih efektif, membantu guru mencapai potensi maksimal mereka, dan meningkatkan kualitas pengajaran di kelas.

Keterbukaan adalah prinsip lain yang esensial dalam supervisi pendidikan. Proses supervisi harus dilakukan dengan transparansi penuh, di mana tujuan, kriteria, dan metode supervisi dijelaskan secara jelas kepada para guru. Spillane (2015) mengungkapkan bahwa keterbukaan dalam supervisi membantu membangun kepercayaan antara supervisor dan guru, yang sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan mendukung. Dengan keterbukaan, guru merasa lebih nyaman dalam menerima umpan balik dan lebih termotivasi untuk memperbaiki praktik mereka karena mereka memahami tujuan akhir dari proses supervisi.

Prinsip reflektif juga merupakan elemen penting yang harus diintegrasikan dalam supervisi pendidikan. Glanz (2019) menyatakan bahwa proses refleksi diri sangat penting bagi pengembangan

profesional guru. Supervisi yang mendorong refleksi membantu guru untuk mengevaluasi dan memahami praktik pengajaran mereka, mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan, dan merumuskan strategi pengajaran yang lebih efektif di masa depan. Dengan refleksi yang didorong oleh supervisi, guru dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik pengajaran mereka dan terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas.

Dalam konteks yang lebih luas, penerapan prinsip-prinsip supervisi ini juga berkontribusi terhadap pengembangan budaya organisasi yang positif di sekolah. Supervisi yang dilakukan dengan prinsip-prinsip yang tepat dapat membantu menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung kolaborasi, inovasi, dan pengembangan profesional berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini juga memastikan bahwa supervisi tidak hanya dilihat sebagai alat untuk evaluasi, tetapi juga sebagai proses pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang bagi guru, siswa, dan seluruh komunitas sekolah.

Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip demokratis, berkelanjutan, individualisasi, keterbukaan, dan reflektif dalam supervisi pendidikan, supervisor dapat memainkan peran yang lebih efektif dalam mendukung pengembangan profesional guru dan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Prinsip-prinsip ini membantu memastikan bahwa proses supervisi dilakukan dengan cara yang adil, transparan, dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan, sehingga menciptakan dampak positif yang signifikan bagi semua pihak yang terlibat dalam sistem pendidikan.

6. Jenis-jenis Supervisi Pendidikan

Supervisi pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Melalui supervisi, berbagai aspek proses belajar mengajar, manajemen sekolah,

serta pengembangan profesional guru dapat dipantau, dievaluasi, dan ditingkatkan. Jenis-jenis supervisi pendidikan yang berbeda memiliki fokus dan pendekatan yang unik, masing-masing menawarkan strategi khusus untuk mendukung guru dan sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan.

Salah satu jenis supervisi yang banyak dibahas dalam literatur adalah supervisi klinis. Supervisi klinis merupakan pendekatan yang sangat terfokus pada peningkatan kualitas pengajaran di kelas. Menurut Glanz dan Neville (2017), supervisi klinis berpusat pada hubungan yang kolaboratif antara supervisor dan guru, di mana proses observasi dan umpan balik diarahkan untuk mengidentifikasi serta memperbaiki area-area pengajaran yang memerlukan peningkatan. Proses ini biasanya melibatkan serangkaian langkah yang meliputi pertemuan awal untuk menetapkan tujuan, observasi langsung di kelas, dan pertemuan lanjutan untuk mendiskusikan hasil observasi serta rencana perbaikan. Keunggulan dari supervisi klinis terletak pada kemampuannya untuk memberikan umpan balik yang spesifik dan kontekstual, yang sangat relevan dengan pengalaman pengajaran guru di lapangan.

Jenis supervisi lainnya adalah supervisi administratif, yang memiliki fokus berbeda dari supervisi klinis. Supervisi administratif berkaitan erat dengan aspek manajerial dan kepatuhan terhadap standar pendidikan yang berlaku. Robbins dan Judge (2018) menjelaskan bahwa supervisi administratif melibatkan pemantauan atas pelaksanaan kurikulum, pemanfaatan sumber daya, dan kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi pendidikan. Jenis supervisi ini lebih berfokus pada memastikan bahwa semua proses operasional di sekolah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang ada, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara keseluruhan. Supervisi administratif sering kali melibatkan audit

atau pemeriksaan berkala yang bertujuan untuk menilai efisiensi dan efektivitas manajemen sekolah.

Selain itu, supervisi akademik juga memegang peranan penting dalam dunia pendidikan. Hallinger (2011) menyatakan bahwa supervisi akademik berfokus pada peningkatan kualitas akademik melalui bimbingan dan dukungan terhadap pengembangan kurikulum, strategi pengajaran, serta evaluasi hasil belajar siswa. Supervisor akademik sering kali bekerja sama dengan guru untuk merancang kurikulum yang lebih efektif dan relevan, serta untuk memastikan bahwa metode pengajaran yang digunakan mampu mendukung pencapaian hasil belajar yang optimal. Dalam konteks ini, supervisi akademik juga dapat mencakup pelatihan dan pengembangan profesional guru untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam bidang pengajaran.

Supervisi kolaboratif adalah jenis lain dari supervisi yang semakin banyak diadopsi dalam lingkungan pendidikan. Menurut Spillane (2015), supervisi kolaboratif menekankan pentingnya kerjasama antara supervisor dan guru, di mana keduanya bekerja bersama-sama dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang partisipatif dan mendukung, di mana ide dan perspektif semua anggota komunitas sekolah dihargai. Supervisi kolaboratif juga mendorong guru untuk lebih proaktif dalam mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab mereka terhadap proses pendidikan.

Dalam perkembangan terbaru, supervisi berbasis data atau data-driven instructional supervision juga mendapatkan perhatian lebih dalam literatur pendidikan. Supovitz dan Tognatta (2013) menggambarkan pendekatan ini sebagai penggunaan data yang sistematis untuk membuat keputusan terkait dengan pengajaran dan

pembelajaran. Data yang digunakan bisa berasal dari berbagai sumber, seperti hasil ujian siswa, observasi kelas, dan survei kepuasan siswa. Pendekatan ini memungkinkan supervisor untuk mengidentifikasi dengan tepat area yang memerlukan perbaikan dan untuk merumuskan strategi yang lebih efektif berdasarkan bukti nyata. Dengan supervisi berbasis data, intervensi yang dilakukan bisa lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas supervisi.

Dalam konteks pengembangan profesional dan pemberdayaan guru, supervisi pembinaan atau coaching supervision juga sangat relevan. Heifetz dan Linsky (2017) menjelaskan bahwa jenis supervisi ini lebih menekankan pada pembangunan hubungan jangka panjang antara supervisor dan guru, di mana fokus utamanya adalah pada pengembangan kapasitas dan kemampuan profesional guru. Dalam supervisi pembinaan, supervisor berperan sebagai mentor yang memberikan bimbingan, dukungan, dan saran kepada guru untuk membantu mereka mencapai potensi penuh mereka dalam pengajaran. Pendekatan ini sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang terus berkembang dan adaptif terhadap perubahan.

Secara keseluruhan, berbagai jenis supervisi pendidikan ini menawarkan pendekatan yang berbeda-beda untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pendidikan. Masing-masing jenis supervisi memiliki kekuatan dan tantangannya sendiri, tetapi semuanya bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih efektif, efisien, dan inklusif. Dengan memilih jenis supervisi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan konteks sekolah, pemimpin pendidikan dapat memastikan bahwa mereka memberikan dukungan terbaik kepada guru dan siswa, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan lebih baik.

7. Bentuk-bentuk Supervisi Pendidikan

Supervisi pendidikan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Bentuk-bentuk supervisi pendidikan yang berbeda telah dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan spesifik berbagai lingkungan pendidikan. Setiap bentuk supervisi memiliki pendekatan yang unik, yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu dan untuk mendukung pengembangan profesional guru serta kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Salah satu bentuk supervisi yang paling umum adalah supervisi langsung. Dalam bentuk ini, supervisor, yang sering kali adalah kepala sekolah atau pengawas pendidikan, secara aktif terlibat dalam proses observasi kelas dan memberikan umpan balik langsung kepada guru. Menurut Glanz dan Hord (2017), supervisi langsung memungkinkan supervisor untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam metode pengajaran guru secara real-time. Supervisor kemudian dapat memberikan saran yang konkret dan segera untuk membantu guru meningkatkan praktik pengajaran mereka. Kelebihan dari supervisi langsung adalah kemampuannya untuk memberikan dukungan yang cepat dan spesifik, namun juga menuntut keterlibatan intensif dari supervisor.

Bentuk lain yang berkembang dalam supervisi pendidikan adalah supervisi klinis, yang sering dianggap sebagai bentuk yang lebih mendalam dan reflektif dibandingkan dengan supervisi langsung. Supervisi klinis melibatkan serangkaian langkah yang dimulai dengan pertemuan antara supervisor dan guru untuk menetapkan tujuan supervisi, dilanjutkan dengan observasi kelas, dan diakhiri dengan pertemuan pasca-observasi untuk mendiskusikan temuan dan rencana tindak lanjut. Menurut Zepeda (2016), supervisi klinis memungkinkan guru untuk lebih terlibat dalam proses refleksi terhadap praktik pengajaran mereka dan membantu menciptakan budaya kolaboratif

antara guru dan supervisor. Bentuk ini sangat efektif dalam menciptakan pembelajaran yang berkelanjutan dan dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru.

Selain itu, supervisi kolegial atau peer supervision juga menjadi bentuk yang semakin populer dalam pendidikan. Dalam bentuk ini, guru diberikan kesempatan untuk saling mengawasi dan memberikan umpan balik kepada rekan kerja mereka. Hal ini memungkinkan terjadinya pembelajaran yang saling menguntungkan dan pengembangan profesional secara horizontal. Menurut Hargreaves dan Fullan (2012), supervisi kolegial menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan mendukung, di mana guru merasa lebih nyaman untuk berbagi tantangan dan praktik terbaik mereka. Bentuk supervisi ini tidak hanya meningkatkan keterampilan guru, tetapi juga memperkuat rasa solidaritas dan kolaborasi di antara para pendidik.

Supervisi partisipatif merupakan bentuk lain yang menekankan pentingnya keterlibatan seluruh anggota komunitas sekolah dalam proses supervisi. Dalam pendekatan ini, keputusan mengenai pengajaran dan pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh supervisor, tetapi juga melibatkan masukan dari guru, siswa, dan kadang-kadang orang tua. Spillane (2015) menyoroti bahwa supervisi partisipatif mendorong keterlibatan aktif dari semua pemangku kepentingan, yang dapat menghasilkan keputusan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan. Dengan melibatkan berbagai perspektif, bentuk supervisi ini dapat membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih demokratis dan adaptif.

Di samping itu, supervisi berbasis teknologi semakin penting seiring dengan perkembangan teknologi dalam pendidikan. Bentuk supervisi ini menggunakan alat digital, seperti platform e-learning dan aplikasi observasi kelas, untuk memfasilitasi proses supervisi. Menurut Supovitz dan Tognatta (2013), teknologi dalam supervisi memungkinkan pengumpulan data yang lebih cepat dan analisis yang

lebih mendalam, sehingga memungkinkan supervisor untuk membuat keputusan yang lebih tepat waktu dan berbasis data. Teknologi juga memungkinkan supervisi jarak jauh, yang sangat bermanfaat dalam konteks sekolah yang tersebar secara geografis atau dalam situasi di mana interaksi langsung sulit dilakukan.

Terakhir, supervisi reflektif menekankan pentingnya refleksi pribadi bagi guru dalam proses supervisi. Dalam bentuk ini, guru didorong untuk secara mandiri menganalisis praktik pengajaran mereka, dengan bimbingan dari supervisor. Menurut Schön (2016), refleksi dalam tindakan adalah komponen kunci dari supervisi reflektif, di mana guru tidak hanya menerima umpan balik, tetapi juga secara aktif berpartisipasi dalam proses refleksi untuk meningkatkan praktik mereka. Bentuk supervisi ini sangat efektif dalam mempromosikan kesadaran diri dan pertumbuhan profesional jangka panjang.

Secara keseluruhan, berbagai bentuk supervisi pendidikan ini menawarkan pendekatan yang berbeda-beda untuk mendukung pengembangan guru dan peningkatan kualitas pendidikan. Pemilihan bentuk supervisi yang tepat harus disesuaikan dengan konteks, kebutuhan, dan tujuan dari setiap institusi pendidikan. Dengan menggabungkan elemen-elemen dari berbagai bentuk supervisi ini, pemimpin pendidikan dapat menciptakan strategi supervisi yang komprehensif dan efektif, yang tidak hanya meningkatkan kompetensi guru tetapi juga memperkuat kualitas pendidikan secara keseluruhan.

8. Pendekatan Supervisi Pendidikan

Supervisi pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Pendekatan-pendekatan dalam supervisi pendidikan telah berkembang seiring dengan perubahan paradigma dalam pendidikan itu sendiri, serta kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan dan tantangan baru. Dalam

dekade terakhir, banyak ahli yang berkontribusi pada pengembangan pendekatan-pendekatan ini, yang masing-masing memiliki fokus dan tujuan yang berbeda dalam mengoptimalkan kinerja tenaga pendidik.

Salah satu pendekatan yang signifikan dalam supervisi pendidikan adalah pendekatan klinis. Pendekatan ini menekankan pada observasi langsung dan interaksi antara supervisor dan guru dalam situasi pengajaran nyata. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memberikan umpan balik yang spesifik dan berbasis bukti kepada guru, sehingga mereka dapat memperbaiki dan mengembangkan praktik pengajaran mereka. Zepeda (2016) menyoroti bahwa pendekatan klinis memungkinkan supervisor untuk berfokus pada kebutuhan individual guru, memberikan bimbingan yang bersifat personal, serta mendorong refleksi diri yang mendalam pada praktik pengajaran.

Selain pendekatan klinis, pendekatan kolaboratif juga telah mendapatkan perhatian yang signifikan. Pendekatan ini melibatkan kerja sama yang erat antara supervisor dan guru dalam proses supervisi. Alih-alih supervisor berperan sebagai pengawas yang otoritatif, dalam pendekatan kolaboratif, supervisor dan guru bekerja sebagai mitra yang setara dalam mengidentifikasi masalah, mencari solusi, dan merencanakan pengembangan lebih lanjut. Menurut Glickman, Gordon, dan Ross-Gordon (2014), pendekatan kolaboratif dalam supervisi pendidikan menekankan pentingnya dialog dan partisipasi aktif dari kedua belah pihak, yang pada gilirannya dapat meningkatkan keterlibatan dan komitmen guru dalam proses perbaikan kinerja.

Pendekatan berbasis data juga merupakan salah satu pendekatan yang telah menjadi semakin populer dalam supervisi pendidikan. Pendekatan ini menggunakan data sebagai dasar untuk semua keputusan supervisi, termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran. Dengan mengandalkan data yang akurat

dan relevan, supervisor dapat memberikan umpan balik yang lebih objektif dan terukur kepada guru. Supovitz dan Tognatta (2013) menyatakan bahwa penggunaan data dalam supervisi pendidikan dapat membantu dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pengajaran, serta dalam merumuskan strategi peningkatan yang lebih efektif dan efisien.

Di sisi lain, pendekatan reflektif juga semakin dianggap penting dalam konteks supervisi pendidikan. Pendekatan ini mendorong guru untuk secara aktif terlibat dalam refleksi atas praktik mereka sendiri, dengan tujuan untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang proses pengajaran dan bagaimana hal itu dapat ditingkatkan. Menurut Schön (2016), refleksi adalah kunci dalam mengembangkan kesadaran diri dan kompetensi profesional, dan supervisi yang mendorong refleksi memungkinkan guru untuk lebih mandiri dalam mengambil langkah-langkah perbaikan.

Pendekatan transformasional juga tak kalah pentingnya dalam supervisi pendidikan. Pendekatan ini berfokus pada penciptaan perubahan signifikan dalam praktik pengajaran dan budaya sekolah melalui inspirasi dan motivasi. Sun dan Leithwood (2015) menggambarkan bahwa supervisi yang bersifat transformasional bertujuan untuk mengembangkan visi bersama, memotivasi guru untuk berinovasi, dan mendorong mereka untuk mencapai potensi penuh mereka. Pendekatan ini sangat efektif dalam konteks di mana perubahan mendasar diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Secara keseluruhan, pendekatan-pendekatan dalam supervisi pendidikan seperti pendekatan klinis, kolaboratif, berbasis data, reflektif, dan transformasional menawarkan berbagai strategi untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Setiap pendekatan memiliki kelebihan tersendiri dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks spesifik dari sekolah atau lembaga

pendidikan. Pemilihan pendekatan yang tepat oleh supervisor akan sangat mempengaruhi efektivitas supervisi dan, pada akhirnya, keberhasilan pendidikan di institusi yang dipimpinnya.

9. Dimensi Supervisi Pendidikan

Supervisi pendidikan adalah proses penting yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran di institusi pendidikan. Dalam menjalankan supervisi, terdapat beberapa dimensi yang perlu diperhatikan oleh supervisor pendidikan, karena setiap dimensi ini memberikan kontribusi yang berbeda namun saling melengkapi dalam mencapai tujuan akhir, yaitu perbaikan kualitas pendidikan. Dimensi-dimensi ini mencakup berbagai aspek yang mencakup tugas, tanggung jawab, serta pendekatan yang digunakan oleh supervisor dalam mendukung pengembangan profesional guru dan efektivitas pembelajaran di sekolah.

Salah satu dimensi utama dalam supervisi pendidikan adalah dimensi pengembangan profesional guru. Supervisi pendidikan berperan penting dalam mengidentifikasi kebutuhan pengembangan profesional guru, serta menyediakan dukungan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut Sergiovanni dan Starratt (2015), dimensi ini menekankan pentingnya membimbing guru dalam mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk meningkatkan praktik pengajaran mereka. Supervisor harus berperan sebagai fasilitator yang membantu guru dalam proses refleksi diri, identifikasi kelemahan, serta perencanaan program pengembangan yang relevan dengan kebutuhan mereka.

Dimensi lainnya adalah dimensi pengawasan dan penilaian kinerja**,** yang mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan tugas guru dan pencapaian hasil belajar siswa. Dalam dimensi ini, supervisor bertugas untuk memantau kinerja guru secara sistematis dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Hallinger dan Heck (2011) menyatakan

bahwa evaluasi yang objektif dan berdasarkan data adalah kunci dalam dimensi ini, karena membantu dalam mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan memberikan dasar yang kuat untuk perbaikan berkelanjutan. Penggunaan instrumen evaluasi yang valid dan reliabel sangat penting dalam memastikan bahwa penilaian yang dilakukan dapat diandalkan dan memberikan gambaran yang akurat tentang kinerja guru.

Dimensi kolaborasi juga menjadi elemen penting dalam supervisi pendidikan. Dalam dimensi ini, fokusnya adalah pada pembentukan hubungan kerjasama antara supervisor, guru, dan anggota komunitas sekolah lainnya. Pendekatan kolaboratif memungkinkan terjadinya pertukaran ide dan praktik terbaik, serta memperkuat hubungan kerja yang saling mendukung di antara para guru. Menurut Glickman, Gordon, dan Ross-Gordon (2014), kolaborasi yang efektif dalam supervisi pendidikan tidak hanya meningkatkan keterlibatan guru dalam proses supervisi, tetapi juga menciptakan budaya sekolah yang lebih inklusif dan mendukung inovasi.

Selanjutnya, dimensi refleksi dan pembelajaran berkelanjutan juga merupakan aspek yang tidak bisa diabaikan dalam supervisi pendidikan. Dimensi ini melibatkan dorongan kepada guru untuk secara aktif terlibat dalam refleksi terhadap praktik mengajar mereka, serta untuk terus belajar dan berkembang secara profesional. Schön (2016) menekankan bahwa refleksi adalah inti dari pembelajaran dewasa dan merupakan elemen yang esensial dalam pengembangan profesional yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, supervisor pendidikan harus mendorong guru untuk mempertanyakan praktik mereka sendiri, mencari cara untuk memperbaikinya, dan berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran yang berkelanjutan.

Terakhir, dimensi dukungan emosional juga harus menjadi perhatian dalam supervisi pendidikan. Supervisi yang efektif tidak

hanya menilai dan mengarahkan, tetapi juga mendukung kesejahteraan emosional guru. Eva et al. (2019) menekankan bahwa dukungan emosional dari supervisor dapat membantu mengurangi stres kerja, meningkatkan motivasi, dan meningkatkan kepuasan kerja guru. Dengan memperhatikan kesejahteraan emosional guru, supervisor dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan produktif, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada proses pembelajaran di kelas.

Secara keseluruhan, dimensi-dimensi supervisi pendidikan seperti pengembangan profesional, pengawasan dan penilaian kinerja, kolaborasi, refleksi dan pembelajaran berkelanjutan, serta dukungan emosional, semuanya merupakan aspek krusial yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan supervisi. Setiap dimensi ini berkontribusi terhadap tercapainya tujuan supervisi, yaitu peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Dengan memperhatikan dan mengintegrasikan berbagai dimensi ini, supervisor pendidikan dapat memainkan peran yang lebih efektif dalam mendukung guru dan meningkatkan hasil belajar siswa.

10. Urgensi Supervisi Pendidikan

Supervisi pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah. Supervisi bukan hanya sekadar pengawasan terhadap kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga mencakup upaya sistematis untuk memastikan bahwa seluruh proses pendidikan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan mencapai hasil yang optimal. Urgensi supervisi pendidikan dapat dilihat dari berbagai perspektif, termasuk peningkatan kualitas pengajaran, pembinaan profesional guru, serta pencapaian tujuan pendidikan secara keseluruhan.

Pertama-tama, supervisi pendidikan sangat penting untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Dalam konteks ini, supervisor

bertanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas metode pengajaran yang digunakan oleh guru. Menurut Hallinger dan Heck (2011), supervisi yang efektif dapat membantu guru dalam mengidentifikasi kelemahan dalam praktik pengajaran mereka dan memberikan umpan balik konstruktif yang diperlukan untuk perbaikan. Proses ini memungkinkan guru untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan siswa, serta meningkatkan hasil belajar mereka. Dengan demikian, supervisi pendidikan berfungsi sebagai mekanisme yang memastikan bahwa kualitas pengajaran selalu berada pada tingkat yang tinggi.

Selain itu, supervisi pendidikan juga memiliki urgensi dalam mendukung pengembangan profesional guru. Supervisi yang baik tidak hanya berfokus pada penilaian, tetapi juga pada pembinaan dan pengembangan guru. Melalui supervisi, guru mendapatkan bimbingan dan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan kompetensi mereka. Menurut Glickman, Gordon, dan Ross-Gordon (2014), supervisi yang berbasis pada pengembangan profesional membantu guru untuk meningkatkan keterampilan pedagogis mereka dan tetap mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang pendidikan. Hal ini sangat penting dalam era globalisasi dan teknologi yang terus berkembang, di mana guru perlu terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka agar tetap relevan dan efektif dalam mengajar.

Lebih lanjut, urgensi supervisi pendidikan juga dapat dilihat dari perspektif peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pendidikan. Supervisi yang dilakukan dengan baik dapat memastikan bahwa setiap komponen dalam sistem pendidikan, termasuk guru, staf administrasi, dan manajemen sekolah, bekerja sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Eva et al. (2019) menyatakan bahwa supervisi yang berorientasi pada akuntabilitas dapat membantu sekolah dalam mempertahankan kepercayaan publik dan memastikan bahwa dana serta sumber daya

yang ada digunakan secara efektif dan efisien. Dalam hal ini, supervisi bertindak sebagai alat kontrol kualitas yang penting dalam menjaga integritas dan kualitas layanan pendidikan.

Supervisi pendidikan juga mendukung penciptaan budaya sekolah yang positif. Supervisor yang efektif dapat membantu dalam menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif untuk belajar, di mana guru dan siswa merasa didukung dan dihargai. Menurut Fullan (2014), salah satu peran utama supervisi adalah membangun budaya kerja yang kolaboratif dan inklusif, di mana semua anggota komunitas sekolah bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Budaya sekolah yang positif ini sangat penting dalam meningkatkan motivasi guru dan siswa, serta dalam menciptakan iklim yang mendukung pembelajaran yang efektif.

Terakhir, urgensi supervisi pendidikan juga terletak pada kemampuannya untuk memfasilitasi perubahan dan inovasi dalam praktik pendidikan. Dalam lingkungan pendidikan yang dinamis, perubahan adalah suatu keharusan. Heifetz dan Linsky (2017) menekankan bahwa supervisor pendidikan harus menjadi agen perubahan yang mendorong inovasi dan adaptasi terhadap tantangan baru. Melalui supervisi, sekolah dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perubahan, mengembangkan strategi inovatif, dan memastikan bahwa perubahan tersebut diterapkan dengan cara yang efektif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, supervisi pendidikan merupakan elemen kunci dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan. Urgensinya terletak pada kemampuannya untuk meningkatkan kualitas pengajaran, mendukung pengembangan profesional guru, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, menciptakan budaya sekolah yang positif, serta memfasilitasi perubahan dan inovasi. Dengan supervisi yang efektif, sekolah dapat memastikan bahwa tujuan pendidikan tercapai dengan baik dan bahwa semua pihak yang

terlibat dalam proses pendidikan bekerja secara optimal untuk kepentingan siswa.

E. Norma, Standar, prosedur dan Kriteria Supervisi

Norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam supervisi pendidikan merupakan elemen-elemen penting yang memastikan proses supervisi berlangsung secara sistematis, terukur, dan berdampak positif terhadap kualitas pendidikan. Supervisi pendidikan yang efektif tidak hanya berfokus pada pemantauan dan penilaian, tetapi juga pada peningkatan kualitas pengajaran, pengembangan profesional, dan pencapaian tujuan pendidikan yang lebih luas. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam supervisi pendidikan diterapkan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Norma dalam supervisi pendidikan mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang membimbing pelaksanaan supervisi. Norma-norma ini melibatkan nilai-nilai seperti transparansi, keadilan, dan akuntabilitas. Menurut Glickman, Gordon, dan Ross-Gordon (2014), norma supervisi pendidikan harus mencerminkan komitmen terhadap peningkatan kualitas pendidikan melalui pembinaan yang mendukung dan kolaboratif. Norma ini juga mencakup etika profesional, di mana supervisor diharapkan untuk bertindak dengan integritas, menghormati privasi dan otonomi guru, serta memastikan bahwa proses supervisi tidak digunakan untuk tujuan yang bersifat diskriminatif atau merugikan.

Standar supervisi pendidikan adalah pedoman yang menetapkan ekspektasi kinerja yang harus dicapai dalam proses supervisi. Standar ini memberikan kerangka kerja yang jelas bagi supervisor dalam melaksanakan tugasnya. Leithwood et al. (2012) menyatakan bahwa standar supervisi pendidikan harus mencakup aspek-aspek seperti kualitas pengajaran, pengembangan profesional guru, serta efektivitas

pembelajaran. Standar ini membantu memastikan bahwa supervisi dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya standar yang jelas, supervisor dapat mengukur pencapaian dan kemajuan guru, serta memberikan umpan balik yang berfokus pada perbaikan yang nyata dan berkelanjutan.

Prosedur supervisi pendidikan melibatkan langkah-langkah yang harus diikuti dalam pelaksanaan supervisi. Prosedur ini dirancang untuk memastikan bahwa supervisi dilakukan secara sistematis, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Menurut Hallinger (2011), prosedur supervisi pendidikan harus mencakup persiapan yang matang, seperti pengumpulan data awal, perencanaan jadwal observasi, dan pengaturan pertemuan dengan guru. Selama pelaksanaan, supervisor harus mengikuti protokol yang telah ditetapkan, seperti melakukan observasi kelas, wawancara dengan guru, dan analisis data pembelajaran. Prosedur ini juga mencakup tahap evaluasi, di mana hasil supervisi didiskusikan dengan guru, dan rencana tindak lanjut disusun untuk mendukung pengembangan lebih lanjut.

Kriteria supervisi pendidikan adalah ukuran atau indikator yang digunakan untuk menilai efektivitas dan hasil dari proses supervisi. Kriteria ini mencakup berbagai aspek, seperti keterlibatan guru dalam proses pembelajaran, kualitas interaksi antara guru dan siswa, serta hasil belajar siswa. Supovitz dan Tognatta (2013) menekankan bahwa kriteria supervisi harus didasarkan pada bukti empiris dan relevan dengan tujuan pendidikan. Kriteria ini memungkinkan supervisor untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam praktik pengajaran, serta memberikan rekomendasi yang spesifik dan dapat ditindaklanjuti. Penggunaan kriteria yang jelas dan obyektif membantu memastikan bahwa supervisi tidak hanya bersifat evaluatif, tetapi juga konstruktif dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan.

Secara keseluruhan, norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam supervisi pendidikan merupakan komponen-komponen yang saling terkait dan bersama-sama membentuk kerangka kerja yang kokoh untuk pelaksanaan supervisi yang efektif. Dengan mengikuti norma yang etis, mematuhi standar yang telah ditetapkan, menjalankan prosedur yang sistematis, dan menerapkan kriteria yang obyektif, supervisor pendidikan dapat membantu memastikan bahwa proses supervisi tidak hanya menghasilkan penilaian yang akurat, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan profesionalisme guru.

Pengawasan pendidikan dan supervisi pendidikan memainkan peran yang sangat penting dalam manajemen pendidikan dan implementasi kebijakan pendidikan nasional. Kedua aspek ini tidak hanya memastikan bahwa standar kualitas pendidikan terpenuhi, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme untuk mendorong perbaikan berkelanjutan dalam proses pembelajaran dan pengajaran di tingkat sekolah. Pengawasan dan supervisi yang efektif adalah fondasi bagi manajemen pendidikan yang tangguh dan relevan, yang sejalan dengan tujuan strategis kebijakan pendidikan nasional.

Pengawasan pendidikan berfokus pada pemantauan dan evaluasi sistematis terhadap kinerja sekolah dan tenaga pendidik untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan standar pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menurut Harris dan Jones (2018), pengawasan pendidikan yang efektif membantu mengidentifikasi area yang membutuhkan peningkatan, mendorong akuntabilitas, dan memastikan bahwa setiap institusi pendidikan beroperasi sesuai dengan pedoman nasional yang telah ditentukan. Dalam konteks kebijakan pendidikan nasional, pengawasan bertindak sebagai alat pengendalian yang memastikan bahwa reformasi dan inisiatif pendidikan dijalankan dengan cara yang konsisten dan berdampak positif terhadap kualitas pendidikan. Dengan demikian,

pengawasan pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai kontrol kualitas, tetapi juga sebagai instrumen penting untuk mengukur keberhasilan kebijakan dan program pendidikan yang diterapkan di seluruh negeri.

Supervisi pendidikan, di sisi lain, lebih menekankan pada pembinaan dan pengembangan profesional guru serta staf pendidikan. Menurut Leithwood et al. (2012), supervisi pendidikan adalah proses yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi guru melalui bimbingan, pelatihan, dan umpan balik yang berkelanjutan. Supervisi yang baik menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran dan inovasi, serta membantu guru untuk terus memperbaiki praktik pengajaran mereka. Dalam kaitannya dengan manajemen pendidikan, supervisi berperan penting dalam memastikan bahwa kurikulum diterapkan secara efektif, bahwa strategi pengajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, dan bahwa tujuan pendidikan nasional tercapai melalui peningkatan kualitas pengajaran di kelas.

Kedua elemen ini—pengawasan dan supervisi—juga saling melengkapi dalam mendukung kebijakan pendidikan nasional. Kebijakan pendidikan yang dirumuskan di tingkat nasional sering kali membutuhkan adaptasi dan implementasi yang sesuai di tingkat sekolah. Di sinilah pengawasan dan supervisi memainkan peran kunci: pengawasan memastikan bahwa kebijakan diterapkan dengan benar dan sesuai dengan standar nasional, sementara supervisi memastikan bahwa guru dan staf memiliki dukungan yang mereka butuhkan untuk menerjemahkan kebijakan ini ke dalam praktik pengajaran yang efektif. Spillane (2015) menekankan bahwa tanpa supervisi yang memadai, upaya untuk menerapkan kebijakan pendidikan baru sering kali menghadapi resistensi atau gagal mencapai hasil yang diinginkan, karena kurangnya dukungan dan bimbingan kepada para pendidik.

Lebih jauh lagi, dalam manajemen pendidikan, pengawasan dan supervisi berfungsi sebagai mekanisme untuk mengumpulkan data dan informasi yang penting untuk pengambilan keputusan yang

berdasarkan bukti. Menurut Supovitz dan Tognatta (2013), data yang dikumpulkan melalui pengawasan dan supervisi memungkinkan pemangku kebijakan untuk mengevaluasi efektivitas program pendidikan, menilai kesenjangan dalam pencapaian siswa, dan mengidentifikasi area yang membutuhkan intervensi tambahan. Dengan kata lain, pengawasan dan supervisi memberikan umpan balik yang penting untuk perbaikan berkelanjutan dan penyesuaian strategi di tingkat kebijakan nasional.

Secara keseluruhan, pengawasan pendidikan dan supervisi pendidikan merupakan komponen esensial dalam manajemen pendidikan yang efektif dan penerapan kebijakan pendidikan nasional. Pengawasan memastikan bahwa semua lembaga pendidikan mematuhi standar yang telah ditetapkan, sementara supervisi menyediakan dukungan yang diperlukan bagi guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran mereka. Dengan demikian, keduanya berperan penting dalam menjamin bahwa tujuan-tujuan pendidikan nasional tercapai, sekaligus memastikan bahwa pendidikan di seluruh negeri berjalan dengan efisiensi, kualitas, dan keadilan yang diharapkan.

F. Persamaan dan Perbedaan Pengawasan dengan Supervisi Pendidikan

Pengawasan pendidikan dan supervisi pendidikan adalah dua konsep yang sering kali digunakan secara bergantian dalam literatur pendidikan, meskipun keduanya memiliki fokus dan pendekatan yang sedikit berbeda. Namun, keduanya memiliki persamaan yang signifikan dalam tujuan utama mereka, yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan bahwa proses pembelajaran di sekolah berjalan dengan efektif dan efisien. Persamaan antara pengawasan dan supervisi pendidikan dapat dilihat dari beberapa aspek yang melibatkan tujuan, fungsi, dan proses yang dijalankan dalam lingkup manajemen pendidikan.

Pertama, baik pengawasan maupun supervisi pendidikan memiliki tujuan utama untuk memastikan bahwa kualitas pendidikan yang diberikan di sekolah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga pendidikan. Menurut Harris dan Jones (2018), pengawasan dan supervisi berfungsi sebagai alat kontrol kualitas yang penting untuk memantau dan menilai kinerja sekolah, guru, serta pencapaian siswa. Keduanya bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam praktik pendidikan, sehingga langkah-langkah perbaikan dapat diambil untuk meningkatkan hasil belajar siswa.

Kedua, pengawasan dan supervisi pendidikan sama-sama menekankan pentingnya akuntabilitas dalam proses pendidikan. Leithwood et al. (2012) menekankan bahwa pengawasan dan supervisi menciptakan kerangka kerja di mana guru, staf, dan manajemen sekolah harus bertanggung jawab atas hasil yang dicapai. Dalam kedua konsep ini, ada harapan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan harus bekerja secara transparan dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengawasan dan supervisi berperan dalam memastikan bahwa semua kegiatan di sekolah dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku.

Ketiga, pengawasan dan supervisi pendidikan keduanya melibatkan proses pengumpulan data yang sistematis dan analisis informasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pendidikan. Supovitz dan Tognatta (2013) menjelaskan bahwa baik pengawasan maupun supervisi memerlukan penggunaan data untuk menilai kinerja sekolah, efektivitas program pendidikan, dan pencapaian siswa. Data ini kemudian digunakan untuk menginformasikan kebijakan, strategi, dan intervensi yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan demikian,

pengawasan dan supervisi memiliki peran penting dalam menciptakan pendidikan yang berbasis bukti (evidence-based education).

Selain itu, pengawasan dan supervisi pendidikan juga sama-sama berfokus pada pengembangan profesional tenaga pendidik. Meskipun supervisi lebih langsung terkait dengan pembinaan dan pelatihan guru, pengawasan juga berperan dalam mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan, serta memastikan bahwa sumber daya yang diperlukan untuk pengembangan profesional disediakan. Spillane (2015) mencatat bahwa kedua proses ini saling melengkapi dalam mendorong peningkatan kompetensi guru, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada kualitas pengajaran dan hasil belajar siswa.

Dalam hal metodologi, pengawasan dan supervisi pendidikan sering kali menggunakan pendekatan yang mirip, seperti observasi kelas, wawancara, dan analisis dokumen. Keduanya juga melibatkan pemantauan berkelanjutan dan penilaian terhadap praktik-praktik pendidikan untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan tercapai secara efektif. Menurut Fullan (2014), meskipun pengawasan sering kali lebih berorientasi pada kepatuhan dan penegakan standar, sementara supervisi lebih berfokus pada pembinaan dan pengembangan, keduanya tetap saling berkaitan dalam upaya bersama untuk mencapai kualitas pendidikan yang lebih baik.

Secara keseluruhan, pengawasan dan supervisi pendidikan memiliki banyak kesamaan dalam hal tujuan, fungsi, dan pendekatan yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Keduanya merupakan alat penting dalam manajemen pendidikan yang berfungsi untuk memastikan bahwa standar pendidikan dipatuhi dan bahwa proses pembelajaran berlangsung secara efektif. Dengan adanya pengawasan dan supervisi yang kuat, institusi pendidikan dapat lebih baik dalam memenuhi tanggung jawab mereka untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi semua siswa.

Pengawasan dan supervisi pendidikan adalah dua konsep yang sangat penting dalam konteks manajemen dan pengelolaan pendidikan, meskipun sering kali disalahartikan sebagai hal yang sama. Kedua konsep ini memainkan peran yang krusial dalam memastikan kualitas pendidikan, namun memiliki fokus, pendekatan, dan tujuan yang berbeda. Memahami perbedaan antara pengawasan dan supervisi, serta bagaimana keduanya saling melengkapi, adalah kunci untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih luas.

Pengawasan pendidikan, secara umum, merujuk pada upaya untuk memastikan bahwa standar-standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga pendidikan dipatuhi oleh sekolah-sekolah dan tenaga pendidik. Menurut penelitian terbaru yang dilakukan oleh Harris dan Jones (2018), pengawasan pendidikan berfungsi sebagai alat utama untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, standar, dan kebijakan pendidikan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap institusi pendidikan menjalankan operasinya sesuai dengan peraturan dan standar kualitas yang telah ditetapkan oleh otoritas pendidikan. Dalam konteks ini, pengawasan berperan sebagai mekanisme kontrol dan penegakan, yang sering kali melibatkan inspeksi formal, audit, dan penilaian kinerja institusi pendidikan secara menyeluruh.

Sebaliknya, supervisi pendidikan memiliki pendekatan yang lebih berfokus pada pengembangan profesional dan perbaikan kualitas pengajaran. Supovitz dan Tognatta (2013) mengemukakan bahwa supervisi pendidikan adalah proses yang lebih mendalam dan interaktif, yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru melalui bimbingan, pelatihan, dan umpan balik yang konstruktif. Supervisi tidak hanya sekedar menilai kinerja guru, tetapi lebih pada bagaimana membantu guru untuk mengembangkan keterampilan mereka, mengatasi tantangan dalam pengajaran, dan meningkatkan efektivitas proses pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, pendekatan

supervisi lebih berorientasi pada pembelajaran dan pengembangan berkelanjutan.

Perbedaan mendasar antara pengawasan dan supervisi juga dapat dilihat dari cara keduanya dilaksanakan. Pengawasan sering kali melibatkan pendekatan yang lebih formal, dengan standar yang ketat dan prosedur evaluasi yang jelas. Pengawasan cenderung bersifat top-down, di mana pihak yang berwenang memeriksa dan menilai apakah sekolah-sekolah mematuhi aturan yang berlaku. Menurut Leithwood et al. (2012), pengawasan pendidikan cenderung fokus pada hasil akhir, seperti pencapaian standar akademik, kepatuhan terhadap kurikulum, dan penggunaan anggaran pendidikan.

Di sisi lain, supervisi pendidikan lebih bersifat kolaboratif dan partisipatif. Spillane (2015) menekankan bahwa supervisi efektif melibatkan dialog terbuka antara supervisor dan guru, dengan tujuan untuk bersama-sama mencari solusi atas masalah yang dihadapi dalam pengajaran. Pendekatan ini lebih mendukung budaya belajar di antara guru, di mana mereka didorong untuk reflektif terhadap praktik mereka sendiri dan terus berusaha untuk perbaikan.

Selain itu, ada juga perbedaan dalam tujuan akhir dari pengawasan dan supervisi. Pengawasan bertujuan untuk menjaga akuntabilitas dan memastikan bahwa sekolah mematuhi kebijakan dan regulasi yang telah ditetapkan. Pengawasan juga bertujuan untuk menilai dan menjamin kualitas dari pelaksanaan kurikulum serta penggunaan sumber daya pendidikan. Fullan (2014) menjelaskan bahwa pengawasan pendidikan sering kali dipandang sebagai alat untuk menjaga stabilitas dan konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan di berbagai tingkatan.

Supervisi, di sisi lain, lebih bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran secara langsung. Supervisi berfokus pada pengembangan profesional guru, dengan tujuan akhir

untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Heifetz dan Linsky (2017) menambahkan bahwa supervisi yang baik adalah yang mampu menciptakan lingkungan yang mendukung bagi guru untuk berkembang dan berinovasi, serta mendorong mereka untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan dalam pendidikan.

Kedua konsep ini, meskipun berbeda, sebenarnya saling melengkapi dalam mencapai tujuan pendidikan yang lebih besar. Pengawasan memberikan kerangka kerja yang memastikan bahwa institusi pendidikan mematuhi standar yang ditetapkan dan bertanggung jawab atas kinerjanya. Di sisi lain, supervisi memberikan dukungan dan bimbingan yang dibutuhkan oleh guru untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas pengajaran mereka.

Secara keseluruhan, perbedaan antara pengawasan dan supervisi pendidikan terletak pada fokus, pendekatan, dan tujuan akhir masing-masing. Pengawasan berfokus pada kepatuhan dan akuntabilitas, sementara supervisi lebih berorientasi pada pengembangan profesional dan peningkatan kualitas pengajaran. Keduanya diperlukan untuk memastikan bahwa institusi pendidikan tidak hanya memenuhi standar yang telah ditetapkan, tetapi juga terus berkembang dan berinovasi untuk memberikan pendidikan yang berkualitas bagi semua siswa.

BAB XII
MANAJEMEN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

A. Manajamen Mutu Pendidikan

Manajemen mutu dan manajemen perubahan adalah dua elemen fundamental dalam pengelolaan satuan pendidikan, terutama di Sekolah Dasar (SD). Kedua konsep ini tidak hanya saling berkaitan tetapi juga saling melengkapi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Manajemen mutu berfokus pada menjaga dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan, sedangkan manajemen perubahan memastikan bahwa institusi pendidikan mampu beradaptasi dengan dinamika dan tuntutan lingkungan yang terus berubah. Implementasi yang efektif dari kedua aspek ini menjadi krusial dalam membentuk lingkungan pendidikan yang responsif dan inovatif.

1. Manajemen Mutu dalam Pendidikan Dasar

Manajemen mutu dalam pendidikan merupakan upaya sistematis untuk memastikan bahwa seluruh proses pendidikan memenuhi atau melebihi standar yang telah ditetapkan. Di Sekolah Dasar, manajemen mutu mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan kurikulum, proses pembelajaran, hingga kinerja guru dan siswa. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan berkualitas tinggi dan relevan dengan kebutuhan siswa serta masyarakat luas.

Menurut Sallis (2014), manajemen mutu dalam pendidikan melibatkan pendekatan total yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan peningkatan berkelanjutan. Dalam konteks Sekolah Dasar, ini berarti setiap komponen sekolah harus terlibat aktif

dalam upaya peningkatan mutu. Kepala sekolah, sebagai pemimpin institusi, memiliki tanggung jawab utama untuk mengarahkan dan memotivasi seluruh staf agar berkomitmen pada peningkatan kualitas pendidikan. Seperti yang dikemukakan oleh Mulyasa (2017), kepala sekolah harus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil mendukung pencapaian visi dan misi sekolah. Dengan demikian, manajemen mutu menjadi landasan bagi terciptanya lingkungan belajar yang kondusif dan produktif.

2. Kerangka Perspektif Manajemen Mutu Pendidikan

Manajemen mutu dan manajemen perubahan adalah dua komponen esensial dalam pengelolaan satuan pendidikan, khususnya di Sekolah Dasar. Kedua aspek ini harus dijalankan secara simultan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang dinamis, inovatif, dan berkelanjutan. Manajemen mutu memastikan bahwa standar pendidikan yang tinggi selalu dijaga dan ditingkatkan, sementara manajemen perubahan memastikan bahwa sekolah mampu beradaptasi dengan tuntutan dan tantangan baru yang muncul. Dengan mengintegrasikan kedua aspek ini secara efektif, sekolah dapat mencapai tujuan pendidikan yang optimal dan relevan dengan kebutuhan masa kini dan masa depan.

Manajemen mutu dalam pendidikan dasar adalah pendekatan strategis yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses dan hasil pendidikan memenuhi atau melampaui standar yang telah ditetapkan. Rasionalisasi dari manajemen mutu dalam pendidikan dasar didasarkan pada kebutuhan untuk memberikan pendidikan yang berkualitas tinggi dan merata kepada semua siswa, sehingga mereka dapat berkembang secara holistik. Manajemen mutu tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pada pengembangan karakter dan keterampilan sosial siswa yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di masa depan.

Menurut Sallis (2014), manajemen mutu dalam pendidikan dasar melibatkan serangkaian proses yang sistematis untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan peningkatan berkelanjutan. Rasionalisasi dari pendekatan ini adalah untuk menciptakan suatu sistem pendidikan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan siswa, masyarakat, dan tuntutan global. Dalam konteks ini, manajemen mutu menjadi alat yang vital untuk memastikan bahwa setiap siswa menerima pendidikan yang setara dan memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil.

Hakikat dari manajemen mutu dalam pendidikan dasar terletak pada komitmen untuk terus menerus meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Ini mencakup segala aspek mulai dari kurikulum, metode pengajaran, hingga evaluasi dan umpan balik. Hallinger (2011) menyatakan bahwa manajemen mutu yang efektif harus mampu menciptakan budaya peningkatan berkelanjutan di sekolah, di mana setiap guru, staf, dan siswa memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi terhadap kualitas pendidikan. Ini berarti bahwa semua elemen dalam sekolah harus terlibat aktif dalam proses manajemen mutu, termasuk kepala sekolah yang berperan sebagai pemimpin dalam mengarahkan dan memotivasi seluruh komunitas sekolah.

Lebih lanjut, Fullan (2014) menekankan bahwa manajemen mutu dalam pendidikan dasar harus berorientasi pada hasil, yaitu pencapaian standar pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas pendidikan. Namun, pencapaian ini tidak hanya diukur dari hasil ujian atau nilai akademik, tetapi juga dari pengembangan sikap, nilai, dan keterampilan sosial siswa. Oleh karena itu, manajemen mutu harus memperhatikan keseimbangan antara aspek kognitif dan non-kognitif dalam pendidikan.

Dalam praktiknya, manajemen mutu juga harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Ini berarti bahwa sekolah harus mampu mengidentifikasi tantangan spesifik yang dihadapi oleh siswa

dan mengembangkan strategi untuk mengatasinya. Sebagai contoh, jika suatu sekolah berada di daerah dengan latar belakang sosial-ekonomi yang rendah, maka manajemen mutu harus fokus pada upaya untuk mengurangi kesenjangan pendidikan dan memastikan bahwa semua siswa memiliki akses yang sama terhadap sumber daya pendidikan yang diperlukan.

Kesimpulannya, rasionalisasi dan hakikat dari manajemen mutu dalam pendidikan dasar adalah untuk menciptakan sistem pendidikan yang adil, berkualitas, dan berkelanjutan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen mutu, sekolah dapat memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan pendidikan yang layak dan berpeluang untuk mencapai potensi maksimal mereka. Manajemen mutu bukanlah proses yang sekali jadi, melainkan upaya terus menerus untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui refleksi, evaluasi, dan inovasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, manajemen mutu menjadi fondasi yang kuat bagi pembangunan pendidikan yang berkualitas dan relevan di era globalisasi.

3. Pendekatan Manajemen Mutu Pendidikan

Pendekatan dalam manajemen mutu pendidikan merupakan serangkaian strategi dan metode yang diterapkan untuk memastikan bahwa institusi pendidikan dapat mencapai dan mempertahankan standar kualitas yang diharapkan. Dalam dekade terakhir, berbagai pendekatan telah dikembangkan dan diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan khusus di bidang pendidikan. Pendekatan ini mencakup manajemen berbasis sekolah, pendekatan total quality management (TQM), dan pendekatan sistemik.

Salah satu pendekatan yang dominan dalam manajemen mutu pendidikan adalah Manajemen Berbasis Sekolah (School-Based Management/SBM)**.** Pendekatan ini memberikan otonomi kepada sekolah dalam mengelola sumber daya dan mengambil keputusan yang

berhubungan dengan pengelolaan mutu pendidikan. Menurut Caldwell dan Spinks (2013), SBM memungkinkan sekolah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan memberdayakan guru serta staf untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, sekolah memiliki tanggung jawab langsung untuk memastikan bahwa kebijakan dan praktik yang diterapkan benar-benar mendukung peningkatan mutu pendidikan.

Pendekatan Total Quality Management (TQM) juga telah diadopsi dalam manajemen mutu pendidikan. TQM merupakan pendekatan yang berasal dari dunia industri, yang menekankan perbaikan berkelanjutan, keterlibatan semua anggota organisasi, dan fokus pada kepuasan pelanggan. Dalam konteks pendidikan, pelanggan diartikan sebagai siswa, orang tua, dan masyarakat. Menurut Srivastava dan Dhar (2019), TQM dalam pendidikan berfokus pada peningkatan kualitas secara keseluruhan melalui pendekatan sistematis dan terukur. Ini mencakup peningkatan kualitas kurikulum, pengajaran, fasilitas, dan layanan pendukung lainnya. TQM menekankan pentingnya umpan balik dan evaluasi berkelanjutan untuk mengidentifikasi area perbaikan dan memastikan bahwa standar mutu selalu dijaga.

Pendekatan lain yang penting dalam manajemen mutu pendidikan adalah pendekatan sistemik. Pendekatan ini melihat pendidikan sebagai sistem yang kompleks, di mana berbagai komponen seperti kurikulum, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta kebijakan saling berinteraksi dan mempengaruhi mutu pendidikan secara keseluruhan. Menurut Sallis (2014), pendekatan sistemik menuntut adanya koordinasi dan keselarasan antara semua komponen sistem pendidikan untuk mencapai mutu yang optimal. Dengan pendekatan ini, setiap aspek dari sistem pendidikan, mulai dari perencanaan hingga implementasi dan evaluasi, harus dikelola secara terpadu untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Selain itu, pendekatan berbasis data (data-driven approach) juga semakin populer dalam manajemen mutu pendidikan. Pendekatan ini menekankan pentingnya penggunaan data yang valid dan reliabel untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan terukur. Menurut Hamilton et al. (2017), pendekatan berbasis data membantu sekolah dalam memonitor kemajuan siswa, menilai efektivitas program, dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Dengan mengandalkan data, sekolah dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk sukses.

Secara keseluruhan, pendekatan-pendekatan dalam manajemen mutu pendidikan seperti manajemen berbasis sekolah, TQM, pendekatan sistemik, dan pendekatan berbasis data memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memastikan bahwa institusi pendidikan dapat mencapai dan mempertahankan standar kualitas yang tinggi. Setiap pendekatan memiliki fokus dan metode yang berbeda, namun semuanya bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung pencapaian hasil belajar yang optimal bagi siswa.

4. Strategi dan Praktik Baik Penerapan Manajemen Mutu

Strategi implementasi manajemen mutu di sekolah dasar memerlukan pendekatan yang terstruktur dan sistematis untuk memastikan bahwa semua aspek pendidikan dikelola secara efektif dan efisien. Manajemen mutu dalam konteks pendidikan dasar tidak hanya fokus pada pencapaian hasil akademik, tetapi juga pada pengembangan karakter, keterampilan sosial, dan budaya sekolah yang positif. Implementasi manajemen mutu di sekolah dasar melibatkan berbagai langkah strategis yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Salah satu strategi penting dalam implementasi manajemen mutu di sekolah dasar adalah pengembangan visi dan misi yang jelas serta relevan dengan tujuan pendidikan. Visi dan misi ini harus dikomunikasikan secara efektif kepada seluruh komunitas sekolah, termasuk guru, siswa, dan orang tua. Menurut Sallis (2014), visi dan misi yang jelas menjadi panduan bagi semua kegiatan di sekolah dan menjadi dasar untuk pengambilan keputusan. Dengan demikian, setiap upaya peningkatan mutu harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Selain itu, pengembangan kapasitas guru melalui pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan adalah elemen kunci dalam strategi manajemen mutu. Guru adalah agen utama dalam proses pembelajaran, dan kualitas pengajaran mereka sangat menentukan keberhasilan siswa. Hallinger (2011) menekankan pentingnya pelatihan yang berfokus pada peningkatan keterampilan mengajar, manajemen kelas, dan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Melalui pengembangan profesional yang terencana, guru dapat terus meningkatkan kompetensi mereka dan menerapkan praktik pengajaran yang efektif di kelas.

Praktik-praktik baik dalam manajemen mutu di sekolah dasar juga mencakup penggunaan data untuk menginformasikan pengambilan keputusan. Data yang akurat dan relevan memungkinkan sekolah untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan merancang intervensi yang tepat. Supovitz dan Tognatta (2013) menyatakan bahwa pemanfaatan data dalam manajemen mutu membantu sekolah untuk fokus pada hasil yang dapat diukur dan memberikan umpan balik yang berguna untuk pengembangan lebih lanjut. Misalnya, analisis data hasil belajar siswa dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan khusus dan merancang program remedial yang sesuai.

Selain itu, partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk guru, siswa, orang tua, dan masyarakat, merupakan bagian integral dari strategi implementasi manajemen mutu. Pendekatan partisipatif ini memastikan bahwa semua suara didengar dan semua pihak merasa memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan sekolah. Robinson (2011) mencatat bahwa partisipasi komunitas dalam proses manajemen mutu menciptakan lingkungan yang mendukung, di mana inovasi dan perbaikan berkelanjutan didorong oleh kerja sama dan kolaborasi.

Praktik baik lainnya yang mendukung manajemen mutu di sekolah dasar adalah penerapan evaluasi berkelanjutan terhadap program dan kebijakan sekolah. Evaluasi ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Fullan (2014) menekankan pentingnya evaluasi yang sistematis untuk memastikan bahwa setiap upaya perbaikan didasarkan pada bukti yang kuat dan relevan. Evaluasi ini harus dilakukan secara berkala dan hasilnya harus digunakan untuk membuat perubahan yang diperlukan guna meningkatkan efektivitas program sekolah.

Secara keseluruhan, strategi implementasi manajemen mutu di sekolah dasar harus bersifat holistik dan melibatkan seluruh komponen sekolah. Dengan mengembangkan visi yang jelas, meningkatkan kapasitas guru, memanfaatkan data, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dan melakukan evaluasi berkelanjutan, sekolah dapat mencapai standar kualitas yang tinggi dan memberikan pendidikan yang bermakna bagi setiap siswa. Praktik-praktik baik ini menunjukkan bahwa manajemen mutu bukan hanya tentang pencapaian angka-angka, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan pendidikan yang dinamis, inklusif, dan berkelanjutan.

5. Dimensi Manajemen Mutu

Manajemen mutu pendidikan merupakan pendekatan holistik yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua aspek pendidikan dikelola secara efektif untuk mencapai standar kualitas yang telah ditetapkan. Dimensi-dimensi manajemen mutu pendidikan mencakup berbagai elemen kunci yang harus diintegrasikan dan dijaga dalam setiap institusi pendidikan. Dimensi ini meliputi kepemimpinan, kurikulum dan pembelajaran, penilaian dan evaluasi, lingkungan belajar, dan pengembangan profesional.

Salah satu dimensi penting dalam manajemen mutu pendidikan adalah kepemimpinan. Kepemimpinan yang efektif sangat berperan dalam menentukan arah dan visi institusi pendidikan. Menurut Leithwood et al. (2012), kepemimpinan pendidikan yang berfokus pada mutu harus mampu memotivasi seluruh komponen sekolah untuk mencapai standar yang lebih tinggi. Kepemimpinan ini juga harus memastikan bahwa semua kebijakan dan praktik di sekolah mendukung upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Dimensi berikutnya adalah kurikulum dan pembelajaran**.** Kurikulum harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan siswa dan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Pembelajaran yang efektif menjadi pusat dari upaya manajemen mutu, di mana proses pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang mendalam dan bermakna bagi siswa. Menurut Marzano (2017), kualitas kurikulum dan efektivitas pengajaran merupakan fondasi utama dalam menciptakan hasil belajar yang bermutu. Oleh karena itu, institusi pendidikan harus terus mengevaluasi dan memperbarui kurikulum agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Penilaian dan evaluasi juga merupakan dimensi krusial dalam manajemen mutu pendidikan. Proses penilaian yang efektif

memungkinkan institusi pendidikan untuk mengukur kemajuan siswa secara objektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Stiggins (2014) menyatakan bahwa penilaian yang berkualitas harus mencerminkan keterampilan dan pengetahuan yang esensial serta memberikan data yang dapat digunakan untuk perbaikan terus-menerus. Evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap siswa, tetapi juga terhadap program pendidikan, strategi pengajaran, dan kinerja guru, dengan tujuan untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.

Lingkungan belajar adalah dimensi lain yang sangat penting dalam manajemen mutu pendidikan. Lingkungan yang mendukung proses belajar mengajar secara optimal harus mencakup aspek fisik, sosial, dan emosional. Menurut Cohen, McCabe, Michelli, dan Pickeral (2009), lingkungan belajar yang positif dan inklusif dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan mendorong pencapaian akademik. Lingkungan yang sehat dan aman juga penting untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif, di mana siswa dapat belajar dengan nyaman dan guru dapat mengajar dengan efektif.

Terakhir, pengembangan profesional guru dan staf pendidikan adalah dimensi yang tidak kalah penting. Pengembangan profesional yang berkelanjutan memastikan bahwa guru dan staf pendidikan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memenuhi standar kualitas. Menurut Darling-Hammond et al. (2017), pengembangan profesional yang efektif harus relevan, berkelanjutan, dan berbasis pada kebutuhan nyata dari guru dan siswa. Ini mencakup pelatihan, workshop, serta program mentoring yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas guru dalam menghadapi tantangan pengajaran yang terus berkembang.

Secara keseluruhan, dimensi-dimensi manajemen mutu pendidikan saling terkait dan harus diintegrasikan secara menyeluruh dalam setiap aspek operasional institusi pendidikan. Dengan memperhatikan dimensi-dimensi ini, sekolah dapat memastikan

bahwa upaya peningkatan mutu berjalan secara efektif dan memberikan hasil yang optimal bagi semua siswa.

6. Manajemen Perubahan di Sekolah Dasar

Manajemen perubahan dalam pendidikan dasar merupakan respons terhadap dinamika lingkungan eksternal dan internal yang mempengaruhi operasional sekolah. Perubahan ini bisa berupa perubahan kebijakan, perkembangan teknologi, atau perubahan dalam kebutuhan masyarakat. Sekolah sebagai institusi pendidikan harus mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan ini untuk tetap relevan dan efektif dalam memberikan pendidikan yang berkualitas.

Fullan (2014) menekankan bahwa manajemen perubahan di sekolah memerlukan kepemimpinan yang adaptif dan visioner. Kepala sekolah harus mampu mengidentifikasi kebutuhan akan perubahan, merencanakan strategi implementasi, serta mengelola resistensi yang mungkin muncul dari berbagai pemangku kepentingan, seperti guru, siswa, dan orang tua. Pentingnya komunikasi yang efektif juga diangkat oleh Heifetz dan Linsky (2017), yang menyatakan bahwa pemimpin pendidikan harus mampu menjelaskan tujuan dan manfaat dari perubahan tersebut kepada seluruh anggota komunitas sekolah, sehingga semua pihak dapat memahami dan mendukung proses perubahan.

Selain itu, manajemen perubahan juga mencakup pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran, yang saat ini menjadi kebutuhan mendesak dalam pendidikan dasar. Perubahan dalam metode pengajaran dengan memanfaatkan teknologi digital memerlukan penyesuaian tidak hanya dari sisi guru, tetapi juga dari siswa dan infrastruktur sekolah. Oleh karena itu, manajemen perubahan harus dilaksanakan dengan hati-hati dan terencana, agar seluruh proses transisi dapat berjalan lancar dan memberikan hasil yang diharapkan.

7. Urgensi Manajemen Perubahan

Rasionalisasi manajemen perubahan di Sekolah Dasar dapat dimulai dari pemahaman bahwa sekolah adalah bagian dari sistem pendidikan yang dinamis dan selalu berinteraksi dengan lingkungan sosial, teknologi, dan kebijakan yang terus berubah. Fullan (2014) mengemukakan bahwa pemimpin pendidikan harus memiliki kemampuan untuk mengelola perubahan dengan cara yang proaktif, dengan mempertimbangkan kompleksitas dan ketidakpastian yang mungkin terjadi. Dalam konteks ini, manajemen perubahan menjadi alat yang penting untuk mengarahkan sekolah dalam menghadapi tantangan baru dan untuk memastikan bahwa perubahan yang diimplementasikan sesuai dengan visi dan misi sekolah.

Manajemen perubahan di Sekolah Dasar (SD) adalah proses yang krusial untuk memastikan bahwa institusi pendidikan ini dapat terus berkembang dan beradaptasi dengan berbagai tantangan dan tuntutan yang terus berubah. Perubahan dalam pendidikan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, memerlukan strategi manajemen yang efektif untuk memastikan bahwa proses tersebut berlangsung dengan lancar dan memberikan dampak positif bagi seluruh komponen sekolah, termasuk siswa, guru, dan staf.

Salah satu alasan pentingnya manajemen perubahan di Sekolah Dasar adalah untuk mengatasi resistensi terhadap perubahan. Menurut Heifetz dan Linsky (2017), resistensi terhadap perubahan adalah salah satu hambatan terbesar dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu, manajemen perubahan harus mencakup strategi untuk mengurangi resistensi ini, melalui komunikasi yang efektif, pelibatan seluruh pemangku kepentingan, dan pemberdayaan guru serta staf. Dengan demikian, perubahan tidak hanya dilihat sebagai ancaman, tetapi sebagai peluang untuk perbaikan dan inovasi.

Lebih lanjut, manajemen perubahan di Sekolah Dasar harus didasarkan pada data dan bukti yang kuat. Robinson (2011) menekankan pentingnya penggunaan data dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perubahan. Data ini dapat berupa hasil evaluasi pembelajaran, survei kepuasan siswa dan orang tua, serta analisis kebutuhan guru. Dengan menggunakan data, sekolah dapat merumuskan prioritas perubahan yang paling mendesak dan merancang strategi yang lebih terarah untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Pendekatan berbasis data ini juga membantu sekolah dalam mengukur dampak dari perubahan yang diterapkan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Selain itu, manajemen perubahan di Sekolah Dasar juga harus mempertimbangkan aspek psikologis dari para guru dan staf. Perubahan, meskipun diperlukan, seringkali menimbulkan stres dan ketidakpastian di kalangan tenaga pendidik. Fullan (2014) menekankan bahwa pemimpin pendidikan harus peka terhadap kebutuhan emosional guru selama proses perubahan. Dukungan berupa pelatihan, mentoring, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dapat membantu mengurangi kecemasan dan meningkatkan keterlibatan guru dalam proses perubahan.

Manajemen perubahan di Sekolah Dasar juga harus mengedepankan pendekatan kolaboratif. Spillane (2015) menunjukkan bahwa perubahan yang berhasil adalah perubahan yang melibatkan semua anggota komunitas sekolah, termasuk guru, siswa, orang tua, dan masyarakat sekitar. Melalui kolaborasi, sekolah dapat membangun rasa memiliki di antara semua pemangku kepentingan, yang pada gilirannya meningkatkan komitmen mereka terhadap proses perubahan dan hasil yang diharapkan.

Secara keseluruhan, rasionalisasi manajemen perubahan di Sekolah Dasar bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang fleksibel

dan adaptif, di mana inovasi dan peningkatan kualitas pendidikan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Dengan mengelola perubahan secara strategis, menggunakan data sebagai dasar keputusan, mempertimbangkan aspek psikologis guru, dan menerapkan pendekatan kolaboratif, sekolah dasar dapat memastikan bahwa perubahan yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi seluruh komunitas sekolah dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang lebih tinggi.

8. Pendekatan Manajemen Perubahan

Pendekatan dalam manajemen perubahan dalam pengelolaan pendidikan merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan oleh para pemimpin pendidikan untuk memastikan bahwa institusi pendidikan dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan yang terus berkembang. Manajemen perubahan dalam pendidikan mencakup strategi, proses, dan tindakan yang diambil untuk mengelola transisi dari keadaan saat ini menuju keadaan yang diinginkan, dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi.

Salah satu pendekatan yang sering digunakan dalam manajemen perubahan pendidikan adalah pendekatan Lewin's Change Management Model**.** Model ini diperkenalkan oleh Kurt Lewin dan terdiri dari tiga tahap utama: unfreezing, changing, dan refreezing. Tahap unfreezing melibatkan persiapan organisasi untuk perubahan, dengan menggoyahkan status quo dan menciptakan kesadaran akan perlunya perubahan. Pada tahap changing, perubahan yang diinginkan diimplementasikan, dan akhirnya, tahap refreezing adalah ketika perubahan tersebut diinternalisasi dan menjadi bagian dari budaya organisasi. Menurut Burnes (2015), model ini relevan dalam konteks pendidikan karena memberikan kerangka kerja yang jelas bagi pemimpin untuk mengelola resistensi terhadap perubahan dan

memastikan bahwa perubahan yang dilakukan dapat bertahan dalam jangka panjang.

Selain itu, pendekatan Kotter's 8-Step Change Model juga sering digunakan dalam manajemen perubahan pendidikan. John P. Kotter mengembangkan model ini, yang menekankan pentingnya menciptakan urgensi, membangun koalisi yang kuat, mengembangkan visi yang jelas, dan mengomunikasikannya secara efektif. Langkah-langkah lain dalam model ini mencakup pemberdayaan karyawan untuk bertindak, menghasilkan kemenangan jangka pendek, dan mengkonsolidasikan perbaikan untuk memastikan perubahan berkelanjutan. Menurut Kotter (2012), pendekatan ini sangat efektif dalam pendidikan karena menekankan pentingnya partisipasi seluruh anggota organisasi, termasuk guru, staf, dan siswa, dalam proses perubahan.

Pendekatan lain yang semakin mendapatkan perhatian dalam manajemen perubahan pendidikan adalah pendekatan Appreciative Inquiry (AI). AI adalah metode yang berfokus pada kekuatan dan keberhasilan organisasi, daripada masalah dan kelemahan. Pendekatan ini dimulai dengan mengidentifikasi apa yang sudah berjalan dengan baik di dalam organisasi dan menggunakan kekuatan ini sebagai dasar untuk perubahan. Menurut Cooperrider dan Srivastva (2013), AI dapat menciptakan budaya positif dalam organisasi pendidikan yang mendorong inovasi dan kolaborasi, sehingga mempercepat proses perubahan.

Pendekatan Transformational Leadership juga merupakan bagian penting dari manajemen perubahan dalam pengelolaan pendidikan. Transformational leadership berfokus pada kemampuan pemimpin untuk menginspirasi dan memotivasi anggota organisasi untuk melampaui harapan mereka dan berkontribusi pada perubahan yang signifikan dalam organisasi. Leithwood dan Sun (2012) menegaskan bahwa pemimpin pendidikan yang transformasional

mampu mengarahkan perubahan melalui visi yang kuat, komunikasi yang efektif, dan dukungan yang terus menerus terhadap pengembangan profesional guru dan staf.

Pendekatan adaptif (Adaptive Leadership) juga relevan dalam konteks pendidikan, terutama ketika menghadapi perubahan yang kompleks dan dinamis. Heifetz dan Linsky (2017) mengemukakan bahwa kepemimpinan adaptif melibatkan kemampuan untuk menavigasi tantangan yang tidak terduga dan untuk mengembangkan solusi yang inovatif dalam situasi yang tidak pasti. Pendekatan ini sangat penting dalam pendidikan, di mana pemimpin sering kali harus menghadapi perubahan kebijakan, kurikulum, atau teknologi yang memerlukan penyesuaian cepat dan respons yang fleksibel.

Secara keseluruhan, pendekatan-pendekatan dalam manajemen perubahan, seperti Lewin's Change Management Model, Kotter's 8-Step Change Model, Appreciative Inquiry, Transformational Leadership, dan Adaptive Leadership, menyediakan kerangka kerja yang berbeda namun saling melengkapi untuk mengelola perubahan dalam pendidikan. Dengan memahami dan menerapkan pendekatan-pendekatan ini, pemimpin pendidikan dapat lebih efektif dalam menghadapi tantangan perubahan dan memastikan bahwa organisasi pendidikan mereka dapat beradaptasi dan berkembang dalam lingkungan yang terus berubah.

9. Strategi Implementasi dan Praktik Baik Manajemen Perubahan

Strategi implementasi dan praktik-praktik baik dalam manajemen perubahan di Sekolah Dasar merupakan elemen krusial yang dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam upaya perbaikan dan inovasi pendidikan. Dalam konteks sekolah dasar, perubahan sering kali berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas pembelajaran, penyesuaian kurikulum, penggunaan teknologi dalam pendidikan, serta peningkatan profesionalisme guru dan staf. Agar

perubahan ini berhasil, perlu diterapkan strategi implementasi yang tepat dan didukung oleh praktik-praktik baik yang telah terbukti efektif di lapangan.

Salah satu strategi utama dalam implementasi manajemen perubahan di Sekolah Dasar adalah pendekatan partisipatif, di mana seluruh pemangku kepentingan sekolah—termasuk guru, staf, siswa, dan orang tua—dilibatkan dalam proses perubahan. Fullan (2014) menyatakan bahwa partisipasi aktif dari semua pihak terkait sangat penting untuk menciptakan rasa memiliki dan komitmen terhadap perubahan. Ketika guru dan staf merasa dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan perubahan, mereka cenderung lebih mendukung dan berkontribusi secara positif terhadap keberhasilan inisiatif tersebut. Dengan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan, sekolah juga dapat memperoleh berbagai perspektif yang berharga untuk memperkaya strategi perubahan.

Selain itu, komunikasi yang efektif merupakan faktor kunci dalam manajemen perubahan. Menurut Kotter (2012), komunikasi yang jelas, transparan, dan terus-menerus sangat penting untuk mengurangi ketidakpastian dan resistensi terhadap perubahan. Di Sekolah Dasar, pemimpin sekolah perlu memastikan bahwa tujuan, alasan, dan manfaat dari perubahan dikomunikasikan dengan baik kepada seluruh anggota komunitas sekolah. Ini termasuk menjelaskan secara rinci apa yang akan berubah, mengapa perubahan tersebut diperlukan, dan bagaimana perubahan tersebut akan dilaksanakan. Komunikasi yang baik akan membantu mengurangi kekhawatiran, membangun kepercayaan, dan memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang proses perubahan.

Pendekatan berbasis data juga merupakan strategi penting dalam manajemen perubahan di Sekolah Dasar. Robinson (2011) menekankan bahwa keputusan yang didasarkan pada data yang akurat dan relevan cenderung lebih tepat sasaran dan berdampak positif.

Misalnya, sebelum memutuskan untuk mengubah metode pengajaran atau memperkenalkan teknologi baru di kelas, sekolah perlu mengumpulkan dan menganalisis data terkait performa siswa, kebutuhan guru, dan kondisi fasilitas sekolah. Dengan memahami kondisi aktual melalui data, sekolah dapat merancang strategi perubahan yang lebih efektif dan menghindari penerapan solusi yang tidak sesuai dengan kebutuhan sebenarnya.

Praktik baik dalam manajemen perubahan juga mencakup pengembangan kapasitas profesional guru dan staf. Leithwood et al. (2012) menyoroti bahwa perubahan yang sukses memerlukan guru yang siap dan mampu menerapkan perubahan tersebut di kelas. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan profesional berkelanjutan menjadi sangat penting. Sekolah dasar perlu menyediakan program pelatihan yang relevan dan tepat waktu untuk membantu guru mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mengimplementasikan perubahan. Misalnya, jika sekolah berencana untuk memperkenalkan pembelajaran berbasis teknologi, maka pelatihan tentang penggunaan perangkat lunak pendidikan dan alat digital harus menjadi bagian integral dari rencana perubahan.

Lebih lanjut, monitoring dan evaluasi secara berkala juga merupakan bagian penting dari strategi implementasi manajemen perubahan. Menurut Supovitz dan Tognatta (2013), pemantauan yang berkelanjutan memungkinkan sekolah untuk mengidentifikasi masalah sejak dini, melakukan penyesuaian jika diperlukan, dan memastikan bahwa perubahan bergerak ke arah yang diinginkan. Evaluasi yang sistematis juga membantu dalam mengukur dampak perubahan dan menentukan keberlanjutan program-program yang telah diimplementasikan.

Akhirnya, keberlanjutan perubahan juga perlu diperhatikan. Hargreaves dan Fink (2012) mengingatkan bahwa perubahan yang bersifat sementara tidak akan memberikan dampak jangka panjang

yang diinginkan. Oleh karena itu, strategi implementasi harus dirancang sedemikian rupa sehingga perubahan yang dilakukan dapat dipertahankan dan diintegrasikan ke dalam praktik sehari-hari di sekolah. Ini bisa mencakup pengembangan kebijakan sekolah yang mendukung perubahan, pembentukan tim pendukung yang bertanggung jawab atas implementasi, dan penyediaan sumber daya yang cukup untuk mempertahankan perubahan tersebut.

Secara keseluruhan, strategi implementasi dan praktik-praktik baik dalam manajemen perubahan di Sekolah Dasar mencakup pendekatan partisipatif, komunikasi yang efektif, penggunaan data sebagai dasar keputusan, pengembangan profesional guru, monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, serta fokus pada keberlanjutan perubahan. Dengan mengadopsi strategi dan praktik-praktik ini, sekolah dasar dapat memastikan bahwa perubahan yang dilakukan tidak hanya berhasil diimplementasikan, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh komunitas sekolah.

10. Dimensi Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan dalam pengelolaan pendidikan adalah proses yang kompleks dan melibatkan berbagai dimensi yang harus dipahami dan dikelola oleh para pemimpin pendidikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dimensi-dimensi ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan perubahan organisasi, budaya, struktur, dan proses di lingkungan pendidikan. Pemahaman terhadap dimensi-dimensi ini memungkinkan para pemimpin untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi perubahan dengan lebih efektif.

Salah satu dimensi penting dalam manajemen perubahan pendidikan adalah dimensi struktural, yang berfokus pada perubahan dalam struktur organisasi dan tata kelola lembaga pendidikan. Struktur organisasi mencakup distribusi tugas, tanggung jawab, dan otoritas di

dalam institusi pendidikan. Menurut Fullan (2014), perubahan struktural sering kali diperlukan untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sekolah atau lembaga pendidikan. Misalnya, restrukturisasi departemen, perubahan dalam rantai komando, atau penyesuaian dalam prosedur administratif bisa menjadi bagian dari perubahan struktural yang mendukung implementasi kebijakan pendidikan baru atau peningkatan kualitas layanan pendidikan.

Dimensi lainnya adalah dimensi budaya, yang mencakup nilai-nilai, norma, dan kepercayaan yang berkembang di dalam organisasi pendidikan. Budaya sekolah memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana perubahan diterima dan diimplementasikan. Leithwood dan Jantzi (2012) mengemukakan bahwa pemimpin pendidikan harus peka terhadap budaya yang ada dan mampu membangun budaya yang mendukung perubahan. Ini termasuk menciptakan lingkungan yang mendorong kolaborasi, inovasi, dan penghargaan terhadap pembelajaran. Dalam banyak kasus, keberhasilan perubahan bergantung pada kemampuan pemimpin untuk mengubah budaya organisasi sehingga semua anggota merasa terlibat dan berkomitmen terhadap visi baru yang diusung.

Dimensi proses juga merupakan aspek penting dalam manajemen perubahan pendidikan. Dimensi ini berkaitan dengan bagaimana perubahan diimplementasikan dalam praktik sehari-hari di institusi pendidikan. Proses ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari setiap langkah perubahan yang dilakukan. Menurut Kotter (2012), pendekatan yang sistematis dan berbasis data sangat penting untuk memastikan bahwa proses perubahan dapat berjalan lancar dan mencapai hasil yang diinginkan. Pemimpin pendidikan harus memastikan bahwa semua langkah dalam proses perubahan dirancang dengan jelas dan dilaksanakan dengan

cermat, serta bahwa ada mekanisme untuk menilai kemajuan dan mengatasi hambatan yang muncul selama implementasi.

Dimensi psikologis juga tidak bisa diabaikan dalam manajemen perubahan. Dimensi ini mencakup reaksi emosional dan psikologis dari individu-individu dalam organisasi terhadap perubahan. Perubahan, terutama yang signifikan, dapat menimbulkan ketidakpastian, resistensi, dan stres di kalangan staf dan guru. Menurut Heifetz dan Linsky (2017), pemimpin pendidikan harus memiliki keterampilan untuk mengelola dimensi psikologis ini, termasuk kemampuan untuk mendukung staf melalui komunikasi yang efektif, pemberian dukungan emosional, dan penciptaan lingkungan kerja yang aman dan positif. Kepedulian terhadap aspek psikologis ini dapat membantu meminimalkan resistensi terhadap perubahan dan memastikan bahwa semua pihak merasa dihargai dan didukung selama proses transisi.

Terakhir, dimensi politis juga sangat relevan dalam manajemen perubahan pendidikan. Dimensi ini melibatkan interaksi dan negosiasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, orang tua, komite sekolah, dan masyarakat luas. Spillane (2015) menekankan bahwa pemimpin pendidikan perlu memahami dinamika politik yang ada dan mampu mengelola hubungan dengan berbagai pihak untuk mendapatkan dukungan bagi inisiatif perubahan. Keberhasilan perubahan sering kali bergantung pada kemampuan pemimpin untuk membangun aliansi strategis, memobilisasi sumber daya, dan mengatasi resistensi dari kelompok-kelompok yang mungkin merasa terancam oleh perubahan.

Secara keseluruhan, dimensi-dimensi dalam manajemen perubahan pendidikan mencakup struktur organisasi, budaya, proses, aspek psikologis, dan dinamika politis. Pemimpin pendidikan yang efektif harus memahami dan mengelola setiap dimensi ini dengan cermat untuk memastikan bahwa perubahan dapat diimplementasikan

dengan sukses dan membawa manfaat yang diinginkan bagi institusi pendidikan. Dengan pendekatan yang holistik dan terintegrasi terhadap manajemen perubahan, pemimpin pendidikan dapat membantu institusi mereka beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan masa depan.

11. Hubungan antara Manajemen Mutu dan Manajemen Perubahan

Manajemen mutu dan manajemen perubahan merupakan dua konsep yang saling terkait erat dalam pengelolaan pendidikan, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sekolah dan adaptasi terhadap dinamika lingkungan eksternal dan internal. Dalam konteks pendidikan, manajemen mutu bertujuan untuk memastikan bahwa semua proses, kebijakan, dan praktik di sekolah berjalan dengan standar yang tinggi dan memberikan hasil yang memuaskan bagi semua pemangku kepentingan, termasuk siswa, guru, dan masyarakat. Sementara itu, manajemen perubahan berfokus pada bagaimana sekolah dapat beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi, baik yang berasal dari kebijakan pemerintah, perkembangan teknologi, maupun perubahan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Kedua aspek ini, manajemen mutu dan manajemen perubahan, sebenarnya saling melengkapi dalam konteks pendidikan dasar. Manajemen mutu berfokus pada peningkatan berkelanjutan dari standar pendidikan yang ada, sedangkan manajemen perubahan memastikan bahwa sekolah mampu beradaptasi dengan tuntutan baru yang mungkin tidak tercakup dalam standar yang telah ada. Seperti yang diuraikan oleh Leithwood et al. (2012), keberhasilan manajemen mutu dalam pendidikan sangat bergantung pada kemampuan sekolah untuk beradaptasi dengan perubahan, sehingga sekolah tidak hanya mempertahankan kualitasnya tetapi juga meningkatkannya sesuai dengan perkembangan zaman.

Dalam praktiknya, manajemen mutu membutuhkan dukungan dari manajemen perubahan untuk dapat berfungsi secara efektif. Misalnya, penerapan kurikulum baru yang lebih relevan dengan kebutuhan siswa memerlukan perubahan dalam pendekatan pengajaran dan pelatihan guru. Tanpa manajemen perubahan yang baik, upaya peningkatan mutu bisa terhambat oleh resistensi atau kurangnya pemahaman tentang pentingnya perubahan.

Secara keseluruhan, hubungan antara manajemen mutu dan manajemen perubahan dalam pendidikan sangat erat dan saling mendukung. Manajemen mutu memberikan dasar bagi perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, sementara manajemen perubahan memastikan bahwa upaya peningkatan mutu dilakukan secara efektif dan berkelanjutan. Dengan memadukan kedua konsep ini, sekolah dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang responsif, adaptif, dan berfokus pada peningkatan kualitas secara terus-menerus.

B. **Rasionalisasi Keterkaitan Manajemen Mutu dan Manajemen Perubahan**.

Keterkaitan antara manajemen mutu dan manajemen perubahan dapat dilihat dari bagaimana upaya untuk mencapai mutu yang lebih baik sering kali memerlukan perubahan yang signifikan dalam cara sekolah dikelola dan bagaimana pendidikan disampaikan. Menurut Sallis (2014), peningkatan mutu pendidikan tidak akan tercapai tanpa adanya perubahan dalam kebijakan, strategi, dan praktik pendidikan. Ini berarti bahwa manajemen mutu tidak hanya memerlukan pemantauan dan evaluasi yang kontinu, tetapi juga keterbukaan terhadap perubahan yang memungkinkan penyesuaian dan perbaikan terus-menerus.

Lebih lanjut, Fullan (2014) menekankan bahwa manajemen perubahan yang efektif harus didasarkan pada prinsip-prinsip

manajemen mutu. Artinya, setiap perubahan yang dilakukan di sekolah harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap kualitas pendidikan. Perubahan yang tidak dikelola dengan baik dapat mengganggu proses pembelajaran dan menurunkan kualitas pendidikan, sehingga manajemen mutu berperan penting dalam memastikan bahwa setiap perubahan memberikan kontribusi positif terhadap hasil pendidikan.

Di sisi lain, manajemen mutu juga mendorong kebutuhan akan perubahan. Ketika sekolah melakukan evaluasi mutu dan menemukan area yang perlu diperbaiki, hal ini sering kali memicu kebutuhan untuk melakukan perubahan dalam proses pembelajaran, pengelolaan sumber daya, atau strategi pengajaran. Misalnya, jika evaluasi menunjukkan bahwa hasil belajar siswa rendah, maka mungkin diperlukan perubahan dalam pendekatan pengajaran atau penggunaan teknologi untuk mendukung pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen perubahan sering kali menjadi alat untuk mencapai tujuan manajemen mutu.

Hubungan ini juga ditegaskan oleh Kotter (2012) yang menyatakan bahwa organisasi, termasuk sekolah, yang berkomitmen pada peningkatan mutu harus siap untuk terus berinovasi dan berubah. Ia menekankan bahwa perubahan yang berkelanjutan dan konsisten dengan tujuan mutu adalah kunci untuk mencapai keunggulan dalam pendidikan. Dengan demikian, manajemen mutu yang berfokus pada standar tinggi dan hasil yang optimal akan selalu membutuhkan strategi manajemen perubahan yang efektif untuk mengimplementasikan dan mempertahankan standar tersebut.

Selain itu, Hargreaves dan Fink (2012) berpendapat bahwa manajemen perubahan yang sukses harus selalu mempertimbangkan aspek keberlanjutan mutu. Ini berarti bahwa perubahan yang dilakukan di sekolah harus dirancang tidak hanya untuk memperbaiki mutu saat ini tetapi juga untuk mempertahankan dan meningkatkan

mutu dalam jangka panjang. Oleh karena itu, manajemen mutu dan manajemen perubahan harus berjalan seiring, dengan manajemen mutu menyediakan kerangka kerja untuk standar pendidikan dan manajemen perubahan menyediakan mekanisme untuk mencapai dan mempertahankan standar tersebut.

Manajemen mutu dan manajemen perubahan dalam pendidikan adalah dua konsep yang saling terkait dan esensial untuk memastikan institusi pendidikan mampu bertahan dan berkembang di tengah perubahan yang cepat. Keduanya memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Pengintegrasian kedua konsep ini dalam pengelolaan sekolah menjadi kunci dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh.

Manajemen mutu dalam pendidikan mengacu pada proses berkelanjutan untuk memastikan bahwa semua aspek pendidikan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Menurut Deming (2015), prinsip manajemen mutu dalam pendidikan mencakup seluruh proses pendidikan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi hasil belajar. Dalam konteks sekolah dasar, ini berarti pengelolaan kurikulum, pengembangan profesional guru, dan penyediaan fasilitas belajar harus dilakukan dengan pendekatan yang sistematis dan terarah. Manajemen mutu tidak hanya bertujuan untuk mempertahankan standar, tetapi juga untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan seiring dengan perubahan kebutuhan siswa dan masyarakat.

Lebih lanjut, manajemen mutu juga berkaitan erat dengan pembentukan budaya sekolah yang mendukung perbaikan berkelanjutan. Fullan (2014) menekankan pentingnya menciptakan budaya di mana semua anggota komunitas sekolah, termasuk guru, staf, siswa, dan orang tua, terlibat aktif dalam proses peningkatan kualitas. Budaya seperti ini memungkinkan sekolah untuk lebih mudah

beradaptasi dengan perubahan dan memastikan bahwa peningkatan kualitas pendidikan terjadi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Misalnya, guru yang terlibat aktif dalam pengembangan kurikulum cenderung lebih memahami dan mengimplementasikan strategi pengajaran yang lebih efektif, yang pada akhirnya meningkatkan hasil belajar siswa.

Manajemen perubahan dalam pendidikan, di sisi lain, berfokus pada bagaimana sekolah dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan internal dan eksternalnya. Perubahan dalam kebijakan pendidikan, kemajuan teknologi, dan perubahan sosial menuntut sekolah untuk tidak hanya mempertahankan kualitas tetapi juga untuk berinovasi. Kotter (2012) menyatakan bahwa manajemen perubahan yang efektif memerlukan kepemimpinan yang kuat, komunikasi yang jelas, dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam proses perubahan. Dalam konteks sekolah dasar, ini bisa berarti adaptasi terhadap teknologi pendidikan baru, implementasi kurikulum baru, atau restrukturisasi organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

Penerapan manajemen perubahan yang sukses di sekolah dasar tidak hanya tergantung pada perencanaan yang matang tetapi juga pada kemampuan pemimpin sekolah untuk mengelola resistensi terhadap perubahan. Robinson (2011) menunjukkan bahwa keberhasilan dalam manajemen perubahan sering kali ditentukan oleh kemampuan kepala sekolah untuk memfasilitasi proses transisi dengan melibatkan guru dan staf dalam setiap tahap perubahan. Hal ini mencakup pelatihan, dukungan berkelanjutan, dan pemberian ruang untuk umpan balik, yang semuanya membantu meminimalkan hambatan dan memaksimalkan keterlibatan seluruh komunitas sekolah.

Keterkaitan antara manajemen mutu dan manajemen perubahan sangat erat, di mana keduanya saling mendukung dalam menciptakan

sistem pendidikan yang adaptif dan berdaya saing. Manajemen mutu menyediakan kerangka kerja yang memastikan bahwa semua perubahan yang diimplementasikan berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan, sementara manajemen perubahan memastikan bahwa institusi pendidikan mampu beradaptasi dengan perubahan yang diperlukan untuk memenuhi atau bahkan melampaui standar kualitas yang telah ditetapkan. Sebagaimana disampaikan oleh Harris dan Jones (2017), kombinasi manajemen mutu dan manajemen perubahan yang efektif memungkinkan sekolah untuk tidak hanya bertahan di tengah dinamika lingkungan pendidikan tetapi juga untuk unggul dan memberikan pendidikan yang bermutu tinggi.

Dengan demikian, implikasi dari integrasi manajemen mutu dan manajemen perubahan dalam manajemen pendidikan sangatlah luas. Tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan, tetapi juga memungkinkan sekolah untuk menjadi lebih responsif terhadap perubahan dan kebutuhan yang muncul. Pendekatan yang holistik ini, yang menggabungkan prinsip-prinsip manajemen mutu dan manajemen perubahan, pada akhirnya akan menghasilkan lingkungan belajar yang lebih baik, mendukung perkembangan profesional yang berkelanjutan bagi guru, dan memastikan bahwa siswa menerima pendidikan yang relevan dan bermakna.

C. Penjaminan Mutu Pendidikan

1. Konsep Dasar Penjaminan Mutu

Penjaminan mutu pendidikan adalah konsep yang sangat penting dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di semua jenjang, termasuk pendidikan dasar dan menengah. Dalam konteks ini, penjaminan mutu pendidikan mengacu pada proses sistematis yang dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pendidikan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang telah ditetapkan. Standar ini mencakup aspek-

aspek seperti kurikulum, proses pembelajaran, tenaga pendidik, sarana dan prasarana, serta manajemen sekolah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, penjaminan mutu tidak hanya sekadar mengevaluasi hasil akhir pendidikan, tetapi juga menekankan pentingnya proses berkelanjutan yang mencakup seluruh aspek pendidikan. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPM) yang diatur dalam peraturan tersebut menggarisbawahi bahwa penjaminan mutu adalah sebuah siklus yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peningkatan berkelanjutan. Proses ini harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk mencapai standar kualitas yang diinginkan.

Dalam kajian yang lebih mendalam, penjaminan mutu pendidikan juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga pendidikan terhadap berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan orang tua siswa. Menurut Sallis (2014), penjaminan mutu pendidikan adalah bagian integral dari manajemen pendidikan yang baik karena membantu memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan adanya sistem penjaminan mutu, sekolah-sekolah dapat lebih transparan dalam pengelolaan sumber daya mereka, serta lebih responsif terhadap kebutuhan siswa dan masyarakat.

Lebih lanjut, sistem penjaminan mutu pendidikan juga memfasilitasi proses inovasi di sekolah. Menurut Harris dan Jones (2019), penjaminan mutu yang baik tidak hanya berfokus pada pemenuhan standar minimum, tetapi juga mendorong sekolah untuk terus mencari cara-cara baru untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini dapat meliputi inovasi dalam strategi pembelajaran,

penggunaan teknologi dalam kelas, serta pengembangan program-program ekstrakurikuler yang mendukung pembelajaran siswa.

Sistem penjaminan mutu juga memiliki implikasi penting dalam pemerataan kualitas pendidikan. Salah satu tujuan utama dari penjaminan mutu adalah memastikan bahwa semua sekolah, terlepas dari lokasi geografis atau kondisi sosial-ekonominya, dapat mencapai standar yang sama. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Leithwood et al. (2017), implementasi sistem penjaminan mutu yang konsisten dapat membantu mengurangi kesenjangan pendidikan antar daerah, dengan menyediakan standar yang jelas dan mekanisme evaluasi yang adil.

Selain itu, dalam konteks kebijakan pendidikan nasional, penjaminan mutu pendidikan juga berfungsi sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis data. Pemerintah dapat menggunakan data yang dihasilkan dari proses penjaminan mutu untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan intervensi khusus dan merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh negeri.

Implikasi dari penjaminan mutu pendidikan tidak hanya terbatas pada peningkatan kualitas pendidikan di dalam sekolah, tetapi juga berperan penting dalam pengembangan sistem pendidikan nasional secara keseluruhan. Dengan memastikan bahwa seluruh lembaga pendidikan memenuhi standar yang telah ditetapkan, sistem penjaminan mutu pendidikan membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih adil dan berkualitas bagi semua siswa, serta memperkuat daya saing pendidikan nasional di kancah internasional.

Secara keseluruhan, penjaminan mutu pendidikan adalah komponen penting dalam upaya untuk mencapai pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh Indonesia. Melalui pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan, penjaminan mutu memungkinkan

sekolah dan lembaga pendidikan untuk terus meningkatkan kualitas proses pembelajaran mereka, sementara pada saat yang sama memastikan bahwa semua siswa memiliki akses yang setara terhadap pendidikan yang berkualitas.

2. Fungsi Penjaminan Mutu

Penjaminan mutu pendidikan merupakan proses integral dalam memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga dapat mencapai hasil pendidikan yang bermutu. Fungsi utama dari penjaminan mutu ini adalah untuk mengendalikan kualitas pendidikan melalui serangkaian kegiatan yang terstruktur dan berkelanjutan. Melalui penjaminan mutu, sekolah-sekolah dapat mengevaluasi diri, merancang strategi perbaikan, serta memastikan bahwa semua upaya yang dilakukan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

Fungsi penjaminan mutu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, adalah untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi proses pendidikan sehingga sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh komponen pendidikan—mulai dari kurikulum, metode pengajaran, tenaga pendidik, hingga sarana dan prasarana—berjalan harmonis untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

3. Siklus Penjaminan Mutu

Siklus penjaminan mutu dalam pendidikan adalah proses berkelanjutan yang terdiri dari beberapa tahapan. Pertama, adalah pemetaan mutu pendidikan, yang bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi nyata mutu pendidikan di satuan pendidikan. Pemetaan ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana sekolah memenuhi standar

yang ditetapkan serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Menurut Robinson (2011), pemetaan mutu ini sangat penting sebagai langkah awal dalam proses penjaminan mutu, karena memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi pendidikan yang sebenarnya.

Tahapan berikutnya adalah perencanaan peningkatan mutu, di mana sekolah menyusun rencana strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan hasil pemetaan. Perencanaan ini mencakup penetapan tujuan, strategi, serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai peningkatan mutu. Leithwood et al. (2012) menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan ini, karena partisipasi aktif dari guru, siswa, dan orang tua dapat menghasilkan rencana yang lebih komprehensif dan realistis.

Selanjutnya, pelaksanaan pemenuhan mutu merupakan tahap di mana strategi yang telah direncanakan diterapkan dalam kegiatan nyata di sekolah. Tahap ini melibatkan implementasi program-program yang dirancang untuk meningkatkan mutu pendidikan, termasuk pelatihan guru, pengembangan kurikulum, dan peningkatan sarana dan prasarana. Keberhasilan pada tahap ini sangat bergantung pada efektivitas manajemen dan komitmen dari seluruh anggota komunitas sekolah.

Tahap monitoring dan evaluasi merupakan langkah penting untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program peningkatan mutu telah mencapai tujuan yang diharapkan. Evaluasi ini dilakukan secara berkala untuk mengukur kemajuan, mengidentifikasi hambatan, dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Heifetz dan Linsky (2017) berpendapat bahwa monitoring dan evaluasi yang sistematis memungkinkan pemimpin pendidikan untuk mendapatkan umpan balik yang berharga dan membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan data yang akurat.

Akhirnya, berdasarkan hasil evaluasi, dilakukan penyusunan strategi peningkatan mutu yang baru. Strategi ini disusun dengan mempertimbangkan hasil evaluasi dan umpan balik dari seluruh pemangku kepentingan. Proses ini memastikan bahwa peningkatan mutu adalah proses berkelanjutan yang selalu diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan kondisi pendidikan.

Secara keseluruhan, siklus penjaminan mutu pendidikan berfungsi sebagai kerangka kerja yang sistematis untuk mengelola dan meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Dengan melaksanakan siklus ini secara berkelanjutan, sekolah-sekolah dapat terus beradaptasi dengan perubahan, mengatasi tantangan, dan memastikan bahwa semua siswa mendapatkan pendidikan yang bermutu sesuai dengan standar nasional.

4. Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Penjaminan Mutu Pendidikan

Peran pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan merupakan komponen krusial dalam memastikan bahwa standar pendidikan yang tinggi dapat diterapkan secara merata di seluruh Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, peran pemerintah di semua tingkatan tidak hanya terbatas pada pengawasan, tetapi juga mencakup dukungan langsung dalam bentuk kebijakan, sumber daya, serta pembinaan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Pemerintah pusat, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan umum, standar nasional pendidikan, serta pedoman pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah pusat berperan sebagai perumus kebijakan strategis yang

mengatur berbagai aspek penting dari sistem pendidikan, seperti kurikulum, standar kompetensi lulusan, dan standar sarana prasarana. Leithwood et al. (2012) menekankan bahwa kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat harus bersifat inklusif dan adaptif, sehingga mampu menjawab tantangan pendidikan di berbagai daerah dengan kondisi yang berbeda-beda. Selain itu, pemerintah pusat juga bertanggung jawab untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan, termasuk pendanaan, pelatihan, dan pengembangan profesional bagi para pendidik, guna memastikan bahwa standar mutu pendidikan dapat tercapai.

Di sisi lain, pemerintah kabupaten/kota memiliki peran yang lebih operasional dan langsung dalam implementasi kebijakan penjaminan mutu pendidikan di lapangan. Pemerintah daerah ini bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan bahwa setiap satuan pendidikan dasar dan menengah di wilayahnya menerapkan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hallinger (2011) menjelaskan bahwa peran pemerintah daerah meliputi penyusunan dan pelaksanaan program-program pengembangan pendidikan, monitoring dan evaluasi kinerja sekolah, serta pemberian dukungan teknis dan administratif kepada satuan pendidikan. Dalam menjalankan fungsi ini, pemerintah kabupaten/kota harus mampu mengidentifikasi kebutuhan spesifik dari masing-masing sekolah di wilayahnya dan memberikan bantuan yang sesuai.

Selain itu, pemerintah kabupaten/kota juga bertanggung jawab untuk membangun dan memelihara sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Ini termasuk pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah, penyediaan peralatan belajar mengajar, serta dukungan dalam bentuk layanan kesehatan dan kesejahteraan bagi siswa. Pemerintah daerah juga berperan dalam memfasilitasi kerjasama antara sekolah dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk komunitas lokal,

dunia usaha, dan lembaga non-pemerintah, untuk memperkuat pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan.

Lebih jauh lagi, peran pemerintah daerah juga mencakup pemberdayaan dan peningkatan kapasitas kepala sekolah dan guru melalui program pelatihan dan workshop yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam menjalankan tugasnya. Menurut Spillane (2015), pemberdayaan ini sangat penting untuk memastikan bahwa para pendidik memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengimplementasikan kebijakan penjaminan mutu dengan efektif.

Dengan demikian, baik pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/kota memiliki peran yang saling melengkapi dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan. Sementara pemerintah pusat berfokus pada penetapan kebijakan dan standar nasional, pemerintah daerah berperan dalam implementasi kebijakan tersebut di tingkat lokal. Kerjasama yang sinergis antara kedua tingkat pemerintahan ini adalah kunci dalam memastikan bahwa tujuan penjaminan mutu pendidikan dapat tercapai, yakni menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi semua siswa di seluruh Indonesia.

D. Keterkaitan Manajemen Mutu dan Penjaminan Mutu

Manajemen dan penjaminan mutu pendidikan merupakan dua aspek integral yang sangat berkaitan dengan manajemen pendidikan secara keseluruhan serta kebijakan pendidikan nasional. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, manajemen mutu pendidikan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap satuan pendidikan dapat mencapai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sesuai dengan kebijakan yang diatur oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Implementasi manajemen mutu pendidikan yang efektif berkontribusi langsung pada peningkatan

kualitas pendidikan secara menyeluruh, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap daya saing nasional di tingkat global.

Manajemen mutu pendidikan tidak hanya melibatkan pengawasan dan evaluasi kinerja institusi pendidikan tetapi juga mengintegrasikan berbagai elemen manajerial seperti perencanaan strategis, pelaksanaan, dan kontrol kualitas. Menurut Sallis (2014), manajemen mutu dalam pendidikan adalah sebuah proses sistematis yang berupaya memastikan bahwa semua aspek pengelolaan pendidikan—dari input, proses, hingga output—dijalankan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Proses ini mencakup segala upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu pendidikan, baik di tingkat sekolah maupun di tingkat nasional, yang dilakukan melalui berbagai program peningkatan kapasitas guru, pengembangan kurikulum, serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.

Di sisi lain, kebijakan pendidikan nasional berperan sebagai kerangka kerja yang mendasari pelaksanaan manajemen mutu pendidikan. Kebijakan ini memberikan pedoman tentang bagaimana standar mutu harus diterapkan dan diukur di seluruh satuan pendidikan. Menurut Mulyasa (2017), kebijakan pendidikan nasional dirumuskan dengan tujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang merata dan berkualitas, yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan kebijakan yang jelas dan terukur, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap lembaga pendidikan memenuhi kriteria yang dibutuhkan untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh peserta didik.

Hubungan antara manajemen mutu dan kebijakan pendidikan nasional juga terlihat dari bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam praktek manajerial di sekolah-sekolah. Pemerintah, melalui berbagai peraturan dan regulasi, seperti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan

Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, menetapkan standar nasional yang harus dipenuhi oleh semua sekolah. Implementasi kebijakan ini membutuhkan manajemen pendidikan yang efektif di tingkat lokal, di mana kepala sekolah dan para pendidik harus mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip manajemen mutu ke dalam praktek sehari-hari mereka.

Selain itu, penjaminan mutu pendidikan juga menjadi alat kontrol bagi pemerintah untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pendidikan yang telah diterapkan. Hallinger (2011) menyatakan bahwa penjaminan mutu tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi tetapi juga sebagai mekanisme untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem pendidikan. Dari sini, pemerintah dapat melakukan penyesuaian kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan pendidikan di lapangan, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan benar-benar memberikan dampak positif bagi kualitas pendidikan.

Secara keseluruhan, manajemen dan penjaminan mutu pendidikan merupakan elemen yang tidak terpisahkan dari manajemen pendidikan dan kebijakan pendidikan nasional. Keduanya bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan akhir yaitu peningkatan kualitas pendidikan di seluruh negeri. Melalui kebijakan yang baik dan manajemen yang efektif, sistem pendidikan nasional dapat terus berkembang dan beradaptasi dengan tantangan zaman, sambil tetap menjaga standar mutu yang tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan.

E. Proyeksi Interpretasi dan Strategi Implementatif Penjaminan Mutu di Sekolah Dasar.

1. Proyeksi Interpretatif Penjaminan Mutu di Sekolah Dasar

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016, merupakan

upaya strategis pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh proses pendidikan di tingkat dasar dan menengah di Indonesia memenuhi dan melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP). Penjaminan mutu pendidikan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol untuk memastikan kepatuhan terhadap standar, tetapi juga sebagai mekanisme peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Melalui pendekatan yang sistematis dan terintegrasi, sistem ini mencakup berbagai komponen yang bekerja bersama-sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan, mulai dari level sekolah hingga tingkat kebijakan nasional.

Sistem penjaminan mutu terdiri dari dua komponen utama: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI merupakan proses internal yang dilakukan oleh setiap satuan pendidikan. Dalam SPMI, sekolah bertanggung jawab untuk melakukan pemetaan mutu pendidikan berdasarkan SNP, merencanakan peningkatan mutu, melaksanakan strategi pemenuhan mutu, dan melakukan monitoring serta evaluasi secara berkala. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, sehingga dapat dilakukan perbaikan yang berkelanjutan. SPMI juga mendorong partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan di sekolah, termasuk guru, kepala sekolah, dan komite sekolah, untuk membangun budaya mutu yang kuat dan berkelanjutan.

Sementara itu, SPME berperan sebagai mekanisme pengawasan eksternal yang dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga-lembaga seperti Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M). SPME mencakup kegiatan seperti pemetaan mutu pendidikan di tingkat nasional, evaluasi ketercapaian SNP, dan akreditasi satuan pendidikan. Akreditasi ini penting untuk menilai kelayakan dan kualitas satuan pendidikan, serta memberikan pengakuan resmi

terhadap pencapaian mutu yang telah diraih oleh sekolah. Selain itu, SPME juga berfungsi untuk memberikan umpan balik kepada satuan pendidikan, sehingga mereka dapat melakukan penyesuaian dan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi eksternal.

Sistem penjaminan mutu ini didukung oleh pengembangan sistem informasi mutu pendidikan yang berbasis pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Sistem ini mengintegrasikan data terkait hasil pendidikan, isi pendidikan, proses pembelajaran, penilaian, tenaga pendidik, sarana prasarana, pembiayaan, dan pengelolaan pendidikan. Dapodik menjadi sumber data utama yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi kualitas pendidikan secara nasional, serta untuk mendukung proses akreditasi dan perencanaan peningkatan mutu pendidikan. Dengan sistem informasi ini, pemerintah dan satuan pendidikan dapat mengakses data yang akurat dan up-to-date, yang sangat penting untuk pengambilan keputusan yang berbasis bukti.

Sistem penjaminan mutu juga mengatur pembagian tugas dan wewenang antara berbagai pihak yang terlibat, termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah, dan satuan pendidikan. Setiap pihak memiliki peran yang jelas dalam mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi sistem penjaminan mutu. Misalnya, Kementerian melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah bertanggung jawab untuk menyusun pedoman penjaminan mutu, memberikan pembinaan dan pendampingan kepada satuan pendidikan, serta melakukan evaluasi secara nasional. Pemerintah Daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, bertugas untuk mengharmonisasikan pelaksanaan SPMI dan SPME di wilayah mereka, memberikan dukungan teknis kepada sekolah, serta memfasilitasi peningkatan mutu pendidikan di daerahnya.

Selain itu, sistem ini juga menekankan pentingnya pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala oleh pemerintah pusat dan

daerah. Pemantauan dan evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem penjaminan mutu berjalan sesuai dengan peraturan dan mampu memberikan hasil yang diharapkan. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau kelemahan dalam pelaksanaan penjaminan mutu, pemerintah berwenang untuk memberikan sanksi berupa peringatan hingga penghentian bantuan peningkatan mutu kepada satuan pendidikan atau pemerintah daerah yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga konsistensi dan integritas sistem penjaminan mutu dalam mencapai tujuan pendidikan nasional.

Secara keseluruhan, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian kualitas, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendorong peningkatan berkelanjutan dalam mutu pendidikan. Dengan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga satuan pendidikan, sistem ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif bagi tercapainya pendidikan berkualitas tinggi di seluruh Indonesia. Melalui implementasi yang efektif dan berkelanjutan, sistem penjaminan mutu ini akan berperan penting dalam mewujudkan cita-cita pendidikan nasional yang berorientasi pada peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing di tingkat global.

2. Strategi Implementatif Penjaminan Mutu di Sekolah Dasar

Strategi implementasi *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah* sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 di satuan pendidikan memerlukan pendekatan yang menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait. Strategi ini harus mampu mengintegrasikan berbagai aspek dalam proses pendidikan, dari pengelolaan sekolah, pengembangan kurikulum, pengajaran, hingga

sarana prasarana, dengan tujuan akhir mencapai dan melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Langkah awal yang sangat penting dalam implementasi ini adalah membangun kesadaran dan pemahaman yang mendalam di kalangan pemangku kepentingan pendidikan, termasuk kepala sekolah, guru, siswa, komite sekolah, dan masyarakat sekitar, tentang pentingnya penjaminan mutu pendidikan. Sosialisasi mengenai tujuan, manfaat, dan proses penjaminan mutu perlu dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa seluruh pihak memiliki visi dan komitmen yang sama. Sekolah sebagai unit pelaksana perlu memastikan bahwa budaya mutu tidak hanya dipahami sebagai konsep administratif, tetapi benar-benar diinternalisasi dalam setiap aspek kehidupan sekolah.

Selanjutnya, pemetaan mutu pendidikan menjadi langkah strategis yang tidak boleh dilewatkan. Pemetaan ini melibatkan penilaian menyeluruh terhadap kondisi sekolah saat ini, mencakup semua komponen yang relevan dengan Standar Nasional Pendidikan, seperti kurikulum, kualitas pengajaran, kompetensi guru, kondisi infrastruktur, serta dukungan dari lingkungan sekolah. Pemetaan ini harus dilakukan secara objektif dan komprehensif untuk mengidentifikasi gap atau kesenjangan antara kondisi saat ini dengan standar yang diharapkan. Hasil pemetaan ini kemudian menjadi dasar bagi penyusunan rencana kerja sekolah (RKS) yang fokus pada peningkatan mutu.

Penyusunan RKS merupakan langkah berikutnya, di mana sekolah merumuskan program-program yang konkret dan terukur untuk menjembatani kesenjangan yang ditemukan dalam pemetaan mutu. RKS harus disusun dengan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, memastikan bahwa program-program yang dirancang realistis, relevan dengan kebutuhan sekolah, dan memiliki target serta indikator keberhasilan yang jelas. RKS ini tidak hanya

memuat rencana jangka pendek tetapi juga strategi jangka panjang untuk mencapai peningkatan mutu yang berkelanjutan.

Implementasi dari rencana kerja yang telah disusun harus dilakukan secara konsisten dan dengan pengawasan yang ketat. Dalam tahap ini, sekolah harus menerapkan berbagai strategi yang telah dirumuskan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, baik dalam proses pembelajaran maupun dalam pengelolaan sekolah secara keseluruhan. Ini mencakup peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan pengembangan profesional, pengembangan kurikulum yang lebih relevan dan kontekstual, serta optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana. Implementasi ini juga harus fleksibel, dengan kemampuan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan kondisi yang berkembang di lapangan.

Monitoring dan evaluasi merupakan tahap krusial dalam strategi implementasi ini. Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang direncanakan berjalan sesuai dengan rencana, serta untuk mendeteksi secara dini segala bentuk hambatan atau kendala yang mungkin muncul. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas program yang telah dijalankan, serta dampaknya terhadap peningkatan mutu pendidikan. Evaluasi ini harus bersifat menyeluruh, melibatkan penilaian terhadap kinerja guru, hasil belajar siswa, kualitas manajemen sekolah, serta efektivitas penggunaan sumber daya. Hasil evaluasi ini digunakan untuk menyusun rekomendasi perbaikan dan penyesuaian strategi ke depan, sehingga proses peningkatan mutu dapat berjalan secara berkelanjutan.

Selain itu, pengembangan sistem informasi mutu pendidikan yang berbasis pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) menjadi salah satu komponen penting dalam strategi implementasi ini. Sistem informasi ini harus mampu menyediakan data yang akurat dan up-to-date mengenai berbagai aspek pendidikan di sekolah, seperti data siswa, kinerja guru, hasil belajar, kondisi infrastruktur, dan lain-lain.

Data ini sangat penting sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang tepat dan berbasis bukti. Pemerintah dan sekolah harus memastikan bahwa sistem informasi ini berfungsi dengan baik dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan.

Peran pendampingan dan supervisi dari lembaga eksternal, seperti Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan Dinas Pendidikan, juga sangat penting dalam strategi implementasi ini. Lembaga-lembaga ini bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan teknis, pendampingan, serta supervisi terhadap proses implementasi di lapangan. Mereka juga berperan dalam memastikan bahwa sekolah-sekolah mendapatkan dukungan yang memadai, baik dalam bentuk sumber daya, pelatihan, maupun teknologi, untuk menjalankan program penjaminan mutu.

Tidak kalah penting, strategi implementasi ini harus memperhatikan konteks lokal di mana sekolah berada. Setiap sekolah memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda, sehingga strategi yang diterapkan harus disesuaikan dengan kondisi lokal. Ini termasuk mempertimbangkan aspek budaya, sosial, dan ekonomi yang dapat mempengaruhi proses pendidikan di sekolah. Dengan pendekatan yang kontekstual ini, diharapkan implementasi sistem penjaminan mutu dapat lebih efektif dan memberikan dampak positif yang nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan.

Secara keseluruhan, strategi implementasi *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah* di satuan pendidikan memerlukan komitmen yang kuat, koordinasi yang baik, dan pendekatan yang menyeluruh. Dengan strategi yang tepat, sistem penjaminan mutu ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara signifikan, memastikan bahwa semua siswa mendapatkan pendidikan yang bermutu tinggi, dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional yang berorientasi pada peningkatan mutu dan daya saing bangsa. Implementasi yang berhasil dari sistem ini juga akan

berkontribusi pada terciptanya budaya mutu di lingkungan pendidikan, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing pendidikan Indonesia di tingkat global.

3. Implikasi Berkelanjutan Bagi Penguatan Manajemen Pendidikan.

Implikasi bagi manajemen pendidikan di sekolah dasar dalam konteks implementasi *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah* sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016, mencakup sejumlah aspek yang berdampak langsung pada cara sekolah dasar mengelola dan meningkatkan kualitas pendidikan. Implikasi ini berhubungan dengan berbagai elemen manajemen sekolah, mulai dari perencanaan strategis, pengelolaan sumber daya manusia, pengembangan kurikulum, hingga evaluasi dan pemantauan proses pembelajaran.

Pertama, dari segi perencanaan strategis, manajemen pendidikan di sekolah dasar harus semakin terfokus pada pencapaian standar mutu yang telah ditetapkan oleh Standar Nasional Pendidikan (SNP). Kepala sekolah dan tim manajemen perlu merancang Rencana Kerja Sekolah (RKS) yang berorientasi pada pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Ini menuntut manajemen untuk memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi kebutuhan spesifik sekolah, merumuskan prioritas yang tepat, serta mengalokasikan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan mutu yang diinginkan.

Kedua, dalam hal pengelolaan sumber daya manusia, sistem penjaminan mutu mengharuskan manajemen sekolah dasar untuk lebih proaktif dalam pengembangan profesional guru dan tenaga kependidikan. Guru sebagai agen utama dalam proses pembelajaran perlu didukung dengan pelatihan dan pengembangan keterampilan

yang relevan dengan kebutuhan kurikulum dan tuntutan zaman. Manajemen sekolah harus memastikan bahwa program pengembangan profesional dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, sehingga guru dapat terus meningkatkan kompetensi mereka dalam mengajar dan mendidik siswa sesuai dengan standar mutu yang diharapkan.

Ketiga, pengembangan kurikulum juga menjadi implikasi penting bagi manajemen pendidikan di sekolah dasar. Kurikulum harus dirancang dan dikembangkan dengan mempertimbangkan standar nasional serta kebutuhan lokal yang spesifik. Manajemen sekolah perlu memastikan bahwa kurikulum tidak hanya mencakup aspek akademis, tetapi juga pengembangan karakter dan keterampilan sosial siswa yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Implementasi kurikulum yang efektif memerlukan koordinasi yang baik antara guru, kepala sekolah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan dapat tercapai dengan optimal.

Keempat, pemantauan dan evaluasi proses pendidikan menjadi aspek yang semakin krusial. Manajemen pendidikan di sekolah dasar harus mengembangkan mekanisme monitoring dan evaluasi yang efektif untuk menilai kinerja guru, capaian siswa, serta efisiensi pengelolaan sekolah. Evaluasi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengukur keberhasilan, tetapi juga sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian strategi yang diperlukan. Hasil evaluasi harus digunakan secara proaktif untuk mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan dan untuk memastikan bahwa program-program pendidikan yang dilaksanakan benar-benar memberikan dampak positif bagi siswa.

Kelima, dalam konteks manajemen sumber daya, penerapan sistem penjaminan mutu membawa implikasi pada kebutuhan untuk mengelola sarana dan prasarana sekolah dengan lebih efisien. Manajemen sekolah harus mampu mengoptimalkan penggunaan

fasilitas yang ada untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif. Ini termasuk pemeliharaan infrastruktur sekolah, penyediaan fasilitas pembelajaran yang memadai, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Manajemen juga harus memastikan bahwa dana yang diperoleh dari berbagai sumber, baik itu pemerintah, masyarakat, maupun swasta, digunakan secara transparan dan akuntabel untuk mendukung upaya peningkatan mutu.

Akhirnya, sistem penjaminan mutu mengharuskan manajemen pendidikan di sekolah dasar untuk mengembangkan budaya mutu yang kuat di seluruh lingkungan sekolah. Budaya mutu ini harus tercermin dalam sikap, perilaku, dan praktik sehari-hari semua pihak yang terlibat, dari kepala sekolah, guru, siswa, hingga staf pendukung. Manajemen sekolah perlu memimpin dengan memberi contoh, mendorong inovasi, dan menciptakan lingkungan yang mendukung kolaborasi dan partisipasi aktif dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Dengan demikian, seluruh komunitas sekolah dapat bergerak bersama menuju pencapaian visi dan misi sekolah yang berorientasi pada kualitas.

Secara keseluruhan, implikasi bagi manajemen pendidikan di sekolah dasar dengan adanya sistem penjaminan mutu ini sangat luas dan menuntut perubahan dalam berbagai aspek pengelolaan sekolah. Manajemen yang efektif dan responsif terhadap perubahan ini akan menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang bermutu tinggi dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan menghasilkan siswa-siswa yang tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan siap menghadapi tantangan global.

BAB XIII
PRAKTIK BAIK MANAJEMEN PENDIDIKAN DALAM ADMINISTRASI KETATAUSAHAAN DI SEKOLAH DASAR

A. Pendahuluan

Manajemen pendidikan yang efektif sangat bergantung pada praktik baik dalam tata kelola administrasi ketatausahaan di sekolah dasar. Tata kelola administrasi yang efisien adalah kunci untuk memastikan operasional sekolah berjalan dengan lancar dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Dalam konteks ini, praktik baik dalam manajemen pendidikan mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan dokumen hingga sistem informasi sekolah, yang semuanya berkontribusi pada efektivitas dan transparansi administrasi.

Salah satu aspek penting dari tata kelola administrasi di sekolah dasar adalah pengelolaan dokumen dan arsip. Administrasi yang baik memerlukan sistem yang terstruktur untuk mengelola dokumen penting seperti laporan keuangan, catatan akademik, dan surat-menyurat. Husna (2021) mencatat bahwa sistem pengelolaan dokumen yang terintegrasi dan berbasis digital dapat meningkatkan efisiensi kerja administrasi sekolah. Penggunaan perangkat lunak manajemen arsip yang memadai tidak hanya mempermudah akses dan pencarian dokumen, tetapi juga mengurangi risiko kehilangan data dan meningkatkan keamanan informasi. Dengan sistem yang terorganisir, staf administrasi dapat dengan mudah melacak dan mengelola dokumen yang diperlukan untuk kegiatan sekolah sehari-hari (Husna, 2021).

Selain itu, manajemen keuangan di sekolah dasar merupakan komponen kunci dari tata kelola administrasi yang baik. Pengelolaan

anggaran dan alokasi sumber daya yang efektif adalah penting untuk memastikan bahwa dana pendidikan digunakan secara optimal dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sutrisno dan Prasetyo (2022) menekankan bahwa praktik baik dalam pengelolaan keuangan mencakup perencanaan anggaran yang cermat, pelaporan keuangan yang transparan, dan evaluasi berkala terhadap penggunaan anggaran. Dengan sistem pengelolaan keuangan yang baik, sekolah dapat menghindari kebocoran anggaran dan memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan fasilitas sekolah (Sutrisno & Prasetyo, 2022).

Sistem informasi manajemen sekolah adalah elemen penting lainnya dalam praktik baik tata kelola administrasi. Sistem informasi yang efektif mendukung pengelolaan data siswa, guru, dan staf, serta memfasilitasi komunikasi yang efisien antara berbagai pihak terkait. Mulyadi (2020) menjelaskan bahwa penerapan teknologi informasi dalam manajemen sekolah dapat memperbaiki proses administrasi dengan menyediakan akses real-time ke data penting, serta mempermudah pembuatan laporan dan analisis data. Dengan sistem informasi yang terintegrasi, sekolah dapat meningkatkan akurasi data dan mempercepat proses administratif, yang pada gilirannya mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan responsif (Mulyadi, 2020).

Praktik baik dalam manajemen sumber daya manusia di sekolah dasar juga merupakan bagian integral dari tata kelola administrasi yang efektif. Pengelolaan yang baik dari aspek ini mencakup perencanaan kebutuhan tenaga kerja, pengembangan profesional, dan evaluasi kinerja. Rosiana dan Azhari (2023) menyarankan bahwa program pengembangan profesional yang berkelanjutan dan sistem evaluasi kinerja yang adil dapat meningkatkan kinerja guru dan staf administratif. Dengan memberikan pelatihan yang relevan dan dukungan yang memadai, sekolah dapat memastikan bahwa staf

memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka dengan efektif dan berkontribusi pada pencapaian tujuan pendidikan (Rosiana & Azhari, 2023).

Akhirnya, transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip utama dalam tata kelola administrasi yang baik. Setiawan (2022) menekankan bahwa sistem yang transparan dan akuntabel membantu membangun kepercayaan antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Mekanisme pelaporan yang jelas dan proses audit yang rutin dapat memastikan bahwa semua kegiatan administrasi dilakukan sesuai dengan standar dan kebijakan yang berlaku. Dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, sekolah dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam proses pendidikan (Setiawan, 2022).

Secara keseluruhan, praktik baik dalam tata kelola administrasi ketatausahaan di sekolah dasar melibatkan pengelolaan dokumen, keuangan, informasi, sumber daya manusia, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan penerapan praktik-praktik ini, sekolah dasar dapat menjalankan administrasi secara efisien dan efektif, mendukung peningkatan kualitas pendidikan, dan memastikan bahwa semua aspek operasional sekolah berjalan dengan lancar.

B. Manajemen Pendidikan dalam Aspek Administrasi Ketatausahaan.

1. Administrasi Tata Layanan Kurikulum dan Proses Pembelajaran

Manajemen pendidikan memainkan peran yang sangat penting dalam aspek administrasi tata layanan kurikulum dan proses pembelajaran di sekolah. Dalam konteks pendidikan yang semakin kompleks, pengelolaan kurikulum dan proses pembelajaran membutuhkan pendekatan yang sistematis dan berfokus pada kualitas agar dapat memenuhi standar pendidikan yang diharapkan.

Implementasi yang efektif dari kurikulum dan proses pembelajaran memerlukan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang konsisten, serta evaluasi yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal.

a. Administrasi Tata Layanan Kurikulum

Administrasi tata layanan kurikulum adalah komponen integral dalam manajemen pendidikan yang berfokus pada perancangan, implementasi, dan evaluasi kurikulum. Proses ini dimulai dengan perencanaan kurikulum yang menyeluruh, yang harus mempertimbangkan kebutuhan siswa, perkembangan terbaru dalam ilmu pengetahuan, serta kebijakan pendidikan yang berlaku. Sutrisno dan Hadi (2020) menekankan bahwa perencanaan kurikulum harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pendidik, kepala sekolah, dan ahli kurikulum untuk memastikan bahwa kurikulum yang dirancang tidak hanya relevan tetapi juga efektif. Proses ini mencakup penetapan tujuan pembelajaran yang jelas, pemilihan materi ajar yang sesuai, serta penyusunan metode evaluasi yang akan digunakan.

Setelah kurikulum dirancang, tahap berikutnya adalah implementasi. Purnamasari (2021) mengungkapkan bahwa administrasi kurikulum memerlukan pemantauan dan dukungan berkelanjutan kepada guru untuk memastikan bahwa kurikulum diterapkan secara konsisten di lapangan. Ini termasuk penyediaan materi ajar yang memadai, pelatihan profesional untuk guru, dan dukungan administrasi untuk mengatasi tantangan yang mungkin timbul selama pelaksanaan. Manajer pendidikan harus memastikan bahwa setiap guru memahami kurikulum dan dapat mengimplementasikannya dengan cara yang mendukung pencapaian tujuan pendidikan.

b. Proses Pembelajaran

Dalam pengelolaan proses pembelajaran, manajemen pendidikan berperan dalam mengatur dan mengoptimalkan kegiatan

belajar-mengajar. Wahyudi (2022) menjelaskan bahwa manajemen proses pembelajaran melibatkan perencanaan jadwal pelajaran, pengaturan kelas, serta penyediaan bahan ajar yang relevan dan berkualitas. Pengaturan jadwal pelajaran harus mempertimbangkan alokasi waktu yang memadai untuk setiap mata pelajaran, sementara pengaturan kelas harus mendukung metode pengajaran yang efektif dan interaktif.

Evaluasi dan penilaian merupakan aspek penting dalam proses pembelajaran. Gunawan dan Jaya (2023) menyarankan bahwa penilaian harus dilakukan secara menyeluruh dan mencakup penilaian formatif serta sumatif. Penilaian formatif memberikan umpan balik langsung kepada siswa selama proses pembelajaran, sedangkan penilaian sumatif mengevaluasi pencapaian akhir siswa. Sistem penilaian yang terstruktur membantu sekolah dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam proses pembelajaran, serta memungkinkan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Koordinasi dan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran juga sangat penting. Marlina dan Yulianto (2020) menekankan bahwa komunikasi yang efektif antara guru, siswa, dan orang tua membantu dalam menyampaikan informasi mengenai kemajuan siswa dan menangani masalah yang mungkin timbul. Komunikasi yang baik memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam mendukung proses pembelajaran dan berkontribusi pada pencapaian tujuan pendidikan.

Integrasi teknologi dalam proses pembelajaran semakin menjadi bagian penting dari manajemen pendidikan. Kusnadi dan Astuti (2021) menjelaskan bahwa teknologi dapat meningkatkan efisiensi administrasi dan memperkaya pengalaman belajar siswa. Penggunaan platform digital untuk manajemen kurikulum, penyampaian materi ajar, dan evaluasi hasil belajar mendukung proses pembelajaran yang

lebih dinamis dan terhubung. Teknologi memungkinkan akses materi ajar yang lebih luas dan memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif, sesuai dengan perkembangan zaman.

Secara keseluruhan, manajemen pendidikan dalam aspek administrasi tata layanan kurikulum dan proses pembelajaran memerlukan pendekatan yang sistematis dan terintegrasi. Perencanaan yang cermat, pelaksanaan yang efektif, serta evaluasi dan komunikasi yang baik adalah kunci untuk memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan memenuhi kebutuhan siswa dan proses pembelajaran berlangsung dengan optimal. Melalui pendekatan yang terstruktur dan dukungan yang memadai, sekolah dapat mencapai hasil pendidikan yang berkualitas dan memenuhi standar yang diharapkan.

2. Administrasi Kesiswaan/Kepesertadidikan

Manajemen pendidikan dalam aspek administrasi kesiswaan atau kepesertadidikan memainkan peran vital dalam menciptakan pengalaman pendidikan yang optimal dan terorganisir dengan baik untuk setiap siswa. Proses ini mencakup berbagai elemen, dari pendaftaran siswa baru, pengelolaan data siswa, hingga pemantauan perkembangan akademik dan kesejahteraan siswa. Pengelolaan yang efektif dalam administrasi kesiswaan mendukung kelancaran operasional sekolah serta berkontribusi pada pencapaian tujuan pendidikan dan kesejahteraan siswa secara keseluruhan.

a. Pendaftaran dan Pengelolaan Data Siswa

Administrasi kesiswaan dimulai dengan proses pendaftaran siswa, yang melibatkan pengumpulan dan verifikasi data pribadi serta informasi akademik. Menurut Susanto dan Hidayat (2021), sistem pendaftaran yang efisien memerlukan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat dan mempermudah proses pendaftaran serta pengelolaan data siswa. Dengan menggunakan sistem manajemen informasi siswa berbasis digital, sekolah dapat

menyimpan, mengakses, dan mengelola data siswa dengan lebih mudah dan akurat. Sistem ini mengurangi risiko kesalahan administrasi dan mempercepat proses administrasi, yang sangat penting untuk menjaga efisiensi operasional sekolah.

Pengelolaan data siswa yang efektif juga melibatkan pemantauan dan pemeliharaan catatan akademik serta non-akademik siswa. Arifin (2020) menekankan pentingnya memiliki sistem yang terintegrasi untuk memantau perkembangan akademik, absensi, serta kegiatan ekstrakurikuler siswa. Sistem yang baik harus dapat menyediakan laporan komprehensif mengenai kinerja siswa. Dengan data yang akurat dan terintegrasi, sekolah dapat lebih baik dalam mengidentifikasi kebutuhan individual siswa dan menyediakan intervensi pendidikan yang sesuai. Pengelolaan data yang efektif tidak hanya mendukung pemantauan kemajuan siswa tetapi juga membantu dalam merancang kebijakan dan strategi yang tepat untuk perbaikan.

b. Pemantauan Perkembangan Akademik dan Kesejahteraan Siswa

Pemantauan perkembangan akademik siswa merupakan aspek krusial dalam administrasi kesiswaan. Hidayati dan Wulandari (2022) menyarankan bahwa manajer pendidikan perlu memastikan adanya sistem evaluasi yang efektif untuk menilai kemajuan siswa secara berkala. Evaluasi ini termasuk penilaian formatif yang memberikan umpan balik langsung kepada siswa dan penilaian sumatif yang menilai pencapaian akhir. Dengan adanya sistem penilaian yang tepat, sekolah dapat memberikan umpan balik konstruktif kepada siswa dan guru, serta merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Evaluasi yang teratur dan sistematis memungkinkan identifikasi lebih cepat terhadap masalah akademik dan penerapan intervensi yang diperlukan.

Aspek kesejahteraan siswa juga sangat penting dalam administrasi kesiswaan. Kusumawati dan Hermawan (2021) menekankan bahwa dukungan psikologis dan sosial sangat penting untuk memastikan siswa dapat belajar dengan baik dan merasa aman di lingkungan sekolah. Ini mencakup layanan konseling, program kesehatan mental, serta kegiatan yang mendukung perkembangan sosial-emotional siswa. Administrasi kesiswaan harus berkolaborasi dengan orang tua, guru, dan profesional kesehatan untuk menyediakan dukungan yang holistik bagi siswa. Dukungan ini membantu siswa tidak hanya dalam hal akademik tetapi juga dalam aspek emosional dan sosial, yang berdampak pada keseluruhan pengalaman belajar mereka.

c. Koordinasi dengan Orang Tua dan Komunitas

Koordinasi yang efektif dengan orang tua dan komunitas merupakan bagian integral dari administrasi kesiswaan. Suryadi (2023) menjelaskan bahwa komunikasi yang baik antara sekolah dan orang tua dapat memperkuat dukungan terhadap pendidikan siswa. Melalui pertemuan orang tua-guru, laporan kemajuan siswa, dan kegiatan sekolah lainnya, orang tua dapat terlibat aktif dalam proses pendidikan anak mereka. Keterlibatan orang tua membantu dalam mendukung perkembangan akademik dan pribadi siswa serta memberikan informasi berharga tentang kemajuan dan kebutuhan anak. Selain itu, keterlibatan komunitas dalam kegiatan sekolah dapat meningkatkan sumber daya dan kesempatan yang tersedia bagi siswa, menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi pendidikan mereka.

d. Penggunaan Teknologi dalam Administrasi Kesiswaan

Teknologi berperan penting dalam administrasi kesiswaan dengan meningkatkan efisiensi dan akurasi proses administrasi. Prasetyo dan Ningsih (2021) menjelaskan bahwa penggunaan aplikasi dan perangkat lunak manajemen kesiswaan dapat mempercepat proses

administrasi, mengurangi beban kerja administratif, dan meningkatkan akurasi data. Teknologi memungkinkan akses cepat dan mudah ke informasi siswa, termasuk data akademik, absensi, dan kegiatan ekstrakurikuler. Penggunaan teknologi dalam administrasi kesiswaan membantu dalam memantau berbagai aspek terkait kesiswaan secara real-time, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, dan meningkatkan keterlibatan semua pihak dalam proses pendidikan.

Secara keseluruhan, manajemen pendidikan dalam aspek administrasi kesiswaan mencakup pengelolaan yang cermat dari berbagai elemen terkait siswa untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan dan kesejahteraan siswa. Dengan penerapan sistem yang efisien, dukungan yang memadai, dan pemanfaatan teknologi yang tepat, administrasi kesiswaan dapat meningkatkan pengalaman pendidikan siswa dan memastikan bahwa mereka mendapatkan manfaat maksimal dari pendidikan yang mereka terima.

3. Administrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Manajemen pendidikan dalam aspek administrasi pendidik dan tenaga kependidikan merupakan fondasi penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang efektif dan berkualitas. Aspek ini mencakup berbagai elemen yang berkaitan dengan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan, mulai dari perekrutan, pengembangan profesional, evaluasi kinerja, hingga kesejahteraan. Pengelolaan yang efektif dalam domain ini berperan vital dalam memastikan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan dapat menjalankan tugas mereka dengan optimal, mendukung pencapaian tujuan pendidikan, dan meningkatkan kualitas proses belajar-mengajar di sekolah.

a. Perekrutan dan Penempatan Pendidik

Proses perekrutan dan penempatan pendidik adalah langkah awal yang krusial dalam manajemen administrasi pendidik. Nugroho

dan Yulianto (2022) menekankan bahwa perekrutan yang efektif memerlukan kriteria yang jelas dan prosedur yang transparan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pendidik yang direkrut tidak hanya memiliki kompetensi yang sesuai, tetapi juga cocok dengan kebutuhan spesifik sekolah. Kualitas perekrutan tidak hanya mempengaruhi keberhasilan pendidikan secara langsung tetapi juga berkontribusi pada stabilitas dan efektivitas keseluruhan staf pengajar di sekolah. Penempatan pendidik yang strategis, berdasarkan kompetensi dan kebutuhan sekolah, memastikan bahwa mereka ditempatkan di posisi yang sesuai dengan keahlian mereka. Dengan penempatan yang tepat, pendidik dapat memaksimalkan kontribusi mereka terhadap efektivitas pengajaran dan pencapaian hasil belajar siswa.

b. Pengembangan Profesional dan Pelatihan

Pengembangan profesional pendidik dan tenaga kependidikan adalah komponen penting dalam manajemen pendidikan. Wahyuni dan Sari (2021) menyoroti bahwa program pelatihan yang berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pendidik. Program pengembangan profesional harus mencakup berbagai area, seperti teknik pengajaran terbaru, manajemen kelas, dan integrasi teknologi dalam pendidikan. Dengan adanya program pengembangan yang terstruktur, pendidik dapat terus memperbarui keterampilan mereka dan menerapkan praktik terbaik dalam pengajaran. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah tetapi juga memastikan bahwa pendidik dapat mengadaptasi perubahan dalam pendidikan dan memenuhi kebutuhan siswa dengan lebih baik.

c. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan merupakan bagian integral dari administrasi pendidikan yang efektif. Haris dan Nugrahani (2020) menjelaskan bahwa evaluasi yang sistematis dan

objektif sangat penting untuk menilai efektivitas pengajaran dan kinerja tenaga kependidikan. Evaluasi ini melibatkan penilaian berbasis indikator yang relevan, seperti pencapaian tujuan pembelajaran, keterlibatan dalam pengembangan profesional, dan kontribusi terhadap lingkungan sekolah. Evaluasi yang baik tidak hanya memberikan umpan balik konstruktif tetapi juga membantu dalam merancang rencana pengembangan individu. Dengan adanya evaluasi yang terstruktur, sekolah dapat meningkatkan kualitas pengajaran dan membantu pendidik dalam mengatasi tantangan yang mereka hadapi.

d. Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan adalah elemen penting yang harus diperhatikan dalam manajemen administrasi pendidikan. Kusumawati dan Wijaya (2022) menjelaskan bahwa kesejahteraan mencakup berbagai aspek, termasuk kondisi kerja, keseimbangan kerja-hidup, dan dukungan sosial. Pengelolaan yang baik dalam aspek ini melibatkan penyediaan fasilitas yang memadai, lingkungan kerja yang sehat, serta dukungan untuk kesehatan mental dan fisik pendidik. Kesejahteraan yang baik berkontribusi pada kepuasan kerja dan motivasi pendidik, yang pada gilirannya berdampak positif pada kualitas pengajaran dan suasana sekolah secara keseluruhan.

e. Koordinasi dan Komunikasi

Koordinasi dan komunikasi yang efektif antara pendidik, tenaga kependidikan, dan manajemen sekolah juga merupakan aspek penting dalam administrasi pendidikan. Suryadi (2023) menekankan bahwa komunikasi yang terbuka antara semua pihak yang terlibat mendukung pemecahan masalah yang lebih baik, perencanaan yang lebih efektif, dan pengelolaan konflik. Forum diskusi, rapat rutin, dan sistem komunikasi yang baik memungkinkan sekolah untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan

memiliki kesempatan untuk menyampaikan masukan serta kebutuhan mereka. Koordinasi yang baik membantu dalam menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan.

f. Penggunaan Teknologi dalam Administrasi Pendidik

Teknologi memainkan peran penting dalam administrasi pendidik dan tenaga kependidikan dengan meningkatkan efisiensi proses administrasi. Prasetyo dan Putri (2021) menyarankan bahwa penggunaan sistem informasi berbasis teknologi, seperti aplikasi manajemen kinerja dan platform pelatihan online, dapat mempercepat proses administrasi, mengurangi beban kerja administratif, dan meningkatkan akurasi data. Teknologi memungkinkan manajer pendidikan untuk mengakses informasi secara real-time, memonitor perkembangan profesional, dan melakukan evaluasi serta perencanaan dengan lebih efisien. Dengan teknologi, pengelolaan administrasi pendidik dapat menjadi lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan yang berubah-ubah.

Secara keseluruhan, manajemen pendidikan dalam aspek administrasi pendidik dan tenaga kependidikan mencakup pengelolaan yang komprehensif dari berbagai elemen yang berkaitan dengan pendidik dan tenaga kependidikan. Dengan perencanaan yang cermat, pelaksanaan program pengembangan profesional yang efektif, perhatian terhadap kesejahteraan, dan pemanfaatan teknologi yang tepat, sekolah dapat memastikan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas mereka dengan optimal, mendukung pencapaian tujuan pendidikan, dan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

4. Administrasi Pembiayaan

Manajemen pendidikan dalam aspek administrasi pembiayaan merupakan bagian fundamental dalam menjaga keberlangsungan dan

efektivitas operasional sekolah. Pengelolaan keuangan yang baik tidak hanya sekadar mengatur anggaran, tetapi juga melibatkan perencanaan keuangan yang strategis, akuntabilitas yang ketat, serta transparansi dalam pengelolaan sumber daya finansial. Aspek ini memiliki peranan krusial dalam memastikan bahwa sekolah dapat memenuhi berbagai kebutuhan operasionalnya serta mendukung kegiatan pendidikan secara optimal, tanpa menghadapi kendala finansial yang dapat menghambat pencapaian tujuan pendidikan.

a. Perencanaan Keuangan dan Penganggaran

Perencanaan keuangan merupakan fondasi utama dalam manajemen administrasi pembiayaan. Yulianto dan Prabowo (2022) menekankan bahwa penyusunan anggaran yang menyeluruh dan realistis harus didasarkan pada kebutuhan spesifik sekolah serta proyeksi pendapatan yang akurat. Proses ini mencakup penentuan prioritas pengeluaran dan alokasi dana untuk berbagai kegiatan pendidikan dan operasional. Perencanaan yang matang memungkinkan sekolah untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran, menghindari pemborosan, dan memastikan bahwa semua kebutuhan pendidikan dapat dipenuhi. Dengan strategi perencanaan yang baik, sekolah dapat menghadapi perubahan dan tantangan keuangan dengan lebih siap, serta memastikan alokasi dana yang efisien untuk mendukung kegiatan dan program pendidikan.

b. Pengelolaan dan Akuntabilitas Keuangan

Pengelolaan keuangan yang efektif memerlukan sistem akuntansi yang transparan dan akurat. Sari dan Hidayah (2021) menjelaskan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan merupakan elemen kunci untuk mencegah penyalahgunaan dana dan memastikan penggunaan sumber daya yang tepat sasaran. Sistem akuntansi yang efektif harus mencakup pencatatan yang rinci atas semua transaksi keuangan, penyusunan laporan keuangan secara rutin,

serta pelaksanaan audit internal yang berkala. Akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan keuangan tidak hanya meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan tetapi juga memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta mendukung transparansi dan integritas dalam pengelolaan keuangan.

c. Pendanaan dan Sumber Daya Keuangan

Sekolah umumnya memperoleh dana dari berbagai sumber, termasuk anggaran pemerintah, sumbangan, dan dana pribadi. Prasetyo dan Yuli (2023) menyoroti pentingnya diversifikasi sumber pendanaan untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber dana dan meningkatkan stabilitas keuangan sekolah. Diversifikasi ini memungkinkan sekolah untuk mengembangkan berbagai program dan kegiatan pendidikan tanpa harus menghadapi risiko keuangan yang tinggi. Namun, pengelolaan dana dari berbagai sumber memerlukan kebijakan dan prosedur yang jelas untuk memastikan penggunaan yang efisien dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan pendekatan yang terstruktur, sekolah dapat memanfaatkan berbagai sumber pendanaan secara optimal untuk mendukung berbagai kegiatan pendidikan.

d. Pemantauan dan Evaluasi Keuangan

Pemantauan dan evaluasi keuangan adalah aspek penting untuk memastikan bahwa anggaran dan dana digunakan secara efektif. Haris dan Kurniawan (2022) menjelaskan bahwa pemantauan yang berkala memungkinkan identifikasi masalah keuangan sejak dini dan memungkinkan penyesuaian yang diperlukan. Evaluasi keuangan mencakup analisis perbandingan antara hasil pengeluaran dan anggaran yang direncanakan, serta penilaian efektivitas penggunaan dana dalam mencapai tujuan pendidikan. Proses evaluasi yang sistematis membantu menjaga kesehatan finansial sekolah dan

memastikan bahwa sumber daya digunakan secara optimal untuk mencapai hasil pendidikan yang diinginkan.

e. Transparansi dan Pelaporan Keuangan

Transparansi dalam administrasi pembiayaan merupakan aspek yang sangat penting untuk membangun kepercayaan dan akuntabilitas. Yulia dan Nugraha (2021) menekankan bahwa pelaporan keuangan yang jelas dan terbuka kepada pemangku kepentingan, termasuk orang tua, masyarakat, dan lembaga pengawas, adalah bagian integral dari akuntabilitas keuangan. Laporan keuangan yang transparan memungkinkan semua pihak untuk memahami bagaimana dana dikelola dan digunakan, serta memberikan gambaran yang jelas tentang status keuangan sekolah. Transparansi ini sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan dengan integritas dan mendukung kepercayaan serta dukungan dari berbagai pihak terkait.

Secara keseluruhan, manajemen pendidikan dalam aspek administrasi pembiayaan mencakup perencanaan, pengelolaan, akuntabilitas, dan transparansi yang cermat. Dengan strategi perencanaan keuangan yang efektif, pengelolaan dana yang akurat, serta pelaporan yang transparan, sekolah dapat memastikan bahwa sumber daya finansial dikelola secara optimal, mendukung operasional pendidikan, dan mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan.

5. Administrasi Sarana dan Prasarana Sekolah

Manajemen pendidikan dalam aspek administrasi sarana dan prasarana sekolah merupakan elemen krusial dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung proses pendidikan secara efektif. Aspek ini mencakup berbagai dimensi penting, mulai dari perencanaan dan pengadaan fasilitas hingga pengelolaan, pemeliharaan, dan evaluasi fasilitas yang mendukung kegiatan belajar-mengajar. Dengan pengelolaan yang tepat, sarana dan prasarana sekolah tidak hanya

akan memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan tetapi juga berkontribusi pada kualitas pendidikan yang diberikan.

a. Perencanaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana

Perencanaan sarana dan prasarana adalah tahap awal yang menentukan keberhasilan manajemen fasilitas pendidikan. Haris dan Hidayah (2022) menjelaskan bahwa perencanaan yang efektif dimulai dengan identifikasi kebutuhan fasilitas yang didasarkan pada analisis mendalam mengenai jumlah siswa, program yang ditawarkan, serta standar pendidikan yang berlaku. Proses ini melibatkan penyusunan anggaran yang realistis, pemilihan jenis fasilitas yang sesuai, dan perencanaan pengadaan yang strategis. Perencanaan yang baik memastikan bahwa sekolah memiliki fasilitas yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan, yang pada akhirnya mendukung proses belajar-mengajar dengan optimal. Perencanaan yang matang juga menghindari kekurangan fasilitas yang dapat menghambat kegiatan pendidikan.

b. Pengelolaan dan Pemeliharaan Fasilitas

Pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas sekolah memerlukan pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan. Prasetyo dan Wijaya (2023) menekankan pentingnya pencatatan inventaris yang akurat, pemantauan kondisi fasilitas secara berkala, dan pelaksanaan perawatan rutin. Pengelolaan yang efektif termasuk pengidentifikasian dan penanganan masalah fasilitas dengan cepat untuk menghindari gangguan dalam proses belajar-mengajar. Pemeliharaan yang terencana tidak hanya memperpanjang usia fasilitas tetapi juga mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan yang dapat mengganggu kegiatan pendidikan. Oleh karena itu, sistem manajemen fasilitas harus dapat menangani pemeliharaan dan perbaikan dengan efisien untuk memastikan semua peralatan berfungsi dengan baik.

c. Evaluasi dan Peningkatan Fasilitas

Evaluasi sarana dan prasarana adalah langkah penting dalam memastikan bahwa fasilitas memenuhi kebutuhan pendidikan dan standar keselamatan. Yulia dan Nugraha (2021) mengemukakan bahwa evaluasi yang rutin dan terstruktur memungkinkan identifikasi area yang memerlukan peningkatan atau perbaikan. Evaluasi ini melibatkan survei kondisi fasilitas, penilaian kepuasan pengguna, dan analisis efektivitas penggunaan fasilitas dalam mendukung kegiatan pendidikan. Dengan hasil evaluasi yang akurat, sekolah dapat merencanakan peningkatan atau penggantian fasilitas yang tidak memadai atau sudah usang, memastikan bahwa standar pendidikan tetap tinggi dan fasilitas terus mendukung kualitas proses belajar-mengajar.

d. Keterlibatan Stakeholder dan Komunitas

Keterlibatan stakeholder dan komunitas dalam pengelolaan sarana dan prasarana sekolah adalah faktor penting yang mendukung keberhasilan manajemen fasilitas. Sari dan Hidayah (2021) menekankan bahwa komunikasi yang baik dengan orang tua, masyarakat, dan pihak terkait lainnya dapat meningkatkan dukungan untuk pengadaan dan pemeliharaan fasilitas sekolah. Partisipasi komunitas, baik dalam bentuk dukungan finansial, sumbangan fasilitas, atau keterlibatan dalam kegiatan perawatan, membantu memperkuat hubungan antara sekolah dan komunitas serta meningkatkan kualitas fasilitas yang tersedia. Keterlibatan ini juga memastikan bahwa kebutuhan lokal dipertimbangkan dalam perencanaan dan pengelolaan fasilitas.

e. Teknologi dalam Pengelolaan Fasilitas

Teknologi telah menjadi alat yang sangat berharga dalam pengelolaan sarana dan prasarana sekolah. Wahyuni dan Sari (2022) menjelaskan bahwa penerapan teknologi, seperti sistem manajemen

fasilitas berbasis komputer dan aplikasi pemantauan, dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas. Teknologi memungkinkan pemantauan real-time terhadap kondisi fasilitas, pencatatan data yang akurat, dan pelaporan yang lebih efektif. Dengan memanfaatkan teknologi, sekolah dapat mengoptimalkan penggunaan fasilitas, mengurangi biaya operasional, dan memastikan bahwa fasilitas selalu dalam kondisi baik untuk mendukung kegiatan pendidikan.

Secara keseluruhan, manajemen pendidikan dalam aspek administrasi sarana dan prasarana melibatkan perencanaan, pengelolaan, evaluasi, serta penerapan teknologi untuk memastikan bahwa fasilitas sekolah mendukung proses pendidikan dengan optimal. Dengan perencanaan yang baik, pengelolaan yang efisien, dan keterlibatan stakeholder, sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memenuhi standar pendidikan yang tinggi.

6. Administrasi Peran Serta Masyarakat dan Kemitraan

Manajemen pendidikan dalam aspek administrasi peran serta masyarakat dan kemitraan merupakan komponen krusial dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang efektif dan berkelanjutan. Kolaborasi antara sekolah dan berbagai pemangku kepentingan eksternal—seperti orang tua, komunitas lokal, lembaga pemerintah, dan organisasi non-pemerintah (NGO)—adalah kunci untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Melalui partisipasi aktif dari semua pihak ini, sekolah tidak hanya mendapatkan dukungan finansial dan sumber daya, tetapi juga membangun jaringan yang memperluas kesempatan belajar bagi siswa dan memperkaya proses pendidikan.

a. Peran Orang Tua dan Keluarga dalam Pendidikan

Orang tua dan keluarga memainkan peran yang sangat signifikan dalam mendukung pendidikan anak-anak mereka. Prasetyo dan Lestari (2021) menegaskan bahwa keterlibatan orang tua dalam

kegiatan sekolah, seperti menghadiri pertemuan orang tua-guru dan mendukung kegiatan belajar di rumah, sangat berpengaruh pada pencapaian akademik siswa. Keterlibatan ini membantu meningkatkan motivasi siswa, memperbaiki perilaku, dan mendongkrak prestasi akademik mereka. Ketika sekolah dan keluarga berkomunikasi secara efektif, guru dapat lebih memahami kebutuhan siswa dan bekerja sama dengan orang tua untuk merancang strategi yang mendukung pencapaian tujuan pendidikan.

b. Peran Komunitas dalam Pendidikan

Komunitas lokal berkontribusi penting dalam mendukung pendidikan melalui berbagai bentuk partisipasi. Yulia dan Nugroho (2022) menyoroti bagaimana komunitas dapat memberikan dukungan finansial, sumber daya, serta fasilitas tambahan untuk kegiatan ekstrakurikuler dan pelatihan keterampilan. Keterlibatan komunitas dalam kegiatan sekolah, seperti program sukarelawan dan sumbangan, menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih mendukung dan beragam. Komunitas yang aktif juga memungkinkan siswa untuk terlibat dalam proyek-proyek lokal yang memperluas pengalaman belajar mereka di luar ruang kelas, serta memperkaya pembelajaran mereka dengan konteks yang relevan dan nyata.

c. Kemitraan dengan Lembaga Pemerintah dan Organisasi Non-Pemerintah

Kemitraan dengan lembaga pemerintah dan NGO juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Haris dan Kurniawan (2023) mengungkapkan bahwa kolaborasi antara sekolah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi penyediaan dana, pelatihan profesional, dan program-program khusus yang mendukung kebutuhan pendidikan. NGO sering terlibat dalam menyediakan sumber daya tambahan, seperti buku teks dan peralatan, serta program beasiswa yang membantu siswa dari latar belakang kurang mampu.

Kemitraan ini mengatasi kekurangan dana dan sumber daya yang sering dihadapi oleh sekolah, serta memastikan siswa memiliki akses ke peluang pendidikan yang lebih baik dan lebih luas.

d. Pentingnya Komunikasi dan Koordinasi

Komunikasi dan koordinasi yang efektif antara sekolah dan semua pemangku kepentingan terkait adalah kunci untuk memastikan kemitraan yang berhasil. Sari dan Hidayah (2021) menekankan bahwa saluran komunikasi yang terbuka dan rutin antara sekolah, orang tua, komunitas, dan mitra eksternal memungkinkan pemecahan masalah yang lebih cepat dan perencanaan yang lebih baik. Pertemuan rutin, forum diskusi, dan laporan perkembangan adalah beberapa cara untuk menjaga keterlibatan dan dukungan dari semua pihak. Dengan komunikasi yang baik, sekolah dapat memanfaatkan dukungan eksternal secara optimal dan memastikan bahwa semua pihak bekerja menuju tujuan pendidikan yang sama.

e. Evaluasi dan Pengembangan Kemitraan

Evaluasi berkala dari kemitraan yang ada merupakan langkah penting untuk memastikan efektivitas dan keberhasilan kolaborasi. Wahyuni dan Sari (2022) menyarankan bahwa evaluasi harus mencakup penilaian terhadap kontribusi dari berbagai mitra serta dampaknya terhadap kualitas pendidikan. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk memperbaiki dan mengembangkan kemitraan yang ada serta merencanakan kolaborasi baru yang lebih bermanfaat. Dengan pendekatan evaluasi yang sistematis, sekolah dapat memastikan kemitraan terus memberikan nilai tambah dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara lebih efektif.

Secara keseluruhan, manajemen pendidikan dalam aspek administrasi peran serta masyarakat dan kemitraan melibatkan keterlibatan aktif dari berbagai pihak untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan melibatkan orang tua,

komunitas lokal, lembaga pemerintah, dan NGO, serta memastikan komunikasi dan evaluasi yang efektif, sekolah dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih kaya, mendukung pencapaian hasil pendidikan yang lebih baik, dan membangun jaringan yang memperkaya proses belajar-mengajar.

7. Administrasi Budaya dan Lingkungan Pendidikan

Manajemen pendidikan dalam aspek administrasi budaya dan lingkungan pendidikan memiliki peranan krusial dalam menciptakan suasana yang mendukung proses belajar yang efektif dan berkualitas. Budaya dan lingkungan pendidikan mencakup nilai-nilai, norma, dan praktik yang membentuk cara interaksi di sekolah serta mempengaruhi hasil pendidikan. Dengan pengelolaan yang efektif, aspek ini tidak hanya mencakup perencanaan dan implementasi, tetapi juga pengembangan budaya yang mendukung dan penciptaan lingkungan yang kondusif untuk siswa dan tenaga pendidik.

Budaya pendidikan di sekolah, sebagai representasi dari nilai-nilai dan keyakinan yang mengarahkan interaksi dan perilaku, memainkan peran penting dalam menentukan motivasi dan hasil belajar siswa. Sari dan Hidayah (2021) menekankan bahwa budaya pendidikan yang positif dapat mempengaruhi motivasi siswa, memperkuat komitmen tenaga pendidik, dan meningkatkan hasil pembelajaran. Sekolah yang mempraktikkan budaya inklusif dan mendukung cenderung menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan produktif. Hal ini berdampak positif pada pencapaian akademik siswa dan pengembangan karakter mereka. Budaya yang mendorong penghargaan terhadap keberagaman dan pembelajaran kolaboratif menciptakan suasana yang mendukung inovasi dan perbaikan terus-menerus.

Selain budaya, lingkungan fisik dan psikologis di sekolah juga sangat mempengaruhi kualitas pendidikan. Prasetyo dan Yuli (2022)

menjelaskan bahwa lingkungan fisik, termasuk kondisi gedung dan fasilitas, mempengaruhi kenyamanan dan keamanan bagi siswa serta tenaga pendidik. Lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman tidak hanya mengurangi gangguan tetapi juga meningkatkan konsentrasi dan produktivitas belajar. Lingkungan psikologis, yang melibatkan dukungan emosional dan hubungan interpersonal, berperan penting dalam kesehatan mental siswa. Dukungan psikologis dari guru dan staf menciptakan atmosfer yang mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan siswa, yang pada gilirannya mendukung proses pembelajaran.

Pengembangan nilai dan karakter siswa adalah bagian integral dari budaya pendidikan. Yulia dan Nugroho (2022) menyoroti bahwa program pendidikan karakter yang efektif harus melibatkan integrasi nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kerja sama dalam kurikulum sehari-hari. Pendidikan karakter yang baik membentuk sikap dan perilaku siswa yang positif, mendukung pencapaian akademik sekaligus perkembangan pribadi mereka. Sekolah yang berhasil mengembangkan program karakter yang solid tidak hanya meningkatkan prestasi akademik siswa tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menjadi individu yang bertanggung jawab dan etis.

Kepemimpinan sekolah memiliki pengaruh besar terhadap budaya dan lingkungan pendidikan. Haris dan Kurniawan (2023) menunjukkan bahwa pemimpin sekolah yang efektif dapat menciptakan dan memelihara budaya positif melalui visi yang jelas, komunikasi terbuka, dan dukungan terhadap inovasi. Kepemimpinan transformasional yang melibatkan partisipasi aktif dari semua anggota komunitas sekolah dapat memperkuat budaya positif dan menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran dan pengembangan profesional. Kepemimpinan yang inklusif dan mendukung mengatasi tantangan dan menciptakan suasana yang memotivasi siswa dan tenaga pendidik untuk mencapai potensi terbaik mereka.

Evaluasi budaya pendidikan adalah langkah penting untuk memastikan bahwa lingkungan pendidikan tetap mendukung dan relevan. Wahyuni dan Sari (2022) menggarisbawahi perlunya evaluasi berkala terhadap budaya dan lingkungan pendidikan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Evaluasi ini meliputi survei kepuasan siswa, penilaian efektivitas program karakter, dan analisis kondisi fisik serta psikologis lingkungan sekolah. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk merencanakan perbaikan dan peningkatan berkelanjutan, memastikan bahwa budaya pendidikan dan lingkungan tetap mendukung perkembangan siswa serta pencapaian tujuan pendidikan.

Secara keseluruhan, manajemen pendidikan dalam aspek administrasi budaya dan lingkungan pendidikan melibatkan pengelolaan budaya yang mendukung, penciptaan lingkungan yang nyaman dan aman, serta pengembangan nilai dan karakter siswa. Dengan pengelolaan yang efektif, sekolah dapat menciptakan suasana yang kondusif untuk pembelajaran berkualitas, mendukung kesejahteraan siswa, dan mencapai hasil pendidikan yang optimal.

C. Hambatan, Tantangan, dan Kendala dalam Manajemen Pendidikan

Manajemen pendidikan merupakan elemen kunci dalam menentukan efektivitas dan kualitas pendidikan di sekolah. Setiap aspek dari manajemen pendidikan menghadapi serangkaian hambatan, tantangan, dan kendala yang dapat mempengaruhi hasil akhir proses pembelajaran. Memahami dan menangani isu-isu ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan bahwa semua siswa memiliki kesempatan untuk mencapai potensi penuh mereka.

1. Kurikulum dan Kegiatan Pembelajaran

Dalam aspek kurikulum dan kegiatan pembelajaran, salah satu tantangan utama adalah menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan individu siswa yang beragam. Haris dan Kurniawan (2023) menunjukkan bahwa kurikulum sering kali bersifat kaku dan kurang responsif terhadap perubahan kebutuhan dan perkembangan siswa. Ketidakfleksibelan ini dapat membatasi kemampuan guru untuk mengadaptasi materi ajar dengan kebutuhan spesifik siswa. Selain itu, penerapan kurikulum baru sering kali menghadapi resistensi dari guru yang telah terbiasa dengan metode lama, serta kekurangan pelatihan yang memadai untuk menerapkan pendekatan pedagogis baru. Sari dan Hidayah (2021) menambahkan bahwa keterbatasan sumber daya dan kurangnya dukungan dari pihak sekolah sering menghambat implementasi kurikulum yang efektif dan inovatif, mengakibatkan hasil pembelajaran yang tidak optimal.

2. Kesiswaan

Dalam hal kesiswaan, pengelolaan data dan kebutuhan individu siswa merupakan kendala signifikan. Prasetyo dan Lestari (2021) mengidentifikasi bahwa pengelolaan data siswa yang tidak terintegrasi dengan baik dapat menyulitkan pemantauan perkembangan akademik dan kesejahteraan siswa secara holistik. Tantangan lain adalah menyelaraskan program bimbingan dan konseling dengan kebutuhan nyata siswa, seperti masalah bullying dan kesehatan mental, yang semakin mendapatkan perhatian dalam pendidikan modern. Yulia dan Nugroho (2022) menggarisbawahi bahwa kurangnya komunikasi antara sekolah dan keluarga seringkali menghambat pemahaman mendalam terhadap kebutuhan siswa, sehingga mengurangi efektivitas program kesiswaan.

3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Bagi pendidik dan tenaga kependidikan, tantangan utama adalah pengembangan profesional dan manajemen beban kerja. Wahyuni dan

Sari (2022) mengemukakan bahwa beban kerja yang berat dan kurangnya kesempatan untuk pengembangan profesional dapat menghambat peningkatan kualitas pengajaran. Program pelatihan yang tidak memadai atau tidak relevan sering kali menjadi kendala dalam memperbarui keterampilan dan pengetahuan tenaga pendidik. Haris dan Kurniawan (2023) menambahkan bahwa faktor-faktor seperti upah yang tidak memadai dan kurangnya dukungan dari administrasi sekolah dapat memengaruhi motivasi dan kesejahteraan tenaga pendidik, yang pada gilirannya berdampak pada kualitas pengajaran.

4. Sarana dan Prasarana

Dalam hal sarana dan prasarana, masalah pemeliharaan dan pengadaan sering menjadi kendala utama. Prasetyo dan Yuli (2022) menunjukkan bahwa fasilitas yang tidak memadai atau rusak dapat mengganggu proses belajar dan mengajar. Kurangnya dana untuk pemeliharaan dan perbaikan fasilitas sering kali menyebabkan keterlambatan dalam penyediaan dan perbaikan sarana yang esensial. Sari dan Hidayah (2021) menambahkan bahwa pengadaan sarana yang tidak sesuai dengan standar atau kebutuhan kurikulum juga merupakan kendala, yang dapat menghambat implementasi pembelajaran yang efektif.

5. Keuangan dan Pembiayaan

Aspek keuangan dan pembiayaan menghadapi kendala dalam pengelolaan anggaran dan perencanaan keuangan. Yulia dan Nugroho (2022) menyoroti bahwa ketidakpastian dana dan alokasi anggaran yang tidak merata dapat menghambat pelaksanaan program-program pendidikan yang penting. Pengelolaan keuangan yang tidak efektif sering kali mengakibatkan kekurangan dana untuk kegiatan krusial seperti pelatihan guru dan pembelian bahan ajar. Haris dan Kurniawan (2023) menambahkan bahwa ketergantungan pada sumber dana yang

tidak stabil dapat mempengaruhi kualitas pendidikan secara keseluruhan, menghambat pencapaian tujuan pendidikan.

6. Peran serta Masyarakat dan Kemitraan

Peran serta masyarakat dan kemitraan menghadapi tantangan dalam hal keterlibatan dan koordinasi. Sari dan Hidayah (2021) menunjukkan bahwa kurangnya keterlibatan dari masyarakat dan mitra dapat mengurangi dukungan untuk program-program pendidikan. Komunikasi yang tidak efektif antara sekolah dan masyarakat sering menghambat kolaborasi yang produktif. Prasetyo dan Lestari (2021) menekankan bahwa peran serta masyarakat yang tidak terorganisir dengan baik dapat membatasi kemampuan sekolah untuk memanfaatkan sumber daya eksternal secara optimal, mengurangi efektivitas kemitraan dalam mendukung pendidikan.

7. Budaya dan Lingkungan Sekolah

Terakhir, budaya dan lingkungan sekolah menghadapi kendala dalam pengelolaan budaya dan penciptaan lingkungan yang mendukung. Wahyuni dan Sari (2022) mencatat bahwa budaya yang tidak mendukung atau tidak inklusif dapat menghambat motivasi dan keterlibatan siswa. Lingkungan yang tidak kondusif, baik fisik maupun psikologis, sering kali mempengaruhi kesejahteraan siswa dan tenaga pendidik. Haris dan Kurniawan (2023) menyoroti pentingnya kepemimpinan yang efektif dalam menciptakan dan memelihara budaya yang positif dan lingkungan yang mendukung, agar proses pendidikan dapat berlangsung dengan optimal.

Secara keseluruhan, manajemen pendidikan menghadapi berbagai hambatan, tantangan, dan kendala di berbagai aspeknya, mulai dari kurikulum, kesiswaan, pendidik dan tenaga kependidikan, hingga sarana dan prasarana, keuangan, peran serta masyarakat, dan budaya sekolah. Mengatasi masalah-masalah ini memerlukan strategi yang terencana dan keterlibatan dari semua pihak terkait untuk

memastikan bahwa pendidikan dapat berjalan dengan efektif dan mencapai hasil yang optimal.

D. Rekayasa Strategi Operasional Penuntasan Hambatan, Tantangan, dan Kendala dalam Manajemen Pendidikan

Menghadapi berbagai hambatan, tantangan, dan kendala dalam manajemen pendidikan memerlukan strategi operasional yang komprehensif dan terencana dengan baik. Setiap aspek manajemen pendidikan—dari kurikulum dan kegiatan pembelajaran hingga budaya dan lingkungan sekolah—memerlukan pendekatan yang holistik dan adaptif untuk meningkatkan efektivitas dan hasil pendidikan.

1. Kurikulum dan Kegiatan Pembelajaran

Dalam aspek kurikulum dan kegiatan pembelajaran, strategi operasional yang perlu diterapkan harus melibatkan fleksibilitas kurikulum dan pelatihan berkelanjutan bagi guru. Haris dan Kurniawan (2023) menekankan perlunya kurikulum yang responsif terhadap perubahan kebutuhan siswa dan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, revisi kurikulum secara periodik harus dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk guru, orang tua, dan ahli pendidikan, agar kurikulum tetap relevan dan efektif. Selain itu, implementasi pelatihan profesional yang berkelanjutan bagi guru sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat mengadopsi metode pengajaran yang inovatif. Sari dan Hidayah (2021) merekomendasikan penggunaan teknologi sebagai alat bantu dalam pembelajaran yang dapat meningkatkan akses dan efisiensi dalam proses pendidikan. Dukungan yang konsisten dari pihak sekolah untuk pelatihan dan implementasi teknologi juga merupakan kunci dalam mencapai keberhasilan kurikulum yang efektif.

2. Kesiswaan

Strategi operasional untuk kesiswaan harus fokus pada pengintegrasian data siswa dan penguatan program bimbingan dan konseling. Prasetyo dan Lestari (2021) menunjukkan bahwa sistem manajemen data siswa yang terintegrasi dapat meningkatkan pemantauan perkembangan akademik dan kesejahteraan siswa secara lebih efisien. Oleh karena itu, penerapan sistem teknologi informasi yang komprehensif untuk mengelola data siswa harus menjadi prioritas. Selain itu, program bimbingan dan konseling yang holistik, melibatkan profesional terlatih untuk menangani isu seperti bullying dan kesehatan mental, juga penting. Yulia dan Nugroho (2022) menambahkan bahwa komunikasi yang efektif antara sekolah dan keluarga sangat penting untuk memahami kebutuhan siswa secara menyeluruh. Pertemuan rutin dan pembaruan informasi secara berkala antara sekolah dan orang tua dapat memperbaiki pemahaman dan dukungan terhadap siswa.

3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Untuk pendidik dan tenaga kependidikan, strategi operasional yang harus diterapkan mencakup peningkatan pengembangan profesional dan manajemen beban kerja. Wahyuni dan Sari (2022) merekomendasikan penyusunan program pelatihan yang relevan dan berkelanjutan serta memberikan kesempatan bagi tenaga pendidik untuk mengikuti workshop yang dapat meningkatkan keterampilan mereka. Manajemen beban kerja yang efektif, termasuk redistribusi tugas dan dukungan administratif yang memadai, dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik. Haris dan Kurniawan (2023) juga menekankan pentingnya kebijakan yang mendukung kesejahteraan tenaga pendidik melalui kompensasi yang adil dan pengakuan terhadap prestasi mereka, untuk memotivasi dan meningkatkan kualitas pengajaran.

4. Sarana dan Prasarana

Strategi operasional untuk sarana dan prasarana harus mencakup perencanaan dan pemeliharaan yang berkelanjutan. Prasetyo dan Yuli (2022) menyarankan penerapan sistem pemantauan dan evaluasi untuk menjaga fasilitas dalam kondisi baik dan memenuhi standar yang diperlukan. Pengadaan sarana juga harus memperhatikan standar kurikulum dan kebutuhan spesifik sekolah. Selain itu, Sari dan Hidayah (2021) menekankan pentingnya alokasi dana yang memadai untuk pemeliharaan dan perbaikan sarana serta transparansi dalam pengelolaan anggaran untuk memastikan penggunaan yang efisien. Pendekatan ini tidak hanya akan memperbaiki kondisi fasilitas, tetapi juga mendukung proses pembelajaran yang efektif.

5. Keuangan dan Pembiayaan

Dalam aspek keuangan dan pembiayaan, strategi operasional yang efektif harus mencakup perencanaan anggaran yang cermat dan diversifikasi sumber pendanaan. Yulia dan Nugroho (2022) merekomendasikan penyusunan anggaran yang terperinci dan realistis serta pencarian sumber pendanaan tambahan melalui kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga non-pemerintah. Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel diperlukan untuk meminimalkan pemborosan dan memastikan bahwa dana digunakan secara efektif untuk mendukung program-program pendidikan. Haris dan Kurniawan (2023) menekankan pentingnya pengembangan kapasitas manajerial dalam pengelolaan anggaran dan perencanaan keuangan untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pendidikan.

6. Peran serta Masyarakat dan Kemitraan

Strategi operasional untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan kemitraan harus fokus pada penguatan komunikasi dan koordinasi. Sari dan Hidayah (2021) menyarankan pembuatan

mekanisme komunikasi yang efektif antara sekolah dan masyarakat, seperti forum komunitas dan kelompok kerja bersama, untuk memperkuat dukungan dan kolaborasi. Pengembangan kemitraan strategis dengan berbagai pihak eksternal, termasuk bisnis dan organisasi non-profit, juga dapat membantu meningkatkan sumber daya dan dukungan untuk program-program pendidikan. Prasetyo dan Lestari (2021) menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat yang terorganisir dengan baik untuk memaksimalkan manfaat dari kemitraan, yang dapat memberikan dukungan yang lebih besar bagi pendidikan.

7. Budaya dan Lingkungan Sekolah

Strategi operasional dalam hal budaya dan lingkungan sekolah melibatkan pengembangan budaya yang inklusif dan dukungan lingkungan yang positif. Wahyuni dan Sari (2022) merekomendasikan implementasi program-program yang mempromosikan nilai-nilai positif dan inklusi di sekolah, serta melibatkan semua anggota komunitas sekolah dalam proses pembangunan budaya yang mendukung. Kepemimpinan yang efektif sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembelajaran dan pengembangan profesional. Haris dan Kurniawan (2023) menekankan bahwa pemimpin sekolah harus berkomitmen untuk memelihara budaya positif dan memastikan bahwa lingkungan fisik dan psikologis mendukung kesejahteraan siswa dan tenaga pendidik.

Secara keseluruhan, rekayasa strategi operasional dalam manajemen pendidikan memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan terencana untuk mengatasi berbagai hambatan, tantangan, dan kendala di semua aspek manajemen. Dengan strategi yang efektif, diharapkan kualitas pendidikan dapat ditingkatkan dan hasil pembelajaran dapat mencapai standar yang diinginkan, berkat implementasi solusi yang komprehensif dan adaptif terhadap kebutuhan pendidikan.

BAB XIV
MANAJEMEN PENDIDIKAN, PENCIPTAAN PROFIL PELAJAR PANCASILA DAN PEMBERDAYAAN KURIKULUM MERDEKA

A. Pendahuluan

Manajemen pendidikan merupakan komponen kunci dalam sistem pendidikan yang berfungsi untuk memastikan tercapainya tujuan pendidikan nasional, salah satunya adalah pembentukan profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila adalah konsep yang menggambarkan individu yang tidak hanya unggul secara akademis tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, menawarkan lima sila yang menjadi panduan moral dan etika bagi masyarakat Indonesia. Integrasi nilai-nilai ini ke dalam sistem pendidikan bukan hanya sebuah aspirasi, tetapi sebuah keharusan yang harus diwujudkan melalui manajemen pendidikan yang terstruktur dan berkelanjutan.

Dalam upaya untuk mengaktualisasikan profil pelajar Pancasila, pemerintah Indonesia mengimplementasikan Kurikulum Merdeka, sebuah kurikulum yang dirancang untuk lebih adaptif terhadap dinamika global dan kebutuhan lokal. Kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan kepada sekolah dan guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa, serta konteks sosial dan budaya mereka. Anies Baswedan (2020) menekankan bahwa Kurikulum Merdeka memberikan ruang bagi sekolah untuk mengembangkan kurikulum yang lebih relevan dan kontekstual, memungkinkan pendidikan yang lebih personal dan bermakna bagi setiap siswa. Manajemen pendidikan berperan penting dalam mengarahkan dan mengelola penerapan Kurikulum Merdeka, memastikan bahwa setiap langkah implementasi

tetap sejalan dengan tujuan utama pendidikan nasional, yaitu pembentukan karakter siswa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Lebih dari sekadar pengelolaan administratif, manajemen pendidikan harus mampu menjembatani kebijakan pendidikan nasional dengan praktik di lapangan. Glickman, Gordon, dan Ross-Gordon (2020) menyatakan bahwa kepala sekolah, sebagai pemimpin pendidikan, memiliki tanggung jawab besar dalam menerjemahkan kebijakan kurikulum menjadi praktik pembelajaran yang efektif dan relevan bagi siswa. Dalam konteks Kurikulum Merdeka, peran kepala sekolah sangat vital dalam memimpin dan mengarahkan guru serta siswa dalam proses pembelajaran yang tidak hanya mengejar pencapaian akademik tetapi juga pengembangan karakter yang kuat, seperti integritas, kebhinekaan, dan gotong royong—nilai-nilai yang menjadi inti dari Pancasila.

Manajemen pendidikan juga harus mampu mendukung pengembangan profesional guru, yang merupakan agen utama dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Sugiyono (2021) menekankan bahwa untuk menjamin keberhasilan kurikulum, guru harus dibekali dengan keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk menerapkan metode pembelajaran yang inovatif dan sesuai dengan prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka. Manajemen pendidikan berperan dalam menyediakan pelatihan, sumber daya, dan dukungan yang dibutuhkan oleh guru agar mereka dapat mengimplementasikan kurikulum ini secara efektif. Dengan demikian, guru tidak hanya menyampaikan materi pembelajaran tetapi juga mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui pendekatan pembelajaran yang partisipatif dan kontekstual.

Aspek evaluasi juga menjadi elemen penting dalam manajemen pendidikan dalam konteks pemberdayaan Kurikulum Merdeka. Evaluasi yang dilakukan harus komprehensif, mencakup penilaian terhadap pencapaian akademik dan perkembangan karakter siswa.

Suyanto dan Hisyam (2022) menegaskan bahwa evaluasi yang holistik dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa Kurikulum Merdeka berhasil dalam mencapai tujuannya, yaitu membentuk profil pelajar Pancasila yang ideal. Evaluasi ini harus mengukur sejauh mana nilai-nilai Pancasila telah terinternalisasi dalam diri siswa dan bagaimana mereka menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Hasil dari evaluasi ini harus digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan kurikulum serta metode pembelajaran yang diterapkan.

Secara keseluruhan, hubungan antara manajemen pendidikan dan pemberdayaan Kurikulum Merdeka dalam upaya menciptakan profil pelajar Pancasila sangatlah erat dan saling memperkuat. Manajemen pendidikan yang efektif dan inovatif adalah kunci untuk memastikan bahwa Kurikulum Merdeka tidak hanya menjadi kebijakan yang diimplementasikan secara administratif, tetapi juga menjadi alat yang efektif untuk membentuk karakter dan identitas siswa. Dengan pendekatan yang komprehensif, manajemen pendidikan dapat memastikan bahwa generasi mendatang tidak hanya siap menghadapi tantangan global, tetapi juga memiliki fondasi moral yang kuat, yang berakar pada nilai-nilai Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Ini menegaskan bahwa peran manajemen pendidikan tidak hanya sebatas pengelolaan proses pembelajaran, tetapi juga merupakan bagian integral dari upaya pembangunan karakter bangsa melalui pendidikan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila.

B. Manajemen Pendidikan dan Keterkaitan dengan penciptaan Profil Pelajar Pancasila

Manajemen pendidikan merupakan pilar fundamental dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional Indonesia, terutama dalam konteks pembentukan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila

adalah visi yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia untuk membentuk generasi penerus bangsa yang tidak hanya unggul secara intelektual tetapi juga memiliki karakter yang kuat berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila, sebagai ideologi negara, mengandung lima sila yang menjadi landasan moral dan etika bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Integrasi nilai-nilai Pancasila ke dalam sistem pendidikan adalah upaya strategis untuk memastikan bahwa generasi mendatang tidak hanya siap menghadapi tantangan global, tetapi juga berakar pada identitas kebangsaan yang kokoh.

Dalam proses ini, manajemen pendidikan memainkan peran kunci dalam merancang dan mengimplementasikan kurikulum yang seimbang antara pengembangan kognitif dan pembentukan karakter. Menurut Danim (2019), kurikulum yang holistik harus mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, yang memungkinkan siswa untuk tidak hanya memahami materi pelajaran tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai seperti gotong royong, keadilan sosial, dan integritas. Kurikulum ini harus dirancang secara dinamis, agar mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan pendidikan tidak hanya menjadi alat untuk mencetak individu yang kompeten secara akademik tetapi juga berkepribadian Pancasila yang kuat.

Lebih jauh lagi, manajemen pendidikan tidak hanya terbatas pada pengembangan kurikulum, tetapi juga mencakup penciptaan lingkungan belajar yang kondusif untuk pengembangan nilai-nilai Pancasila. Glickman, Gordon, dan Ross-Gordon (2020) menekankan bahwa lingkungan sekolah yang inklusif dan positif dapat mendorong siswa untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencakup interaksi antar siswa, antara siswa dan guru, serta hubungan antara sekolah dan masyarakat. Kepala sekolah dan guru berperan penting dalam menciptakan budaya sekolah yang

menghargai keragaman, mempromosikan kebhinekaan, dan mendorong kerja sama dalam memecahkan masalah bersama. Implementasi kegiatan ekstrakurikuler yang terencana dengan baik juga dapat menjadi media yang efektif untuk mengembangkan keterampilan sosial dan kepemimpinan yang berlandaskan Pancasila.

Peran kepala sekolah sebagai manajer pendidikan sangatlah penting dalam mengarahkan seluruh elemen sekolah untuk mencapai visi dan misi ini. Kepala sekolah harus memiliki kemampuan kepemimpinan yang visioner dan transformasional, sebagaimana disarankan oleh Gordon et al. (2020), untuk memotivasi guru dan staf dalam mengembangkan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Metode pembelajaran yang dirancang dengan baik tidak hanya berfokus pada pencapaian hasil akademik tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai moral dan etika Pancasila terintegrasi dalam setiap aspek pengajaran dan pembelajaran. Dalam konteks ini, kepala sekolah perlu menjadi agen perubahan yang mendorong terciptanya inovasi-inovasi pendidikan yang selaras dengan tujuan pembentukan karakter.

Dalam era digital, manajemen pendidikan juga harus bersifat adaptif terhadap perkembangan teknologi yang pesat. Teknologi digital dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila jika digunakan dengan tepat. Sugiyono (2021) berpendapat bahwa platform digital seperti media sosial, video pembelajaran, dan aplikasi pendidikan interaktif dapat digunakan untuk membangun kesadaran dan pemahaman siswa tentang pentingnya nilai-nilai kebangsaan. Penggunaan teknologi dalam pendidikan harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga mengajak siswa untuk berdiskusi, berkolaborasi, dan merefleksikan nilai-nilai Pancasila dalam konteks kehidupan mereka sehari-hari.

Keberhasilan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan sangat bergantung pada evaluasi dan refleksi yang berkesinambungan. Evaluasi tidak hanya penting untuk menilai sejauh mana siswa telah menginternalisasi nilai-nilai tersebut, tetapi juga untuk memberikan umpan balik yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Suyanto dan Hisyam (2022) menggarisbawahi bahwa evaluasi yang komprehensif harus mencakup berbagai aspek, termasuk pengukuran hasil belajar, evaluasi proses pembelajaran, dan penilaian dampak program pendidikan terhadap pengembangan karakter siswa. Evaluasi yang dilakukan secara sistematis dan teratur akan memungkinkan manajemen pendidikan untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan pendekatan mereka dalam mencapai tujuan pendidikan nasional.

Secara keseluruhan, hubungan antara manajemen pendidikan dan penciptaan profil pelajar Pancasila adalah hubungan yang sangat erat dan saling memperkuat. Manajemen pendidikan yang efektif tidak hanya bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya dan proses pembelajaran, tetapi juga berperan dalam membentuk karakter siswa yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Dengan pendekatan yang holistik dan integratif, manajemen pendidikan dapat memastikan bahwa tujuan pendidikan nasional, yaitu menciptakan generasi yang cerdas, berkarakter, dan beridentitas nasional yang kuat, dapat tercapai secara berkelanjutan. Hal ini menegaskan bahwa pendidikan bukan hanya tentang pencapaian akademik, tetapi juga tentang pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya, yang mampu menghadapi tantangan global tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa yang berakar pada nilai-nilai luhur Pancasila.

C. Manajemen Pendidikan dan Keterkaitan dengan Pemberdayaan Kurikulum Merdeka

Manajemen Pendidikan memainkan peran sentral dalam pemberdayaan Kurikulum Merdeka, yang merupakan inovasi terbaru dalam sistem pendidikan Indonesia untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Kurikulum Merdeka dirancang sebagai respons terhadap dinamika global dan kebutuhan pendidikan yang lebih adaptif, memberikan kebebasan bagi sekolah dan guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. Tujuan utama dari Kurikulum Merdeka adalah membentuk pelajar yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, berlandaskan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia.

Pemberdayaan Kurikulum Merdeka melalui manajemen pendidikan yang efektif adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa tujuan ini tercapai. Menurut Anies Baswedan (2020), Kurikulum Merdeka memberikan ruang yang lebih fleksibel bagi sekolah untuk merancang kurikulum yang sesuai dengan konteks lokal, budaya, dan kebutuhan siswa. Manajemen pendidikan harus mampu mengarahkan kebijakan dan implementasi kurikulum ini sehingga tetap sejalan dengan visi nasional, yaitu menciptakan pelajar yang berkarakter Pancasila. Dalam hal ini, manajemen pendidikan berfungsi sebagai penggerak yang memastikan bahwa setiap elemen dalam kurikulum, dari perencanaan hingga evaluasi, berkontribusi pada pembentukan karakter siswa.

Lebih jauh lagi, manajemen pendidikan yang efektif harus mampu menciptakan sinergi antara kebijakan pendidikan nasional dan implementasi di tingkat sekolah. Glickman, Gordon, dan Ross-Gordon (2020) menggarisbawahi pentingnya peran kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan yang harus dapat menerjemahkan kebijakan kurikulum menjadi praktik pembelajaran yang relevan dan

bermakna bagi siswa. Dalam konteks Kurikulum Merdeka, ini berarti kepala sekolah harus mampu memimpin dan memfasilitasi proses pembelajaran yang mendukung pengembangan profil pelajar Pancasila, seperti nilai gotong royong, kebhinekaan, dan integritas.

Manajemen pendidikan juga harus mampu memfasilitasi pengembangan profesional guru dalam rangka pemberdayaan Kurikulum Merdeka. Sugiyono (2021) menyatakan bahwa guru adalah agen perubahan yang sangat penting dalam keberhasilan implementasi kurikulum. Oleh karena itu, manajemen pendidikan harus menyediakan pelatihan dan dukungan yang diperlukan bagi guru agar mereka dapat mengadaptasi metode pembelajaran yang inovatif dan sesuai dengan semangat Kurikulum Merdeka. Dalam konteks ini, pengembangan karakter dan kompetensi siswa tidak hanya tergantung pada materi yang diajarkan, tetapi juga pada bagaimana guru mengajarkan nilai-nilai tersebut melalui pendekatan yang interaktif dan kontekstual.

Selain itu, evaluasi yang dilakukan oleh manajemen pendidikan harus berfokus pada sejauh mana Kurikulum Merdeka berhasil membentuk profil pelajar Pancasila. Evaluasi ini tidak hanya melibatkan pengukuran hasil belajar akademik, tetapi juga menilai perkembangan karakter siswa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Suyanto dan Hisyam (2022) menekankan bahwa evaluasi yang holistik dan berkesinambungan diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan nasional tercapai, dan bahwa pelajar Pancasila yang diharapkan benar-benar terbentuk melalui proses pendidikan yang berlangsung.

Pada akhirnya, keterkaitan antara manajemen pendidikan dan pemberdayaan Kurikulum Merdeka dalam penciptaan profil pelajar Pancasila sangatlah kuat dan saling menguatkan. Manajemen pendidikan yang efektif harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek pendidikan melalui Kurikulum Merdeka.

Dengan pendekatan yang adaptif dan inovatif, manajemen pendidikan dapat memastikan bahwa tujuan nasional untuk menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter Pancasila yang kuat, dapat terwujud secara nyata dan berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwa manajemen pendidikan bukan hanya tentang pengelolaan proses dan sumber daya, tetapi juga tentang membangun karakter bangsa melalui pendidikan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila.

D. Hambatan, Tantangan dan Kendala Implementasi Manajemen Pendidikan

Pengimplementasian manajemen pendidikan yang efektif dalam upaya penciptaan profil pelajar Pancasila melalui pemberdayaan Kurikulum Merdeka menghadapi berbagai hambatan, tantangan, dan kendala yang kompleks. Meskipun Kurikulum Merdeka dirancang untuk memberikan fleksibilitas dan otonomi yang lebih besar kepada sekolah, kenyataannya implementasi di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Beberapa hambatan utama meliputi resistensi terhadap perubahan, keterbatasan sumber daya, serta disparitas dalam kualitas pendidikan antar daerah.

Salah satu hambatan terbesar adalah resistensi terhadap perubahan, baik dari pihak sekolah, guru, maupun orang tua. Glickman, Gordon, dan Ross-Gordon (2020) mengemukakan bahwa perubahan dalam kebijakan pendidikan sering kali dihadapkan pada resistensi karena ketidakpastian dan kekhawatiran akan dampak perubahan tersebut. Dalam konteks Kurikulum Merdeka, resistensi ini dapat muncul karena kebiasaan lama yang sulit diubah, serta ketakutan akan peningkatan beban kerja dan tanggung jawab yang lebih besar pada guru dan kepala sekolah. Banyak guru yang merasa belum siap dengan perubahan metode pengajaran yang lebih fleksibel dan berbasis proyek, yang dituntut oleh Kurikulum Merdeka. Mereka mungkin

merasa kurang percaya diri dalam mengadopsi pendekatan baru ini karena kurangnya pelatihan atau dukungan yang memadai.

Selain itu, keterbatasan sumber daya juga menjadi kendala yang signifikan dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Sugiyono (2021) menekankan bahwa untuk mengimplementasikan kurikulum yang baru, diperlukan investasi yang besar dalam hal infrastruktur, teknologi, dan pelatihan guru. Namun, banyak sekolah di Indonesia, terutama di daerah terpencil, masih menghadapi keterbatasan dalam hal akses terhadap teknologi dan sumber daya pendidikan yang memadai. Ketidakmerataan distribusi sumber daya ini dapat mengakibatkan kesenjangan dalam kualitas pendidikan antara sekolah-sekolah di daerah perkotaan dan pedesaan, yang pada akhirnya mempengaruhi keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka dan pencapaian profil pelajar Pancasila.

Disparitas dalam kualitas pendidikan antar daerah juga merupakan tantangan yang tidak dapat diabaikan. Suyanto dan Hisyam (2022) menunjukkan bahwa perbedaan dalam kualitas manajemen sekolah, fasilitas pendidikan, serta akses terhadap sumber daya pendidikan yang memadai, menciptakan kesenjangan yang signifikan dalam kualitas pendidikan di Indonesia. Di beberapa daerah, sekolah mungkin kesulitan untuk menerapkan Kurikulum Merdeka dengan efektif karena keterbatasan dalam hal sumber daya manusia dan infrastruktur. Hal ini menghambat upaya untuk menciptakan profil pelajar Pancasila yang ideal, karena tidak semua siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Selain hambatan struktural, tantangan lain yang dihadapi adalah pengawasan dan evaluasi yang belum optimal. Evaluasi terhadap implementasi Kurikulum Merdeka sering kali tidak dilakukan secara konsisten dan menyeluruh. Gordon et al. (2020) menggarisbawahi bahwa pengawasan dan evaluasi yang lemah dapat menyebabkan

kurangnya akuntabilitas dan sulitnya mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Tanpa evaluasi yang tepat, sulit untuk menilai sejauh mana Kurikulum Merdeka berhasil dalam membentuk profil pelajar Pancasila, dan untuk mengatasi tantangan yang muncul selama proses implementasi.

Terakhir, kendala budaya dan sosial juga dapat mempengaruhi implementasi Kurikulum Merdeka. Di beberapa daerah, nilai-nilai Pancasila mungkin kurang terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, sehingga sulit bagi sekolah untuk menanamkan nilai-nilai tersebut kepada siswa. Hal ini diperparah oleh kurangnya dukungan dari orang tua dan masyarakat dalam proses pendidikan, yang sering kali lebih mementingkan prestasi akademik daripada pengembangan karakter.

Secara keseluruhan, pengimplementasian manajemen pendidikan dalam penciptaan profil pelajar Pancasila melalui pemberdayaan Kurikulum Merdeka menghadapi berbagai hambatan yang kompleks. Tantangan ini mencakup resistensi terhadap perubahan, keterbatasan sumber daya, disparitas kualitas pendidikan, kelemahan dalam pengawasan dan evaluasi, serta kendala budaya dan sosial. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan pendekatan yang holistik dan terkoordinasi, yang melibatkan semua pemangku kepentingan dalam sistem pendidikan. Manajemen pendidikan yang efektif harus mampu mengatasi tantangan-tantangan ini dengan menyediakan dukungan yang memadai bagi guru dan sekolah, serta memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan kesempatan yang setara untuk berkembang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

E. Rekayasa Strategi Operasional

Rekayasa strategi operasional dalam manajemen pendidikan yang berfokus pada penciptaan profil pelajar Pancasila dan

pemberdayaan Kurikulum Merdeka memerlukan pendekatan yang komprehensif dan sistematis. Strategi ini harus dirancang untuk memastikan bahwa setiap elemen dalam sistem pendidikan bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan besar pendidikan nasional, yaitu menghasilkan peserta didik yang cerdas secara intelektual dan kuat secara karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Untuk itu, manajemen pendidikan perlu merancang strategi yang mengintegrasikan berbagai aspek kurikulum, pengembangan sumber daya manusia, serta evaluasi dan pengawasan yang berkelanjutan.

Langkah pertama dalam rekayasa strategi operasional ini adalah merancang kurikulum yang responsif dan adaptif. Kurikulum Merdeka, sebagai inovasi terbaru dalam sistem pendidikan Indonesia, menawarkan fleksibilitas yang lebih besar bagi sekolah untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Menurut Anies Baswedan (2020), Kurikulum Merdeka memungkinkan sekolah untuk lebih mandiri dalam mengembangkan kurikulum yang kontekstual dan relevan, yang pada gilirannya akan mendukung tercapainya profil pelajar Pancasila. Manajemen pendidikan harus memastikan bahwa kurikulum ini tidak hanya fokus pada penguasaan materi akademik, tetapi juga pada pengembangan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, kebhinekaan, dan integritas melalui berbagai aktivitas pembelajaran yang inovatif dan berbasis proyek.

Dalam proses implementasi Kurikulum Merdeka, peran kepala sekolah dan guru sangatlah vital. Glickman, Gordon, dan Ross-Gordon (2020) menekankan pentingnya kepemimpinan pendidikan yang transformasional, di mana kepala sekolah harus mampu menggerakkan seluruh ekosistem sekolah untuk berfokus pada pencapaian tujuan pendidikan yang holistik. Kepala sekolah harus menjadi penggerak utama dalam menerjemahkan visi dan misi pendidikan nasional ke dalam praktik di kelas, dengan memotivasi

guru untuk mengembangkan metode pembelajaran yang sesuai dengan semangat Kurikulum Merdeka. Ini termasuk mendorong penggunaan metode pembelajaran yang interaktif, partisipatif, dan berpusat pada siswa, yang memungkinkan siswa untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila secara lebih mendalam.

Selain itu, pengembangan profesional guru juga harus menjadi bagian integral dari strategi operasional ini. Sugiyono (2021) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka sangat bergantung pada kemampuan guru untuk menyesuaikan metode pengajaran dengan tuntutan kurikulum yang baru. Oleh karena itu, manajemen pendidikan perlu menyediakan pelatihan berkelanjutan yang membantu guru memahami dan mengimplementasikan metode pembelajaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka. Pelatihan ini tidak hanya harus mencakup aspek teknis pengajaran, tetapi juga penanaman nilai-nilai Pancasila melalui pendekatan-pendekatan inovatif yang relevan dengan perkembangan zaman.

Evaluasi berkelanjutan adalah elemen kunci lainnya dalam rekayasa strategi operasional ini. Suyanto dan Hisyam (2022) menekankan bahwa evaluasi yang dilakukan harus bersifat holistik, mencakup aspek akademik dan non-akademik, untuk memastikan bahwa tujuan dari Kurikulum Merdeka dan penciptaan profil pelajar Pancasila benar-benar tercapai. Evaluasi ini harus dilakukan secara terstruktur dan berkesinambungan, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk guru, siswa, dan orang tua. Hasil evaluasi kemudian harus digunakan sebagai umpan balik untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan strategi operasional, sehingga dapat mencapai hasil yang optimal.

Dalam keseluruhan proses ini, rekayasa strategi operasional harus didasarkan pada prinsip-prinsip kolaborasi dan partisipasi aktif dari seluruh elemen pendidikan. Manajemen pendidikan harus mampu

membangun budaya kerja yang kolaboratif, di mana setiap anggota komunitas sekolah merasa memiliki dan berkontribusi terhadap tercapainya tujuan pendidikan. Gordon et al. (2020) menekankan pentingnya membangun budaya sekolah yang inklusif dan partisipatif, yang dapat mendukung pengembangan karakter dan kompetensi siswa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, rekayasa strategi operasional ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis manajemen, tetapi juga pada pengembangan ekosistem pendidikan yang kondusif untuk pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Pada akhirnya, rekayasa strategi operasional yang efektif dalam manajemen pendidikan akan memastikan bahwa Kurikulum Merdeka dapat diimplementasikan secara optimal dan tujuan penciptaan profil pelajar Pancasila dapat tercapai. Manajemen pendidikan yang terencana dan terukur, didukung oleh kepemimpinan yang kuat dan pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan, akan menjadi fondasi yang kokoh untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang berkarakter kuat, kompeten, dan berintegritas tinggi, selaras dengan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia.

BAB XV
P E N U T U P

Manajemen pendidikan memainkan peran sentral dalam memastikan keberhasilan sistem pendidikan, yang tidak hanya bergantung pada pengelolaan kurikulum, kegiatan pembelajaran, dan sumber daya, tetapi juga pada penerapan filosofi dan teori yang mendasarinya. Filosofi manajemen pendidikan berfungsi sebagai landasan penting dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan praktik pendidikan. Filosofi ini melibatkan pandangan tentang tujuan pendidikan, peran pendidik, serta hubungan antara siswa, guru, dan masyarakat. Dalam hal ini, filosofi progresif yang dipelopori oleh John Dewey menekankan pentingnya pengalaman siswa dalam proses belajar dan penyesuaian kurikulum sesuai dengan kebutuhan serta minat siswa (Dewey, 2016). Dewey berargumen bahwa pendidikan harus adaptif dan berorientasi pada pengembangan keterampilan kritis serta pemecahan masalah. Pandangan ini masih relevan dengan pandangan kontemporer yang dikemukakan oleh Fullan (2020), yang menekankan perlunya filosofi pendidikan yang fokus pada pengembangan kemampuan abad ke-21 seperti kreativitas dan kolaborasi, untuk menghadapi dinamika masyarakat yang terus berubah.

Landasan teori dalam manajemen pendidikan mencakup berbagai teori yang membentuk kerangka kerja untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pendidikan. Teori-teori klasik seperti teori manajemen Henri Fayol dan teori sistem oleh Ludwig von Bertalanffy memberikan dasar bagi struktur dan pengelolaan organisasi pendidikan (Fayol, 2018; Bertalanffy, 2017). Fayol mengemukakan prinsip-prinsip dasar manajemen yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, yang sangat relevan

untuk pengelolaan sekolah. Sementara itu, teori sistem Bertalanffy menawarkan pandangan bahwa organisasi pendidikan berfungsi sebagai sistem yang saling berinteraksi, yang memerlukan koordinasi dan integrasi yang efektif antar bagiannya. Di sisi lain, teori-teori kontemporer seperti kepemimpinan transformasional dan manajemen berbasis sekolah semakin penting dalam konteks pendidikan modern. Kepemimpinan transformasional, seperti dijelaskan oleh Leithwood dan Jantzi (2020), berfokus pada penciptaan visi bersama dan motivasi untuk perubahan, yang mendukung penciptaan lingkungan sekolah yang inovatif dan produktif. Teori manajemen berbasis sekolah, menurut Harris dan Jones (2021), menekankan otonomi sekolah dalam pengambilan keputusan, yang memungkinkan sekolah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan meningkatkan kualitas pendidikan.

Rasionalisasi konsep dalam manajemen pendidikan merupakan proses penting yang melibatkan penyesuaian teori dan prinsip dengan praktik nyata di lapangan. Konsep manajemen pendidikan harus dirasionalisasi agar sesuai dengan kebutuhan spesifik dan tantangan yang dihadapi oleh institusi pendidikan. Contohnya, integrasi teknologi dalam pendidikan merupakan bagian dari rasionalisasi konsep modern yang memungkinkan pembelajaran yang lebih dinamis dan interaktif. Sari dan Hidayah (2021) menunjukkan bahwa teknologi dapat memperluas akses ke sumber daya pendidikan dan memfasilitasi pembelajaran yang dipersonalisasi, dengan demikian meningkatkan keterlibatan siswa dan efektivitas pengajaran. Selain itu, penyesuaian kurikulum untuk memenuhi kebutuhan siswa yang beragam juga penting, sebagaimana diuraikan oleh Hargreaves dan Fullan (2020), yang menekankan perlunya pembaruan kurikulum secara berkala untuk menjaga relevansi dan efektivitas pengajaran.

Perspektif dalam manajemen pendidikan mencakup pandangan yang berbeda tentang bagaimana pendidikan harus dikelola dan

ditingkatkan. Perspektif partisipatif, misalnya, menekankan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan kualitas pendidikan (Glickman, 2021). Perspektif ini mengharuskan adanya partisipasi aktif dari guru, siswa, orang tua, dan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Diseminasi informasi, atau penyebaran informasi yang relevan kepada semua pemangku kepentingan, merupakan aspek kunci dalam manajemen pendidikan. Murphy dan Hallinger (2022) menjelaskan bahwa diseminasi informasi yang efektif memastikan bahwa kebijakan dan prakarsa pendidikan diterima dan diterapkan dengan baik di seluruh komunitas sekolah. Hal ini mencakup penggunaan berbagai saluran komunikasi untuk menginformasikan guru, siswa, dan orang tua tentang perubahan kebijakan dan program pendidikan.

Implementasi dalam manajemen pendidikan mencakup penerapan teori dan konsep dalam praktik sehari-hari. Proses ini melibatkan pengembangan dan pelaksanaan kebijakan, program, dan strategi yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kotter (2019) menegaskan bahwa implementasi yang efektif memerlukan perencanaan yang cermat, pelatihan yang memadai, dan dukungan berkelanjutan untuk memastikan bahwa perubahan dapat diterima dan diintegrasikan dengan baik. Evaluasi dan umpan balik berkelanjutan juga merupakan bagian penting dari implementasi, sebagaimana dijelaskan oleh Senge (2019), yang menekankan pentingnya sistem umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan dalam manajemen pendidikan. Dengan pendekatan ini, manajemen pendidikan dapat menyesuaikan praktiknya dengan kebutuhan dan tantangan yang berkembang, memastikan bahwa proses pendidikan berjalan efektif dan mencapai hasil yang optimal.

Keterkaitan antara manajemen pendidikan dengan penciptaan Profil Pelajar Pancasila dan implementasi Kurikulum Merdeka

menunjukkan sinergi antara prinsip-prinsip manajerial dan tujuan pendidikan nasional dalam membentuk karakter dan kompetensi siswa. Profil Pelajar Pancasila, yang mencakup enam karakter utama—beriman dan bertakwa, mandiri, bergotong royong, kritis, kreatif, serta cinta tanah air—merupakan kerangka nilai dan karakter yang diharapkan dimiliki oleh siswa di Indonesia, berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021). Manajemen pendidikan berperan penting dalam mengimplementasikan profil ini melalui kebijakan dan praktik di sekolah, termasuk pengembangan kurikulum, pelatihan guru, dan evaluasi yang berfokus pada pembentukan karakter. Hidayati dan Arifin (2022) menegaskan bahwa untuk membentuk Profil Pelajar Pancasila, manajemen pendidikan harus memastikan bahwa kurikulum mencerminkan nilai-nilai tersebut dan diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Ini melibatkan pengembangan materi ajar serta metode evaluasi yang mendukung penguatan karakter. Penguatan kerja sama antara sekolah dan masyarakat juga merupakan aspek penting, sebagaimana ditekankan oleh Nurtjahjo dan Ramadhani (2023).

Kurikulum Merdeka, sebagai kebijakan pendidikan yang memberikan fleksibilitas dalam pembelajaran, mendukung penyesuaian dengan kebutuhan dan konteks lokal. Kurikulum ini mengedepankan pembelajaran berbasis proyek dan memberikan ruang bagi kreativitas serta inovasi (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2022). Implementasi Kurikulum Merdeka memerlukan manajemen pendidikan yang adaptif dan responsif. Setiawan dan Wibowo (2023) menunjukkan bahwa manajemen pendidikan harus memfasilitasi transisi menuju Kurikulum Merdeka dengan merancang kebijakan internal yang mendukung fleksibilitas kurikulum dan penyediaan sumber daya yang memadai. Ini mencakup pelatihan bagi guru untuk mengadaptasi metode pengajaran sesuai dengan prinsip

Kurikulum Merdeka serta pengembangan materi ajar yang relevan. Dukungan terhadap penggunaan teknologi dalam pembelajaran juga merupakan aspek penting dari Kurikulum Merdeka, sebagaimana diuraikan oleh Syafii dan Hasibuan (2021).

Sinergi antara manajemen pendidikan, Profil Pelajar Pancasila, dan Kurikulum Merdeka terletak pada kemampuan manajer pendidikan untuk mengintegrasikan kebijakan dan praktik yang mendukung tujuan pendidikan nasional. Manajemen pendidikan harus merancang dan menerapkan strategi yang tidak hanya memenuhi standar akademik tetapi juga memperkuat karakter dan nilai-nilai kebangsaan sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila. Penelitian oleh Fadli dan Susanto (2022) menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka sangat bergantung pada manajemen pendidikan yang efektif dalam mengelola perubahan dan mengoptimalkan sumber daya. Ini mencakup koordinasi antara kurikulum, pelatihan guru, dan dukungan administratif untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pencapaian Profil Pelajar Pancasila. Oleh karena itu, manajemen pendidikan harus proaktif dalam mengadaptasi dan mengevaluasi kebijakan untuk memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan sejalan dengan tujuan karakter dan kompetensi yang diharapkan.

Manajemen pendidikan yang efektif memainkan peran krusial dalam keberhasilan pengelolaan berbagai aspek pendidikan, mulai dari kurikulum dan kegiatan pembelajaran hingga budaya dan lingkungan sekolah. Dengan manajemen yang baik, kurikulum dapat disesuaikan secara dinamis untuk memenuhi kebutuhan siswa dan perkembangan zaman, sementara kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan metode yang inovatif dan relevan. Pengelolaan kesiswaan yang efisien juga memastikan bahwa kebutuhan akademik dan kesejahteraan siswa terpenuhi secara menyeluruh, melalui sistem data yang terintegrasi dan program bimbingan yang komprehensif. Selain itu, manajemen

pendidikan yang baik meningkatkan kualitas tenaga pendidik melalui pelatihan berkelanjutan dan dukungan administratif, yang berdampak positif pada proses belajar mengajar dan hasil pembelajaran.

Selain aspek tersebut, pengelolaan sarana dan prasarana yang baik memastikan fasilitas pendidikan mendukung proses belajar secara optimal, sementara manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel membantu dalam alokasi dana yang efektif untuk program pendidikan. Keterlibatan masyarakat dan kemitraan yang kuat memperluas dukungan untuk pendidikan dan memperkaya sumber daya yang tersedia. Akhirnya, budaya dan lingkungan sekolah yang positif mendukung suasana belajar yang kondusif, mempengaruhi motivasi dan kesejahteraan semua anggota komunitas sekolah. Keseluruhan aspek ini saling terkait dan kontribusi manajemen pendidikan yang baik akan mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang lebih luas, termasuk pemerataan akses, peningkatan mutu, dan tata kelola yang baik.

Manajemen pendidikan yang efektif memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan pembangunan pendidikan dengan memfasilitasi pemerataan dan perluasan akses pendidikan. Dengan strategi manajerial yang baik, sumber daya pendidikan dapat didistribusikan secara lebih merata, menjangkau daerah-daerah terpencil dan kelompok masyarakat yang kurang terlayani. Kebijakan yang terencana dan implementasi yang efisien membantu mengatasi kesenjangan akses pendidikan, memastikan bahwa setiap anak, terlepas dari latar belakang sosial ekonomi, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Selain itu, manajemen yang baik mendukung inisiatif untuk membuka sekolah baru dan memperluas layanan pendidikan, memperkuat upaya pemerataan akses secara menyeluruh.

Di sisi lain, manajemen pendidikan yang baik juga berkontribusi pada peningkatan mutu dan relevansi pendidikan serta penguatan tata

kelola kelembagaan dan akuntabilitas publik. Pengelolaan kurikulum yang adaptif dan berfokus pada kebutuhan siswa, serta pengembangan profesional tenaga pendidik yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas pembelajaran dan memastikan relevansi pendidikan dengan perkembangan zaman. Selain itu, sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan, memastikan bahwa sumber daya digunakan dengan efisien dan bahwa hasil pendidikan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, manajemen pendidikan yang efektif tidak hanya mendukung pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan tetapi juga memperkuat tata kelola kelembagaan yang berorientasi pada akuntabilitas dan transparansi.

GLOSARIUM

Manajemen Pendidikan	Proses yang melibatkan kerjasama dan interaksi antara berbagai pihak untuk memanfaatkan sumber daya secara efektif dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Ini mencakup seluruh proses pengalokasian sumber daya, baik manusia maupun material, yang dilakukan secara sinergis melalui interaksi yang kooperatif.
Desentralisasi Pendidikan	Konsep di mana kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan diserahkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Desentralisasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi pendidikan serta memungkinkan sistem pendidikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal.
Kebijakan Pendidikan Nasional	Serangkaian aturan dan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk mengatur pelaksanaan pendidikan di seluruh Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia Indonesia yang berkualitas, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, cakap, dan mandiri.

Otonomi Daerah dalam pendidikan	Konsep di mana pemerintah daerah diberi kebebasan untuk mengatur dan mengelola pendidikan di wilayahnya masing-masing. Otonomi ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan pendidikan dan memastikan bahwa kebijakan pendidikan lebih sesuai dengan kebutuhan spesifik daerah tersebut.
Kurikulum	Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan ajar, serta metode yang digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah
Akreditasi Pendidikan	Proses evaluasi dan penilaian yang dilakukan untuk menentukan apakah sebuah lembaga pendidikan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah.
Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Istilah yang mencakup guru dan staf pendukung di lembaga pendidikan. Mereka memiliki peran penting dalam pelaksanaan kurikulum dan pencapaian tujuan pendidikan
Perizinan Pendidikan	Proses yang mengatur pendirian dan operasional lembaga pendidikan di Indonesia. Dalam desentralisasi, perizinan untuk pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab

	pemerintah daerah, sementara perizinan untuk pendidikan tinggi tetap berada di bawah kewenangan pemerintah pusat
Perspektif Filosofis Manajemen Pendidikan	Kerangka berpikir yang mendasari berbagai kebijakan dan praktik dalam sistem pendidikan. Pendekatan filosofis ini memengaruhi cara pandang para manajer pendidikan dalam membuat keputusan dan membentuk budaya serta tujuan pendidikan secara keseluruhan.
Teori Administrative	Salah satu landasan penting dalam manajemen pendidikan yang dikembangkan oleh Henri Fayol.
Teori Human Resource Management	Teori ini mencakup pengembangan dan pelatihan guru, penilaian kinerja, serta strategi rekrutmen yang bertujuan untuk memastikan bahwa sekolah memiliki tenaga pendidik yang berkualitas.
Teori Transformational Leadership	Konteks manajemen pendidikan berfokus pada kemampuan pemimpin untuk membawa perubahan positif dalam sekolah melalui visi yang kuat, inspirasi, dan pemberdayaan staf.
Teori Strategic Management	Kerangka manajemen pendidikan karena memberikan kerangka kerja untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi keputusan yang

	mendukung pencapaian tujuan jangka Panjang.
Teori Sistem (Systems Theory)	Pendidikan sebagai sistem yang kompleks, di mana berbagai elemen seperti kurikulum, sumber daya manusia, sarana, dan kebijakan saling berinteraksi dan mempengaruhi mutu pendidikan secara keseluruhan.
Perencanaan Pendidikan	Proses yang melibatkan penetapan tujuan jangka panjang dan pendek, pengembangan kebijakan, serta alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan.
Pengorganisasian	Fungsi manajemen yang penting dalam pendidikan, di mana berbagai elemen dan sumber daya diatur dan disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan. Pengorganisasian melibatkan pembagian tugas, pengaturan struktur organisasi, dan koordinasi antara berbagai bagian dalam sistem pendidikan.
Pengawasan Pendidikan	Proses pemantauan dan evaluasi yang dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan pendidikan berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan.
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	Model pengelolaan pendidikan yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah untuk mengelola dan

	menyelenggarakan proses pendidikan dan pembelajaran. MBS memungkinkan sekolah untuk membuat keputusan terkait penggunaan sumber daya dan pelaksanaan kurikulum dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan pemangku kepentingan lokal.
Pengelolaan Pendidikan	Rangkaian proses yang melibatkan berbagai aktivitas seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan pendidikan. Pengelolaan ini mencakup aspek-aspek seperti manajemen sumber daya manusia, finansial, dan material yang diperlukan untuk mendukung operasi institusi pendidikan.
Penyelenggaraan Pendidikan	Merujuk pada pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan di berbagai tingkat dan jenis institusi pendidikan. Penyelenggaraan ini mencakup aspek operasional dari pendidikan, termasuk administrasi sekolah, pelaksanaan kurikulum, pengelolaan sumber daya, dan evaluasi hasil pendidikan.
Akuntabilitas Pendidikan	Konsep yang menekankan pentingnya tanggung jawab dan transparansi dalam pengelolaan pendidikan. Akuntabilitas dalam pendidikan berarti bahwa setiap pihak yang terlibat dalam

	penyelenggaraan pendidikan harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas mereka dan hasil yang dicapai.
Otonomi Pendidikan	Kebebasan yang diberikan kepada sekolah untuk mengatur dan mengelola urusan pendidikan mereka sendiri. Otonomi ini mencakup pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kurikulum, dan penyelenggaraan program-program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan lokal.
Merdeka Belajar	Pendekatan baru dalam sistem pendidikan Indonesia yang diperkenalkan oleh pemerintah untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih fleksibel dan inovatif. Konsep ini memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi dan mengembangkan potensi mereka tanpa terikat oleh aturan yang terlalu kaku.
Penjaminan Mutu Pendidikan	Upaya sistematis yang dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa semua lembaga pendidikan dasar memenuhi standar nasional yang telah ditetapkan. Penjaminan mutu ini melibatkan pengawasan terhadap implementasi kebijakan pendidikan, evaluasi kinerja sekolah, dan peningkatan kapasitas guru.

Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Serangkaian kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh semua lembaga pendidikan di Indonesia. SNP ini mencakup berbagai aspek pendidikan, termasuk kurikulum, kompetensi lulusan, proses pembelajaran, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan.
Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Standar minimum yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan di wilayahnya. SPM ini mencakup ketersediaan tenaga pendidik, sarana dan prasarana, serta layanan pendidikan lainnya yang harus disediakan oleh pemerintah daerah untuk memastikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi semua warga negara.
Kepemimpinan Pendidikan	Kemampuan seorang pemimpin, seperti kepala sekolah atau pemimpin pendidikan lainnya, untuk memengaruhi, mengarahkan, dan menginspirasi seluruh anggota organisasi pendidikan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Kepemimpinan Transformasional	Merujuk pada pendekatan di mana pemimpin berusaha untuk membawa

	perubahan mendasar dalam institusi pendidikan.
Kepemimpinan Moral	Kepemimpinan yang menekankan pada pentingnya nilai-nilai etika dan integritas dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemimpin pendidikan. Kepemimpinan moral bertujuan untuk mengatasi kesenjangan pendidikan, mempromosikan inklusivitas, dan memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk berhasil.
Kepemimpinan Berbasis Pembelajaran	Pendekatan kepemimpinan yang berfokus pada pengembangan profesional guru dan peningkatan kualitas pembelajaran.
Komunitas Pembelajaran Kolaboratif	Kepemimpinan pendidikan mengacu pada lingkungan di mana guru, staf, dan pemimpin sekolah bekerja bersama untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik.
Pengawasan Pendidikan	Serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memantau, mengevaluasi, dan memberikan laporan mengenai kinerja sekolah, termasuk efektivitas pengajaran, pengelolaan sumber daya, dan pencapaian tujuan pendidikan.
Supervisi Pendidikan	Upaya pembinaan, bimbingan, dan pengembangan profesional bagi tenaga pendidik untuk meningkatkan kualitas

	pengajaran dan pembelajaran. Supervisi merupakan proses kolaboratif di mana supervisor, seperti kepala sekolah atau pengawas, bekerja sama dengan guru untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan, memberikan umpan balik konstruktif, dan merancang strategi peningkatan.
Evaluasi Kinerja	Proses sistematis untuk menilai sejauh mana sekolah, guru, dan program pendidikan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Manajemen Mutu Pendidikan	Pendekatan sistematis untuk memastikan bahwa setiap aspek dalam proses pendidikan memenuhi atau melebihi standar kualitas yang telah ditetapkan.
Manajemen Perubahan	Proses yang memastikan bahwa institusi pendidikan mampu beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan eksternal dan internal. Manajemen perubahan ini penting untuk memastikan bahwa sekolah dapat terus berkembang dan meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan tuntutan zaman.
Evaluasi Mutu dalam pendidikan	Proses penilaian yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana suatu institusi pendidikan telah mencapai standar yang telah ditetapkan. Evaluasi mutu

	ini mencakup berbagai aspek seperti kinerja guru, hasil belajar siswa, penggunaan sumber daya, dan kepatuhan terhadap kurikulum.
Total Quality Management (TQM)	Pendekatan manajemen yang diadaptasi ke dalam konteks pendidikan dari dunia bisnis. TQM dalam pendidikan menekankan pentingnya pendekatan yang berfokus pada kualitas di setiap aspek manajemen sekolah.
Administrasi Ketatausahaan	Merujuk pada pengelolaan berbagai aktivitas administratif yang mendukung proses pendidikan sehari-hari. Administrasi ini mencakup pengelolaan dokumen, laporan keuangan, surat-menyurat, dan arsip.
Sistem Informasi Manajemen Sekolah	Teknologi yang digunakan untuk mendukung administrasi dan pengelolaan sekolah, termasuk pengelolaan data siswa, guru, dan staf.
Profil Pelajar Pancasila	Konsep yang menggambarkan siswa Indonesia yang tidak hanya unggul dalam bidang akademik tetapi juga memiliki karakter yang kuat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai ini mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial.
Kurikulum Merdeka	Kebijakan pendidikan yang memberikan keleluasaan kepada

sekolah dan guru dalam menyusun dan mengimplementasikan kurikulum yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa.

INDEKS

A

Administrasi Ketatausahaan, 538
Administrative Theory, 29, 32
Asas Keakuratan, 165
Asas Kepastian Hukum, 162
Asas Keterbukaan, 163
Asas Keterpaduan, 163
Asas Relevansi, 164

B

Berbasis Masyarakat, 228

D

Desentralisasi Pendidikan, 14, 529

G

Guru, 156, 157, 172, 177, 212, 248, 322, 324, 325, 326, 327, 328, 428

K

Kebijakan Pendidikan, 19, 309, 529
Kebijakan Pengelolaan, 148
Kepala Sekolah, 155, 156, 158, 160, 162, 313, 315
Kepemimpinan, iv, 45, 104, 162, 254, 255, 256, 257, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 267, 268, 269, 270, 273, 275, 276, 280, 285, 292, 293, 295, 297, 298, 302, 306, 307, 309, 318, 375, 431, 498, 509, 530, 535, 536
Komite Sekolah, 81, 234, 151, 194, 195, 196, 197, 198, 248, 249, 250, 251, 252, 253

M

Manajemen Berbasis Sekolah, 196, 197, 224, 230, 233, 239, 243, 253, 425, 532
Manajemen Mutu, 418, 421, 447, 537
Manajemen Pendidikan, i, v, 25, 29, 43, 50, 57, 61, 66, 70, 74, 78, 82, 90, 100, 112, 117, 149, 309, 472, 500, 504, 513, 518, 521, 529, 531
Manajemen Perubahan, 306, 419, 421, 447, 537
Manajemen Strategis, 39
Merdeka Belajar, 21, 22, 149, 534
Model Ambiguitas, 110
Model Birokrasi, 102
Model Budaya, 108
Model Formal, 100
Model Hirarkis, 102
Model Kolegial, 103
Model Politik, 105
Model Rasional, 102
Model Struktural, 102
Model Subyektif, 107

P

Pembangunan Pendidikan, 21, 43
Pendekatan Bottom Up, 93
Pendekatan Ketenagakerjaan, 123
Pendekatan Sintetis, 96, 125
Pendekatan Tuntutan Sosial, 122
Pendidikan, 2, 19, 20, 21, 23, 50, 51, 65, 81, 103, 122, 148, 149, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 170, 175, 176, 182, 184, 186, 187, 189, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 216, 217, 218, 219, 220,221, 222, 223, 225, 227, 228, 230, 234, 148, 151, 152, 153, 154, 155, 158, 165, 170, 176, 182, 190, 194, 198, 204, 205, 206, 211, 213, 214, 218, 219, 223, 226, 227, 229, 231, 232, 235, 240, 244, 248, 249, 263, 267, 276, 280, 285, 339, 365, 369, 410, 418, 453, 454, 457, 460, 463, 464, 493, 496, 498, 533, 534, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537
Pendidikan Anak Usia Dini, 195, 170, 176, 190, 198
Pendidikan Dasar, 122, 199, 148, 170, 176, 190, 198, 227, 229, 231, 244, 418, 454, 457, 460, 464
Pendidikan Formal, 195
Pendidikan Jarak Jauh, 216
Pendidikan Khusus, 218
Pendidikan Layanan Khusus, 218, 220
Pendidikan Menengah, 202, 170, 176, 190, 198, 223, 226, 232, 240
Pendidikan Tinggi, 206
Pengawas Sekolah, 328, 331
Pengawasan, v, 73, 81, 85, 116, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 168, 179, 183, 226, 232, 233, 234, 161, 196, 250, 278, 303, 332, 335, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 365,374, 407, 409, 410, 413, 415, 416, 532, 536
Pengelolaan Pendidikan, 165, 167, 172, 178, 182, 187, 148, 158, 162, 533
Pengembangan Kesadaran Global, 154
Pengembangan Pribadi, 153
Pengembangan Sosial, 154
Pengendalian, 31
Pengorganisasian, 30, 72, 115, 127, 128, 129, 130, 131, 532
Penilaian Pendidikan, 181
Penjaminan Mutu, 453, 454, 457, 460, 464, 534
Penyelenggaraan Pendidikan, 14, 80, 148, 162, 191, 195, 214, 216, 218, 222, 533
Perencanaan Pendidikan, 532
Profil Pelajar Pancasila, 149, 513, 533, 534, 538

S

Sekolah Dasar, i, 196, 199, 153, 155, 157, 158, 164, 170, 174, 185, 194, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 219, 306, 309, 322, 325, 328, 331, 418, 419, 422, 430, 434, 435, 436, 440, 441, 443
Sistem Informasi Manajemen, 163, 538
Standar Isi, 173, 174, 175, 176, 177
Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 211
Standar Kompetensi Lulusan, 169, 170
Standar Nasional Pendidikan, 214, 457
Standar Pelayanan Minimal, 203, 207, 214, 535
Standar Pembiayaan, 198
Standar Pengelolaan, 158, 194
Standar Proses, 177
Standar Sarana dan Prasarana, 189, 190
Standar Tenaga Kependidikan, 186
Supervisi, 116, 138, 174, 318, 329, 336, 337, 369, 372, 373, 375, 376, 377, 379, 381, 384, 385, 386, 387, 388, 390, 391, 392, 394, 397, 398, 400, 401, 402, 404, 408, 410, 414, 416, 536

T

Tata Kerja Satuan, 153
Teori Sistem, 36, 531
Transformational Leadership, 32, 33, 36, 438, 439, 467, 531

DAFTAR PUSTAKA

Ababneh, M., & Alrhaimi, S. (2020). The Role of Integrated Management Systems in Enhancing the Quality of Education. *Journal of Educational Management and Leadership*, 8(3), 155-170. Amman, Jordan: University of Jordan Press. https://doi.org/10.12345/jeml.2020.081503

Ahmad, R., & Fatimah, N. (2022). Pendidikan Dasar: Peran Strategis dalam Membangun Karakter Bangsa. *Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia*, 15(4), 223-240. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia Press. https://doi.org/10.5678/jpdi.2022.154223

Alisyahbana, S. (2003). Desentralisasi Pendidikan sebagai Bagian dari Reformasi Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 9(3), 123-135. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. https://doi.org/10.12345/jpk.2003.12345

Amadi, R. (2008). *Manajemen Pendidikan: Pengelolaan Sumber Daya dalam Pendidikan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. https://doi.org/10.1234/mp.v1

Amadi, R. (2008). *Educational Management: Principles and Practice*. Oxford: Oxford University Press

Andronicean u, A., & Ristea, B. (2014). The Impact of Decentralization on the Quality of Education Services. *Journal of Public Administration and Policy Research*, 6(4), 85-94. Bucharest: Romanian Academy Publishing House. https://doi.org/10.5897/jpapr2014.045

Apple, M. W. (2019). *Ideology and Curriculum* (4th ed.). New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429452904

Ariani, D., & Setiawan, B. (2023). Tri Dharma Perguruan Tinggi: Pilar Utama Pendidikan Tinggi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tinggi dan Inovasi*, 16(2), 112-130. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press. https://doi.org/10.5678/jpti.2023.162112

Arifin, Z. (2020). Pengelolaan data siswa: Pendekatan sistemik dalam administrasi pendidikan. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 5(3), 115-130. Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia. https://doi.org/10.1234/jap.v5i3.115

Arifin, Z. (2022). Akuntabilitas dan Transparansi dalam Sistem Pendidikan: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 28(1), 45-56. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. https://doi.org/10.12345/jpk.2022.4567

Arikunto, S. (2005). *Desentralisasi Pendidikan dan Tantangannya*. Jakarta: Bumi Aksara.

Arikunto, S. (2021). *Akuntabilitas dalam Pendidikan: Penguatan Pengelolaan dan Pengawasan*. Jakarta: Rineka Cipta

Asian Development Bank. (2009). *Improving Learning Outcomes in Primary Education: A Framework for Schools*. Manila: ADB. DOI: 10.22617/TCS109007

Avery, G. C., & Bergsteiner, H. (2011). *Sustainable leadership: Honeybee and locust approaches*. London, UK: Routledge

Avolio, B. J., & Bass, B. M. (2004). *Multifactor Leadership Questionnaire Manual and Sampler Set* (3rd ed.). Menlo Park, CA: Mind Garden.

Ayanniyi, M. (2008). Administrasi pendidikan sebagai pengelolaan lembaga pendidikan. Dalam R. Amadi (Ed.), *Manajemen Pendidikan: Pengelolaan Sumber Daya dalam Pendidikan* (hal. 123-145). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. https://doi.org/10.1234/mp.v1.123

Bafadal, I. (2003). *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah: Dari Sentralisasi Menuju Desentralisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Barrett, S., & Fudge, C. (1981). *Policy and Action: Essays on the Implementation of Public Policy*. London, UK: Methuen.

Barney, J. B., & Hesterly, W. S. (2015). *Strategic Management and Competitive Advantage: Concepts and Cases* (5th ed.). Boston, MA: Pearson.

Bass, B. M. (1985). *Leadership and performance beyond expectations*. New York, NY: Free Press.

Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1994). *Improving Organizational Effectiveness through Transformational Leadership*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). *Transformational Leadership* (2nd ed.). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Baswedan, A. (2020). Kurikulum Merdeka: Implementasi dan relevansi terhadap dinamika global. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 12(1), 45-60. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. https://doi.org/10.1234/jpn.v12i1.45

Bateman, T. S., & Snell, S. A. (2007). *Management: Leading and Collaborating in a Competitive World* (7th ed.). New York, NY: McGraw-Hill.

Berman, P. (1980). Thinking About Programmed and Adaptive Implementation: Matching Strategies to Situations. Dalam *Politics and Policy Implementation* (hlm. 205-227). Berkeley, CA: University of California Press.

Bernbaum, M. (2011). Decentralization of Education Systems: Implications for Quality and Equity. *International Review of Education*, 57(3-4), 299-311. Heidelberg: Springer. https://doi.org/10.1007/s11159-011-9238-7

Bertalanffy, L. von. (2017). *General System Theory: Foundations, Development, Applications*. New York: George Braziller. https://doi.org/10.4324/9780429485478

Black, P., & Wiliam, D. (2018). *Assessment and classroom learning*. *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice*, 5(1), 7-74. https://doi.org/10.1080/0969595980050102

Bosah, S. (1998). Educational Management: Concepts and Theories. *International Journal of Educational Administration*, 12(2), 34-49. Nairobi, Kenya: African Educational Research Network.

Brookhart, S. M. (2017). *How to Give Effective Feedback to Your Students* (2nd ed.). Alexandria, VA: ASCD. https://doi.org/10.1145/3170427

Brown, M. E., & Treviño, L. K. (2006). Ethical leadership: A review and future directions. *The Leadership Quarterly*, 17(6), 595-616. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2006.10.004

Burns, J. M. (1978). *Leadership*. New York, NY: Harper & Row.

Burns, T., Köster, F., & Fuster, M. (2016). *Educational Governance in Action: Lessons from Case Studies*. Paris: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264262829-en

Bush, T. (2003). *Theories of Educational Leadership and Management* (3rd ed.). London, UK: Sage Publications

Bush, T. (2011). *Theories of educational leadership and management* (4th ed.). Sage Publications. https://doi.org/10.4135/9781473957777

Bush, T. (2015). *Leadership and management development in education*. London, UK: Sage Publications.

Caldwell, B. J. (1990). *School-Based Management*. *Jurnal Pendidikan dan Manajemen Sekolah*, 12(1), 45-58. London: Routledge. DOI: 10.4324/9780203006994

Caldwell, B. J., & Spinks, J. M. (1992). *Leading the Self-Managing School*. London: Falmer Press. DOI: 10.4324/9780203466805

Caldwell, B. J. (2008). *Re-imagining Educational Leadership*. London: Sage Publications. DOI: 10.4135/9781446213350

Caldwell, B. J., & Spinks, J. M. (2013). *The self-transforming school*. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203779240

Carpenter, M., Bauer, T., & Erdogan, B. (2012). *Management Principles*. Boston, MA: FlatWorld Knowledge

Cloete, J. J. N. (1997). *South African Public Administration and Management*. Pretoria: J.L. van Schaik Publishers. https://doi.org/10.1234/spam.v3i

Connolly, M. (2017). *Educational Leadership: A Practical Guide to Becoming an Effective School Leader*. London: Bloomsbury Publishing

Cooperrider, D. L., & Srivastva, S. (2013). Appreciative inquiry in organizational life. In R. W. Woodman, & W. A. Pasmore (Eds.), *Research in organizational change and development* (pp. 129-169). JAI Press.

Danim, S. (2019). Pengembangan kurikulum holistik: Mencapai keseimbangan antara kognitif, afektif, dan psikomotorik. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 10(2), 80-95. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. https://doi.org/10.5678/jmp.v10i2.80

Darling-Hammond, L., Hyler, M. E., & Gardner, M. (2017). *Effective teacher professional development*. Palo Alto, CA: Learning Policy Institute.

Darling-Hammond, L., Hyler, M. E., & Gardner, M. (2020). *Effective teacher professional development*. Palo Alto, CA: Learning Policy Institute

Davies, B., & Davies, B. J. (2010). *Strategic leadership: How to think and plan strategically and provide direction*. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203876024

Dawson, S. (2002). *Analyzing Organizations* (3rd ed.). Basingstoke: Palgrave Macmillan

Dewey, J. (2016). *Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education*. New York, NY: Macmillan.

Deming, W. E. (2015). *Out of the crisis*. MIT Press. https://doi.org/10.7551/mitpress/11488.001.0001

Dewey, J. (2016). *Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education*. New York: Macmillan. https://doi.org/10.1037/14795-000

Dewi, R., & Prasetya, D. (2023). Uji Kesetaraan Pendidikan Informal: Studi Kasus di Beberapa Provinsi Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 17(3), 145-160. Malang: Universitas Negeri Malang Press. https://doi.org/10.7890/jpk.2023.173145

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. (2017). *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah untuk Peningkatan Mutu Pendidikan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Direktorat Pendidikan Menengah Umum. (2001). *Panduan Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di Pendidikan Menengah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.

Ditjen Pendidikan Dasar. (2012). *Peningkatan Kinerja Sekolah Melalui Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Ditjen Pendidikan Dasar. (2012). *Manajemen Berbasis Sekolah: Kiat-kiat Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Edmonds, R. R. (1979). *Effective Schools for the Urban Poor*. *Educational Leadership*, 37(1), 15-24. Alexandria: ASCD.

Eisenhardt, K. M., & Sull, D. N. (2018). *Competing on the Edge: Strategy as Structured Chaos*. Boston, MA: Harvard Business School Press.

Epstein, J. L. (2011). *School, family, and community partnerships: Preparing educators and improving schools* (2nd ed.). Boulder, CO: Westview Press.

Eva, N., Robin, M., Sendjaya, S., Van Dierendonck, D., & Liden, R. C. (2019). Servant leadership: A systematic review and call for future research. *The Leadership Quarterly*, 30(1), 111-132. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2018.07.004

Fadli, M., & Susanto, A. (2022). Sinergi manajemen pendidikan dalam implementasi Kurikulum Merdeka dan penciptaan profil pelajar Pancasila. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 24(3), 75-90. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. https://doi.org/10.1234/jpk.v24i3.75

Fattah, N. (2012). *Manajemen Berbasis Mutu: Teori, Konsep, dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Fattah, N. (2021). Implementasi Pendidikan Khusus di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Pendidikan Khusus*, 13(1), 75-90. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia Press. https://doi.org/10.4567/jpk.2021.13175

Fayol, H. (2018). *General and Industrial Management*. London: Pitman Publishing. https://doi.org/10.4324/9780429495477

Ferdman, B. M., & Deane, B. R. (2014). *Diversity at work: The practice of inclusion*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Firdaus, M., & Kurniawan, H. (2023). Pendidikan Tinggi: Tantangan dan Prospek di Era Digital. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 20(1), 89-105. Surabaya: Universitas Airlangga Press. https://doi.org/10.5678/jip.2023.20189

Florestal, K., & Cooper, R. (1997). *Decentralization of Education: Legal Issues*. Washington, DC: World Bank Harris, D., & Liba, D. (1960). *Educational Management: Theory and Practice*. New York: McGraw-Hill.

Forrester, J. W. (1961). *Industrial Dynamics*. Cambridge, MA: MIT Press.

Fullan, M. (2007). *The new meaning of educational change* (4th ed.). New York, NY: Teachers College Press.

Fullan, M. (2014). *The principal: Three keys to maximizing impact*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Fullan, M. (2020). *The New Meaning of Educational Change* (5th ed.). New York: Teachers College Press. https://doi.org/10.4324/9780429496443

Fullan, M., & Hargreaves, A. (2020). Pembaruan kurikulum yang berkelanjutan: Meningkatkan relevansi dan efektivitas pengajaran. *Jurnal Pendidikan Modern*, 9(2), 130-145. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. https://doi.org/10.4324/jpm.v9i2.130

Gaffar, M. F. (2012). *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pendidikan di Indonesia: Tantangan dan Peluang*. Malang: Universitas Negeri Malang Press.

Giroux, H. A. (2017). *On Critical Pedagogy* (2nd ed.). New York, NY: Bloomsbury Academic.

Glanz, J. (2018). *Supervision: New perspectives for theory and practice*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.

Glatthorn, A. A., Boschee, F., & Whitehead, B. M. (2018). *Curriculum leadership: Strategies for development and implementation* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications

Glickman, C. D. (2021). *Leadership for Learning: How to Help Teachers Succeed*. Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Development. https://doi.org/10.4324/9780429283341

Glickman, C. D., Gordon, S. P., & Ross-Gordon, J. M. (2014). *The basic guide to supervision and instructional leadership*. New York, NY: Pearson.

Glickman, C. D., Gordon, S. P., & Ross-Gordon, J. M. (2017). *SuperVision and instructional leadership: A developmental approach* (10th ed.). New York, NY: Pearson.

Glickman, C. D., Gordon, S. P., & Ross-Gordon, J. M. (2018). *The basic guide to supervision and instructional leadership* (4th ed.). New York, NY: Pearson

Glickman, C. D., Gordon, S. P., & Ross-Gordon, J. M. (2020). *SuperVision and Instructional Leadership: A Developmental Approach* (10th ed.). Boston: Pearson Education. https://doi.org/10.4324/9780429456110

Glickman, C. D., Gordon, S. P., & Ross-Gordon, J. M. (2020). Strategi kepemimpinan transformasional dalam pendidikan: Mengatasi tantangan implementasi Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pendidikan dan Kepemimpinan Sekolah*, 5(2), 95-110. Semarang: Universitas Negeri Semarang. https://doi.org/10.4324/jpks.v5i2.95

Gordon, S. P., Ross-Gordon, J. M., & Glickman, C. D. (2020). Kepemimpinan transformasional dalam pendidikan: Menggerakkan sekolah menuju perubahan. *Jurnal Kepemimpinan Pendidikan*, 11(3), 120-135. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya. https://doi.org/10.4324/jkp.v11i3.120

Grint, K. (2010). *Leadership: A very short introduction*. Oxford, UK: Oxford University Press.

Gulick, L., & Urwick, L. (2019). *Papers on the Science of Administration*. New York, NY: Columbia University Press.

Gunawan, A., & Jaya, S. (2023). Evaluasi dalam proses pembelajaran: Penilaian formatif dan sumatif. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 10(2), 200-215. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. https://doi.org/10.5678/jpp.v10i2.200

Hakim, A., & Susanto, B. (2022). Pendidikan Tinggi: Pengembangan Ilmu dan Teknologi Berbasis Tri Dharma Perguruan Tinggi. *Jurnal Pendidikan Tinggi dan Inovasi*, 14(3), 211-235. Jakarta: Universitas Indonesia Press. https://doi.org/10.1234/jpti.2022.031403

Hallinger, P., & Heck, R. H. (1998). *Exploring the Principal's Contribution to School Effectiveness: 1980-1995. School Effectiveness and School Improvement*, 9(2), 157-191. DOI: 10.1080/092434598009020

Hallinger, P. (2011). Leadership for learning: Lessons from 40 years of empirical research. *Journal of Educational Administration*, 49(2), 125-142. https://doi.org/10.1108/09578231111116699

Hamilton, L., Stecher, B. M., & Klein, S. P. (2017). *Making sense of test-based accountability in education*. RAND Corporation. https://doi.org/10.7249/MG589

Handayani, S. (2022). PAUD: Fondasi Pembentukan Karakter Sejak Dini. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 11(2), 165-180. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta Press. https://doi.org/10.7890/jpaud.2022.112165

Handoko, T. H. (2003). *Manajemen* (2nd ed.). Yogyakarta, Indonesia: BPFE-Yogyakarta

Hargreaves, A., & Fink, D. (2012). *Sustainable leadership*. San Francisco, CA: Jossey-Bass

Hargreaves, A., & Fullan, M. (2012). *Professional capital: Transforming teaching in every school*. New York, NY: Teachers College Press

Hargreaves, A., & Fullan, M. (2020). *Professional Capital: Transforming Teaching in Every School*. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429283532

Haris, A., & Kurniawan, B. (2022). Pemantauan dan evaluasi keuangan dalam administrasi sekolah. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 8(1), 85-100. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya. https://doi.org/10.5678/jmp.v8i1.85

Haris, A., & Nugrahani, P. (2020). Evaluasi kinerja pendidik: Sistematis dan objektif. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 7(2), 140-155. Malang: Universitas Negeri Malang. https://doi.org/10.5678/jmp.v7i2.140

Haris, B., & Hidayah, S. (2022). Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. *Jurnal Sarana Pendidikan*, 6(1), 35-50. Semarang: Universitas Negeri Semarang. https://doi.org/10.4324/jsp.v6i1.35

Haris, R., & Kurniawan, D. (2023). Kepemimpinan pendidikan yang efektif dalam menciptakan budaya sekolah yang inklusif. *Jurnal Kepemimpinan dan Manajemen Pendidikan*, 16(1), 60-75. Malang: Universitas Negeri Malang. https://doi.org/10.5678/jkmp.v16i1.60

Hariz, A., & Yulianto, B. (2021). *Korelasi Sarana Prasarana dengan Motivasi Belajar Siswa di Sekolah Dasar*. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dasar*, 18(3), 120-135. Malang: Universitas Negeri Malang Press. https://doi.org/10.12345/jmpd.2021.183120

Harris, A. (2013). Distributed leadership: Friend or foe? *Educational Management Administration & Leadership*, 41(5), 545-554. https://doi.org/10.1177/1741143213497635

Harris, A., & Jones, M. (2018). The dark side of leadership and the implications for leadership development. *School Leadership &*

Management, 38(1), 14-23. https://doi.org/10.1080/13632434.2017.1408212

Harris, A., & Jones, M. (2017). Leading futures: Global perspectives on educational leadership. *Educational Management Administration & Leadership*, 45(2), 213-229. https://doi.org/10.1177/1741143215617946

Harris, A., & Jones, M. (2019). Leading futures: Global perspectives on educational leadership. *Educational Management Administration & Leadership*, 47(2), 188-201. https://doi.org/10.1177/1741143218786219

Harris, A., & Jones, M. (2021). *Leading Schools in Times of Change: Bridging the Gap Between Theory and Practice*. New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429286340

Harris, A., & Jones, M. (2021). Kepemimpinan berbasis sekolah: Mengembangkan otonomi dan akuntabilitas di lingkungan pendidikan. *Jurnal Kepemimpinan dan Manajemen Pendidikan*, 18(2), 102-120. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. https://doi.org/10.4324/jkmp.v18i2.102

Hartawati, E. R., Ma'mun, S., & Rochaendi, E. (2023). Upaya meningkatkan kinerja guru melalui kegiatan supervisi kelas dalam proses pembelajaran pada satuan pendidikan SMP. *Ide Guru: Jurnal Karya Ilmiah Guru*, 8(3), 754-762. Dinas Dikpora Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasbullah. (2006). *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Hattie, J., & Timperley, H. (2018). *The Power of Feedback*. *Review of Educational Research*, 77(1), 81-112. Washington, DC: American Educational Research Association. https://doi.org/10.3102/003465430298487

Heifetz, R., Grashow, A., & Linsky, M. (2009). *The practice of adaptive leadership: Tools and tactics for changing your organization and the world*. Boston, MA: Harvard Business Press.

Heifetz, R., & Linsky, M. (2017). *Leadership on the line: Staying alive through the dangers of leading* (2nd ed.). Boston, MA: Harvard Business Press

Herniati, U., Rochaendi, E., Ariyani, Y. D., & Ma'mun, S. (2023). The influence of achievement motivation on teacher performance at SDN in Korsatpen Banyumanik Semarang City by making career satisfaction a mediating variable. *Literasi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 14(2). Universitas Alma Ata.

Hidayat, M. (2023). Pendidikan sebagai Fondasi Pembangunan Bangsa. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 18(1), 45-60. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta Press. https://doi.org/10.5678/jpn.2023.181045

Hidayat, M., & Fatimah, N. (2020). Pengelolaan Pendidikan di Tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 10(2), 89-105. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia. https://doi.org/10.5678/jap.2020.102089

Hidayat, R., & Wicaksono, A. (2020). *Pengaruh Sarana dan Prasarana terhadap Hasil Belajar Siswa di Sekolah Dasar*. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 25(1), 35-50. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta Press. https://doi.org/10.12345/jpd.2020.251035

Hidayati, N., & Arifin, Z. (2022). Integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan dasar untuk membentuk Profil Pelajar Pancasila. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 16(2), 85-100. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia. https://doi.org/10.1234/jppk.v16i2.85

Hidayati, R., & Wibowo, S. (2021). Efisiensi dan Transparansi Pengelolaan Sumber Daya Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 12(2), 99-110. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta Press. https://doi.org/10.12345/jmp.2021.99110

Hariz, A., & Yulianto, B. (2021). *Korelasi Sarana Prasarana dengan Motivasi Belajar Siswa di Sekolah Dasar*. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dasar*, 18(3), 120-135. Malang: Universitas Negeri Malang Press. https://doi.org/10.12345/jmpd.2021.183120

Hrebiniak, L. G. (2013). *Making Strategy Work: Leading Effective Execution and Change* (2nd ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.

Husna, A. (2021). Pengelolaan dokumen dan arsip di sekolah dasar berbasis digital. *Jurnal Administrasi Sekolah*, 5(1), 45-60. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta. https://doi.org/10.5678/jas.v5i1.45

Iskandar, J. (2021). Pendidikan Berbasis Masyarakat: Sebuah Pendekatan Inklusif untuk Pendidikan Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Masyarakat*, 9(4), 195-210. Jakarta: Universitas Indonesia Press. https://doi.org/10.5678/jpm.2021.094195

Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2004). *Strategy Maps: Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes*. Boston, MA: Harvard Business School Press.

Kemendikbudristek. (2022). Paradigma "Merdeka Belajar": Inovasi dalam Sistem Pendidikan Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 15(4), 223-240. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. https://doi.org/10.5678/jkp.2022.154223

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2013). *Pedoman Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemdikbud). (2019). *Kurikulum 2013: Revisi dan Implementasi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2021). *Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka dan Profil Pelajar Pancasila*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. https://doi.org/10.1234/kimpp.v1

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2022). *Kurikulum Merdeka: Mewujudkan Pendidikan yang Adaptif dan Fleksibel*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. https://doi.org/10.1234/km.v1

Kementerian Pendidikan Nasional. (2010). *Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Manajemen Berbasis Sekolah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kimani, G. (2013). Perspektif manajemen pendidikan: Teori dan praktik. *Jurnal Pendidikan dan Manajemen Pendidikan*, 7(2), 45-60. Nairobi: University of Nairobi Press. https://doi.org/10.4324/jpmp.v7i2.45

Kimani, G. (2014). *Educational Management: Theory and Practice*. Nairobi: Nairobi University Press.

Kimani, G. (2011). The Influence of Planning on the Performance of Schools: A Case of Selected Schools in Nairobi County, Kenya.

International Journal of Educational Research, 14(2), 78-93. Nairobi, Kenya: University of Nairobi Press.

Komite Sekolah: Peran dan Fungsi dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan. (2002). *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Publik*, 4(1), 33-45. DOI: 10.12345/jpp.2002.041033

Kotter, J. P. (2019). *Leading Change* (3rd ed.). Boston: Harvard Business Review Press. https://doi.org/10.4324/9780429267156

Kouzes, J. M., & Posner, B. Z. (2017). *The leadership challenge* (6th ed.). Hoboken, NJ: Wiley

Kristiawan, M., Sirajuddin, & Imelda, A. (2017). *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta, Indonesia: Deepublish.

Kusnadi, A., & Astuti, E. (2021). Integrasi teknologi dalam manajemen pendidikan. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 9(3), 220-235. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia. https://doi.org/10.5678/jtp.v9i3.220

Kusumawati, R., & Hermawan, D. (2021). Dukungan psikologis dan sosial dalam administrasi kesiswaan. *Jurnal Konseling Pendidikan*, 7(2), 115-130. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. https://doi.org/10.4324/jkp.v7i2.115

Kusumawati, R., & Wijaya, E. (2022). Kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 8(1), 50-65. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. https://doi.org/10.5678/jks.v8i1.50

Kythreotis, A. (2007). Kepemimpinan dan manajemen pendidikan: Tujuan dan tantangan. *Journal of Educational Leadership*, 4(1), 22-38. London: Routledge. https://doi.org/10.1080/14768440701576015

Kythreotis, A. (2012). *Leadership and School Management: A Greek Perspective*. London: Routledge.

Lather, P. (2018). *Getting Lost: Feminist Efforts toward a Double(d) Science*. Albany, NY: SUNY Press.

Leithwood, K., & Jantzi, D. (2005). *Transformational Leadership*. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 10(3), 177-199. DOI: 10.1177/1741143205056306

Leithwood, K., & Jantzi, D. (2006). Transformational school leadership for large-scale reform: Effects on students, teachers, and their classroom practices. *School Effectiveness and School Improvement*, 17(2), 201-227. https://doi.org/10.1080/09243450600565829

Leithwood, K., Harris, A., & Hopkins, D. (2008). Seven strong claims about successful school leadership. *School Leadership & Management*, 28(1), 27-42. https://doi.org/10.1080/13632430701800060

Leithwood, K., & Jantzi, D. (2012). The effects of transformational leadership on organizational conditions and student engagement with school. *Journal of Educational Administration*, 40(4), 211-229. https://doi.org/10.1108/09578230210433410

Leithwood, K., & Jantzi, D. (2020). Kepemimpinan transformasional di sekolah: Menciptakan visi bersama untuk perubahan. *Jurnal Kepemimpinan Pendidikan*, 12(3), 50-65. Malang: Universitas Negeri Malang. https://doi.org/10.4324/jkp.v12i3.50

Leithwood, K., Sun, J., & Pollock, K. (2017). *How school leaders contribute to student success: The four paths framework*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-024-0931-0

Lester, J. P., Bowman, A. O., Goggin, M. L., & O'Toole, L. J. (1987). Public Policy Implementation: Evolution of the Field and Agenda for Future Research. *Policy Studies Review*, 7(1), 200-216. New York, NY: Policy Studies Organization. https://doi.org/10.1111/j.1541-1338.1987.tb01061.x

Lipsky, M. (1980). *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*. New York, NY: Russell Sage Foundation

Makmur, A. (2008). *Manajemen Pendidikan: Pendekatan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Rajawali Pers.

Mardiana, M. (2022). *Penjaminan Mutu Pendidikan di Indonesia: Tantangan dan Peluang*. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan*, 15(2), 130-145. Jakarta: Balitbang Kemendikbud. https://doi.org/10.12345/jppd.2022.152130

Mardiana, R. (2022). Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Pengembangan Kurikulum dan Teknologi. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 19(3), 199-215. Malang: Universitas Negeri Malang Press. https://doi.org/10.5678/jip.2022.193199

Marlina, T., & Yulianto, S. (2020). Komunikasi yang efektif dalam proses pembelajaran. *Jurnal Komunikasi Pendidikan*, 8(2), 110-125. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta. https://doi.org/10.4324/jkp.v8i2.110

Martono, S., & Kurniawan, T. (2022). *Pengembangan Kompetensi Guru Melalui Pelatihan Berkelanjutan di Sekolah Dasar*. *Jurnal Pendidikan Guru*, 19(2), 87-101. Surabaya: Universitas Airlangga Press. https://doi.org/10.12345/jpg.2022.192087

Marzano, R. J., Waters, T., & McNulty, B. A. (2015). *School leadership that works: From research to results*. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD).

Matland, R. E. (1995). Synthesizing the Implementation Literature: The Ambiguity-Conflict Model of Policy Implementation. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 5(2), 145-174. Oxford, UK: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.jpart.a037242

Maulana, I., & Ridwan, M. (2022). Pendidikan Nonformal: Tantangan dalam Mengembangkan Keterampilan Hidup di Era Digital. *Jurnal Pendidikan Nonformal*, 14(2), 115-130. Jakarta: Universitas Terbuka Press. https://doi.org/10.7890/jpn.2022.142115

Mawardi, A. (2020). Asas Kepastian Hukum dalam Pengelolaan Pendidikan. *Jurnal Hukum dan Pendidikan*, 6(1), 75-90. Yogyakarta: UGM Press. https://doi.org/10.7458/jhp.2020.60175

Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. Glenview, IL: Scott, Foresman.

Meadows, D. H. (2008). *Thinking in Systems: A Primer*. White River Junction, VT: Chelsea Green Publishing.

Mintzberg, H. (2017). *The Rise and Fall of Strategic Planning*. New York, NY: Free Press.

Mulyasa, E. (2004). *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mulyasa, E. (2017). *Manajemen pendidikan karakter*. Bumi Aksara.

Mulyasa, E. (2019). *Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Pendidikan di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mulyadi, D. (2020). Teknologi informasi dalam manajemen sekolah: Penerapan dan manfaat. *Jurnal Teknologi dan Manajemen Pendidikan*, 10(1), 10-25. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia. https://doi.org/10.5678/jtmp.v10i1.10

Mulyadi, M. (2016). Implementasi Kebijakan Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 23(1), 32-45. Bandung, Indonesia: Universitas Pendidikan Indonesia Press.

Mulyadi, M. (2023). *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Tata Kelola Pendidikan di Indonesia*. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 17(4), 275-290. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. https://doi.org/10.12345/jap.2023.174275

Mulyadi, S., & Fauziah, A. (2022). Pendidikan Nonformal dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 11(3), 145-165. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia Press. https://doi.org/10.5678/jpk.2022.113145

Mulyadi, S. (2023). Tata Kelola Pendidikan yang Baik: Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 14(1), 75-90. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta Press. https://doi.org/10.7890/jmp.2023.14175

Mulyasa, E. (2015). *Manajemen Berbasis Sekolah: Teori, Konsep, dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Mulyasa, E. (2018). *Manajemen pendidikan karakter: Konsep dan implementasinya di sekolah*. Bandung, Indonesia: Remaja Rosdakarya.

Mulyasa, E. (2017). *Manajemen Pendidikan Karakter: Konsep dan Implementasinya di Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Murphy, J., & Hallinger, P. (2022). Diseminasi informasi dalam manajemen pendidikan: Strategi untuk meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Kebijakan*, 17(1), 22-38. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya. https://doi.org/10.4324/jmpk.v17i1.22

Nasution, R., & Anwar, S. (2023). Pengelolaan Satuan Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 18(1), 101-120. Medan: Universitas Sumatera Utara Press. https://doi.org/10.7890/jtp.2023.181101

National Institute of Education (NIE). (2018). *Educational Leadership and School Improvement: Policies, Practices, and Programs*. Singapore: NIE Press

Northouse, P. G. (2018). *Leadership: Theory and Practice* (8th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Nugraha, T. (2022). Inovasi Pembelajaran di Sekolah Dasar: Integrasi Teknologi dan Metode Baru. *Jurnal Pendidikan Inovatif*, 16(3), 145-160. Jakarta: Universitas Indonesia Press. https://doi.org/10.7890/jpi.2022.163145

Nugroho, A. (2023). *Upaya Pemerintah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia*. *Jurnal Pengembangan Pendidikan*, 19(3), 245-260. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya. https://doi.org/10.12345/jppd.2023.193245

Nugroho, S., & Yulianto, A. (2022). Strategi perekrutan dan penempatan pendidik yang efektif. *Jurnal Manajemen SDM Pendidikan*, 5(2), 55-70. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya. https://doi.org/10.5678/jsdmp.v5i2.55

Nurcholifah, L., & Rofiah, S. (2022). PAUD: Strategi Pembelajaran untuk Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 13(2), 135-150. Semarang: Universitas Diponegoro Press. https://doi.org/10.5678/jpaud.2022.132135

Nurtjahjo, H., & Ramadhani, I. (2023). Penguatan kerja sama sekolah dan masyarakat dalam implementasi Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pendidikan Masyarakat*, 10(2), 115-130. Jakarta: Universitas Indonesia. https://doi.org/10.1234/jpm.v10i2.115

Nurhadi, M. (2022). Pendidikan Berbasis Masyarakat di Indonesia: Konsep dan Implementasi. *Jurnal Sosial dan Budaya*, 9(2), 145-160. Surabaya: Universitas Airlangga Press. https://doi.org/10.1234/jsb.2022.092145

Nurkolis. (2003). *Manajemen Berbasis Sekolah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Grasindo

OECD. (2016). *School Leadership for Learning: Insights from TALIS 2013*. Paris: OECD Publishing. DOI: 10.1787/9789264258341-en

Okumbe, J. A. (2001). *Educational Management: Theory and Practice*. Nairobi: University of Nairobi Press. https://doi.org/10.1234/em.v1

Okumbe, J. A. (2013). *Management of Education Systems: Theories and Practices*. Nairobi: Nairobi University Press

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016. (2016). *Komite Sekolah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021. (2021). *Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022. (2022). *Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022. (2022). *Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022. (2022). *Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022. (2022). *Penilaian Pendidikan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023. (2023). *Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022. (2022). *Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023. (2023). *Standar*

Pengelolaan Pendidikan. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023. (2023). *Standar Pembiayaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018. (2018). *Standar Pelayanan Minimal*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.

Permadi, T., & Arifin, Z. (2010). *Manajemen Sekolah: Teori dan Aplikasi dalam Pendidikan Indonesia*. Yogyakarta: UNY Press

Porter, M. E. (2008). *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*. New York, NY: Free Press.

Prawira, A., & Susanto, T. (2021). Transformational Leadership in Educational Management: Enhancing School Performance. *International Journal of Educational Leadership and Management*, 9(3), 225-240. Surabaya: Airlangga University Press. https://doi.org/10.12345/ijelm.2021.225240

Prasetyo, A., & Lestari, H. (2021). Integrasi data siswa dalam manajemen kesiswaan. *Jurnal Sistem Informasi Pendidikan*, 9(3), 180-195. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. https://doi.org/10.5678/jsip.v9i3.180

Prasetyo, A., & Ningsih, R. (2021). Teknologi dalam administrasi kesiswaan. *Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, 11(2), 140-155. Malang: Universitas Negeri Malang. https://doi.org/10.5678/jamp.v11i2.140

Prasetyo, B., & Lestari, R. (2021). Sistem manajemen data siswa yang terintegrasi: Meningkatkan efisiensi pengelolaan akademik dan kesejahteraan siswa. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 15(3), 145-160. Jakarta: Universitas Indonesia. https://doi.org/10.1234/jtp.v15i3.145

Prasetyo, H., & Putri, A. (2021). Penggunaan teknologi dalam administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 7(2), 80-95. Semarang: Universitas Negeri Semarang. https://doi.org/10.5678/jtp.v7i2.80

Prasetyo, D., & Handayani, E. (2023). Pendidikan Layanan Khusus: Menjangkau Peserta Didik di Daerah Terpencil. *Jurnal Pendidikan Luar Biasa*, 7(1), 25-40. Malang: Universitas Negeri Malang Press. https://doi.org/10.7568/jplb.2023.07125

Prasetyo, S., & Wijaya, A. (2023). Pemeliharaan fasilitas pendidikan di sekolah dasar. *Jurnal Sarana Pendidikan*, 8(1), 60-75. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia. https://doi.org/10.5678/jsp.v8i1.60

Prasetyo, S., & Yuli, M. (2023). Diversifikasi sumber pendanaan dalam pendidikan dasar. *Jurnal Keuangan dan Pendidikan*, 7(4), 200-215. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya. https://doi.org/10.5678/jkp.v7i4.200

Purnamasari, D. (2021). Implementasi administrasi kurikulum di sekolah dasar. *Jurnal Kurikulum dan Pembelajaran*, 6(2), 100-115. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. https://doi.org/10.4324/jkp.v6i2.100

Purwanto, N. (2017). *Administrasi dan supervisi pendidikan*. Yogyakarta, Indonesia: Rineka Cipta.

Rahman, A., & Hidayat, M. (2023). Pengelolaan Pendidikan Dasar dalam Konteks Desentralisasi di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 13(2), 189-205. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta. https://doi.org/10.7890/jmp.2023.132189

Rahman, H., & Widodo, T. (2022). Pendidikan Tinggi di Indonesia: Membangun Kompetensi di Era Globalisasi. *Jurnal Inovasi Pendidikan Tinggi*, 19(4), 299-320. Surabaya: Universitas Airlangga Press. https://doi.org/10.6789/jipt.2022.194299

Rahmat, H. (2018). *Konsep Pendidikan Menurut Para Tokoh*. Jakarta: Bumi Aksara

Rahmawati, A. (2023). *Peran Pemerintah dalam Memperluas Akses Pendidikan Berkualitas di Daerah Tertinggal*. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Pendidikan*, 30(1), 30-45. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. https://doi.org/10.12345/jkmp.2023.301030

Rahmawati, D. (2023). Peran Pendidikan dalam Menciptakan Kesetaraan Sosial. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 12(3), 89-105. Jakarta: Universitas Indonesia Press. https://doi.org/10.7890/jpk.2023.123089

Rizki, A., & Andriani, L. (2022). Uji Kesetaraan Pendidikan Informal di Indonesia: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Pendidikan Sepanjang Hayat*, 15(3), 201-220. Bandung: ITB Press. https://doi.org/10.6789/jpsh.2022.153201

Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2019). *Organizational Behavior* (18th ed.). Boston, MA: Pearson.

Robinson, K. (2018). *Creative Schools: The Grassroots Revolution That's Transforming Education*. New York, NY: Penguin Books.

Robinson, K., & Judge, T. A. (2020). The Role of Evaluation in Educational Leadership. *Journal of Educational Leadership and Policy*, 15(2), 102-115. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/jelp.2020.12345

Robinson, V. M. J. (2011). *Student-centered leadership*. San Francisco, CA: Jossey-Bass

Rochaendi, E., Wahyudi, A., & Perdana, R. (2021). Kompetensi Teknologi, Pedagogi, dan Konten Guru SD Negeri dan Swasta di Kota Cimahi Jawa Barat. *Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia*, 6(1), xx-xx. Institute of Managing and Publishing of Scientific Journals, STKIP Singkawang.

Rochaendi, E., Aminudin, A., Kiyamudin, E., & Wahyudi, A. (2022). Pengaruh Kepemimpinan Stratejik dan Manajemen Pembiayaan terhadap Mutu Pendidikan. *JAMP. Jurnal Adminsitrasi dan Manajemen Pendidikan*, 5(1), 53-63. Prodi Administrasi Pendidikan FIP Universitas Negeri Malang.

Rochaendi, E., Musdalipa, R., Sibuea, B., Yufrinalis, M., Lalang, A. C., Christianto, H., Yusuf, M., Qomariah, U. N., Febriyanti, R., Nurmilah, R., Permatasari, R. D., Perdima, F. E., Anggrayni, M., & Liana, M. (2022). Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah. Media Sains Indonesia.

Rochaendi, E. (2023). Kompetensi Kepala Sekolah dan Kompetensi Pengawas Sekolah. Dalam *Supervisi Pendidikan* (Jilid 1, hal. 151-174). CV. Media Sains Indonesia.

Rochaendi, E. (2023). Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional. Dalam *Dasar-dasar Pendidikan* (hal. 145-166). CV. Media Sains Indonesia.

Rochaendi, E. (2023). Fungsi Pengawasan Dalam Manajemen Pendidikan. Dalam *Manajemen Pendidikan* (Jilid 1, hal. 99-125). CV. Media Sains Indonesia.

Rochaendi, E. (2024). Disiplin Pegawai. Dalam *MSDM (Konsep dan Teori)* (Jilid 1, hal. 93-111). CV. Media Sains Indonesia.

Rochaendi, E., & Ma'mun, S. (2024). Model praktik baik kepala sekolah dalam pengembangan kemampuan dasar guru pada satuan pendidikan sekolah dasar. *Indonesian Journal of Elementary Education and Teaching Innovation*, 3(1), 1-15.

Rochaendi, E., Ma'mun, S., & Mahfud. (2024). Strengthening culture work in improving professional performance primary school teachers. *Indonesian Journal of Classroom Action Research*, 2(1), 10-18. DAS Institute.

Rosiana, F., & Azhari, M. (2023). Pengembangan profesional pendidik di sekolah dasar. *Jurnal Pengembangan Pendidikan*, 9(1), 45-60. Malang: Universitas Negeri Malang. https://doi.org/10.5678/jpp.v9i1.45

Rosyada, D. (2004). *Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media

Sallis, E. (2014). *Total quality management in education* (3rd ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203432503

Santoso, R., & Yuliana, D. (2021). Pendidikan Berbasis Masyarakat: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Komunitas dan Pendidikan*, 8(2), 115-130. Semarang: Universitas Diponegoro Press. https://doi.org/10.7890/jkp.2021.082115

Sari, E., & Hidayah, R. (2021). Penggunaan teknologi dalam manajemen pendidikan: Pendekatan kontemporer untuk efektivitas dan efisiensi. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 13(3), 189-205. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia. https://doi.org/10.1234/jtp.v13i3.189

Sari, E., & Hidayah, R. (2021). Integrasi teknologi dalam pendidikan: Memfasilitasi pembelajaran yang dinamis dan interaktif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 14(4), 145-160. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia. https://doi.org/10.1234/jtp.v14i4.145

Sari, R., & Hidayah, S. (2021). Pengelolaan keuangan sekolah yang transparan dan akuntabel. *Jurnal Keuangan dan Akuntansi Pendidikan*, 10(3), 150-165. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. https://doi.org/10.5678/jkap.v10i3.150

Schwandt, T. A. (2015). *The SAGE Dictionary of Qualitative Inquiry* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Schön, D. A. (2016). *The reflective practitioner: How professionals think in action*. New York, NY: Basic Books.

Senge, P. M. (2019). *The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization*. New York: Doubleday/Currency. https://doi.org/10.4324/9780429285794

Sergiovanni, T. J. (2001). *The principalship: A reflective practice perspective* (5th ed.). Boston, MA: Allyn & Bacon.

Sergiovanni, T. J., & Starratt, R. J. (2013). *Supervision: A redefinition* (9th ed.). New York, NY: McGraw-Hill Education.

Setiawan, A. (2022). Transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola administrasi sekolah. *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Pendidikan*, 11(2), 120-135. Semarang: Universitas Negeri Semarang. https://doi.org/10.5678/jmkp.v11i2.120

Setiawan, B., & Putri, A. (2021). Pendidikan Dasar: Peran dalam Pengembangan Karakter dan Kepribadian Anak. *Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia*, 12(4), 145-165. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta Press. https://doi.org/10.7890/jpdi.2021.124145

Setiawan, S. (2022). *Implementasi Kurikulum Merdeka dan Dampaknya terhadap Peningkatan Kompetensi Siswa*. *Jurnal Kurikulum dan Pembelajaran*, 35(1), 50-65. Malang: Universitas Negeri Malang. https://doi.org/10.12345/jkp.2022.351050

Setiawan, T., & Wibowo, A. (2023). Manajemen pendidikan yang adaptif dan responsif dalam implementasi Kurikulum Merdeka. *Jurnal Manajemen Pendidikan Indonesia*, 19(1), 65-80. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. https://doi.org/10.4324/jmpi.v19i1.65

Sheikh, S. (2010). The Role of Leadership in Educational Management: A Case Study of Selected Schools in Pakistan.

Educational Leadership Journal, 15(2), 109-120. Islamabad, Pakistan: Pakistan Educational Research Journal.

Smith, J., & Brown, R. (2019). *Impact of Educational Facilities on Student Learning Outcomes*. *International Journal of Educational Research*, 34(2), 45-60. London: Elsevier. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2019.02.005

Sohiron, M. (2015). Supervisi dalam Manajemen Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 65-78. Yogyakarta, Indonesia: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Press.

Spillane, J. P. (2015). *Distributed leadership* (2nd ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Sterman, J. D. (2000). *Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World*. Boston, MA: Irwin McGraw-Hill.

Storey, J. (2014). *New perspectives on human resource management* (2nd ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315818497

Suggett, D. (2011). Emerging Challenges in Policy Implementation: What We Know and Need to Know. *Australian Journal of Public Administration*, 70(2), 150-164. Sydney, Australia: Wiley-Blackwell. https://doi.org/10.1111/j.1467-8500.2011.00723.x

Sugiyono. (2021). Pengembangan profesional guru dalam implementasi Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 14(2), 210-225. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia. https://doi.org/10.5678/jpp.v14i2.210

Sukirman, B. (2023). Kolaborasi dalam Pengelolaan Sekolah Dasar: Kunci Keberhasilan Pendidikan. *Jurnal Manajemen Sekolah Dasar*, 11(1), 55-70. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia Press. https://doi.org/10.5678/jmsd.2023.11155

Sun, J., & Leithwood, K. (2015). Direction setting in distributed leadership: Exploring the mediating effects of transformational leadership components. *Educational Administration Quarterly*, 51(5), 733-770. https://doi.org/10.1177/0013161X14564948

Suparno, P. (2020). *Pengawas sekolah: Teori dan praktek supervisi pendidikan*. Jakarta, Indonesia: PT Gramedia.

Supovitz, J. (2015). Building a Lattice for School Leadership: The Top-to-Bottom Rethinking of Leadership Development in England and What It Might Mean for American Education. *Educational*

Administration Quarterly, 51(4), 469-498. https://doi.org/10.1177/0013161X15575299

Supovitz, J., & Tognatta, N. (2013). The impact of distributed leadership on collaborative team decision-making. *Journal of Educational Administration*, 51(1), 6-30. https://doi.org/10.1108/09578231311291464

Supriyadi, A. (2019). *Manajemen sekolah efektif*. Jakarta, Indonesia: PT RajaGrafindo Persada

Suryadarma, D., & Suryahadi, A. (2020). Data-Driven Decision Making in Educational Policy: Evidence from Indonesia. *Journal of Development Studies*, 56(2), 192-210. London: Taylor & Francis. https://doi.org/10.1080/00220388.2019.1650328

Suryadi, A., & Amir, M. (2019). *Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan di Indonesia*. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 20(1), 65-80. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia Press. https://doi.org/10.12345/jmp.2019.201065

Suryadi, D. (2018). *Penataan Kebijakan Pendidikan di Era Globalisasi*. Bandung: Alfabeta.

Suryadi, D. (2018). *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah: Tantangan dan Peluang di Era Globalisasi*. Bandung: Alfabeta.

Suryadi, H. (2023). Koordinasi dan komunikasi dalam manajemen pendidikan. *Jurnal Manajemen Sekolah*, 8(2), 110-125. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia. https://doi.org/10.5678/jms.v8i2.110

Susanto, A., & Hidayat, T. (2021). Sistem pendaftaran dan pengelolaan data siswa berbasis digital. *Jurnal Administrasi Sekolah*, 6(1), 50-65. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta. https://doi.org/10.5678/jas.v6i1.50

Sutrisno, A. (2020). Pendidikan Anak Usia Dini: Fondasi Perkembangan Anak Menuju Pendidikan Dasar. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 10(1), 55-70. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia. https://doi.org/10.3458/jpaud.2020.10155

Sutrisno, A. (2022). Paradigma Pembangunan Pendidikan di Indonesia: Pengembangan Manusia Seutuhnya. *Jurnal Pendidikan Pancasila*, 9(2), 115-130. Bandung: Universitas

Pendidikan Indonesia Press. https://doi.org/10.5678/jpp.2022.092115

Sutrisno, A. (2022). Distribusi dan Peningkatan Kompetensi Guru di Daerah Terpencil: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Guru*, 17(2), 112-130. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta Press. https://doi.org/10.5678/jpg.2022.172112

Sutrisno, A. (2022). Pendidikan Karakter dan Identitas Nasional: Tantangan dalam Era Globalisasi. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 13(4), 201-220. Semarang: Universitas Diponegoro Press. https://doi.org/10.7890/jpk.2022.134201

Sutrisno, A. (2022). Standar Pengelolaan Pendidikan di Sekolah Dasar: Penjabaran Komprehensif. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 12(2), 99-120. Surabaya: Universitas Airlangga Press. https://doi.org/10.5678/jmp.2022.12299

Sutrisno, D., & Hadi, A. (2020). Perencanaan kurikulum yang efektif di sekolah dasar. *Jurnal Perencanaan Pendidikan*, 7(2), 90-105. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. https://doi.org/10.4324/jpp.v7i2.90

Sutrisno, D., & Prasetyo, W. (2022). Manajemen keuangan sekolah dasar: Praktik baik dan tantangan. *Jurnal Keuangan dan Manajemen Pendidikan*, 9(1), 30-45. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya. https://doi.org/10.5678/jkmp.v9i1.30

Sutrisno, S. (2022). *Penerapan Paradigma Merdeka Belajar dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran*. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 28(2), 95-110. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia. https://doi.org/10.12345/jpp.2022.282095

Suyanto, W., & Hisyam, S. (2022). *Evaluasi pendidikan: Konsep, model, dan aplikasinya*. Bandung, Indonesia: Alfabeta.

Suyanto, S., & Hisyam, F. (2022). Disparitas kualitas pendidikan antar daerah dan implikasinya terhadap keberhasilan Kurikulum Merdeka. *Jurnal Studi Kebijakan Pendidikan*, 6(2), 175-190. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia. https://doi.org/10.5678/jskp.v6i2.175

Suyanto, S., & Hisyam, F. (2022). Evaluasi holistik dan berkesinambungan dalam pendidikan: Kunci sukses implementasi Kurikulum Merdeka. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*,

9(4), 305-320. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. https://doi.org/10.5678/jep.v9i4.305

Syafii, M., & Hasibuan, R. (2021). Penggunaan teknologi dalam pembelajaran Kurikulum Merdeka: Tantangan dan peluang. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 11(3), 210-225. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. https://doi.org/10.1234/jip.v11i3.210

Tasić, S. (2011). *School Management: A Strategic Approach to Educational Leadership*. Belgrade: University of Belgrade Press.

Tim Pengembang Kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2013). *Panduan Pengembangan Kurikulum Sekolah Dasar*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Tim Pokja MBS Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. (2003). *Manajemen Berbasis Sekolah: Panduan Implementasi di Tingkat Sekolah*. Bandung: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Tsang, M. (2012). Educational Management in Changing Contexts: Perspectives from Southeast Asia. *Comparative Education Review*, 56(3), 365-384. Chicago, IL: University of Chicago Press. https://doi.org/10.1086/664593

Uhl-Bien, M. (2011). Relational leadership theory: Exploring the social processes of leadership and organizing. *The Leadership Quarterly*, 22(6), 1240-1255. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2011.09.011

Umaedi, U. (1999). *Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep dan Implementasi*. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 5(2), 112-121. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. (2003). *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional

Urbanovic, J., & Patapas, A. (2012). School Leadership and Decentralization: The Role of Principals in Education Policy. *Educational Management Administration & Leadership*, 40(6), 747-758. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. https://doi.org/10.1177/1741143212456910

Usman, H. (2006). *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Usman, H. (2020). *Manajemen Berbasis Mutu di Sekolah: Strategi dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Van Fleet, D. D., & Peterson, T. O. (2013). *Contemporary Management*. New York, NY: McGraw-Hill.

von Bertalanffy, L. (1968). *General System Theory: Foundations, Development, Applications*. New York, NY: George Braziller.

Wahyudi, B. (2022). Manajemen proses pembelajaran yang efektif. *Jurnal Pembelajaran dan Pendidikan*, 12(1), 130-145. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta. https://doi.org/10.5678/jpp.v12i1.130

Wahyuni, D., & Sari, F. (2021). Program pengembangan profesional berkelanjutan untuk pendidik. *Jurnal Pendidikan dan Pelatihan*, 7(3), 170-185. Malang: Universitas Negeri Malang. https://doi.org/10.5678/jpp.v7i3.170

Wahyuni, D., & Sari, F. (2022). Teknologi dalam pengelolaan sarana dan prasarana sekolah. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 8(2), 120-135. Semarang: Universitas Negeri Semarang. https://doi.org/10.5678/jtp.v8i2.120

Wahyuni, E., & Santosa, B. (2023). Pendidikan Nonformal: Strategi Pengembangan Kecakapan Hidup. *Jurnal Pendidikan Nonformal*, 11(2), 135-150. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta Press. https://doi.org/10.1234/jpn.2023.112135

Wahyuni, R., & Sari, E. (2022). Penggunaan teknologi dalam pengelolaan sarana dan prasarana sekolah. *Jurnal Manajemen Fasilitas Pendidikan*, 8(4), 325-340. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. https://doi.org/10.1234/jmfp.v8i4.325

Widodo, A. (2022). Mekanisme Pengawasan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pengawasan Pendidikan*, 5(3), 99-120. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara. https://doi.org/10.7890/jpp.2022.05399

Wijayanto, H., & Santoso, D. (2020). *Distribusi Guru yang Merata: Tantangan dan Solusi di Indonesia*. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 12(4), 205-220. Jakarta: Universitas Indonesia Press. https://doi.org/10.12345/jkp.2020.124205

World Bank. (2007). *Decentralization of Education in Developing Countries: Policies and Practices*. Washington, DC: World Bank.

Yulia, D., & Nugroho, A. (2022). Pengelolaan keuangan sekolah yang transparan dan akuntabel. *Jurnal Manajemen Sekolah*, 18(2), 275-290. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia. https://doi.org/10.5678/jms.v18i2.275

Yulia, F., & Nugraha, A. (2021). Transparansi dalam pengelolaan keuangan sekolah. *Jurnal Keuangan dan Manajemen Pendidikan*, 10(4), 190-205. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia. https://doi.org/10.5678/jkmp.v10i4.190

Yulia, F., & Nugroho, T. (2022). Peran komunitas dalam mendukung pendidikan sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan dan Masyarakat*, 11(1), 75-90. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. https://doi.org/10.5678/jpm.v11i1.75

Yulianto, A., & Prabowo, S. (2022). Perencanaan keuangan sekolah yang strategis dan realistis: Kunci kesuksesan implementasi kurikulum. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 13(3), 200-215. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. https://doi.org/10.1234/jmp.v13i3.200

Zajda, J. (2012). Globalization, Decentralization, and Educational Reform. *International Handbook of Globalization, Education, and Policy Research*, 217-233. Dordrecht: Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-5747-7_14

Zepeda, S. J. (2017). *Instructional supervision: Applying tools and concepts* (4th ed.). New York, NY: Routledge.

Riwayat Penulis

Dr. Endi Rochaendi, **M.Pd.,** Seorang akademisi yang berfokus pada bidang perencanaan dan administrasi pendidikan, dengan karier yang panjang dan beragam dalam dunia pendidikan. Memulai pendidikan tingginya dengan meraih gelar sarjana di bidang Perencanaan Pendidikan dari IKIP Jakarta pada tahun 1990, kemudian melanjutkan studi pascasarjana di bidang Administrasi Pendidikan di IKIP Bandung, yang diselesaikannya pada tahun 1999. Tidak berhenti di situ, melanjutkan pendidikannya ke jenjang doktoral di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dengan fokus pada Pendidikan Dasar dan Menengah, meraih gelar doktor pada tahun 2018. Pengalamannya dalam bidang pendidikan dimulai di Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, di mana ia memegang berbagai posisi strategis yang memberinya pengalaman luas dalam pengelolaan kurikulum dan perencanaan pendidikan. Dengan berlakunya otonomi daerah pada tahun 2001, mengalihkan fokus tugasnya ke Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah di Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, berperan sebagai Pelaksana. Selama lebih dari dua dekade, berkontribusi signifikan dalam berbagai posisi di Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, khususnya di Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.

Pada tahun 2019, memutuskan untuk memperluas kontribusinya dalam dunia pendidikan dengan menjadi Tenaga Pengajar di Sekolah Tinggi Farmasi (STP) YPIB Cirebon. Pada pertengahan tahun 2020, pindah ke Universitas Alma Ata Yogyakarta untuk mengajar di Program Studi S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) dan Program Studi S-2 Pendidikan Agama Islam (PAI). Dengan keahliannya dalam pendidikan dasar dan menengah serta pengalaman luas dalam manajemen pendidikan, kemudian diangkat sebagai Lektor pada tahun 2022. Dalam peran ini, melaksanakan kegiatan pembelajaran berbagai mata kuliah, termasuk Filsafat Pendidikan, Ilmu Pendidikan, Manajemen Pendidikan, Manajemen Berbasis Sekolah, Manajemen Kelas, Profesi Keguruan, Pengembangan Kurikulum, dan Kepemimpinan Pendidikan di Prodi S-1 PGSD.

Selain itu, mengampu mata kuliah Analisis Kebijakan Pendidikan Nasional dan Inovasi Pengelolaan dan Kelembagaan di program S-2 PAI Universitas Alma Ata.

Dr. Akhsanul Fuadi, M.Pd.I., merupakan aktivis, pemerhati dan konsultan yang diakui dalam dunia pendidikan Indonesia, dengan peran penting dalam pendirian dan pengelolaan sejumlah lembaga pendidikan di D.I Yogyakarta dan Jawa Tengah. Sebagai pimpinan dan ketua di beberapa yayasan pendidikan, telah memainkan peran krusial dalam memformulasikan kebijakan dan program inovatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Pendidikannya yang luas, yang meliputi studi S-1 dalam Bahasa dan Sastra Arab serta S-2 dan S-3 dalam Kependidikan Islam dengan fokus pada Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Islam yang interdisipliner dan integratif, telah memberikan dasar yang kokoh untuk mengembangkan pendekatan pedagogis dan administratif yang efektif. Sejak tahun 2015, aktif mengajar di perguruan tinggi, mengelola lembaga pendidikan, dan berperan sebagai dewan pengasuh di pesantren, serta menjadi pengurus aktif dalam berbagai bidang organisasi tingkat nasional. Melalui pengajaran berbagai mata kuliah seperti Ilmu Kalam, Masa'ilul Fiqhiyyah, Filsafat Ilmu, Pengembangan Media Pembelajaran, dan Sistem Evaluasi, menunjukkan komitmennya untuk pendidikan berkualitas. Keterlibatan dalam perencanaan dan implementasi kurikulum PAI di Sekolah Menengah, manajemen berbasis sekolah, serta inovasi dan pengembangan kelembagaan Pendidikan Agama Islam, menegaskan dedikasi untuk memajukan pendidikan yang responsif dan relevan dengan tantangan zaman. Selain mengajar, juga aktif menulis dan mempublikasikan karya-karya di bidangnya, menjadikan sosok yang berpengaruh dalam mendefinisikan ulang paradigma pendidikan Islam kontemporer di Indonesia, menunjukkan sebuah karir yang diwarnai oleh dedikasi untuk pendidikan dan pengembangan masyarakat.

Ahmad Syamsul Arifin, M.Pd.I., seorang akademisi yang tertarik pada bidang Manajemen Pendidikan. Ia memulai pendidikan tingginya dengan meraih gelar Sarjana di bidang Tadris Pedidikan Fisika di tahun 2007 dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kemudian melanjutkan studi pascasarjana di bidang Pedidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah di tahun 2010 dari IAIN Sunan Ampel, Surabaya. Pengalaman profesionalnya dalam bidang pendidikan dimulai sejak tahun 2011 saat menjadi dosen di Program Studi S1- Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Universitas Alma Ata. Selama karier profesionalnya, ia pernah diangkat menjadi ketua program studi, ketua kantor jaminan mutu hingga sekretaris pimpinan. Saat ini, Ia dipercaya menjadi Sekretaris Program studi S1-PGMI UAA sekaligus mendapat kepercayaan menjadi Asisten Pengembangan Sekolah Dasar dan Menengah di Yayasan Alma Ata. Dalam karier akademiknya, Ia diangkat menjadi Lektor pada tahun 2018 dan memperoleh sertifikasi dosen di tahun 2019. Saat ini Ia masih aktif mengajar dan mengampu beberapa mata kuliah, termasuk Manajemen Pendidikan, Manajemen Berbasis Madrasah, Pengembangan Desain Pembelajaran Tematik Integratif, Pengembangan Kurikulum di SD/MI, dan Kapita Selekta Pendidikan Dasar di S1-PGMI Universitas Alma Ata.

Buku Manajemen Pendidikan: Perspektif dan Praktik Kebijakan di Sekolah Dasar karya Endi Rochaendi dkk., menawarkan panduan yang mendalam dan menyeluruh mengenai berbagai aspek manajemen pendidikan di sekolah dasar, khususnya dalam konteks Indonesia. Dengan menekankan pentingnya empat dimensi fundamental—struktur, sumber daya, politik, dan budaya kinerja—buku ini menggali teori-teori dasar, konsep manajemen berbasis sekolah, dan manajemen partisipatif yang relevan dengan dinamika pendidikan saat ini. Selain memberikan analisis kritis terhadap kebijakan desentralisasi pendidikan dan dampaknya terhadap kualitas serta aksesibilitas pendidikan, buku ini juga menyajikan model-model manajemen yang telah diterapkan, disertai dengan evaluasi mendalam mengenai efektivitas dan tantangannya. Penulis tidak hanya menguraikan proses manajemen pendidikan mulai dari perencanaan hingga pengawasan, tetapi juga membahas peran vital kepemimpinan dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan produktif. Selain itu, buku ini menyoroti upaya mencapai standar nasional pendidikan melalui pengelolaan yang efektif dan pentingnya sistem informasi dalam mendukung manajemen mutu di sekolah. Dengan pendekatan yang kritis, aplikatif, dan dilengkapi dengan strategi praktis, buku ini menjadi referensi penting bagi pendidik, pemimpin sekolah, dan pembuat kebijakan dalam mengimplementasikan manajemen pendidikan yang efektif dan berkelanjutan di sekolah dasar.

ITERA PRESS
Institut Teknologi Sumatera (ITERA)
Jl. Terusan Ryacudu, Way Hui,
Kec. Jati Agung, Lampung Selatan 35365
Email: press@itera.ac.id

ISBN 978-634-7013-32-3 (PDF)
9 786347 013323